

Drive Collaboration & Strengthening the Foundation for the Future

2023

Annual Report
Laporan Tahunan

PT LRT Jakarta

Sekapur Sirih

Foreword

**Drive Collaboration & Strengthening
the Foundation for the Future**
**Mendorong Kolaborasi & Memperkuat
Fondasi untuk Masa Depan**



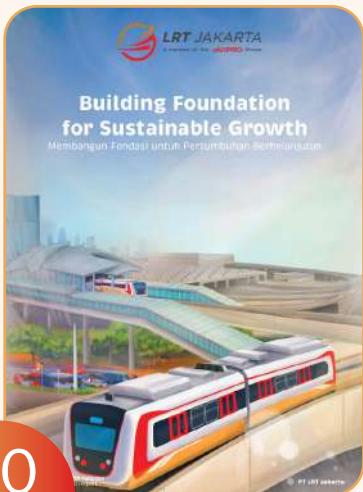
Tema ini merupakan gambaran dari upaya LRT Jakarta dalam hal peningkatan kualitas layanan secara terus menerus kepada pelanggannya. Komitmen tersebut diwujudkan dengan kolaborasi sinergis meliputi semua aspek usaha dalam rangka penguatan fondasi demi masa depan yang lebih baik. LRT Jakarta senantiasa hadir dengan sinergi kuat antar lini usaha melalui sistem yang terintegrasi. Semangat yang tinggi dari Insan Perusahaan menjadi fondasi yang kuat bagi LRT Jakarta untuk terus melakukan inovasi bisnis secara berkelanjutan. LRT Jakarta bertekad untuk selalu memberikan kinerja terbaik melalui implementasi kebijakan dan strategi yang tepat sasaran dalam rangka meningkatkan daya saing usaha serta memanfaatkan secara optimal pangsa pasar yang ada.

This theme provides an illustration of LRT Jakarta's efforts in continuously improving the quality of service to its customers. This commitment is realized through synergistic collaboration encompassing all aspects of business in order to strengthen the foundation for a better future. LRT Jakarta consistently operates with strong synergy among its business lines through an integrated system. The high spirit of the Company's personnel forms a strong foundation for LRT Jakarta to continuously innovate its business. LRT Jakarta is committed to consistently providing the best performance by implementing targeted policies and strategies to increase business competitiveness and optimally utilize existing market share.



Kesinambungan Tema

Theme Continuity



20
22

Membangun Fondasi untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

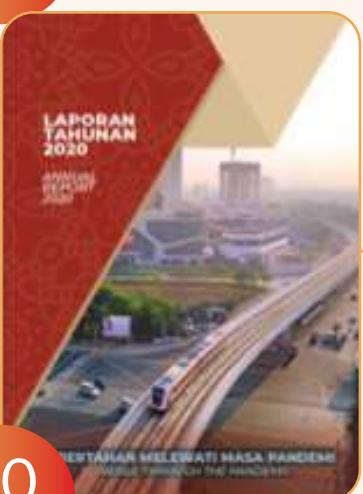
Building Foundation
for Sustainable Growth



20
21

Mengejar Pertumbuhan Inklusif

The Pursuit of Inclusive Growth



20
20

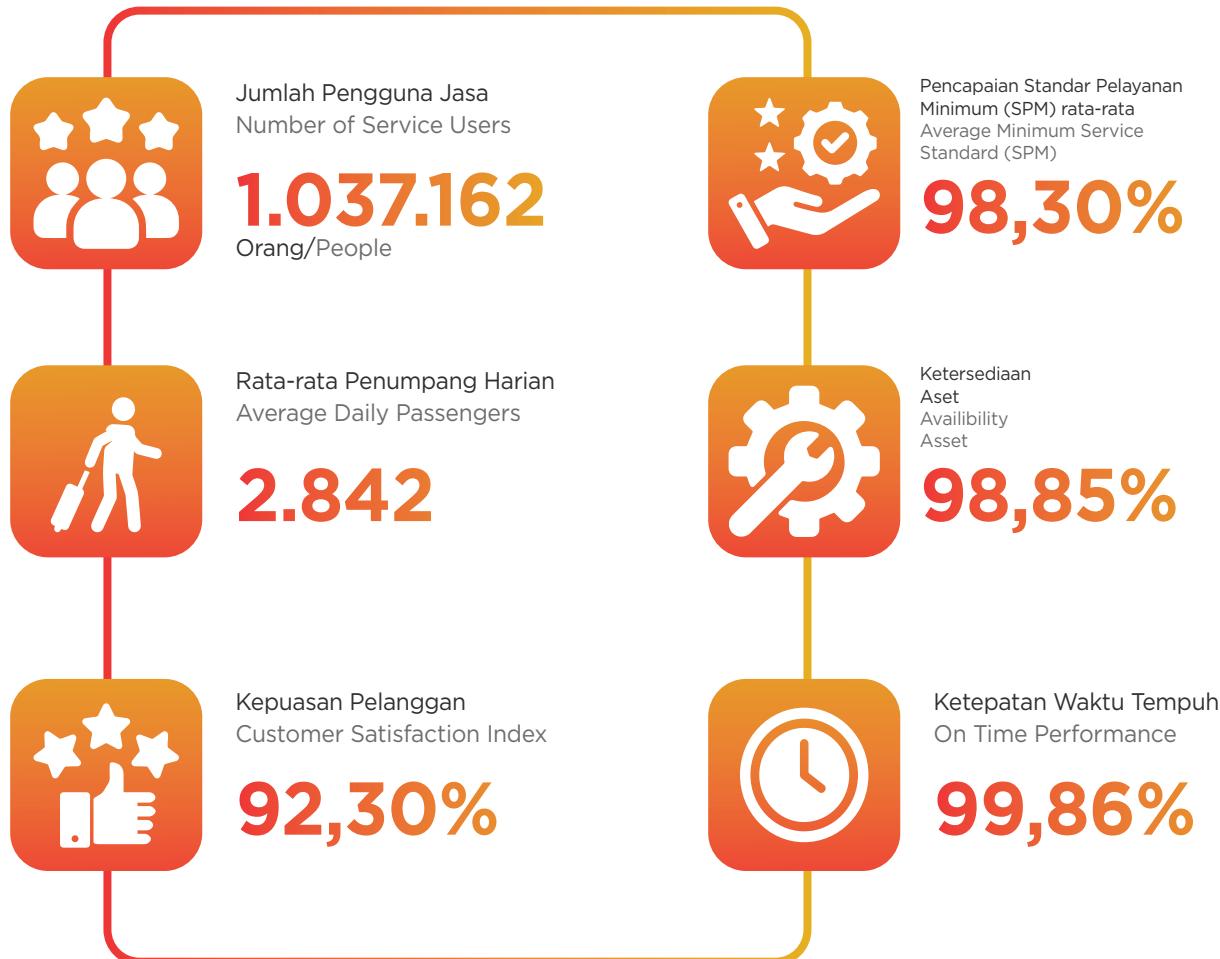
Bertahan Melewati Masa Pandemi

Resile Through the Pandemic

KILAS KINERJA 2023

PERFORMANCE HIGHLIGHT 2023

KINERJA OPERASIONAL OPERATIONAL PERFORMANCE



KINERJA KEUANGAN FINANCIAL PERFORMANCE



Aset
Assets

Rp381,49
Miliar/Billion



Pendapatan
Revenue

26,50%

Perusahaan membukukan pendapatan sebesar Rp271,60 miliar, mengalami peningkatan sebesar 26,50% jika dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp214,70 miliar.

The Company recorded revenue of IDR271.60 billion, an increase of 26.50% compared to 2022, which amounted to IDR214.70 billion.



Kas dan Setara Kas
Cash and Cash Equivalent

Rp120,64
Miliar/Billion



Laba Komperehensif
Comprehensive Income

87,05%

Perusahaan membukukan laba usaha sebesar Rp15,41 miliar di tahun 2023, jumlah tersebut meningkat sebesar 87,05% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp8,24 miliar.

The Company recorded operating profit of IDR15.41 billion in 2023, an increase of IDR87.05% compared to the previous year, which amounted to IDR8.24 billion.

Daftar Isi

Table of Contents



01



02



03



04

- 2 SEKAPUR SIRIH
FOREWORD
- 3 KESINAMBUNGAN TEMA
THEME CONTINUITY
- 4 KILAS KINERJA 2023
PERFORMANCE HIGHLIGHT 2023
- 6 DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

1 Performa 2023 2023 Performance

- 10 IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
HIGHLIGHT ON IMPORTANT FINANCIAL DATA
- 16 IKHTISAR OPERASIONAL
OPERATIONAL HIGHLIGHTS
- 22 IKHTISAR SAHAM
SHARE HIGHLIGHTS
- 24 INFORMASI TENTANG OBLIGASI, SUKUK, ATAU
OBLIGASI KONVERSI
INFORMATION ON BONDS, SUKUK, OR CONVERTIBLE
BONDS
- 24 INFORMASI TENTANG SUMBER PENDANAAN LAINNYA
INFORMATION ON OTHER SOURCES OF FUNDING
- 25 PERISTIWA PENTING
KEY EVENT HIGHLIGHTS

2 Laporan Manajemen Management Report

- 30 Laporan Dewan Komisaris
Report of the Board of Commissioners
- 25 Laporan Direksi
Report of the Board of Directors
- SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN
TAHUNAN 2023 PT LRT JAKARTA
- 52 STATEMENT LETTER OF THE MEMBERS OF THE BOARD
OF COMMISSIONERS REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE 2023 ANNUAL REPORT OF PT LRT JAKARTA
- SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSITENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023 PT
LRT JAKARTA
- 53 STATEMENT LETTER OF THE MEMBERS OF THE BOARD
OF DIRECTORS REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE 2023 ANNUAL REPORT OF PT LRT JAKARTA

3 Profil Perusahaan Company Profile

- 57 INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN
GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY
- 58 RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
HISTORY OF THE COMPANY
- 60 JEJAK LANGKAH
MILESTONES
- KEGIATAN DAN BIDANG USAHA
THE COMPANY'S BUSINESS ACTIVITIES AND LINE OF
BUSINESS

- 64 PENGEMBANGAN PRODUK DAN JASA
PRODUCT AND SERVICE DEVELOPMENT
- 65 WILAYAH OPERASI
AREAS OF OPERATION
- 66 VISI, MISI, SIKAP DASAR DAN BUDAYA PERUSAHAAN
VISION, MISSION, AND CORPORATE VALUE
- 68 STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATIONAL STRUCTURE
- 70 PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
AWARDS AND CERTIFICATIONS

- 74 PROFIL DEWAN KOMISARIS
PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
- 78 PROFIL DIREKSI
PROFILE OF THE BOARD OF BOARD OF DIRECTORS
- 82 PEJABAT EKSEKUTIF
EXECUTIVE OFFICERS
- DEMOGRAFI KARYAWAN DAN SEKILAS TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
- 88 EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY
DEVELOPMENT

- PENDIDIKAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN DEWAN
KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS
PERUSAHAAN, AUDIT INTERNAL, DAN UNIT
MANAJEMEN RISIKO
- 92 EDUCATION AND/OR TRAINING OF THE BOARD
OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS,
COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, INTERNAL
AUDIT, AND RISK MANAGEMENT UNIT

- 95 KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
SHAREHOLDER COMPOSITION
- 99 STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN
THE COMPANY'S GROUP STRUCTURE
- INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK, ENTITAS
ASOSIASI SERTA JOINT VENTURE (JV) DAN SPECIAL
PURPOSE VEHICLE (SPV)
- 100 INFORMATION ON SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, JOINT
VENTURE (JV), AND SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)
- 100 KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM
CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND LISTING
- KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK
LAINNYA
- 100 CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES ISSUANCE AND
LISTING

- 101 LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG
SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS
- 102 INFORMASI WEBSITE PERUSAHAAN
INFORMATION ON THE COMPANY'S WEBSITE

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan

- 4 Management Discussion and Analysis on Company
Performance
- 106 TINJAUAN MAKROEKONOMI
MACROECONOMICS OVERVIEW
- 111 TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA
OVERVIEW OF OPERATIONS PER BUSINESS SEGMENT



05



06



07



08

124	ASPEK PEMASARAN MARKETING ASPECT
126	TINJAUAN KEUANGAN FINANCIAL REVIEW
139	PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI CHANGES IN ACCOUNTING POLICY
140	ASPEK PERPAJAKAN DAN KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA ASPECTS OF TAXATION AND CONTRIBUTION TO THE STATE
141	INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY
144	PROSPEK USAHA BUSINESS PROSPECT
146	INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT TO THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE
5	Fungsi Penunjang Bisnis Business Support Function
150	TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
161	TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE
6	Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance
172	KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICIES
175	PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN SECARA BERKELANJUTAN THE DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION IN A SUSTAINABLE MANNER
181	STRUKTUR TATA KELOLA GOVERNANCE STRUCTURE
208	DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
218	DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
238	TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TRANSPARENCY OF INFORMATION ON THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS
254	ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
261	ORGAN PENDUKUNG DIREKSI SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF DIRECTORS
273	AUDITOR EKSTERNAL EXTERNAL AUDITOR
276	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
277	MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT
283	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

283	PERKARA PENTING PERKARA PENTING
284	AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN ACCESS TO THE COMPANY'S INFORMATION AND DATA
285	PEDOMAN PERILAKU PERUSAHAAN THE COMPANY'S CODE OF CONDUCT
288	SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUJUPAN ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM
292	KEBIJAKAN TERKAIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI POLICIES RELATED TO GRATIFICATION CONTROL
294	KEBIJAKAN TERKAIT AKTIVITAS POLITIK DAN SOSIAL ORGANISASI POLICIES RELATED TO POLITICAL ACTIVITIES AND SOCIAL ORGANIZATION
294	LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) STATE OFFICIALS' ASSETS REPORT (LHKPN)
295	PENGADAAN BARANG DAN JASA PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES
298	SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN VIOLATION REPORTING SYSTEM
302	TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES
7	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Corporate Social and Environment Responsibility
306	TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE
312	TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATIONS
316	TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAK ASASI MANUSIA SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO HUMAN RIGHTS
318	TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP CORPORATE RESPONSIBILITY GOVERNANCE IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR
324	TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECT
332	TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PRODUK DAN KONSUMEN/PELANGGAN SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE RELATED TO PRODUCT AND CONSUMER/CUSTOMER ASPECT
337	TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT ASPECT
8	Laporan Keuangan Financial Report



Performa 2023

2023 Performance



Dalam era persaingan yang cukup ketat, Perusahaan terus meningkatkan performa sumber daya yang dimiliki untuk menjadi yang terbaik.

In an era of intense competition, the Company continues to improve the performance of its resources to be the best.



01



IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

HIGHLIGHT ON IMPORTANT FINANCIAL DATA

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in full IDR, unless otherwise stated)

Uraian Uraian	2023	2022	2021	Selisih 2023-2022	YoY 2023-2022 (%)
Pendapatan Revenue	271.606.454.045	214.704.813.046	134.349.088.570	56.901.640.999	26,50%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(170.163.884.005)	(143.921.284.817)	(86.419.369.875)	26.242.599.188	18,23%
Laba (Rugi) Kotor Gross Profit (Loss)	101.442.570.040	70.783.528.229	47.929.718.695	30.659.041.811	43,31%
Beban Usaha Operating Expenses					
Beban Penjualan Selling Expenses	(536.300.537)	(91.599.041)	(218.009.464)	444.701.496	485,49%
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(85.492.101.782)	(62.451.178.319)	(44.409.165.702)	23.040.923.463	36,89%
Jumlah Beban Penjualan, Beban Umum & Administrasi Total Selling Expenses and General and Administrative Expenses	(86.028.402.319)	(62.542.777.360)	(44.627.175.166)	23.485.624.959	37,55%
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	15.414.167.721	8.240.750.869	3.302.543.529	7.173.416.852	87,05%
Pendapatan/Beban Lainnya Other Income/Expenses					
Pendapatan Lainnya Other Income	6.824.552.243	9.669.366.135	6.733.974.683	(2.844.813.892)	(29,42%)
Beban Lainnya Other Expenses	(2.588.267.531)	(6.922.304.021)	(4.177.180.357)	(4.334.036.490)	(62,61%)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	19.650.452.433	10.987.812.983	5.859.337.855	8.662.639.450	78,84%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income Tax Benefit (Expense)					
Pajak Kini Current Tax	-	-	-	-	-
Pajak Tangguhan Deferred Tax	(2.336.591.181)	(2.764.918.012)	(2.219.899.964)	(428.326.831)	(15,49%)
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Total Income Tax Benefit (Expense)	(2.336.591.181)	(2.764.918.012)	(2.219.899.964)	(428.326.831)	(15,49%)

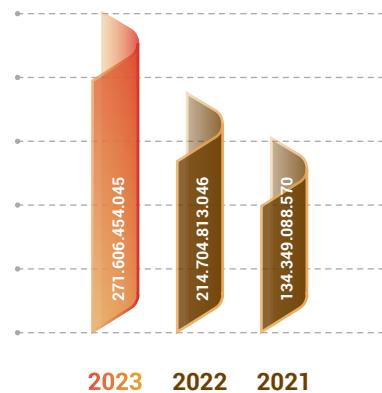
Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain
 Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
 (Expressed in full IDR, unless otherwise stated)

Uraian Uraian	2023	2022	2021	Selisih 2023-2022	YoY 2023- 2022 (%)	
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Expense)						
Keuntungan Aktuarial atas Imbalan Kerja Actuarial Gain on Employee Benefits						
(2.201.864.827)	365.673.366	(477.449.021)	(2.567.538.193)	(702,14%)	▼	
Dampak Pajak Income Tax Effect	484.410.262	(80.448.141)	105.038.785	564.858.403	(702,14%)	▼
Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain Total Other Comprehensive Income	(1.717.454.565)	285.225.225	(372.410.236)	(2.002.679.790)	(702,14%)	▼
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	15.596.406.687	8.508.120.196	3.267.027.655	7.088.286.491	83,31%	▲

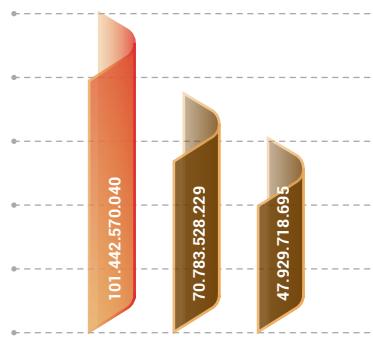
Pendapatan
Revenue

Dalam Miliar Rupiah | In Billion Rupiah



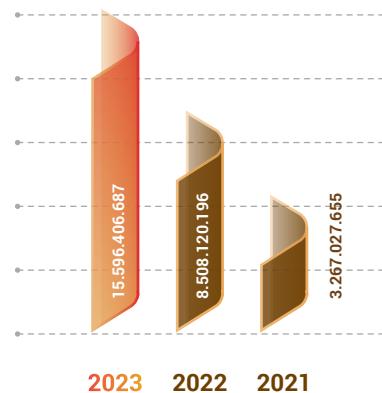
Laba Kotor
Gross Profit

Dalam Miliar Rupiah | In Billion Rupiah



Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Comprehensive Income for the Year

Dalam Miliar Rupiah | In Billion Rupiah



LAPORAN POSISI KEUANGAN**STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION**(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in full IDR, unless otherwise stated)

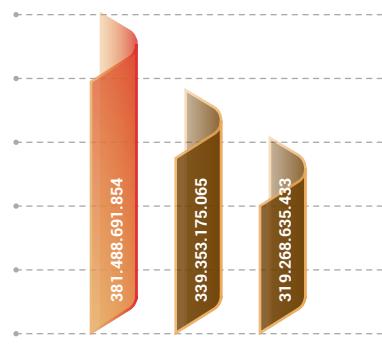
Uraian Description	2023	2022	2021	Selisih 2023-2022	YoY 2023-2022 (%)
Aset Assets					
Aset Lancar Current Assets					
Kas Dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	120.641.665.365	114.030.489.408	87.114.933.482	6.611.175.957	5,80% 
Deposito Time Deposits	43.699.794.842	15.000.000.000	0	28.699.794.842	191,33% 
Piutang Usaha Account Receivables					
Pihak Berelasi Related Parties	2.617.964.953	2.528.613.103	13.796.629.493	89.351.850	3,53% 
Pihak Ketiga Third Parties	2.938.633.000	897.894.855	795.048.906	2.040.738.145	227,28% 
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Accrued Revenue	2.473.679.351	1.680.210.678	3.613.539.147	793.468.673	47,22% 
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	120.966.635	758.993.967	937.235.519	(638.027.332) (84,06%)	
Biaya Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	3.122.035.680	2.466.150.082	2.280.673.964	655.885.598	26,60% 
Uang Muka Advance	816.508.511	822.953.530	494.028.441	(6.445.019) (0,78%)	
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	189.290.899.397	138.185.305.623	109.032.088.952	51.105.593.774	36,98% 
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets					
Kas dan Setara Kas Yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash and Cash Equivalents	16.606.372	33.225.607	1.245.384.737	(16.619.235) (50,02%)	
Aset Tetap - Bersih Fixed Assets - Net	180.554.354.151	187.619.512.920	194.415.650.032	(7.065.158.769) (3,77%)	
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	8.811.083.964	10.663.264.884	13.508.631.037	(1.852.180.920) (17,37%)	
Aset Tak Berwujud - Bersih Intangible Assets - Net	2.815.747.970	2.851.866.031	1.066.880.676	(36.118.062) (1,27%)	
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	192.197.792.457	201.167.869.442	210.236.546.482	(8.970.076.986) (4,46%)	
Jumlah Aset Total Assets	381.488.691.854	339.353.175.065	319.268.635.433	42.135.516.788	12,42% 
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity					
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities					
Utang Usaha Account Payables					
Pihak Berelasi Related Parties	11.089.608.167	2.217.932.978	-	8.871.675.188	400,00% 
Pihak Ketiga Third Parties	35.692.162.441	23.293.483.129	16.136.071.925	12.398.679.313	53,23% 
Utang Pajak Tax Payables	2.443.277.936	1.422.624.046	635.594.816	1.020.653.890	71,74% 
Beban Akrual Accrued Expenses	7.639.438.934	8.706.503.882	9.783.736.800	(1.067.064.950) (12,26%)	
Pendapatan Diterima Dimuka Unearned Revenues	2.992.679.506	746.250.000	1.178.500.000	2.246.429.506	301,03% 

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in full IDR, unless otherwise stated)

Uraian Description	2023	2022	2021	Selisih 2023-2022	YoY 2023-2022 (%)
Jaminan dan Uang Muka Lainnya Guarantess and Other Advances	355.047.818	1.318.603.833	150.050.000	(963.556.015)	(73,07)%
Utang Retensi Retention Payables	116.397.499	28.228.600	21.234.551	88.168.899	312,34%
Utang Lain-Lain Other Payables	-	107.558.905	27.329.264	(107.558.907)	(100%)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Short-Term Liabilities	60.328.612.301	37.841.185.373	27.932.517.356	22.487.426.924	59,43%
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities					
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Post Employment Benefits	5.865.367.835	1.813.684.658	145.933.239	4.051.683.177	223,40%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Long-Term Liabilities	5.865.367.835	1.813.684.658	145.933.239	4.051.683.177	223,40%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	66.193.980.136	39.654.870.031	28.078.450.595	26.539.110.101	66,93%
Ekuitas Equity					
Modal Saham Share Capital	333.893.400.000	333.893.400.000	333.893.400.000	-	0,00%
Saldo Laba (Rugi) Profit (Loss) Balance	(15.815.703.390)	(34.195.094.966)	(42.703.215.162)	18.664.616.804	(54,13)%
Jumlah Ekuitas Total Equity	315.294.711.718	299.698.305.034	291.190.184.838	15.596.406.687	5,20%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	381.488.691.854	339.353.175.065	319.268.635.433	42.135.516.788	12,42%

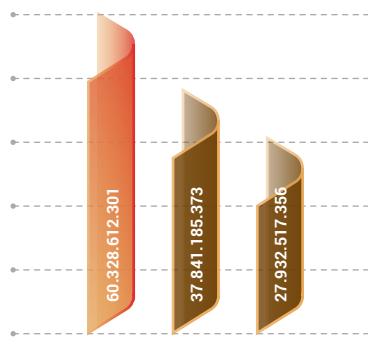
Jumlah Aset Total Assets

Dalam Miliar Rupiah | In Billion Rupiah



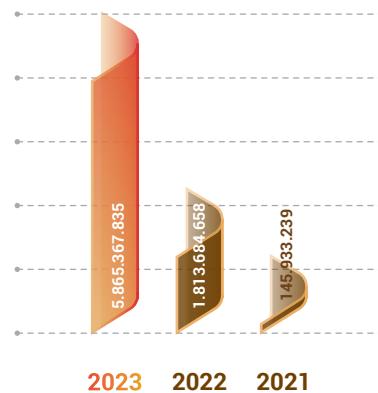
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities

Dalam Miliar Rupiah | In Billion Rupiah

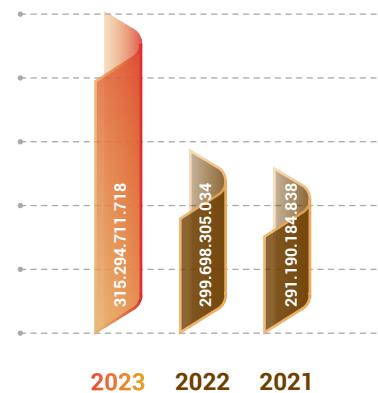


Liabilitas Jangka Panjang
Non-Current Liabilities

Dalam Miliar Rupiah | In Billion Rupiah

**Jumlah Ekuitas**
Total Equity

Dalam Miliar Rupiah | In Billion Rupiah

**LAPORAN ARUS KAS****STATEMENT OF CASH FLOWS**(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in full IDR, unless otherwise stated)

Uraian Description	2023	2022	2021	Selisih 2023- 2022	YoY 2023-2022 (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	41.533.376.617	48.378.682.322	(1.934.718.913)	(6.845.305.705)	(14,15%)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(34.922.200.660)	(21.463.126.396)	(4.105.822.599)	(13.459.074.264)	62,71%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	-	-	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalent	6.611.175.957	26.915.555.926	(6.040.541.512)	(20.304.379.969)	(75,44%)
Saldo Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash Balance and Cash Equivalent at Beginning of the Year	114.030.489.408	87.114.933.482	93.155.474.994	26.915.555.926	30,90%
Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash Balance and Cash Equivalent at End of the Year	120.641.665.365	114.030.489.408	87.114.933.482	6.611.175.957	5,80%

RASIO-RASIO KEUANGAN DAN RASIO PENTING LAINNYA**FINANCIAL RATIOS AND OTHER KEY RATIOS**

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Profitabilitas Profitability				
Rasio Pengembalian atas Aset (ROA) Return on Assets Ratio (ROA)	%	4,09%	2,42%	1,14%
Rasio Pengembalian atas Ekuitas (ROE) Return on Equity Ratio (ROE)	%	4,95%	2,74%	1,25%
Imbal Hasil Investasi (ROI) Return on Investment (ROI)	%	6,21%	2,42%	1,14%

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2022	2021
Likuiditas Liquidity				
Rasio Lancar Current Ratio	%	313%	365%	390%
Rasio Kas Cash Ratio	%	199%	301%	312%
Rasio Cepat Quick Ratio	%	199%	301%	312%
Aktivitas Activities				
Perputaran Piutang Accounts Receivable Turnover	kali	7,46	15,73	16,51
Perputaran Aset Asset Turnover	kali	0,71	0,65	0,42
Struktur Modal Kerja Working Capital Structure				
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Liability to Equity Ratio	%	20,99%	13,23%	9,64%
Rasio Liabilitas terhadap Aset Liability to Asset Ratio	%	17,35%	11,69%	8,79%
Rasio Modal Sendiri terhadap Aset Equity to Asset Ratio	%	82,65%	88,31%	91,21%
Marjin Margin				
Marjin Laba Kotor Gross Profit Margin	%	37,35%	32,97%	35,68%
Marjin Laba Usaha Operating Profit Margin	%	5,68%	3,84%	2,46%
Marjin Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year Margin	%	5,74%	3,96%	2,43%
EBITDA EBITDA	miliar	26,9	21,1	15,6
Pertumbuhan Growth				
Pendapatan Bersih Net Income	%	110,56%	59,81%	27,56%
Laba Usaha Operating Profit	%	87,05%	149,53%	102,40%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Profit for the Year	%	83,31%	160,42%	65,15%
Ekuitas Equity	%	5,20%	2,92%	1,13%
Aset Assets	%	12,42%	6,29%	-0,26%

IKHTISAR OPERASIONAL

OPERATIONAL HIGHLIGHTS

KINERJA SEGMENT PENGEMBANGAN BISNIS

BUSINESS DEVELOPMENT SEGMENT PERFORMANCE

Uraian Description	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal Nominal (Rp)	Percentase Percentage (%)
Pendapatan Sewa Menyewa Lease Income	2.410.500.663	1.969.991.003	440.509.660	22,36%
Periklanan Advertising	2.817.078	9.009.009	(6.191.931)	(68,73%)
Jasa Penjualan Teknis Technical Sales Service	5.884.424.060	2.677.156.193	3.207.267.867	119,80%
Jasa Pelatihan Training Service	61.005.540	41.250.000	19.755.740	47,89%
Jumlah Total	8.358.747.341	4.697.406.205	3.661.341.136	77,94%

KINERJA OPERASI SEGMENT OPERATION & SERVICES

OPERATION & SERVICES SEGMENT OPERATIONAL PERFORMANCE 10 MINUTES

Pola Operasi LRT Jakarta
LRT Jakarta Operational Pattern

Bulan Month	Periode Period	Jam Operasi Operational Hours	Jumlah Perjalanan KA Number of Trips	Headway
Januari January	01 - 31 Januari 2023 01 - 31 Januari 2023	05.30-22.30	6.190	10 menit 10 minutes
Februari February	01 - 28 Februari 2023 01 - 28 Februari 2023	05.30-22.30	5.600	10 menit 10 minutes
Maret March	01 - 31 Maret 2023 01 - 31 Maret 2023	05.30-22.30	6.200	10 menit 10 minutes
April April	01 - 30 April 2023 01 - 30 April 2023	05.30-22.30	5.998	10 menit 10 minutes
Mei May	01 - 31 Mei 2023 01 - 31 Mei 2023	05.30-22.30	6.198	10 menit 10 minutes
Juni June	01 - 05 Juni 2023			10 menit
	06 - 30 Juni 2023 01 - 05 Juni 2023 06 - 30 Juni 2023	05.30-22.30 05.30-23.30	1.000 5.098	10 minutes 10 menit 10 minutes
Juli July	01 - 31 Juli 2023 01 - 31 Juli 2023	05.30-23.00	6.322	10 menit 10 minutes
Agustus August	01 - 31 Agustus 2023 01 - 31 Agustus 2023	05.30-23.00	6.320	10 menit 10 minutes
September September	01 - 30 September 2023 01 - 30 September 2023	05.30-23.00	6.120	10 menit 10 minutes

Pola Operasi LRT Jakarta
LRT Jakarta Operational Pattern

Bulan Month	Periode Period	Jam Operasi Operational Hours	Jumlah Perjalanan KA Number of Trips	Headway
Oktober October	01 - 31 Oktober 2023 01 - 31 Oktober 2023	05.30-23.00	6.314	10 menit 10 minutes
November November	01 - 30 November 2023 01 - 30 November 2023	05.30-23.00	6.120	10 menit 10 minutes
Desember December	01 - 30 Desember 2023 31 - 31 Desember 2023 01 - 30 Desember 2023 31 - 31 Desember 2023	05.30-23.00 05.30-02.00	6.112 238	10 menit 10 minutes

Bulan Month	Jumlah Penumpang Number of Passengers	Jumlah Rata-Rata Penumpang Harian Average Number of Daily Passengers
Januari January	81.685	2.635
Februari February	77.112	2.754
Maret March	83.511	2.694
April April	73.125	2.438
Mei May	81.506	2.629
Juni June	84.139	2.805
Juli July	86.594	2.793
Agustus August	89.921	2.901
September September	92.900	3.097
Oktober October	93.511	3.016
November November	94.709	3.157
Desember December	98.449	3.176

Ketepatan Waktu Tempuh Kereta per Lintas

Di tahun 2023, Perusahaan mampu menjaga ketepatan waktu kedatangan antar stasiun, ketepatan waktu berhenti di stasiun dan ketepatan waktu tempuh kereta per lintas.

Train Travel Time Punctuality per Line

Throughout 2023, the Company has managed to maintain the train arrival time punctuality between stations, train dwell time punctuality, as well as train travel time punctuality per line.

Bulan Month	Percentase Ketepatan Percentage of Punctuality
Januari January	99,82%
Februari February	99,88%
Maret March	99,85%
April April	99,82%
Mei May	99,81%
Juni June	99,89%

Bulan Month	Percentase Ketepatan Percentage of Punctuality
Juli July	99,94%
Agustus August	99,88%
September September	99,97%
Okttober October	99,84%
November November	99,98%
Desember December	99,83%
Total Total	99,87%

Bulan Month	Percentase SPM Percentase SPM
Januari January	97.75%
Februari February	97.29%
Maret March	97.23%
April April	97.13%
Mei May	96.46%
Juni June	98.31%
Juli July	98.19%
Agustus August	98.43%
September September	99.50%
Okttober October	99.48%
November November	99.65%
Desember December	99.63%
Rata-rata Average	98.30%

KINERJA PERAWATAN PRASARANA

Hingga 31 Desember 2023, perawatan prasarana dilakukan dengan baik secara keseluruhan dimana realisasi pelaksanaan pekerjaan perawatan memenuhi target yang ditetapkan. Asset availability mencapai 98,85% dari target 95%. Hal ini dikarenakan oleh upaya perbaikan dan peningkatan kualitas perbaikan dan percepatan dalam melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan prasarana perkeretaapian dari segi jalur, jalan layang dan bangunan, persinyalan, telekomunikasi dan fasilitas operasi.

INFRASTRUCTURE MAINTENANCE PERFORMANCE

Infrastructure maintenance was conducted effectively until December 31, 2023, with the realization of maintenance work achieving the target given. Asset availability surpassed 98.85% of the 95% target. This was due to initiatives to improve the quality of repair as well as accelerate the maintenance and inspection of railroad infrastructure, including tracks, overpasses, and buildings, signaling, telecommunications, and operating facilities.

Bentuk Pekerjaan Pemeliharaan
Form of Maintenance Work

	Volume Pekerjaan Work Volume		
	Target Target	Realisasi Realization	Percentase Percentage
Jalur dan Jalan Layang Railroads and Overpasses	1.259	1.259	100%
Bangunan Buildings	2.779	2.779	100%
Persinyalan, Telekomunikasi & Fasilitas Pertiketan Signaling, Telecommunication & Ticketing Facilities	2.087	2.087	100%
Sistem Kelistrikan Electricity System	6.772	6.772	100%

Di tahun 2023, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan perawatan prasarana dilakukan oleh karyawan pelaksana pemeriksaan dan perawatan prasarana yang memiliki sertifikasi ada 27 orang atau 100%. Sedangkan untuk pemeriksaan prasarana jalur dan bangunan dilakukan oleh karyawan pelaksana pemeriksaan jalur dan bangunan yang memiliki sertifikasi sebanyak 10 orang untuk perawatan prasarana jalur dan bangunan dari seluruh tenaga pemeriksa dan perawatan prasarana. Jumlah tersebut menurun untuk karyawan fasilitas operasi dan meningkat untuk karyawan jalur dan bangunan dari tahun 2022.

In 2023, 27 infrastructure inspection and maintenance employees conducted the implementation of infrastructure inspection and maintenance work, and all of them, or 100%, were certified. Meanwhile, the inspection of track and building infrastructure was conducted by 10 (ten) certified track and building inspection employees out of all infrastructure inspection and maintenance employees. The number decreased for operating facility employees and increased for track and building employees from 2022.

Daftar Sertifikasi SDM Prasarana
List of Certifications for Infrastructure Personnel

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Sertifikat Certificate Issuer	Jumlah Karyawan Number of Certified Employees in 2023	Jumlah Karyawan Number of Certified Employees in 2022
Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fasilitas Operasi Railway Infrastructure Maintenance Operating Facilities	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	27	28
Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian Fasilitas Operasi Railway Infrastructure Inspection Operating Facilities	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	27	28
Perawatan Prasarana Perkeretaapian Jalur dan Bangunan Railway Infrastructure Maintenance Track and Building	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	10	7
Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian Jalur dan Bangunan Railway Infrastructure Inspection Track and Building	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	10	8

Kinerja Operasi Segmen Perawatan Sarana

Sepanjang tahun 2023, kinerja perawatan kereta berjalan dengan baik dalam memenuhi target yang ditetapkan. Perawatan kereta dilakukan di Depo, meliputi pekerjaan perawatan harian, mingguan dan bulanan. Perawatan dilakukan untuk memastikan keamanan operasional kereta dan kenyamanan selama perjalanan. Pekerjaan perawatan sarana dilakukan oleh karyawan yang memiliki kompetensi kecakapan dan sertifikasi sesuai.

Seluruh proses perawatan kereta yang dioperasikan dilakukan secara mandiri oleh Divisi Sarana. Setiap rangkaian kereta LRT Jakarta atau "Light Rail Vehicle" (LRV) harus menjalani dua jenis pemeriksaan dan perawatan secara periodik untuk memastikan kondisi

Facility Maintenance Segment Operating Performance

Throughout 2023, train maintenance was performed properly and achieved all the targets given. The Depot conducts train maintenance work on a daily, weekly, and monthly basis. Maintenance is performed to ensure that trains operate safely and comfortably during travel. Facility maintenance work is conducted by employees with the necessary competencies and certifications.

The entire maintenance process of the operated trains is conducted independently by the Facilities Division. Each set of LRT Jakarta rolling stock or "Light Rail Vehicle" (LRV) must undergo two types of periodic inspection and maintenance to ensure the safety of both physical

fisik dan kebersihan kereta aman. Perawatan itu meliputi perawatan ringan (*light maintenance*) dan perawatan berat (*heavy maintenance*). Perawatan ringan dilakukan setiap tujuh hari dan empat bulan, sedangkan perawatan berat dilakukan setiap empat tahun dan delapan tahun.

Kereta melewati tahap pemeriksaan dan perawatan ringan mulai dari kondisi fisik, fungsi dan kebersihan kereta serta pemeriksaan komponen-komponen kereta. Sedangkan perawatan besar yang dilakukan, yaitu “*overhaul*” yang meliputi seluruh bagian dan komponen kereta akan dibongkar lalu dicek. Jika terdapat kerusakan harus diperbaiki demi memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penumpang. Jika ada kerusakan komponen yang harus diganti maka akan diganti atau dibersihkan. Pemeriksaan keseluruhan juga dilakukan berdasarkan usia pakai, kondisi dan fungsi terakhirnya.

Adapun area pelaksanaan pemeriksaan ringan dan berat juga berbeda. Pemeriksaan ringan dilakukan pada area yang khusus untuk melakukan pekerjaan pemeriksaan ataupun perawatan ringan LRV. Sedangkan area perawatan berat membutuhkan banyak peralatan besar dan lengkap untuk melakukan perawatan kereta berskala besar, yaitu “*overhaul*”.

Area pencucian kereta otomatis (*Automatic Train Washing Plant/ATWP*) menjadi peralatan (*equipment*) khusus untuk mencuci eksterior kereta secara otomatis saat kereta kembali ke depo setelah dioperasikan setiap harinya. Masinis cukup menjalankan kereta yang kembali ke depo melalui jalur yang terdapat ATWP ini dan menginformasikan jumlah *trainset* LRV yang dioperasikannya pada peralatan ATWP ini. Setelah itu, eksterior kereta akan dicuci oleh mesin secara otomatis sambil kereta bergerak menuju area parkir (*stabling*) atau area perawatan.

Air yang digunakan untuk mencuci LRV secara otomatis disalurkan ke peralatan yang dinamakan “*Waste Water Training Plant*” (WWTP). Alat tersebut untuk mengolah limbah air bekas pencucian yang terkontaminasi kotoran dan pembersih. Selain pencucian otomatis menggunakan ATWP untuk bagian eksterior, LRV juga dicuci secara manual interiornya dan eksteriornya setiap selesai perawatan ringan.

Bentuk Pekerjaan Pemeliharaan

Type of Maintenance Work

Perawatan Kereta Train Maintenance	338	338	100%
Pemeriksaan Pengendalian Mutu Sarana Facility QC Inspection	1471	1520	100%
Cuci Kereta Train Wash	1460	1455	99,9%
Program Dan Realisasi Perawatan Fasilitas Depo Depot Facility Maintenance Program and Realization	322	322	100%

condition and cleanliness of the train. The maintenance includes light maintenance and heavy maintenance. Light maintenance is conducted every seven days and four months, while heavy maintenance is carried out every four years and eight years.

The train undergoes a stage of inspection and light maintenance, beginning with the physical condition, function, and cleanliness of the train, followed by an inspection of train components. While heavy maintenance is performed, specifically “*overhaul*,” all parts and components of the train will be disassembled and inspected. For any damage found, it must be repaired to ensure the safety and comfort of passengers. If any damaged components require replacement, they will be replaced or cleaned. An overall inspection is also performed based on lifespan, condition, and current function.

The areas for conducting light and heavy inspections are also different. Light inspection is conducted in an area that is specialized for conducting light inspection or maintenance work of LRVs. While the heavy maintenance area requires a lot of large and comprehensive equipment to perform large-scale train maintenance, namely “*overhaul*”.

The Automatic Train Washing Plant (ATWP) is a specialized equipment to automatically wash the exterior of trains as they return to the depot after each day's operation. The driver simply runs the train back to the depot through the ATWP and informs the number of LRV trainsets operated on the ATWP equipment. After that, the exterior of the train will be washed by the machine automatically while the train moves to the parking (*stabling*) or maintenance area.

The water used to wash the LRVs is automatically channeled to a piece of equipment called the “*Waste Water Training Plant*” (WWTP). The equipment is to treat wastewater used for washing that is contaminated with dirt and cleaners. In addition to automatic washing using ATWP for the exterior, the LRV is also manually washed for the interior and exterior after every light maintenance.

Volume Pekerjaan Work Volume

Target Target	Realisasi Realization	Percentase Percentage
338	338	100%
1471	1520	100%
1460	1455	99,9%
322	322	100%

Ditahun 2023 memasuki periode pelaksanaan *Intermediate Over Haul* untuk sarana LRV yang sudah memasuki masanya. Pelaksanaan berlangsung sejak Juni 2022, sampai dengan akhir September 2023 sudah dilakukan 8 LRV (LRV 01, 02 , 03, 04, 05, 06, 07, 08).

In 2023, the Intermediate Overhaul implementation period was conducted for LRV facilities that have entered its period. It has been implemented since June 2022, until the end of December 2023, which covered 8 LRVs ((LRV 01, 02 , 03, 04, 05, 06, 07, 08).



Daftar Sertifikasi SDM Sarana

List of Certifications for Facilities Personnel

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Sertifikat Certificate Issuer	Jml Karyawan Tersertifikasi - 2023 Number of Certified Employees in 2023	Jml Karyawan Tersertifikasi - 2022 Number of Certified Employees in 2022
Pemeriksa Sarana Facilities Inspection	Kementrian Perhubungan Ministry of Transportation	31	26
Perawat Sarana Facilities Maintenance	Kementrian Perhubungan Ministry of Transportation	31	26

Di tahun 2023, pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dan perawatan sarana dilakukan oleh karyawan pelaksana pemeriksaan dan perawatan sarana yang memiliki sertifikasi ada 31 orang atau 100% dari seluruh tenaga pemeriksa dan perawatan sarana. Jumlah tersebut meningkat 5 orang atau sebesar 19% dari tahun 2022.

In 2023, 31 facilities inspection and maintenance employees conducted the implementation of facilities inspection and maintenance work, all of them, or 100%, were certified. The number of employees increased by five or 19% from 2022.

IKHTISAR SAHAM

SHARE HIGHLIGHTS

KOMPOSISI DAN PERGERAKAN JUMLAH SAHAM

Sebagai bentuk pemenuhan compliance atas terbitnya Izin Operasi Sarana Nomor 1540 Tahun 2019 yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT LRT Jakarta, maka pada tahun 2020 telah dilakukan inbreng sebanyak 3 (tiga) trainset LRV dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda), sebagaimana tertuang didalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 75 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat oleh Wiwik Condro SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0408252 tanggal 17 November 2020.

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar rupiah), bertambah sebesar 25% sebesar Rp150.000.000.000,- menjadi 55% atau sejumlah Rp333.893.400.000,-, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dari Modal Dasar tersebut, Modal Ditempatkan dan Disetor penuh oleh Para Pemegang Saham adalah sebesar 55% (lima puluh lima persen) atau sejumlah 3.338.934 (tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat lembar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp333.893.400.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga ratus empat ratus ribu rupiah). Berikut komposisi saham PT LRT Jakarta dalam 3 (tiga) tahun terakhir

COMPOSITION AND TREND OF TOTAL SHARES

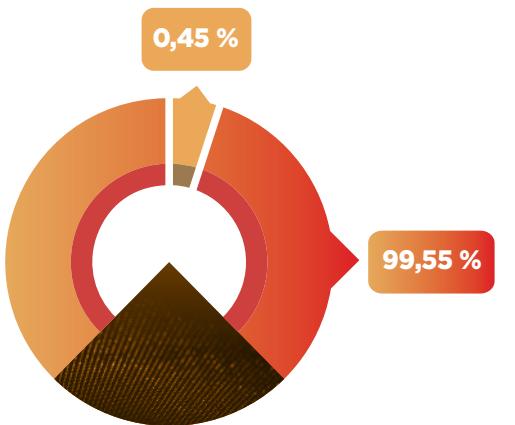
As a form of compliance with the issuance of the Facility Operation Permit No. 1540 of 2019, which has been granted by DKI Jakarta Provincial Government to PT LRT Jakarta, in 2020, 3 (three) LRV trainsets have been transferred from PT Jakarta Propertindo (Perseroda), as stated in the Deed of Declaration of Shareholders' Resolution No. 75 dated October 26, 2020, drawn up by Wiwik Condro, S.H., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0408252 dated November 17, 2020.

Pursuant to the Company's Deed of Establishment, the Company's Authorized Capital amounted to IDR600,000,000,000 (six hundred billion rupiah), an increase of 25%, or by IDR 150,000,000,000 to 55% or a total of IDR333,893,400,000,- each share with a par value of IDR100,000 (one hundred thousand rupiah).

From the Authorized Capital, the Issued and Fully Paid-up Capital by the Shareholders amounted to 55% (fifty-five percent) or 3,338,934 (three million three hundred thirty-eight thousand nine hundred and thirty-four shares) with a total nominal value of IDR333,893,400,000 (three hundred thirty-three billion eight hundred ninety-three million and four hundred thousand rupiah). The following is the share composition of PT LRT Jakarta in the last 3 (three) years, as described in the table below.

Komposisi dan Pergerakan Jumlah Saham PT LRT Jakarta 2021-2023
Composition and Trend of PT LRT Jakarta's Shares 2021-2023

Pemegang Saham Shareholder	31 Desember 2023 December 31, 2023		31 Desember 2022 31 Desember 2022		31 Desember 2021 31 Desember 2021	
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (share)	Kepemilikan Ownership (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (share)	Kepemilikan Ownership (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (share)	Kepemilikan Ownership (%)
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	3.323.934	99,55	3.323.934	99,55	3.323.934	99,55
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	15.000	0,45	15.000	0,45	15.000	0,45
Jumlah Total	3.338.934	100,00%	3.338.934	100,00%	3.338.934	100,00%



- PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
- PT Jakarta Infrastruktur Propertindo

INFORMASI TENTANG PERDAGANGAN SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK

Sepanjang tahun 2023, LRT tidak pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/ IPO*) sehingga saham Perusahaan tidak diperdagangkan kepada publik melalui Bursa Efek. Dengan demikian, tidak terdapat informasi perdagangan saham yang memuat kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan dan volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.

INFORMASI TENTANG AKSI KORPORASI

Per 31 Desember 2023, Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi, dengan demikian informasi terkait hal tersebut tidak dapat disampaikan.

INFORMASI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (SUSPENSION) DAN/ ATAU SANKSI PERDAGANGAN SAHAM (DELISTING)

Di tahun 2023, Perusahaan tidak pernah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek, sehingga tidak terdapat aksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau sanksi penghapusan perdagangan saham (*delisting*) yang dapat disajikan dalam Laporan Tahunan ini.

DIVIDEN SAHAM

Hingga 31 Desember 2023, Perusahaan belum membagikan dividen kepada pemegang saham. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar serta keputusan pemegang saham.

INFORMATION OF STOCK TRADING AND PUBLIC SHARE OWNERSHIP

As of 2023, the Company has never conducted Initial Public Offering (IPO) so that the Company's shares are not traded to the public through the Stock Exchange. Therefore, there is no stock trading information containing market capitalization based on the price on the Stock Exchange in which the shares are listed; the highest, lowest, and closing share prices based on the price on the Stock Exchange in which the shares are listed; trading volume of shares on the Stock Exchange in which the shares are listed; and information in the form of a graph containing at least the closing price based on the price on the Stock Exchange in which the shares are listed and the trading volume of the shares on the Stock Exchange in which the shares are listed for each quarter in the last 2 (two) fiscal years.

INFORMATION ON CORPORATE ACTION

As of December 31, 2023, the Company has not conducted corporate action; thus there is no information regarding this matter can be presented.

INFORMATION ON TEMPORARY SUSPENSION (SUSPENSION) AND/OR SANCTION (DELISTING) OF STOCK TRADING SANCTION

In 2023, the Company has not listed its shares on the Stock Exchange, thus there is no temporary suspension and/or delisting of stock trading can be presented in this Annual Report.

SHARE DIVIDENDS

As of December 31, 2023, the Company has not distributed dividends to shareholders. This is in accordance with the provisions in the Articles of Association as well as shareholder resolutions.

INFORMASI TENTANG OBLIGASI, SUKUK, ATAU OBLIGASI KONVERSI

— INFORMATION ON BONDS, SUKUK, OR CONVERTIBLE BONDS

Di tahun 2023, Perusahaan tidak menerbitkan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi tentang jumlah obligasi, sukuk, maupun obligasi konversi yang beredar (*outstanding*), tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, serta peringkat obligasi/sukuk.

In 2023, the Company has not issued bonds, sukuk or convertible bonds, or other securities. Therefore, there is no information on the number of outstanding bonds, sukuk, or convertible bonds, interest rates/yields, maturity dates, and ratings of bonds/sukuk.

INFORMASI TENTANG SUMBER PENDANAAN LAINNYA

— INFORMATION ON OTHER SOURCES OF FUNDING

Sumber pendanaan proyek LRT Jakarta 100% didapatkan dari dana APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui skema Penanaman Modal Daerah (PMD) yang disalurkan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemanfaatan dana PMD tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh PT Jakarta Propertindo sehingga tidak tercermin di dalam laporan keuangan Perusahaan.

Sedangkan sumber pendanaan bagi operasional LRT Jakarta (+ 90%) berasal dari subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

The source of funding for LRT Jakarta project is 100% obtained from the DKI Jakarta Provincial Government Regional Budget (APBD) funds, through the Regional Investment Scheme (PMD) which is channeled to PT Jakarta Propertindo (Perseroda) as a Regional Owned Enterprise (BUMD) of the DKI Jakarta Provincial Government. The utilization of PMD funds is fully implemented by PT Jakarta Propertindo. Hence, it is not reflected in the Company's Financial Statements.

Meanwhile, the main source of funding for the Company's operations (+90%) derives from subsidies paid by the DKI Jakarta Provincial Government.

PERISTIWA PENTING

KEY EVENT HIGHLIGHTS



Digitalisasi Bisnis Proses
Business Process Digitalization

31 Maret 2023
March 31, 2023

LRT Jakarta lanjutkan proses digitalisasi bisnis proses di lingkungan Perusahaan, Procure to Pay mengintegrasikan aplikasi yang berkaitan untuk proses bisnis internal yang lebih efisien dan efektif, serta mengoptimalkan aset yang dimiliki. LRT Jakarta continues the process of digitizing its business processes, Procure to Pay integrates related applications for more efficient and effective internal business processes, as well as optimizing owned assets.



Signing Perjanjian Subsidi TA 2023
Signing of Subsidy Agreement for FY 2023

14 April 2023
April 14, 2023

Dalam rangka tindak lanjut penyelenggaraan layanan angkutan umum LRT Jakarta, penandatanganan perjanjian subsidi tahun anggaran 2023 telah dilakukan oleh Dishub dan PT Jakarta Propertindo selaku induk usaha PT LRT Jakarta. To follow up on the implementation of LRT Jakarta's public transportation service, the signing of a subsidy agreement for 2023 fiscal year has been conducted by the Transportation Agency and PT Jakarta Propertindo as the parent company of PT LRT Jakarta.



RUPST & RUPS Luar Biasa
Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) &
Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)

17 Mei 2023
May 17, 2023

LRT Jakarta melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dilanjutkan dengan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) dihadiri oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Perwakilan Pemegang Saham LRT Jakarta. LRT Jakarta held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) followed by Extraordinary GMS (EGMS) attended by the Board of Directors, Board of Commissioners, and LRT Jakarta Shareholder Representatives.



Launching Whistleblowing system LRTJakarta Integritas

Launching of Whistleblowing System "LRT Jakarta Integritas"

22 Agustus 2023
August 22, 2023

LRT meluncurkan *Whistleblowing System* sebagai bentuk komitmen menjalankan *Good Corporate Governance* dalam menjalankan bisnis secara profesional dan menjunjung integritas.

LRT launched Whistle Blowing System as a form of commitment to implementing Good Corporate Governance in conducting business professionally and upholding integrity.



Grand Opening Nasi Tempong Indra

Grand Opening of Nasi Tempong Indra

10 Oktober 2023
October 10, 2023

LRTJ menghadiri undangan Grand Opening Nasi Tempong Indra di Area Depo LRTJ Pegangsaan Dua. Acara ini turut dihadiri Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan. Nasi Tempong Indra merupakan *tenant* restoran pertama yang berada dalam lingkungan depo LRT Jakarta yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik masyarakat untuk menggunakan LRT Jakarta menuju Stasiun Pegangsaan Dua serta juga mendatangkan investor lain dalam bidang pemanfaatan lahan kawasan.

LRTJ attended the Grand Opening of Nasi Tempong Indra at LRTJ Depot Area Pegangsaan Dua. The Indonesian Minister of Trade Zulkifli Hasan also attended the event. Nasi Tempong Indra is the first restaurant tenant in LRT Jakarta depot, which is expected to increase the attractiveness of the public to use the LRT Jakarta to Pegangsaan Dua Station and bring in other investors for regional land utilization.



Groundbreaking Fase 1B

Groundbreaking of Phase 1B

30 Oktober 2023
October 30, 2023

Groundbreaking Pembangunan fase 1B Velodrome-Manggarai diluncurkan oleh Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Bapak Heru Budi dan dihadiri juga oleh jajaran pejabat instansi terkait. Proyek LRT Jakarta fase 1B ditargetkan selesai pada tahun 2026. Proyek ini bernilai anggaran Rp5,5 triliun. The groundbreaking Phase 1B Velodrome-Manggarai was launched by the Minister of Transportation, Budi Karya Sumadi, Acting Governor, Heru Budi, and attended by officials from related agencies. Phase 1B of LRT Jakarta project is targeted for completion in 2026. The project has a budget of IDR5.5 trillion.



Penandatangan MoU Link & Match

MOU Signing of Link & Match

09 November 2023
November 9, 2023

LRT Jakarta turut serta dalam program yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta beserta Jajaran, Anggota DPRD DKI Jakarta, Ketua KADIN Provinsi DKI Jakarta serta perwakilan Perusahaan BUMD dan Swasta.

LRT Jakarta participated in a program organized by the DKI Jakarta Provincial Education Agency. The event was attended by the Regional Secretary of DKI Jakarta Province and his staff, Members of DKI Jakarta DPRD, Chairperson of KADIN of DKI Jakarta Province, and representatives of Regional-Owned Enterprise (BUMD) and Private Companies.



Signing Pedoman Kerja Teknis Sistem Manajemen Pengamanan

Signing of Technical Working Guidelines for Security Management System

30 November 2023
November 30, 2023

LRTJ menyelenggarakan seremonial Penandatangan Pedoman Kerja Teknis (PKT) Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) dengan Direktorat Konservasi dan Baharkam Polri.

LRTJ held a ceremonial signing of the Technical Work Guidelines (PKT) for the Security Management System (SMP) with the Directorate of Security for Vital Objects, Korsabhabara Baharkam Polri.


Pra Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Luar Biasa PT LRT Jakarta.

Pre Extraordinary General Meeting of Shareholders (GMS) of PT LRT Jakarta.

04 Desember 2023

December 4, 2023

LRT Jakarta gelar Pra RUPSLB dalam rangka membahas RKA dan KPI Perusahaan tahun 2024.

LRT Jakarta held Pre-EGMS to discuss the Company's Work Plan and Budget and KPI for 2024.


Penetapan Stasiun dan Depo LRT Jakarta sebagai Objek Vital Nasional

Designation of LRT Jakarta Stations and Depots as National Vital Objects

14 Desember 2023

December 14, 2023

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menetapkan objek vital transportasi bidang perkeretaapian PT LRT Jakarta. Penetapan ini merupakan bentuk legitimasi penyelenggaraan pengamanan objek vital transportasi bidang perkeretaapian dimana prinsip pengamanan internal dan pemenuhan kewajiban-kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan pedoman pengamanan objek vital nasional.

The Director General of Railways of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia has designated the stations and depots of LRT Jakarta as National Vital Objects of Transportation. The designation is a form of legitimization for the security management of vital transportation objects in the railway sector, wherein the principle of internal security and the fulfillment of obligations is in accordance with the laws and regulations concerning railways as well as guidelines for national vital object security.



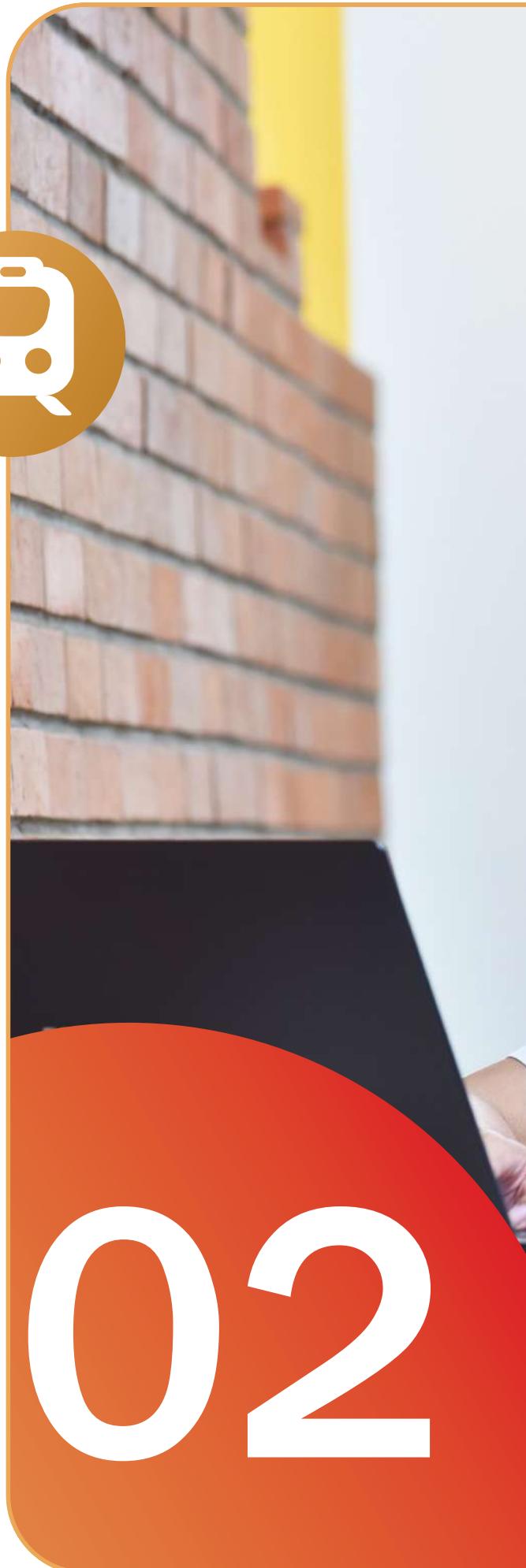
Laporan Manajemen

Management Report



Perusahaan terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan baik dari sisi pendapatan tiket maupun non-subsidi.

The Company continues to make efforts to increase revenue from both farebox and non-subsidized sources.





Laporan Dewan Komisaris

Report of the Board of Commissioners



Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja LRT Jakarta di 2023 bisa menjadi pondasi yang kuat untuk menaklukkan berbagai tantangan dan peluang usaha di 2024.

The Board of Commissioners believes that LRT Jakarta's performance in 2023 can provide a solid basis for overcoming numerous obstacles and business opportunities in 2024.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga sepanjang tahun PT LRT Jakarta, dapat menjalankan usahanya dengan baik di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Laporan Dewan Komisaris ini merupakan laporan penilaian atas kinerja Direksi yang antara lain mencakup pencapaian realisasi RKAP tahun 2023, kinerja operasional dan keuangan, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, efektivitas sistem pengendalian internal dan penerapan budaya Perusahaan, serta pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris terhadap pengawasan pengelolaan Perusahaan untuk tahun buku 2023 sebagai bagian dari penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,

First and foremost, let us express our gratitude to God Almighty, for enabling PT LRT Jakarta to properly conduct its business throughout the year amidst various challenges faced. This Board of Commissioners' report assesses the performance of the Board of Directors, including the achievement of the Company's 2023 Work Plan and Budget realization, operational and financial performance, risk management, the effectiveness of the internal control system, the implementation of corporate culture, and compliance with applicable laws. Next, allow us to present the Board of Commissioners' accountability report on the oversight of the Company's management for 2023 fiscal year as part of the implementation of Good Corporate Governance principles.



Pandangan Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Direksi

Dewan Komisaris menekankan bahwa strategi yang tepat merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan Perusahaan. Oleh karena itu, penyusunan strategi perlu memerhatikan implementasinya di tahun sebelumnya dan kondisi terkini agar strategi yang akan dijalankan pada tahun berikutnya berjalan tepat sasaran. Melalui pemberian nasihat, Dewan Komisaris turut berperan dalam penyusunan strategi yang selanjutnya melakukan pengawasan terhadap implementasi atas strategi yang telah disusun oleh Direksi.

Views of the Board of Commissioners on the Performance of the Board of Directors

The Board of Commissioners emphasizes that the right strategy is a determinant factor of the Company's success. Therefore, the strategy formulation must consider its implementation in the previous year and current conditions to ensure the strategy executed in the following year is on target. Through advisory, the Board of Commissioners also plays a role in formulating strategy and subsequently monitors the implementation of the strategies developed by the Board of Directors.

Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi dalam menghadapi tantangan dengan berbagai inisiatif yang dicetuskan, sehingga secara umum target kinerja Perusahaan telah dapat memenuhi sebagian besar target-target yang ditetapkan Pemegang Saham. Dalam aspek bisnis, Direksi mampu mengoptimalkan pendapatan non tiket dengan inisiatif-inisiatif bisnis dalam pemanfaatan lahan, pemasangan media luar ruang serta jasa konsultasi perawatan dan operasi.

Direksi dengan pengawasan dan masukan-masukan dari Dewan Komisaris juga melakukan berbagai inisiatif penghematan biaya dengan tetap mengutamakan keandalan dan keamanan operasi kereta. Seluruh inisiatif dan tindak lanjutnya selalu dilaporkan berkala oleh Direksi sehingga Dewan Komisaris dapat memastikan bahwa kualitas operasi, perawatan, pengusahaan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang.

Hubungan Kerja dan Mekanisme Pemberian Nasihat kepada Direksi

Dalam menjalankan pengawasannya kami selalu melakukan koordinasi secara aktif dan konstruktif melalui rapat bulanan. Selain itu, koordinasi pengawasan juga dilakukan oleh Organ Dekom melalui Internal Audit dan Divisi lainnya di Perusahaan. Pemberian nasehat dan arahan dilakukan baik secara langsung pada saat rapat bulanan maupun melalui surat yang berisikan hasil telaah Dekom kepada Direksi, yang antara lain dapat berupa:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan
2. Memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan
3. Fokus pengawasan dan pemberian nasihat atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
4. Mengawasi tindak lanjut atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. Memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
6. Mengawasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal.
7. Memastikan penerapan kode etik dan nilai-nilai budaya Perusahaan.
8. Mengawasi pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Pengawasan dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan dilakukan di berbagai lini Perusahaan. Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris PT LRT Jakarta menggunakan berbagai parameter untuk memastikan pemenuhan target RKAP oleh manajemen. Parameter tersebut bisa meliputi:

The Board of Commissioners appreciates the efforts of the Board of Directors in facing challenges with various initiatives that have been launched, so that generally the Company's performance targets have been able to meet most of the targets set by the Shareholders. In the aspect of business, the Board of Directors is able to optimize non-ticket revenue with business initiatives in land utilization, outdoor media placement, and consulting services for maintenance and operations.

The Board of Directors, with supervision and input from the Board of Commissioners, also undertakes various cost-saving initiatives while still prioritizing the reliability and safety of train operations. All initiatives and their follow-ups are always periodically reported by the Board of Directors so that the Board of Commissioners can ensure that the quality of operations, maintenance, and management continues to prioritize safety, security, and comfort of the passengers.

Work Relations and Mechanisms for Providing Advice to the Board of Directors

In executing supervision, the Board of Commissioners always coordinate actively and constructively through monthly meetings. Additionally, supervisory coordination is also performed by the Board of Commissioners' Organ through Internal Audit and other Divisions within the Company. Advice and directions are provided both directly during monthly meetings and through letters containing the Board of Commissioners' findings to the Board of Directors, which may include:

1. Overseeing the management policies and general management operations concerning the Company and its business.
2. Providing advice to the Board of Directors in the interest of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives.
3. Focusing on the supervision and advice on the execution of the Company's Work Plan and Budget.
4. Monitoring the follow-up on the resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).
5. Ensuring the implementation of Good Corporate Governance.
6. Overseeing the effectiveness of the Internal Control System.
7. Ensuring the application of the code of ethics and the Company's cultural values.
8. Monitoring the implementation of applicable laws and regulations.

Supervisory Function and Recommendations of the Board of Commissioners

Supervision is carried out in accordance with the principles of good corporate governance and is implemented across various lines of the Company. In performing its supervisory function, the Board of Commissioners of PT LRT Jakarta applies various parameters to ensure the achievement of the Company's Work Plan and Budget targets by management. These parameters may include:

1. Pencapaian target keuangan: Memantau apakah manajemen berhasil mencapai target pendapatan dan laba yang ditetapkan dalam RKAP.
2. Kinerja operasional: Mengawasi efisiensi operasional, seperti waktu tunggu dan frekuensi layanan LRTJ, serta kepuasan pelanggan.
3. Pengelolaan risiko: Menilai bagaimana manajemen mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian target RKAP.
4. Kepatuhan terhadap regulasi: Memastikan bahwa manajemen mematuhi semua regulasi yang relevan, termasuk keselamatan, lingkungan, dan ketentuan pemerintah.
5. Inisiatif strategis: Menilai kemajuan proyek dan inisiatif strategis yang dapat berkontribusi pada pencapaian target jangka panjang.

Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi yang meliputi aspek operasional, keuangan, dan aspek-aspek lainnya yang berkaitan erat bagi keberlanjutan kegiatan usaha Perusahaan. Dasar penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi tentunya tidak terlepas dari tingkat keberhasilan Direksi dalam merealisasikan *Key Performance Indicator* (KPI) maupun RKAP PT LRT Jakarta tahun 2023 seperti yang dicanangkan pada awal tahun.

Beberapa aspek yang menjadi rekomendasi Dewan Komisaris, adalah sebagai berikut:

Aspek Operasional:

Direksi PT LRT Jakarta memiliki tanggung jawab penting untuk terus memperkuat strategi dan langkah-langkah operasional yang ada. Hal ini tidak hanya penting untuk mengantisipasi perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan, tetapi juga untuk menjamin bahwa layanan fasilitas publik yang disediakan oleh LRT Jakarta tetap berjalan dengan lancar dan efisien. Dengan memastikan bahwa operasional LRT Jakarta dapat beradaptasi dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat, Direksi akan memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa LRT Jakarta terus menjadi tulang punggung transportasi publik yang handal bagi penduduk kota. Oleh karena itu, Direksi harus proaktif dalam merencanakan dan mengimplementasikan inovasi serta peningkatan yang akan memperkaya pengalaman pengguna dan meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan.

Aspek Pengembangan Bisnis (Non-Farebox):

Pengembangan sumber pendapatan Non-Farebox merupakan langkah strategis yang vital bagi PT LRT Jakarta untuk menciptakan aliran pendapatan yang berkelanjutan dan diversifikasi. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada pendapatan subsidi yang seringkali tidak dapat diprediksi dan tunduk pada perubahan kebijakan pemerintah. Dengan memperluas portofolio pendapatan melalui inisiatif seperti penjualan iklan, penyewaan ruang ritel, dan kemitraan strategis, PT LRT Jakarta dapat memperkuat posisi keuangannya dan meningkatkan kemampuan untuk melakukan reinvestasi dalam layanan dan infrastruktur.

1. Financial Targets: Monitoring whether management has achieved the revenue and profit targets set in the Company's Work Plan and Budget.
2. Operational Performance: Overseeing operational efficiency such as waiting time, service frequency of LRTJ, and customer satisfaction.
3. Risk Management: Assessing how management identifies, manages, and mitigates risks that could affect the achievement of the Company's Work Plan and Budget RKAP targets.
4. Compliance with Regulations: Ensuring that management complies with all relevant regulations, including environmental safety and government regulations.
5. Strategic Initiatives: Assessing the progress of projects and strategic initiatives that could contribute to long-term target achievements.

The Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors covering operational, financial aspects, and other closely related aspects essential for the sustainability of the Company's business activities. The basis of the Board of Commissioners' assessment of the performance of the Board of Directors is inseparable from the level of success of the Board of Directors in realizing the Key Performance Indicators (KPIs) and the Company's 2023 Work Plan and Budget as proclaimed at the beginning of the year.

Some of the aspects recommended by the Board of Commissioners are as follows:

Operational Aspect:

The Board of Directors of PT LRT Jakarta has a significant responsibility to continuously strengthen existing operational strategies and measures. This is crucial not only to anticipate potential future policy changes but also to ensure that the public service facilities provided by LRT Jakarta continue to operate smoothly and efficiently. By ensuring that LRT Jakarta's operations can adapt to policy dynamics and community needs, the Board of Directors will play a key role in ensuring that LRT Jakarta continues to be a reliable backbone of public transportation for city residents. Therefore, the Board of Directors must be proactive in planning and implementing innovations and improvements that will enhance the user experience and improve the overall quality of service.

Business Development (Non-Farebox) Aspect:

Developing non-farebox revenue sources is a vital strategic measure for PT LRT Jakarta to create sustainable revenue streams and diversification. This will reduce dependence on often unpredictable subsidy revenues and subject to government policy changes. By expanding its revenue portfolio through initiatives such as advertising, retail space leasing, and strategic partnerships, PT LRT Jakarta can strengthen its financial position and enhance its ability to reinvest in services and infrastructure.

Dalam konteks bisnis yang terkait dengan fasilitas publik, menjaga aspek keselamatan adalah imperatif yang tidak dapat ditawar. Ini bukan hanya tentang memenuhi standar regulasi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Keamanan dan kenyamanan yang konsisten akan menjamin bahwa pengguna merasa aman saat menggunakan layanan LRT, yang pada gilirannya akan mendorong penggunaan yang lebih luas dan meningkatkan reputasi PT LRT Jakarta sebagai penyedia layanan transportasi yang handal.

Selanjutnya, Direksi PT LRT Jakarta harus mengadopsi pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang di Stasiun-Stasiun Fase 1B. Inisiatif bisnis yang inovatif dan berdampak signifikan, seperti pengembangan pusat komersial atau zona *transit-oriented development* (TOD), dapat menjadi sumber pendapatan baru yang signifikan. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan nilai komersial stasiun tetapi juga dapat memberikan layanan dan fasilitas tambahan yang meningkatkan pengalaman pengguna dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Aspek Pengelolaan Aset:

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) perlu memastikan pengelolaan asetnya dilakukan dengan baik dan memperhatikan aspek legalitas. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada mitra bisnis. Sebagai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dengan tujuh anak usaha, Jakpro seharusnya lebih optimal dalam memanfaatkan ratusan asetnya. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan laba dan eksistensinya.

Aspek Kolaborasi:

Direksi PT LRT Jakarta perlu menjalin sinergi dan kolaborasi dengan operator lain guna mengoptimalkan efisiensi dan pelayanan. Dalam menghadapi tantangan dan memastikan layanan yang lebih baik, PT LRT Jakarta dapat berkoordinasi dengan operator lain, seperti angkutan umum atau moda transportasi lainnya, untuk mengatur jadwal dan rute secara efisien. Dengan sinergi ini, penumpang akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan terintegrasi. Kolaborasi dengan operator lain dalam pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dapat mengurangi biaya dan mempercepat proses perbaikan. Misalnya, berbagi fasilitas perbaikan dan suku cadang.

PT LRT Jakarta dapat berkolaborasi dengan operator lain dalam penggunaan teknologi, dapat menghasilkan aplikasi terintegrasi yang memudahkan penumpang dalam memantau jadwal, membeli tiket, dan mengakses informasi transportasi secara keseluruhan. Bahkan tidak menutup kemungkinan PT LRT Jakarta dan operator lain dapat mengadakan pelatihan bersama untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan mengoptimalkan pelayanan kepada penumpang. Dengan kerjasama yang baik, PT LRT Jakarta dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.

In the context of business related to public facilities, maintaining safety aspect is a non-negotiable imperative. This is not just about meeting regulatory standards but also about building customer trust and satisfaction. Consistent safety and comfort will ensure that users feel secure when using LRT services, which in turn will encourage wider use and enhance PT LRT Jakarta's reputation as a reliable transportation service provider.

Next, the Board of Directors of PT LRT Jakarta must adopt a proactive approach in identifying and leveraging opportunities at Phase 1B Stations. Innovative and significant business initiatives such as the development of commercial centers or transit-oriented development (TOD) zones can become significant new revenue sources. This approach will not only enhance the commercial value of the stations but also provide additional services and facilities that enhance the user experience and support local economic growth.

Asset Management Aspect:

PT Jakarta Propertindo (Jakpro) needs to ensure a good asset management and consider legal aspects. This aims to provide legal certainty to business partners. As a Regional-Owned Enterprise (ROE) with seven subsidiaries, Jakpro should optimize the use of its hundreds of assets. Thus, the Company can increase its profits and presence.

Collaboration Aspect:

The Board of Directors of PT LRT Jakarta needs to establish synergy and collaboration with other operators to optimize efficiency and service. In facing challenges and ensuring better service, PT LRT Jakarta can coordinate with other operators such as public transport or other modes of transport to efficiently arrange schedules and routes. With this synergy, passengers will receive better and integrated service. Collaboration with other operators in maintenance and facility care can reduce costs and accelerate repair processes, such as sharing repair facilities and spare parts.

PT LRT Jakarta can collaborate with other operators in the use of technology to produce integrated applications that make it easier for passengers to monitor schedules, purchase tickets, and access overall transportation information. It is also possible that PT LRT Jakarta and other operators could hold joint training to improve employee skills and optimize service to passengers. With good cooperation, PT LRT Jakarta can achieve higher efficiency and provide better service to the community.

Aspek Pengembangan Jalur LRTJ Fase 1B:

Sebagai pengelola dan operator, PT LRT Jakarta perlu menjalin koordinasi yang erat dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Tujuannya adalah untuk memastikan proses operasional yang efisien dan terkoordinasi di masa depan. Kolaborasi antara kedua entitas ini akan memperkuat sinergi dalam mengelola aset dan layanan transportasi di wilayah Jakarta. Kolaborasi dalam perizinan, pengelolaan aset akan memastikan optimalisasi penggunaan usaha, operasi dan pemeliharaan. Dengan berkolaborasi, PT LRT Jakarta dan Jakpro dapat menggali potensi pengembangan lebih lanjut. Misalnya, memperluas jaringan transportasi atau mengintegrasikan layanan dengan moda transportasi lainnya. Dengan koordinasi yang baik, PT LRT Jakarta dan Jakpro dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Jakarta di masa depan.

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM):

Direksi diharapkan untuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai perusahaan kepada karyawan guna terus meningkatkan kinerja karyawan. Direksi perlu memperkuat internalisasi nilai-nilai perusahaan kepada karyawan agar kinerja mereka terus meningkat. Direksi dapat mengadakan pelatihan khusus yang fokus pada nilai-nilai inti perusahaan. Ini akan membantu karyawan memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi. Secara konsisten mengkomunikasikan nilai-nilai perusahaan melalui berbagai saluran, seperti rapat, memo, dan intranet. Pesan yang jelas dan berulang akan membantu memperkuat pemahaman karyawan.

Walk the talk, Direksi harus menjadi contoh yang baik dalam menerapkan nilai-nilai perusahaan. Ketika karyawan melihat pimpinan mengamalkan nilai-nilai tersebut, mereka akan lebih termotivasi untuk mengikuti jejak yang sama. Menghargai karyawan yang secara aktif menerapkan nilai-nilai perusahaan akan memperkuat internalisasi. Direksi dapat mengintegrasikan nilai-nilai perusahaan dalam proses evaluasi kinerja. Karyawan yang berhasil menginternalisasi nilai-nilai tersebut dapat diakui dan diberikan kesempatan lebih lanjut. Dengan pendekatan ini, Direksi dapat menciptakan budaya perusahaan yang kuat dan memastikan kinerja karyawan terus berkembang.

Aspek Teknologi Informasi:

Transformasi proses menjadi digitalisasi merupakan langkah penting yang harus dilakukan. Dalam era teknologi informasi yang terus berkembang, organisasi perlu mengadopsi solusi digital untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan. Namun, keamanan data juga harus menjadi perhatian utama. Implementasikan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Gunakan *firewall*, antivirus, dan *intrusion detection systems* untuk mengamankan jaringan dan sistem. Hanya memberikan izin akses yang tepat kepada pengguna agar hanya mereka yang berwenang yang dapat mengakses data. Edukasi karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data dan menghindari pelanggaran privasi. Dengan menggabungkan transformasi digital dan

LRTJ Phase 1B Line Development Aspect:

As the manager and operator, PT LRT Jakarta needs to establish close coordination with PT Jakarta Propertindo (Jakpro). The goal is to ensure efficient and coordinated operational processes in the future. Collaboration between these two entities will strengthen synergy in managing assets and transportation services in the Jakarta area. Collaboration in licensing and asset management will ensure the optimization of business use, operations, and maintenance. By collaborating, PT LRT Jakarta and Jakpro can explore further development potential, such as expanding the transportation network or integrating services with other modes of transport. With good coordination, PT LRT Jakarta and Jakpro can create a more efficient transportation system and provide better service to the people of Jakarta in the future.

Human Resources (HR) Aspect:

The Board of Directors is expected to enhance the internalization of the Company's values among employees to continue improving employee performance. The Board of Directors needs to strengthen the internalization of the Company's values to employees so that their performance continues to improve. The Board of Directors can hold special training focused on the core values of the Company. This will help employees understand and internalize the principles upheld. Consistently communicating the Company's values through various channels, such as meetings, memos, and intranets. Clear and repeated messages will help strengthen employees' understanding.

Walk the talk, the Board of Directors must set a good example in applying the Company's values. When employees see leaders practicing these values, they will be more motivated to follow the same path. Appreciating employees who actively apply the Company's values will strengthen internalization. The Board of Directors can integrate the Company's values into the performance evaluation process. Employees who successfully internalize these values can be recognized and given further opportunities. With this approach, the Board of Directors can create a strong corporate culture and ensure that employee performance continues to evolve.

Information Technology Aspect:

The transformation of processes into digitalization is an important step that must be taken. In an era of evolving information technology, the organization needs to adopt digital solutions to enhance efficiency, productivity, and service quality. However, data security must also be a primary concern. Implement data encryption to protect sensitive information from unauthorized access. Use firewalls, antivirus, and intrusion detection systems to secure networks and systems. Only provide appropriate access permissions to users so that only authorized individuals can access the data. Educate employees on the importance of maintaining data confidentiality and avoiding privacy breaches. By combining digital transformation and a focus on data security, the organization can achieve

fokus pada keamanan data, organisasi dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi tanpa mengorbankan privasi dan keamanan informasi.

Aspek Finansial:

Mekanisme subsidi yang diterapkan harus selalu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan perjanjian yang berlaku. Dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, Perusahaan dapat menjaga keberlanjutan finansial dan menghindari risiko hukum.

Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu Direksi dalam menghadapi tantangan di tahun 2023 dan mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan mengoptimalkan penggunaan subsidi dan memastikan kepatuhan, Perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan berkelanjutan.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Rumusan target tahun 2024 yang tertuang dalam RKAP 2024 harus menjadi gambaran tentang optimisme Perusahaan. Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja LRT Jakarta di 2023 bisa menjadi pondasi yang kuat untuk menaklukan berbagai tantangan dan peluang usaha di 2024.

Dewan Komisaris sependapat dengan Direksi terkait prospek usaha pada tahun 2024. Sebagai pemenuhan mandat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka LRT Jakarta harus terus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat melalui pemenuhan SPM dan dilengkapi juga dengan standar internasional lain yang dikelola dengan baik selama ini. Selain itu, strategi untuk meningkatkan *ridership* melalui integrasi fisik dan pembayaran moda transportasi diharapkan mampu mendorong minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

Namun, Direksi juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan usaha *nonfare box* melalui *advertising*, jasa konsultasi dan teknis, retail dan sewa menyewa, ritel, telekomunikasi dan *event/activation*. Agar secara perlahan namun pasti dapat mengurangi beban subsidi dan mampu bertahan secara mandiri.

Penerapan GCG dan Peran Dewan Komisaris dalam Implementasi Whistleblowing System (WBS)

Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris tunduk terhadap ketentuan Tata Kelola Perusahaan sehingga evaluasi terhadap pelaksanaan Tata Kelola dilakukan secara rutin melalui pelaporan pencapaian skor GCG baik secara bulanan maupun tahunan. Evaluasi kesesuaian Tata Kelola juga dilakukan di internal Dewan Komisaris beserta Komite-nya.

higher efficiency without compromising privacy and information security.

Financial Aspect:

The subsidy mechanism applied must always comply with the provisions of the law and applicable agreements. By ensuring compliance with regulations, the Company can maintain financial sustainability and avoid legal risks.

These recommendations are expected to help the Board of Directors face challenges in 2023 and achieve the set targets. By optimizing the use of subsidies and ensuring compliance, the Company can operate efficiently and sustainably.

Views on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

The Company's 2024 target formulation, as defined in the 2024 Work Plan and Budget, should reflect its optimism. The Board of Commissioners believes that LRT Jakarta's performance in 2023 can provide a solid basis for overcoming numerous obstacles and business opportunities in 2024.

The Board of Commissioners agrees with the Board of Directors regarding the business prospects for 2024. As a fulfillment of the mandate from the DKI Jakarta Provincial Government, LRT Jakarta must continue to provide optimal service to the community through the fulfillment of SPM and is also equipped with other international standards that have been well managed so far. In addition, strategies to increase ridership through physical integration and payment of transportation modes are expected to encourage public interest in using public transportation.

However, the Board of Directors is also expected to be able to increase non-fare box business revenue through advertising, consulting and technical services, retail and leasing, retail, telecommunications, and event/activation. So that gradually but surely it can reduce the burden of subsidies and be able to survive independently.

GCG Implementation and the Role of the Board of Commissioners in the Implementation of Whistleblowing System (WBS)

In carrying out supervision, the Board of Commissioners is subject to the provisions of Corporate Governance, so the evaluation of the implementation of Corporate Governance is carried out regularly through reporting the achievement of GCG scores both monthly and annually. The evaluation of the conformity of Governance is also carried out internally by the Board of Commissioners and its Committee.

Dewan Komisaris memainkan peran sentral dalam mekanisme pelaporan *Whistleblowing System* (WBS), sesuai dengan matriks tindak lanjut yang telah ditetapkan serta bertanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pelaporan.

Dewan Komisaris juga menghadiri kegiatan sosialisasi WBS sebagai bentuk peran aktif dalam memberikan dukungan langsung kepada karyawan dan memastikan pemahaman yang baik tentang sistem ini. Ini akan memperkuat komitmen organisasi terhadap WBS dan memastikan kesuksesan implementasinya.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dukungan terhadap fungsi pengawasan Dewan Komisaris dioptimalkan oleh dibentuknya Komite Audit. Keberadaan komite Audit telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip-prinsip GCG.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Sejauh ini, Dewan Komisaris menilai kinerja Komite Audit cukup memuaskan karena senantiasa memberikan *feedback* yang memadai kepada Dewan Komisaris dan menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Piagam Komite.

Setiap tahunnya baik Dewan Komisaris maupun Komite memiliki program kerja yang terukur atau *Key Performance Indicator* (KPI) dan dilakukan penilaian pencapaian di setiap semester. Hasil penilaian kinerja juga dilaporkan langsung kepada Pemegang Saham. Penilaian bisa meliputi struktur dan komposisi Dewan Komisaris, pencapaian kinerja Perusahaan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan, pelaksanaan pengawasan, dan penerapan GCG.

Informasi Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan, yakni berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) No. 001/2023 tanggal 21 Maret 2023, dan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) No. 001/KPS/123/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023.

The Board of Commissioners plays a central role in the reporting mechanism of the Whistleblowing System (WBS), in accordance with the established follow-up matrix, and is responsible for ensuring transparency and accountability in the reporting process.

The Board of Commissioners also attends WBS socialization activities as an active role in providing direct support to employees and ensuring a good understanding of this system. This will strengthen the organization's commitment to the WBS and ensure the success of its implementation.

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

Support for the supervisory function of the Board of Commissioners is optimized by the formation of the Audit Committee. The existence of the Audit Committee complies with applicable regulations and aims to perfect the implementation of GCG principles.

The Audit Committee is a committee established and accountable to the Board of Commissioners, assisting in the execution of the Board of Commissioners' duties and functions to ensure the effectiveness of the internal system and the effectiveness of external and internal auditors' duties by monitoring and evaluating the planning and implementation of audits, as well as monitoring the follow-up of audit results to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.

So far, the Board of Commissioners considers the performance of the Audit Committee to be satisfactory because it consistently provides adequate feedback to the Board of Commissioners and performs its duties and functions in accordance with the Committee Charter.

Each year, both the Board of Commissioners and the Committee have measurable work programs or Key Performance Indicators (KPIs), and an assessment of achievements is made each semester. The results of the performance evaluation are also reported directly to the Shareholders. Evaluations can include the structure and composition of the Board of Commissioners, the Company's performance achievements, adherence to laws and regulations, commitment to advancing the Company's interests, the execution of supervision, and the implementation of GCG.

Information on Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Throughout 2023, up to the signing of this Annual Report, there have been changes in the structure and composition of the Company's Board of Commissioners, based on the Shareholders' Resolution (KPPS) No. 001/2023 dated March 21, 2023, and the Shareholders' Resolution (KPPS) No. 001/KPS/123/X/2023 dated October 5, 2023.

Berikut kronologi perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana terlampir berikut ini.

Below is the chronology of changes in the structure and composition of the Company's Board of Commissioners as attached herein.

Komisaris yang Berhenti Menjabat Commissioner No Longer Serving	Komisaris yang Baru Menjabat Newly Appointed Commissioner	Keterangan Remarks
Romy Barenco		Diberhentikan dengan hormat sejak tanggal 17 Juli 2023 Honorable discharged with effect from July 17, 2023
	Azas Tigor Nainggolan	Diangkat menjadi Komisaris Perusahaan sejak tanggal 21 Maret 2023 Appointed as Commissioner of the Company since March 21, 2023
	Mohamad Pramintohadi Sukarno	Diangkat menjadi Komisaris Perusahaan sejak tanggal 05 Oktober 2023 Appointed as Commissioner of the Company since October 05, 2023

Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris PT LRT Jakarta per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Thus, the composition of the Board of Commissioners of PT LRT Jakarta as of December 31, 2023, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Iwan Takwin	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham No. 103/UT2000/X/2022/0321 tanggal 7 Oktober 2022. Shareholders' Resolution No. 103/ UT2000/X/2022/0321 dated October 7, 2022.	Pertama First
Azas Tigor Nainggolan	Komisaris Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham No. 001/KPS/123/X/2023 tanggal 21 Maret 2023 Shareholders' Resolution No. 001/ KPS/123/X/2023 dated March 21, 2023	Pertama First
Mohamad Pramintohadi Sukarno	Komisaris Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham No. 001/KPS/123/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 Shareholders' Resolution No. 001/ KPS/123/X/2023 dated October 5, 2023	Pertama First

Segenap Dewan Komisaris berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk kepentingan Para Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan Lainnya.

The entire Board of Commissioners is committed to carrying out this mandate by consistently promoting the principles of good corporate governance for the benefit of the Shareholders and Other Stakeholders.

Apresiasi

Atas seluruh capaian Perusahaan selama tahun 2023, Kami selaku Dewan Komisaris PT LRT Jakarta menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas semangat, dedikasi dan pengabdian segenap jajaran Direksi, Manajemen dan Karyawan dalam merealisasikan capaian kinerja Perusahaan. Tak lupa Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham, konsumen atau pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaannya dalam mendukung kelangsungan usaha.

Appreciation

For all the Company's achievements during 2023, we, the Board of Commissioners of PT LRT Jakarta, express our appreciation and gratitude for the enthusiasm, dedication, and devotion of the entire Board of Directors, Management, and Employees in realizing the Company's performance achievements. The Board of Commissioners also expresses gratitude to the Shareholders, consumers or customers, business partners, and other stakeholders for their trust in supporting the Company's business continuity.

Jakarta, 27 Juni 2024
Jakarta, June 27, 2024



Iwan Takwin
Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi

Report of the Board of Directors



Dengan komitmen dan kerja sama yang baik, PT LRT Jakarta dapat terus memajukan transportasi massal di Jakarta menuju masa depan yang lebih baik.

With good commitment and cooperation, PT LRT Jakarta can continue to advance mass transportation in Jakarta towards a better future.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, PT LRT Jakarta dapat melewati tahun 2023 dengan pencapaian kinerja yang optimal. Seiring dengan visi Perusahaan yaitu "Menjadi Solusi Mobilitas Publik Terbaik di Indonesia", suatu kehormatan bagi saya dapat mewakili seluruh anggota direksi menyampaikan kinerja Perusahaan, dimana pada tahun 2023 Perusahaan berhasil mempertahankan kinerja baik secara keuangan maupun operasional. Pencapaian tersebut merupakan landasan kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Selanjutnya perkenankanlah kami selaku Direksi LRT Jakarta untuk menyampaikan pengelolaan Perusahaan di tahun buku 2023.

Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,

We express our gratitude to God Almighty, as PT LRT Jakarta has navigated through the year 2023 with optimal performance achievements. In line with the Company's vision of "To Be the Best Public Mobility Solution in Indonesia," it is an honor for me to represent all members of the board in presenting the Company's performance, where in 2023 the Company succeeded in maintaining satisfactory performance both financially and operationally. These achievements provide a solid foundation for a brighter future. Allow us, the Board of Directors of LRT Jakarta, to present the Company's management for the 2023 fiscal year.

Hendri Saputra
Direktur Utama
President Director



Perspektif Ekonomi Makro

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data World Bank pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 hanya mencapai 2,1% atau melemah dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 3,5% dan diproyeksikan akan melambat menjadi 3,1% pada tahun 2024. Secara umum, kondisi ini dipengaruhi oleh tekanan inflasi global yang meningkat, pengetatan pasar tenaga kerja dan kenaikan suku bunga yang sangat tinggi pada sejumlah negara maju, perubahan iklim yang ekstrim, ketegangan perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok, ketegangan Rusia-Ukraina hingga konflik Israel-Palestina yang menambah ketegangan geopolitik.

Macro-Economic Perspective

In 2023, global economic growth experienced a slowdown. According to World Bank data, global economic growth in 2023 reached only 2.1%, down from 3.5% in 2022, and is projected to further slow to 3.1% in 2024. Overall, this condition is influenced by increased global inflationary pressures, tightening labor markets, and significantly higher interest rates in several advanced economies, extreme climate change, tensions in the US-China trade relations, Russia-Ukraine tensions, and the Israel-Palestine conflict adding to geopolitical tensions.

Berdasarkan data dari *World Economic Outlook* (WEO) 2023 yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dunia melambat dari 3,5% pada tahun 2022 menjadi 3,1% pada tahun 2023 serta diproyeksikan 3,1% pada tahun 2024. Selain itu, WEO menyebutkan inflasi global tahun 2023 diperkirakan sebesar 6,8% atau menurun dari tahun 2022 sebesar 8,8%. Sedangkan pada tahun 2024 diproyeksikan inflasi akan turun menjadi 5,8%.

Di tengah perekonomian dunia yang melambat, kondisi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 juga mengalami penurunan pertumbuhan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05% (yoY) atau lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31% (yoY). dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pengeluaran Konsumsi Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83%.

Di sisi lain, seperti dikutip dari Laporan Perekonomian Provinsi yang dirilis Bank Indonesia menyatakan bahwa perekonomian DKI Jakarta dengan pangsa 16,62% terhadap nasional, pada triwulan III 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,93% (yoY), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (5,13% yoY). Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi DKI Jakarta terutama disebabkan oleh konsumsi Pemerintah yang terkontraksi serta perlambatan ekspor dan investasi. Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 15,87% (yoY), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh positif (6,06% yoY) disebabkan oleh kontraksi pada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Selanjutnya, perlambatan juga terjadi pada ekspor yang pada triwulan III 2023 tumbuh 5,82% (yoY), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (8,93% yoY) yang dipengaruhi oleh kontraksi pada ekspor barang terutama untuk komoditas produk kimia, ikan dan udang, serta lemak dan minyak hewan/nabati seiring dengan tertahannya ekonomi Tiongkok. Adapun kinerja investasi juga tumbuh sedikit lebih rendah menjadi sebesar 4,17% (yoY) dari triwulan sebelumnya sebesar 4,22% (yoY) yang terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja investasi swasta sejalan dengan *wait and see* investor jelang Pemilu 2024. Di sisi lain, permintaan domestik yang tercermin dari kinerja konsumsi rumah tangga masih tumbuh kuat.

Memasuki triwulan IV 2023, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan masih akan tetap tumbuh tinggi meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan terutama dipengaruhi oleh melambatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan ekspor sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian perekonomian global. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang masih cukup baik diperkirakan ditopang oleh baiknya kinerja investasi,

Based on data from the *World Economic Outlook* (WEO) 2023 released by the International Monetary Fund (IMF), global Gross Domestic Product (GDP) growth slowed from 3.5% in 2022 to 3.1% in 2023 and is projected to remain at 3.1% in 2024. Additionally, the WEO mentions that global inflation in 2023 is estimated at 6.8%, down from 8.8% in 2022, with projected inflation in 2024 to decrease further to 5.8%.

Amidst the slowing global economy, national economic growth conditions in 2023 also experienced a decline. According to data from BPS-Statistics Indonesia, Indonesia's economic growth was 5.05% (year-on-year) in 2023, lower than the 5.31% growth achieved in 2022. In terms of production, the highest growth occurred in the Transportation and Warehousing sector at 13.96%, while in terms of expenditure, the highest growth was achieved by Non-Profit Institutions Serving Households (PK-LNPRT) expenditure at 9.83%.

On the other hand, as quoted from the Provincial Economic Report released by Bank Indonesia, the economy of DKI Jakarta, with a share of 16.62% of the national economy, remained resilient in the third quarter of 2023, growing at 4.93% (yoY), although lower than the previous quarter (5.13% yoY). From the demand side, the slowdown in the economy of DKI Jakarta was mainly caused by government consumption contracting, as well as slowing exports and investment. Government consumption contracted by 15.87% (yoY), lower than the previous quarter's positive growth (6.06% yoY), due to contractions in employee spending and expenditure on goods and services. Furthermore, the slowdown also occurred in exports, which grew by 5.82% (yoY) in the third quarter of 2023, lower than the previous quarter (8.93% yoY), influenced by contractions in exports of goods, especially for chemical products, fish and shrimp, as well as fats and oils, in line with the slowdown in the Chinese economy. Investment performance also grew slightly lower at 4.17% (yoY) from the previous quarter's 4.22% (yoY), primarily due to the declining performance of private investment in line with investors adopting a wait-and-see approach ahead of the 2024 election. On the other hand, domestic demand, reflected in household consumption performance, continued to grow strongly.

Entering the fourth quarter of 2023, the economy of DKI Jakarta is expected to continue to grow at a high rate, although slower than the previous quarter. This slowdown is mainly influenced by the slowing performance of household consumption and exports, in line with the continued high uncertainty in the global economy. On the other hand, the still relatively good economic growth of DKI Jakarta is expected to be supported by the positive

konsumsi Pemerintah, dan konsumsi LNPRT yang masing-masing didorong oleh akselerasi penyelesaian proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta, penyerapan belanja Pemerintah pada akhir tahun, serta peningkatan aktivitas jelang pemilu 2024.

Inisiasi Peran Direksi dalam Kebijakan Strategis Perusahaan

Direksi LRT Jakarta senantiasa berkomitmen dalam merancang kebijakan strategis dan memantau penerapannya guna menggapai hasil optimal yang berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik. Sebagai perusahaan transportasi publik, LRT Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam mendukung aktivitas masyarakat dan komunitas.

Sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan, Perusahaan berfokus pada kegiatan utama untuk mewujudkan pelayanan dan operasi yang handal, peningkatan pendapatan *farebox* dan *non-farebox*, serta ikut berkontribusi dalam penyiapan operasi LRTJ Fase Lanjutan. Untuk mendukung kinerja tahun 2023, manajemen berfokus dalam realisasi program kerja sesuai dengan yang direncanakan, memperkuat kolaborasi, serta membangun fondasi untuk keberlanjutan bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Program kerja tahun 2023 tercermin dalam tema TRANSFORM (*Transforming business process, Revenue enhancement, Accelerate leveraging asset, Non-farebox business improvement, Synergy, Foundation for high performance organization, Operation excellence, Ready for continuing next chapter of LRTJ, dan Maintaining service excellence*).

Perusahaan terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan baik dari sisi pendapatan tiket maupun non-subsidi. Hal ini diiringi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan prima, aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa LRT Jakarta. Perusahaan melakukan beragam kegiatan aktivasi secara rutin di stasiun-stasiun LRT Jakarta dengan mengajak beragam komunitas, instansi pendidikan maupun masyarakat umum. Ajakan menggunakan transportasi umum kami selalu gaungkan kepada masyarakat melalui program edukasi EduTour agar masyarakat memahami sejak dulu manfaat menggunakan transportasi umum yang ramah lingkungan, bebas macet dan nyaman.

Saat ini pendapatan perusahaan masih ditopang oleh pendapatan subsidi sarana dan prasarana, disusul oleh pendapatan *non-farebox* dan pendapatan *farebox* (tiket). Di masa yang akan datang, Perusahaan akan fokus pada peningkatan pendapatan *non-farebox* secara masif sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

performance of investment, government consumption, and non-profit institutions serving household (LNPRT) consumption, each driven by the acceleration of both government and private strategic projects' completion, government spending absorption at the end of the year, and increased activity ahead of the 2024 election.

Initiation of the Board of Directors' Role in Strategic Corporate Policies

The Board of Directors of LRT Jakarta remains committed to designing strategic policies and monitoring their implementation to achieve optimal and sustainable results for a better future. As a public transportation company, LRT Jakarta continues to strive to provide the best service in supporting the activities of the community and society.

In line with the established strategic objectives, the Company focuses on core activities to achieve reliable service and operations, increase farebox and non-farebox revenue, and contribute to the preparation of operations for the next phase of LRT Jakarta. To support the performance of 2023, management focuses on realizing the work program as planned, strengthening collaboration, and building a foundation for the Company's business sustainability in the future. The 2023 work program is reflected in the TRANSFORM theme (*Transforming business process, Revenue enhancement, Accelerate leveraging asset, Non-farebox business improvement, Synergy, Foundation for high performance organization, Operation excellence, Ready for continuing next chapter of LRT Jakarta, and Maintaining service excellence*).

The Company continues efforts to increase revenue from both farebox and non-subsidized sources. This is accompanied by the goal of providing excellent, safe, and comfortable services for all users of LRT Jakarta. The Company regularly conducts various activation activities at LRT Jakarta stations by involving various communities, educational institutions, and the general public. The call to use public transportation is always echoed to the public through the EduTour education program so that the community understands from an early age the benefits of using environmentally friendly, congestion-free, and comfortable public transportation.

Currently, the Company's revenue is still supported by subsidies for facilities and infrastructure, followed by non-farebox revenue and farebox (ticket) revenue. In the future, the Company will focus on massively increasing non-farebox revenue to reduce reliance on subsidies provided by the DKI Jakarta Provincial Government.

Di sisi lain, PT LRT Jakarta tengah menyusun *masterplan* dengan berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas transportasi massal di Jakarta, PT LRT Jakarta memiliki komitmen untuk mengoptimalkan efisiensi dan pelayanan bagi masyarakat. Beberapa langkah yang telah diambil dalam implementasi *masterplan* meliputi beberapa hal diantaranya; PT LRT Jakarta kerap memberikan masukan dalam pembangunan jalur dan stasiun LRT Fase 1B agar sesuai dengan rencana, efektif dan efisien. Ini termasuk pengembangan jalur, perawatan rel, dan fasilitas stasiun.

PT LRT Jakarta juga terus berupaya mengintegrasikan LRT dengan moda transportasi lain, seperti Transjakarta, DAMRI dan Bluebird. Hal ini bertujuan untuk memudahkan perpindahan penumpang dan meningkatkan koneksi kota. Selain itu PT LRT Jakarta terus berupaya meningkatkan layanan, termasuk kebersihan, ketepatan waktu, dan kenyamanan bagi penumpang. Namun, Direksi terus memantau dan mengevaluasi implementasi *masterplan* agar tujuan keberlanjutan dan pelayanan yang lebih baik dapat tercapai. Direksi harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian yang berlaku, serta memperhatikan keberlanjutan finansial. Dengan komitmen dan kerja sama yang baik, PT LRT Jakarta dapat terus memajukan transportasi massal di Jakarta menuju masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, sepanjang tahun 2023, Perusahaan melakukan beberapa inovasi dan pengembangan di bidang IT diantaranya ada *Procure to Pay*, dimana proses pengadaan dari awal permintaan, proses seleksi vendor, laporan pekerjaan hingga proses pembayaran terintegrasi secara baik dengan menggunakan aplikasi *M-Files*, *e-proc*, serta *Dynamic365*. Saat ini pengembangan masih berlangsung hingga pengelolaan *inventory* di Maximo yang masih terus di-explore penggunaannya. Sistem verifikasi subsidi juga telah disiapkan untuk memudahkan proses monitoring anggaran yang dapat diakses oleh *stakeholder* dari Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi ini memberikan manfaat dan efisiensi dalam proses *monitoring* anggaran yang sebelumnya masih dikelola secara manual.

Kedepannya, Perusahaan sedang mengejar implementasi pengembangan sistem *ticketing* dan *maintenance, permit to work & job safety analysis*, remediasi IT security dan juga implementasi *Disaster Recovery Center* (DRC).

Kendala dan Solusi Penanganannya

Dalam menjalankan penugasan pengusahaan aset prasarana dan sarana LRT, Perusahaan dihadapkan pada berbagai macam tantangan, terutama yang berasal dari eksternal, seperti adanya situasi *force majeur*, perubahan regulasi dan kebijakan, serta terbatasnya fiskal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk subsidi transportasi umum. Untuk memitigasi hal tersebut, Perusahaan berusaha

On the other hand, PT LRT Jakarta is currently drafting a master plan focused on sustainable development. As a company responsible for mass transportation in Jakarta, PT LRT Jakarta is committed to optimizing efficiency and service for the public. Some of the steps taken in the implementation of the master plan include; PT LRT Jakarta often provides input in the development of the LRT Phase 1B lines and stations to ensure they are planned, effective, and efficient. This includes the development of lines, rail maintenance, and station facilities.

PT LRT Jakarta also continues to strive to integrate LRT with other modes of transportation, such as Transjakarta, DAMRI, and Bluebird. This aims to facilitate passenger transfers and enhance city connectivity. In addition, PT LRT Jakarta continues to strive to improve services, including cleanliness, punctuality, and comfort for passengers. However, the Board of Directors continues to monitor and evaluate the implementation of the master plan to ensure that the goals of sustainability and improved service are achieved. The Board of Directors must ensure that each step taken is in accordance with legal provisions and applicable agreements and considers financial sustainability. With good commitment and cooperation, PT LRT Jakarta can continue to advance mass transportation in Jakarta towards a better future.

Meanwhile, throughout the year 2023, the Company carried out several innovations and developments in the field of IT, including Procure to Pay, where the procurement process from the initial request, vendor selection process, work reporting to the payment process is well integrated using M-Files, e-proc, and Dynamic365 applications. Currently, development is still ongoing until inventory management in Maximo, which is still being explored for its use. The subsidy verification system has also been prepared to facilitate the budget monitoring process that can be accessed by stakeholders from the DKI Jakarta Provincial Transportation Agency. This application provides benefits and efficiencies in the budget monitoring process, which was previously managed manually.

In the future, the Company is pursuing the implementation of the development of ticketing and maintenance systems, permit to work & job safety analysis, IT security remediation, and also the implementation of a Disaster Recovery Center (DRC).

Challenges and Solutions

In managing the assets of LRT infrastructure and facilities, the Company faces various challenges, especially external ones, such as force majeure situations, changes in regulations and policies, and limited fiscal resources of the DKI Jakarta Provincial Government for public transportation subsidies. To mitigate these, the Company strives to adapt to business dynamics, one of which is

untuk dapat beradaptasi dengan dinamika bisnis yang terjadi, salah satunya dengan mulai meningkatkan kinerja pengembangan bisnis *non-farebox* serta melakukan inisiatif program peningkatan *ridership*.

Dengan berjalannya proyek pembangunan fase 1B Velodrome-Manggarai di kuartal akhir 2023, Perusahaan memiliki kesempatan untuk menyiapkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk dapat beroperasi dengan lingkup bisnis yang lebih besar serta melakukan perbaikan berkelanjutan agar LRT Jakarta ke depannya dapat mandiri secara finansial dan mengurangi ketergantungan terhadap subsidi.

Perusahaan melakukan pengembangan kemampuan sumber daya manusia melalui berbagai macam program peningkatan kompetensi, baik pelatihan yang sifatnya *mandatory* maupun program pengembangan diri. Hal ini diwujudkan melalui *Learning Management System (LMS)* dan program pelatihan lain yang dapat meningkatkan *hardskill* maupun *softskill* insan LRT Jakarta. Diharapkan melalui program ini, kualitas insan LRTJ dapat meningkat untuk mampu beradaptasi dengan dinamika bisnis serta menghadapi tantangan-tantangan lain ke depannya.

Kinerja Usaha dan Pemenuhan Target RKAP

Secara umum, kinerja PT LRT Jakarta pada periode Januari - Desember 2023 sudah bisa memenuhi target yang ditetapkan sesuai RKAP 2023, baik kinerja dari sisi finansial maupun operasional. Pendapatan Perusahaan menunjukkan tren positif yang ditunjukkan dengan peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2020 serta berpengaruh terhadap pencapaian laba yang juga diperoleh Perusahaan.

Di tahun 2023, Perusahaan merencanakan perolehan dari beberapa komponen substansial sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Perusahaan. Perbandingan antara rencana dan realisasi adalah sebagai berikut:

1. Laba Usaha

Pencapaian Laba Usaha pada 2023 adalah sebesar Rp15,41 miliar, meningkat sebesar 87,05% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp8,24 miliar. Kenaikan/penurunan tersebut disebabkan oleh tumbuhnya jumlah penumpang dan pendapatan subsidi dari Pemprov DKI Jakarta.

2. Pendapatan

Di tahun 2023, LRT Jakarta membukukan pendapatan sebesar Rp271,60 miliar. Angka tersebut meningkat sebesar 26,50% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp214,70 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah aktivitas di perusahaan sehingga realisasi belanja menjadi lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dan menyebabkan pendapatan subsidi meningkat signifikan. Selain itu, meningkatnya jumlah penumpang menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan tiket.

by starting to improve the performance of non-farebox business development and initiating ridership increase programs.

With the completion of the Phase 1B Velodrome-Manggarai construction project in the last quarter of 2023, the Company has the opportunity to prepare all available resources to operate with a larger business scope and make continuous improvements so that LRT Jakarta can be financially independent and reduce reliance on subsidies in the future.

The Company develops human resource capabilities through various competency development programs, including mandatory training and self-development programs. This is realized through the Learning Management System (LMS) and other training programs that can improve both the hard skills and soft skills of LRT Jakarta personnel. Through this program, it is hoped that the quality of LRTJ personnel can improve to adapt to business dynamics and face other future challenges.

Business Performance and Fulfillment of the Company's Work Plan and Budget Targets

Generally, the performance of PT LRT Jakarta for the period January - December 2023 has met the targets set according to the Company's 2023 Work Plan and Budget, both in terms of financial and operational performance. The company's revenue shows a positive trend with a significant increase from 2020 and has an impact on the achievement of profits also obtained by the Company.

In 2023, the Company plans to obtain from several substantial components as a benchmark in assessing the Company's performance. The comparison between the plan and realization is as follows:

1. Operating Profit

The Company's Operating Profit for 2023 amounted to IDR15.41 billion, an increase of 87.05% compared to the previous year of IDR8.24 billion. The increase was caused by the growth in the number of passengers and subsidy revenue from the DKI Jakarta Provincial Government.

2. Revenue

In 2023, LRT Jakarta recorded a revenue of IDR271.60 billion. This figure increased/decreased by 26.50% compared to the previous year of IDR214.70 billion. The increase was caused by the increase in activities at the Company that has led to higher spending realization compared to the previous year and caused a significant increase in subsidy revenue. Additionally, the growing number of passengers has been a supporting factor in increasing revenue from ticket sales.

3. Total Aset

Jumlah Aset Perusahaan pada akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp381,49 miliar, meningkat sebesar Rp42,13 miliar atau 12,42% bila dibandingkan dengan akhir tahun 2022 yang tercatat serbesar Rp339,35 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh telah dilakukannya pengakuan pencatatan persediaan sebesar Rp12,95 miliar dan terdapat peningkatan pendapatan subsidi dari tahun 2022 sebesar 50,39% yaitu 51,8 miliar.

Di sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak melakukan revisi target (RKAP) mengacu kepada kebijakan yang diterapkan oleh induk perusahaan (PT Jakpro), tetapi untuk memitigasi perubahan dan dinamika bisnis yang terjadi, Perusahaan menyusun internal target sebagai suplemen atas RKAP yang sudah ditetapkan di awal tahun. Hal tersebut dilakukan mengingat dinamisnya proses pemberian subsidi antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta, PT Jakpro dan PT LRT Jakarta serta membutuhkan waktu sampai dengan pengesahan Kontrak Subsidi di Triwulan I 2023 dan mempengaruhi perencanaan Perusahaan yang telah disusun sebelumnya.

Prospek Usaha Tahun 2024

Seperti dikutip dari Laporan perekonomian Provinsi yang dirilis oleh Bank Indonesia, menyatakan bahwa pada 2023 pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diprakirakan masih tumbuh tinggi pada kisaran 4,8-5,2% (yoY) sejalan dengan mobilitas masyarakat yang terus meningkat, optimisme masyarakat yang masih baik, semakin tingginya aktivitas pariwisata, MICE dan event baik skala nasional maupun internasional, serta berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur strategis baik Pemerintah maupun swasta. Dari sisi pengeluaran, motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pada 2023 masih bersumber dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada 2023 akan ditopang oleh pertumbuhan beberapa LU utama yaitu perdagangan besar dan eceran dan reparasi kendaraan bermotor, konstruksi, serta informasi dan komunikasi.

Pada 2024, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diprakirakan meningkat pada kisaran 4,8-5,6% (yoY) sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik dan masih baiknya permintaan eksternal. Meningkatnya perekonomian domestik didorong oleh membaiknya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi serta masih baiknya permintaan eksternal sejalan dengan perbaikan ekonomi negara-negara ASEAN dan Timur Tengah. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada 2024 akan ditopang oleh meningkatnya 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Namun demikian, beberapa risiko yang perlu dicermati yang dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu berlanjutnya tensi geopolitik, tertahannya pemulihan ekonomi Tiongkok, dan keberlanjutan stance moneter ketat AS.

3. Total Assets

The Company's total assets as of the end of 2023 amounted to IDR381.49 billion, an increase of IDR42.13 billion or 12.42% compared to the end of 2022 of IDR339.35 billion. This was mainly due to the recognition of inventory recording of IDR12.95 billion and an increase in subsidy revenue by 50.39% from 2022, amounted to IDR51.8 billion.

Throughout 2023, the Company did not revise its Work Plan and Budget targets according to the policies applied by the parent company (PT Jakpro), but to mitigate changes and business dynamics that occurred, the Company compiled internal targets as a supplement to the Company's Work Plan and Budget established at the beginning of the year. This was done considering the dynamic process of subsidy provision between the DKI Jakarta Transportation Agency, PT Jakpro, and PT LRT Jakarta, which took time until the Subsidy Contract was ratified in the first quarter of 2023 and had an impact on the Company's previously planned activities.

Business Prospects for 2024

As quoted from the Provincial Economic Report released by Bank Indonesia, it is stated that in 2023, the economic growth of DKI Jakarta is forecasted to remain high in the range of 4.8-5.2% (yoY) in line with the continued increase in community mobility, good public optimism, the increasing tourism activities, MICE and events both nationally and internationally, and the ongoing various strategic infrastructure projects by both the Government and private sectors. From the expenditure side, the main driving force of economic growth in DKI Jakarta in 2023 still comes from household consumption and investment. Meanwhile, from the business sector perspective, the economy of DKI Jakarta in 2023 will be supported by the growth of several main sectors, namely wholesale and retail trade, motor vehicle repair, construction, as well as information and communication.

In 2024, the economic growth of DKI Jakarta is forecasted to increase in the range of 4.8-5.6% (yoY) in line with the increasing domestic demand and the still good external demand. The increase in domestic economy is driven by the improvement in household consumption, government consumption, and investment as well as the still good external demand in line with the improvement of economies in ASEAN and Middle Eastern countries. Meanwhile, from the business sector perspective, the economy of DKI Jakarta in 2024 will be supported by the increase of 5 (five) main economic sectors, namely trade, construction, manufacturing industry, information and communication, as well as financial services. However, some risks need to be noted that may hinder further improvement, mainly including the continuation of geopolitical tensions, the delayed recovery of the Chinese economy, and the sustainability of the tight monetary stance of the United States.

Inflasi DKI Jakarta pada 2023 diprakirakan akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan terkendali dalam rentang sasaran $3\pm1\%$ (yoY). Pada 2024, inflasi Jakarta juga diperkirakan akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi yang semakin rendah sebesar $2.5\pm1\%$ (yoY). Perkiraan tersebut terutama didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif pasca berlangsungnya *El-Nino* pada 2023 yang juga didukung oleh penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Berdasarkan uraian di atas, LRT Jakarta telah menyiapkan langkah strategis dalam menjawab tantangan di tahun 2024. PT LRT Jakarta terus berfokus pada peningkatan pendapatan baik dari perolehan *ridership / farebox* dan bisnis *non-farebox* dengan menerapkan strategi optimalisasi program kerja perusahaan, program promosi, dan peningkatan *awareness*, serta peningkatan fasilitas layanan kepada pelanggan. Program-program bisnis *non-farebox* juga terus dikembangkan untuk dapat menghasilkan pendapatan diluar tiket serta mengurangi ketergantungan terhadap subsidi. Selain itu, PT LRT Jakarta juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swasta sebagai bentuk kolaborasi dengan *stakeholder* dalam menjalankan bisnisnya.

Pada tahun 2024, Perusahaan berfokus pada pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan yang diperoleh dengan melakukan rencana pelaksanaan program-program strategis yang terdiri dari:

1. Pemenuhan *Service & Operation Excellence*

Sebagai moda transportasi massal berbasis rel, LRT Jakarta diberikan mandat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat. Perusahaan akan menyediakan layanan pelanggan yang maksimal serta melakukan kegiatan operasi dan perawatan sesuai dengan rencana, untuk memastikan layanan LRT Jakarta dapat beroperasi secara optimal.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Perusahaan akan melakukan pemenuhan program kerja sesuai dengan kontrak subsidi yang telah ditetapkan dengan melakukan strategi percepatan realisasi program kerja dan mengoptimalkan proses pengadaan yang efektif dan efisien serta melakukan proses monitoring atas kontrak yang berjalan sehingga program yang direncanakan dapat berjalan sesuai jadwal. Proses ini akan dievaluasi secara berkala sehingga program kerja Perusahaan dapat berjalan dan dilakukan mitigasi atas risiko-risiko yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang.

Inflation in DKI Jakarta in 2023 is forecasted to decrease compared to the previous year and is well-controlled within the target range of $3\pm1\%$ (yoY). In 2024, Jakarta's inflation is also expected to remain well-controlled, with a lower inflation target of $2.5\pm1\%$ (yoY). These forecasts are mainly supported by the more conducive weather conditions after the El-Nino phenomenon in 2023, which is also supported by the strengthening of the inflation control program through the National Movement for Controlling Food Inflation (GNPIP).

Based on the above description, LRT Jakarta has prepared strategic measures to address the challenges in 2024. PT LRT Jakarta continues to focus on increasing revenue from both *ridership/farebox* and *non-farebox* businesses by implementing optimization strategies for the Company's work programs, promotion programs, and increasing awareness, as well as improving service facilities for customers. Non-farebox business programs are also continually being developed to generate revenue beyond ticket sales and reduce dependency on subsidies. Additionally, PT LRT Jakarta is committed to continue collaborating with the Government, SOEs/BUMDs, and the Private Sector as a form of collaboration with stakeholders in conducting its business.

In 2024, the Company focuses on its sustainable growth achieved through the implementation of strategic programs, including:

1. Fulfillment of Service & Operation Excellence

As a rail-based mass transportation mode, LRT Jakarta is mandated by the DKI Jakarta Provincial Government to provide optimal service to the public. The Company will provide maximum customer service and conduct operational and maintenance activities according to plan to ensure that LRT Jakarta services can operate optimally.

To achieve this, the Company will fulfill work programs according to established subsidy contracts by accelerating the realization of work programs, optimizing effective and efficient procurement processes, and monitoring ongoing contracts to ensure planned programs run on schedule. This process will be periodically evaluated to ensure the Company's work programs run smoothly and mitigate any risks that may arise in the future.

2. Strategi Peningkatan *Ridership*

Seiring dengan mulai meredanya pandemi covid-19 dan mulai normalnya aktivitas masyarakat di luar rumah, Perusahaan juga akan terus melakukan program-program kerja yang mampu membuat masyarakat dapat menggunakan transportasi umum lagi, khususnya menggunakan LRT Jakarta. Beberapa inisiatif program yang akan dilakukan terdiri dari:

- Integrasi fisik dan pembayaran moda transportasi di Jakarta.
- Revitalisasi kawasan area stasiun LRT Jakarta.
- Pemanfaatan area Depo LRT Jakarta dalam kegiatan komunitas.
- Program edukasi dan aktivitas *event* di Stasiun maupun Depo LRT Jakarta.
- Penyusunan *Calender of Event* LRT Jakarta tahun 2024.
- Program peningkatan *brand awareness* LRT Jakarta kepada masyarakat.
- Sinergi program promosi dan *event* LRT Jakarta dengan Jakpro Group maupun dengan para *stakeholder* lainnya.

3. Strategi Peningkatan Bisnis *Non-Farebox*

Pada tahun 2024, Perusahaan akan terus mengoptimalkan kembali bisnis *non-farebox* sehingga bisa berkontribusi positif terhadap pendapatan dan laba Perusahaan. Kegiatan bisnis *non-farebox* akan difokuskan pada aspek-aspek yang cukup potensial sebagai berikut:

- Periklanan (*Advertising*)
- Jasa teknis dan konsultansi
- Retail dan sewa menyewa
- Event & activation*
- Telekomunikasi

Sesuai dengan rencana Perusahaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi, manajemen berfokus pada peningkatan pendapatan *non-farebox*. Sesuai dengan AD/ART, Perusahaan memiliki 23 bidang usaha, tetapi untuk saat ini prospek utama pendapatan *non-farebox* berasal dari kegiatan ritel dan sewa menyewa, jasa konsultansi serta operasi & perawatan, dan periklanan.

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, perusahaan mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Periode 2020-2024 yang berfokus pada 3 tujuan strategis, yaitu menjadi penyedia layanan transportasi publik yang andal, memaksimalkan profitabilitas perusahaan, dan ekspansi jaringan pelayanan. Sedangkan untuk rencana jangka pendek, perusahaan mengacu kepada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang mengatur detail serta sasaran yang dicapai pada tahun 2023 dengan fokus pada realisasi program kerja sesuai rencana, memperkuat kolaborasi, serta membangun fondasi untuk keberlanjutan bisnis Perusahaan di masa yang akan datang.

2. Ridership Improvement Strategy

With the easing of the COVID-19 pandemic and the normalization of public activities, the Company will continue to implement programs that encourage the public to use public transportation again, especially LRT Jakarta. Some initiatives include:

- Physical integration and payment of transportation modes in Jakarta.
- Revitalization of LRT Jakarta station area.
- Utilization of LRT Jakarta Depo area for community activities.
- Education programs and event activities at LRT Jakarta stations and Depo.
- Preparation of LRT Jakarta's 2024 Event Calendar.
- Increasing brand awareness of LRT Jakarta among the public.
- Synergy of promotion programs and events of LRT Jakarta with Jakpro Group and other stakeholders.

3. Non-Farebox Business Improvement Strategy

In 2024, the Company will continue to optimize non-farebox businesses to positively contribute to the Company's revenue and profit. Non-farebox business activities will focus on the following potential aspects:

- Advertising
- Technical and consulting services
- Retail and leasing
- Events & activations
- Telecommunications

In accordance with the Company's plan to reduce dependence on subsidies, management is focused on increasing non-farebox revenue. According to the Articles of Association, the Company operates in 23 business fields, but currently, the main prospects for non-farebox revenue come from retail and leasing activities, consulting services, operation & maintenance, and advertising.

In the execution of business activities, the company refers to the Company's 2020-2024 Long-Term Plan, which focuses on three strategic objectives: to become a reliable public transportation service provider, to maximize the Company's profitability, and to expand the service network. For the short-term plan, the Company refers to its Work Plan and Budget, which outlines the details and targets to be achieved in 2023 with a focus on the realization of work programs as planned, strengthening collaboration, and building a foundation for the future sustainability of the Company's business.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dalam menjalankan implementasi GCG di setiap lini bisnis, Perusahaan mengacu pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan secara eksternal maupun internal, yakni:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 96 tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT LRT Jakarta
5. Anggaran Dasar Perusahaan.

Menyadari pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi keberlangsungan usaha, Manajemen LRTJ senantiasa mengoptimalkan penerapan GCG secara berkesinambungan dengan terus melakukan penguatan infrastruktur untuk mencapai praktik terbaik, pengujian keandalan, serta penyesuaian sistem dan prosedur sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi atau ketentuan yang berlaku. Untuk itu, GCG menjadi penting karena pada dasarnya didesain untuk melindungi kepentingan para Pemegang Saham (*Shareholders*) maupun para Pemangku Kepentingan lainnya (*Stakeholders*).

Perusahaan menerapkan GCG melalui komitmen manajemen (Pakta Integritas), kebijakan dan prosedur (SK Direksi dan *Board Manual*), transparansi laporan (Laporan LHKPN, Laporan Keuangan oleh Auditor Eksternal), dan pengawasan independen (Auditor SMK3 dari Kemenhub, Auditor BPKP dan BPK). Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, perusahaan dapat memelihara kepercayaan pemangku kepentingan dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Perubahan Komposisi Direksi di Tahun 2023

Komposisi Direksi ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Di sepanjang tahun 2023, tidak terdapat perubahan komposisi dan susunan keanggotaan Direksi. Komposisi Direksi PT LRT Jakarta per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Hendri Saputra	Direktur Utama President Director	Akta No. 1 tanggal 3 Januari 2022 Deed No. 1 dated January 3, 2022	Pertama First
Sahurdi	Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Director of Finance and Business Support	Akta PKPS PT LRT Jakarta No. 22 tahun 2022 PKPS Deed of PT LRT Jakarta No. 22 of 2022	Pertama First
Aditia Kesuma Negara	Direktur Operasi dan Pengembangan Director of Operations and Development	Akta No. 1 tanggal 3 Januari 2022 Deed No. 1 dated January 3, 2022	Pertama First

Development of Corporate Governance Implementation

In executing the implementation of GCG across all business lines, the Company adheres to policies set both externally and internally, namely:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Government Regulation No. 54 of 2017 concerning State-Owned Enterprises.
3. Decree of the Governor of Special Capital Region of Jakarta No. 96 of 2004 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in Regional Owned Enterprises (ROEs) in the Special Capital Region of Jakarta.
4. Code of Corporate Governance of PT LRT Jakarta
5. The Company's Articles of Association.

Recognizing the importance of implementing Good Corporate Governance for business continuity, LRTJ Management continuously optimizes the implementation of GCG by strengthening infrastructure to achieve best practices, testing reliability, and adjusting systems and procedures in accordance with business developments and applicable regulations or provisions. Therefore, GCG is crucial as it is fundamentally designed to protect the interests of Shareholders and other Stakeholders.

The Company implements GCG through management commitment (Integrity Pact), policies and procedures (Decree of the Board of Directors and Board Manual), transparency of reports (LHKPN Report, Financial Statements by External Auditor), and independent supervision (SMK3 Auditor from the Ministry of Transportation, BPKP Auditor, and BPK Auditor). By adhering to these principles, the Company can maintain stakeholder trust and achieve sustainable business growth.

Changes in the Composition of the Board of Directors in 2023

The composition of the Board of Directors is set in such a way as to enable effective, accurate, and swift decision-making and to act independently. Throughout 2023, there were no changes in the composition and membership of the Board of Directors. The composition of the Board of Directors of PT LRT Jakarta as of December 31, 2023, is as follows:

Kami mengapresiasi kebijakan Perusahaan yang telah percaya terhadap dedikasi Direksi dalam mengembangkan Perusahaan untuk lebih maju lagi. Segenap jajaran Direksi berkomitmen untuk menjalankan amanah ini dengan senantiasa mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk kepentingan Para Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan Lainnya.

Apresiasi

Atas pencapaian yang dibukukan di tahun 2023, izinkan Direksi menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris serta pemegang saham, juga kepada regulator, para pemangku kepentingan, serta jajaran manajemen dan karyawan, atas seluruh kerjasama yang telah terjalin dengan baik. Semoga PT LRT Jakarta terus dapat berkembang dan bertumbuh untuk mewujudkan visinya, yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada segenap pemangku kepentingan khususnya untuk pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

We appreciate the Company's policy that has trusted the dedication of the Board of Directors in advancing the Company further. The entire Board of Directors is committed to carrying out this mandate by consistently prioritizing the principles of good corporate governance for the benefit of the Shareholders and Other Stakeholders.

Appreciation

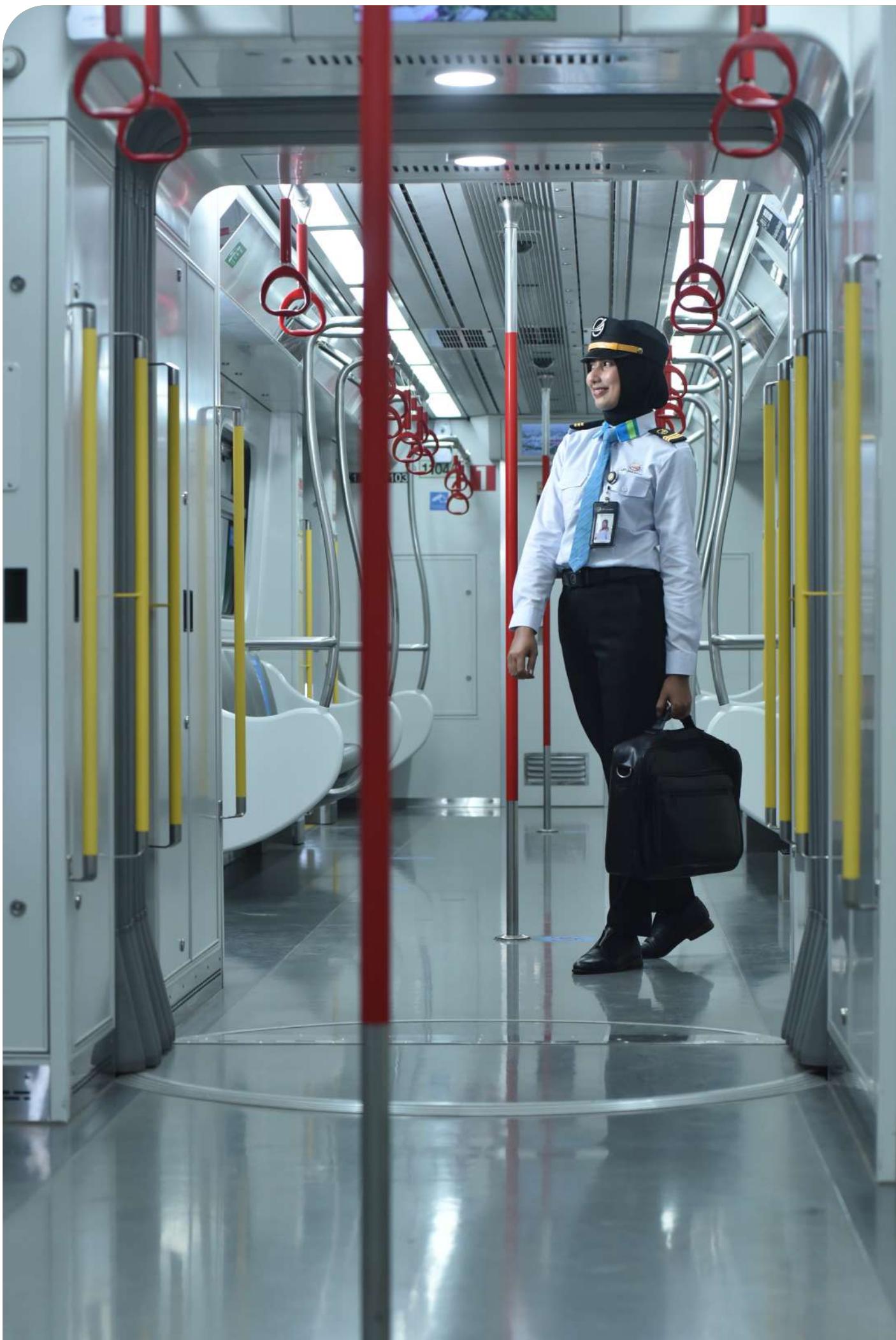
For the achievements recorded in 2023, allow the Board of Directors to express their respect and gratitude to the Board of Commissioners and shareholders, as well as to regulators, stakeholders, and the management and employees, for all the cooperation that has been well established. We hope that PT LRT Jakarta will continue to develop and grow to realize its vision, which will ultimately provide added value to all stakeholders, especially for sustainable business growth.

Jakarta, 27 Juni 2024
Jakarta, June 27, 2024



Hendri Saputra

Direktur Utama
President Director



SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNGJAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023 PT LRT JAKARTA

STATEMENT LETTER OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE 2023 ANNUAL REPORT OF PT LRT JAKARTA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT LRT Jakarta tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, declare that all information in the 2023 Annual Report of PT LRT Jakarta has been presented in its entirety, and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

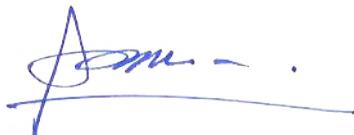
Thus, this statement is made truthfully.

Jakarta, 27 Juni 2024
Jakarta, June 27, 2024

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Iwan Takwin
Komisaris Utama
President Commissioner



Mohamad Pramintohadi Sukarno
Komisaris
Commissioner



Azas Tigor Nainggolan
Komisaris
Commissioner

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023 PT LRT JAKARTA

STATEMENT LETTER OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE 2023 ANNUAL REPORT OF PT LRT JAKARTA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT LRT Jakarta tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, declare that all information in the 2023 Annual Report of PT LRT Jakarta has been presented in its entirety, and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report and Financial Statement.

Thus, this statement is made truthfully.

Jakarta, 27 Juni 2024
Jakarta, June 27, 2024

Direksi
Board of Directors



Hendri Saputra
Direktur Utama
President Director



Aditia Kesuma Negara
Direktur Operasi dan Pengembangan
Director of Operation and Development



Sahurdi
Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis
Director of Finance and Business Support



Profil Perusahaan

Company Profile

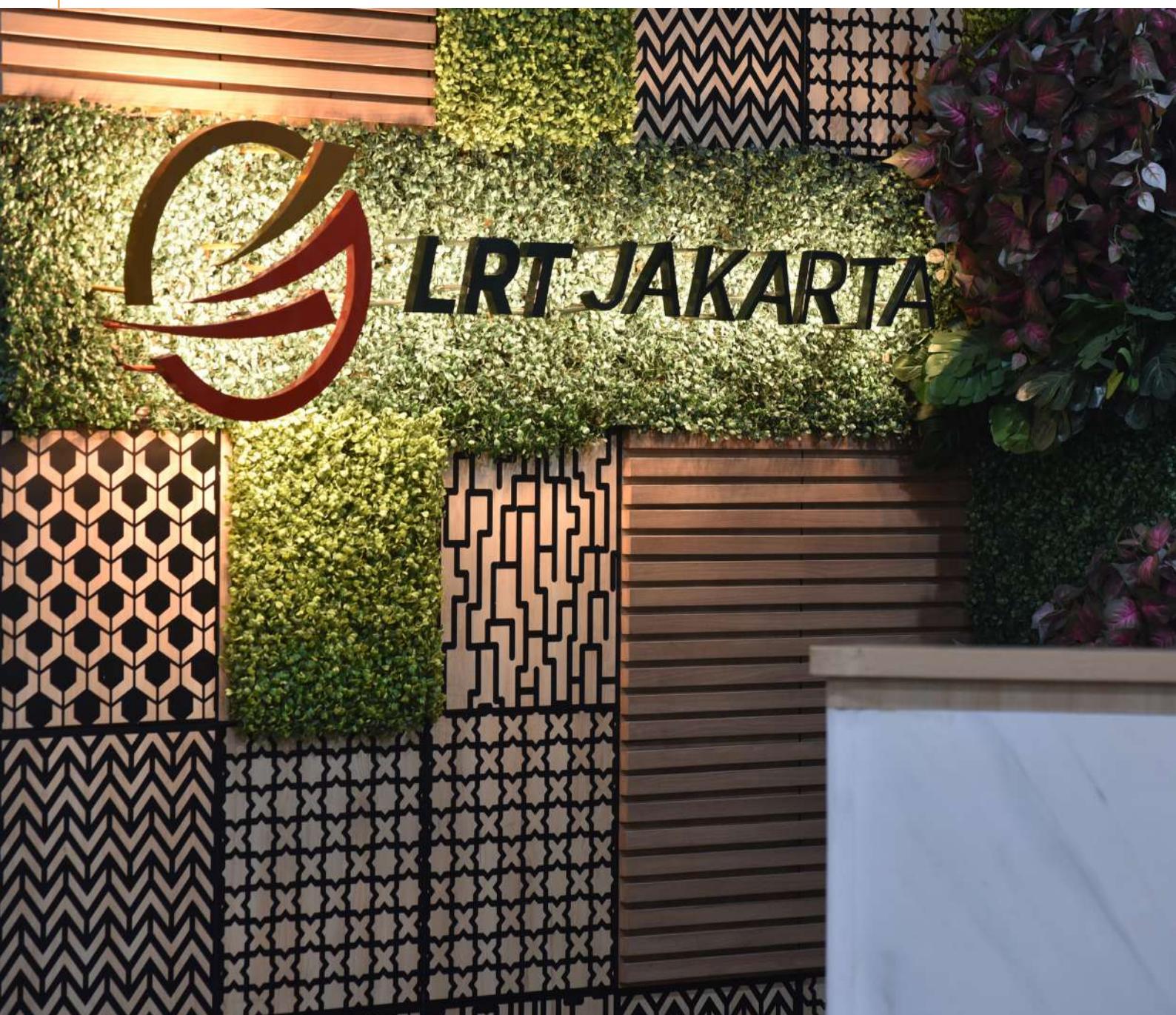


Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan memiliki 3 (tiga) segmen usaha, yaitu Segmen Pengoperasian, Perawatan dan Pengusahaan Prasarana dan Sarana.

As of the end of 2023, the Company has 3 (three) business segments, namely Operations, Maintenance, and Management of Infrastructure and Facilities.







INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY

Nama Perusahaan Company Name	:	PT LRT Jakarta
Penyebutan Lain Other Mention	:	LRTJ
Tanggal Pendirian dan Beroperasi Date of Establishment and Operations	:	16 April 2018 April 16, 2018
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	:	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2017 Pasal 39 ayat (4) Regulation of the Governor of DKI Jakarta No. 154 of 2017 Article 39 paragraph (4)
Status Status	:	Perseroan Terbatas (PT) Limited Liability Company
Bidang Usaha Line of Business	:	Pengoperasian dan Perawatan Sarana dan Prasarana Kereta Api Ringan / <i>Light Rail Transit</i> (LRT) (LRT) Operation and Maintenance of Light Rail Transit (LRT) Facilities and Infrastructure
Kepemilikan Ownership	:	PT Jakarta Propertindo (Perseroda) 99,55% PT Jakarta Infrastruktur Propertindo 0,45%
Modal Dasar Authorized Capital	:	Rp600.000.000.000 IDR600,000,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-Up Capital	:	Rp333.893.400.000 IDR333,893,400,000
Jumlah Karyawan Number of Employees	:	277 pegawai (2023) 277 employees (2023)
Alamat Kantor Pusat Head Office Address	:	GEDUNG MCC - DEPO LRT JAKARTA Jl. Raya Kelapa Nias, RW025, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 14250 MCC Building - Depo LRT Jakarta Jl. Raya Kelapa Nias, RW025, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, North Jakarta City Special Region of the Capital City of Jakarta, 14250
Telepon Telephone	:	+62 21 8061 7490
Surel E-mail	:	carla@lrtjakarta.co.id
Situs Web Website	:	www.lrtjakarta.co.id
Media Sosial Social Media	:	Facebook : LRT Jakarta Twitter : @lrtjkt Instagram : @lrtjkt
Kontak Perusahaan Corporate Contact	:	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary E-mail: sekretaris.perusahaan@lrtjakarta.co.id

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

HISTORY OF THE COMPANY



SEJARAH PERUSAHAAN

PT LRT Jakarta berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, yang secara mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda), berdiri pada tanggal 16 April 2018, yang salah satu usahanya bergerak dibidang pengoperasian dan perawatan sarana serta prasarana perkeretaapian.

PT Jakarta Propertindo sebagai Perusahaan Daerah Provinsi DKI Jakarta terpanggil untuk turut serta membantu Pemerintah untuk segera merealisasikan program dengan membangun proyek LRT Jakarta.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2017 Pasal 39 ayat (4) yang merupakan tonggak awal didirikannya anak perusahaan untuk melaksanakan tugas - tugas tertentu agar Prasarana dan Sarana LRT dapat dioperasikan, dirawat dan/atau diusahakan secara efisien, efektif dan sesuai tata kelola yang baik.

Sejak berdirinya pada 16 April 2018, Perusahaan tidak pernah melakukan pergantian nama, yaitu LRT Jakarta. Tahun 2019 merupakan tahun yang bersejarah bagi Perusahaan, di mana pada tanggal 1 Desember 2019, Perusahaan mulai mengoperasikan LRT Jakarta secara komersial.

HISTORY OF THE COMPANY

PT LRT Jakarta is a Limited Liability Company, which is owned in majority by PT Jakarta Propertindo (Perseroda), established on April 16, 2018. One of its business is in the operation and maintenance of railway facilities and infrastructure.

PT Jakarta Propertindo as a Regional Company of DKI Jakarta Province wanted to contribute in supporting the Government to realize the program of building the Jakarta LRT project.

After going through a long process, finally, the Regulation of the Governor of DKI Jakarta No. 154 of 2017 Article 39 paragraph (4) was stipulated and became the initial milestone for the establishment of a subsidiary to carry out specific duties so that LRT Infrastructure and Facilities can be operated, maintained and/or managed efficiently, effective and in accordance with good governance.

Since its establishment on April 16 2018, the Company has never changed its name, namely LRT Jakarta. The year 2019 was a historic year for the Company since on December 1, 2019, the Company started commercially operating the Jakarta LRT.

INFORMASI PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

Sejak berdiri pada tanggal 16 April 2018, PT LRT Jakarta belum pernah melakukan perubahan nama dan perubahan status badan hukum

MAKNA LOGO PERUSAHAAN

Bagi LRTJ *brand* bukanlah hanya sekadar logo, namun juga aset visual yang berperan sebagai medium penyampaian persepsi pembentuk citra sebuah merek. Konsistensi tampilan visual juga akan membuat sebuah *brand* mudah dikenal.

INFORMATION ON CHANGE IN THE COMPANY'S NAME

Since its establishment on April 16, 2018, PT LRT Jakarta has never changed its name and legal entity status.

MEANING OF THE COMPANY'S LOGO

For Jakarta LRT, the brand is not just a logo; it is also a visual asset that acts as a medium for conveying perceptions that establishes the image of a brand. Consistency in visual appearance will also make a brand easily recognizable.



Filosofi Logo

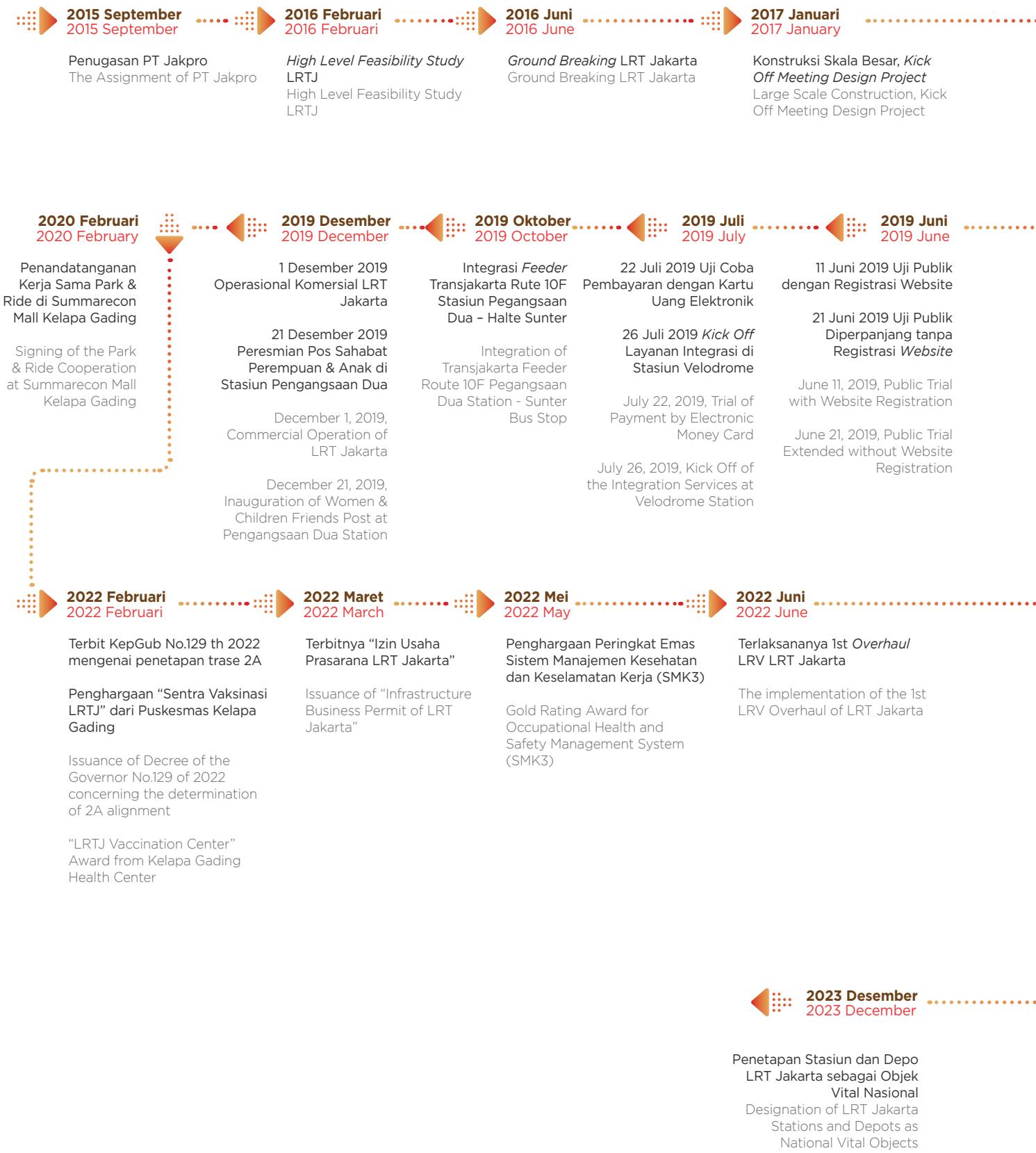
Philosophy of the Company's Logo

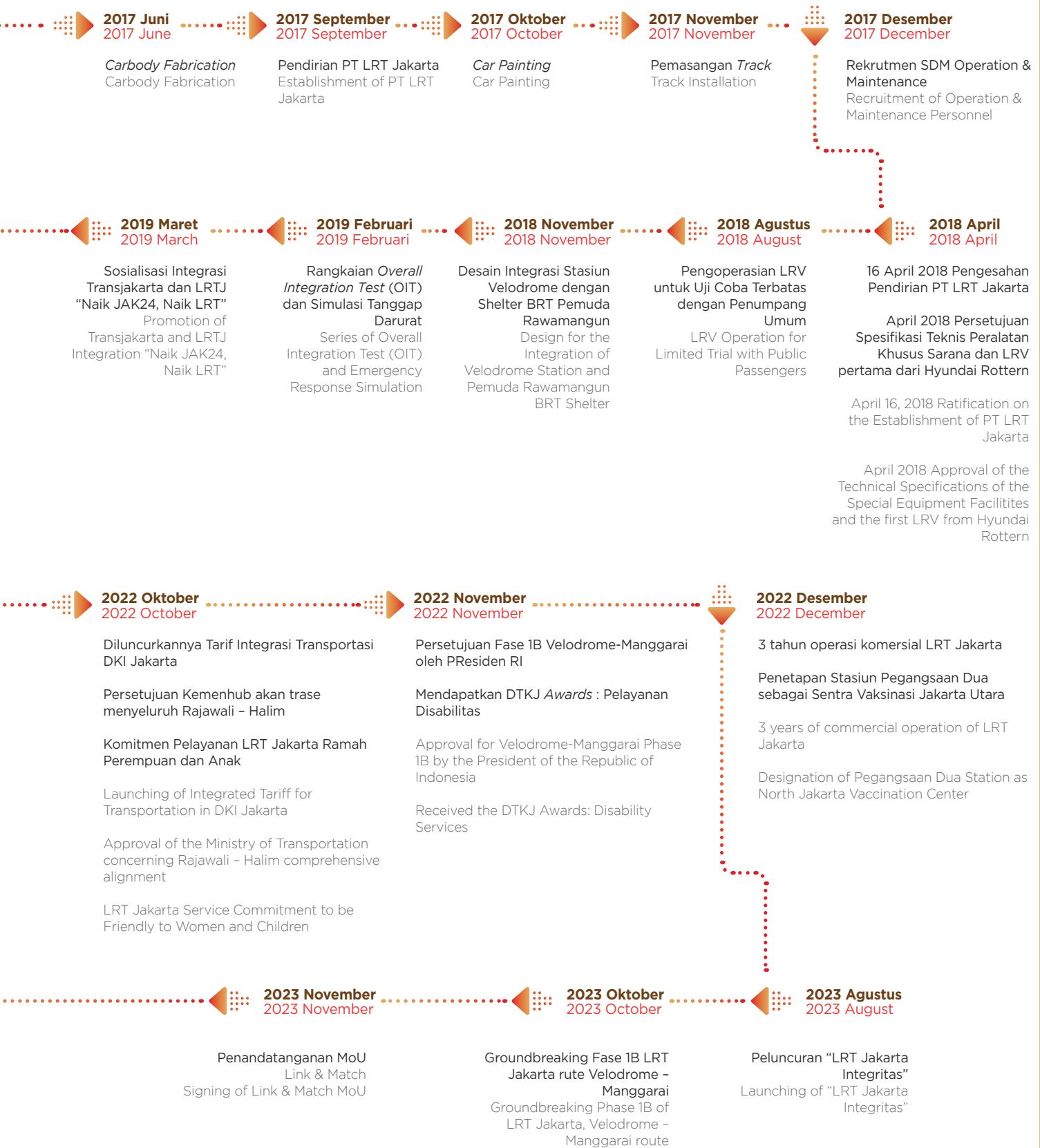
1. Elemen logo membentuk 3 garis yang secara keseluruhan merupakan representasi bentuk kereta api menggambarkan LRT Jakarta yang bergerak maju dan progresif di bidang perkeretaapian.
2. Warna merah terinspirasi oleh Perusahaan *Holding* Jakpro dengan warna Dominan Merah sebagai *corporate color* nya dan mencerminkan keuletan, ketegasan serta keberanian dalam menghadapi berbagai macam kesulitan.
3. Warna emas menunjukkan prestasi, kesuksesan, kemewahan, kemenangan dan kemakmuran.

1. LRT Jakarta logo depicts an image of a complete circle forming 3 lines which as a whole represent the form of the Jakarta LRT train which is moving forward and progressively in the railroad sector.
2. The red color is inspired by the Jakpro Holding Company, with the dominant red color as its corporate color represents tenacity, firmness and courage in facing various kinds of difficulties.
3. The gold color represents achievement, success, luxury, victory and prosperity.

JEJAK LANGKAH

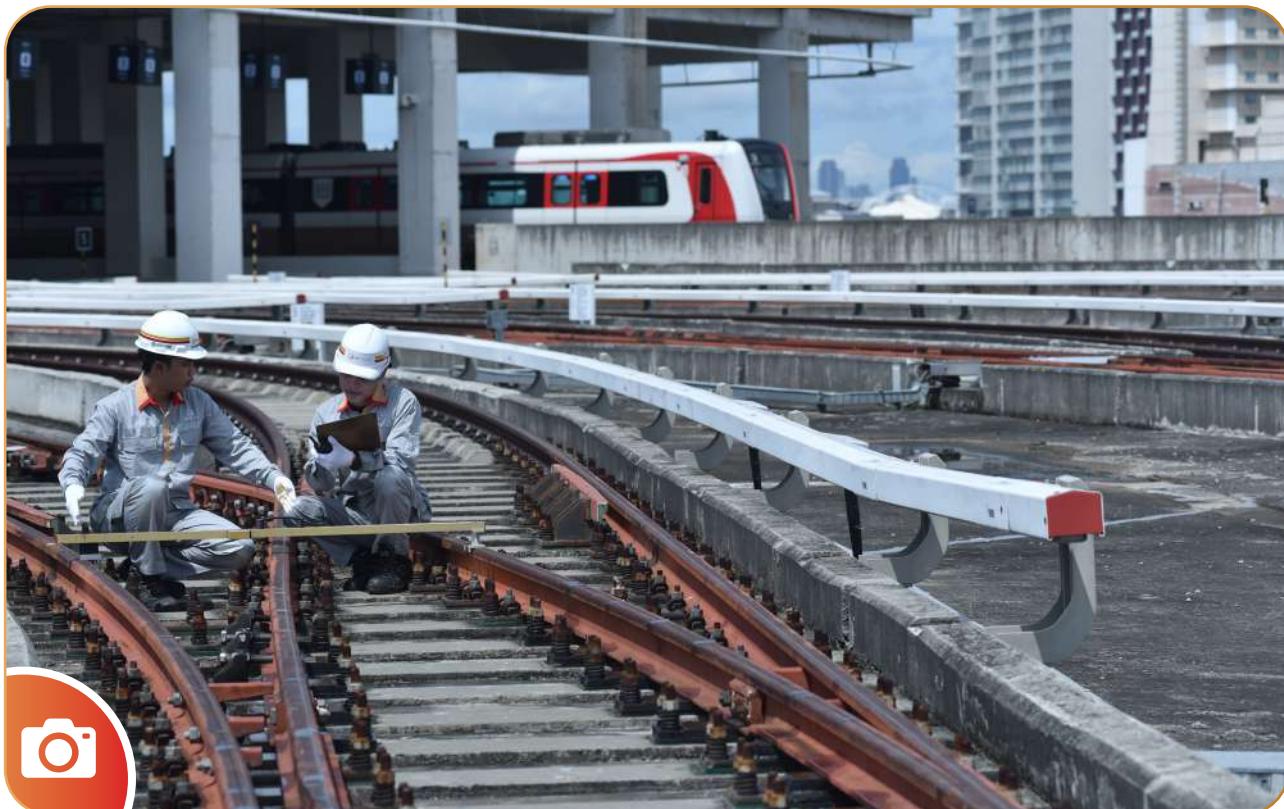
MILESTONES





KEGIATAN DAN BIDANG USAHA

THE COMPANY'S BUSINESS ACTIVITIES AND LINE OF BUSINESS



Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, yang dikukuhkan dengan Akta No. 58 tanggal 17 Mei 2023 maksud dan tujuan Perusahaan untuk menjalankan usaha di bidang:

1. Konstruksi bangunan sipil,
2. Konstruksi khusus,
3. Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa,
4. Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran; analisis dan uji teknis,
5. Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan,
6. Telekomunikasi,
7. Real estat,
8. Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen,
9. Periklanan dan penelitian pasar,
10. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi,
11. Pendidikan,
12. Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadangan dan perlengkapannya,
13. Aktivitas ketenagakerjaan.

The Company's Activities Based on Articles of Association and Business Activities Conducted

In accordance with of the Company's Articles of Association, which was confirmed by Deed No. 58 dated May 17, 2023, the purposes and objectives of the Company is to operate business in the fields of:

1. Civil building construction,
2. Special construction,
3. Land transportation and transportation through pipelines,
4. Architectural and engineering activities; analysis and technical test,
5. Warehousing and transportation support activities,
6. Telecommunications,
7. Real estate,
8. Head office activities and management consulting,
9. Advertising and market research,
10. Leasing and leasing activities without option rights,
11. Education,
12. Wholesale trade in land transportation equipment (not cars, motorbikes, and the like), spare parts and equipment.
13. Employment Activities.

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan akan menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

In achieving its purpose and objectives as mentioned above, the Company will conduct the following business activities:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar The Company's Activities Based on Articles of Association	Telah/Belum Dijalankan Has Been/Not Yet Executed	Kegiatan yang Dijalankan Activities Conducted
Kegiatan pengoperasian sarana dan prasarana Facilities and infrastructure operation activities	v	Melakukan pengoperasian dan Perawatan Sarana dan Prasarana Kereta Api Ringer / <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Koridor 1 fase 1 Velodrome - Kelapa Gading Operating and Maintaining Light Rail Transit (LRT) Facilities and Infrastructure Corridor 1 Phase 1 Velodrome - Kelapa Gading
Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan Machinery and Equipment Repair and Installation	v	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Spare Part Automated People Mover System 2. Overhaul Trainset 3 3. Pekerjaan Bubut Roda <ol style="list-style-type: none"> 1. Procurement of Automated People Mover System spare parts 2. Overhaul of Trainset 3 3. Wheel Lathe Work
Konstruksi khusus Special construction	x	-
Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan Warehousing and transportation support activities	x	-
Telekomunikasi Telecommunications	x	-
Real Estat Real Estate	x	-
Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen Head office activities and management consulting	x	-
Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran Architectural and engineering activities	x	-
Periklanan dan penelitian pasar Advertising and market research	x	-
Pendidikan Education	v	Melakukan kemitraan untuk pelatihan kerja lapangan ahli K3 umum Kemnaker Establish partnership in organizing field training for general OHS experts Ministry of Manpower
Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya Wholesale trade in land transportation equipment (not cars, motorbikes, and the like), spare parts and equipment	x	-
Aktivitas Ketenagakerjaan Employment Activities	x	-

v = telah dijalankan | x = belum dijalankan

v = Has Been Executed | x = Not Yet Executed

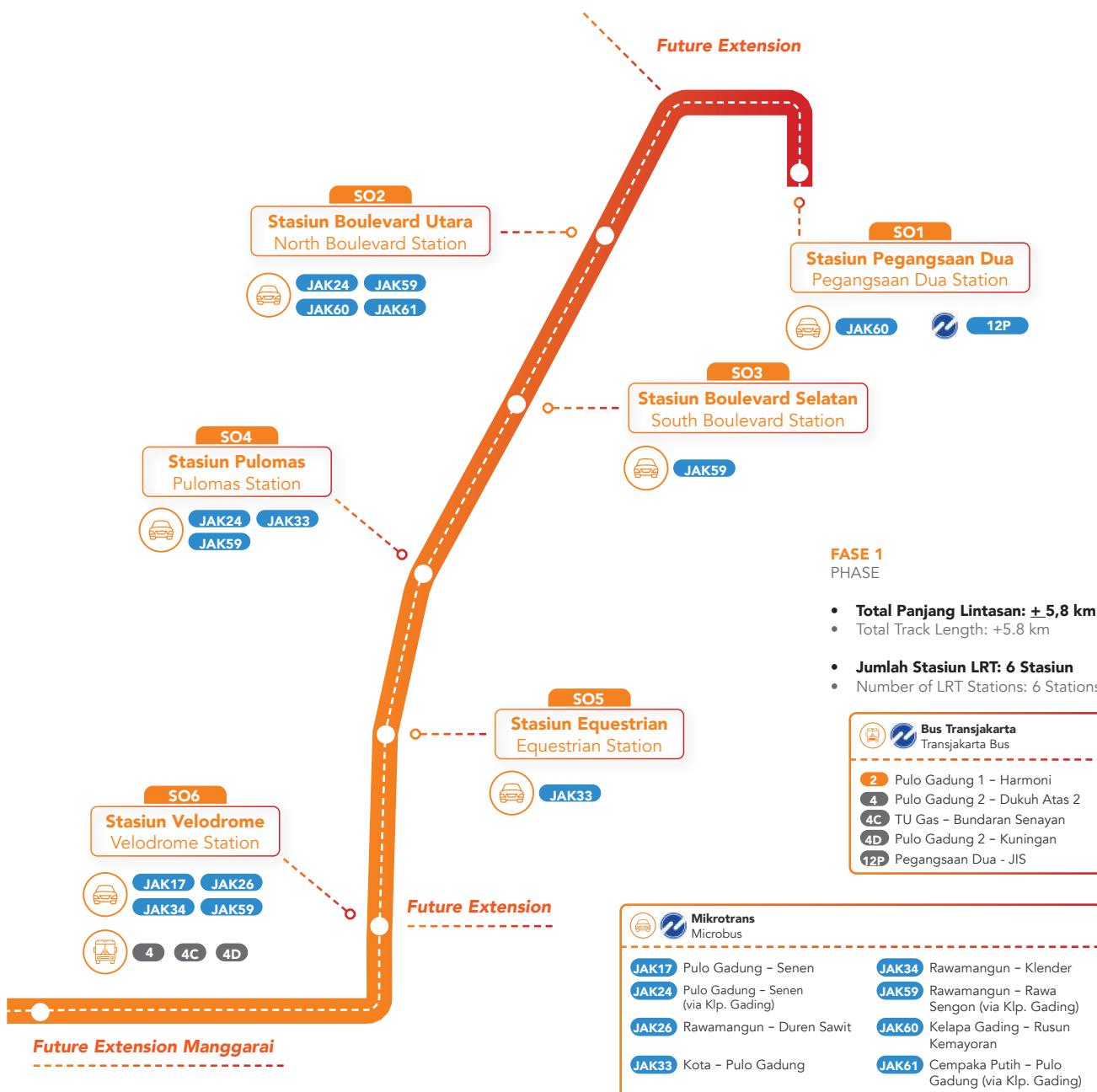
PENGEMBANGAN PRODUK DAN JASA

PRODUCT AND SERVICE DEVELOPMENT



WILAYAH OPERASI

AREAS OF OPERATION



VISI, MISI, SIKAP DASAR DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VISION, MISSION, AND CORPORATE VALUE

VISI
VISION

Menjadi Solusi Mobilitas Publik
Terbaik di Indonesia

To be the best public mobility solution in Indonesia

MISI
MISSION

- Menyediakan layanan transportasi publik warga Jakarta yang aman dan nyaman
- Mengembangkan jaringan transportasi publik yang modern dan terintegrasi
- Membangun reputasi perusahaan dengan pengembangan sumber daya manusia yang “LRTJ”
- Providing safe and comfortable public transportation services for Jakarta residents,
- Developing a modern and integrated public transportation network, and
- Build the Company’s reputation by developing “LRTJ” human resources

**Review Visi dan Misi
Perusahaan oleh
Manajemen Kunci**

Review of Company
Vision and Mission by Key
Management

Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian atas visi dan misi perusahaan yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan telah disetujui oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

The Board of Commissioners and the Board of Directors have reviewed the Company's vision and mission in the Company's Work Plan and Budget, which has been approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Nilai Perusahaan

Corporate Values

Perusahaan dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) mewajibkan seluruh karyawannya untuk senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai Perusahaan yakni LRTJ. Nilai-nilai Perusahaan ini memiliki arti penting dalam merealisasikan visi dan misi Perusahaan sehingga nantinya diharapkan dapat menuntun kinerja perusahaan lebih berjalan optimal dan terarah ke depannya. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

In managing its Human Resources (HR), the Company requires all its employees to always implement the Company's corporate values, namely LRTJ. These corporate values have an important meaning in realizing the Company's vision and mission so that later it is expected to guide the Company's performance to operate business more optimally and be directed in the future. The description of the values is as follow:



SOSIALISASI DAN INTERNALISASI TATA NILAI PERUSAHAAN

Dalam rangka memberikan pengetahuan dan mananamkan serta meningkatkan pemahaman, Perusahaan senantiasa melaksanakan program sosialisasi dan internalisasi nilai kepada seluruh insan Perusahaan mengenai nilai Perusahaan.

Agar nilai Perusahaan dapat menyatu dengan perilaku Insan Perusahaan dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka Perusahaan melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai Perusahaan dengan melakukan induksi kepada karyawan baru, *refreshment* melalui *meeting internal/townhall*.

DISSEMINATION AND INTERNALIZATION OF CORPORATE VALUES

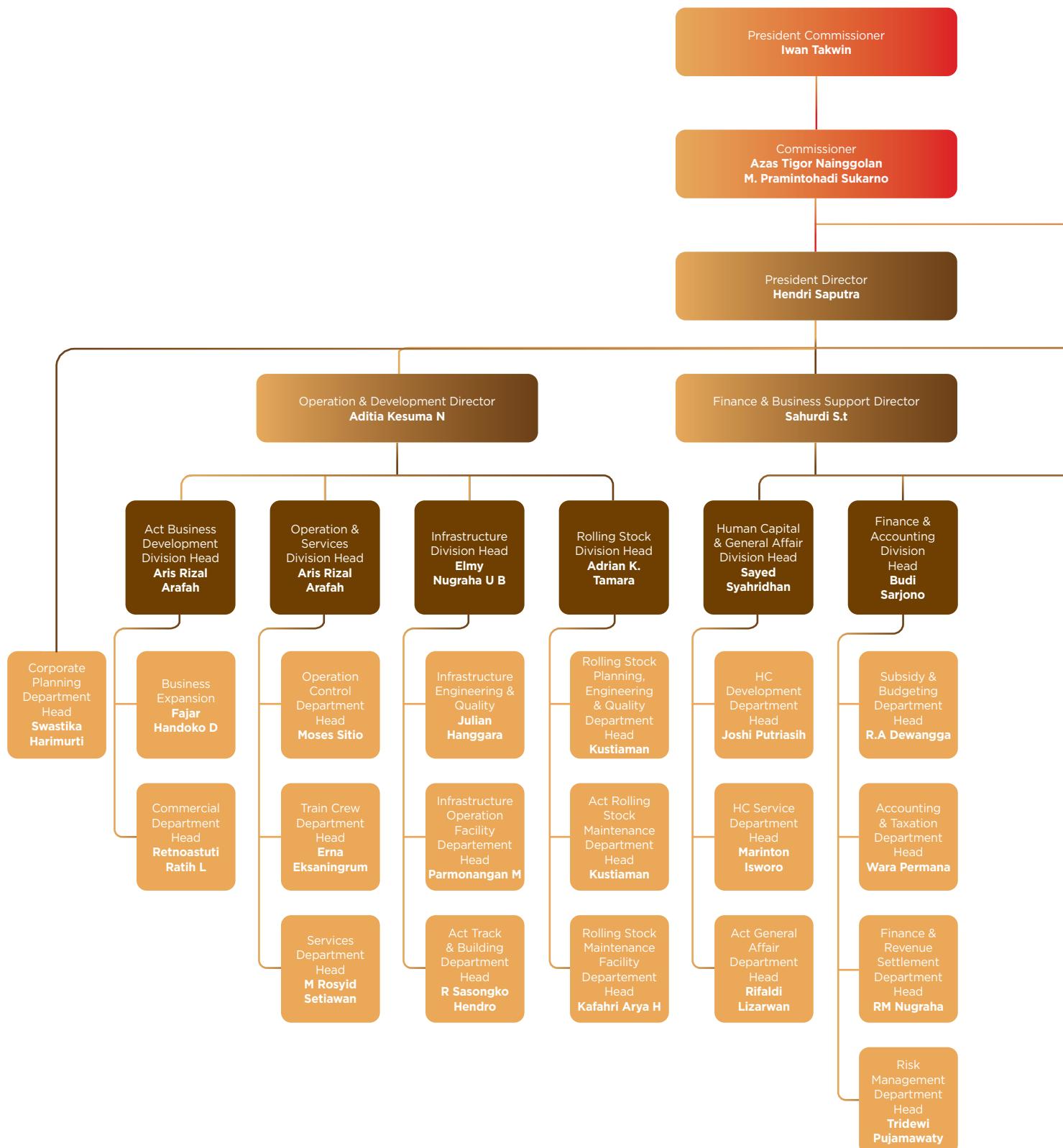
In order to provide knowledge, instill and improve understanding, the Company consistently conducts dissemination and internalization programs to all Company personnel regarding corporate values.

To integrate corporate values into the behavior of the Company's personnel in their daily business activities, the Company disseminates and internalizes corporate values through induction of new employees and refreshment through internal meetings/townhall.

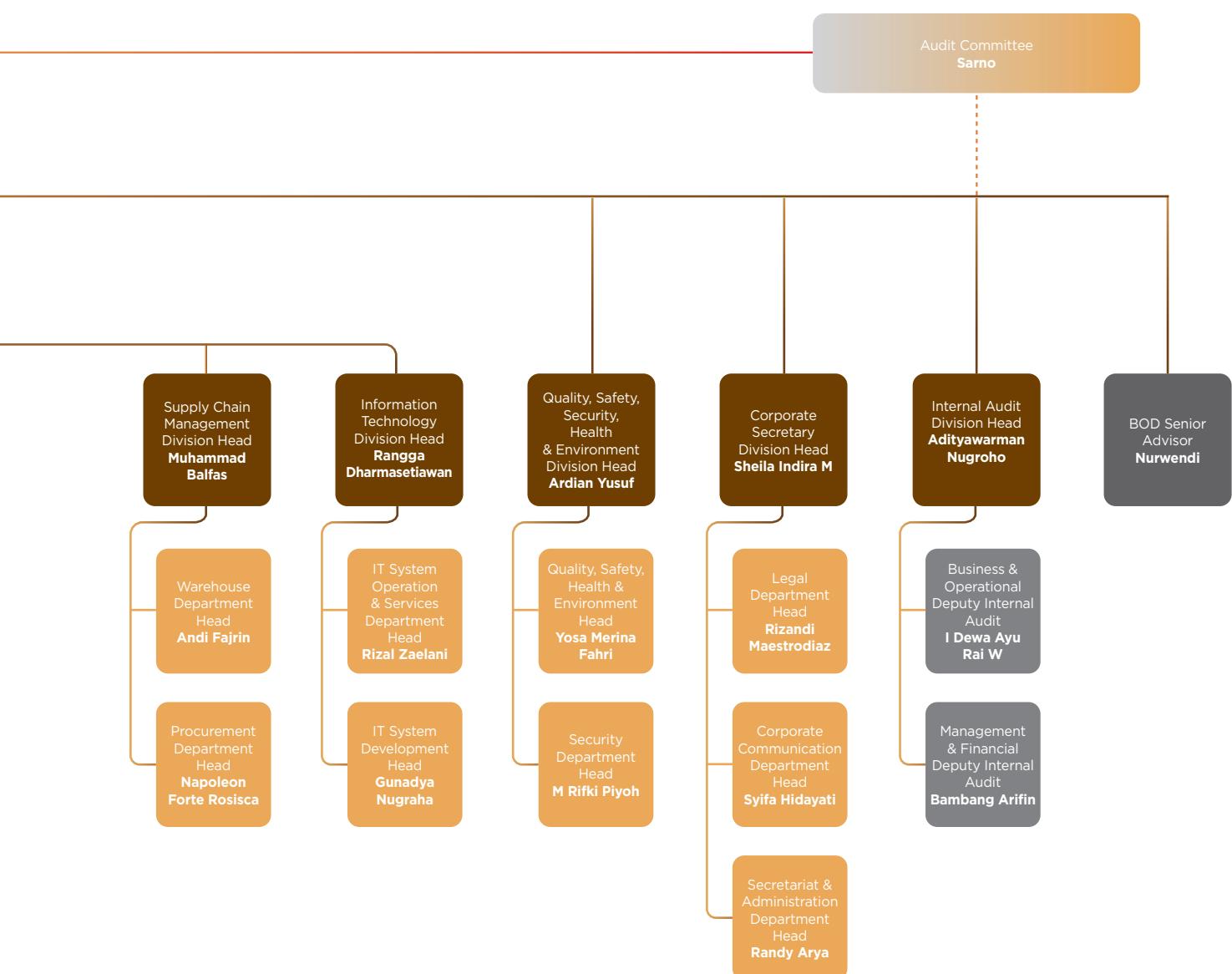
STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Perusahaan terus melakukan penguatan struktur organisasi demi mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi Perusahaan telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 001/DRU/111/IX/2023 tanggal 06 September 2023 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT LRT Jakarta.



The Company continues to strengthen its organizational structure to achieve common goals. The Company's organizational structure has been approved through Decree of the Board of Directors No. 001/DRU/IX/2023 dated September 6, 2023, concerning Changes in the Organization Structure of PT LRT Jakarta.



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATIONS

PENGHARGAAN

LRT Jakarta senantiasa menghadirkan layanan yang optimal dan kinerja operasional secara maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai penghargaan yang didapatkan oleh Perusahaan di tahun 2023 seperti:

AWARDS

LRT Jakarta always provides optimal service and maximum operational performance. This is shown by the various awards obtained by the Company in 2023 such as:

Tanggal Date	Nama Penghargaan Name of Awards	Dikeluarkan Oleh Issued By
17 Maret 2023 March 17, 2023	Bronze Winner Kanal Digital Sub Kategori Media Sosial (Instagram)	
	Bronze Winner Program PR Sub Kategori Corporate PR (LRTJ Creativity Hub - LRTJ Photography workshop)	PR Indonesia
	Bronze Winner Digital Channel Social Media Subcategory (Instagram)	
	Bronze Winner PR Program Corporate PR Sub-Category (LRTJ Creativity Hub - LRTJ Photography workshop)	
20 Maret 2023 March 20, 2023	Penghargaan THE 14TH SPS AWARDS 2023 dengan predikat Bronze untuk Indonesia Digital Media Awards (IDMA) Kategori Media Sosial Terbaik - Sub Kategori Korporasi The 14th SPS Awards 2023, the Company received Indonesia Digital Media Awards (IDMA) with the Bronze predicate for the Best Social Media category - Corporate Subcategory	Serikat Perusahaan Pers (SPS) Press Company Union (SPS)
30 Mei 2023 May 30, 2023	"Apresiasi Stakeholder Terbaik" dalam menjalani proses-proses pengujian Sarana, Prasarana & SDM "Appreciation for Best Stakeholder Engagement" in undergoing testing processes for Facilities, Infrastructure & Human Resources	Balai Uji (BLU) Perkeretaapian DJKA Kemenhub. Railway Testing Center (BLU) of Directorate General of Railway, Indonesian Ministry of Transportation
6 Juni 2023 June 6, 2023	Kategori Lembaga Humas Pemerintah Terbaik (BUMD) dan Kategori Program Kehumasan Pemerintah Terbaik. Keduanya meraih predikat Bronze Winner. Best Government Public Relations Institution (Regional-owned Enterprises) Category and Best Government Public Relations Program Category. Both categories won the predicate Bronze Winner	Humas Indonesia Indonesia Public Relations
5 Juli 2023 July 5, 2023	Human Capital on Resilience Excellence Award 2023 <ul style="list-style-type: none"> • <i>The Best CEO Focus on HC</i> • <i>Service Excellence Company 2023</i> • <i>The Best Organization Structure</i> • <i>The Best HR in Retention Strategy</i> • <i>The Most Resilience company 2023</i> 	First Indonesia Magazine
4 Agustus 2023 August 4, 2023	Penghargaan Masinis dan Pramudi Teladan di wilayah Jabodetabek Tahun 2023 Juara II Masinis Teladan - Rico Ebenhezer Juara Harapan II Masinis Teladan - Novan Aditya Exemplary Train Drivers and Conductors Award Jabodetabek 2023 Second Winner-up Train Driver - Rico Ebenhezer Second Runner-up Train Driver - Novan Aditya	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kemenhub RI Transportation Management Agency of Jabodetabek, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia
11 Agustus 2023 August 11, 2023	Gold Winner - Media Relations kategori Media Special Program melalui program "Media Tour KELAR (Keliling Bareng LRTJ)" Gold Winner - Media Relations category Media Special Program for the "Media Tour KELAR (Keliling Bareng LRTJ)" program	Serikat Perusahaan Pers (SPS) Press Company Union (SPS)

Tanggal Date	Nama Penghargaan Name of Awards	Dikeluarkan Oleh Issued By
2 September 2023 September 2, 2023	Juara 3 kategori Corporate PR Tema Nation branding Third Place Winner - Corporate PR Theme Nation branding category	Perhumas (Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia) The Association of Indonesian Public Relations PR Excellence Awards 2023
6 September 2023 September 6, 2023	TOP GRC Awards 2023 #4 Star, The High Performing Board of Commissioner on GRC 2023, dan The Most Committed GRC Leader 2023 (Hendri Saputra - Direktur Utama PT LRT Jakarta). TOP GRC Awards 2023 #4 Star, The High Performing Board of Commissioners on GRC 2023, dan The Most Committed GRC Leader 2023 (Hendri Saputra - President Director of PT LRT Jakarta).	Top Business Indonesia
21 September 2023 September 21, 2023	Penghargaan sebagai Perusahaan Berpengaruh di Bidang Komunikasi tahun 2023 dan Top 50 Kartini Humas Indonesia (Sheila Indira Maharshi - Head of Corporate Secretary Division LRT Jakarta). Award for Influential Company in the field of Communication in 2023 and Top 50 Kartini Public Relations Indonesia (Sheila Indira Maharshi - Head of Corporate Secretary Division LRT Jakarta).	PR INDONESIA Group
27 September 2023 September 27, 2023	Penghargaan Platinum Winner sebagai The Best Customer Experience Platinum Winner award for The Best Customer Experience	Indonesia Contact Center Association (ICCA)
9 November 2023 November 9, 2023	Juara 1 pada kategori Inovasi Karya Kehumasan BUMD (LRTJ Ngabuburit Photowalk) 1st Winner in the category of BUMD Public Relations Works Innovation (LRTJ Ngabuburit Photowalk)	Anugerah Humas Jakarta 2023 Pemprov DKI Jakarta Jakarta Public Relations Award 2023 from DKI Jakarta Provincial Government
4 Desember 2023 December 4, 2023	Top Digital Implementation 2023 dan Top Leader on Digital Implementation 2023 untuk Bapak Hendri Saputra selaku Direktur Utama LRT Jakarta Top Digital Implementation 2023 and Top Leader on Digital Implementation 2023 for Hendri Saputra as the President Director of LRT Jakarta	Top Digital Award majalah "It Works"

SERTIFIKASI**CERTIFICATIONS****Sertifikasi yang Masih Berlaku Hingga Tahun 2023**

Valid Certifications Until 2023

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Certificate Issuance Date	Skema Sertifikasi Scheme of Certificate	Jenis Sertifikat Type of Certificate	Nomor Sertifikat Certificate No.	Dikeluarkan Oleh Issued By	Masa Berlaku Hingga Validity Period
27 Maret 2020 March 27, 2020	SNI ISO 9001:2015 Quality Management Systems-Requirement	Sertifikasi Pertama First Certification	QSC 01722	Sucofindo International Certification Services	26 Maret 2023 March 26, 2023
01 September 2021 September 1, 2021	Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018 Railway Safety Management System (RSMS) Based on the Regulation of Minister of Transportation No. 69 of 2018	Sertifikasi Pertama First Certification	01/BA.SMKP/K5.2/IX/DJKA/2021	Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Directorate General of Railways, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia	31 Agustus 2023 August 31, 2023
13 Mei 2022 May 13, 2022	Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) Based on Government Regulation No. 50 of 2012	Sertifikasi Pertama First Certification	REG.SMK3.2022.MAL.SK-886	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	12 Mei 2025 May 12, 2023
13 April 2023 April 13, 2023	SNI ISO 9001:2015 Quality Management Systems-Requirement	Sertifikasi Ulang Re-Certification	QSC 01722	Sucofindo International Certification Services	26 Maret 2026 March 26, 2026
13 April 2023 April 13, 2023	SNI ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System - Requirements with guidance for use	Sertifikasi Pertama First Certification	OHS 00235	Sucofindo International Certification Services	26 Maret 2026 March 26, 2026
13 April 2023 April 13, 2023	Integrated Management System SNI ISO 9001:2015 Quality Management Systems-Requirement SNI ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System - Requirements with guidance for use	Sertifikasi Pertama First Certification	IMS 00230	Sucofindo International Certification Services	26 Maret 2026 March 26, 2026
22 Desember 2023 December 22, 2023	Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018 Railway Safety Management System (RSMS) Based on the Regulation of Minister of Transportation No. 69 of 2018	Sertifikasi Ulang Re-Certification	KA.008-1-1-K5-DJKA-2024	Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Directorate General of Railways, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia	21 Desember 2025 December 21, 2025



**Mohamad
Pramintohadi Sukarno**

Komisaris
Commissioner

**Iwan
Takwin**

Komisaris Utama
President Commissioner

**Azas Tigor
Nainggolan**

Komisaris
Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS

PROFILE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sepanjang tahun 2023 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan, yakni berdasarkan Akta PKPS PT LRT Jakarta No. 01 tanggal 3 April 2023, Akta PKPS PT LRT Jakarta No. 06 tanggal 7 Agustus 2023, dan Akta PKPS PT LRT Jakarta No. 01 tanggal 3 November 2023.

Berikut kronologi perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana terlampir berikut ini.

Throughout 2023 until the signing of this Annual Report, there have been changes in the composition of the Company's Board of Commissioners, namely based on PKPS Deed of PT LRT Jakarta No. 01 dated April 3, 2023, PKPS Deed of PT LRT Jakarta No. 06 dated August 7, 2023, and PKPS Deed of PT LRT Jakarta No. 01 dated November, 2023.

The following is the chronology of changes in the composition of the Company's Board of Commissioners as described below.

Nama dan Jabatan Name and Position	Keterangan Description
Iwan Takwin Komisaris Utama President Commissioner	-
Romy Barenco Komisaris Commissioner	Berhenti menjabat sebagai Komisaris pada tanggal 17 Juli 2023 berdasarkan Akta PKPS PT LRT Jakarta No. 06 tanggal 07 Agustus 2023. No longer served as the Company's Commissioner since July 17, 2023 based on PKPS Deed of PT LRT Jakarta No. 06 dated August 7, 2023.
Azas Tigor Nainggolan Komisaris Commissioner	Diangkat sebagai Komisaris pada tanggal 21 Maret 2023 berdasarkan Akta PKPS PT LRT Jakarta No. 01 tanggal 3 April 2023 Appointed as the Company's Commissioner since March 21, 2023 based on PKPS Deed of PT LRT Jakarta No. 01 dated April 3, 2023
Mohamad Pramintohadi Sukarno Komisaris Commissioner	Diangkat sebagai Komisaris pada tanggal 5 Oktober 2023 berdasarkan Akta PKPS PT LRT Jakarta No. 01 tanggal 3 November 2023 Appointed as the Company's Commissioner since October 5, 2023 based on PKPS Deed of PT LRT Jakarta No. 01 dated November 3, 2023

Adapun profil Dewan Komisaris yang menjabat sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

Profile of the Board of Commissioners serving the Company until the signing of this Annual Report is described below.



**Iwan
Takwin**

Komisaris Utama
President Commissioner

Periode Jabatan: 7 Oktober 2022 - sekarang
Term of Office: October 7, 2022 - Present

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 48 tahun per 31 Desember 2023
Kelahiran Makassar, 9 September 1975

Domisili

Depok, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1999)

Sertifikasi

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

1. Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta no. 103/UT2000/X/2022/0321;
2. Akta PKPS PT. LRT Jakarta Nomor 22;
3. Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. LRT Jakarta Nomor AHU-AH.01.09-0066816.

Riwayat Pekerjaan

1. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) 2022 - sekarang
2. Direktur Utama PT Jakarta Solusi Lestari 2021 – 2022
3. Direktur Proyek PT Jakarta Propertindo (Perseroda) 2016 – 2021

Rangkap Jabatan

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Personal Data

Indonesian citizen
48 years old as of December 31, 2023
Born in Makassar, September 9, 1975

Domicile

Depok, West Java, Indonesia

Educational Background

Bachelor of Engineering from Gadjah Mada University, Yogyakarta (1999)

Certifications

History and Legal Basis of Appointment

1. Resolution of Shareholder outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 103/UT2000/X/2022/0321;
2. Deed of PKPS PT. LRT Jakarta No. 22;
3. Letter of Acceptance of Notification of Company Data Change of PT. LRT Jakarta No. AHU-AH.01.09-0066816.

Work Experience

1. President Director of PT Jakarta Propertindo (Perseroda) 2022 – Present
2. President Director of PT Jakarta Solusi Lestari 2021 – 2022
3. Project Director of PT Jakarta Propertindo (Perseroda) 2016 – 2021

Concurrent Position

President Director of PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

Affiliations

Has no affiliation with other member(s) of the Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major/Controlling Shareholders

Azas Tigor Nainggolan



Komisaris Commissioner

Periode Jabatan: 21 Maret 2023 - Sekarang
Term of Office: March 21, 2023 - Present

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 58 tahun per 31 Desember 2023
Kelahiran Medan, 9 Februari 1965

Domisili

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Studi Program Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan (2021-Sekarang)
- S2 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila (2018)
- S2 Magister Ilmu Politik Pasca Sarjana Universitas Nasional (2014)
- S1 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (1989)

Sertifikasi

-

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

- Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta No. 001/KPS/123/III/2023;
- Akta PKPS PT. LRT Jakarta Nomor 01 tanggal 3 April 2023;
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT LRT Jakarta No. AHU-AH.01.09-0106501.

Riwayat Pekerjaan

- Ketua Bidang Sosial Budaya, Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) (2020-2025)
- Ketua Bidang Sosial Budaya, Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) (2015-2020)
- Pendiri dan Ketua Koalisi Transport Demand Management (TDM) Jakarta (2010-sekarang)
- Pendiri dan Koordinator Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Jakarta (2009-sekarang)
- Pendiri dan Board LBH Pers (2006-sekarang)
- Bendahara Eksekutif Board INFID (2005-2008)
- Anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) (2004-sekarang)
- Koordinator Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta (1998-2002)
- Institut Sosial Jakarta (ISJ), mulai dari menjadi pendamping lapangan, Koordinator Biro Pengorganisasian, Kordinator Presidium Pengurus ISJ (1989-2003)

Rangkap Jabatan

- Pendiri dan Ketua Koalisi Transport Demand Management (TDM) Jakarta (2010-sekarang)
- Pendiri dan Koordinator Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Jakarta (2009-sekarang)
- Pendiri dan Board LBH Pers (2006-sekarang)
- Anggota Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) (2004-sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Personal Data

Indonesian citizen
Age 58 years old as of December 31, 2023
Born in Medan, February 9, 1965

Domicile

East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Educational Background

- Doctor of Law, Pelita Harapan University (2021-Present)
- Master of Law, Pancasila University (2018)
- Master of Political Science, National University (2014)
- Bachelor of Law, the Christian University of Indonesia (1989)

Certifications

-

History and Legal Basis of Appointment

- Resolution of Shareholders Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 001/KPS/123/III/2023;
- Deed of Amendment to the Articles of Association of PT. LRT Jakarta No. 01 dated April 3, 2023;
- Letter of Acceptance of Notification of Company Data Change of PT. LRT Jakarta No. AHU-AH.01.09-0106501.

Work Experience

- Chair of Socio-Cultural Affairs, National Leadership Council of the Indonesian Advocates Association (2020-2025)
- Chair of Social and Cultural Affairs, National Leadership Council of the Indonesian Advocates Association (2015-2020)
- Founder and Chair of the Jakarta Transport Demand Management (TDM) Coalition (2010-present)
- Founder and Coordinator of the Jakarta Citizens Coalition for Transportation (KAWAT) (2009-present)
- Founder and Board of LBH Pers (2006-present)
- Treasurer of the Executive Board of INFID (2005-2008)
- Member of the Indonesian Advocates Association (AAI) (2004-present)
- Coordinator of the Jakarta Regional Council of the Indonesian Forum for the Environment (WALHI) (1998-2002)
- Jakarta Institute of Social (ISJ), starting from being a field assistant, Coordinator of the Organizing Bureau, Coordinator of the ISJ Management Presidium (1989-2003)

Concurrent Positions

- Founder and Chair of the Jakarta Transport Demand Management (TDM) Coalition (2010-present)
- Founder and Coordinator of the Jakarta Citizens Coalition for Transportation (KAWAT) (2009-present)
- Founder and Board of LBH Pers (2006-present)
- Member of the Indonesian Advocates Association (AAI) (2004-present)

Affiliations

Has no affiliation with other member(s) of the Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major/Controlling Shareholders



**Mohamad
Pramintohadi
Sukarno**

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan: 5 Oktober 2023 - Sekarang
Term of Office: October 5, 2023 - Present

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 60 tahun per 31 Desember 2023
Ketahuan Yogyakarta, 21 Mei 1963

Domisili

Tangerang, Banten, Indonesia

Riwayat Pendidikan

1. S2 Magister Transportasi, Institut Teknologi Bandung (1993)
2. S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (1987)

Sertifikasi

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

- Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT LRT Jakarta no. 001/KPS/123/X/2023;
- Akta PKPS PT. LRT Jakarta Nomor 01 tanggal 3 November 2023
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT LRT Jakarta Nomor AHU-AH.01.09-0182131.

Riwayat Pekerjaan

1. Analis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Perhubungan (2023-sekarang)
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (2022-2023)
3. Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, dan Lingkungan Perhubungan Kementerian Perhubungan (2022)
4. Direktur Utama Airnav Indonesia (2020-2022)
5. Staf Ahli Bidang Teknologi, Energi, Dan Lingkungan Perhubungan Kementerian Perhubungan (2019-2020)
6. Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan (2018-2019)
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Plt Dirjen Hubud) Kementerian Perhubungan (2018)
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (2015-2016)
9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (2015)
10. Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah V Kelas I Hasanuddin Makassar Kementerian Perhubungan (2015)
11. Kepala Kantor Otoritas Wilayah III Bandar Udara Kelas I Juanda Surabaya Kementerian Perhubungan (2014-2015)
12. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan Kementerian Perhubungan (2013-2014)
13. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Jakarta Kementerian Perhubungan (2011-2013)
14. Kabag TU Kantor Otoritas Bandar Udara Wil. I Kelas Utama Soetta Kementerian Perhubungan (2011-2013)
15. Atase Perhubungan KBRI Canada (2007-2011)
16. Kabid Ketertiban Adban Juanda Surabaya Kementerian Perhubungan (2005-2007)
17. Kasi Mutu Tanah Kementerian Perhubungan (1999-2005)
18. Pimbagpro KTI Kementerian Perhubungan (1996-1999)
19. Staf Subdit Penyelidikan dan Standarisasi Kementerian Perhubungan (1987-1996)

Rangkap Jabatan

Analis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Perhubungan (2023-sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Personal Data

Indonesian citizen
Age 60 years old as of December 31, 2023
Born in Yogyakarta, May 21, 1963

Domicile

Tangerang, Banten, Indonesia

Educational Background

1. Master of Transportation, Bandung Institute of Technology (1993)
2. Bachelor's Degree in Civil Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology (1987)

Certifications

History and Legal Basis of Appointment

- Resolution of Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 001/KPS/123/X/2023;
- Deed of Amendment to the Articles of Association of PT LRT Jakarta No. 01 dated November 3, 2023
- Letter of Acceptance of Notification of Company Data Change of PT. LRT Jakarta No. AHU-AH.01.09-0182131.

Work Experience

1. Policy Analyst, Main Expert, Ministry of Transportation (2023-present)
2. Inspector General, Ministry of Transportation (2022-2023)
3. Expert Staff for Transportation Technology, Energy, and Environment, Ministry of Transportation (2022)
4. President Director of Airnav Indonesia (2020-2022)
5. Expert Staff for Transportation Technology, Energy, and Environment, Ministry of Transportation (2019-2020)
6. Director of Airports, Ministry of Transportation (2018-2019)
7. Secretary of Directorate General of Civil Aviation (Acting Director General of Land Transportation), Ministry of Transportation (2018)
8. Secretary of the Directorate General of Civil Aviation, Ministry of Transportation (2015-2016)
9. Head of the Research and Development Center for Civil Aviation, Ministry of Transportation (2015)
10. Head of Airport Authority Office for Region V Class I Hasanuddin Makassar, Ministry of Transportation (2015)
11. Head of Airport Authority Office for Region III Class I Juanda Surabaya, Ministry of Transportation (2014-2015)
12. Head of Airport Authority Office for Region II Medan, Ministry of Transportation (2013-2014)
13. Head of Administration Division of Airport Authority Office for Region I Jakarta, Ministry of Transportation (2011-2013)
14. Head of Administration Division of Airport Authority Office for Region I Main Class Soetta, Ministry of Transportation (2011-2013)
15. Transportation Attaché at the Indonesian Embassy in Canada (2007-2011)
16. Head of Order Adban Juanda Surabaya, Ministry of Transportation (2005-2007)
17. Head of Land Quality Section, Ministry of Transportation (1999-2005)
18. Project Leader for KTI, Ministry of Transportation (1996-1999)
19. Staff of Sub-Directorate of Investigation and Standardization, Ministry of Transportation (1987-1996)

Concurrent Positions

Policy Analyst, Main Expert Staff, Ministry of Transportation (2023-present)

Affiliations

Has no affiliation with other member(s) of the Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major/Controlling Shareholders

PROFIL DIREKSI

PROFILE OF THE BOARD OF BOARD OF DIRECTORS

Sepanjang tahun 2023 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Direksi Perusahaan. Adapun profil Direksi yang menjabat per 31 Desember 2023, sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

Throughout 2023 until the signing of this Annual Report, there has been no change in the composition of the Company's Board of Directors. The profile of the Directors serving the Company as of December 31, 2023, until the signing of this Annual Report, is as follows.



Aditia Kesuma Negara

Direktur Operasi dan

Pengembangan

Director of Operations and
Development

Hendri Saputra

Direktur Utama

President Director

Sahurdi

Direktur Keuangan dan

Dukungan Bisnis

Director of Finance and Business
Support



**Hendri
Saputra**

Direktur Utama
President Director

Periode Jabatan: 3 November 2021 - sekarang, Periode ke-1
Term of Office: November 3, 2021 - Present, 1st Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 53 tahun per 31 Desember 2023
Ketahiran 13 Juni 1970

Domisili

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Jurusan Fisika, Prodi Geofisika dari Universitas Indonesia (1995)

Sertifikasi

Riwayat Penunjukan dan Dasar Hukum

- KPPS No.001/KPPS/XII/2021
- Akta PKPS no. 01 tanggal 03 Januari 2022
- Surat penerimaan pemberitahuan Data Perseroan No. AHU.01.03-0001476

Riwayat Pekerjaan

1. President Director, PT LRT Jakarta (2021-sekarang)
2. Project Management Office Division Head (Senior Manager), PT. Jakarta Propertindo (Perseroda) (2021)
3. Business Process Improvement Manager/ System Implementation Head, PT. Tripatra Engineers and Constructors (Member of Indika Energy Group) (2012-2019)
4. Head of Management System (MBOS), Procurement Improvement & Analysis Strategic Procurement Division, Asia Pulp & Paper, Ltd. (Sinar Mas Group) (2008-2012)
5. Business Process & System Improvement Manager, HQ Purchasing/ Corporate Procurement, Asia Pulp & Paper, Ltd. (Sinar Mas Group) (2005-2008)
6. Business Process Manager, Technocenter Division, Asia Pulp & Paper, Ltd. (Sinar Mas Group) (2002-2005)
7. Business Process Specialist, PT. Dunamis Intra Mitra (Franklin Covey Indonesia) (2001-2002)
8. Total Optimization of Processes (TOPs) Manager, Automation Segment Indonesia, PT. ABB Sakti Industri (ABB Group) (1999-2001)
9. Quality Coordinator, PT. ABB Sakti Industri (ABB Group) (1995-1999)

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Personal Data

Indonesian citizen
53 years old as of December 31, 2023
Born June 13, 1970

Domicile

Bogor, West Java, Indonesia

Educational Background

Bachelor's Degree in Physics, Geophysics Study Program from the University of Indonesia (1995)

Certifications

History and Legal Basis of Appointment

- KPPS No.001/KPPS/XII/2021
- Deed of PKPS no. 01 dated January 03, 2022
- Letter of acceptance of notification of Company Data No. AHU.01.03-0001476

Work Experience

1. President Director, PT LRT Jakarta (2021-present)
2. Project Management Office Division Head (Senior Manager), PT. Jakarta Propertindo (Perseroda) (2021)
3. Business Process Improvement Manager/ System Implementation Head, PT. Tripatra Engineers and Constructors (Member of Indika Energy Group) (2012-2019)
4. Head of Management System (MBOS), Procurement Improvement & Analysis Strategic Procurement Division, Asia Pulp & Paper, Ltd. (Sinar Mas Group) (2008-2012)
5. Business Process & System Improvement Manager, HQ Purchasing/ Corporate Procurement, Asia Pulp & Paper, Ltd. (Sinar Mas Group) (2005-2008)
6. Business Process Manager, Technocenter Division, Asia Pulp & Paper, Ltd. (Sinar Mas Group) (2002-2005)
7. Business Process Specialist, PT. Dunamis Intra Mitra (Franklin Covey Indonesia) (2001-2002)
8. Total Optimization of Processes (TOPs) Manager, Automation Segment Indonesia, PT. ABB Sakti Industri (ABB Group) (1999-2001)
9. Quality Coordinator, PT. ABB Sakti Industri (ABB Group) (1995-1999)

Concurrent Positions

No concurrent positions

Affiliations

Has no affiliation with other member(s) of the Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major/Controlling Shareholders

Sahurdi**Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis**

Director of Finance and Business Support

Periode Jabatan: 7 Oktober 2022 - sekarang Periode ke-1

Term of Office: October 7, 2022 – Present, 1st Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 51 tahun per 31 Desember 2023

Ketahiran 1972

Domisili

Bogor, Jawa Barat Indonesia

Riwayat Penunjukan

- Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta No. 103/UT2000/X/2022/0321;
- Akta PKPS PT. LRT Jakarta Nomor 22;
- Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. LRT Jakarta Nomor AHU-AH.01.09.0066816.

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Universitas Andalas, Sumatera Barat (1996)

Sertifikasi

-

Riwayat Pekerjaan

- Director of Finance and Business Support PT LRT Jakarta (2022-sekarang)
- General Manager of Project Acquisition & Development, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (2022)
- General Manager of Strategic Business and Procurement, PT LRT Jakarta (2019-2022)
- General Manager Business Support, PT LRT Jakarta (2018-2019)
- Vice President (Plt) Corporate Secretary, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (2017-2018)
- Vice President Procurement & Facility Management, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia tahun (2010-2018)

Informasi Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Personal Data

Indonesian citizen

51 years old as of December 31, 2023

Born in 1972

Domicile

Bogor, West Java, Indonesia

History and Legal Basis of Appointment

- Circular Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta No. 103/UT2000/X/2022/0321;
- Deed of PKPS of PT LRT Jakarta No. 22;
- Letter of Acceptance of Notification of Change of Company Data of PT LRT Jakarta No. AHU-AH.01.09.0066816

Educational Background

Bachelor's Degree in Civil Engineering from Andalas University, West Sumatera (1996)

Certifications

-

Work Experience

- Director of Finance and Business Support PT LRT Jakarta (2022-present)
- General Manager of Project Acquisition & Development, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (2022)
- General Manager of Strategic Business and Procurement, PT LRT Jakarta (2019-2022)
- General Manager Business Support, PT LRT Jakarta (2018-2019)
- Vice President (Act) Corporate Secretary, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (2017-2018)
- Vice President Procurement & Facility Management, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia tahun (2010-2018)

Concurrent Positions

No concurrent positions

Affiliations

Has no affiliation with other member(s) of the Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major/Controlling Shareholders



**Aditia
Kesuma
Negara**

Direktur Operasi dan Pengembangan

Director of Operations and Development

Periode Jabatan: 3 November 2021 – sekarang Periode Ke-1

Term of Office: November 3, 2021 - Present, 1st Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 38 tahun per 31 Desember 2023
Ketahuan Medan, 20 Agustus 1985

Domisili

DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Penunjukan

- KPPS No.001/KPPS/XII/2021
- Akta PKPS no. 01 tanggal 03 Januari 2022

Riwayat Pendidikan

1. Doctoral Degree Program in Economic Business, Universitas Padjadjaran (2020-sekarang)
2. Research Student di Kyushu University, Jepang, (2011)
3. Magister (S2) Program Master Sistem & Teknik Transportasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, (2011)
4. Sarjana (S1) Teknik Sipil dan Lingkungan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, (2009)

Sertifikasi

1. Engineering Professional Certified (Ir.), Universitas Gadjah Mada (2019)
2. Senior Professional Engineer (IPM), Persatuan Insinyur Indonesia (2019)
3. ASEAN Engineering Certified (ASEAN Eng) (2019)

Riwayat Pekerjaan

1. Director of Operation and Development PT LRT Jakarta (2021 – sekarang)
2. General Manager of Operation and Services LRT Jakarta (2018-2021)
3. Lecturer at Civil Engineering of Mercubuana University (2018-sekarang)
4. PMO Manager & Acting Project Manager Rolling Stock for LRT Jakarta PT. Jakarta Propertindo (2016-2018)
5. Chief Civil Expert Assistant, Jakarta MRT Construction Management Consultant (2014-2016)
6. Co-Team Leader, Management Consultant of North Line Double Track Project (2012-2014)
7. Transport Associate, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) (2011-2012)

Informasi Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris maupun dengan pemegang saham pengendali dan utama.

Personal Data

Indonesian citizen
38 years old as of December 31, 2023
Born in Medan, August 20, 1985

Domicile

DKI Jakarta, Indonesia

History and Legal Basis of Appointment

- KPPS No.001/KPPS/XII/2021
- Deed of PKPS no. 01 dated January 03, 2022

Educational Background

1. Doctoral Degree Program in Economic Business, Padjadjaran University (2020-present)
2. Research Student at Kyushu University, Japan, (2011)
3. Master in Transportation Systems & Engineering from Gadjah Mada University (UGM) Yogyakarta, (2011)
4. Bachelor of Civil and Environmental Engineering from Gadjah Mada University (UGM) Yogyakarta, (2009)

Certifications

1. Engineering Professional Certified (Ir.), University Gadjah Mada (2019)
2. Senior Professional Engineer (IPM), Persatuan Insinyur Indonesia (2019)
3. ASEAN Engineering Certified (ASEAN Eng) (2019)

Work Experience

1. Director of Operations and Development PT LRT Jakarta (2021 – present)
2. General Manager of Operation and Services LRT Jakarta (2018-2021)
3. Lecturer at Civil Engineering of Mercubuana University (2018-present)
4. PMO Manager & Acting Project Manager Rolling Stock for LRT Jakarta PT. Jakarta Propertindo (2016-2018)
5. Chief Civil Expert Assistant, Jakarta MRT Construction Management Consultant (2014-2016)
6. Co-Team Leader, Management Consultant of North Line Double Track Project (2012-2014)
7. Transport Associate, Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) (2011-2012)

Concurrent Positions

No concurrent positions

Affiliations

Has no affiliation with other member(s) of the Board of Commissioners, Board of Directors, or with Major/Controlling Shareholders

PEJABAT EKSEKUTIF

EXECUTIVE OFFICERS



Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	: 52 tahun per 31 Desember 2023 52 years old, as of December 31, 2023
Domisili Domicile	: Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	: 1 Desember 2019 December 1, 2019
Riwayat Pendidikan Educational Background	: German Dual System pendidikan Teknik Mesin Siemens di Cilegon dan Industriekaufmann dari Yayasan Bina Eksekutif Jakarta (1995) German Dual System, Siemens Mechanical Engineering Education in Cilegon and Industriekaufmann from the Jakarta Executive Development Foundation (1995)
Pengalaman Kerja Work Experience	: <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Prasarana PT LRT Jakarta • Plt. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT LRT Jakarta • Kepala Divisi Sarana, PT LRT Jakarta • Project Controlling Team Metal Industry di Siemens, Erlangen Germany • Head of Commercial & Business Administration Divisi Automation & Control di Siemens • Divisi Telekomunikasi Siemens • Head of Customer Team Finance & Control di Nokia • Head of Infrastructure Division, PT LRT Jakarta • Act. Head of Corporate Secretary Division, PT LRT Jakarta • Head of Facilities Division, PT LRT Jakarta • Project Controlling Team Metal Industry in Siemens, Erlangen Germany • Head of Commercial & Business Administration Automation & Control Division at Siemens • Telecommunications Division at Siemens • Head of Customer Team Finance & Control at Nokia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi no. 001/SDM/106/VI/2023 Decree of the Board of Directors No. 001/SDM/106/VI/2023



**Aris Rizal
Arafah**

Kepala Divisi Pengembangan Bisnis
Head of Business Development Division

Menjabat sejak Maret 2022
Held office since: March 2022

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	33 tahun per 31 Desember 2023 33 years old, as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Bogor, Jawa Barat, Indonesia Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	1 Agustus 2018 August 1, 2018
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada tahun 2017 Master of Management from Gadjah Mada University in 2017
Pengalaman Kerja Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Departemen Subsidi dan Anggaran PT LRT Jakarta • Finance Executive PT LRT Jakarta • Head of Subsidy and Budget Department of PT LRT Jakarta • Finance Executive PT LRT Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi Nomor : 018/SDM/111/III/2022 Decree of the Board of Directors No. 018/SDM/111/III/2022

**Muhamad
Balfas**

Kepala Divisi Manajemen Rantai Pasok
Head of Supply Chain Management Division

Menjabat sejak Maret 2022
Held office since: March 2022

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	43 tahun per 31 Desember 2023 43 years old, as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	16 September 2019 September 16, 2019
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Advance Diploma in Business Management, Australian Pacific College, Australia (2010)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> • Procurement Manager di PT LRT Jakarta • Deputy Head of Procurement di Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jakarta • Supply Chain Executive di PT Biomin Indonesia • Procurement Manager at PT LRT Jakarta • Deputy Head of Procurement di Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jakarta • Supply Chain Executive at PT Biomin Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi no. 019/SDM/111/2022 Decree of the Board of Directors No. 019/SDM/111/2022



**Budi
Sarjono**

Kepala Divisi Keuangan & Akuntansi
Head of Finance & Accounting Division

Menjabat sejak Februari 2021
Held office since: February 2021

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	51 tahun per 31 Desember 2023 51 years old, as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	1 Februari 2021 February 1, 2021
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen IMMI (2012) Master of Management IMMI College of Management (2012)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> • Finance and Administration Manager di PT Wijaya Karya 2015-2021 • Assistant Accounting Manager PT Adhimix Precast 2006-2015 • Financial and Personnel Staff di PT Wijaya Karya Beton 1994-2005 • Finance and Administration Manager at PT Wijaya Karya 2015-2021 • Assistant Accounting Manager at PT Adhimix Precast 2006-2015 • Financial and Personnel Staff at PT Wijaya Karya Beton 1994-2005
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi No. 001/SDM/106/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 Board of Directors Decree No: 001/SDM/106/II/2021 dated February 1, 2021



**Sheila Indira
Maharshi**

Kepala Divisi Corporate Secretary
Head of Corporate Secretary Division

Menjabat sejak April 2022
Held office since: April 2022

Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	36 tahun per 31 Desember 2023 36 years old, as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Bekasi, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	18 April 2022 April 18, 2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjajaran (2008) Bachelor of Communication Science from Padjadjaran University (2008)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> • Lead of Corporate Communication di PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) 2017 - 2022 • Senior Manager Public Relations di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2008-2017 • Lead of Corporate Communication at PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) 2017 - 2022 • Senior Manager Public Relations at PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2008-2017
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi No. 004/SDM/106/VII/2022 Decree of the Board of Directors No. 004/SDM/106/VII/2022

Kepala Divisi Teknologi Informasi
Head of Information Technology Division
Menjabat sejak Maret 2022
Held office since: March 2022

**Rangga
Dharmasetiawan**



Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	37 tahun per 31 Desember 2023 37 years old, as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	14 Maret 2022 March 14, 2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	Sarjana Teknologi Informasi dari Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Amerika (LPKIA) (2009) Bachelor of Information Technology from the American Indonesian Computer Education Institute (LPKIA) (2009)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> • Head of IT, PT Gelora Muda Teknologi 2020 – 2022 • Business Analyst, PT Jakarta Propertindo 2019 – 2020 • Chief Operation & Administrative Officer, PT Zloob Digital Kreasi 2018 – 2019 • Head of ICT, PT Jakarta Propertindo 2016 – 2019 • Chief Operation & Administrative Officer, PT Zloob Digital Kreasi 2018 – 2019 • Head of ICT, PT Jakarta Propertindo 2016 – 2019 • Chief Operation & Administrative Officer, PT Zloob Digital Kreasi 2018 – 2019 • Head of ICT, PT Jakarta Propertindo 2016 – 2019
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi no.006/SDM/106/VI/2022 Decree of the Board of Directors No. 006/SDM/106/VI/2022

Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Bagian Umum
Head of Human Resources and General Affairs Division

Menjabat sejak November 2022
Held office since: November 2022

**Sayed
Syahridhan**



Kewarganegaraan Citizenship	:	Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	:	40 tahun per 31 Desember 2023 40 years old, as of December 31, 2023
Domisili Domicile	:	DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	1 November 2022 November 1, 2022
Riwayat Pendidikan Educational Background	:	<ul style="list-style-type: none"> • Magister Management dari PPM Management, Jakarta (2008) • Sarjana Teknik Industri dari STT Telkom Bandung (2006) • Master of Management from PPM Management, Jakarta (2008) • Bachelor of Industrial Engineering from STT Telkom Bandung (2006)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Dewan Komisaris, PT MRT Jakarta (Perseroda) 2021 - 2022 • Human Capital Services Department Head, PT MRT Jakarta (Perseroda) 2018 – 2021 • Planning Program Development Manager, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk 2014 – 2018 • Secretary to the Board of Commissioners, PT MRT Jakarta (Perseroda) 2021 – 2022 • Human Capital Services Department Head, PT MRT Jakarta (Perseroda) 2018 – 2021 • Planning Program Development Manager, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk 2014 – 2018
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi no. 016/SDM/106/II/2023 Decree of the Board of Directors No. 016/SDM/106/II/2023



Ardian Yusuf

Kepala Divisi Mutu, Keselamatan, Keamanan, Kesehatan & Lingkungan

Head of Quality, Safety, Security, Health & Environment Division

Menjabat sejak November 2022

Held office since : November 2022

Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	: 45 tahun per 31 Desember 2023 45 years old, as of December 31, 2023
Domisili Domicile	: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	: 01 Oktober 2018 October 1, 2018
Riwayat Pendidikan Educational Background	: Sarjana Teknik Kimia dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Bachelor of Chemical Engineering from Muhammadiyah University, Jakarta
Pengalaman Kerja Work Experience	: <ul style="list-style-type: none"> QSHE Manager, PT LRT Jakarta 2018 – 2022 Regional Safety Lead, Kimberly-Clark 2015 – 2022 HSES Specialist, AkzoNobel 2014 – 2015
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/SDM/106/XI/2022 Decree of the Board of Directors No. 001/SDM/106/XI/2022



Adrian Kristianto Tamara

Kepala Divisi Sarana

Head of Rolling Stock Division

Menjabat sejak Desember 2022

Held office since: December 2022

Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	: 52 tahun per 31 Desember 2023 52 years old, as of December 31, 2023
Domisili Domicile	: DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	: 09 Desember 2019 December 9, 2019
Riwayat Pendidikan Educational Background	: <ul style="list-style-type: none"> Magister Teknik Perkeretaapian dari Institut Teknologi Bandung, 2001 Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya, 1995 Master of Railway Engineering from the Bandung Institute of Technology, 2001 Bachelor of Mechanical Engineering from Brawijaya University, 1995
Pengalaman Kerja Work Experience	: Rolling Stock Maintenance Facility Manager 2019, PT Industri Kereta Api (Persero)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 017/SDM/106/XII/2022 Decree of the Board of Directors No. 017/SDM/106/XII/2022

**Elmy
Nugraha
Utama
Bahar**

Kepala Divisi Prasarana
Head of Infrastructure Division

Menjabat sejak Juni 2023
Held office since June 2023



Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia Indonesian citizen
Usia Age	: 41 tahun per 31 Desember 2023 41 years old, as of December 31, 2023
Domisili Domicile	: DKI Jakarta, Indonesia DKI Jakarta, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	: 7 Juni 2023 June 7, 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	: S1 Teknik Sipil, Universitas Janabadra, 2010 Bachelor of Civil Engineering, Janabadra University, 2010
Pengalaman Kerja Work Experience	: <ul style="list-style-type: none"> Plt. Kepala Divisi Operasi dan Pelayanan, 2023 Manager Penjadwalan, Pembiayaan & Kesekretariatan - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (2019-2021) Asisten Manager Pengawas & Pengendalian Proyek - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (2017-2019) Quantity Surveyor - PT Inti Era Cipta (2015-2017) Engineer Sipil - PT Dardela Yasa Guna (2008-2015) Pelaksana Lapangan - PT Karya Putra Yasa (2004-2006) Acting Head of Operations and Services Division, 2023 Manager of Scheduling, Financing & Secretarial Affairs - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (2019-2021) Assistant Manager of Project Supervision & Control - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (2017-2019) Quantity Surveyor - PT Inti Era Cipta (2015-2017) Civil Engineer - PT Dardela Yasa Guna (2008-2015) Field Executor - PT Karya Putra Yasa (2004-2006)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 002/SDM/106/VI/2023 Decree of the Board of Directors No. 002/SDM/106/VI/2023

**Adityawarman
Nugroho**

Kepala Divisi Internal Audit
Head of Internal Audit Division

Menjabat sejak Juli 2023
Held office since July 2023



Kewarganegaraan Citizenship	: Warga Negara Indonesia Indonesian
Usia Age	: 36 tahun per 31 Desember 2023 36 years old, as of December 31, 2023
Domisili Domicile	: Depok, Jawa Barat, Indonesia Depok, West Java, Indonesia
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	: 3 Juli 2023 July 3, 2023
Riwayat Pendidikan Educational Background	: <ul style="list-style-type: none"> S2 Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta (2019) S1 Ekonomi Akuntansi, Universitas Sultan Agung Semarang, (2010) Master of Management, Jakarta State University (2019) Bachelor of Economy Accounting, Sultan Agung Semarang University
Pengalaman Kerja Work Experience	: <ul style="list-style-type: none"> Komite Audit, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (2022-sekarang) Kepala Departemen Audit Internal, PT Jakarta Propertindo (2018-2023) Audit Committee, PT Jakarta Infrastructure Propertindo (2022-present) Head of Internal Audit Department, PT Jakarta Propertindo (2018-2023)
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	: Surat Keputusan Direksi No. 003/SDM/106/VII/2023 Decree of the Board of Directors No. 003/SDM/106/VII

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN SEKILAS TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS AND COMPETENCY DEVELOPMENT

Dalam menjalankan pengelolaan karyawan, Perusahaan senantiasa menerapkan prinsip non diskriminatif secara ketat dan konsisten kepada seluruh karyawannya, dengan keberagaman latar belakang dari setiap karyawan LRT Jakarta. Perusahaan juga memiliki kebijakan untuk penerimaan, penilaian kinerja, remunerasi dan pengembangan karier tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Per 31 Desember 2023, jumlah karyawan Perusahaan mencapai 277 orang, mengalami peningkatan sebesar 5,72% dibandingkan jumlah karyawan di tahun 2022 yang sebanyak 262 orang. Peningkatan ini disebabkan oleh optimalisasi pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia LRT Jakarta.

In conducting its employee management, The Company always strictly and consistently applies nondiscriminatory principles to all its employees, this can be illustrated by the diversity of backgrounds of each LRT Jakarta employee. In addition, the Company also has a policy for acceptance, performance appraisal, remuneration and career development, regardless of ethnicity, religion, race, class, gender, and physical condition.

As of December 31, 2023, the number of employees of the Company amounted to 227 people, an increase of 5.72% compared to the number of employees in 2022 of 262 people. The increase was caused by the optimization of fulfilling the human resources requirements of LRT Jakarta.

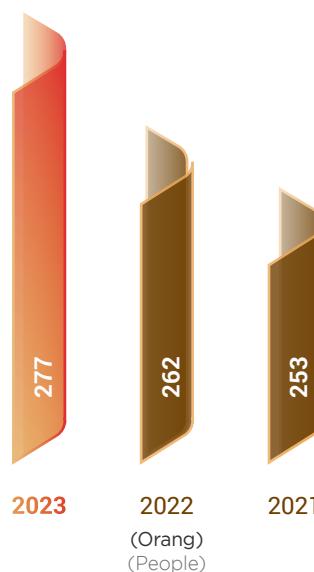
Pergerakan Jumlah Karyawan 2021-2023 (orang)

Trend in Number of Employee 2020-2023 (People)

Tahun Year	Jumlah Karyawan (orang) Number of Employee (People)
2021	253
2022	262
2023	277

Pergerakan Jumlah Karyawan

Trend in Number of Employee



Demografi Karyawan berdasarkan Level Organisasi/Jabatan (orang)
Employee Demographics by Organization/Position Level (people)

Level Organisasi/ Jabatan Organization/ Position Level	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition	Selisih Difference	Percentase Percentage
Komisaris Commissioners	3	0	3	1,1%	2	0	2	0,8%	1	0,30% ▲
Direksi Directors	3	0	3	1,1%	3	0	3	1,1%	0	0,00% ▼
GM	10	1	11	4,0%	9	1	10	3,8%	1	0,20% ▲
Manajer Manager	20	6	26	9,4%	21	6	27	10,3%	-1	-0,90% ▼
Asst. Manajer Asst. Managers	18	4	22	7,9%	14	4	18	6,9%	4	1,00% ▲
Supervisor	27	7	34	12,3%	29	7	36	13,7%	-2	1,40% ▲
Officer	69	29	98	35,4%	60	23	83	31,7%	15	3,70% ▲
Staff	57	23	80	28,9%	53	30	83	31,7%	-3	-2,80% ▼
Jumlah Total	207	70	277	100%	191	71	262	100%	15	0,10% ▲

L = Laki-laki/P = Perempuan

M = Male/F = Female

Demografi Karyawan berdasarkan Status Karyawan (orang)
Employee Demographics by Employee Status (People)

Status	2023				2022					
	L M	P F	Jumlah Number		L M	P F	Jumlah Number			
Karyawan Tetap Full Time Employees	185	64	249		177	61	238			▲
Karyawan Tidak Tetap Contract Employees	16	6	22		9	10	19			▲
Pekerja Lain Other Workers	6	0	6		5	0	5			▲
Jumlah Total	207	70	277		191	71	262			▲

L = Laki-laki/P = Perempuan

M = Male/F = Female

Demografi Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)
Employee Demographics by Education Level (People)

Tingkat Pendidikan Education Level	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition	Selisih Difference	Percentase Percentage
SMA Highschool	22	1	23	8,3%	21	1	22	8,4%	0	-0,10% ▼
D.III Diploma III	78	31	109	39,4%	73	34	107	40,8%	2	-1,40% ▼
S1/D.IV Bachelor Degree/ Diploma IV	81	35	116	41,9%	74	33	107	40,8%	16	1,10% ▲
S2 Master Degree	26	3	29	10,5%	23	3	26	9,9%	6	0,60% ▲
Jumlah Total	207	70	277	100%	191	71	262	100%	24	0,20% ▲

L = Laki-laki/P = Perempuan

M = Male/F = Female

Demografi Karyawan berdasarkan Usia (orang)

Employee Demographics by Age (People)

Rentang Usia Age Range	2023				2022				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition	Selisih Difference	Percentase Percentage
18 - 30 Tahun 18 - 30 years old	118	53	171	61,7%	117	58	175	66,8%	-4	-5,1% ▼
31 - 40 Tahun 31 - 40 years old	61	14	75	27,1%	48	10	58	22,1%	17	5,0% ▲
41 - 50 Tahun 41 - 50 years old	20	3	23	8,3%	21	3	24	9,2%	-1	-0,9% ▼
> 51 Tahun > 51 years old	8	0	8	2,9%	5	0	5	1,9%	3	1,0% ▲
Jumlah Total	207	70	277	100%	191	71	262	100%	15	0,0% ▲

L = Laki-laki/P = Perempuan

M = Male/F = Female

Demografi Karyawan berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (orang)

Employee Demographics by Gender (People)

Gender	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition	Selisih Difference	Percentase Percentage	
Laki-Laki Male	207	74,7%	191	72,9%	16	1,8% ▲	
Perempuan Female	70	25,3%	71	27,1%	-1	-1,8% ▼	
Jumlah Total	277	100%	262	100%	15	0,0%	-

L = Laki-laki/P = Perempuan

M = Male/F = Female

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

Perusahaan meyakini, Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan profesional akan dapat membantu Perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin dinamis. Oleh karena itu, Perusahaan melaksanakan sejumlah program peningkatan kompetensi SDM yang diselenggarakan secara berkala baik dalam bentuk pelatihan maupun pengembangan bagi jajaran manajemen dan karyawan.

Adapun pengembangan kompetensi karyawan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan pengembangan bisnis Perusahaan maupun kebutuhan masing-masing divisi agar senantiasa mampu mengoptimalkan kompetensinya untuk kemajuan Perusahaan. Berikut tabel jumlah pendidikan dan pelatihan karyawan Perusahaan berdasarkan level jabatan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi di sepanjang tahun 2023.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

The Company believes that excellent and professional Human Resources (HR) will support the Company in facing the increasingly dynamic business challenges. For this reason, the Company conducts a number of HR competency development programs which are held regularly, both in the form of training and development for management and employees.

Employee competency development is conducted by taking into account the needs of the Company's business development as well as the needs of each division so that they are always able to optimize their competencies for the progress of the Company. The following is a table of the number of Company employee education and training by position level which reflects opportunities for each level of the organization throughout 2023.

Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan Tahun 2023
Competency Development by Organization/Position Level in 2023

Level Jabatan Position Level	Jenis dan Tujuan Pelatihan Type and Objectives of Training	Akademi Academy	Komposisi Peserta Composition of Participants				
			Laki-Laki Male	Percentase Percentage	Perempuan Female	Percentase Percentage	Jumlah Total
Direksi Directors	Softskill & Hardskill dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang pekerjaannya. Soft skills and hard skills are aimed at enhancing competence in their respective fields of work.	Inhouse/ Eksternal Provide by LRTJ Inhouse/ External Provide by LRTJ	4	100%	0	0%	4
GM			78	94%	5	6%	83
Manager			246	79%	66	21%	312
Asst. Manager			146	76%	45	24%	191
Supervisor			257	81%	62	19%	319
Officer			432	72%	170	28%	602
Staff			308	63%	178	37%	486

BIAYA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARYAWAN

Perusahaan memiliki komitmen yang besar untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya insani yang dimilikinya diwujudkan dengan penyediaan anggaran investasi pada program pengembangan kompetensi pegawai secara berkelanjutan. Realisasi biaya pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp5.486.790.970,- yang mana mengalami peningkatan sebesar Rp1.074.481.208,- atau sebesar 24% dari tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp4.412.309.762,-, hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas training hardskill serta pengembangan program *Leadership Management Development Program* (LMDP) yang diwajibkan untuk level Managerial.

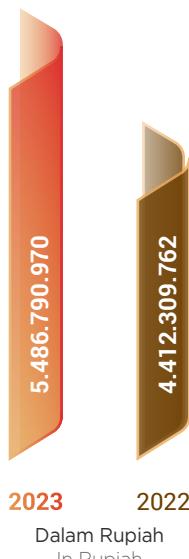
EMPLOYEE TRAINING AND DEVELOPMENT COSTS

The Company has a strong commitment to continuously improve the capacity and quality of its human resources, which is realized by providing an investment budget for employee competency development programs on an ongoing basis. The realization of employee competency development costs in 2023 amounted to IDR5,486,790,970, which experienced an increase of IDR1,074,481,208, or 24% from 2022, which amounted to IDR4,412,309,762. This increase was due to the heightened activities in hard skill training and the implementation of the Leadership Management Development Program (LMDP) mandated for managerial levels.

Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan
Employee Competency Development Costs

	2023 (Rp) (IDR)	2022 (Rp) (IDR)	Perbandingan Realisasi 2023 dan 2022	
			Comparison of 2023 vs. 2022 Realization	Selisih (Rp) Difference (IDR)
Pendidikan dan Pelatihan Training and Education	Rp5.486.790.970	Rp4.412.309.762	Rp1.074.481.208,-	24% 

Biaya Pengembangan Kompetensi
Competency Development Costs



PENDIDIKAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, AUDIT INTERNAL, DAN UNIT MANAJEMEN RISIKO

EDUCATION AND/OR TRAINING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, INTERNAL AUDIT, AND RISK MANAGEMENT UNIT

Berikut informasi tentang program peningkatan kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, Sekretaris Perusahaan, Audit Internal, dan Unit Manajemen Risiko, di sepanjang tahun 2023.

The following is information about the competency development program for the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Internal Audit, and Risk Management Unit, throughout 2023.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Date/Location	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Azas Tigor Nainggolan	Hardskill	Seminar Nasional Internal Audit "Trusted Advisor: Navigating the New Frontier" National Seminar on Internal Audit "Trusted Advisor: Navigating the New Frontier"	6 Desember 2023 December 6, 2023	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)
Direksi Board of Directors				
Hendri Saputra	Hardskill	Risk Management & Value Creation	6 Maret 2023 March 6, 2023	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS)
Aditia Kesuma Negara Dalimunthe	Hardskill	Risk Management & Value Creation	6 Maret 2023 March 6, 2023	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS)
	Hardskill	Urban Mobility Challenges & Solution	6 Maret 2023 March 6, 2023	PT LRT Jakarta
	Hardskill	Akuntansi Untuk Aset Tetap Accounting for Fixed Assets	21 Januari 2023 January 21, 2023	UNPAD LUHUNG
Sahurdi ST	Hardskill	World Class HR Director School	25 Januari 2023 January 25, 2023	Intipesan
	Hardskill	Risk Management & Value Creation	6 Maret 2023 March 6, 2023	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS)
	Hardskill	Driving Business Growth Through People Development	6 Maret 2023 March 6, 2023	PT LRT Jakarta

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Date/Location	Penyelenggara Organizer
Komite Audit Audit Committee				
Sarno	Hardskill	Seminar Nasional Internal Audit "Trusted Advisor: Navigating the New Frontier" National Seminar on Internal Audit "Trusted Advisor: Navigating the New Frontier"	6 Desember 2023 December 6, 2023	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary				
Sheila Indira Maharsih	Hardskill	Risk Management & Value Creation	6 Maret 2023 March 6, 2023	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS)
	Hardskill	SMART Key Performance Indicator	14 Maret 2023 March 14, 2023	PT Proquaman Konsultan
	Hardskill	Stakeholder Mapping	31 Juli 2023 July 31, 2023	Center for Public Relations, Outreach and Communication (CPRCOM)
	Softskill	LMDP-SMDP-Leadership Effectiveness	13 November 2023 November 13, 2023	Asian Leadersip
	Softskill	LMDP-SMDP-Business Performance & Productivity	5 Desember 2023 December 5, 2023	PT Sandika Darsa Lentera Raya (SANDLER)
Kepala Audit Internal Head of Internal Audit				
Adityawarman Nugroho	Hardskill	Stakeholder Mapping	31 Juli 2023 July 31, 2023	Center for Public Relations, Outreach and Communication (CPRCOM)
	Hardksill	Forensik Internal Audit Internal Audit Forensics	23 Oktober 2023 October 23, 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSPAF) Professional Certification Institute of Forensics Auditor (LSPAF)
	Softskill	LMDP-SMDP-Leadership Effectiveness	13 November 2023 November 13, 2023	Asian Leadersip
	Softskill	Communication & Negotiation Skill	16 November 2023 November 16, 2023	Inspigo
	Softskill	Problem Solving Decision Making & Critical Thinking Skill	16 November 2023 November 16, 2023	Inspigo
	Softskill	LMDP-SMDP-Business Performance & Productivity	19 Desember 2023 December 19, 2023	PT Sandika Darsa Lentera Raya (SANDLER)
Kepala Manajemen Risiko Head of Risk Management				
Tridewi Pujamawaty	Hardskill	SMK3 - Safety Leadership	7 Februari 2023 February 7, 2023	Department Quality, Safety, Health, & Environment LRT Jakarta
	Hardskill	Good Corporate Governance (GCG) Implementation	22 Februari 2023 February 22, 2023	Arcarta Consultan
	Hardskill	Risk Management & Value Creation	6 Maret 2023 March 6, 2023	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS)
	Hardskill	SMART Key Performance Indicator	14 Maret 2023 March 14, 29023	PT Proquaman Konsultan

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Date/Location	Penyelenggara Organizer
	Hardskill	Stakeholder Mapping	31 Juli 2023 July 31, 2023	Center for Public Relations, Outreach and Communication (CPROCOM)
	Hardskill	Certified Governance Professional	21 Agustus 2023 August 21, 2023	Center for Risk Management & Sustainability (CRMS)
	Hardskill	Training of Trainers Sertifikasi BNSP Training of Trainers BNSP Certification	5 September 2023 September 5, 2023	PT Phitagoras
	Hardskill	ISO 19011:2018 Panduan Audit Sistem Manajemen/ Refreshment Auditor Internal 2023 ISO 19011:2018 Management System Audit Guidelines / Internal Auditor Refreshment 2023	26 September 2023 September 26, 2023	PT Nawasena
	Softskill	LMDP-MMDP-Leadership Effectiveness	13 November 2023 November 13, 2023	Asian Leadersip
	Softskill	Communication & Negotiation Skill	16 November 2023 November 16, 2023	Inspigo
	Softskill	Problem Solving Decision Making & Critical Thinking Skill	16 November 2023 November 16, 2023	Inspigo
	Softskill	LMDP-MMDP-Business Performance & Productivity	6 Desember 2023 December 6, 2023	PT Sandika Darsa Lentera Raya (SANDLER)

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDER COMPOSITION

INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN

INFORMATION ON THE COMPANY'S SHARE OWNERSHIP

Pemegang Saham Share Ownership	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (Share)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Issued and Fully Paid Capital (IDR)	Percentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	3.323.934	332.393.400.000	99,55%
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	15.000	1.500.000.000	0,45%
Jumlah Total	3.338.934	333.893.400.000	100,00%

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2023
Composition of the Company's Shareholders As of December 31, 2023

PT Jakarta Infrastruktur Propertindo



Sebagai bentuk pemenuhan *compliance* atas terbitnya Izin Operasi Sarana Nomor 1540 Tahun 2019 yang telah diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT LRT Jakarta, maka pada tahun 2020 telah dilakukan inbreng sebanyak 3 (tiga) trainset LRV dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda), sebagaimana tertuang di dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham nomor 75 tanggal 26 Oktober 2020 yang dibuat oleh Wiwik Condro SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor A HU-AH.01.03-0408252 tanggal 17 November 2020.

As a form of compliance with the issuance of the Facility Operation Permit No. 1540 of 2019, which has been granted by DKI Jakarta Provincial Government to PT LRT Jakarta, in 2020, 3 (three) LRV trainsets have been transferred from PT Jakarta Propertindo (Perseroda), as stated in the Deed of Declaration of Shareholders' Resolution No. 75 dated October 26, 2020, drawn up by Wiwik Condro, S.H., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0408252 dated November 17, 2020.

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar rupiah), bertambah sebesar 25% sebesar Rp150.000.000.000,- menjadi 55% atau sejumlah Rp333.893.400.000,-, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100.000 (seratus ribu rupiah).

Dari Modal Dasar tersebut, Modal Ditempatkan dan Disetor penuh oleh Para Pemegang Saham adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 3.323.934 (tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh empat lembar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp333.893.400.000 (tiga ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN OLEH MANAJEMEN KUNCI

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak menerbitkan saham kepada publik maupun terdapat penawaran kepemilikan saham oleh manajemen serta karyawan.

Pursuant to the Company's Deed of Establishment, the Company's Authorized Capital amounted to IDR600,000,000,000 (six hundred billion rupiah), an increase of 25%, or by IDR 150,000,000,000 to 55% or a total of IDR333,893,400,000,- each share with a par value of IDR100,000 (one hundred thousand rupiah).

From the Authorized Capital, the Issued and Fully Paid-up Capital by the Shareholders amounted to 25% (twenty-five percent) or 3,323,934 (three million three hundred twenty-three thousand nine hundred and thirty-four shares) with a total nominal value of IDR333,893,400,000 (three hundred thirty-three billion eight hundred ninety-three million and four hundred thousand rupiah).

INFORMATION ON THE COMPANY'S SHARE OWNERSHIP BY KEY MANAGEMENT

Until the end of 2023, the Company has not issued shares to the public nor has there been an offer of share ownership by management and employees.

Nama dan Jabatan Name and Position	2023		2022	
	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (Per Share)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (Per Share)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Iwan Takwin (Komisaris Utama) Iwan Takwin (President Commissioner)		Nihil None		Nihil None
Azas Tigor Nainggolan (Komisaris) Azas Tigor Nainggolan (Commissioner)				
Mohamad Pramintohadi Sukarno (Komisaris) Mohamad Pramintohadi Sukarno (Commissioner)				
Direksi Board of Directors				
Hendri Saputra (Direktur Utama) Hendri Saputra (President Director)				
Sahurdi (Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis) Sahurdi (Director of Finance and Business Support)		Nihil None		Nihil None
Aditia Kesuma Negara (Direktur Operasi dan Pengembangan) Aditia Kesuma Negara (Director of Operations and Development)				
Jumlah Kepemilikan Saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi Total Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors		Nihil None		Nihil None

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI HINGGA NAMA PEMILIK AKHIR

INFORMATION ON MAJOR SHAREHOLDERS AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS TO THE NAME OF THE ULTIMATE OWNER

“PT Jakarta Propertindo (Perseroda) merupakan pemegang saham utama/ pengendali LRT Jakarta dengan kepemilikan langsung sebesar 99,55%, dan kepemilikan tidak langsung melalui PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sebesar 0,45%.”

“PT Jakarta Propertindo (Perseroda) is the major/controlling shareholder of LRT Jakarta with direct ownership of 99.55%, and indirect ownership through PT Jakarta Infrastructure Propertindo of 0.45%.”

PT Jakarta Propertindo

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) merupakan perusahaan Properti, Infrastruktur, Utilitas dan Teknologi Informasi Komunikasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang awalnya merupakan sebuah Badan Pengelola Lingkungan (BPL) yang didirikan pada tahun 1985 dengan tanggung jawab mengelola kawasan Pluit. Selanjutnya pada September 1997 PT Pembangunan Pluit Jaya dengan limpahan aset dari eks BPL Pluit merger dengan PT Pembangunan Pantai Utara Jakarta. Pada tanggal 15 Desember 2000, kedua perusahaan merger ini berubah menjadi PT Jakarta Propertindo. Dan tahun 2018, Perusahaan menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perusahaan Daerah) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang properti, infrastruktur, utilitas dan teknologi informasi komunikasi milik Pemerintah DKI Jakarta.

Sejak saat itu, Perusahaan tidak hanya membidangi sektor properti, tetapi juga mulai merambah ke sektor infrastruktur. Proyek-proyek ini kemudian meluas pada pembangunan jalan tol, waduk, dan prasarana infrastruktur lain. Pada tahun 2014, Perusahaan kemudian membagi perusahaannya menjadi 3 anak usaha yakni properti, infrastruktur, dan utilitas.

Dengan pengalaman dan aset yang dimiliki, serta didukung oleh manajemen dan sumber daya yang kompeten, Perusahaan terus berekspansi dan mengukuhkan diri bukan hanya untuk menghasilkan profit, tetapi juga menjadi agen pembangunan yang berkontribusi terhadap pembangunan yang berdampak secara langsung untuk masyarakat DKI Jakarta.

PT Jakarta Propertindo

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) is a Property, Infrastructure, Utilities, and Communication Information Technology company owned by the Provincial Government of DKI Jakarta which was originally an Environmental Management Agency (BPL) which was established in 1985 with the responsibility of managing the Pluit area. Furthermore, in September 1997, PT Pembangunan Pluit Jaya with an abundance of assets from the former BPL Pluit merged with PT Pembangunan Pantai Utara Jakarta. On December 15, 2000, the two companies merged into PT Jakarta Propertindo. In 2018, the Company became a Jakarta Propertindo Limited Liability Company (Regional Company) for Regional-Owned Enterprises engaged in property, infrastructure, utilities and information and communication technology owned by the Government of DKI Jakarta.

Since then, the Company has not only been in charge of the property sector but has also begun to penetrate the infrastructure sector. These projects then expanded to the construction of toll roads, reservoirs, and other infrastructure. In 2014, the Company then divided its company into 3 subsidiaries namely property, infrastructure and utilities.

With its experience and assets, and supported by competent management and resources, the Company continues to expand and strengthen itself not only to generate profit, but also to become a development agent that contributes to development that has a direct impact on the people of DKI Jakarta.

Manajemen Kunci PT Jakarta Propertindo per 31 Desember 2023
Key Management of PT Jakarta Propertindo as of December 31, 2023

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Komisaris Utama President Commissioner	Hikmahanto Juwana
Komisaris Commissioner	Lusiana Herawati
Komisaris Commissioner	Suhajar Diantoro
Komisaris Commissioner	Agus Susanto

Direksi

Board of Directors

Direktur Utama President Director	Iwan Takwin
Direksi Director	Dian Takdir Badrsyah
Direksi Director	Solihin
Direksi Director	I Gede Adi Adnyana T

PT Jakarta Infrastruktur Propertindo

PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) yang awalnya merupakan PT Jakarta Komunikasi didirikan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2006 berdasarkan Akta No.06 dari Notaris Sutjipto SH. Sebagai perusahaan penerus, PT Jakarta Infrastruktur Propertindo yang berdomisili di Gedung Thamrin City Lantai 1, Jl. Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Jakarta Pusat juga ditunjuk sebagai sub holding bidang infrastruktur yang bergerak dalam berbagai bidang.

PT Jakarta Infrastruktur Propertindo

PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP), which was originally PT Jakarta Komunikasi. It was established in Jakarta on October 2, 2006, based on Deed No. 06 of Notary Sutjipto SH. As a successor company, PT Jakarta Infrastructure Propertindo, domiciled at Gedung Thamrin City, 1st Floor, Jl. Thamrin Boulevard, Kebon Melati, Central Jakarta, was also appointed as the infrastructure sub-holding which operates in various fields.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Komisaris Utama President Commissioner	Nanang Santoso
Komisaris Commissioner	Boy Devries

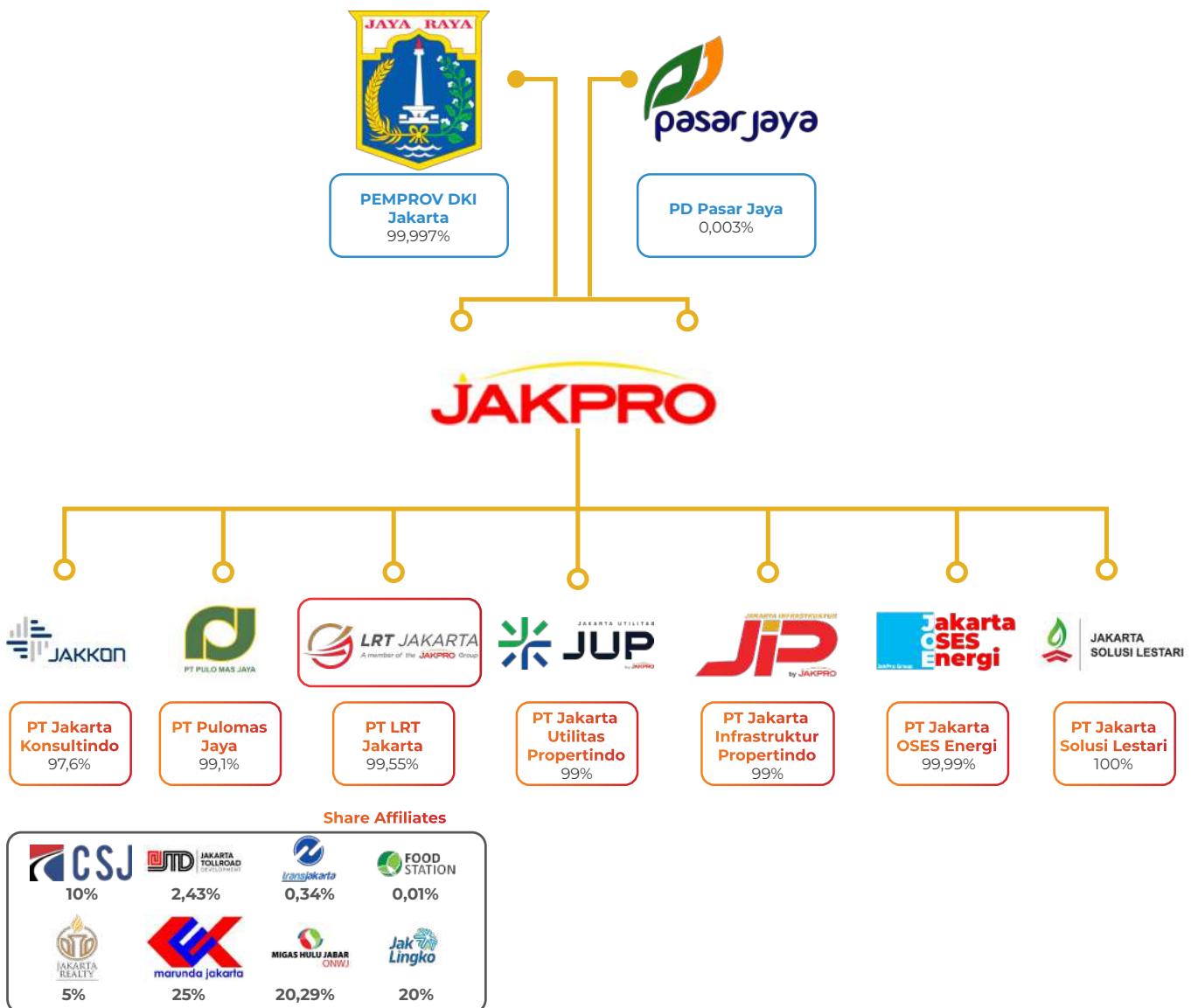
Direksi

Board of Directors

Direktur Utama (Plt.) Acting President Director	Ivan C. Permana
Direktur Director	Ivan C. Permana
Direktur Director	Santosa

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

THE COMPANY'S GROUP STRUCTURE



INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI SERTA JOINT VENTURE (JV) DAN SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

INFORMATION ON SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, JOINT VENTURE (JV), AND SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

Hingga 31 Desember 2023, LRT tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, Joint Venture (JV) ataupun Special Purpose Vehicle (SPV), sehingga tidak terdapat informasi terkait nama entitas anak dan/atau asosiasi; persentase kepemilikan saham; keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

Until December 31, 2023, LRT does not have Subsidiaries, Associated Entities, Joint Ventures (JV) or Special Purpose Vehicles (SPV), so there is no information regarding the names of subsidiaries and/or associations; percentage of share ownership; information about the line of business of subsidiaries and/or associated entities; and description of operating status of subsidiaries and/or associated entities (already operating or not yet operating).

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM

CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND LISTING

Sepanjang tahun 2023, LRT tidak melakukan penerbitan saham kepada publik, tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham mana pun. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action), dan nama bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.

Throughout 2023, LRT did not issue shares to the public, did not conduct an Initial Public Offering and did not trade its shares on any stock exchange. Thus, there is no information related to the year of issuance of shares, number of shares, nominal value of shares, share offering price for each corporate action, the number of listed shares after each corporate action, and the name of the stock exchange which the Company's shares are listed.

KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN EFEK LAINNYA

CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES ISSUANCE AND LISTING

Per 31 Desember 2023, LRT tidak menerbitkan penerbitan dan pencatatan efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait penerbitan dan pencatatan efek lainnya dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2023, LRT did not conduct other securities issuance and listing. Thus, there is no information related to the issuance and listing of other securities in this Annual Report.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONS

Nama Profesi Name of Profession	Alamat Address	Jenis dan Bentuk Jasa Types and Forms of Service	Biaya Costs	Periode Penugasan Assignment Period
Akuntan Publik Public Accountant	KAP Hertanto, Grace, Karunawan TIAG Internasional Palma Tower, 18th Floor lot F&GJI. RA Kartini II-S Kav.06 TB Simatupang , Jakarta Selatan 12310 Fax: (021) -75930434 Public Accounting Firm Hertanto, Grace, Karunawan TIAG International Palma Tower, 18th Floor lot F&G Jl. RA Kartini II-S Kav.06 TB Simatupang, South Jakarta 12310 Fax: (021) -75930434	Auditor Eksternal External Auditor	Rp109.807.583 IDR109,807,583	2023
Konsultan Hukum Legal Consultant	n/a	n/a	n/a	n/a
Notaris Notary	Kantor Notaris & PPAT Pratiwi Handayani, S.HAlamat: Gedung Jaya Lantai 2 JI MH Thamrin Nomor 12 Telp: (021) 31908335 Fax: (021) 31927378 Notary Office & Land Deed Official (PPAT) Pratiwi Handayani, S.H. Address: Jaya Building, 2nd Floor, JI MH Thamrin No. 12 Phone: (021) 31908335 Fax: (021) 31927378 Kantor Notaris & PPAT Muhammad Taufiq S.H., M.Kn Alamat: Jl Pulomas Barat XI Nomor 15 Jakarta Timur Telp: (021) 47884396 Fax: (021) 47884396 Notary Office & Land Deed Official (PPAT) Muhammad Taufiq S.H., M.Kn Address: Jl Pulomas Barat XI No. 15, East Jakarta Phone: (021) 47884396 Fax: (021) 47884396 Kantor Notaris & PPAT Mustangin S.H., M.Kn Alamat: Jl Condet Raya Nomor 27, Komplek Ruko Mutiara Faza Blok RA-9, Pasar Rebo, Jakarta Timur Telp: (021) 87782258 Fax: (021) 87782258 Notary Office & Land Deed Official (PPAT) Mustangin S.H., M.Kn Address: Jl Condet Raya No. 27, Mutiara Faza Block RA-9 Complex, Pasar Rebo, East Jakarta Phone: (021) 87782258 Fax: (021) 87782258	Jasa Notaris Notary Services	Rp40.202.243 IDR40,202,243	2023

INFORMASI WEBSITE PERUSAHAAN

INFORMATION ON THE COMPANY'S WEBSITE

PT LRT Jakarta senantiasa menyediakan informasi terkait Perusahaan kepada *stakeholders* yang salah satunya dapat diakses melalui situs *web* yang beralamat www.lrtjakarta.co.id. Perusahaan terus berupaya memberikan informasi yang terbuka kepada publik dan pemangku kepentingan. Situs resmi Perusahaan menyajikan informasi dalam dua Bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan telah memenuhi informasi yang wajib dimuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emitter atau Perusahaan Publik yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2015, seperti:

1. Informasi Umum Emitter atau Perusahaan Publik
2. Informasi Bagi Pemodal atau Investor
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PT LRT Jakarta always provides information related to the Company to stakeholders, one of which can be accessed through the Company's website at www.lrtjakarta.co.id. The Company continues to provide open information to the public and stakeholders. The Company's official website presents information in two languages, namely Indonesian and English and has complied with the information that must be published in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8/POJK.4/2015 concerning Issuer or Public Company Websites, which was stipulated on June 25, 2015, such as:

1. General Information of Issuers or Public Companies
2. Information for Investors
3. Corporate Governance Information
4. Corporate Social Responsibility Information

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Details
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu. Shareholder information up to individual ultimate owners.	v	Informasi dapat diakses di menu laporan tahunan di situs web perusahaan. Information can be accessed in the annual report menu on the Company's website.
Isi Kode Etik. Content of the Code of Ethics.	v	Informasi mengenai Kode Etik Perusahaan yang dapat diakses di situs web Perusahaan. Information regarding the Company's Code of Conduct can be accessed on the Company's website.
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan. Information on the General Meeting of Shareholders, (GMS) which at least includes material on the agenda discussed in the GMS, a summary of the minutes of the GMS, and information on important dates, namely the date of the announcement of the GMS, the date of the summon to the GMS, the date of the GMS, the date on which the summary of the minutes of the GMS is announced.	v	Informasi dapat diakses di menu laporan tahunan di situs web perusahaan. Information can be accessed in the annual report menu on the Company's website.
Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir). Annual financial statement (of the last 5 years).	v	Laporan keuangan menjadi 1 bagian dengan Laporan Tahunan. Financial statement becomes one with the Annual Report.
Profil Dewan Komisaris dan Direksi. Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors.	v	Informasi mengenai Profil Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang dapat diakses di situs web Perusahaan. Information regarding the Profile of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors can be accessed on the Company's website.

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Details
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit.	v	Informasi mengenai Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Audit Internal Perusahaan yang dapat diakses di situs web Perusahaan. Information regarding the Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and the Company's Internal Audit can be accessed on the Company's website.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Corporate Social Responsibility.	v	Informasi kegiatan CSR dapat diakses di situs web Perusahaan. Information on CSR activities can be accessed on the Company's website.
Informasi Umum Perusahaan. General Information on the Company.	v	Informasi mengenai Informasi Umum Perusahaan yang dapat diakses di situs web Perusahaan. General information on the Company can be accessed on the Company's website.

v = tersedia pada situs web Perusahaan

x = belum tersedia pada situs web Perusahaan

v = It is available on the Company's website

x = It is not yet available on the Company's website

*) LRT Jakarta bukan Perusahaan Terbuka maupun Emitter, namun Perusahaan senantiasa berkomitmen untuk memberikan informasi semaksimal mungkin terhadap publik.
*) LRT Jakarta is neither a Public Company nor an Issuer, however the Company is always committed to providing as much information as possible to the public.



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan

Management Discussion
and Analysis on Company
Performance



Parameter penilaian kinerja Direksi juga dilakukan dengan meninjau dan mempertimbangkan pencapaian yang telah diraih pada akhir tahun.

Parameters for evaluating the performance of the Board of Directors are also carried out by reviewing and considering the achievements at the end of the year.



04



TINJAUAN MAKROEKONOMI

MACROECONOMICS OVERVIEW

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data World Bank pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 hanya mencapai 2,1% atau melemah dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 3,5% dan diproyeksikan akan melambat menjadi 3,1% pada tahun 2024. Secara umum, kondisi ini dipengaruhi oleh tekanan inflasi global yang meningkat, pengetatan pasar tenaga kerja dan kenaikan suku bunga yang sangat tinggi pada sejumlah negara maju, perubahan iklim yang ekstrim, ketegangan perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok, ketegangan Rusia-Ukraina hingga konflik Israel-Palestina yang menambah ketegangan geopolitik.

Berdasarkan data dari *World Economic Outlook* (WEO) 2023 yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF), pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dunia melambat dari 3,5% pada tahun 2022 menjadi 3,1% pada tahun 2023 serta diproyeksikan 3,1% pada tahun 2024. Selain itu, WEO menyebutkan inflasi global tahun 2023 diperkirakan sebesar 6,8% atau menurun dari tahun 2022 sebesar 8,8%. Sedangkan pada tahun 2024 diproyeksikan inflasi akan turun menjadi 5,8%.

Di tengah perekonomian dunia yang melambat, kondisi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 juga mengalami penurunan pertumbuhan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05% (y-on-y) atau lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31% (y-on-y). dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 13,96%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh pengeluaran Konsumsi Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,83%.

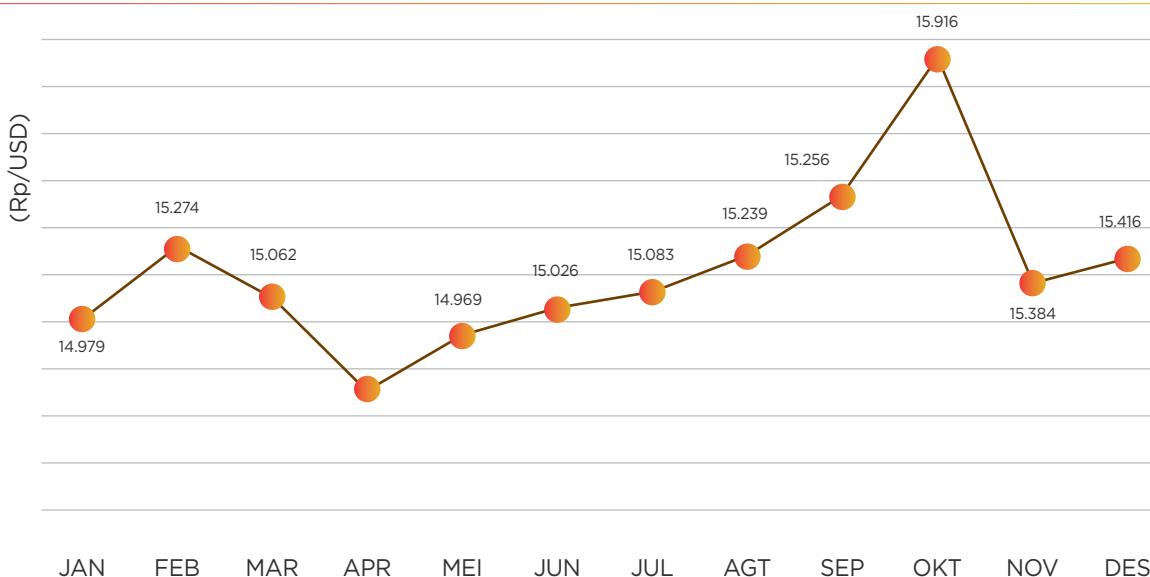
Dari sisi nilai tukar, kurs rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2023 mengalami pelemahan, berdasarkan data Bank Indonesia, pada januari 2023 dari Rp14.979,- per dolar menjadi Rp15.416,- per dolar.

In 2023, global economic growth experienced a slowdown. According to World Bank data, global economic growth in 2023 reached only 2.1%, down from 3.5% in 2022, and is projected to further slow to 3.1% in 2024. Overall, this condition is influenced by increased global inflationary pressures, tightening labor markets, and significantly higher interest rates in several advanced economies, extreme climate change, tensions in the US-China trade relations, Russia-Ukraine tensions, and the Israel-Palestine conflict adding to geopolitical tensions.

Based on data from the *World Economic Outlook* (WEO) 2023 released by the International Monetary Fund (IMF), global Gross Domestic Product (GDP) growth slowed from 3.5% in 2022 to 3.1% in 2023 and is projected to remain at 3.1% in 2024. Additionally, the WEO mentions that global inflation in 2023 is estimated at 6.8%, down from 8.8% in 2022, with projected inflation in 2024 to decrease further to 5.8%.

Amidst the slowing global economy, national economic growth conditions in 2023 also experienced a decline. According to data from the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's economic growth was 5.05% (year-on-year) in 2023, lower than the 5.31% growth achieved in 2022. In terms of production, the highest growth occurred in the Transportation and Warehousing sector at 13.96%, while in terms of expenditure, the highest growth was achieved by Non-Profit Institutions Serving Households (PK-LNPRT) expenditure at 9.83%.

Regarding exchange rates, the Indonesian rupiah weakened against the US dollar in 2023. According to Bank Indonesia data, in January 2023, the exchange rate was IDR14,979 per dollar, which weakened to IDR15,416 per dollar.



Di sisi lain, seperti dikutip dari Laporan Perekonomian Provinsi yang dirilis Bank Indonesia menyatakan bahwa perekonomian DKI Jakarta dengan pangsa 16,62% terhadap nasional, pada triwulan III 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,93% (yoY), meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (5,13% yoY). Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi DKI Jakarta terutama disebabkan oleh konsumsi Pemerintah yang terkontraksi serta perlambatan ekspor dan investasi. Konsumsi Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 15,87% (yoY), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh positif (6,06% yoY) disebabkan oleh kontraksi pada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Selanjutnya, perlambatan juga terjadi pada ekspor yang pada triwulan III 2023 tumbuh 5,82% (yoY), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (8,93% yoY) yang dipengaruhi oleh kontraksi pada ekspor barang terutama untuk komoditas produk kimia, ikan dan udang, serta lemak dan minyak hewan/nabati seiring dengan tertahannya ekonomi Tiongkok. Adapun kinerja investasi juga tumbuh sedikit lebih rendah menjadi sebesar 4,17% (yoY) dari triwulan sebelumnya sebesar 4,22% (yoY) yang terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja investasi swasta sejalan dengan *wait and see* investor jelang Pemilu 2024. Di sisi lain, permintaan domestik yang tercermin dari kinerja konsumsi rumah tangga masih tumbuh kuat.

Dari sisi sektoral atau lapangan usaha, melambatnya pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama disebabkan oleh melambatnya kinerja LU perdagangan dengan pertumbuhan sebesar 3,99% (yoY) pada triwulan III 2023, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (4,67% yoY). Selain itu, perlambatan juga bersumber dari menurunnya kinerja LU transportasi dan pergudangan serta LU jasa lainnya dipengaruhi oleh melambatnya kinerja transportasi barang sejalan dengan menurunnya kinerja ekspor serta menurunnya aktivitas rekreasi pasca HBKN Idulfitri pada triwulan II 2023.

On the other hand, as quoted from the Provincial Economic Report released by Bank Indonesia, the economy of DKI Jakarta, with a share of 16.62% of the national economy, remained resilient in the third quarter of 2023, growing at 4.93% (yoY), although lower than the previous quarter (5.13% yoY). From the demand side, the slowdown in the economy of DKI Jakarta was mainly caused by government consumption contracting, as well as slowing exports and investment. Government consumption contracted by 15.87% (yoY), lower than the previous quarter's positive growth (6.06% yoY), due to contractions in employee spending and expenditure on goods and services. Furthermore, the slowdown also occurred in exports, which grew by 5.82% (yoY) in the third quarter of 2023, lower than the previous quarter (8.93% yoY), influenced by contractions in exports of goods, especially for chemical products, fish and shrimp, as well as fats and oils, in line with the slowdown in the Chinese economy. Investment performance also grew slightly lower at 4.17% (yoY) from the previous quarter's 4.22% (yoY), primarily due to the declining performance of private investment in line with investors adopting a wait-and-see approach ahead of the 2024 election. On the other hand, domestic demand, reflected in household consumption performance, continued to grow strongly.

From a sectoral perspective, the slowing growth of Jakarta's economy is primarily attributed to the slowing performance of the trade sector, with growth at 3.99% (yoY) in the third quarter of 2023, lower than the previous quarter (4.67% yoY). Additionally, the slowdown also stemmed from the declining performance of the transportation and warehousing sector and other service sectors, influenced by the slowing performance of goods transportation in line with the decline in export performance and decreased recreational activities post-Idulfitri holiday in the second quarter of 2023.

Memasuki triwulan IV 2023, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan masih akan tetap tumbuh tinggi meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan terutama dipengaruhi oleh melambatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan ekspor sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian perekonomian global. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang masih cukup baik diperkirakan ditopang oleh baiknya kinerja investasi, konsumsi Pemerintah, dan konsumsi LNPRT yang masing-masing didorong oleh akselerasi penyelesaian proyek strategis baik Pemerintah maupun swasta, penyerapan belanja Pemerintah pada akhir tahun, serta peningkatan aktivitas jelang pemilu 2024.

DRPD Provinsi DKI Jakarta baru saja mengesahkan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023 pada September 2023. Adapun, pagu APBD-P Jakarta mengalami penurunan dari APBD murni menjadi sekitar Rp79,5 Triliun, atau lebih rendah 4,16% dari APBD-P 2022. Lebih lanjut, berdasarkan APBD-P 2023 yang telah disahkan, DKI Jakarta pada tahun 2023 diperkirakan akan kembali mengalami defisit anggaran.

Pada triwulan III 2023, kinerja Pendapatan Daerah di DKI Jakarta tumbuh melambat. Melambatnya pertumbuhan Pendapatan Daerah utamanya disebabkan oleh kontraksi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Perlambatan kinerja pada penerimaan Pajak Daerah utamanya disebabkan oleh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang tercatat kontraksi setelah pada triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan positif. Perlambatan lebih jauh pada kinerja penerimaan Pajak Daerah di DKI Jakarta pada triwulan laporan tertahan oleh kinerja positif pada komponen Pajak Hiburan dan Pajak Hotel. Dari sisi belanja, realisasi Belanja Daerah tercatat lebih rendah jika dibandingkan dengan rerata historis periode yang sama. Capaian belanja yang lebih rendah pada triwulan laporan disebabkan oleh realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal yang tercatat lebih rendah.

Kinerja APBN di DKI Jakarta dari sisi Pendapatan dan Hibah pada triwulan III 2023 telah mencapai 91,46% dari total pagu anggaran. Dari sisi belanja, realisasi belanja APBN di DKI Jakarta pada triwulan laporan tumbuh melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perlambatan kinerja ini utamanya disebabkan oleh kontraksi pada hampir seluruh komponen belanja APBN kecuali komponen belanja modal yang mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan laporan.

Entering the fourth quarter of 2023, the economy of DKI Jakarta is expected to continue to grow at a high rate, although slower than the previous quarter. This slowdown is mainly influenced by the slowing performance of household consumption and exports, in line with the continued high uncertainty in the global economy. On the other hand, the still relatively good economic growth of DKI Jakarta is expected to be supported by the positive performance of investment, government consumption, and non-profit institutions serving household (LNPRT) consumption, each driven by the acceleration of both government and private strategic projects' completion, government spending absorption at the end of the year, and increased activity ahead of the 2024 election.

The DKI Jakarta Provincial DRPD has just passed the draft Regional Regulation (Raperda) on the 2023 Revised Regional Budget (APBD-P) in September 2023. The Revised APBD ceiling decreased from the original APBD to around IDR79.5 trillion, or 4.16% lower than the Revised APBD 2022. Furthermore, based on the approved Revised APBD 2023, DKI Jakarta is projected to experience a budget deficit again in 2023.

In the third quarter of 2023, the performance of Regional Revenue in DKI Jakarta grew slowly. The slowing growth of Regional Revenue was mainly due to the contraction in the realization of Regional Original Revenue (PAD) and Transfer Revenue. The slowdown in regional tax revenue mainly stems from the contraction of land and building tax revenue after experiencing positive growth in the previous quarter. Further slowdown in the performance of regional tax revenue in DKI Jakarta in the third quarter report is due to positive performance in the entertainment tax and hotel tax components. On the expenditure side, regional expenditure realization was lower compared to the historical average for the same period. The lower expenditure achievement in the reporting quarter is due to lower operational and capital expenditure realization.

The performance of the state budget in DKI Jakarta in terms of revenue and grants in the third quarter of 2023 reached 91.46% of the total budget ceiling. On the expenditure side, the realization of state budget expenditure in DKI Jakarta in the reporting quarter grew slower compared to the previous quarter. This slowdown in performance is mainly due to contractions in almost all components of state budget expenditure except for the capital expenditure component, which recorded positive growth in the reporting quarter.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan III 2023 tercatat sebesar 1,89% (yoY), melandai dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,20% (yoY). Capaian inflasi ini juga lebih rendah jika dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 2,28% (yoY). Terkendalinya inflasi sejalan dengan eratnya sinergi pengendalian inflasi TPID melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, dan komunikasi efektif. Berdasarkan komoditasnya, penyumbang inflasi terbesar pada triwulan III 2023 diantaranya beras, kontrak rumah, daging ayam ras, rokok kretek filter, dan upah asisten rumah tangga. Memasuki triwulan IV 2023, perkembangan inflasi Jakarta pada Oktober 2023 tercatat mengalami peningkatan dengan inflasi sebesar 2,08% (yoY). Ke depan, inflasi IHK Jakarta diprakirakan akan tetap terkendali dalam rentang sasaran 3±1%.

Intermediasi perbankan membaik dengan didukung ketahanan yang terjaga. Di tengah kenaikan suku bunga acuan dan tetap tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global, sinergi bauran kebijakan *pro stability* dan *pro growth* Bank Indonesia sebagai bagian bauran kebijakan nasional mampu menjaga ketahanan dan mendorong intermediasi perbankan tetap tumbuh positif pada triwulan III 2023. Pertumbuhan tersebut terutama didukung oleh masih kuatnya penawaran di tengah permintaan yang relatif terbatas.

Dari sisi penawaran, perbankan memiliki kapasitas yang baik untuk menyalurkan kredit sejalan dengan kondisi likuiditas yang memadai dan risiko kredit yang terjaga rendah. Kekurangan likuiditas perbankan ditopang oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK). Adapun risiko kredit yang terjaga rendah tercermin dari penurunan rasio *Non Performing Loans* (NPL) sehingga mendorong perbankan tetap dapat menerapkan standar penyaluran kredit yang longgar. Selain itu, kapasitas perbankan diperkuat oleh berbagai pelonggaran kebijakan dan insentif makroprudensial sebagai inovasi kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan.

Sementara itu dari sisi permintaan, kredit korporasi meningkat terbatas seiring meningkatnya tekanan kinerja korporasi akibat perlambatan permintaan global. Tingkat profitabilitas korporasi nonkeuangan sedikit menurun sejalan penurunan tingkat penjualan. Meskipun demikian, kemampuan membayar korporasi nonkeuangan tetap baik tercermin dari rendahnya rasio NPL kredit korporasi.

Sejalan dengan perkembangan kinerja sektor korporasi, kinerja sektor rumah tangga pada triwulan III 2023 juga membaik terbatas. Kondisi ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen dan Indeks Ekspektasi Konsumen yang tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan

The Consumer Price Index (CPI) inflation in Jakarta in the third quarter of 2023 was recorded at 1.89% (yoY), down from inflation in the previous quarter of 3.20% (yoY). This inflation achievement is also lower compared to the National inflation of 2.28% (yoY). The controlled inflation is in line with the tight coordination of inflation control through the strengthening of the National Food Inflation Control Movement (GNPIP) to encourage supply availability, smooth distribution, price stability, and effective communication. Based on its commodities, the largest contributors to inflation in the third quarter of 2023 include rice, contract housing, chicken meat, filter kretek cigarettes, and household assistant wages. Moving into the fourth quarter of 2023, Jakarta's inflation development in October 2023 recorded an increase with inflation at 2.08% (yoY). Going forward, Jakarta's CPI inflation is expected to remain controlled within the target range of 3±1%.

Banking intermediation improved supported by maintained resilience. Amidst the increase in benchmark interest rates and persistent high uncertainty in the global financial markets, the synergy of pro-stability and pro-growth policies by Bank Indonesia as part of the national policy mix managed to maintain resilience and drive banking intermediation to continue growing positively in the third quarter of 2023. This growth is primarily supported by strong supply amidst relatively limited demand.

From the supply side, banks have good capacity to channel credit in line with adequate liquidity conditions and maintained low credit risk. Adequate banking liquidity is supported by an increase in Third-Party Funds (DPK). Meanwhile, the maintained low credit risk is reflected in the decrease in Non-Performing Loans (NPL) ratio, allowing banks to continue applying loose credit distribution standards. Furthermore, the banking capacity is strengthened by various policy relaxations and macroprudential incentives as Bank Indonesia's policy innovations to drive growth.

Meanwhile, from the demand side, corporate credit increased modestly amidst increasing corporate performance pressures due to slowing global demand. The profitability levels of non-financial corporations slightly decreased in line with sales decline. However, the non-financial corporation's ability to pay remains good, reflected in the low NPL ratio of corporate loans.

In line with the development of corporate sector performance, household sector performance in the third quarter of 2023 also improved modestly. This condition is reflected in the Consumer Confidence Index and Consumer Expectation Index, which recorded lower values

sebelumnya. Sementara itu, kinerja sektor UMKM terus meningkat sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Kenaikan pertumbuhan kredit UMKM didorong oleh permintaan kredit dari skala mikro dan kecil terutama dari sektor perdagangan. KPwBI Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai program untuk mendukung perbaikan produktivitas serta peningkatan kapasitas UMKM baik dari sisi SDM maupun pengembangan usaha.

Perkembangan nilai transaksi sistem pembayaran tunai dan nontunai mengonfirmasi terus berlanjutnya pemulihan ekonomi Jakarta. Pada triwulan III 2023, arus kas tercatat *net outflow* sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi terutama didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga. Transaksi nontunai pada berbagai instrumen pembayaran yaitu BI-RTGS, SKNBI, serta APMK baik jenis kartu debit dan kartu kredit, juga mengalami peningkatan nilai. Sementara itu, transaksi e-commerce mengalami sedikit perlambatan.

Seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi, serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode Agustus 2023 mengalami kenaikan, diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran dan bertambahnya porsi pekerja formal. Dari sisi sektoral, peningkatan serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode Agustus 2023 terutama terjadi pada sektor jasa perdagangan, penyedia akomodasi, dan pengangkutan.

compared to the previous quarter. Meanwhile, the SME sector's performance continues to improve in line with increasing community mobility. The increase in SME credit growth is driven by credit demand from micro and small-scale sectors, especially in the trade sector. The Jakarta Regional Office of Bank Indonesia continues to implement various programs to support productivity improvement and capacity building for SMEs in terms of both human resources and business development.

The development of cash and non-cash payment system transaction values confirms the continued economic recovery of Jakarta. In the third quarter of 2023, cash flow recorded a net outflow in line with the still high economic growth, primarily driven by increased household consumption. Non-cash transactions across various payment instruments such as BI-RTGS, SKNBI, and APMK, including both debit and credit cards, also experienced an increase in value. Meanwhile, e-commerce transactions experienced a slight slowdown.

Alongside the improvement in economic performance, employment absorption in DKI Jakarta during the period of August 2023 experienced an increase, accompanied by a decrease in the unemployment rate and an increase in the proportion of formal employment. From a sectoral perspective, the increase in employment absorption in DKI Jakarta during August 2023 primarily occurred in the trade, accommodation services, and transportation sectors.

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

OVERVIEW OF OPERATIONS PER BUSINESS SEGMENT

PENETAPAN SEGMENT USAHA

Tinjauan per segment usaha pada Laporan Tahunan ini disajikan sesuai dengan pembagian segmen yang tercantum dalam Laporan Keuangan PT LRT Jakarta sesuai PSAK No. 5 tentang Segmen Operasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait tiap-tiap segmen usaha yang dimiliki oleh Perusahaan.

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan memiliki 3 (tiga) segmen usaha, yaitu Segmen Pengoperasian, Perawatan dan Pengusahaan Prasarana dan Sarana. Kinerja masing-masing segmen usaha yang dimiliki Perusahaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Segmen Pengoperasian Prasarana dan Sarana

Kegiatan Operasi dan Usaha Segmen Pengoperasian Prasarana dan Sarana

LRT Jakarta terus memberikan layanan terbaik kepada seluruh penumpang. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan operasional, pelayanan, melakukan kontrol, pengawasan (*monitoring*), dan koordinasi secara langsung dengan seluruh divisi terkait atas aktivitas operasional LRT Jakarta. Untuk itu, Perusahaan berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan prima kepada seluruh pelanggan agar terciptanya tingkat kepuasan yang baik.

Perusahaan telah mengimplementasikan berbagai kegiatan selama tahun 2023 dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Pengadaan dan penggunaan peralatan untuk mendukung operasional, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan responsibilitas dalam menghadapi tantangan operasional. Program pengembangan untuk memastikan bahwa anggota tim memiliki keterampilan dan pengetahuan terkini yang diperlukan dalam menjalankan tugas operasional, diselenggarakan dengan fokus bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas personal serta pengembangan karier masing-masing personal.

Kegiatan digitalisasi bisnis proses mengadopsi teknologi dalam meningkatkan efisiensi operasional dan telah diimplementasikan, mulai dari penggunaan perangkat hingga implementasi sistem yang terhubung secara digital. Seiring dengan perubahan dalam lingkungan operasional dan teknologi, secara berkala dilakukan pemutakhiran prosedur, telah dilakukan tinjauan menyeluruh terhadap prosedur-prosedur yang ada dan melakukan pembaruan

DETERMINATION OF BUSINESS SEGMENTS

The review discussion per business segment in this Annual Report is presented in accordance with the division of segments listed in PT LRT Jakarta's Financial Report in accordance with PSAK No. 5 regarding Operating Segments. The performance of each business segment run by the Company aims to provide a comprehensive picture of each business segment owned by the Company.

Until the end of 2023, the Company has 3 (three) business segments, namely Infrastructure and Facility Operations, Maintenance, and Business. The performance of each business segment is described as follows:

Infrastructure and Facility Operations Segment

Operations and Business Activities of the Infrastructure and Facility Operations Segment

LRT Jakarta continues to provide the best service to all passengers. The Company has the obligation to carry out operations, services, conduct control, supervision (*monitoring*), and coordination directly with all related divisions regarding the operational activities of LRT Jakarta. Therefore, the Company is committed to consistently providing excellent service to all customers to achieve a high level of satisfaction.

Throughout the year 2023, the Company has implemented various activities to enhance operational effectiveness and efficiency. Procurement and utilization of equipment to support operations aim to improve capabilities and responsiveness in addressing operational challenges. Development programs ensure that team members have the skills and up-to-date knowledge necessary to perform operational tasks, organized with the aim of improving personal quality, productivity, and career development for each individual.

The digitalization of business processes involves adopting technology to enhance operational efficiency and has been implemented, ranging from device usage to the implementation of digitally connected systems. With changes in operational and technological environments, procedures are periodically updated, thoroughly reviewed, and revised according to best practices and changing needs. The goal is to ensure that operations meet the

sesuai dengan praktik terbaik dan perubahan kebutuhan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa operasional sesuai dengan standar tertinggi dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dengan cepat dan efektif. Dengan serangkaian kegiatan ini, Perusahaan telah meningkatkan kapabilitas dalam menjalankan operasional sepanjang tahun 2023.

No	Bulan Month	Tanggal Periode Date of Period	Rencana Perjalanan Planned Trips (Trip)	Realisasi Perjalanan Actual Trips (Trip)	Persentase Ketercapaian Percentage of Achievement
1	Januari January	01-Jan-23	31-Jan-23	6.200	6.190
2	Februari February	01-Feb-23	28-Feb-23	5.600	5.600
3	Maret March	01-Mar-23	31-Mar-23	6.200	6.200
4	April April	01-Apr-23	30-Apr-23	6.000	5.998
5	Mei May	01-May-23	31-May-23	6.200	6.198
6	Juni June	01-Jun-23 06-Jun-23	05-Jun-23 30-Jun-23	1.000 5.100	1.000 5.098
7	Juli July	01-Jul-23	31-Jul-23	6.324	6.322
8	Agustus August	01-Aug-23	31-Aug-23	6.324	6.320
9	September September	01-Sep-23	30-Sep-23	6.120	6.120
10	Oktober October	01-Oct-23	31-Oct-23	6.324	6.314
11	November November	01-Nov-23	30-Nov-23	6.120	6.120
12	Desember December	01-Dec-23 31-Dec-23	30-Dec-23 31-Dec-23	6.120 242	6.112 242

Persentase ketercapaian rencana perjalanan dengan realisasi perjalanan pada tahun 2023 mencapai angka 99,95%. Perusahaan terus melakukan perbaikan dalam melakukan pengoperasian sarana agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Pada tahun 2023, pencapaian atas ketepatan waktu tempuh perlintasan pada kinerja pengoperasian Sarana di luar keterlambatan KA pada range waktu 1-5 menit. Sepanjang periode pelaporan, Perusahaan mampu mempertahankan ketepatan waktu kedatangan antar stasiun, ketepatan waktu berhenti di stasiun, dan ketepatan waktu tempuh kereta per lintas.

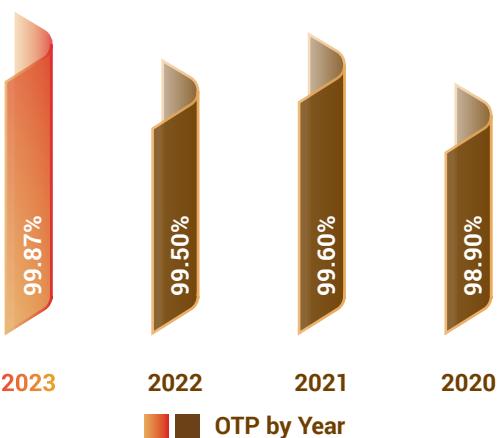
highest standards and can adapt to environmental changes quickly and effectively. Through this series of activities, the Company has enhanced its capabilities in conducting operations throughout the year 2023.

The percentage of achievement of the planned trips compared to the actual trips in 2023 achieved 99.95%. The Company continues to improve its facility operations to provide better services to the public.

In 2023, the achievement regarding the timeliness of crossings in the operation of facilities outside of train delays within the 1-5 minute range. Throughout the reporting period, the Company was able to maintain the accuracy of arrival times between stations, the accuracy of stopping times at stations, and the accuracy of train crossing times.

Bulan Month	Percentase Ketepatan Percentage of Punctuality
Januari 2023 January 2023	99,82%
Februari 2023 February 2023	99,88%
Maret 2023 March 2023	99,85%
April 2023 April 2023	99,82%

Bulan Month	Percentase Ketepatan Percentage of Punctuality
Mei 2023 May 2023	99,81%
Juni 2023 June 2023	99,89%
Juli 2023 July 2023	99,94%
Agustus 2023 August 2023	99,88%
September 2023 September 2023	99,97%
Oktober 2023 October 2023	99,84%
November 2023 November 2023	99,98%
Desember 2023 December 2023	99,83%
Rata-rata Average	99,87%



Percentase ketepatan waktu sepanjang tahun 2023 sebesar 99,87% atau meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 99,50%.

Di tahun 2023, pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) rata-rata adalah sebesar 98,30% atau lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 99,32%. Besaran pencapaian tersebut berasal dari penyesuaian bobot SPM pada kuartal awal tahun, yang berdampak pada perolehan nilai SPM. Namun, pada pertengahan tahun, nilai kembali meningkat hingga mencapai 99,63% di bulan Desember 2023.

The on-time performance percentage throughout the year 2023 was 99.87%, which increased from the previous year's 99.50%.

In 2023, the achievement of the Minimum Service Standards (SPM) averaged 98.30%, which was lower than the previous year's 99.32%. This achievement was due to the adjustment of SPM weights in the early quarters of the year, which affected the SPM score. However, by mid-year, the score increased again to reach 99.63% in December 2023.

Table Standar Pelayanan Minimum
Table of Minimum Service Standard

Bulan Month	Percentase SPM Percentage of SPM
Januari January	97,75%
Februari February	97,29%
Maret March	97,23%
April April	97,13%

Table Standar Pelayanan Minimum
Table of Minimum Service Standard

Bulan Month	Percentase SPM Percentage of SPM
Mei May	96,46%
Juni June	98,31%
Juli July	98,19%
Agustus August	98,43%
September September	99,50%
Oktober October	99,48%
November November	99,65%
Desember December	99,63%
Rata-rata Average	98,30%

Penyesuaian Waktu Operasional Kereta LRT pada Persentase 2023
Adjustment of LRT Train Operational Hours in Certain Periods of 2023

Operasi Terbatas Limited Operations	05.30-22.30	200	10	4	01-Jan-23	31-Jan-23
PPPKA - 002 - IV - 2022, mulai 9 April 2022 (Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 198 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Kapasitas Angkut dan Waktu Operasional Sarana Transportasi pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 <i>Coronavirus Disease 2019</i>) PPPKA - 002 - IV - 2022, starting from April 9, 2022 (Based on the Decision of the Head of Transportation Agency of DKI Jakarta Province No. 198 of 2022 concerning the Technical Instructions for Regulating Transport Capacity and Operational Hours of Transportation Facilities During the Implementation of Level 2 Community Activity Restrictions for Coronavirus Disease 2019	05.30-22.30	200	10	4	01-Feb-23	28-Feb-23
	05.30-22.30	200	10	4	01-Mar-23	31-Mar-23
Operasi Terbatas Limited Operations	05.30-22.30	200	10	4	01-Apr-23	30-Apr-23
	05.30-22.30	200	10	4	01-May-23	31-May-23
	05.30-22.30	200	10	4	01-Jun-23	05-Jun-23

Penyesuaian Waktu Operasional Kereta LRT pada Persentase 2023
 Adjustment of LRT Train Operational Hours in Certain Periods of 2023

Operasi Normal Normal Operations		05.30-23.00	204	10	4	06-Jun-23	30-Jun-23
Operasi Normal Normal Operations	Membatalkan PPPKA r - 002- IV- 2022, Mulai berlaku 6 Juni 2023, (Berdasarkan SK Kadishub Provinsi DKI Jakarta No e-0066 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Waktu Operasional Sarana Transportasi Perkeretaapian Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Raya Terpadu (LRT) pada Masa Transisi Menuju Endemi	05.30-23.00	204	10	4	01-Jul-23	31-Jul-23
Operasi Normal Normal Operations	No e-0066 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Waktu Operasional Sarana Transportasi Perkeretaapian Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Raya Terpadu (LRT) pada Masa Transisi Menuju Endemi	05.30-23.00	204	10	4	01-Aug-23	31-Aug-23
Operasi Normal Normal Operations	Cancelling PPPKA r - 002- IV- 2022, Starting on June 6, 2023, (Based on the Decree of the Head of Transportation Agency of DKI Jakarta Province No. e-0066 of 2023 concerning Technical Guidelines for Operational Timing of Railway Transportation Facilities for the Moda Raya Terpadu (MRT) and Lintas Raya Terpadu (LRT) during the Transition Period to the Endemic Period.	05.30-23.00	204	10	4	01-Sep-23	30-Sep-23
Operasi Normal Normal Operations		05.30-23.00	204	10	4	01-Oct-23	31-Oct-23
Operasi Normal Normal Operations		05.30-23.00	204	10	4	01-Nov-23	30-Nov-23
Operasi Normal Normal Operations		05.30-23.00	204	10	4	01-Dec-23	30-Dec-23
Operasi Normal Normal Operations		05.30-02.00	242	10	4	31-Dec-23	31-Dec-23

Jumlah penumpang cenderung mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dikarenakan minat pengguna transportasi umum meningkat pasca pandemi COVID-19. Selain itu, adanya kegiatan aktivasi di stasiun serta kunjungan edukasi dari sekolah-sekolah memberikan dampak positif dari segi *brand awareness* terhadap produk layanan yang diberikan Perusahaan serta dukungan dari *stakeholder* dalam normalisasi jam operasional perjalanan KA yang sudah *full* mulai pukul 05.30 sampai dengan 23.00 sejak 6 Juni 2023.

The number of passengers tends to increase from the previous year. This could be due to increased interest in public transportation post-Covid-19 pandemic. Additionally, station activation activities and educational visits from schools have a positive impact on brand awareness of the Company's service offerings. Furthermore, support from stakeholders in normalizing train travel operational hours, which are now full from 05:30 to 23:00 starting June 6, 2023, also contributes to this increase.

Bulan	Jumlah Pengguna Jasa (Orang)	Jumlah Pendapatan (Rp Juta)
Month	Number of Service Users (People)	Total Income (IDR Million)
Januari 2023 January 2023	81.685	408.425.000,00
Februari 2023 February 2023	77.112	385.560.000,00
Maret 2023 March 2023	83.511	417.555.000,00

Bulan Month	Jumlah Pengguna Jasa (Orang) Number of Service Users (People)	Jumlah Pendapatan (Rp Juta) Total Income (IDR Million)
April 2023 April 2023	73.125	365.625.000,00
Mei 2023 May 2023	81.506	407.530.000,00
Juni 2023 June 2023	84.139	420.695.000,00
Juli 2023 July 2023	86.594	432.970.000,00
Agustus 2023 August 2023	89.921	449.605.000,00
September 2023 September 2023	92.900	4.645.000,00
Oktober 2023 October 2023	93.511	467.555.000,00
November 2023 November 2023	94.709	473.545.000,00
Desember 2023 December 2023	98.449	492.245.000,00
Jumlah Total	1.037.162	4.725.955.000,00

*perhitungan jumlah pendapatan berdasarkan pengali biaya tiket per penumpang sebesar Rp5000,-

*calculation of total revenue based on a multiplier of ticket costs per passenger of IDR5,000

Strategi Pengembangan Segmen Pengoperasian Prasarana dan Sarana

Perusahaan dalam hal pengoperasian prasarana dan sarana, salah satunya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk penyusunan dan pengendalian operasi lalu lintas perjalanan kereta dengan tetap memperhatikan standar pelayanan minimum dan standar keselamatan dan keamanan penumpang.

Adapun strategi untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab diatas adalah:

1. Pengadaan Peralatan Pendukung Operasional:
 - a. Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan operasional departemen untuk mengidentifikasi peralatan baru yang diperlukan.
 - b. Membuat rencana pengadaan yang terperinci, termasuk anggaran, sumber daya, dan jadwal implementasi.
 - c. Melakukan evaluasi dan uji coba peralatan baru sebelum diterapkan secara luas.
 - d. Mengadakan pelatihan untuk personel dalam penggunaan, pemeliharaan, dan pemecahan masalah terkait peralatan baru.
2. Peningkatan Kompetensi Personil:
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan untuk berbagai peran dan tingkat sesuai kebutuhan departemen.
 - b. Mengajukan program pelatihan yang komprehensif, termasuk pelatihan teknis, kepemimpinan, dan keterampilan antarpersonil.
 - c. Memberi ruang partisipasi dalam program pelatihan dan pengembangan untuk memperluas pengetahuan, keterampilan dan peningkatan kompetensi.
 - d. Membuat sistem evaluasi kinerja dan *feedback* secara umum untuk memantau dan mendukung perkembangan personel.

Development Strategy for Infrastructure and Facility Operations Segment

The Company, in terms of operating infrastructure and facilities, including the task and responsibility of traffic operation and control of train journeys, must ensure compliance with minimum service standards and passenger safety and security standards.

The strategy to fulfill these tasks and responsibilities includes:

1. Procurement of Operational Support Equipment:
 - a. Conducting in-depth analysis of departmental operational needs to identify required new equipment.
 - b. Creating detailed procurement plans, including budgets, resources, and implementation schedules.
 - c. Evaluating and testing new equipment before widespread implementation.
 - d. Providing training for personnel in the use, maintenance, and troubleshooting of the new equipment.
2. Personnel Competency Development:
 - a. Identifying training and development needs for various roles and levels as per departmental requirements.
 - b. Proposing comprehensive training programs, including technical training, leadership development, and interpersonal skills.
 - c. Allowing participation in training and development programs to broaden knowledge, skills, and competency improvement.
 - d. Establishing performance evaluation and feedback systems to monitor and support personnel development overall.

3. Digitalisasi Bisnis Proses:
 - a. Mengidentifikasi proses bisnis yang dapat ditingkatkan melalui digitalisasi, seperti manajemen pemantauan kinerja dan pendokumentasian kertas kerja.
 - b. Menyusun alur pada *platform* agar sesuai dengan kebutuhan departemen dan infrastruktur yang tersedia.
 - c. Mengintegrasikan sistem digital dengan sistem yang sudah ada untuk memastikan keterpaduan dan kompatibilitas.
 - d. Memberikan pelatihan kepada personel dalam penggunaan sistem baru dan mempromosikan adopsi teknologi.
4. Memutakhirkirkan Prosedur:
 - a. Melakukan tinjauan menyeluruh terhadap prosedur operasional yang ada untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan.
 - b. Melibatkan personel yang terlibat dalam proses tersebut dalam penyusunan dan penyesuaian prosedur baru.
 - c. Memastikan dokumentasi prosedur yang diperbarui mudah diakses dan dipahami oleh seluruh personil.
 - d. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas prosedur baru dan melakukan perubahan jika diperlukan.

Dengan menerapkan strategi ini secara komprehensif, diharapkan dapat meningkatkan kinerja departemen dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab operasional dengan lebih efisien dan efektif.

SEGMENT PERAWATAN PRASARANA DAN SARANA

Kegiatan Operasi dan Usaha Segmen Perawatan Prasarana dan Sarana

Dari segi perawatan prasarana, sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah merealisasikan pelaksanaan pekerjaan perawatan dengan memenuhi target yang telah ditetapkan untuk perawatan jalur dan bangunan, traksi daya listrik, serta sinyal, dan telekomunikasi., antara lain:

1. Melakukan perbaikan infrastruktur terkait *facade* di Stasiun Pegangsaan Dua.
2. Melakukan perbaikan tampus Stasiun LRT Jakarta.
3. Pekerjaan desain dan perbaikan saluran air Stasiun LRT Jakarta.
4. Pekerjaan perbaikan *environment* BOH-1 BS (Jalur Listrik & AC).
5. Pekerjaan tangga akses *radio antenna* dan lampu sinyal.
6. Perbaikan atap R7 dengan *inject* material.
7. Perbaikan *wayfinding* stasiun-stasiun.
8. Pekerjaan perbaikan penerangan stasiun.
9. Perbaikan lantai Depo Area LM 7-8.

3. Digitalization of Business Processes:
 - a. Identifying business processes that can be enhanced through digitalization, such as performance monitoring management and paperless documentation.
 - b. Designing workflows on platforms to align with departmental needs and available infrastructure.
 - c. Integrating digital systems with existing systems to ensure coherence and compatibility.
 - d. Providing training to personnel in using the new systems and promoting technology adoption.
4. Updating Procedures:
 - a. Conducting a comprehensive review of existing operational procedures to identify areas needing improvement or refinement.
 - b. Involving personnel involved in the process into the development and adjustment of new procedures.
 - c. Ensuring that updated procedure documentation is easily accessible and understood by all personnel.
 - d. Performing periodic evaluations of the effectiveness of new procedures and making changes as needed.

By implementing these strategies comprehensively, it is expected to enhance the department's performance in fulfilling operational duties and responsibilities more efficiently and effectively.

INFRASTRUCTURE AND FACILITY MAINTENANCE SEGMENT

Operations and Business Activities of Infrastructure and Facility Maintenance Segment

In terms of infrastructure maintenance, throughout the year 2023, the Company has realized the implementation of maintenance work by meeting the set targets for track and building maintenance, electrical power traction, as well as signaling and telecommunication, including:

1. Repairing facade-related infrastructure at Pegangsaan Dua Station.
2. Repairing platform canopies at LRT Jakarta Stations.
3. Design and repair work on water channels at LRT Jakarta Stations.
4. Repair work on the environment of BOH-1 BS (Electrical Line & AC).
5. Repair work on access stairs for radio antennas and signal lights.
6. Roof repair for R7 with inject material.
7. Wayfinding repair at stations.
8. Station lighting repair work.
9. Floor repair in LM 7-8 Depot Area.

Kinerja operasi perawatan prasarana dapat dilihat melalui volume pekerjaan yang telah dilakukan. Adapun target dan realisasi volume pekerjaan yang dilakukan sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Bentuk Pekerjaan Pemeliharaan Form of Maintenance Work	Volume Pekerjaan Work Volume		
	Target Target	Realisasi Realization	Percentase Percentage
Jalur dan Jalan Layang Tracks and Overpasses	1.259	1.259	100%
Bangunan Buildings	2.779	2.779	100%
Persinyalan, Telekomunikasi & Fasilitas Pertiketan Signaling, Telecommunication & Ticketing Facilities	2.087	2.087	100%
Traksi & Daya Sistem Kelistrikan Electrical System Traction & Power	6.772	6.772	100%

Sepanjang tahun 2023, perawatan prasarana yang dilakukan telah didukung dengan kompetensi kecakapan dan sertifikasi oleh para karyawan. Perusahaan merencanakan pelaksanaan diklat dan sertifikasi tenaga pemeriksaan dan perawatan sehingga setiap aspek dapat menunjang kinerja menuju arah yang lebih baik. Adapun daftar sertifikasi yang telah dilakukan oleh karyawan perawatan Prasarana khususnya pada bidang perkeretaapian pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Sertifikat Certificate Issuer	Jumlah Karyawan Tersertifikasi Number of Certified Employees
Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fasilitas Operasi Railway Infrastructure Maintenance Operating Facilities	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	27
Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian Fasilitas Operasi Railway Infrastructure Inspection Operating Facilities	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	27
Perawatan Prasarana Perkeretaapian Jalur dan Bangunan Railway Infrastructure Maintenance Track and Building	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	10
Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian Jalur dan Bangunan Railway Infrastructure Inspection Track and Building	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	10

Selain itu, Perusahaan terus berkomitmen melaksanakan perawatan sarana dengan cara melakukan pemeriksaan dan perawatan kereta LRV setiap hari dan tidak ada penghentian perawatan kereta LRT. Hal itu seiring dengan telah beroperasinya LRT Jakarta Fase 1 secara normal. Dalam rangka memastikan kondisi sarana tetap aman, nyaman, dan bersih, Perusahaan telah melakukan beberapa upaya, seperti:

1. Perawatan berkala dan kendali mutu.
2. Penggantian komponen yang aus, habis masa pakainya, rusak dan mengalami penurunan kinerja.
3. *Monitoring* kinerja sarana dan digitalisasi data perawatan.

The performance of infrastructure maintenance operations can be seen through the volume of work conducted. The targeted and realized volume of work conducted throughout the year 2023 is as follows:

Throughout 2023, the Company's infrastructure maintenance has been supported by skills competencies and certified employees. The Company plans to conduct training and certification of inspection and maintenance personnel so that every aspect can support performance towards a better direction. The list of certifications that have been conducted by employees of the Infrastructure Division in 2023 can be seen as follows:

Furthermore, the Company remains committed to conducting infrastructure maintenance by inspecting and maintaining LRV trains daily without any interruptions in LRT train maintenance. This aligns with the normal operation of LRT Jakarta Phase 1. To ensure that the facilities remain safe, comfortable, and clean, the Company has taken several measures, such as:

1. Periodic maintenance and quality control.
2. Replacement of worn-out, expired, damaged, and underperforming components.
3. Monitoring the performance of facilities and digitizing maintenance data.

Di tahun 2023, kinerja segmen perawatan sarana dapat dilihat melalui volume pekerjaan, baik perawatan kereta LRT di Depo maupun perawatan sarana yang telah direalisasikan. Perawatan tersebut bertujuan untuk memastikan keamanan operasional kereta dan kenyamanan selama perjalanan. Per 31 Desember 2023, volume pekerjaan perawatan sarana yang telah dilakukan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Bentuk Pekerjaan Pemeliharaan Type of Maintenance Work	Volume Pekerjaan Work Volume		
	Target Target	Realisasi Realization	Persentase Percentage
Perawatan Kereta Train Maintenance	338	338	100%
Pemeriksaan Pengendalian Mutu Sarana Facility QC Inspection	1.471	1.520	100%
Cuci Kereta Train Wash	1.460	1.455	99,9%
Program dan Realisasi Perawatan Fasilitas Depo Depot Facility Maintenance Program and Realization	322	322	100%

Tim perawatan Sarana telah didukung dengan kompetensi kecakapan dan sertifikasi, hal itu dilakukan untuk memastikan perawatan sarana yang dilakukan berjalan dengan baik. Adapun daftar sertifikasi yang dimiliki oleh karyawan perawatan sarana perkeretaapian dan masih berlaku hingga akhir tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis Sertifikasi Type of Certification	Penerbit Sertifikat Certificate Issuer	Jumlah Karyawan Tersertifikasi Number of Certified Employees
Pemeriksa Sarana Facilities Inspection	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	31
Perawat Sarana Facilities Maintenance	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation	31

Strategi Pengembangan Segmen Perawatan Prasarana dan Sarana

Peningkatan kinerja perawatan Prasarana pada tahun 2023 menjadi salah satu fokus utama bagi manajemen. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan telah merumuskan beberapa strategi pengembangan kinerja, di antaranya adalah:

1. Peningkatan kualitas perawatan & pemeriksaan: Divisi Prasarana terus berupaya meningkatkan kualitas perawatan & pemeriksaan yang diberikan. Hal ini mencakup perbaikan prasarana yang memadai, memberikan edukasi kepada karyawan mengenai pentingnya pelaksanaan pemeriksaan dan perawatan sesuai rencana kerja dan pemilihan vendor jasa pemeliharaan yang berkualitas.
2. Peningkatan keamanan dan keselamatan: Divisi Prasarana juga akan berfokus pada peningkatan keamanan dan keselamatan dalam pengoperasian kereta api. Hal ini mencakup perbaikan infrastruktur dan perlengkapan keselamatan, seperti pengadaan CCTV dan pengaman pintu kereta, serta pelatihan bagi karyawan terkait keselamatan dalam pengoperasian kereta api.

In 2023, the performance of the infrastructure maintenance segment can be seen through the volume of work, both in maintaining LRT trains at the depot and in maintaining facilities that have been implemented. This maintenance aims to ensure the operational safety of trains and passenger comfort during travel. As of December 31, 2023, the volume of infrastructure maintenance work conducted by the Company is as follows:

The Facilities Maintenance team has been supported by competency and certification to ensure that the maintenance activities are conducted effectively. The list of certifications held by railway facilities maintenance personnel, which are still valid until the end of 2023, is as follows:

Strategies for the Development of Infrastructure and Facility Maintenance Segment

Improving the performance of infrastructure maintenance in 2023 was one of the main focuses for management. To achieve this goal, the Company has formulated several performance development strategies, including:

1. Improving Maintenance and Inspection Quality: The Infrastructure Division continues to strive to improve the quality of maintenance and inspections. This includes adequate infrastructure repairs, providing education to employees on the importance of conducting inspections and maintenance according to work plans, and selecting quality maintenance service vendors.
2. Improving Safety and Security: The Infrastructure Division will also focus on enhancing safety and security in railway operations. This involves infrastructure improvements and safety equipment, such as procuring CCTV and train door safety devices, as well as providing training to employees on railway operation safety.

3. Optimalisasi teknologi: Divisi Prasarana juga melakukan optimalisasi teknologi dalam pengoperasian kereta. Hal ini mencakup penggunaan teknologi canggih dalam perawatan dan perbaikan infrastruktur, serta pengembangan aplikasi atau *platform digital* yang memudahkan pelanggan dalam membeli tiket, mengetahui jadwal keberangkatan, serta memonitor status perjalanan kereta api.

Dengan strategi pengembangan kinerja yang komprehensif ini, diharapkan Perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selain itu, strategi ini juga akan membantu meningkatkan citra Perusahaan sebagai perusahaan transportasi yang andal dan terpercaya.

Sedangkan dalam hal metoda perawatan sarana, mengacu pada *maintenance manual* dari pabrikir kereta. Metode perawatan yang dilakukan adalah *preventive maintenance* yaitu perawatan yang dilakukan bertujuan untuk menilai dan/atau memitigasi degradasi dan mengurangi kemungkinan kegagalan suatu komponen. Perawatan preventif dilakukan sesuai dengan interval waktu atau jumlah unit penggunaan yang ditetapkan, namun tanpa investigasi kondisi sebelumnya. Dapat berupa pembersihan, pelumasan, dan penggantian komponen atau suku cadang.

Kegiatan rutin yang dilakukan terkait perawatan sarana sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dan Perawatan Sarana
 - a. Pemeriksaan Rutin (DC): Selama 2023, Divisi Sarana telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap armada LRV sebelum beroperasi. Pemeriksaan ini mencakup 13 item utama sebelum dilakukan serah terima ke tim ASP.
 - b. Perawatan Preventif (7D, 4M): Tim perawatan telah menjalankan program perawatan preventif yang telah direncanakan sebelumnya. Mencakup penggantian suku cadang yang sudah mencapai batas umur pakainya bila diperlukan dan perawatan berkala mingguan dan 4 bulanan untuk memastikan kinerja LRV tetap optimal.
 - c. Perawatan 4 tahunan (4Y): Tim perawatan berat (HM) telah melakukan program perawatan 4 tahunan (*Intermediate Overhaul*) untuk seluruh armada LRT pada bulan September 2023. Selama perawatan ini, seluruh komponen utama akan diperiksa, diperbaiki, atau diganti sesuai kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk memastikan armada LRT tetap dalam kondisi prima selama jangka waktu yang lebih panjang.
2. Perencanaan Perawatan dan Kendali Mutu (QC)
 - a. Selama 2023, Divisi Sarana telah melakukan kegiatan QC sebelum dan sesudah dilakukan perawatan mingguan dan 4 bulanan serta QC setelah perawatan 4 tahunan.
 - b. Tim QC terus mengawasi dan mengukur mutu pekerjaan perawatan yang dilakukan oleh tim perawatan. Tim QC memastikan bahwa setiap kegiatan perawatan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk menghindari potensi risiko dan kegagalan.

3. Technology Optimization: The Infrastructure Division also implements technology optimization in railway operations. This includes using advanced technology in infrastructure maintenance and repair, as well as developing applications or digital platforms to facilitate customers in purchasing tickets, checking departure schedules, and monitoring train travel status.

With this comprehensive performance development strategy, the Company hopes to improve performance and provide better services to customers. Additionally, these strategies will help enhance the Company's image as a reliable and trustworthy transportation company.

In terms of facility maintenance methods, it refers to the maintenance manual of the train manufacturer. The maintenance method is preventive maintenance, which aims to assess and/or mitigate degradation and reduce the likelihood of failure of a component. Preventive maintenance is conducted according to a set time interval or number of units of use, but without prior condition investigation. It can include cleaning, lubrication, and replacement of components or parts.

Routine activities conducted related to facility maintenance are as follows:

1. Inspection and Maintenance of Facilities
 - a. Routine Inspection (DC): During 2023, the Facilities Division conducted routine checks on the LRV fleet prior to operation. This inspection covered 13 key items prior to handover to the ASP team.
 - b. Preventive Maintenance (7D, 4M): The maintenance team has executed a pre-planned preventive maintenance program. This includes replacement of end-of-life parts when necessary and weekly and 4-monthly periodic maintenance to ensure LRV performance remains optimal.
 - c. 4-Year Maintenance (4Y): The heavy maintenance (HM) team has undertaken a 4-year maintenance program (*Intermediate Overhaul*) for the entire LRT fleet in September 2023. During this maintenance, all major components would be inspected, repaired or replaced as required. This aims to ensure the LRT fleet remains in top condition for a longer period of time.
2. Maintenance Planning and Quality Control (QC)
 - a. During 2023, the Facilities Division has conducted QC activities before and after weekly and 4-monthly maintenance and QC after 4-yearly maintenance.
 - b. The QC team continuously supervises and measures the quality of maintenance work performed by the maintenance team. The QC team ensures that every maintenance activity is conducted in accordance with established standards to avoid potential risks and failures.

3. Perencanaan dan Perawatan Fasilitas Peralatan Depo Divisi Sarana juga bertanggung jawab atas perawatan dan pemeriksaan berkala fasilitas peralatan depo LRT. Selama 2023, telah melakukan pemeriksaan dan perawatan rutin terhadap infrastruktur dan peralatan depo, termasuk perbaikan jika ditemukan kerusakan.

PT LRT Jakarta tetap berkomitmen untuk menyediakan layanan LRT yang aman, handal, dan efisien bagi masyarakat DKI Jakarta. Kegiatan pemeriksaan dan perawatan yang dilakukan selama 2023 mencerminkan tekad untuk memenuhi kewajiban ini. Perusahaan akan terus berupaya menjaga kehandalan sarana LRT dan meningkatkan mutu layanan di masa mendatang.

SEGMENT PENGUSAHAAN PRASARANA DAN SARANA

Kegiatan Operasi dan Usaha Segmen Pengusahaan Prasarana dan Sarana

Kegiatan pengembangan usaha di luar pendapatan tiket (*non-farebox*) yang dijalankan oleh segmen ini bertujuan untuk mendukung aktivitas pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana LRT Jakarta. Hal itu sesuai dengan fungsi penyelenggaraan yaitu pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan. Aktivitas pengusahaan yang dilakukan oleh LRTJ antara lain yaitu ritel, *event & activation*, *telecommunication*, *consultancy & training*, *advertising*, dan jasa *operation & maintenance* di industri perkeretaapian.

Proses bisnis ini dilakukan dengan cara *direct approach* atau *direct selling* kepada potensial klien, melakukan inisiasi *meeting offline* maupun *online* dengan menjelaskan *market sounding* dan *company profile* LRT Jakarta, *Document Collection* dan mengirimkan LOO (*Letter of Offering*) kepada calon klien yang telah terinfo mengenai *product brief* dari LRT Jakarta, negosiasi mengenai teknis dan harga sesuai dengan SK Direksi untuk mencapai kesepakatan, dan yang terakhir adalah membuat kesepakatan kerja sama yang tertuang dalam perjanjian kerja sama berdasarkan jangka waktu *mid-term* dan *long-term*.

Produk dan jasa pengembangan bisnis *non-farebox* yang dimiliki meliputi area Depo LRT Jakarta, sebagai pemanfaatan area untuk kegiatan bisnis restoran dan gerai pusat pengiriman kebutuhan harian digital, 6 (enam) Stasiun LRT Jakarta sebagai area penempatan *vending machine* dan kegiatan *brand activation* dari mitra usaha, penyelenggaraan *training* secara *online/offline*, space untuk penempatan antena *microcell*, sebagai mitra penyediaan barang untuk *spareparts*, serta pemanfaatan dalam bidang jasa konsultansi dan perawatan di mana PT LRT Jakarta dapat menjadi *partner operasi*, perawatan dan konsultansi untuk mitra yang bergerak di bidang transportasi. Jika di tahun-tahun sebelumnya pengembangan bisnis masih terfokus pada kegiatan *non human presence*, dan terus bertumbuh dengan melibatkan mitra usaha secara daring maupun luring.

3. Depot Equipment Facility Planning and Maintenance The Facilities Division is also responsible for the maintenance and periodic inspection of LRT depot equipment facilities. During 2023, it has conducted regular inspection and maintenance of depot infrastructure and equipment, including repairs if damage is found.

PT LRT Jakarta remains committed to providing safe, reliable, and efficient LRT services for the people of DKI Jakarta. The inspection and maintenance activities conducted during 2023 reflect the determination to fulfill this obligation. The Company will continue to strive to maintain the reliability of LRT facilities and improve service quality in the future.

INFRASTRUCTURE AND FACILITY BUSINESS SEGMENT

Operations and Business Activities of Infrastructure and Facility Business Segment

The business development activities outside of ticket revenue (*non-farebox*) carried out by this segment aim to support the operation and maintenance activities of the Jakarta LRT facilities and infrastructure. This is in accordance with the organizing function, namely development, operation, maintenance, and exploitation. Business activities conducted by LRTJ include retail, events & activation, telecommunication, consultancy & training, advertising, and operation & maintenance services in the railway industry.

This business process is carried out by direct approach or direct selling to potential clients, initiating offline and online meetings by explaining the market sounding and company profile of LRT Jakarta, Document Collection and sending LOO (*Letter of Offering*) to prospective clients who have been informed about the product brief of LRT Jakarta, negotiating technical and pricing in accordance with the Decree of the Board of Directors to reach an agreement, and the last is to make a cooperation agreement contained in a cooperation agreement based on the mid-term and long-term period.

The non-farebox business development products and services include the Jakarta LRT Depot area, as a utilization area for restaurant business activities and digital daily necessities delivery center outlets, 6 (six) Jakarta LRT Stations as a vending machine placement area and brand activation activities from business partners, online/offline training, space for microcell antenna placement, as a partner in providing goods for spare parts, as well as utilization in the field of consulting and maintenance services where PT LRT Jakarta can become an operation, maintenance and consulting partner for partners engaged in the transportation sector. If in previous years business development was still focused on non-human presence activities and continued to grow by involving business partners online and offline.

Strategi Pengembangan Segmen Pengusahaan Prasarana dan Sarana

Perusahaan melakukan kegiatan bisnis secara *direct selling* kepada para mitra dengan memperhatikan kebutuhan para calon mitra baik calon mitra eksisting maupun calon mitra baru. Tahun 2023 merupakan titik balik setelah masa pandemi berkepanjangan, bisnis non-farebox LRTJ fokus pada kelima kelompok besar bisnis yaitu retail, *advertising, operation and maintenance, event and activation* dan *telecommunication*. Dalam mengembangkan segmen pengusahaan prasarana dan sarana, pendekatan ini menekankan pentingnya komunikasi langsung dan interaksi yang berkelanjutan dengan para mitra, menggali serta memahami secara mendalam kebutuhan dan harapan mereka.

Melalui pendekatan *direct selling*, perusahaan berupaya untuk secara langsung berinteraksi dengan para calon mitra. Hal ini tidak hanya mencakup penyampaian informasi yang komprehensif mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk mendengarkan masukan dan umpan balik dari para mitra potensial. Dengan demikian, perusahaan dapat menyesuaikan penawaran mereka secara lebih efektif sesuai dengan kebutuhan dan harapan calon mitra baru.

Selain itu, perusahaan juga memberikan perhatian khusus terhadap mitra-mitra eksisting. Melalui pendekatan *direct selling* ini, perusahaan dapat secara teratur berkomunikasi dengan mitra-mitra yang sudah ada, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi, serta memberikan solusi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya mempertahankan hubungan yang kuat dengan para mitra eksisting, tetapi juga memperkuat loyalitas mereka terhadap merek dan layanan perusahaan.

Pendekatan *direct selling* ini juga memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Dengan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang preferensi dan harapan mitra, perusahaan dapat mengembangkan inovasi produk dan layanan yang relevan, serta meningkatkan efisiensi operasional secara terus-menerus.

Dengan demikian, strategi pengembangan segmen pengusahaan prasarana dan sarana perkeretaapian yang berfokus pada *direct selling* ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memberikan nilai tambah bagi para mitra, sambil tetap memperhatikan perubahan dinamika pasar dan kebutuhan pelanggan .

Kinerja Operasi Segmen Pengusahaan Prasarana dan Sarana

Kegiatan bisnis yang dilakukan Perusahaan berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian kerja sama. Produk LRTJ yang ditawarkan bersifat *adjustable* atau dapat disesuaikan dengan kondisi pasar dan permintaan *customer* dengan tetap berasaskan nilai-nilai yang dipegang oleh LRTJ. Tim

Strategies for the Development of Infrastructure and Facility Segment

The Company conducts direct selling business activities to partners by paying attention to the needs of prospective partners, both existing and new prospective partners. The year 2023 marks a turning point after a prolonged pandemic period, with the non-farebox business of LRTJ focusing on five major business groups, namely retail, advertising, operation and maintenance, event and activation, and telecommunication. In developing the infrastructure and facilities management segment, this approach emphasizes the importance of direct communication and ongoing interaction with partners, exploring and deeply understanding their needs and expectations.

Through the direct selling approach, the Company strives to interact directly with prospective partners. This not only includes the comprehensive delivery of information about the products and services offered, but also allows the Company to listen to input and feedback from potential partners. Thus, the Company can more effectively tailor their offerings according to the needs and expectations of new partners.

Furthermore, the Company also pays special attention to existing partners. Through this direct selling approach, the Company can regularly communicate with existing partners, identify challenges and opportunities they face, and provide suitable solutions to meet their needs. Thus, the Company not only maintains strong relationships with existing partners but also strengthens their loyalty to the Company's brand and services.

This direct selling approach also allows the Company to be more flexible in responding to market changes and customer needs. By having a deeper understanding of partners' preferences and expectations, the Company can develop relevant product and service innovations and continuously improve operational efficiency.

Therefore, this strategy of developing the infrastructure and facilities management segment in the railway sector, focusing on direct selling, reflects the Company's commitment to providing added value to partners while keeping in mind the changing market dynamics and customer needs.

Operating Performance of Infrastructure and Facility Business Segment

The business activities conducted by the Company are based on an agreement between the two parties contained in a cooperation agreement. LRTJ products offered are adjustable or can be adjusted to market conditions and customer demand while still being based on the values held by LRTJ. The Business Development Team always

Pengembang Bisnis senantiasa menggali, menyesuaikan, dan menjaga (*Maintain*) networking atas ide bisnis yang sedang berkembang di tengah kebutuhan *customer*, hal itu dilakukan untuk memastikan kinerja operasi segmen tersebut.

Pendapatan dan Profitabilitas Pendapatan Usaha

Uraian Description	2023 (Rp) (IDR)	2022 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp) (IDR)	Percentase Percentage (%)
Pendapatan Sewa Menyewa Lease Income	2.410.500.663	1.969.991.003	440.509.660	22,36%
Periklanan Advertising	2.817.078	9.009.009	(6.191.931)	(68,73%)
Jasa Penjualan Teknis Technical Sales Service	5.884.424.060	2.677.156.193	3.207.267.867	119,80%
Jasa Pelatihan Training Service	61.005.540	41.250.000	19.755.740	47,89%
Jumlah Total	8.358.747.341	4.656.156.205	3.661.341.136	77,94%

Per 31 Desember 2023, PT LRT Jakarta berhasil membukukan pendapatan non-Farebox senilai Rp8,36 miliar atau lebih tinggi 77,94% dari tahun 2022. Kontribusi pendapatan non-Farebox terbesar selama tahun 2023 diperoleh dari pendapatan Jasa Penjualan Teknis senilai Rp5,88 miliar. Nilai tersebut meningkat sebesar 119,80% dari tahun 2022 yaitu senilai Rp2,68 miliar. Adapun kenaikan tersebut disebabkan oleh keberlanjutan bisnis pemeliharaan dan perawatan kereta layang Bandara Soekarno-Hatta milik Angkasa Pura 2 yang masih tetap membutuhkan perawatan dan pemeliharaan.

Pendapatan dan Profitabilitas Pendapatan Tiket dan Subsidi Operasi dan Pelayanan

Uraian Description	2023 (Rp) (IDR)	2022 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp) (IDR)	Percentase Percentage (%)
Pendapatan Tiket Ticket Revenue	4.872.248.450	3.462.909.084	1.409.339.366	40,70%
Pendapatan Subsidi Sarana dari Pemprov DKI Jakarta Facility Subsidy Revenue from DKI Jakarta Provincial Government	136.155.828.746	110.097.445.845	26.058.382.904	23,67%
Pendapatan Subsidi Prasarana dari Pemprov DKI Jakarta Infrastructure Subsidy Revenue from DKI Jakarta Provincial Government	122.219.629.509	96.447.051.915	25.772.577.594	26,72%

explores, adjusts, and maintains networking on business ideas that are developing in the midst of customer needs, it is done to ensure the performance of the segment's operations.

Revenue and Profitability of Operating Revenue

As of December 31, 2023, PT LRT Jakarta successfully recorded non-Farebox revenue amounted to IDR8.36 billion, which was 77.94% higher than in 2022. The largest contribution to non-Farebox revenue in 2023 came from Technical Sales Services revenue of IDR5.88 billion. This value increased by 119.80% from 2022, which was IDR2.68 billion. The increase was due to the sustainability of Angkasa Pura 2's Soekarno-Hatta Airport elevated train maintenance business, which still requires care and maintenance.

Revenue and Profitability of Ticket Revenue and Operations and Services Subsidies

ASPEK PEMASARAN

MARKETING ASPECT

STRATEGI PEMASARAN

Perusahaan terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan yang diterima dengan menerapkan sejumlah strategi di bidang pemasaran, untuk menarik dan memperbesar peluang dalam meraih pelanggan yang potensial maupun mempertahankan pelanggan setia Perusahaan.

Strategi pemasaran:

1. Segmentasi Pasar yang lebih mendalam: LRT Jakarta melakukan analisis yang mendalam terhadap segmen pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik. Dengan demikian, LRT Jakarta dapat menyesuaikan penawaran produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari setiap segmen, meningkatkan relevansi, dan daya tarik.
2. Peningkatan *Brand Awareness* dan *Brand Equity*: LRT Jakarta meningkatkan upaya pemasaran untuk memperkuat kesadaran merek (*brand awareness*) di kalangan target pasar. Dengan meningkatnya kesadaran merek, Perusahaan bertujuan untuk memperkuat posisi LRT Jakarta di pasar dan memperluas basis pelanggan setia.
3. Penyempurnaan Mix Pemasaran: LRT Jakarta terus mengoptimalkan kombinasi pemasaran (*marketing mix*), termasuk produk, harga, distribusi, dan promosi. Ini mencakup pengembangan produk baru yang responsif terhadap kebutuhan pelanggan, penetapan harga yang kompetitif serta pelaksanaan kampanye promosi yang lebih efektif.
4. Penguatan Hubungan Pelanggan: LRT Jakarta memprioritaskan penguatan hubungan dengan pelanggan melalui program loyalitas, layanan pelanggan yang responsif, dan komunikasi yang terus-menerus. LRT Jakarta menganggap pelanggan sebagai mitra penting dalam bisnis dan berusaha untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan.
5. Inovasi Berkelanjutan: LRT Jakarta berkomitmen untuk terus mendorong inovasi dalam strategi pemasaran. Ini meliputi eksplorasi teknologi baru, penemuan jalur pemasaran baru, dan adaptasi terhadap tren dan perubahan pasar yang muncul. Dengan tetap berinovasi, kami bertujuan untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah.

MARKETING STRATEGY

The Company continues to strive to optimize its revenue by implementing a number of strategies in the marketing field, to attract and expand opportunities to reach potential customers as well as retaining loyal customers of the Company.

Marketing strategies:

1. Deeper Market Segmentation: LRT Jakarta conducts in-depth market segmentation analysis to better understand the needs and preferences of customers. Thus, LRT Jakarta can tailor product and service offerings to meet the specific needs of each segment, increasing relevance and attractiveness.
2. Increasing Brand Awareness and Brand Equity: LRT Jakarta enhances marketing efforts to strengthen brand awareness among target markets. With increased brand awareness, the Company aims to strengthen LRT Jakarta's position in the market and expand its loyal customer base.
3. Refinement of Marketing Mix: LRT Jakarta continues to optimize the marketing mix, including product, price, distribution, and promotion. This includes developing new products responsive to customer needs, setting competitive prices, and implementing more effective promotional campaigns.
4. Strengthening Customer Relationships: LRT Jakarta prioritizes strengthening customer relationships through loyalty programs, responsive customer service, and continuous communication. LRT Jakarta sees customers as important partners in business and strives to build mutually beneficial long-term relationships.
5. Sustainable Innovation: LRT Jakarta is committed to continually driving innovation in marketing strategies. This includes exploring new technologies, discovering new marketing channels, and adapting to emerging market trends and changes. By staying innovative, we aim to remain relevant and competitive in the ever-changing market.

PANGSA PASAR

Pada tahun 2023, LRT Jakarta berhasil memperluas jangkauan layanan usaha di berbagai segmen bisnis. Perusahaan menyediakan lahan yang dapat disewa kepada pengusaha lokal untuk pengembangan usahanya di bidang Restoran. Perusahaan juga menyediakan area untuk disewakan kepada pedagang ritel dan pemilik usaha kecil di sekitar stasiun, mencakup berbagai jenis usaha seperti kios makanan dan minuman.

Di bidang periklanan, LRT Jakarta menawarkan berbagai opsi iklan di dalam dan di sekitar stasiun kepada pengiklan potensial. Ini mencakup periklanan jenis *naming rights*, *digital advertising* dan pemasangan *sticker* di dalam maupun di luar stasiun dan kereta, serta iklan luar ruangan di sekitar area stasiun. Perusahaan memfasilitasi pengiklan untuk menjangkau *audiens* yang menggunakan layanan kereta.

Antusiasme warga sekitar terhadap kegiatan *offline activation* yang diselenggarakan di stasiun juga merupakan inovasi atas pemanfaatan aset stasiun secara optimum, kegiatan *activation* tidak hanya terfokus pada komersial, melainkan juga melibatkan pegiat usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengisi portofolio bisnis di kawasan LRT Jakarta.

Terakhir, dalam layanan *operation and maintenance* kereta, LRT Jakarta menyediakan pemeliharaan dan perawatan armada kereta api APMS. Perusahaan berusaha untuk memastikan kelancaran operasi kereta bagi penumpang.

Dengan demikian, Perusahaan menggarisbawahi bahwa pangsa pasar LRT Jakarta mencakup berbagai segmen bisnis yang dilayani mulai dari layanan transportasi hingga penyewaan lahan, periklanan, serta perawatan dan pengoperasian kereta api. Hal ini mencerminkan upaya LRT Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mengoptimalkan pendapatan perusahaan.

MARKET SHARE

In 2023, LRT Jakarta successfully expanded its business service reach in various business segments. The Company provides land that can be leased to local entrepreneurs for business development in the restaurant sector. The Company also provides areas for rent to retail traders and small business owners around the stations, covering various types of businesses such as food and beverage kiosks.

In terms of advertising, LRT Jakarta offers various advertising options inside and around the stations to potential advertisers. This includes advertising options like naming rights, digital advertising, and sticker placements inside and outside stations and trains, as well as outdoor advertising around the station area. The Company facilitates advertisers to reach audiences using the train services.

The enthusiasm of the surrounding residents for offline activation activities held at the stations is also an innovation in the optimal utilization of station assets. Activation activities are not only focused on commercial activities but also involve micro, small, and medium-sized business activists in filling the business portfolio in the LRT Jakarta area.

Finally, in train operation and maintenance services, LRT Jakarta provides maintenance and upkeep of the APMS train fleet. The Company strives to ensure smooth train operations for passengers.

Thus, the Company emphasizes that the market share of LRT Jakarta includes various business segments served, ranging from transportation services to land leasing, advertising, as well as maintenance and operation of trains. This reflects LRT Jakarta's efforts to meet customer needs and optimize its revenue.

TINJAUAN KEUANGAN

FINANCIAL REVIEW

Dalam menyusun analisa dan pembahasan kinerja keuangan dalam Laporan Tahunan ini telah mengacu pada Laporan Keuangan PT LRT Jakarta yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan serta Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

Pembahasan kinerja keuangan Perusahaan disajikan dengan memperhatikan penjelasan atas catatan Laporan Keuangan Perusahaan dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Uraian Description	2023 (Rp) (IDR)	2022 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp) (IDR)	Persentase Percentage (%)
ASET ASSETS				
Aset Lancar Current Assets	189.290.899.397	138.185.305.623	51.105.593.774	36,98%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	192.197.792.457	201.167.869.442	(8.970.076.985)	(4,46%)
Jumlah Aset Total Assets	381.488.691.854	339.353.175.065	42.135.516.789	12,42%
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY				
Liabilitas Jangka Pendek Short-Term Liabilities	60.328.612.301	37.841.185.373	22.487.426.928	59,43%
Liabilitas Jangka Panjang Long-Term Liabilities	5.865.367.835	1.813.684.658	4.051.683.177	223,40%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	66.193.980.136	39.654.870.031	26.539.110.105	66,93%
Ekuitas Equity	315.294.711.718	299.698.305.034	15.596.406.684	5,20%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	381.488.691.854	339.353.175.065	68.674.626.894	20,24%

Aset

Di tahun 2023, Perusahaan berhasil membukukan jumlah aset sebesar Rp381,49 miliar, meningkat Rp42,14 miliar atau 12,42% jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp339,35 miliar. Adapun peningkatan tersebut disebabkan oleh telah dilakukannya pengakuan pencatatan persediaan sebesar Rp12,95 miliar dan terdapat peningkatan pendapatan subsidi dari tahun 2022 sebesar 50,39% yaitu

The analysis and discussion of financial performance in this Annual Report refers to PT LRT Jakarta's Financial Statements, which have been audited by Public Accounting Firm Hertanto, Grace, Karunawan and Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja Suhartono with an unqualified opinion ending on December 31, 2023 and 2022. The Company's Financial Statements have been prepared in accordance with the applicable Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, including Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board - Indonesian Institute of Accountants (DSAK - IAI).

The discussion on the Company's financial performance is presented by taking into account the explanation on the records of the Company's Financial Statements from the external auditor as an integral part of this Annual Report.

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Assets

In 2023, the Company successfully recorded total assets amounted to IDR381.49 billion, an increase of IDR42.14 billion or 12.42% compared to 2022, which amounted to IDR339.35 billion. This increase was due to the recognition of inventory recording amounting to IDR12.95 billion and an increase in subsidy revenue by 50.39% from 2022, amounted to IDR51.8 billion.

51,8 miliar.

Aset Lancar

Per 31 Desember 2023, aset lancar Perusahaan tercatat sebesar Rp189,29 miliar, meningkat Rp51,11 miliar atau 36,98% jika dibanding sebelumnya yang sebesar Rp138,19 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kas setara kas perusahaan dengan diterimanya dana subsidi dari Pemprov DKI Jakarta serta dilakukannya pengakuan pencatatan persediaan.

Aset Tidak Lancar

Di tahun 2023, aset tidak lancar Perusahaan tercatat mengalami penurunan sebesar Rp8,97 miliar atau 12,42% dari Rp201,17 miliar di tahun 2022 menjadi Rp192,2 miliar. Hal ini lebih disebabkan oleh depresiasi aset tetap sepanjang tahun 2023.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Perusahaan di tahun 2023 tercatat sebesar Rp66,19 miliar, meningkat Rp26,54 miliar atau 66,93% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp39,65 miliar. Adanya peningkatan hutang dikarenakan meningkatnya utang kepada pihak berelasi dimana perusahaan mengalami kelebihan penerimaan subsidi serta meningkatnya utang kepada pihak ketiga seiring meningkatnya jumlah aktivitas di penghujung tahun 2023.

Liabilitas Jangka Pendek

Di tahun 2023, liabilitas jangka pendek Perusahaan tercatat sebesar Rp60,33 miliar, meningkat Rp22,49 miliar atau 59,43% dari tahun 2022 yang sebesar Rp37,84 miliar. Hal ini dikarenakan perusahaan mengalami kelebihan penerimaan subsidi dan meningkatnya jumlah aktivitas di penghujung tahun 2023.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang Perusahaan di tahun 2023 tercatat sebesar Rp5,86 miliar, meningkat Rp4,05 miliar atau 223,40% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp1,81 miliar. Hal ini disebabkan oleh pencadangan jumlah imbalan pasca kerja.

Ekuitas

Per 31 Desember 2023, jumlah ekuitas Perusahaan tercatat sebesar Rp 315,29 miliar, meningkat Rp15,60 miliar atau 5,20% dari tahun 2022 sebesar Rp299,70 miliar. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan saldo laba yang mencapai 15,60 miliar, naik sebesar 83,31% dari tahun sebelumnya sebesar Rp8,51 miliar.

Current Assets

As of December 31, 2023, the Company's current assets were recorded at IDR189.29 billion, an increase of IDR51.11 billion or 36.98% compared to the previous amount of IDR138.19 billion. This was due to the increase in the Company's cash equivalents with the receipt of subsidy funds from the DKI Jakarta Provincial Government and the recognition of inventory recording.

Non-Current Assets

In 2023, the Company's non-current assets recorded a decrease of IDR8.97 billion or 4.46%, from IDR201.17 billion in 2022 to IDR192.2 billion. This was primarily due to the depreciation of fixed assets throughout 2023.

Liabilities

The Company's total liabilities in 2023 were recorded at IDR66.19 billion, an increase of IDR26.54 billion or 66.93% compared to the previous year's IDR39.65 billion. This increase in debt was due to higher debts to related parties resulting from excess of subsidy revenue and increased debts to third-parties in line with the increasing number of activities at the end of 2023

Short-Term Liabilities

In 2023, the Company's short-term liabilities were recorded at IDR60.33 billion, an increase of IDR22.49 billion or 59.43% from IDR37.84 billion in 2022. This was due to the excess of subsidy revenue and increasing number of activities at the end of 2023.

Long-Term Liabilities

The Company's long-term liabilities in 2023 were recorded at IDR5.86 billion, an increase of IDR4.05 billion or 223.40% compared to the previous year's IDR 1.81 billion. This was due to the provisioning for post-employment benefits.

Equity

As of December 31, 2023, the Company's total equity was recorded at IDR315.29 billion, an increase of IDR15.60 billion or 5.20% from IDR299.70 billion in 2022. This increase was supported by the growth in retained earnings, which reached IDR15.60 billion, an increase of 83.31% from the previous year's IDR8.51 billion.

LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

STATEMENT OF PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Uraian Description	2023 (Rp) (IDR)	2022 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp) (IDR)	Percentase Percentage (%)
Pendapatan Revenue	271.606.454.045	214.704.813.046	56.901.640.999	26,50%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(170.163.884.005)	(143.921.284.817)	26.242.599.188	18,23%
Laba (Rugi) Kotor Gross Profit (Loss)	101.442.570.040	70.783.528.229	30.659.041.811	43,31%
Beban Usaha Operating Expenses				
Beban Penjualan Selling Expenses	(536.300.537)	(91.599.041)	444.701.496	485,49%
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(85.492.101.782)	(62.451.178.319)	23.040.923.463	36,89%
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	(86.028.402.319)	(62.542.777.360)	23.485.624.959	37,55%
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	15.414.167.721	8.240.750.869	7.173.416.852	87,05%
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Other Income/Expenses				
Pendapatan Lainnya Other Income	6.824.552.243	9.669.366.135	(2.844.813.892)	(29,42%)
Beban Lainnya Other Expenses	(2.588.267.531)	(6.922.304.021)	(4.334.036.490)	(62,61%)
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain Total Other Income (Expenses)	4.236.284.712	2.747.062.114	1.489.222.598	54,21%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Profit (Loss) Before Income Tax	19.650.452.433	10.987.812.983	8.662.639.450	78,84%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Income Tax Benefit (Expense)				
Pajak Kini Current Tax	-	-	-	-
Pajak Tangguhan Deferred Tax	(2.336.591.181)	(2.764.918.012)	(428.326.831)	(15,49%)
Jumlah Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Total Income Tax Benefit (Expense)	(2.336.591.181)	(2.764.918.012)	(428.326.831)	(15,49%)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Profit (Loss) for the Year	17.313.861.252	8.222.894.971	9.090.966.281	110,56%
Pendapatan Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Income				
Keuntungan Aktuarial atas Imbalan Kerja Actuarial Gain on Employee Benefits	(2.201.864.827)	365.673.366	(2.567.538.193)	(702,14%)
Dampak Pajak Income tax effect	484.410.262	(80.448.141)	564.858.403	(702,14%)
Jumlah Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya Total Other Comprehensive Income (Expense)	(1.717.454.565)	285.225.225	(2.002.679.790)	(702,14%)
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income (Loss) for the Year	15.596.406.687	8.508.120.196	7.088.286.491	83,31%

Pendapatan

Di tahun 2023, Perusahaan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp271,60 miliar, mengalami peningkatan Rp56,90 miliar atau 26,50% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp214,70 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah aktivitas di perusahaan sehingga realisasi belanja menjadi lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dan menyebabkan pendapatan subsidi meningkat signifikan. Selain itu, meningkatnya jumlah penumpang menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan pendapatan dari hasil penjualan tiket.

Beban Usaha

Di tahun 2023, beban usaha Perusahaan tercatat sebesar Rp86,03 miliar, meningkat Rp23,49 miliar atau 37,55% dibanding tahun 2022 sebesar Rp62,54 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah aktivitas di perusahaan sehingga realisasi belanja menjadi lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, untuk mendukung pengoptimalisasi operasional perusahaan.

Pendapatan (Beban) Lain-lain

Per 31 Desember 2023, Perusahaan membukukan pendapatan lain-lain sebesar Rp4,24 miliar, meningkat Rp1,49 miliar atau 54,21% jika dibandingkan dengan sebelumnya sebesar Rp2,74 miliar. Hal ini lebih disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendapatan bunga deposito sebesar 71,35% dari tahun sebelumnya dan menurunnya penggunaan beban lainnya.

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Di tahun 2023, Perusahaan membukukan laba bersih sebesar Rp17,31 miliar, mengalami peningkatan Rp7,10 miliar atau 110,56% dari tahun 2022 yang sebesar Rp8,22 miliar. Peningkatan laba bersih Perusahaan disebabkan tumbuhnya jumlah penumpang dan pendapatan subsidi dari Pemprov DKI Jakarta.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Perusahaan berhasil membukukan laba komprehensif sebesar Rp15,60 miliar di tahun 2023, meningkat Rp7,10 miliar atau 83,31% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp8,51 miliar. Hal tersebut dikarenakan tumbuhnya jumlah penumpang dan pendapatan subsidi dari Pemprov DKI Jakarta.

LAPORAN ARUS KAS

Revenue

In 2023, the Company successfully recorded revenue amounted to IDR271.60 billion, an increase of IDR56.90 billion or 26.50% compared to the previous year's IDR 214.70 billion. This increase was due to the increasing number of activities within the Company, resulting in higher spending realization compared to the previous year and a significant increase in subsidy revenue. Additionally, the growing number of passengers contributed to higher revenue from ticket sales.

Operating Expenses

In 2023, the Company's operating expenses were recorded at IDR86.03 billion, an increase of IDR23.49 billion or 37.55% compared to IDR62.54 billion in 2022. This increase was due to the increasing number of activities within the Company, leading to higher spending realization compared to the previous year to support the optimization of the Company's operations.

Other Income (Expense)

As of December 31, 2023, the Company recorded other income of IDR4.24 billion, an increase of IDR1.49 billion or 54.21% compared to the previous year's IDR2.74 billion. This increase was mainly due to a 71.35% increase in interest income from deposits compared to the previous year and a decrease in other expenses.

Net Profit (Loss) for the Year

In 2023, the Company recorded a net profit of IDR17.31 billion, an increase of IDR7.10 billion or 86.38% from the previous year's IDR9.29 billion. The increase in the Company's net profit was due to the growth in the number of passengers and the subsidy revenue from the DKI Jakarta Provincial Government.

Comprehensive Income (Loss) for the Year

The Company successfully recorded comprehensive income of IDR15.60 billion in 2023, an increase of IDR7.10 billion or 83.31% compared to IDR8.51 billion in 2022. This was due to the growth in the number of passengers and the subsidy revenue from the DKI Jakarta Provincial Government.

STATEMENT OF CASH FLOWS

Uraian Description	2023 (Rp) (IDR)	2022 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp) (IDR)	Persentase Percentage (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	41.533.376.617	48.378.682.322	(6.845.305.705)	(14,15%)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(34.922.200.660)	(21.463.126.396)	(13.459.074.264)	62,17%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	-	-	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalent	6.611.175.957	26.915.555.926	(20.304.379.969)	(75,44%)

Uraian Description	2023 (Rp) (IDR)	2022 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp) (IDR)	Percentase Percentage (%)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalent at Beginning of the Year	114.030.489.408	87.114.933.482	26.915.555.926	30,90%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalent at End of the Year	120.641.665.365	114.030.489.408	6.611.175.957	5,80%

Di tahun 2023, Perusahaan membukukan kas dan setara kas akhir tahun sebesar Rp120,64 miliar, meningkat Rp6,61 miliar atau 5,80% dari tahun sebelumnya sebesar Rp114,03 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh penerimaan subsidi yang lebih besar dibanding tahun 2022.

In 2023, the Company recorded cash and cash equivalents at the end of the year amounted to IDR120.64 billion, an increase of IDR6.61 billion or 5.80% from the previous year's IDR114.03 billion. This increase was due to the increase in subsidy revenue compared to 2022.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian Description	2023 (Rp) (IDR)	2022 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp) (IDR)	Percentase Percentage (%)
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Receipt from Customers	269.965.768.868	228.539.615.789	41.426.153.079	18,13%
Pembayaran Kas untuk Beban Usaha dan Operasional Cash Payments for Operating and Operating Expenses	(138.947.585.836)	(124.986.819.519)	(13.960.766.317)	11,17%
Pembayaran Kas kepada Pengurus dan Karyawan Cash Payments to Managers and Employees	(92.998.879.111)	(57.477.735.716)	150.476.614.827	261,80%
Penerimaan Bunga Deposito dan Giro Interest Receipt and Current Account Service	3.514.072.695	2.303.621.768	1.210.450.927	52,55%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi Net Cash Flows Provided From (Used in) Operating Activities	41.533.376.617	48.378.682.322	(6.845.305.705)	-14,15%

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi di tahun 2023 sebesar Rp41,53 miliar, mengalami penurunan Rp6,85 miliar atau 14,15% dibanding tahun 2022 yang mencatatkan arus kas digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp48,38 miliar. Faktor yang mempengaruhi penurunan arus kas yang di peroleh dari aktivitas operasi adalah meningkatnya jumlah aktivitas operasional di perusahaan sehingga pembayaran kas untuk beban-beban perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas operasional meningkat.

Cash flows from operating activities in 2023 amounted to IDR41.53 billion, a decrease of IDR6.85 billion or 14.15% compared to 2022, which recorded cash flows used for operating activities of IDR48.38 billion. The factor affecting the decrease in cash flows from operating activities was the increase in operational activities within the Company, leading to higher cash payments for expenses related to these operational activities.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Uraian Description	2023 (Rp) (IDR)	2022 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp) (IDR)	Percentase Percentage (%)
Penempatan Deposito Placement of Deposits	(43.699.794.842)	(15.000.000.000)	(28.699.794.842)	191,33%
Penerimaan Deposito Acceptance of Deposits	15.000.000.000	-	15.000.000.000	100%
Perolehan Aset Tidak Berwujud Acquisition of Intangible Assets	(1.047.898.420)	(2.321.835.205)	(1.273.936.785)	(54,87%)
Perolehan Aset Tetap Acquisition of Fixed Assets	(5.174.507.398)	(4.141.291.191)	(1.033.216.207)	24,95%

Uraian Description	2023 (Rp) (IDR)	2022 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp) (IDR)	Persentase Percentage (%)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi Net Cash Flows Provided From (Used In) Investing Activities	(34.922.200.660)	(21.463.126.396)	(13.459.074.264)	62,71%

Di tahun 2023, Perusahaan mencatatkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp34,92 miliar, meningkat Rp13,46 miliar atau 62,71% dibanding tahun 2022 sebesar Rp21,46 miliar. Perubahan yang signifikan tersebut dikarenakan perusahaan melakukan penempatan deposito jangka pendek yang jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Kemampuan Perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik jangka pendek yang akan jatuh tempo dapat diukur melalui rasio likuiditas. Rasio likuiditas dapat diukur dengan menggunakan rasio kas dan rasio lancar. Adapun rasio likuiditas Perusahaan adalah sebagai berikut:

Uraian Description	2023 (Rp) (IDR)	2022 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp) (IDR)	Persentase Percentage (%)
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	199	301	-102	33
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	313	365	-52	14

Rasio kas Perusahaan di tahun 2023 tercatat sebesar 199% atau mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang sebesar 301%. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya aktivitas operasional perusahaan yang berbanding lurus dengan meningkatnya kewajiban. Namun, perusahaan tetap memiliki kas dan setara kas yang cukup untuk mengelola kewajiban perusahaan.

Rasio lancar Perusahaan di tahun 2023 adalah sebesar 313% atau menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 365%. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya nilai aset perusahaan yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan subsidi dan pengakuan pencatatan persediaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah memanfaatkan aset secara efisien, dalam melunasi kewajiban perusahaan.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Perusahaan mengukur kemampuannya dalam melunasi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan rasio solvabilitas yang terdiri dari rasio modal sendiri terhadap total aset. Adapun rasio solvabilitas Perusahaan adalah sebagai berikut:

In 2023, the Company recorded cash flows used for investing activities of IDR34.92 billion, an increase of IDR13.46 billion or 62.71% compared to IDR21.46 billion in 2022. This significant change was due to the Company making substantially larger placements in short-term deposits compared to the previous year.

SOLVENCY AND RECEIVABLES COLLECTABILITY RATE

Ability to Pay Short-Term Liabilities

The Company's ability to meet all obligations, including maturing short-term obligations, can be measured through liquidity ratio, namely by using cash ratio and current ratio. The Company's liquidity ratio can be seen as follows:

Uraian Description	2023 (Rp) (IDR)	2022 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp) (IDR)	Persentase Percentage (%)
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	199	301	-102	33
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	313	365	-52	14

The Company's cash ratio in 2023 was recorded at 199%, a decrease compared to 301% in 2022. This decline was due to increased operational activities in the Company, which corresponded with an increase in liabilities. However, the Company still maintained sufficient cash and cash equivalents to manage its obligations.

The Company's current ratio in 2023 was 313%, down from 365% in the previous year. This decrease was caused by the increase in the Company's assets due to higher subsidy revenue and the recognition of inventory recording. This indicates that the Company has efficiently utilized its assets to settle its liabilities.

Solvency

The Company measures its ability to pay off all of its liabilities, both short term and long term, by using the solvency ratio, which consists of the ratio of own capital to total assets. The Company's solvency ratio can be seen as follows:

Uraian Description	2023 (%)	2022 (%)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Percentase Percentage (%)
Rasio Liabilitas terhadap Aset (%) Liability to Assets Ratio (%)	17,35	11,68	5,67	48%

Rasio liabilitas terhadap aset di tahun 2023 tercatat sebesar 17,35%, meningkat dibanding tahun 2022 yang sebesar 11,68%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan liabilitas yang lebih tinggi dibanding peningkatan aset.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang merupakan kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutang yang dapat diukur melalui perhitungan lama penagihan rata-rata *collection period* dan rasio perputaran piutang. Semakin baiknya kemampuan Perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya dapat dilihat dengan semakin kecilnya nilai *collection period*.

Adapun tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian Description	2023 (%)	2022 (%)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Percentase Percentage (%)
Rasio Kolektibilitas Piutang (hari) Receivables Collectability Ratio (in days)	7,46	17,14	(9,68)	(56,48%)

Di tahun 2023, tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan tercatat mengalami penurunan dari 17,14 hari di tahun 2022 menjadi 7,46 hari pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa periode rata-rata yang diperlukan perusahaan untuk mengumpulkan piutang adalah selama 7 hari. Dengan demikian, semakin menurunnya waktu menandakan keamampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutangnya semakin optimal.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Dalam rangka menjaga kelangsungan usaha, Perusahaan mengelola permodalannya dengan memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan tetap menjaga struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal. Untuk memastikan pengelolaan struktur modal secara tepat, Perusahaan senantiasa melakukan telaah secara rutin untuk memastikan struktur modal tetap optimal dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Dasar Pemilihan Struktur Modal

Kebijakan Perusahaan dalam mengelola struktur modal bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha sehingga dapat memberikan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Penetapan kebijakan pengelolaan struktur modal tersebut juga ditujukan untuk mempertahankan struktur permodalan yang optimal guna mengurangi biaya modal.

The liabilities to assets ratio in 2023 was recorded at 17.35%, an increase compared to 11.68% in 2022. This indicates that liabilities increased at a higher rate than assets.

Receivables Collectability Rate

Receivables collectability rate refers to the Company's ability to collect receivables which can be measured through the calculation of the average collection period and receivables turnover ratio. The better the Company's ability to collect its receivables can be seen by the smaller the collection period value.

The Company's receivables collectability rate in 2023 is as follows:

Uraian Description	2023 (%)	2022 (%)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	Percentase Percentage (%)
Rasio Kolektibilitas Piutang (hari) Receivables Collectability Ratio (in days)	7,46	17,14	(9,68)	(56,48%)

In 2023, the Company's receivables collectability ratio decreased from 17.14 days in 2022 to 7.46 days. This indicates that the average period required by the Company to collect receivables is 7 days. Therefore, the shorter collection period signifies the Company's improved efficiency in collecting its receivables.

CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE

Management Policy on Capital Structure

To maintain its business continuity, the Company manages its capital structure to ensure business continuity and maximize benefits for shareholders while maintaining optimal capital structure to reduce the cost of capital. In ensuring proper management of the capital structure, the Company always conducts regular review to ensure that the capital structure remains optimal and provide added value to shareholders.

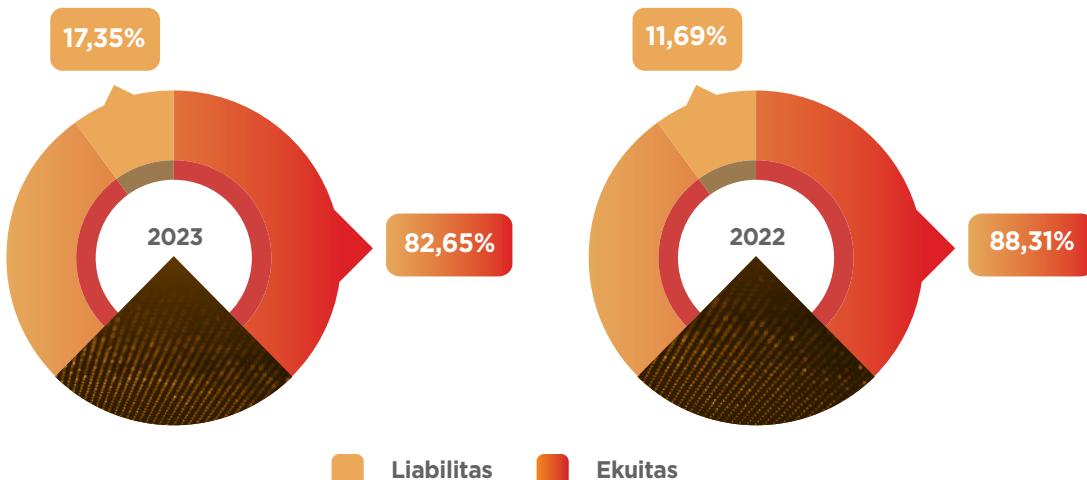
Basis for Selection of Capital Structure

The Company's policy in managing the capital structure aims to maintain business continuity to provide optimal returns for shareholders and other stakeholders. The determination of the capital structure management policy is also aimed at maintaining an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

Rincian Struktur Modal

Struktur modal Perusahaan terdiri dari liabilitas dan ekuitas dengan lebih menitikberatkan struktur permodalannya dari sisi ekuitas. Adapun jumlah liabilitas Perusahaan di tahun 2023 tercatat sebesar Rp66,20 miliar atau 17,35% dari struktur modal dan ekuitas sebesar Rp315,30 miliar atau 82,65% dari struktur modal. Komposisi ini mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Adapun perbandingan struktur modal Perusahaan dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Uraian Description	2023		2022		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Nominal (Rp) (IDR)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp) (IDR)	Komposisi Composition (%)	Nominal (Rp) (IDR)	Percentase Percentage (%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	66.193.980.136	17,35%	39.654.870.031	11,69%	26.539.110.105	66,93%
Jumlah Ekuitas Total Equity	315.294.711.718	82,65%	299.698.305.034	88,31%	15.596.406.684	5,20%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	381.488.691.854	100,00%	339.353.175.065	100,00%	742.135.516.789	12,42%



Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal

Realisasi Investasi Barang Modal

Dalam mengembangkan kegiatan usahanya, Perusahaan meyakini investasi merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan. Investasi Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan biaya yang dikeluarkan Perusahaan untuk melakukan pembelian sejumlah aset, maupun perbaikan terhadap aset yang telah dimiliki sehingga dapat memberikan nilai tambah di kemudian hari. Adapun realisasi investasi barang modal Perusahaan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Capital Structure Details

The Company's capital structure consists of liabilities and equity with more emphasis on the equity side of its capital structure. The Company's total liabilities in 2023 were recorded at IDR66.20 billion, accounting for 17.35% of the capital structure, while equity was IDR315.30 billion, representing 82.65% of the capital structure. This composition reflects a change compared to 2022. The comparison of the Company's capital structure in the last 2 (two) years is as follows:

Material Commitment for Capital Expenditure

Throughout 2023, the Company did not have any material commitments for capital expenditure.

Realization of Capital Expenditure

The Company believes that investment is important in developing its operations. Capital Expenditure is the cost incurred by the Company to purchase a number of assets, as well as repair existing assets so that they can provide added value in the future. Realization of the Company's capital expenditure until December 31, 2023, can be seen as follows:

Uraian Description	Tujuan Investasi Objective of the Investment	Nilai (Rp juta) Value IDR million
Aplikasi OCC-AMS (Activity Monitoring System) OCC-AMS (Activity Monitoring System) Application	Digitalisasi proses bisnis operasional perkeretaapian Digitalization of railway operational business processes	264.883.080
Nursery Room dan Pantry Gedung MCC Lt.6 Nursery Room and Pantry on the 6th Floor of MCC Building	Merevitalisasi area kerja dan fasilitas pendukung Revitalize work areas and supporting facilities	66.476.246
Signage (Wayfinding) stasiun BU Signage (Wayfinding) of BU Station	Meningkatkan kenyamanan dan keamanan penumpang Improve passenger comfort and safety	31.138.234
Fit-out interior Ruang Lobby dan Ruang Kepala Divisi Fit-out interior of Lobby and Head of Division's Room	Merevitalisasi area kerja dan fasilitas pendukung Revitalize work areas and supporting facilities	844.588.250
Fit-out Ruang Kerja Kantor Fit-out of office workspace	Merevitalisasi area kerja dan fasilitas pendukung Revitalize work areas and supporting facilities	1.279.000.000
Perbaikan Lantai Depo PT LRTJ Repair of PT LRTJ Depot Floors	Merevitalisasi area kerja dan fasilitas pendukung Revitalize work areas and supporting facilities	1.379.481.360
Sistem Verifikasi Subsidi Subsidy Verification System	Digitalisasi proses bisnis operasional perkeretaapian Digitalization of railway operational business processes	497.002.500
Integrasi Sistem dan Aplikasi PT LRT Jakarta Integration of Systems and Applications for of PT LRT Jakarta	Digitalisasi proses bisnis operasional perkeretaapian Digitalization of railway operational business processes	551.947.500
Jumlah Total		4.914.517.170

Per 31 Desember 2023, Perusahaan telah merealisasikan investasi barang modal sebesar Rp 4,91 miliar mengalami penurunan Rp784 juta atau 13,79% dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp5,7 miliar. Hal ini lebih disebabkan oleh perusahaan lebih selektif dalam melakukan aktivitas belanja modal (CAPEX).

As of December 31, 2023, the Company had realized capital expenditure of IDR4.91 billion, a decrease of IDR784 million or 13.79% compared to 2022, which was IDR5.7 billion. This was primarily due to the Company being more selective in conducting capital expenditure activities (CAPEX).

Uraian Description	2023 (Rp) (IDR)	2022 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Nominal (Rp) (IDR)	Persentase Percentage (%)
Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Expenditure	4.914.517.170	5.698.768.460	(784.251.290)	(13,79%)

PENCAPAIAN TARGET DENGAN REALISASI, DAN TARGET/ PROYEKSI KE DEPAM

Pencapaian Target dengan Realisasi dan Proyeksi

Perusahaan melalui Manajemen melakukan analisis secara berkala dan menetapkan sejumlah target dan proyeksi yang hendak dicapai. Hal itu tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Adapun perbandingan pencapaian sejumlah target dengan realisasi serta proyeksi tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

ACHIEVEMENT OF TARGETS AGAINST REALIZATION, AND FUTURE TARGETS/PROJECTIONS

Target Achievement against Realization and Projection

In carrying out its business activities, the Company, through the Management, conducts periodic analysis and sets a number of targets and projections to be achieved which are contained in the Company's Work Plan and Budget. The comparison of the achievement of a number of targets against the realization and projections for 2024 can be seen as follows:

Uraian Description	Realisasi 2023 (Rp juta) 2023 Realization (IDR million)	Target 2023 (Rp juta) 2023 Target (IDR million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2023 Realization against 2023 Target (%)	Proyeksi 2024 (Rp juta) 2024 Projection (IDR million)	Proyeksi 2024 terhadap Realisasi 2023 2024 Projection against 2023 Realization (%)	Proyeksi 2024 terhadap Target 2023 2024 Projection against 2023 Target (%)
PENDAPATAN REVENUE						
Pendapatan Operasi Operating Income						
Farebox dan Non-Farebox Farebox and Non-Farebox	13.230	16.040	82,48%	20.257	153,11%	82,48%

Uraian Description	Realisasi 2023 (Rp juta) 2023 Realization (IDR million)	Target 2023 (Rp juta) 2023 Target (IDR million)	Pencapaian Realisasi terhadap Target 2023 Realization against 2023 Target (%)	Proyeksi 2024 (Rp juta) 2024 Projection (IDR million)	Proyeksi 2024 terhadap Realisasi 2023 2024 Projection against 2023 Realization (%)	Proyeksi 2024 terhadap Target 2023 2024 Projection against 2023 Target (%)
Subsidi Sarana Facility Subsidies	136.156	100.761	135,13%	122.974	90,32%	122,05%
Subsidi Prasarana Infrastructure Subsidies	122.220	91.605	133,42%	122.425	111,40%	133,64%
Jumlah Pendapatan Total Revenue	271.606	208.406	130,33%	265.656	97,81%	127,47%
Beban Pokok Operasi Cost of Operations						
Beban Operasi & Perawatan Sarana Perkeretaapian Operating & Maintenance Expenses for Railway Facilities	(98.406)	(80.487)	258,93%	(90.325)	91,79%	122,23%
Beban Operasi & Perawatan Prasarana dan Fasilitas Operasi Operating & Maintenance Expenses for Operational Facilities and Infrastructure	(63.728)	(55.869)	114,07%	(81.377)	127,69%	145,66%
Beban Non Farebox Non-Farebox Load	(8.030)	(8.740)	91,88%	(9.925)	123,60%	113,56%
Jumlah Beban Pokok Operasi Total Operations Expenses	(170.164)	(145.096)	117,28%	(181.627)	106,74%	125,18%
Laba Kotor Gross Profit	101.442	63.310	160,23%	84.029	82,83%	132,73%
Beban Penjualan (Iklan, Pameran, Kegiatan Promosi, dll.) Sales Expenses (Advertising, Exhibition, Promotional Activities, etc.)	(536)	(1.947)	27,53%	(1.694)	316,04%	87,00%
Beban Pegawai Non Awak Sarana Perkeretaapian Non-Crew Employee Expenses for Railway Facilities	(49.949)	(25.227)	197,10%	(46.501)	93,10%	184,33%
Beban Penyusutan Aset Tetap Fixed Asset Depreciation Expense	(4.797)	(5.443)	88,13%	(5.018)	104,61%	92,19%
Beban Jasa Profesional Professional Services Expense	(2.768)	(2.558)	108,21%	(2.437)	88,04%	95,27%
Beban Umum General Expenses	(27.978)	(16.237)	172,31%	(17.939)	64,12%	110,48%
Jumlah Beban Operasional Total Operating Expenses	(86.028)	(51.412)	167,33%	(73.590)	85,54%	143,14%
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) from Operations	15.414	11.898	129,55%	10.439	67,72%	87,74%
Pendapatan Lainnya Other Income	6.825	1.075	6,35%	2.460	36,04%	228,84%
Beban Lainnya Other Expenses	(2.588)	(456)	567,54%	(511)	19,74%	112,06%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income Tax	19.650	12.517	156,10%	12.388	63,04%	98,97%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Benefit (Expenses) of Income Tax	(2.336)	(2.336)	100%	(10.038)	429,71%	429,71%
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan Total Comprehensive Profit (Loss)	15.596	10.181	153,20%	2.350	15,07%	23,08%
Jumlah Aset Total Assets	381.489	329.584	115,75%	331.095	86,79%	100,46%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	66.194	20.983	315,46%	26.829	40,53%	127,86%
Ekuitas Equity	315.295	308.601	102,17%	304.266	96,50%	98,59%

KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen

Kebijakan mengenai pembagian dividen Perusahaan senantiasa mengacu pada Anggaran Dasar, LRTJ memiliki kebijakan mengenai pembagian dividen yang besarnya ditetapkan setiap tahun berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perusahaan berupaya untuk memenuhi hak para pemegang saham tanpa mengesampingkan kondisi Perusahaan serta mempertimbangkan tingkat pertumbuhan usaha ke depan dalam keputusan pembagian dividen.

PROGRAM KEPAMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Sampai dengan akhir tahun 2023, saham LRT Jakarta dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar 99,55% dan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo sebesar 0,45% dan bukan merupakan perusahaan publik. Dengan demikian, Perusahaan tidak memiliki kebijakan mengenai Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (ESOP) dan/atau Manajemen (MSOP), sehingga tidak terdapat informasi terkait jumlah saham ESOP/ MSOP, realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/ atau manajemen yang berhak, serta harga *exercise*.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Hingga 31 Desember 2023, Perusahaan tidak pernah melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atau *Initial Public Offering* (IPO) di Bursa Efek manapun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai total perolehan dana, rencana penggunaan dana, saldo dana, dan tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum.

INFORMASI MATERIAL UNTUK INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan usaha, akuisisi, dan restrukturisasi utang/ modal yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan maupun kinerja operasional Perusahaan.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Kebijakan tentang Pihak Berelasi

Perusahaan memiliki transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang dipakai adalah sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan Pihak Berelasi" suatu pihak dianggap berelasi dengan Perusahaan jika:

DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION

Dividend Policy

The Company's dividend distribution policy consistently adheres to its Articles of Association. LRTJ has a policy regarding dividend distribution, the amount of which is determined annually based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS). The Company strives to fulfill the rights of shareholders without disregarding the Company's conditions and considering the future business growth in dividend distribution decisions.

EMPLOYEE AND/OR MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAM (ESOP/MSOP)

As of the end of 2023, LRT Jakarta shares are owned by PT Jakarta Propertindo (Perseroda) by 99.55% and PT Jakarta Infrastruktur Propertindo by 0.45%, and it is not a public company. Therefore, the Company does not have a policy regarding Employee Share Ownership Program (ESOP) and/or Management Share Ownership Program (MSOP), so there is no information related to the number of ESOP/ MSOP shares, their realization, term, requirements for eligible employees and/or management, as well as the exercise price.

REALIZATION OF USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

As of December 31, 2023, the Company has never made an Initial Public Offering (IPO) on any Stock Exchange. Therefore, there is no information regarding the total acquisition of funds, the planned use of funds, the balance of funds, and the date of approval of the GMS for changes to the use of proceeds from a public offering.

MATERIAL INFORMATION FOR INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

Until the end of 2023, the Company has no material information regarding investment, expansion, divestment, merger, acquisition, and debt/capital restructuring that affect the Company's financial performance or operational performance.

INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND/ OR TRANSAKSI WITH AFFILIATED PARTIES

Policy on Related Parties

The Company has transactions with related parties. The definition of a related party used is in accordance with PSAK No. 7 (Revised 2015) "Disclosure of Related Parties" a party is considered related to the Company if:

1. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Dalam kegiatan usaha normalnya, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" termasuk entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah Indonesia selaku entitas pemilik akhir melalui Menteri Keuangan.

Nama Pihak Bertransaksi dan Sifat Hubungan Afiliasi

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Affiliate Relations	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	Entitas Induk Parent Entity	Piutang Usaha, Utang Usaha Account Receivables, Account Payables
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	Pemegang Saham Shareholders	Piutang Usaha Account Receivables

Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi Perusahaan dengan Pihak Berelasi dilakukan sejalan dengan kebutuhan pengembangan operasional dan bisnis Perusahaan, serta prinsip saling membutuhkan antara Perusahaan dengan Pihak Berelasi.

1. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person
 - a. Has control or joint control over the reporting entity;
 - b. has significant influence over the reporting entity; or
 - c. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or a parent of the reporting entity.
2. An entity is related to a reporting entity if any of the following condition applies:
 - a. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - c. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - e. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself is such a plan, the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
 - f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
 - g. The person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

In its normal business activities, the Company conducts transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2015), "Disclosure of Related Parties", which includes entities that are controlled, jointly controlled or significantly influenced by the Government of Indonesia as the ultimate owner entity through the Minister of Finance.

Name of Party in Transaction with the Company and the Nature of Affiliate Relations

Pihak yang Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Affiliate Relations	Sifat Transaksi Nature of Transaction
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	Entitas Induk Parent Entity	Piutang Usaha, Utang Usaha Account Receivables, Account Payables
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	Pemegang Saham Shareholders	Piutang Usaha Account Receivables

Reasons for the Transaction

The Company's transactions with Related Parties are in line with the Company's operational and business development needs, as well as the principle of mutual need between the Company and Related Parties.

Dalam kegiatan normal usaha, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan, termasuk di dalamnya adalah transaksi pembiayaan bersama, transaksi pengalihan sebagian porsi piutang pembiayaan konsumen ("transaksi CAP"), transaksi penempatan deposito, utang dan piutang asuransi dan pinjaman bank.

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan dengan Pihak-pihak Berelasi/Berafiliasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan persyaratan, tingkat harga, dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Tidak ada perbedaan kebijakan harga dan syarat transaksi antara pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga.

Realisasi Saldo dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Realisasi saldo dan transaksi Pihak-pihak Berelasi terhadap kinerja keuangan Perusahaan dapat disampaikan sebagai berikut:

Uraian Description	2023 (Rp) (IDR)	2022 (Rp) (IDR)
Piutang Usaha Account Receivables		
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	6.190.881	6.190.881
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	2.184.274.072	2.522.422.222
PT Jakarta Konsultindo	427.500.000	-
Jumlah Total	2.617.964.953	2.528.613.103
Persentase terhadap Total Aset Percentage to Total Assets	0,69%	0,74%
Utang Usaha Account Payables		
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	11.089.608.167	2.217.932.978
Jumlah Total	11.089.608.167	2.217.932.978
Persentase terhadap Total Liabilitas Percentage to Total Liabilities	16,75%	5,59%

Pernyataan Direksi terkait Prinsip Transaksi yang Wajar (Arm's Length Principle)

LRT Jakarta memastikan seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi telah melalui prosedur yang memadai, yakni Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

In the normal course of business, the Company enters into transactions with related parties due to ownership and/or management relationships, including joint financing transactions, transactions for the transfer of a portion of consumer financing receivables ("CAP transactions"), transactions for placement of deposits, insurance payables and receivables and bank loans.

Explanation Regarding the Fairness of the Transaction

The fairness of all transactions conducted by the Company with Related/Affiliated Parties has been disclosed in the financial statements and is in accordance with PSAK 7 standards regarding "Disclosure of Related Parties". All transactions with related parties are carried out under terms, price levels and conditions as is done with third parties and has been disclosed in the financial statements. There are no differences in pricing policies and transaction terms between related parties and third parties.

Realization of Balances and Transactions of Related Parties

Realization of balances and transactions of Related Parties to the Company's financial performance can be presented as follows.

Statement from the Board of Directors regarding the Arm's Length Principle Transactions

LRT Jakarta ensures that all transactions conducted with related parties have gone through sufficient procedures, namely Regulation of Financial Services Authority No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions as well as PSAK No. 7 regarding Disclosure of Related Parties, while still adhering to the principles of prudence in accordance with generally accepted business practices.

Direksi memastikan bahwa seluruh kegiatan transaksi afiliasi dilakukan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms' length principle*).

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Memenuhi Prinsip Transaksi yang Wajar (*Arm's Length Principle*)

Dewan Komisaris dan Komite Audit telah melaksanakan perannya dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms' length principle*).

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi keuangan yang mengandung kejadian yang bersifat luar biasa dan jarang terjadi.

The Board of Directors ensures that all affiliate transactions are conducted in accordance with generally accepted business practices and comply with the arms' length principle.

Role of the Board of Commissioners and Audit Committee in Fulfilling the Arm's Length Principle Transactions

The Board of Commissioners and Audit Committee have fulfilled their roles in performing adequate procedures to ensure that affiliate transactions are conducted in accordance with generally accepted business practices, including meeting the arms' length principle.

FINANCIAL INFORMATION CONTAINING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Throughout the year 2023, the Company did not have financial information containing extraordinary and rare events. Therefore, there is no financial information containing extraordinary and rare events.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI CHANGES IN ACCOUNTING POLICY

Pada tahun 2023, Perusahaan telah menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) yang berlaku efektif pada 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023.

Adapun perubahan-perubahan kebijakan akuntansi, penjelasan, serta dampaknya terhadap Perusahaan adalah sebagai berikut:

In 2023, the Company has formulated and established accounting policies in accordance with the Financial Accounting Standards (SAK) issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) which became effective from January 1, 2023, to December 31, 2023.

The changes in accounting policies, explanations, and their impact on the Company are as follows:

Perubahan Kebijakan Akuntansi Changes in Accounting Policy	Penjelasan/Alasan Perubahan Explanation/Reason for Changes	Dampak terhadap Perusahaan Impact on the Company
Kebijakan Metode Pencatatan Persediaan Inventory Recording Method Policy	Penyesuaian sebagaimana PSAK 14 Tentang Persediaan Adjustment in accordance with PSAK 14 on Inventory	Munculnya nilai Persediaan pada LK Tahun 2023 dan seterusnya Emergence of Inventory Value in the Financial Statements for the Year 2023 and onwards

ASPEK PERPAJAKAN DAN KONTRIBUSI TERHADAP NEGARA

ASPECTS OF TAXATION AND CONTRIBUTION TO THE STATE

Sebagai bentuk kontribusi Perusahaan terhadap negara, Perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan. Sebagai wajib pajak, Perusahaan selalu patuh dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Perusahaan memenuhi kewajibannya dalam hal pajak dengan telah menyampaikan dokumen pelaporan pajak, seperti SPT Masa PPh dan PPN, SPT Tahunan, PPh Badan dan dokumen kewajiban perpajakan lainnya kepada otoritas perpajakan yang berwenang dalam rangka memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Di tahun 2023, Perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam hal pajak sebesar Rp10.693.340.125, meningkat sebesar Rp4.599.043.458 atau 75,5% dibanding tahun 2022 yang sebesar Rp6.099.149.268. Adapun kontribusi kepada negara berupa perpajakan yang direalisasikan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

As a form of contribution to the country, the Company fulfills its tax obligations. As a taxpayer, the Company always complies with fulfilling its Corporate Income Tax (PPh) obligations. The Company fulfills its tax obligations by submitting tax reporting documents, such as Periodic Income Tax Returns (SPT Masa PPh) and Value Added Tax (VAT), Annual Income Tax Returns, Corporate Income Tax (CIT), and other tax liability documents to the competent tax authorities in order to comply with applicable tax regulations.

In 2023, the Company has fulfilled its tax obligations amounting to IDR10,693,340,125, an increase of IDR4,599,043,458 or 75.5% compared to 2022, which amounted to IDR6,099,149,268. The contribution to the state in the form of taxes realized by the Company is as follows:

Jenis Pajak Type of Tax	2023 (Rp) (IDR)	2022 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih (Rp) Difference (IDR)	Percentase (%)
PPh 4 ayat (2) Income Tax 4, paragraph (2)	406.368.858	271.846.527	134.522.331	49,5%
PPh 21 Income Tax 21	8.877.066.488	4.799.549.164	4.077.517.324	85,0%
PPh 22 Income Tax 22	404.224.375	269.416.000	134.808.375	50,0%
PPh 23 Income Tax 23	1.005.680.404	753.484.976	252.195.428	33,5%
Jumlah Total	10.693.340.125	6.094.296.667	4.599.043.458	75,5%

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN DI TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, LRT Jakarta masih beroperasi dalam kondisi pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan strategi kebijakan mensukseskan Program Prioritas dalam APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, yakni pengendalian banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi. Mulai ditetapkannya status endemi COVID-19 pada Juni 2023 juga menyebabkan masyarakat sudah mulai beraktivitas secara normal dan turut berpengaruh pada peningkatan jumlah penumpang transportasi umum, termasuk salah satunya jumlah penumpang LRT Jakarta.

Pada Oktober 2023, *Groundbreaking* Penggerjaan Proyek LRT Jakarta Fase 1B Velodrome - Manggarai sudah dimulai dan diproyeksikan proyek ini akan diselesaikan pada tahun 2026. Pelaksanaan proyek ini dilakukan oleh PT Jakpro sebagai penerima penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PT LRT Jakarta sebagai anak usaha dan operator yang ditugaskan oleh PT Jakpro untuk mengoperasikan dan merawat sarana prasarana LRT Jakarta perlu memastikan bahwa proyek pembangunan trase lanjutan ini bisa sesuai dengan kondisi operasional yang sudah berjalan serta mempersiapkan rencana aksi atas kegiatan operasi dan perawatan yang akan dilakukan ketika proyek Fase 1B ini telah diselesaikan. Diharapkan perpanjangan jalur LRT Jakarta ini dapat berdampak positif terhadap peningkatan jumlah penumpang serta mengurangi tingkat kemacetan di Jakarta.

Assessment Manajemen atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Tahun 2023 menjadi tahun yang penting bagi Perusahaan dalam melihat kelangsungan usaha. Beberapa hal berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

MATTERS WITH THE POTENTIAL TO SIGNIFICANTLY INFLUENCE THE COMPANY'S BUSINESS CONTINUITY IN 2023

Throughout the year 2023, LRT Jakarta continued to operate amidst the economic recovery from the COVID-19 pandemic that affected Indonesia, particularly in the Jakarta area. The DKI Jakarta Provincial Government also implemented policy strategies to successfully execute Priority Programs within the DKI Jakarta Provincial Budget for the 2023 Fiscal Year, focusing on flood control, traffic congestion management, and anticipation of the economic growth decline. The declaration of endemic status for COVID-19 in June 2023 also led to the normalization of activities among the public, contributing to the increased number of passengers using public transportation, including LRT Jakarta.

In October 2023, the Groundbreaking Ceremony for the LRT Jakarta Phase 1B Velodrome - Manggarai Project has commenced, with the project projected to be completed by the year 2026. The execution of this project is conducted by PT Jakpro as assigned by the Jakarta Provincial Government. PT LRT Jakarta, as a subsidiary and operator assigned by PT Jakpro to operate and maintain LRT Jakarta's facilities, needs to ensure that the construction of this extended route aligns with the existing operational conditions and prepare action plans for operational and maintenance activities when Phase 1B of the project is completed. It is hoped that the extension of the LRT Jakarta route will have a positive impact on increasing the number of passengers and reducing traffic congestion in Jakarta.

Management's Assessment of Matters Potentially Significantly Impacting the Company's Business Continuity

The year 2023 was crucial for the Company in terms of assessing business sustainability. Several factors had the potential to significantly impact the Company's operations, including:

1. Kondisi Perekonomian yang masih belum stabil
Walaupun kondisi pandemi COVID-19 sudah beralih menjadi endemi di Juni 2023 namun secara global perekonomian dunia masih mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kondisi yang sama juga terjadi pada perekonomian Provinsi DKI Jakarta yang disebabkan oleh konsumsi Pemerintah yang terkontraksi, perlambatan ekspor dan investasi serta perlambatan pertumbuhan pendapatan daerah. Kondisi perlambatan perekonomian tentunya berdampak signifikan pada bisnis Perusahaan. Perusahaan akan dihadapkan pada tantangan dalam menjaga operasional dan pelayanan kepada pelanggan sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Pendapatan yang masih ditopang oleh subsidi
Meskipun perusahaan telah berupaya mengurangi ketergantungan pada subsidi, pada tahun 2023, masih ada sejumlah pendapatan yang masih ditopang oleh subsidi. Ketergantungan pada subsidi tersebut menjadi salah satu faktor risiko terhadap kelangsungan usaha perusahaan dimasa depan. Oleh karena itu, Perusahaan perlu melakukan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi agar dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas.
3. Pendapatan *Non-Farebox*
Pendapatan *Non-Farebox* menjadi faktor penting dalam meningkatkan pendapatan perusahaan. Beberapa sumber pendapatan *non-farebox* seperti penyewaan ruang iklan, penjualan jasa, dan layanan tambahan lainnya, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Perusahaan perlu melakukan strategi yang tepat untuk meningkatkan sumber pendapatan *non-farebox* agar dapat mengurangi ketergantungan pada pendapatan yang masih ditopang subsidi.
4. Kontrak Perusahaan sebagai operator sepanjang masa konsesi
Perusahaan menjadi operator sepanjang masa konsesi memiliki keuntungan dalam hal stabilitas pendapatan. Di tahun 2023, pembangunan perpanjang jalur Fase 1B Velodrome – Manggarai sudah dimulai sehingga terdapat potensi peningkatan pendapatan Perusahaan di tiga tahun mendatang. Namun, Perusahaan harus tetap berupaya mempertahankan kualitas pelayanan dan kinerja operasional agar tidak mengalami penurunan pendapatan pada masa konsesi berikutnya.
5. Indikator keuangan Perusahaan berdasarkan rasio keuangan masih bagus
Indikator keuangan Perusahaan seperti rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas masih tergolong baik. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan Perusahaan masih sehat dan dapat mengatasi sejumlah risiko di masa depan. Namun, Perusahaan perlu tetap berhati-hati dan melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan agar dapat meminimalkan risiko yang dihadapi.

Perusahaan perlu memperhatikan dengan serius hal-hal tersebut demi menciptakan keberlangsungan usaha di masa mendatang.

1. Unstable Economic Conditions
Despite the transition of the COVID-19 pandemic to an endemic phase in June 2023, global economic growth continued to slow compared to previous years. This trend also affected the economy of DKI Jakarta Province, resulting from government consumption contraction, export and investment slowdowns, and regional revenue growth deceleration. The economic slowdown significantly impacts the Company's business, posing challenges in maintaining operations and customer service standards.
2. Subsidy-Dependent Revenue
Despite efforts to reduce dependency on subsidies, a portion of the revenue in 2023 still relied on subsidies. Dependency on subsidies poses a risk to the Company's future sustainability. Hence, efforts are needed to reduce reliance on subsidies to increase revenue and profitability.
3. Non-Farebox Revenue
Non-farebox revenue is essential for increasing the Company's revenue. Various sources such as advertising space rental, service sales, and other additional services contribute significantly to the Company's revenue. Strategic initiatives are required to enhance non-farebox revenue sources to reduce dependence on subsidy-supported revenue.
4. The Company's Contracts as Operator Throughout the Concession Period
The Company's contracts as operator throughout the concession period provide revenue stability. The commencement of the Phase 1B Velodrome – Manggarai extension project in 2023 suggested potential revenue growth for the Company in the next three years. However, maintaining service quality and operational performance is essential to prevent revenue decline in subsequent concession periods.
5. The Company's financial indicators based on financial ratios remain favorable
Financial indicators such as profitability, liquidity, and solvency remain favorable. These indicators demonstrate the Company's financial health and its ability to mitigate future risks. However, continuous efforts are necessary to improve financial performance and minimize potential risks.

The Company needs to take these matters seriously to ensure business sustainability in the future.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan **Assessment** atas Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Dalam melakukan *assessment* atas hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan di tahun 2023, manajemen menggunakan beberapa asumsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Beberapa asumsi yang mungkin digunakan adalah:

1. Asumsi Terkait Pendapatan Subsidi
Manajemen akan fokus pada upaya untuk mengoptimalkan realisasi program kerja sesuai dengan Kontrak Subsidi. Dengan terbatasnya DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka manajemen berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi melalui peningkatan pendapatan *non-farebox*.
2. Asumsi Terkait Kinerja Keuangan Perusahaan
Manajemen fokus pada kesehatan kinerja keuangan Perusahaan di tahun 2023, namun perlu tetap diwaspadai terkait risiko yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan di masa depan, terutama dengan adanya perubahan regulasi. Oleh karena itu, manajemen melakukan strategi untuk menjaga kinerja keuangan perusahaan tetap optimal dan mengurangi risiko yang dihadapi.
3. Asumsi Terkait Kontrak Sebagai Operator Sepanjang Masa
Adanya kontrak sebagai operator sepanjang masa konsesi akan memberikan stabilitas pendapatan bagi Perusahaan. Namun, manajemen tetap berupaya mempertahankan kualitas pelayanan dan kinerja operasional sesuai standar yang berlaku sehingga bisa menjaga kinerja *service & operation excellence*.
4. Asumsi Terkait Peningkatan Permintaan
Manajemen mengasumsikan bahwa peningkatan permintaan akan terjadi di tahun 2023 dikarenakan mulai terjadi peralihan status pandemi menjadi endemi COVID-19. Oleh karena itu, manajemen melakukan strategi peningkatan *ridership*, seperti integrasi fisik dan pembayaran moda transportasi, program edukasi dan *event* di kawasan stasiun dan depo, serta memperkuat *branding* Perusahaan.
5. Asumsi Terkait Perubahan Kebijakan Pemerintah
Manajemen mengasumsikan bahwa adanya perubahan kebijakan pemerintah terkait transportasi dan mobilitas dapat berdampak pada bisnis perusahaan di tahun 2023. Oleh karena itu, manajemen melakukan asesmen serta mitigasi atas perubahan kebijakan pemerintah dan melakukan penyesuaian strategi apabila diperlukan.

Dengan menggunakan asumsi-asumsi tersebut, manajemen dapat melakukan *assessment* dengan lebih akurat dan tepat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Perusahaan di tahun 2023. Hal ini diharapkan membantu perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya dan meningkatkan performa bisnis di masa depan.

Assumptions Used by the Management in Assessing Matters Potentially Significantly Impacting the Company's Business Continuity

In assessing matters that have the potential to significantly affect the continuity of the Company's business in 2023, management uses several assumptions as a basis for making decisions. Some assumptions that might be used are:

1. Assumptions Related to Revenue from Subsidies
Management focused on optimizing program realization according to Subsidy Contracts. With limited Budget Implementation Documents (DPA) of DKI Jakarta Provincial Government, efforts were made to reduce dependency on subsidies by increasing non-farebox revenue.
2. Assumptions Related to the Company's Financial Performance
Management focused on the Company's financial health in 2023 while remaining vigilant about risks affecting future financial performance, especially regulatory changes. Strategies were implemented to maintain optimal financial performance and mitigate risks.
3. Assumptions Regarding Contracts as Operators Throughout the Concession Period
Contracts as operator throughout the concession period provided revenue stability, but efforts were made to maintain service quality and operational standards to maintain service and operational excellence.
4. Assumptions Regarding Increased Demand
Management assumed an increase in demand in 2023 due to the transition from pandemic to endemic status. Hence, strategies were implemented to increase ridership and strengthen the Company's branding, such as physical integration and transportation payment, educational programs and events in station and depot areas, and strengthening the Company's branding.
5. Assumptions Regarding Changes in Government Policies
Management assumed that changes in government policies regarding transportation and mobility could impact the Company's business in 2023. Hence, assessments and mitigation measures were undertaken, and strategies were adjusted as necessary.

Based on these assumptions, management conducted more accurate assessments to address challenges faced by the Company in 2023, aiming to ensure its sustainability and improve business performance in the future.

PROSPEK USAHA

BUSINESS PROSPECT

Seperti dikutip dari Laporan perekonomian Provinsi yang dirilis oleh Bank Indonesia, menyatakan bahwa pada 2023 pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diprakirakan masih tumbuh tinggi pada kisaran 4,8-5,2% (yoY) sejalan dengan mobilitas masyarakat yang terus meningkat, optimisme masyarakat yang masih baik, semakin tingginya aktivitas pariwisata, MICE dan event baik skala nasional maupun internasional, serta berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur strategis baik Pemerintah maupun swasta. Dari sisi pengeluaran, motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pada 2023 masih bersumber dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada 2023 akan ditopang oleh pertumbuhan beberapa LU utama yaitu perdagangan besar dan eceran dan reparasi kendaraan bermotor, konstruksi, serta informasi dan komunikasi.

Pada 2024, pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diprakirakan meningkat pada kisaran 4,8-5,6% (yoY) sejalan dengan meningkatnya permintaan domestik dan masih baiknya permintaan eksternal. Meningkatnya perekonomian domestik didorong oleh membaiknya konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi serta masih baiknya permintaan eksternal sejalan dengan perbaikan ekonomi negara-negara ASEAN dan Timur Tengah. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU) perekonomian DKI Jakarta pada 2024 akan ditopang oleh meningkatnya 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu perdagangan, konstruksi, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Namun demikian, beberapa risiko yang perlu dicermati yang dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu berlanjutnya tensi geopolitik, tertahannya pemulihan ekonomi Tiongkok, dan keberlanjutan stance moneter ketat AS.

Inflasi DKI Jakarta pada 2023 diprakirakan akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan terkendali dalam rentang sasaran $3\pm1\%$ (yoY). Pada 2024, inflasi Jakarta juga diperkirakan akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi yang semakin rendah sebesar $2,5\pm1\%$ (yoY). Perkiraan tersebut terutama didukung oleh kondisi cuaca yang lebih kondusif pasca berlangsungnya El-Nino pada 2023 yang juga didukung oleh penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Berdasarkan uraian di atas, LRT Jakarta telah menyiapkan langkah strategis dalam menjawab tantangan di tahun 2024. PT LRT Jakarta terus berfokus pada peningkatan pendapatan baik dari perolehan *ridership/farebox* dan bisnis *non-farebox* dengan menerapkan strategi optimalisasi program kerja perusahaan, program promosi, dan peningkatan *awareness*, serta peningkatan fasilitas

As quoted from the Provincial Economic Report released by Bank Indonesia, it is stated that in 2023, the economic growth of DKI Jakarta is forecasted to remain high in the range of 4.8-5.2% (yoY) in line with the continued increase in community mobility, good public optimism, the increasing tourism activities, MICE and events both nationally and internationally, and the ongoing various strategic infrastructure projects by both the Government and private sectors. From the expenditure side, the main driving force of economic growth in DKI Jakarta in 2023 still comes from household consumption and investment. Meanwhile, from the business sector perspective, the economy of DKI Jakarta in 2023 will be supported by the growth of several main sectors, namely wholesale and retail trade, motor vehicle repair, construction, as well as information and communication.

In 2024, the economic growth of DKI Jakarta is forecasted to increase in the range of 4.8-5.6% (yoY) in line with the increasing domestic demand and the still good external demand. The increase in domestic economy is driven by the improvement in household consumption, government consumption, and investment as well as the still good external demand in line with the improvement of economies in ASEAN and Middle Eastern countries. Meanwhile, from the business sector perspective, the economy of DKI Jakarta in 2024 will be supported by the increase of 5 (five) main economic sectors, namely trade, construction, manufacturing industry, information and communication, as well as financial services. However, some risks need to be noted that may hinder further improvement, mainly including the continuation of geopolitical tensions, the delayed recovery of the Chinese economy, and the sustainability of the tight monetary stance of the United States.

Inflation in DKI Jakarta in 2023 is forecasted to decrease compared to the previous year and is well-controlled within the target range of $3\pm1\%$ (yoY). In 2024, Jakarta's inflation is also expected to remain well-controlled, with a lower inflation target of $2.5\pm1\%$ (yoY). These forecasts are mainly supported by the more conducive weather conditions after the El-Nino phenomenon in 2023, which is also supported by the strengthening of the inflation control program through the National Movement for Controlling Food Inflation (GNPIP).

Based on the above description, LRT Jakarta has prepared strategic measures to address the challenges in 2024. PT LRT Jakarta continues to focus on increasing revenue from both *ridership/farebox* and *non-farebox* businesses by implementing optimization strategies for the Company's work programs, promotion programs, and increasing awareness, as well as improving service

layanan kepada pelanggan. Program-program bisnis *non-farebox* juga terus dikembangkan untuk dapat menghasilkan pendapatan di luar tiket serta mengurangi ketergantungan terhadap subsidi. Selain itu, PT LRT Jakarta juga berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swasta sebagai bentuk kolaborasi dengan *stakeholder* dalam menjalankan bisnisnya.

Pada tahun 2024, Perusahaan berfokus pada pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan yang diperoleh dengan melakukan rencana pelaksanaan program-program strategis yang terdiri dari:

1. *Pemenuhan Service & Operation Excellence*

Sebagai moda transportasi massal berbasis rel, LRT Jakarta diberikan mandat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat. Perusahaan akan menyediakan layanan pelanggan yang maksimal serta melakukan kegiatan operasi dan perawatan sesuai dengan rencana, untuk memastikan layanan LRT Jakarta dapat beroperasi secara optimal. Untuk merealisasikan hal tersebut, Perusahaan akan melakukan pemenuhan program kerja sesuai dengan kontrak subsidi yang telah ditetapkan dengan melakukan strategi percepatan realisasi program kerja dan mengoptimalkan proses pengadaan yang efektif dan efisien serta melakukan proses monitoring atas kontrak yang berjalan sehingga program yang direncanakan dapat berjalan sesuai jadwal. Proses ini akan dievaluasi secara berkala sehingga program kerja Perusahaan dapat berjalan dan dilakukan mitigasi atas risiko-risiko yang mungkin akan muncul di masa yang akan datang.

2. *Strategi Peningkatan Ridership*

Seiring dengan mulai meredanya pandemi COVID-19 dan mulai normalnya aktivitas masyarakat di luar rumah, Perusahaan juga akan terus melakukan program-program kerja yang mampu membuat masyarakat dapat menggunakan transportasi umum lagi, khususnya menggunakan LRT Jakarta. Beberapa inisiatif program yang akan dilakukan terdiri dari:

- a. Integrasi fisik dan pembayaran moda transportasi di Jakarta.
- b. Revitalisasi kawasan area stasiun LRT Jakarta.
- c. Pemanfaatan area Depo LRT Jakarta dalam kegiatan komunitas.
- d. Program edukasi dan aktivitas event di Stasiun maupun Depo LRT Jakarta.
- e. Penyusunan *Calender of Event* LRT Jakarta tahun 2024.
- f. Program peningkatan *brand awareness* LRT Jakarta kepada masyarakat.

facilities for customers. Non-farebox business programs are also continually being developed to generate revenue beyond ticket sales and reduce dependency on subsidies. Additionally, PT LRT Jakarta is committed to continue collaborating with the Government, SOEs/BUMDs, and the Private Sector as a form of collaboration with stakeholders in conducting its business.

In 2024, the Company focuses on its sustainable growth achieved through the implementation of strategic programs, including:

1. *Fulfillment of Service & Operation Excellence:*

As a rail-based mass transportation mode, LRT Jakarta is mandated by the DKI Jakarta Provincial Government to provide optimal service to the public. The Company will provide maximum customer service and conduct operational and maintenance activities according to plan to ensure that LRT Jakarta services can operate optimally. To achieve this, the Company will fulfill work programs according to established subsidy contracts by accelerating the realization of work programs, optimizing effective and efficient procurement processes, and monitoring ongoing contracts to ensure planned programs run on schedule. This process will be periodically evaluated to ensure the Company's work programs run smoothly and mitigate any risks that may arise in the future.

2. *Ridership Improvement Strategy:*

With the easing of the COVID-19 pandemic and the normalization of public activities, the Company will continue to implement programs that encourage the public to use public transportation again, especially LRT Jakarta. Some initiatives include:

- a. Physical integration and payment of transportation modes in Jakarta.
- b. Revitalization of LRT Jakarta station area.
- c. Utilization of LRT Jakarta Depo area for community activities.
- d. Education programs and event activities at LRT Jakarta stations and Depo.
- e. Preparation of LRT Jakarta's 2024 Event Calendar.
- f. Increasing brand awareness of LRT Jakarta among the public.

- g. Sinergi program promosi dan *event* LRT Jakarta dengan Jakpro Group maupun dengan para *stakeholder* lainnya.
3. Strategi Peningkatan Bisnis *Non-Farebox*
 Pada tahun 2024, Perusahaan akan terus mengoptimalkan kembali bisnis *non-farebox* sehingga bisa berkontribusi positif terhadap pendapatan dan laba Perusahaan. Kegiatan bisnis *non-farebox* akan difokuskan pada aspek-aspek yang cukup potensial sebagai berikut:
- a. Periklanan (*Advertising*)
 - b. Jasa teknis dan konsultansi
 - c. Retail dan sewa menyewa
 - d. *Event & activation*
 - e. Telekomunikasi
- g. Synergy of promotion programs and events of LRT Jakarta with Jakpro Group and other stakeholders.
3. Non-Farebox Business Improvement Strategy:
 In 2024, the Company will continue to optimize non-farebox businesses to positively contribute to the Company's revenue and profit. Non-farebox business activities will focus on the following potential aspects:
- a. Advertising
 - b. Technical and consultancy services
 - c. Retail and leasing
 - d. Events & activations
 - e. Telecommunications

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

— MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT TO THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE

Hingga akhir Desember 2023 sampai tanggal laporan akuntan 27 Juni 2024, tidak terdapat peristiwa atau kejadian penting yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

As of the end of December 2023 until the accountant's report date June 27, 2024, there have been no significant events or incidents that have had a material impact on the Company's financial statements.



Fungsi Penunjang Bisnis

Business Support Function



Perusahaan berkomitmen untuk mengikuti perkembangan TI dan menerapkannya untuk mendukung produktivitas kerja yang optimal serta memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada pemangku kepentingan.

The Company is committed to keeping up with IT developments and implementing them to support optimal work productivity and provide the best quality service to stakeholders.





TATA KELOLA SUMBER DAYA MANUSIA

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Sumber Daya Manusia (SDM) atau *Human Capital* (HC) sebagai salah satu *stakeholders* pemegang kunci penting dalam menggapai kesuksesan Perusahaan secara berkelanjutan. Untuk itu, Perusahaan terus melakukan pengembangan bisnisnya selalu didukung dengan SDM yang andal, unggul, dan memiliki kapabilitas tinggi. LRT Jakarta memandang SDM sebagai mitra strategis bagi Perusahaan untuk dapat meraih kesuksesan dalam setiap lini bisnis yang dijalankan, serta target bisnis yang telah dicanangkan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Selain itu, peran Manajemen SDM juga sangat penting karena mempunyai tanggung jawab untuk membentuk karyawan yang andal dan berkompeten agar mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya, sehingga tercipta SDM yang unggul, loyal dan berkompeten di bidangnya. Dengan kemampuan inilah Perusahaan dapat melaju dengan baik dan mampu menghadapi berbagai tantangan di era yang serba kompetitif. Perusahaan menyadari, keberadaan SDM yang tangguh dan unggul memegang peranan yang sangat penting guna mewujudkan visi dan misi Perusahaan ke depannya.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

SDM yang tangguh dan unggul berperan penting untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perusahaan. Untuk itu, Manajemen SDM memiliki tanggung jawab untuk membentuk pegawai yang andal dan berkompeten sehingga dapat melaju dengan baik dan mampu menghadapi berbagai tantangan di era yang serba kompetitif.

Perusahaan juga telah menetapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka mendukung strategi pengelolaan SDM. Kebijakan tersebut mengatur berbagai aspek terkait manajemen SDM di antaranya mengenai strategi pengelolaan SDM, evaluasi jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pengembangan dan pelatihan karyawan, kompensasi, pengelolaan talent, sistem manajemen kinerja karyawan, serta aturan mengenai pemberhentian karyawan.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perusahaan memberikan pelatihan dan pengelolaan kompetensi karyawan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat dan karakter individu. Hal ini diberikan dengan harapan mampu menjadi salah satu upaya yang dilakukan Perusahaan untuk menunjang pengembangan bisnis di Perusahaan. Perusahaan memberikan kesempatan bagi setiap karyawan

Human Resources or Human Capital (HC) is one of the important key stakeholders in achieving the Company's success in a sustainable manner. Hence, in developing its business, the Company is always supported by reliable, superior and highly capable human resources. LRT Jakarta considers HR as a strategic partner for the Company to be able to achieve success in every line of business being carried out, as well as business targets that have been stated by shareholders and stakeholders.

To create superior, loyal and competent human resources in their fields, the role of HR Management is very important since it has the responsibility to establish reliable and competent employees so that they are able to perform their duties properly. With this capability, the Company can progress well and be able to face various challenges in a competitive era because, the Company realizes that the presence of strong and superior human resources performs a very important role in realizing the Company's vision and mission going forward.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT POLICY

A strong and excellent HR management performs a crucial role in supporting the achievement of the Company's vision and mission. Therefore, HR management has the responsibility to establish reliable and competent employees so that they can progress well and confront various challenges in this highly competitive era.

The Company has also established HR management policies to support HR management strategies. These policies regulate various aspects related to HR management, including HR management strategies, job evaluation, workforce planning, recruitment, employee development and training, compensation, talent management, employee performance management systems, as well as rules regarding employee termination.

Human Resources Development

Human Resource Development

The Company will provide employee competency training and management to develop individual potential, talents, interests and character. This is given with the hope of being able to become one of the efforts made by the Company to support business development in the Company. The Company provides opportunities for every employee

untuk menempati posisi senior dan strategis sesuai dengan pengalaman di bidang masing-masing.

Di tahun 2023, di kategori pelatihan karyawan, didominasi oleh pelatihan yang bersifat *softskill* dengan jumlah persentase 86% dan *hardskill* 14%.

Strategi dan Pelaksanaan Program Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan melakukan perekrutan pegawai baru sebanyak 24 orang dengan rincian sebagai berikut:

Perkembangan Rekrutmen Karyawan Tahun 2023
Progress of Employee Recruitment in 2023

Bulan Month	Jumlah (orang) Total (people)
Januari January	0
Februari February	4
Maret March	2
April April	0
Mei May	4
Juni June	0
Juli July	2
Agustus August	3
September September	0
Oktober October	4
November November	3
Desember December	2
Total Total	24

Tingkat Turnover Karyawan

Salah satu indikator keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sangat ditentukan oleh tingkat *turnover* karyawan. Selain itu, tingkat *turnover* bisa menjadi refleksi dan budaya dalam sistem kerja di lingkup PT LRT Jakarta. Oleh karena itu, Perusahaan senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh pegawai menunjukkan hasil nyata. Di tahun 2023, tingkat *turnover* pegawai tercatat sebesar 2,99% yang turun dari tahun 2022 sebesar 6,58%.

to occupy senior and strategic positions according to experience in their respective fields.

Throughout 2023, in the employee training category, softskill training was conducted with a total percentage of 86% and total percentage of hard skills was 14%.

Strategy and Implementation of the Human Resources Recruitment Program

Throughout 2023, the Company recruited 24 new employees with the following details:

Perkembangan Rekrutmen Karyawan Tahun 2023
Progress of Employee Recruitment in 2023

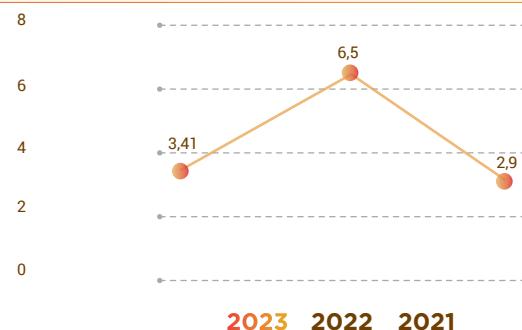
Bulan Month	Jumlah (orang) Total (people)
Januari January	0
Februari February	4
Maret March	2
April April	0
Mei May	4
Juni June	0
Juli July	2
Agustus August	3
September September	0
Oktober October	4
November November	3
Desember December	2
Total Total	24

Employee Turnover Rate

One of the indicators of the Company's success in creating a conducive work environment is highly determined by the employee turnover rate. Additionally, the turnover rate can reflect the culture within the working system at PT LRT Jakarta. Hence, the Company always strives to create a conducive work environment for all employees to show actual results. In 2023, the employee turnover rate was recorded at 2.99%, which decreased from 2022 of 6.58%.

Penyebab Cause	2023	2022	2021
Pensiun Retire	1	0	1
Meninggal dunia Death	0	0	3
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri Resignation	8	17	9
Diberhentikan Termination	1	4	4
Jumlah karyawan yang keluar Number of employees leaving the Company	10	21	34
Total karyawan di akhir tahun Total number of employees at the end of year	274	262	253
Percentase turnover Turnover percentage	2,9%	6,5%	3,41%

Grafik Tingkat Turnover Karyawan 3 Tahun Terakhir
Graphic of Employee Turnover for the Last 3 Year
2021-2023



Pengembangan Karir

LRT Jakarta memiliki tanggung jawab atas penguatan sumber daya manusia. Dalam hal ini, Perusahaan senantiasa melakukan pengembangan karier bagi karyawannya yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan kompetensi tiap masing-masing karyawan. Program pengembangan karir dilakukan melalui berbagai tahapan agar penempatan karyawan pada posisi jabatan yang tepat, yaitu posisi yang sesuai antara level kompetensi yang dimiliki individu dengan profil kompetensi pekerjaan yang diisyaratkan oleh pekerjaan.

Selain itu, Perusahaan juga melakukan penilaian kinerja karyawan, Perusahaan memiliki profil terhadap pencapaian kinerja dari setiap karyawan. Proses penilaian kinerja disertai dengan proses *Coaching and Mentoring*. Dengan adanya sistem penilaian kinerja tersebut diharapkan dapat mendorong Pegawai untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Hasil penilaian kinerja merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk penetapan *reward* dan *punishment*, penentuan *talent* kategori, *upgrading*, dan promosi jabatan.

Pengembangan Kompetensi dan Realisasi Biaya

LRT Jakarta senantiasa mengikutsertakan karyawannya ke dalam program pelatihan dan/atau pendidikan yang diselenggarakan baik secara internal maupun eksternal yang diadakan setiap tahunnya. Hal itu sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam meningkatkan kompetensi SDM tercermin dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan karyawan sebagai berikut:

Career Development

LRT Jakarta has a responsibility for strengthening its human resources. The Company always carries out career development for its employees, in accordance with their interests, talents and competencies. The career development program is carried out through various stages so that the employees can be allocated in the appropriate position, namely the position that matches the Competency level of the individual with the job competency profile required by the job.

In addition, the Company also evaluates employee performance. The Company has a profile of the performance achievements of each employee. The performance appraisal process is accompanied by a *Coaching and Mentoring* process. With the performance appraisal system, it is expected to be able to encourage employees to improve their performance in the next period. The results of performance appraisal are one of the factors used to determine rewards and punishments, determine talent categories, upgrade, and promote positions.

Competency Development and Cost Realization

Every year, the Company always enrolls its employees in the training and/or education programs that are held both internally and externally. This is a form of the Company's commitment to improving HR competencies as reflected in the following various employee education and training programs:

Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Karyawan Tahun 2023
Implementation of Employee Competency Development Year 2023

Nama Pelatihan / Pendidikan Name of Training / Education	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Date	Lokasi Location	Jumlah Peserta Number of Participants
Safety Leadership	Soft Skill	07 Februari 2023 February 7, 2023	Jakarta	38
World Class Human Resource Director School	Hard Skill	26 Januari 2023 January 26, 2023	Jakarta	2
Government Public Relations Goverment Public Relations #5	Hard Skill	17 Februari 2023 February 17, 2023	Jakarta	1
Akuntansi Untuk Aset Tetap Accounting for Fixed Assets	Hard Skill	21 Januari 2023 January 21, 2023	Jakarta	8
Good Corporate Governance (GCG) Implementation	Hard Skill	23 Februari 2023 February 23, 2023	Jakarta	2
Pengatur dan Pengedalian Perkeretaapian (PPKA)	Hard Skill	24 Januari 2023 January 24, 2023	Jakarta	3
9th Indonesia HR Director's Summit	Soft Skill	22 Februari 2023 February 22, 2023	Jakarta	1
Qualified Internal Audit (QIA) Tingkat Dasar Batch 1 Qualified Internal Audit (QIA) Basic Level Batch 1	Hard Skill	27 Februari 2023 February 27, 2023	Jakarta	1
Qualified Internal Audit (QIA) Tingkat Dasar Batch 2 Qualified Internal Audit (QIA) Basic Level Batch 2	Hard Skill	20 Maret 2023 March 20, 2023	Jakarta	1
Qualified Internal Audit (QIA) Tingkat Dasar Batch 3 Qualified Internal Audit (QIA) Basic Level Batch 3	Hard Skill	05 Juni 2023 June 5, 2023	Jakarta	1
Second Career & Preparation and Transition	Hard Skill	17 Maret 2023 March 17, 2023	Jakarta	1
8th PR Indonesia Awards (PRIA) 2023	Soft Skill	17 Maret 2023 March 17, 2023	Jakarta	2
Strategic Digital Marketing Public Relation In The New Era	Hard Skill	09 Maret 2023 March 9, 2023	Jakarta	3
SMART Key Performance Indicator (KPI)	Hard Skill	14 Maret 2023 March 14, 2023	Jakarta	39
SMART Key Performance Indicator (KPI) Awareness	Hard Skill	10 Maret 2023 March 10, 2023	Jakarta	160
Risk Management & Value Creation	Hard Skill	06 Maret 2023 March 6, 2023	Jakarta	36
Refreshment Pengatur Perjalanan Kereta Api Otomatis Refreshment of Automatic Train Travel Regulation	Hard Skill	13 Maret 2023 March 13, 2023	Jakarta	9
QMS ISO 9001:20145 Interpretation, Documented Information & Internal Audit	Hard Skill	08 Maret 2023 March 8, 2023	Jakarta	1
5S for Workplace Improvement	Hard Skill	14 April 2023 April 14, 2023	Jakarta	39
Perawatan Sarana Perkeretaapian Tingkat Pelaksana Maintenance of Railway Facilities at the Implementation Level	Hard Skill	24 Mei 2023 May 24, 2023	Jakarta	5
Training Safety Riding	Hard Skill	24 Mei 2023 May 24, 2023	Jakarta	64
Certified Profesional in Organizational Development (CPOD)	Hard Skill	28 Mei 2023 May 28, 2023	Jakarta	1
Certified Public Relations Competency	Hard Skill	25 Mei 2023 May 25, 2023	Jakarta	1
Digital Marketing Boothcamp	Hard Skill	31 Mei 2023 May 31, 2023	Jakarta	4
Certified Contract Management Specialist	Hard Skill	31 Mei 2023 May 31, 2023	Jakarta	1
Public Relations Research, Measurement & Evaluation	Hard Skill	31 Mei 2023 May 31, 2023	Jakarta	1
Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian Tingkat Pelaksana Inspection of Railway Facilities at the Implementation Level	Hard Skill	08 Maret 2023 March 8, 2023	Jakarta	5
Corporate Investigator Profesional	Hard Skill	09 Mei 2023 May 9, 2023	Jakarta	2
Industrial Relation Certified Program	Hard Skill	23 Juni 2023 June 23, 2023	Jakarta	1

Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Karyawan Tahun 2023
Implementation of Employee Competency Development Year 2023

Nama Pelatihan / Pendidikan Name of Training / Education	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Date	Lokasi Location	Jumlah Peserta Number of Participants
Tenaga Bangunan Tinggi Tingkat 2 High-rise Building Construction Worker Level 2	Hard Skill	15 Juni 2023 June 15, 2023	Jakarta	1
Bejana Tekan & Tangki Timbun Pressure Vessels & Silo Tanks	Hard Skill	21 Juni 2023 June 21, 2023	Jakarta	2
Teknisi Perancah Scaffolding Technician	Hard Skill	19 Juni 2023 June 19, 2023	Jakarta	1
K3 Supervisi (Pengawas) Perancah <i>Occupational Health and Safety (OHS) Supervisor for Scaffolding</i>	Hard Skill	14 Juli 2023 July 14, 2023	Jakarta	1
Workshop Industrial Relations	Hard Skill	15 Juli 2023 July 15, 2023	Jakarta	1
Ahli K3 Konstruksi Construction Occupational Health and Safety Expert	Hard Skill	29 Juli 2023 July 29, 2023	Jakarta	2
Effective Inventory & Warehouse Management	Hard Skill	23 Juni 2023 June 23, 2023	Jakarta	1
Autocad 3D	Hard Skill	18 Juli 2023 July 18, 2023	Jakarta	3
Kupas Tuntas Hukum Ketenaga Kerjaan & Penyelesaian HI <i>Detailed Discussion on Labor Law & Industrial Dispute Resolution</i>	Soft Skill	26 Juli 2023 July 26, 2023	Jakarta	1
Pengelolaan Limbah B3 (SKKNI No:1872016 Level Penanggung Jawab) <i>Management of Hazardous and Toxic Waste (SKKNI No:1872016 PIC Level)</i>	Hard Skill	02 Agustus 2023 August 2, 2023	Jakarta	1
Workshop Penyusunan Alat Ukur Simulasi Assesment Centers Workshop on Developing Measurement Tools for Simulation Assessment Centers	Hard Skill	09 Agustus 2023 August 9, 2023	Jakarta	1
Certified Governance Professional	Hard Skill	24 Agustus 2023 August 24, 2023	Jakarta	1
Stake Holder Mapping	Hard Skill	31 Juli 2023 July 31, 2023	Jakarta	37
The Future of GRC Trends & Key Success Factor & GRC Talks 2023 <i>#roadtobusinessresiliency</i>	Soft Skill	02 Agustus 2023 August 2, 2023	Jakarta	267
Apar & Hydrant Fire Extinguishers & Hydrants	Hard Skill	26 Juli 2023 July 26, 2023	Jakarta	52
Petugas K3 Kimia Chemical OHS Officer	Hard Skill	05 Agustus 2023 August 5, 2023	Jakarta	4
Operator Lift dan Eskalator Lift and Escalator Operator	Hard Skill	02 September 2023 September 2, 2023	Jakarta	2
(SIO) Forklift Kelas 2 Forklift Operator (Class 2 SIO)	Hard Skill	10 Agustus 2023 August 10, 2023	Jakarta	1
Ahli K3 Lingkungan Kerja Occupational Health and Safety Expert	Hard Skill	02 September 2023 September 2, 2023	Jakarta	1
Refreshment Perawatan Sarana Perkeretaapian Tingkat Pelaksana Refreshment for Maintenance of Railway Facilities at the Implementation Level	Hard Skill	15 Maret 2023 March 15, 2023	Jakarta	5
Grooming	Hard Skill	05 September 2023 September 5, 2023	Jakarta	23
Training of Trainer	Hard Skill	25 Agustus 2023 August 25, 2023	Jakarta	16
Juru Las Welder	Hard Skill	23 September 2023 September 23, 2023	Jakarta	1
Best Customer Journey & Experience	Hard Skill	08 September 2023 September 8, 2023	Jakarta	23
Refreshment Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian Tingkat Pelaksana Refreshment for Inspection of Railway Facilities at the Implementation Level	Hard Skill	08 Maret 2023 March 8, 2023	Jakarta	5
Electronika Dasar, PLC & Repair Electric Basic Electronics, PLC, and Electric Repair	Hard Skill	22 September 2023 September 22, 2023	Jakarta	10

Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Karyawan Tahun 2023
Implementation of Employee Competency Development Year 2023

Nama Pelatihan / Pendidikan Name of Training / Education	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Date	Lokasi Location	Jumlah Peserta Number of Participants
Orientasi, Dasar, Kompetensi Pemeriksa & Perawatan Bidang Jalur dan Bangunan Orientation, Fundamentals, Competencies for Inspectors & Maintenance in the Field of Tracks and Buildings	Hard Skill	12 September 2023 September 12, 2023	Jakarta	1
Ahli Manajemen Proyek Project Management Expert	Hard Skill	21 Desember 2023 December 21, 2023	Jakarta	6
Standart Kompetensi Tenaga Teknik ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Competency Standards for Electrical Engineering Technicians in the Field of Electrical Power Utilization Installation	Hard Skill	13 Oktober 2023 October 13, 2023	Jakarta	7
Auditor Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) Internal Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu Internal Security Management System (SMP) Auditor for National Vital Objects and Specific Objects	Hard Skill	27 Oktober 2023 October 27, 2023	Jakarta	1
Microsoft Project	Hard Skill	28 November 2023 November 28, 2023	Jakarta	11
Feasibility Study	Hard Skill	02 November 2023 November 2, 2023	Jakarta	1
Refreshment Audit Internal Integrasi Berdasarkan ISO 19011:2018 Refreshment for Internal Audit Integration Based on ISO 19011:2018	Hard Skill	26 September 2023 September 26, 2023	Jakarta	26
Operator Pesawat Angkat dan Angkut (Boomlift atau Scissor Lift) Boomlift or Scissor Lift Operator	Hard Skill	25 Oktober 2023 October 25, 2023	Jakarta	2
Refreshment Penanganan Ragam Disabilitas Refreshment for Handling Diversity of Disabilities	Hard Skill	14 November 2023 November 14, 2025	Jakarta	23
Training Export & Import Procedure	Hard Skill	17 Maret 2023 March 17, 2023	Jakarta	1
Cataloguer	Hard Skill	25 Oktober 2023 October 25, 2023	Jakarta	15
Auditor Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Occupational Health and Safety Management System (SMK3) Auditor	Hard Skill	21 Oktober 2023 October 21, 2023	Jakarta	1
Predictive Maintenance	Hard Skill	12 Desember 2023 December 12, 2023	Jakarta	8
Microsoft Dynamic 365: Finance & Operations App Developer	Hard Skill	27 Oktober 2023 October 27, 2023	Jakarta	1
Cyber Security	Hard Skill	21 Oktober 2023 October 21, 2023	Jakarta	1
ISO 14001 Environment Management System (EMS) Lead Auditor Course	Hard Skill	24 November 2023 November 24, 2023	Jakarta	1
Brevet Pajak A dan B Tax Brevet A and B	Hard Skill	26 Januari 2024 January 26, 2024	Jakarta	1
Ultrasonic Testing Level 2	Hard Skill	04 Desember 2023 December 4, 2023	Jakarta	5
Qualified Risk Management Profesional (QRMP)	Hard Skill	20 Oktober 2023 October 20, 2023	Jakarta	1
Remuneration Management	Hard Skill	14 Desember 2023 December 14, 2023	Jakarta	2
Perawatan Sarana Perkeretaapian Tingkat Pelaksana Lanjutan Maintenance of Railway Facilities at the Advanced Implementation Level	Hard Skill	14 Desember 2023 December 14, 2023	Jakarta	5
Inklusif Festival " Membangun Ekosistem Inklusif bagi Disabilitas" Inclusive Festival "Building an Inclusive Ecosystem for Disabilities"	Soft Skill	04 Oktober 2023 October 4, 2023	Jakarta	4
Business English	Hard Skill	28 November 2023 November 28, 2023	Jakarta	21
Basic Service Knowledge	Hard Skill	12 Desember 2023 December 12, 2023	Jakarta	25

Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Karyawan Tahun 2023
Implementation of Employee Competency Development Year 2023

Nama Pelatihan / Pendidikan Name of Training / Education	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Date	Lokasi Location	Jumlah Peserta Number of Participants
Seminar Nasional Internal Audit "Trusted Advisor: Navigating the New Frontier" National Seminar on Internal Audit "Trusted Advisor: Navigating the New Frontier"	Soft Skill	07 Desember 2023 December 7, 2023	Jakarta	3
Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian Tingkat Pelaksana Lanjutan Inspection og Railway Facilities at the Advanced Implementation Level	Hard Skill	11 Juli 2023 July 11, 2023	Jakarta	6
Orientasi, Dasar, Kompetensi Pemeriksa & Perawatan Bidang Fasilitas Operasi Persinyalan dan Telekomunikasi Orientation, Fundamentals, Competencies for Inspectors & Maintenance in the Field of Signaling and Telecommunications	Hard Skill	15 Desember 2023 December 15, 2023	Jakarta	1
Awak Sarana Perkeretaapian Peralatan Khusus/ MRV Crew of Railway Facilities Special Equipment / MRV	Hard Skill	11 September 2023 September 11, 2023	Jakarta	4
Gada Utama	Hard Skill	27 Oktober 2023 October 27, 2023	Jakarta	1
Perawatan Prasarana Perkeretaapian Bidang FASOP Traksi Daya Listrik Tingkat Pelaksana Lanjutan Maintenance of Railway Infrastructure in the Field of FASOP Electric Power Traction at the Advanced Implementation Level	Hard Skill	05 Juni 2023 June 5, 2023	Jakarta	1
Forensik Auditor Auditor Forensic	Hard Skill	27 Oktober 2023 October 27, 2023	Jakarta	1
Implementasi Keberadaan Sekretaris Dewan Komisaris dan GCG Implementation of Secretary of the Board of Commissioners and GCG	Hard Skill	22 November 2023 November 22, 2023	Jakarta	1
Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian Bidang FASOP Traksi Daya Listrik Tingkat Pelaksana Lanjutan Inspection of Railway Infrastructure in the Field of FASOP Electric Power Traction at the Advanced Implementation Level	Hard Skill	25 Juni 2023 June 25, 2023	Jakarta	10
Refreshment Perawatan Prasarana Perkeretaapian Bidang FASOP Persinyalan dan Telekomunikasi Tingkat Pelaksana Refreshment of Maintenance of Railway Infrastructure in the Field of FASOP Signaling and Telecommunications at the Implementation Level	Hard Skill	24 Maret 2023 March 24, 2023	Jakarta	1
Refreshment Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian Bidang FASOP Persinyalan dan Telekomunikasi Tingkat Pelaksana Refreshment of of Railway Infrastructure in the Field of FASOP Signaling and Telecommunications at the Implementation Level	Hard Skill	03 April 2023 April 3, 2023	Jakarta	1
Perawatan Prasarana Perkeretaapian Bidang FASOP Persinyalan dan Telekomunikasi Tingkat Pelaksana Lanjutan Maintenance of Railway Infrastructure in the Field of FASOP Signaling and Telecommunications at the Advanced Implementation Level	Hard Skill	05 Juni 2023 June 5, 2023	Jakarta	3
Strategy to Manage People with ESG Business : Challenge & Opportunity	Soft Skill	14 September 2023 September 14, 2023	Jakarta	2
Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian Bidang FASOP Persinyalan dan Telekomunikasi Tingkat Pelaksana Lanjutan Inspection of Railway Infrastructure in the Field of FASOP Signaling and Telecommunications at the Advanced Implementation Level	Hard Skill	14 Juni 2023 June 14, 2023	Jakarta	10
Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian Bidang Jalur dan Bangunan Inspection of Railway Infrastructure in the Field of Tracks and Buildings	Hard Skill	14 Juni 2023 June 14, 2023	Jakarta	1
Perawatan Prasarana Perkeretaapian Bidang Jalur dan Bangunan Maintenance of Railway Infrastructure in the Field of Tracks and Buildings	Hard Skill	04 Agustus 2023 August 4, 2023	Jakarta	2
Communication & Negotiation Skill	Soft Skill	23 November 2023 November 23, 2023	Jakarta	
Problem Solving Decision Making & Critical Thinking Skill	Soft Skill	23 November 2023 November 23, 2023	Jakarta	
Leadership Management Development Program- SMDP: Leadership Effectiveness Class	Soft Skill	14 November 2023 November 14, 2023	Jakarta	11
Leadership Management Development Program- MMDP: Leadership Effectiveness Class	Soft Skill	07 November 2023 November 7, 2023	Jakarta	29

Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi Karyawan Tahun 2023
Implementation of Employee Competency Development Year 2023

Nama Pelatihan / Pendidikan Name of Training / Education	Jenis Pelatihan Type of Training	Tanggal Date	Lokasi Location	Jumlah Peserta Number of Participants
Leadership Management Development Program- SMDP: Business Performance & Productivity Class	Soft Skill	06 Desember 2023 December 6, 2023	Jakarta	11
Leadership Management Development Program- MMDP: Business Performance & Productivity Class	Soft Skill	07 Desember 2023 December 7, 2023	Jakarta	29

Di tahun 2023, Perusahaan merealisasikan biaya pengembangan kompetensi sebesar Rp5.486.790.970 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan Description	Jumlah Amount	Satuan Unit
Biaya Pelatihan Training Costs	5.486.790.970	Rupiah IDR
Kegiatan Pelatihan/Pengembangan Training/Development Activities	122	Kali Time(s)
Durasi Pelatihan Training Duration	23.404,5	Jam Hour(s)
Peserta Participants	272	Orang People

Kesejahteraan Karyawan

Sejak tahun 2021, PT LRT Jakarta mengikutkan karyawan ke dalam Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang dikelola oleh salah satu DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) untuk mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan landasan hukum dana pensiun yaitu Undang-undang Nomor 11 tanggal 20 April 1992 serta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, PT LRT Jakarta juga memperhatikan kebutuhan kesejahteraan karyawan dalam hal BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Kesehatan untuk Karyawan dan Keluarga Karyawan, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Pendidikan dan Tunjangan Akhir Tahun.

Biaya Tenaga Kerja

Di tahun 2023, biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh LRT adalah sebesar Rp53,10 miliar mengalami kenaikan 49,27% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp17,53 miliar. Adapun pos-pos biaya tenaga kerja yang dikeluarkan meliputi gaji, beban manfaat karyawan, tunjangan, beban Pph Karyawan, Beban Tantiem & Jasa Produksi, Beban Premi Asuransi Pegawai, Tunjangan Hari Raya, BPJS Ketenagakerjaan, Beban diklat dan pelatihan sertifikasi, pengobatan, BPJS Kesehatan, Beban Pegawai Lainnya, Pakaian Dinas.

In 2023, the Company realized competency development costs of IDR5,486,790,970 with the following details:

Employee Welfare

Since 2021, PT LRT Jakarta has included employees in the Defined Contribution Pension Program (PPIP) which is managed by a DPLK (Financial Institution Pension Fund) to manage and run a program that promises retirement benefits based on the legal basis for pension funds, namely Law Number 11 dated 20 April 1992 and its implementing regulations. In addition, PT LRT Jakarta also pays attention to employee welfare needs in terms of BPJS Kesehatan (Health Insurance), BPJS Ketenagakerjaan (Social Security), other Health Insurance for Employees and Employees' Families, Holiday Allowances, Education Allowances and Year End Allowances.

Labor Costs

In 2023, the labor cost incurred by LRT was Rp53.10 billion, an increase of 9.27% compared to 2022 which amounted to Rp17.53 billion. The labor cost items incurred include salaries, employee benefit expenses, allowances, Employee Pph expenses, Tantiem & Production Services Expenses, Employee Insurance Premium Expenses, Holiday Allowances, Employment BPJS, Certification training and training expenses, medical treatment, Health BPJS, Other Employee Expenses, Office Clothing.

Biaya Tenaga Kerja
Labor Costs
2022-2023

No	Pos Biaya Tenaga Kerja Labor Cost Posts	2023 (Rp) (IDR)	2022 (Rp) (IDR)	Peningkatan (Penurunan) Increase (Decrease)	
				Nominal (Rp) (IDR)	Percentase Percentage (%)
1	Gaji Salary	22.502.487.903	17.797.776.936	4.704.710.967	26,43%
2	Beban Manfaat Karyawan Employee Benefits Expense	3.467.346.655	4.914.485.624	(1.447.138.969)	(29,45%)
3	Tunjangan Allowances	8.082.529.176	3.579.955.476	4.502.573.700	125,77%
4	Beban PPh Karyawan Employee's Income Tax	5.854.435.764	3.264.107.280	2.590.328.484	79,36%
5	Beban Tantiem Dan Jasa Produksi Tantiem and Production Services	1.946.642.035	842.158.480	1.104.483.555	131,15%
6	Beban Premi Asuransi Pegawai Employee's Insurance Premium Expenses	2.381.821.461	1.915.139.396	466.682.065	24,37%
7	Tunjangan Hari Raya Religious Holiday Allowances	1.481.819.152	1.002.303.573	479.515.579	47,84%
8	BPJS Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	1.668.808.068	1.299.459.179	369.348.889	28,42%
9	Beban Diklat dan Pelatihan Sertifikasi Certification Training and Training Expenses	3.905.246.631	1.730.635.842	2.174.610.789	125,65%
10	Beban Pengobatan Health Treatment Expense	908.020.473	740.142.421	167.878.052	22,68%
11	BPJS Kesehatan BPJS Kesehatan	561.578.690	441.422.138	120.156.552	27,22%
12	Beban Pegawai Lainnya Other Employee Expenses	6.000.000	106.336.270	(100.336.270)	(94,36%)
13	Pakaian Dinas Uniform	337.062.130	25.360.000	311.702.130	1.229,11%
Jumlah Total		53.103.798.138	35.579.465.278	17.530.332.860	49,27%

RENCANA KERJA DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA 2024

Pengembangan kapabilitas karyawan terus dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan sebagai bagian Rencana kerja SDM 2024:

- *Career Management System*: Sistem Manajemen Karir (*Career Management System*) adalah fondasi yang kuat bagi kesuksesan organisasi dan perkembangan individu. Perusahaan telah mengimplementasikan sistem ini dengan cermat dan memastikan bahwa seluruh anggota organisasi memahami manfaatnya. *Career Management System* membantu mengidentifikasi area pengembangan individu. Divisi SDM akan menyediakan pelatihan, kursus, dan *mentorship* untuk membantu insan LRTJ mengasah keterampilan mereka. Selain itu, sistem ini akan membantu mengarahkan pertumbuhan individu berdasarkan hasil evaluasi. Divisi SDM mendorong mobilitas internal dengan mempromosikan rotasi pekerjaan dan promosi. *Career Management System* memfasilitasi perpindahan antar departemen dan posisi. Dengan adanya sistem ini, Perusahaan dapat mengidentifikasi calon pemimpin masa depan dan mengembangkan rencana suksesi sehingga

HUMAN RESOURCES DIVISION'S 2024 WORK PLAN

Employee competency development continues to be conducted continuously. This is carried out as part of the 2024 Human Resources Work Plan:

- Career Management System: The Career Management System is a strong foundation for organizational success and individual development. The Company has carefully implemented this system and ensured that all members of the organization understand its benefits. The Career Management System helps identify individual development areas. The HR Division will provide training, courses, and mentorship to help LRTJ personnel sharpen their skills. Additionally, this system will help guide individual growth based on evaluations. The HR Division encourages internal mobility by promoting job rotations and promotions. The Career Management System facilitates transfer between departments and positions. With this system, the Company can identify future leaders and develop

membantu memastikan kontinuitas kepemimpinan. Perusahaan juga memperhatikan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi melalui sistem yang membantu mengelola beban kerja dan mengurangi stres.

- Penyediaan ruang kerja yang nyaman dan ergonomis bagi karyawan: adalah komitmen penting bagi setiap perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan dan produktivitas timnya. Dalam era kerja yang semakin dinamis dan beragam, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan fisik dan mental karyawan menjadi prioritas utama. Sebuah lingkungan yang nyaman dan ergonomis bukan hanya investasi bagi karyawan, tetapi juga investasi bagi kesuksesan jangka panjang perusahaan.
- Implementasi *Roadmap Knowledge Management* dengan mengoptimalkan *Learning Management System*: Dalam era globalisasi yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, organisasi perlu beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan dan berdaya saing. Salah satu pendekatan yang krusial adalah *Knowledge Management* (KM). KM melibatkan identifikasi, dokumentasi, dan distribusi pengetahuan di seluruh organisasi dengan tujuan meningkatkan efisiensi, inovasi, dan keunggulan kompetitif. Perusahaan berencana mengoptimalkan penggunaan *Learning Management System* (LMS) sebagai sarana untuk wadah *Knowledge Management*. LMS memainkan peran penting dalam menyediakan akses ke konten pendidikan, pelatihan, dan pengetahuan. Dengan memastikan karyawan memiliki akses yang mudah dan efisien ke sumber daya ini, organisasi dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi kesalahan, dan memperkuat budaya berbagi pengetahuan. Implementasi yang baik akan membawa perubahan yang positif secara berkelanjutan dan memperkuat posisi organisasi di pasar global.
- Program pelatihan dan pengembangan insan LRTJ: organisasi tidak hanya mengandalkan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga pada sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Perusahaan memahami bahwa investasi dalam pengembangan karyawan adalah kunci untuk mencapai tujuan Perusahaan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perusahaan melakukan analisis kebutuhan dengan mengumpulkan data melalui diskusi dengan karyawan, identifikasi kekurangan keterampilan serta memahami tren industri. Berdasarkan analisa tersebut, Perusahaan merancang program pelatihan yang komprehensif mencakup: pelatihan teknis/hard skill dan pelatihan softskill. Metode pelatihan menggunakan 3 jenis dalam implementasinya: *in class training*, *on the job training* dan *online training*. Setelah pelatihan, proses selanjutnya adalah evaluasi untuk mengukur efektivitas dan perubahan positif dalam kinerja karyawan.
- Kaderisasi: rasio *succession planning* divisi dan departemen. Program Kaderisasi adalah proses pembentukan dan pengembangan kader dalam suatu organisasi atau kelompok. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemimpin yang berkualitas, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai

succession plans to help ensure leadership continuity. The Company also pays attention to work-life balance through a system that helps manage workload and reduce stress.

- Provision of comfortable and ergonomic workspaces for employees: is a significant commitment for any company concerned with the well-being and productivity of its team. In an increasingly dynamic and diverse work era, creating a workspace that supports the physical and mental health of employees is a top priority. A comfortable and ergonomic environment is not only an investment for employees but also an investment for the long-term success of the Company.
- Implementation of the Knowledge Management Roadmap by optimizing the Learning Management System: In the globalization era marked by advances in knowledge and technology, organizations need to adapt quickly to remain relevant and competitive. One crucial approach is Knowledge Management (KM). KM involves identifying, documenting, and distributing knowledge throughout the organization with the aim of improving efficiency, innovation, and competitive advantage. The Company plans to optimize the use of the Learning Management System (LMS) as a means for Knowledge Management. LMS plays a vital role in providing access to educational content, training, and knowledge. By ensuring employees have easy and efficient access to these resources, organizations can increase productivity, reduce errors, and strengthen a culture of knowledge sharing. Proper implementation will bring about positive and sustainable changes and strengthen the organization's position in the global market.
- Training and Development Program for LRTJ personnel: Organizations rely not only on infrastructure and technology but also on quality human resources (HR). The Company understands that investing in employee development is key to achieving the Company's objectives goals and providing the best service to the community. The Company conducts needs analysis by gathering data through discussions with employees, identifying skill gaps, and understanding industry trends. Based on this analysis, the Company designs a comprehensive training program that includes technical/hard skills and soft skills training. Training methods include three types of implementation: in-class training, on-the-job training, and online training. After training, the next step is evaluation to measure effectiveness and positive changes in employee performance.
- Cadre development: succession planning ratios for divisions and departments. Cadre development program is the process of establishing and developing cadres in an organization or group. The objective is to

dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi. Tahun 2023, Perusahaan telah menyelenggarakan pelatihan *Leadership & Management Development Program* (LMDP) di mana Perusahaan melatih individu untuk mengembangkan kemampuannya dalam bisnis dan kepemimpinan. Kaderisasi melibatkan identifikasi individu yang berpotensi dan mempersiapkan mereka untuk mengisi posisi kepemimpinan di masa depan. Dalam konteks *succession planning*, rasio kaderisasi menjadi faktor penting. Bagaimana perbandingan antara jumlah kader yang siap menggantikan posisi penting di divisi dan departemen dengan jumlah posisi yang perlu diisi. Rasio ini memengaruhi keberhasilan perencanaan sukses dan stabilitas organisasi. Jika rasio kaderisasi rendah, Perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengisi posisi kunci ketika pejabat senior pensiun atau mengundurkan diri. Oleh karena itu, Perusahaan harus memastikan bahwa ada cukup kader yang terlatih dan siap mengambil alih tanggung jawab kepemimpinan. Ini melibatkan pengembangan kader melalui pelatihan, *mentoring*, dan pengalaman kerja yang relevan. Dengan mengoptimalkan rasio kaderisasi, Perusahaan dapat memastikan kelangsungan operasional yang lancar dan kesinambungan kepemimpinan yang kuat.

create quality leaders who have knowledge, skills, and attitudes that align with the organization's values and goals. In 2023, the Company organized a Leadership & Management Development Program (LMDP) where individuals were trained to develop their business and leadership skills. Cadre development involves identifying potential individuals and preparing them to fill leadership positions in the future. In the context of succession planning, the cadre development ratio is an important factor. The comparison between the number of cadres ready to fill important positions in divisions and departments and the number of positions that need to be filled. This ratio affects the success of succession planning and organizational stability. If the cadre development ratio is low, the Company may face difficulties in filling key positions when senior officials retire or resign. Therefore, the Company must ensure that there are enough trained cadres ready to take on leadership responsibilities. This involves developing cadres through training, mentoring, and relevant work experience. By optimizing the cadre development ratio, the Company can ensure efficient operations and strong leadership continuity.



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE

LRTJ menyadari Sistem Teknologi Informasi (TI) memiliki peran sangat penting bagi keberlangsungan bisnis Perusahaan, karena dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas kinerja suatu perusahaan. Untuk itu, Perusahaan berkomitmen untuk mengikuti perkembangan TI dan menerapkannya untuk mendukung produktivitas kerja yang optimal serta memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada pemangku kepentingan. Hal itu bertujuan untuk memperkuat daya saing Perusahaan di masa depan. Pemanfaatan TI yang dikembangkan oleh Perusahaan dapat memungkinkan Perusahaan menyediakan produk dan jasa, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usaha secara berkelanjutan. Upaya untuk menyelaraskan strategi teknologi informasi dengan strategi bisnis Perusahaan, diperlukan penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dilakukan oleh Divisi Teknologi Informasi. Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi merupakan bagian dari Tata Kelola Perusahaan agar dapat menjamin pemanfaatan implementasi Teknologi Informasi yang terukur dan terarah.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI TI

Divisi Teknologi Informasi memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan operasional dan strategis Perusahaan. Dengan fokus pada inovasi teknologi dan efisiensi operasional. Berikut adalah tugas utama Divisi Teknologi Informasi di antaranya :

1. Manajemen Sistem Informasi

Divisi Teknologi Informasi bertugas mengelola dan memelihara infrastruktur teknologi Perusahaan, termasuk jaringan, sistem perangkat keras dan perangkat lunak. Dengan menyediakan fondasi teknologi yang kokoh, Divisi Teknologi Informasi memastikan bahwa operasi Perusahaan berjalan dengan lancar dan efisien.

2. Keamanan Data dan Informasi

Perlindungan data dan informasi Perusahaan adalah prioritas utama Divisi Teknologi Informasi. Dengan mengembangkan kebijakan keamanan yang ketat, mengelola akses pengguna, dan melaksanakan tindakan pencegahan keamanan proaktif, Divisi Teknologi Informasi memastikan bahwa informasi sensitif Perusahaan tetap terlindungi dari ancaman internal dan eksternal.

3. Pengembangan Aplikasi dan Solusi TI

Divisi Teknologi Informasi terlibat dalam pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dan solusi teknologi informasi yang mendukung berbagai aspek bisnis Perusahaan. Dengan memahami kebutuhan bisnis. Divisi Teknologi Informasi merancang dan mengimplementasikan solusi yang inovatif untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pengalaman pengguna.

The Company realizes that Information Technology (IT) Systems have a very important role for the Continuity of a Company's business, because it can increase the effectiveness and productivity of a company's performance. Realizing this, the Company is committed to keeping abreast of IT developments and implementing them to support optimal work productivity and provide the best and quality service to stakeholders. This commitment aims to strengthen the Company's competitiveness in the future. Thus, the use of IT developed by the Company can enable the Company to provide products and services, to measure and track business performance, as well as make appropriate management decisions for sustainable business continuity. Efforts to align information technology strategy with the Company's business strategy require the implementation of Information and Communication Technology Governance carried out by the Information Technology Division. Implementing Information Technology Governance is part of Corporate Governance to ensure the measured and directed utilization of Information Technology implementation.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE IT DIVISION

The Information Technology Division plays a crucial role in supporting the operational and strategic advancements of the Company. With a focus on technological innovation and operational efficiency, the following are the main duties of the Information Technology Division:

1. Information System Management

The Information Technology Division is responsible for managing and maintaining the Company's technology infrastructure, including networks, hardware systems, and software systems. By providing a solid technological foundation, the Information Technology Division ensures that the Company's operations run smoothly and efficiently.

2. Data and Information Security

Protecting the Company's data and information is a top priority for the Information Technology Division. By developing strict security policies, managing user access, and implementing proactive security measures, the Information Technology Division ensures that sensitive information from the Company remains protected from internal and external threats.

3. Application and IT Solutions Development

The Information Technology Division is involved in the development and maintenance of information technology applications and solutions that support various aspects of the Company's business. By understanding business needs, the Information Technology Division designs and implements innovative solutions to enhance productivity, efficiency, and user experience.

4. Dukungan Teknis

Divisi Teknologi Informasi menyediakan dukungan yang andal kepada pengguna internal Perusahaan. Melalui layanan bantuan teknis yang *responsive* dan pelatihan yang efektif. Divisi Teknologi Informasi memastikan bahwa pengguna memiliki akses yang lancar dan dapat memanfaatkan teknologi Perusahaan dengan optimal.

5. Manajemen Proyek TI

Divisi Teknologi Informasi memiliki peran kunci dalam mengelola proyek-proyek TI Perusahaan. Dengan mengadopsi praktik manajemen proyek terbaik, Divisi Teknologi Informasi memastikan bahwa proyek-proyek tersebut diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

6. Analisis Data dan Intelijen Bisnis

Divisi Teknologi Informasi melakukan analisis data yang mendalam untuk memberikan wawasan yang berharga kepada manajemen. Dengan memahami tren bisnis dan pola-pola yang mendasarinya. Divisi Teknologi Informasi membantu manajemen membuat keputusan yang didukung oleh data dan mengidentifikasi peluang-peluang strategis.

7. Pembaruan Teknologi dan Inovasi

Divisi Teknologi Informasi terus memantau perkembangan teknologi terbaru dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan infrastruktur dan sistem teknologi Perusahaan. Dengan mengadopsi teknologi terkini dan berinovasi, Divisi Teknologi Informasi memastikan bahwa Perusahaan tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah.

8. Kepatuhan dan Pengelolaan Risiko TI

Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan Departemen Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa semua sistem dan kebijakan teknologi mematuhi regulasi dan standar industri yang berlaku. Selain itu, Divisi Teknologi Informasi juga berperan dalam mengelola risiko teknologi dan menyelenggarakan audit secara teratur untuk memverifikasi kepatuhan Perusahaan.

Melalui pemenuhan tugas-tugas ini, Divisi Teknologi Informasi memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung tujuan Perusahaan dan menjaga daya saing di pasar yang semakin kompleks dan berubah-ubah.

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Kebijakan Teknologi Informasi merupakan kerangka kerja yang penting bagi Divisi Teknologi Informasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kebijakan ini mencakup serangkaian aturan prosedur, dan pedoman yang dirancang untuk mengatur penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan *asset* teknologi informasi Perusahaan. Beberapa aspek utama dari kebijakan teknologi informasi meliputi:

1. Keamanan Informasi

Kebijakan keamanan informasi mendefinisikan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi data sensitif dan informasi Perusahaan dari ancaman keamanan. Ini termasuk penggunaan enkripsi, pengaturan hak akses,

4. Technical Support

The Information Technology Division provides reliable support to the Company's internal users. Through responsive technical support services and effective training, the Information Technology Division ensures that users have effective access and can utilize the Company's technology optimally.

5. IT Project Management

The Information Technology Division plays a crucial role in managing the Company's IT projects. By adopting best project management practices, the Information Technology Division ensures that projects are completed on time, within budget, and according to specified requirements.

6. Data Analysis and Business Intelligence

The Information Technology Division conducts in-depth data analysis to provide valuable insights to management. By understanding business trends and underlying patterns, the Information Technology Division helps management make data-supported decisions and identify strategic opportunities.

7. Technology Updates and Innovation

The Information Technology Division continuously monitors the latest technology developments and identifies opportunities to improve the Company's technology infrastructure and systems. By adopting cutting-edge technology and innovating, the Information Technology Division ensures that the Company remains relevant and competitive in a constantly changing market.

8. IT Compliance and Risk Management

The Information Technology Division collaborates with the Risk Management Department to ensure that all technology systems and policies comply with applicable regulations and industry standards. Additionally, the Information Technology Division plays a role in managing technology risks and regularly conducts audits to verify the Company's compliance.

By fulfilling these duties, the Information Technology Division makes a significant contribution to supporting the Company's objectives and maintaining competitiveness in an increasingly complex and changing market.

INFORMATION TECHNOLOGY POLICY

The Information Technology Policy is an important framework for the Information Technology Division in carrying out its duties and responsibilities. This policy includes a set of rules, procedures, and guidelines designed to govern the use, management, and protection of the Company's information technology assets. Some key aspects of the information technology policy include:

1. Information Security

The information security policy defines the necessary measures to protect sensitive data and the Company's information from security threats. This includes the use of encryption, access rights management, user activity

pemantauan aktivitas pengguna, serta pelaksanaan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk mengurangi risiko potensial bagi perusahaan.

2. Pengelolaan Risiko TI

Kebijakan ini menetapkan kerangka kerja untuk mengidentifikasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Divisi Teknologi Informasi bertanggung jawab untuk melaksanakan analisis risiko secara teratur dan mengadopsi langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk mengurangi risiko potensial bagi Perusahaan.

3. Kepatuhan Regulasi

Kebijakan ini menetapkan kewajiban Perusahaan untuk mematuhi regulasi dan standar industri yang berlaku terkait dengan penggunaan dan perlindungan data. Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan Departemen Manajemen Risiko untuk memastikan bahwa sistem dan proses teknologi informasi mematuhi persyaratan hukum dan regulasi yang relevan

4. Pengelolaan Aset Teknologi

Kebijakan ini mengatur penggunaan, pengelolaan, dan pemeliharaan aset teknologi informasi Perusahaan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan. Pengelolaan Aset Teknologi ini termasuk prosedur untuk pengadaan dan penggantian aset teknologi, serta kebijakan pemulihan bencana.

5. Kontinuitas Bisnis

Kebijakan kontinuitas bisnis menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan operasional Perusahaan dalam situasi darurat atau bencana. Divisi Teknologi Informasi bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan rencana kontinuitas bisnis yang efektif, termasuk pemulihan sistem dan data dalam waktu yang singkat.

Melalui penerapan kebijakan teknologi informasi yang kokoh dan komprehensif, Divisi Teknologi Informasi tidak hanya melindungi aset Perusahaan, tetapi juga memastikan penggunaan teknologi yang efisien, aman, dan sesuai dengan standar terbaik industri.

SISTEM MANAJEMEN TEKNOLOGI INFORMASI

Sistem Manajemen Teknologi Informasi (TI) adalah kerangka kerja yang digunakan oleh Divisi Teknologi Informasi untuk mengelola semua aspek teknologi informasi dalam Perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan dengan efektif dan efisien untuk mendukung operasi Perusahaan. Berikut adalah poin-poin penting dalam sistem manajemen teknologi informasi:

1. Perencanaan Strategis TI

Divisi Teknologi Informasi merancang rencana strategis untuk penggunaan teknologi informasi yang mendukung visi dan tujuan Perusahaan. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan teknologi jangka panjang dan pengembangan strategi untuk memenuhinya.

monitoring, and the implementation of appropriate mitigation measures to reduce potential risks to the Company.

2. IT Risk Management

This policy establishes a framework for identifying and managing risks associated with information technology. The Information Technology Division is responsible for conducting regular risk analysis and adopting appropriate mitigation measures to reduce potential risks to the Company.

3. Regulatory Compliance

This policy establishes the Company's obligations to comply with applicable regulations and industry standards related to data usage and protection. The Information Technology Division collaborates with the Risk Management Department to ensure that information technology systems and processes comply with relevant legal and regulatory requirements.

4. Technology Asset Management

This policy regulates the use, management, and maintenance of the Company's information technology assets, including hardware, software, and network infrastructure. Technology Asset Management includes procedures for technology asset procurement and replacement, as well as disaster recovery policies.

5. Business Continuity

The business continuity policy establishes the necessary steps to ensure the Company's operational continuity in emergency or disaster situations. The Information Technology Division is responsible for designing and implementing effective business continuity plans, including system and data recovery within a short time frame.

Through the implementation of solid and comprehensive information technology policies, the Information Technology Division not only protects the Company's assets but also ensures efficient, secure, and compliant technology usage according to industry best practices.

INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT SYSTEM

The Information Technology Management System (ITMS) is a framework used by the Information Technology Division to manage all aspects of information technology within the Company. Its main objective is to ensure that information technology is used effectively and efficiently to support the Company's operations. Here are the key points in the information technology management system:

1. Strategic IT Planning

The Information Technology Division designs strategic plans for the use of information technology that support the Company's vision and objectives. This involves identifying long-term technology needs and developing strategies to meet them.

2. Pengelolaan Proyek TI

Setiap proyek teknologi, seperti implementasi sistem baru atau *upgrade* perangkat lunak, dikelola dengan metode yang terstruktur. Hal ini melibatkan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, dan pengawasan progres untuk memastikan keberhasilan proyek.

3. Pengelolaan Risiko TI

Divisi Teknologi Informasi mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Hal ini mencakup risiko keamanan data, kerentanan sistem, dan potensi gangguan operasional.

4. Pemantauan Kinerja TI

Kinerja sistem dan infrastruktur TI secara terus-menerus dipantau untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan efisien dan tanpa gangguan. Pemantauan ini memungkinkan identifikasi cepat terhadap masalah potensial sehingga tindakan perbaikan dapat diambil.

5. Pemeliharaan dan Pemulihan

Perawatan rutin dan pemulihan sistem dalam situasi darurat adalah bagian penting dari sistem manajemen TI. Hal ini mencakup pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta perencanaan dan pengujian rencana pemulihan bencana.

6. Evaluasi dan Peningkatan

Divisi Teknologi Informasi secara teratur mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem TI. Evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan, dan untuk mengembangkan strategi perbaikan yang tepat.

Dengan menerapkan sistem manajemen teknologi informasi yang solid, Divisi Teknologi Informasi memastikan bahwa teknologi informasi digunakan secara efektif untuk mendukung operasi Perusahaan secara keseluruhan.

MITIGASI DISRUPSI TI

Divisi Teknologi Informasi memiliki tanggung jawab penting untuk memitigasi risiko disrupti yang dapat mempengaruhi kinerja sistem dan operasi Perusahaan. Dalam upaya untuk menjaga kontinuitas bisnis dan mengatasi potensi gangguan, Divisi TI menerapkan strategi mitigasi yang efektif, termasuk:

1. Perencanaan Kontinuitas Bisnis (BCP) IT

Divisi Teknologi Informasi merancang dan mengimplementasikan rencana kontinuitas bisnis yang komprehensif. Ini mencakup strategi untuk pemulihan sistem dan layanan esensial dalam situasi darurat atau bencana, serta pelatihan dan latihan rutin untuk memastikan kesiapan tim dalam menghadapi keadaan darurat.

2. Pemantauan Proaktif

Divisi Teknologi Informasi secara terus-menerus memantau kinerja sistem dan jaringan untuk mendeteksi indikasi awal dari masalah potensial. Dengan mendeteksi dan menanggapi peringatan dini, Divisi Teknologi Informasi dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah gangguan lebih lanjut.

2. IT Project Management

Every technology project, such as implementing new systems or software upgrades, is managed with structured methods. This involves thorough planning, appropriate resource allocation, and progress monitoring to ensure project success.

3. IT Risk Management

The Information Technology Division identifies, evaluates, and manages risks associated with information technology. This includes data security risks, system vulnerabilities, and potential operational disruptions.

4. IT Performance Monitoring

The performance of IT systems and infrastructure is continuously monitored to ensure they operate efficiently and without disruption. This monitoring allows for early identification of potential issues so that corrective action can be taken.

5. Maintenance and Recovery

Routine system maintenance and recovery in emergency situations are essential parts of the IT management system. This includes hardware and software maintenance, as well as disaster recovery planning and testing.

6. Evaluation and Improvement

The Information Technology Division regularly evaluates the performance and effectiveness of IT systems. This evaluation is used to identify areas for improvement and develop appropriate improvement strategies.

By implementing a solid information technology management system, the Information Technology Division ensures that information technology is effectively used to support the Company's overall operations.

MITIGATING IT DISRUPTIONS

The Information Technology Division has the important responsibility of mitigating disruptions that can affect system performance and company operations. In an effort to maintain business continuity and address potential disruptions, the IT Division implements effective mitigation strategies, including:

1. IT Business Continuity Planning (BCP)

The Information Technology Division designs and implements comprehensive business continuity plans. This includes strategies for system and essential service recovery in emergency or disaster situations, as well as regular training and exercises to ensure team readiness for emergencies.

2. Proactive Monitoring

The Information Technology Division continuously monitors system and network performance to detect early indications of potential issues. By detecting and responding to early warnings, the IT Division can take preventive measures to prevent further disruptions.

3. Keamanan Cyber

Perlindungan terhadap serangan *cyber* menjadi fokus utama Divisi Teknologi Informasi. Dengan cara menerapkan lapisan keamanan yang kuat, termasuk perangkat lunak antivirus, *firewall*, dan deteksi intrusi, serta melakukan pemantauan dan analisis yang berkelanjutan terhadap ancaman keamanan yang berkembang.

4. Pemulihan Bencana

Divisi Teknologi Informasi mengembangkan rencana pemulihan bencana yang terstruktur dan teruji dengan baik. Ini melibatkan langkah-langkah untuk memulihkan sistem dan layanan kunci Perusahaan dalam waktu yang sesingkat mungkin setelah terjadinya keadaan darurat atau bencana, serta menyediakan fasilitas cadangan dan redundansi untuk meminimalkan dampaknya.

5. Pemeliharaan Rutin

Pemeliharaan terjadwal dan pembaruan sistem secara rutin dilakukan oleh Divisi Teknologi Informasi untuk memastikan bahwa sistem dan perangkat lunak tetap beroperasi dengan lancar dan aman. Hal ini termasuk pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, serta pemantauan kondisi fisik dan lingkungan peralatan TI.

6. Pelatihan Pengguna

Divisi Teknologi Informasi menyediakan pelatihan reguler kepada pengguna internal Perusahaan tentang tata cara penggunaan sistem dan perangkat TI. Dengan meningkatkan kesadaran pengguna tentang praktik keamanan dan pemulihan, mereka dapat berkontribusi dalam upaya mitigasi disruptif TI.

Melalui penerapan strategi mitigasi yang komprehensif, Divisi Teknologi Informasi memastikan bahwa Perusahaan memiliki ketangguhan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan teknologi yang kompleks dan beragam.

CYBER SECURITY (KEAMANAN DUNIA MAYA)

LRT Jakarta memandang keamanan siber sebagai salah satu fokus tahun ini. Dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, Perusahaan berusaha melakukan peningkatan infrastruktur keamanan serta asesmen keamanan IT oleh pihak ketiga sebagai langkah-langkah proaktif dalam perlindungan keamanan data dan informasi Perusahaan. Pelatihan keamanan siber untuk karyawan Divisi Teknologi Informasi dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kompetensi untuk menghadapi potensi serangan siber. Kolaborasi aktif juga terus dilakukan dengan berbagai *stakeholder* terkait keamanan IT sebagai komitmen Divisi Teknologi Informasi untuk menjaga keamanan informasi dan melindungi kepentingan Perusahaan, karyawan serta *stakeholder* terkait. Beberapa komponen utama dari pengelolaan keamanan siber di Perusahaan meliputi:

1. Kebijakan Keamanan

Divisi Teknologi infomasi merancang kebijakan keamanan yang jelas untuk mengatur penggunaan sistem dan data Perusahaan, serta tindakan yang harus diambil dalam menghadapi ancaman keamanan.

3. Cybersecurity

Protection against cyber attacks is a primary focus of the Information Technology Division. This is achieved by implementing strong security layers, including antivirus software, firewalls, intrusion detection, as well as ongoing monitoring and analysis of evolving security threats.

4. Disaster Recovery

The Information Technology Division develops well-structured and well-tested disaster recovery plans. This involves steps to recover key company systems and services as quickly as possible after an emergency or disaster, as well as providing backup facilities and redundancy to minimize impact.

5. Routine Maintenance

Scheduled maintenance and system updates are routinely performed by the Information Technology Division to ensure that systems and software operate smoothly and securely. This includes hardware and software maintenance, as well as monitoring the physical conditions and environment of IT equipment.

6. User Training

The Information Technology Division provides regular training to the Company's internal users on the use of IT systems and devices. By increasing user awareness of security practices and recovery, they can contribute to IT disruption mitigation efforts.

Through the implementation of comprehensive mitigation strategies, the Information Technology Division ensures that the Company has the resilience needed to face complex and diverse technological challenges.

CYBER SECURITY

LRT Jakarta views cyber security as one of its key focuses this year. In confronting increasingly complex cyber threats, the Company endeavors to enhance its security infrastructure and undergo IT security assessments by third parties as proactive measures in safeguarding the security of the Company's data and information. Cyber security training for employees of the Information Technology Division is conducted to fulfill competency requirements in dealing with potential cyber attacks. Active collaboration continues with various stakeholders related to IT security as part of the Information Technology Division's commitment to maintaining information security and protecting the interests of the Company, employees, and related stakeholders. Key components of cyber security management in the Company include:

1. Security Policies

The Information Technology Division designs clear security policies to regulate the use of company systems and data, as well as actions to be taken in response to security threats.

2. Identifikasi Risiko

Divisi Teknologi Informasi terus mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko keamanan siber yang mungkin dihadapi, baik dari dalam maupun luar organisasi.

3. Proteksi dan Pencegahan

Langkah-langkah teknis seperti penggunaan *firewall*, enkripsi data, dan perangkat lunak keamanan lainnya terus diterapkan untuk melindungi sistem dan data Perusahaan.

4. Deteksi Ancaman

Divisi Teknologi Informasi berupaya untuk memiliki mekanisme deteksi dini dalam rangka mengidentifikasi aktivitas mencurigakan atau serangan *cyber* secepat mungkin.

5. Respons Terhadap Insiden

Divisi Teknologi Informasi memiliki perencanaan untuk membentuk tim tanggap insiden siber yang memungkinkan untuk menangani dan merespons serangan dengan cepat dan efektif.

6. Pemulihan dan Pembelajaran

Apabila terjadi serangan atau insiden siber, Divisi Teknologi Informasi akan melakukan pemulihan sistem dan data yang terkena dampak, serta melakukan evaluasi untuk memperbaiki kelemahan yang ada.

7. Kesadaran dan Pelatihan

Penting untuk meningkatkan kesadaran keamanan *cyber* di antara karyawan terutama di Divisi Teknologi Informasi, melalui pelatihan tentang ancaman keamanan dan praktik terbaik.

8. Pemantauan dan Evaluasi

Divisi Teknologi Informasi terus memantau lingkungan keamanan dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur keamanan Perusahaan.

Pengelolaan keamanan siber yang efektif membutuhkan pendekatan *holistic* yang melibatkan kolaborasi antar berbagai fungsi dalam Perusahaan, termasuk Divisi Teknologi Informasi. Dengan strategi yang tepat, diharapkan Perusahaan dapat mengurangi risiko terhadap ancaman keamanan siber dan dapat melindungi *asset* digital Perusahaan dengan lebih baik.

DISASTER RECOVERY (PEMULIHAN BENCANA)

LRT Jakarta terus meningkatkan kesiapan *Disaster Recovery Center* (DRC) untuk memastikan bahwa operasi sistem Teknologi Informasi dapat kembali dipulihkan dalam situasi darurat. Pengembangan serta pengujian rencana pemulihan bencana yang mencakup langkah-langkah untuk mengatasi gangguan terhadap sistem TI terus ditingkatkan. LRT Jakarta terus berupaya untuk memperbarui dan mengoptimalkan infrastruktur pemulihan bencana dalam menjaga efektivitas proses pemulihan. Upaya utama dalam pengelolaan *Disaster Recovery Center* Perusahaan meliputi:

2. Risk Identification

The Information Technology Division continuously identifies and evaluates potential cyber security risks, both internal and external to the organization.

3. Protection and Prevention

Technical measures such as firewall usage, data encryption, and other security software are continuously implemented to protect the Company's systems and data.

4. Threat Detection

The Information Technology Division strives to have early detection mechanisms to identify suspicious activities or cyber attacks as quickly as possible.

5. Incident Response

The Information Technology Division has plans to form a cyber incident response team capable of handling and responding to attacks quickly and effectively.

6. Recovery and Learning

In the event of a cyber attack or incident, the Information Technology Division will recover affected systems and data, as well as conduct evaluations to rectify any weaknesses.

7. Awareness and Training

It is essential to enhance cyber security awareness among employees, especially within the Information Technology Division, through training on security threats and best practices.

8. Monitoring and Evaluation

The Information Technology Division continuously monitors the security environment and periodically evaluates company security policies and procedures.

Effective cyber security management requires a holistic approach involving collaboration among various functions within the Company, including the Information Technology Division. With the right strategies, it is hoped that the Company can reduce the risks of cyber security threats and better protect its digital assets.

DISASTER RECOVERY

LRT Jakarta continues to improve the readiness of its Disaster Recovery Center (DRC) to ensure that the operation of its Information Technology systems can be restored in emergency situations. The development and testing of disaster recovery plans, including measures to address disruptions to IT systems, are continuously enhanced. LRT Jakarta strives to renew and optimize its disaster recovery infrastructure to maintain the effectiveness of the recovery process. Key efforts in managing the Disaster Recovery Center include:

1. Perencanaan Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Planning*)
Divisi Teknologi Informasi telah mengembangkan rencana pemulihan bencana yang mencakup prosedur dan langkah-langkah yang harus diambil untuk memulihkan sistem dan data setelah bencana terjadi
2. Identifikasi Kebutuhan Pemulihan (*Recovery Point Objective/RPO* dan *Recovery Time Objective/RTO*)
Divisi Teknologi Informasi perlu merumuskan RPO dan RTO yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan operasional, yaitu seberapa sering data cadangan harus disinkronkan dan berapa lama waktu yang diperbolehkan untuk memulihkan sistem.
3. Pemilihan Lokasi DRC
Divisi Teknologi Informasi memilih lokasi DRC yang aman dan dapat diakses untuk menyimpan salinan cadangan data dan infrastruktur TI yang diperlukan untuk pemulihan.
4. Pengelolaan Cadangan Data
Divisi Teknologi Informasi secara teratur membuat salinan cadangan data dan menyimpannya di lokasi DRC yang aman.
5. Pemulihan Sistem
Jika terjadi bencana, Divisi Teknologi Informasi harus dapat dengan cepat memulihkan sistem dan data mereka dari salinan cadangan yang disimpan di DRC.
6. Uji Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Testing*)
Perusahaan perlu secara teratur menguji rencana pemulihan bencana mereka untuk memastikan bahwa mereka dapat memulihkan sistem dan data dengan benar dan dalam waktu yang sesuai.
7. Pemantauan dan Pembaruan
Divisi Teknologi Informasi terus memantau dan memperbarui rencana pemulihan bencana mereka sesuai dengan perubahan dalam infrastruktur TI dan kebutuhan bisnis.

Pengelolaan DRC yang efektif membutuhkan komitmen dari manajemen dan kolaborasi antara berbagai Divisi di LRT Jakarta, termasuk Divisi Teknologi Informasi. Dengan memiliki rencana pemulihan bencana yang kuat dan DRC yang siap, Perusahaan dapat mengurangi dampak dari bencana dan dapat memulihkan operasional dan kegiatan bisnis dengan lebih cepat dan efisien.

PENGEMBANGAN TI DAN BIAYA INVESTASI TI

Pengembangan dan biaya investasi Teknologi Informasi (TI) merupakan dua aspek yang saling terkait dalam upaya Divisi Teknologi Informasi untuk mendukung operasi bisnis perusahaan. Pengembangan TI melibatkan proses merancang, mengembangkan, dan memperbarui solusi teknologi informasi, sementara biaya investasi TI mencakup semua pengeluaran terkait dengan pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan teknologi informasi dalam perusahaan.

1. Disaster Recovery Planning
The Information Technology Division has developed disaster recovery plans that include procedures and steps to be taken to restore systems and data after a disaster.
2. Identification of Recovery Needs (Recovery Point Objective/RPO and Recovery Time Objective/RTO)
The Information Technology Division needs to formulate RPO and RTO that are suitable for business and operational needs, i.e., how often backup data should be synchronized and how long it is allowed to recover the system.
3. DRC Location Selection
The Information Technology Division selects a safe and accessible location for the DRC to store backup data copies and the necessary IT infrastructure for recovery.
4. Data Backup Management
The Information Technology Division regularly creates backup data copies and stores them in a secure DRC location.
5. System Recovery:
In the event of a disaster, the Information Technology Division must be able to quickly recover their systems and data from the backup copies stored in the DRC.
6. Disaster Recovery Testing
The Company needs to regularly test its disaster recovery plans to ensure that they can correctly recover systems and data and do so within the appropriate time frame.
7. Monitoring and Updates
The Information Technology Division continuously monitors and updates its disaster recovery plans according to changes in IT infrastructure and business needs.

Effective DRC management requires commitment from management and collaboration among various divisions within LRT Jakarta, including the Information Technology Division. By having a strong disaster recovery plan and a ready DRC, the Company can reduce the impact of disasters and can recover operational and business activities more quickly and efficiently.

IT DEVELOPMENT AND IT INVESTMENT COSTS

IT development and investment costs are two interrelated aspects in the efforts of the Information Technology Division to support the Company's business operations. IT development involves the process of designing, developing, and updating IT solutions, while IT investment costs include all expenses related to the procurement, development, and maintenance of IT technology within the Company.

1. Pengembangan Teknologi Informasi:

Pengembangan TI dimulai dengan analisis mendalam terhadap kebutuhan bisnis Perusahaan. Divisi TI berkomunikasi dengan pemangku kepentingan bisnis untuk memahami persyaratan fungsional dan non-fungsional yang diperlukan dari solusi TI. Berdasarkan analisis ini, Divisi TI merancang solusi TI yang sesuai, memilih teknologi yang tepat, dan merancang sistem yang efisien. Setelah perancangan selesai, tim pengembangan TI mulai mengembangkan aplikasi atau solusi yang diperlukan menggunakan metodologi pengembangan yang terstruktur. Setelah pengembangan selesai, solusi TI diuji secara menyeluruh sebelum diperkenalkan ke lingkungan produksi Perusahaan.

2. Biaya Investasi Teknologi Informasi

Total investasi Teknologi Informasi adalah sebesar Rp8,9 miliar. Biaya investasi TI mencakup semua pengeluaran terkait dengan pengembangan, implementasi, dan pemeliharaan solusi TI, termasuk pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak, biaya pengembangan aplikasi, biaya implementasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya pembaruan dan *upgrade*.

Pemahaman yang komprehensif tentang pengembangan dan biaya investasi TI membantu Divisi Teknologi Informasi dalam membuat perencanaan anggaran yang tepat dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien untuk mencapai tujuan bisnis Perusahaan.

Adapun rincian total anggaran Divisi Teknologi Informasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Komponen Biaya Cost Component	Investasi Investment	Keterangan Description
1	Perangkat Pendukung Kerja Work Supporting Tools	Rp1.677.982.422	Biaya sewa perangkat penunjang kerja IT Cost for IT support equipment rental
2	Lisensi License	Rp3.388.438.227	Biaya lisensi penunjang kerja IT Cost of IT support work licenses
3	Tagihan Invoices/bills	Rp305.782.666	Biaya tagihan layanan internet dan telepon Internet and telephone service bills
4	<i>Third Party</i>	Rp3.190.511.013	Biaya jasa pihak ke-3 Third-party service costs
5	Tools, Suku Cadang & Perawatan AFC Tools, Spareparts & AFC Maintenance	Rp380.198.648	Biaya pengadaan <i>tools</i> , <i>spare part</i> , dan jasa perawatan sistem AFC Cost of procurement for tools, spare parts, and AFC system maintenance services
Total Anggaran Divisi IT Total Budget of the IT Division		Rp8.942.912.976	

RENCANA TEKNOLOGI INFORMASI KE DEPAN

Divisi Teknologi Informasi memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan implementasi teknologi untuk mendukung visi dan misi Perusahaan ke depan. Beberapa rencana yang diusulkan untuk pengembangan Teknologi Informasi ke depan termasuk:

1. IT Development

IT development begins with an in-depth analysis of the Company's business needs. The IT Division communicates with business stakeholders to understand the functional and non-functional requirements required from IT solutions. Based on this analysis, the IT Division designs appropriate IT solutions, selects the right technology, and designs efficient systems. After the design phase is completed, the IT development team begins to develop the necessary applications or solutions using structured development methodologies. After development is completed, IT solutions are thoroughly tested before being introduced into the Company's production environment.

2. Information Technology Investment

Costs The total investment in Information Technology amounted to IDR8.9 billion. IT investment costs cover all expenditures related to the development, implementation, and maintenance of IT solutions, including the procurement of hardware and software, application development costs, implementation costs, operational costs, maintenance costs, and update and upgrade costs.

A comprehensive understanding of development and IT investment costs assists the Information Technology Division in making accurate budget plans and efficiently allocating resources to achieve the Company's business objectives.

The details of the total budget for the Information Technology Division in 2023 are as follows:

FUTURE PLANS OF INFORMATION TECHNOLOGY

The Information Technology Division performs a strategic role in determining the direction and implementation of technology to support the Company's vision and mission in the future. Some proposed plans for the future development of Information Technology include:

1. Peningkatan Infrastruktur Teknologi
Melakukan investasi dalam infrastruktur teknologi yang lebih tangguh dan andal untuk meningkatkan kinerja dan keamanan sistem. Ini termasuk pembaruan perangkat keras, jaringan, dan sistem penyimpanan data agar sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.
2. Pengembangan Aplikasi Berbasis *Cloud*
Mengadopsi *model cloud computing* untuk aplikasi Perusahaan guna meningkatkan fleksibilitas, skalabilitas, dan aksesibilitas. Dengan memanfaatkan infrastruktur *cloud*, Perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan mempercepat waktu penyebaran aplikasi baru.
3. Penggunaan Analitik Data dan Kecerdasan Buatan
Mengintegrasikan analitik data dan kecerdasan buatan ke dalam proses bisnis untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini dapat membantu Perusahaan untuk mengidentifikasi tren pasar, mengoptimalkan operasi, dan mempersonalisasi pengalaman pelanggan.
4. Keamanan Informasi yang Diperkuat
Meningkatkan perlindungan terhadap serangan siber dan mengelola risiko keamanan informasi dengan lebih efektif. Ini termasuk penerapan langkah-langkah keamanan proaktif, pemantauan yang ketat terhadap ancaman, dan pelatihan bagi karyawan tentang praktik keamanan *cyber* yang baik.
5. Meningkatkan Kolaborasi dan Komunikasi
Mengimplementasikan alat dan *platform* kolaborasi yang memungkinkan karyawan untuk bekerja secara efisien dari mana saja, meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas kerja. Hal ini dapat mencakup solusi seperti *platform* kolaborasi tim, konferensi video, dan intranet Perusahaan yang ditingkatkan.
6. Pengembangan Keterampilan Teknologi
Melakukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan teknologi bagi karyawan agar dapat mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru dengan lebih efektif. Ini akan membantu Perusahaan untuk tetap kompetitif dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang.

Rencana Teknologi Informasi ke depan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan terus berinovasi dan mengambil manfaat maksimal dari perkembangan teknologi untuk mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih baik.

1. Enhanced Technology Infrastructure
Investing in robust and reliable technology infrastructure to improve system performance and security. This includes upgrading hardware, networks, and data storage systems to meet evolving needs.
2. Development of Cloud-Based Applications
Applications Adopting cloud computing models for the Company's applications to enhance flexibility, scalability, and accessibility. By leveraging cloud infrastructure, the Company can reduce operational costs and accelerate the deployment of new applications.
3. Utilization of Data Analytics and Artificial Intelligence
Integrating data analytics and artificial intelligence into business processes to gain deeper insights and support better decision-making. This can help the Company identify market trends, optimize operations, and personalize customer experiences.
4. Strengthened Information Security
Enhancing protection against cyber attacks and managing information security risks more effectively. This includes implementing proactive security measures, closely monitoring threats, and providing training for employees on good cyber security practices.
5. Improved Collaboration and Communication
Implementing collaboration tools and platforms that allow employees to work efficiently from anywhere, enhancing productivity and work flexibility. This may include solutions such as the enhancement of the Company's team collaboration platforms, video conferencing, and intranets.
6. Technology Skills Development
Investing in training and developing technology skills for employees to adopt and leverage new technologies more effectively. This will help the Company remain competitive in an ever-evolving business environment.

These future Information Technology plans aim to ensure that the Company continues to innovate and derive maximum benefits from technological advancements to achieve its business objectives more effectively.



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance



Dalam era persaingan yang cukup ketat, Perusahaan terus meningkatkan performa sumber daya yang dimiliki untuk menjadi yang terbaik.

In an era of intense competition, the Company continues to improve the performance of its resources to be the best.



n dan
Room

Area Penaikan dan
Penurunan
Pick Up and Drop Off Point
Jalan Gading Grande



Keluar
Exit



KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICIES



KOMITMEN PERUSAHAAN DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan serangkaian sistem yang mengatur dan mengendalikan entitas usaha. Perusahaan berharap penerapan GCG mampu menciptakan nilai tambah untuk seluruh pemangku kepentingan; termasuk kepada pemegang saham. Pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, dan kewajiban entitas usaha untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja entitas usaha, kepemilikan, dan pemangku kepentingan.

Kehadiran GCG diharapkan mampu memberikan pondasi atas pengelolaan entitas usaha yang akuntabel. Prinsip GCG turut mengalami perkembangan yang mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung

THE COMPANY'S COMMITMENT TO THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is a series of systems that regulate and control business entities. The Company expects the implementation of GCG to create added value for all stakeholders; including shareholders. The importance of the right of shareholders to obtain information correctly and in a timely manner, and the obligation of business entities to make accurate, timely, transparent disclosures of all information on business entity performance, ownership, and stakeholders.

The presence of GCG is expected to provide a foundation for accountable management of business entities. GCG principles have also evolved to include a monitoring and control system that supports work ethics and responsible decision making, supports integrity in financial reporting,

jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan pemangku kepentingan dan Perusahaan yang berlandaskan etika, hal itu sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Di lingkup Perusahaan, penilaian dilakukan atas penerapan GCG untuk memastikan terwujudnya prinsip GCG secara komprehensif.

Menyadari pentingnya implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) bagi keberlangsungan usaha, Manajemen LRTJ senantiasa mengoptimalkan penerapan GCG secara berkesinambungan dengan terus melakukan penguatan infrastruktur untuk mencapai praktik terbaik, pengujian keandalan, serta penyesuaian sistem dan prosedur sesuai dengan perkembangan bisnis dan regulasi atau ketentuan yang berlaku. Untuk itu, GCG menjadi penting karena pada dasarnya didesain untuk melindungi kepentingan para Pemegang Saham (*Shareholders*) maupun para Pemangku Kepentingan lainnya (*Stakeholders*).

TUJUAN PENERAPAN GCG

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Pedoman GCG merupakan acuan bagi LRT Jakarta melaksanakan Tata Kelola Perusahaan dalam rangka:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kewajaran dan kesetaraan;
2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian setiap organ Perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perusahaan;
5. Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan lainnya;
6. Meningkatkan daya saing Perusahaan baik secara nasional maupun internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan.

proper risk management, and ethic-based relationship between the Company and its stakeholders. Within the Company, an assessment is conducted on GCG implementation to ensure the implementation of GCG principles in a comprehensive manner.

Recognizing the importance of Good Corporate Governance (GCG) implementation for business sustainability, the management of LRTJ continues to optimize GCG implementation on an ongoing basis by continuously strengthening infrastructure to achieve best practices, reliability testing, and adjusting systems and procedures in accordance with business developments and applicable regulations or provisions. For this reason, GCG is important because it is basically designed to protect the interests of Shareholders and other Stakeholders.

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) is necessary to encourage the establishment of an efficient, transparent and consistent market with the laws and regulations. The GCG Guidelines are a reference for LRT Jakarta to implement Corporate Governance in order:

1. Encouraging the achievement of corporate sustainability through management based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, as well as fairness and equality;
2. Encouraging the empowerment of functions and independence of each organ of the Company, namely the Board of Commissioners, Board of Directors, and the General Meeting of Shareholders;
3. Encouraging shareholders, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors to make decisions and carry out their actions based on high moral values and compliance with laws and regulations;
4. Encouraging the emergence of corporate social awareness and responsibility towards the community and environmental sustainability, especially around the Company;
5. Optimizing corporate value for shareholders while taking into account other stakeholders;
6. Increasing the Company's competitiveness both nationally and internationally, thereby increasing market confidence which can encourage investment flows and sustainable national economic growth.

DASAR PENERAPAN DAN PRINSIP GCG

Dalam menjalankan implementasi GCG di setiap lini bisnis, Perusahaan mengacu pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan secara eksternal maupun internal, yakni:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 96 tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) PT LRT Jakarta
5. Anggaran Dasar Perusahaan.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perusahaan mengacu pada 5 (lima) nilai dasar yaitu:

Pilar Governansi Governance Pillar	Penjelasan Description
Transparansi Transparency	Prinsip transparansi yang diterapkan Perusahaan dengan cara memastikan setiap langkah proses penetapan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan dilakukan secara transparan. The principle of transparency is applied by the Company by ensuring that every step of the process of determining policies and decisions taken by the Board of Commissioners, Board of Directors and all levels of the Company is conducted transparently.
Akuntabilitas Accountability	Prinsip akuntabilitas yang diterapkan dengan cara menetapkan secara jelas tanggung jawab dan kewenangan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Perusahaan dalam struktur organisasi dan uraian jabatan masing-masing. The principle of accountability is applied by clearly defining the responsibilities and authorities of the Board of Commissioners, Board of Directors and all levels of the Company in the organizational structure and job descriptions.
Responsibilitas/Tanggung Jawab Responsibility	Prinsip pertanggungjawaban diterapkan dengan cara menyesuaikan pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. The principle of accountability is applied by adjusting the management of the Company to the prevailing laws and regulations and sound corporate principles.
Kemandirian/Independensi Independence	Prinsip kemandirian diterapkan dengan cara Perusahaan melakukan kegiatannya secara <i>independent</i> sesuai dengan profesionalisme tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun. The principle of independence is applied by conducting its activities independently in accordance with professionalism without conflict of interest and influence or pressure from any party.
Kewajaran dan Kesetaraan Fairness and Equality	Prinsip kewajaran dan kesetaraan diterapkan dengan cara memberikan rasa keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak <i>stakeholder</i> yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The principle of fairness and equality is applied by providing a sense of justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising based on agreements and applicable laws and regulations.

BASIS OF IMPLEMENTATION AND PRINCIPLES OF GCG

In carrying out the implementation of GCG in every line of business, the Company refers to policies set externally and internally, namely:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Government Regulation No. 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprises.
3. Decree of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Province No. 96 of 2004 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices at Regional-Owned Enterprises (BUMD) within the Government of the Special Capital Region of Jakarta.
4. Code of Corporate Governance of PT LRT Jakarta
5. The Company's Articles of Association.

In implementing the principles of Good Corporate Governance, the Company refers to 5 (five) basic values, namely:

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan

The Development of Corporate Governance Implementation In A Sustainable Manner

JEJAK LANGKAH PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Berikut jejak langkah perkembangan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

2020

1. Pengesahan Hubungan tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board manual*) tanggal 11 Februari 2020.
2. Pengesahan tim satuan tugas penanganan Covid-19 PT LRT Jakarta. Berdasarkan SK Direksi 001/ARS/111/XII/2020.
3. Awal Pembentukan Komite Audit Komisaris PT LRT Jakarta. Berdasarkan SK Komisaris No. 41/SDM/111/II/2020 Tanggal 10 Maret 2020.
4. Penetapan skor Tata Kelola Perusahaan sebagai salah satu KPI Perusahaan. Berdasarkan Kontrak Kinerja Direksi dengan Pemegang Saham Tahun 2020.
5. Pengesahaan Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Berdasarkan SK Direksi No.001/AIT/111/I/2020.
6. Pelaksanaan Audit ISO. Perusahaan berhasil memperoleh sertifikasi ISO Terintegrasi dalam Sistmen Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) yang berlaku sampai dengan tahun 2023.
7. Pengesahaan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Coporate Governance* (GCG) di Lingkungan PT LRT jakarta. Berdasarkan SK Direksi No.001.MRK/111/IV/2020.

2021

1. Pengesahan Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan PT LRT Jakarta. Berdasarkan SK Direksi No. 002/ARS/111/IV/2021.
2. Pengesahan Kebijakan Anti Penyuapan PT LRT Jakarta yang berisikan Komitmen Dewan Komisaris dan Dewan Direksi terkait Anti Penyuapan.

MILESTONES IN THE DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The followings are milestones of the development of good corporate governance implementation in the last 4 (four) years.

2020

1. Ratification of the Relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors (Board Manual) dated February 11, 2020.
2. Ratification of the PT LRT Jakarta Covid-19 handling task force team. Pursuant to the Decree of the Board of Directors 001/ARS/111/XII/2020.
3. The beginning of the establishment of the Audit Committee of the Board of Commissioners of PT LRT Jakarta. Pursuant to the Decree of the Board of Commissioners No. 41/SDM/111/II/2020 dated March 10, 2020.
4. Establishment of Corporate Governance score as one of the Company's KPIs. Pursuant to the Board of Directors' 2020 Performance Contract with Shareholders.
5. Ratification of Guidelines for Gratification Control. Pursuant to Decree of the Board of Directors No.001/AIT/111/I/2020.
6. Implementation of ISO audit. The Company succeeded in obtaining an integrated ISO certification in the Quality Management System (ISO 9001: 2015) which took effect until 2023.
7. Approval of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) within PT LRT Jakarta. Pursuant to Decree of the Board of Directors No. 001.MRK/111/IV/2020.

2021

1. Ratification of Anti-Bribery Management System Governance within PT LRT Jakarta. Pursuant to Decree of the Board of Directors No. 002/ARS/111/IV/2021.
2. Ratification of PT LRT Jakarta's Anti-Bribery Policy containing the Commitment of the Board of Commissioners and Board of Directors regarding Anti-Bribery.

3. Pengesahan Manual Sistem Manajemen Anti Penyuapan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT LRT Jakarta.
4. Pembaharuan dokumentasi untuk Manajemen Risiko dan Kepatuhan menyesuaikan dengan Struktur Organisasi terbaru.

2022

1. Pembaharuan Kebijakan Manajemen Mutu, Keselamatan Perkeretaapian, dan Keselamatan Kesehatan Kerja PT LRT Jakarta.
2. SK Direksi Nomor 004/SDM/111/II/2022 Tentang Pembentukan Komite Audit Dewan Komisaris PT LRT Jakarta.
3. Pembaharuan dokumentasi untuk Manajemen Risiko dan Kepatuhan menyesuaikan dengan Struktur Organisasi terbaru.
4. Pembaharuan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di Lingkungan PT LRT Jakarta sesuai dengan Struktur Organisasi terbaru dengan Pedoman No. LRTJ-MKJ-SPR-001.
5. Pengesahan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT LRT Jakarta berdasarkan SK Direksi No.001/SBU/111/II/2022.

2023

1. Pembaharuan Kebijakan Anti Penyuapan, Prosedur Pelaporan Pelanggaran, dan Pedoman Pengelolaan Gratifikasi di lingkungan PT LRT Jakarta.
2. Pembaharuan *Board Manual* PT LRT Jakarta.
3. Pembaharuan Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan PT LRT Jakarta. Berdasarkan SK Direksi No. 001/DRU/111/II/2023.
4. Peluncuran (*launching*) *Whistleblowing System* (WBS) LRT Jakarta Integritas pada tanggal 22 Agustus 2023 yang dikelola oleh konsultan independen.
5. Pelaksanaan program komunikasi GRC kepada *stakeholder* Perusahaan.
6. Pengimplementasian *E-Procurement* sehingga proses pengadaan (*procurement*) bersifat terbuka bagi penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas.
7. Penerimaan penghargaan TOP GRC Award 4 star level, *The High Performing Board of Commissioner on GRC 2023* dan *The Most Committed GRC Leader 2023*.
8. *Training* Anti Korupsi dan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001:2016 untuk Karyawan Perusahaan.
9. *Training* Implementasi Manajemen Risiko dan Kepatuhan di lingkungan Perusahaan.
10. Perusahaan memperoleh piagam Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) dengan kategori "Memuaskan" nilai 93,22%.
11. Perusahaan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 45001: 2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

3. Ratification of the Anti-Bribery Management System Manual by the Board of Commissioners and Board of Directors of PT LRT Jakarta.
4. Risk Management and Compliance Documentation update in line with the latest Organizational Structure.

2022

1. PT LRT Jakarta's Quality Management, Railway Safety, and Occupational Health and Safety Policy Update.
2. Decree of the Board of Directors No. 004/SDM/111/II/2022 concerning the Establishment of Audit Committee of the Board of Commissioners of PT LRT Jakarta.
3. Risk Management and Compliance Documentation update in line with the latest Organizational Structure.
4. Update on the Good Corporate Governance (GCG) Implementation within PT LRT Jakarta in line with the latest Organizational Structure and Guideline No. LRTJ-MKJ-SPR-001.
5. Ratification of Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services within PT LRT Jakarta. Pursuant to Decree of the Board of Directors No.001/SBU/111/II/2022.

2023

1. Update of Guidelines for Anti-Bribery Policy, Whistleblowing Procedures, and Gratification Management within PT LRT Jakarta.
2. PT LRT Jakarta Board Manual Update.
3. Update of Anti-Bribery Management System (SMAP) Governance within PT LRT Jakarta. Pursuant to Decree of the Board of Directors No. 001/DRU/111/II/2023.
4. Launching of the Company's Whistleblowing System (WBS) "LRT Jakarta Integritas" on August 22, 2023, managed by an independent consultant.
5. Implementation of GRC communication program to the Company's stakeholders.
6. Implementation of E-Procurement to enable an open procurement process to interested goods/services providers as well as to the wider community.
7. Received the TOP GRC Award 4 star level, The High Performing Board of Commissioner on GRC 2023 and The Most Committed GRC Leader 2023.
8. Anti-Corruption Training and Implementation of ISO 37001:2016-based Anti-Bribery Management System for the Company's Employees.
9. Training on the Implementation of Risk Management and Compliance within the Company.
10. The Company obtained the Railway Safety Management System (SMKP) charter with the category "Satisfactory" with a score of 93.22%.
11. The Company obtained certification for ISO 9001:2015 Quality Management System and ISO 45001: 2018 Occupational Health and Safety Management System.

12. Penandatangan Pakta Integritas untuk seluruh Karyawan dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perusahaan.
13. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) untuk Direksi dan Komisaris secara tepat waktu.

PETA JALAN: RENCANA PENGEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai wujud pengembangan GRC, Jakpro Group dan PT LRTJ telah melakukan *Gap Analysis* secara mandiri terhadap kondisi saat ini, penyusunan langkah-langkah kerja (*Area of Improvement*) sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang penerapan GRC dapat berjalan dengan baik. Langkah strategis (*Roadmap*) penerapan GRC yang akan dilakukan hingga tahun 2024 dapat dijelaskan melalui gambar di bawah ini:

12. Signing of Integrity Pact for all Employees and third parties collaborating with the Company.
13. Timely reporting of the State Officials' Assets Report (LHKPN) of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

ROADMAP: DEVELOPMENT PLAN FOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) IMPLEMENTATION

As a manifestation of the development of GRC, Jakpro Group and PT LRTJ have conducted an independent gap analysis of the current conditions and the preparation of work steps (Areas of improvement) so that it is expected that in the coming years GRC implementation can run well. The Strategic Steps (Roadmap) of GRC implementation to be carried out until 2023 are described through the illustration below:

GAP ANALYSIS	ROADMAP GCG	BEST PRACTICES	CORPORATE CULTURE
Sebagai titik awal AU JAKPRO untuk mulai membangun GRC (Starting Point) As a Starting point for AU Jakpro to Start building GCG	Tersedianya rencana strategis dan <i>Road Map</i> penerapan GRC AU JAKPRO periode 2009-2023. <i>Road Map</i> implementasi GRC dirancang selaras dengan RJPP Perusahaan The availability of a strategic plan and a Road Map for the implementation of the GRC AU JAKPRO for the period 2019-2023. The road map for GRC implementation is designed in line with the Company's RJPP	Membangun komitmen dan <i>system</i> GRC Perusahaan sesuai dengan acuan praktik terbaik, untuk mendukung peningkatan kinerja Perusahaan dan memperkuat lini pertahanan Perusahaan dengan pendekatan GRC Building the company's GRC commitment and system in accordance with best practice guidelines, to support improved company performance and strengthen the company's line of defence with the GRC approach	Membangun kultur GRC dengan merumuskan <i>Company value</i> dan <i>Company culture</i> , disosiasi dan diedukasi melalui pendampingan untuk menjadi budaya Perusahaan Building a GCR culture by formulating Company values and Company culture, being disseminated and educated through mentoring to become a corporate culture

PERKEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI TAHUN 2023

Uraian tentang perkembangan Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan di tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan skor tata kelola Perusahaan dari yang semula 85,57 di tahun 2022 menjadi 87,93 di tahun 2023.
2. Perbaikan dari aspek komitmen terhadap penerapan GCG secara berkelanjutan melalui konsistensi pelaksanaan acara tahunan GRC *Talks*, pembaharuan pedoman pengelolaan gratifikasi, peluncuran *Whistleblowing System* (WBS) LRT Jakarta Integritas, dan pembaharuan tata kelola SMAP.

DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN 2023

Description of the Corporate Governance developments in 2023, is as follows:

1. Improved corporate governance score from 85.57 in 2022 to 87.93 in 2023.
2. Continuous improvement in the aspect of commitment to sustainable GCG implementation through the consistent implementation of annual GRC Talks event, updating of the guidelines for gratification management, launching of Whistleblowing System (WBS) "LRT Jakarta Integritas", and updating of SMAP governance.

3. Perbaikan dari aspek Direksi melalui pemenuhan target kinerja Perusahaan, peningkatan hubungan yang bernalih tambah bagi Perusahaan dan *stakeholder* Perusahaan, memastikan keterbukaan informasi yang adil (*fairness*) kepada *stakeholder*, dan penyelenggaraan pengendalian intern yang efektif.
4. Perbaikan dari aspek pengungkapan informasi dan transparansi melalui penyediaan akses bagi *stakeholders* atas informasi Perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala. Selain itu, peningkatan aspek pengungkapan informasi tercermin melalui penghargaan yang diperoleh Perusahaan antara lain, yaitu:
 - a. PR Indonesia: *Bronze Winner* - Kanal Digital Sub Kategori Media Sosial (Instagram) dan *Bronze Winner* - Program PR Sub Kategori Corporate PR (LRTJ Creativity Hub - LRTJ Photography Workshop)
 - b. SPS Award: *Bronze Winner* - Media Sosial Terbaik Sub Kategori Korporasi
 - c. Humas Indonesia: *Bronze Winner* - Program Kehumasan Pemerintah Terbaik (Sub Kesehatan), *Bronze Winner* - Lembaga Humas Pemerintah Terbaik (BUMD).
5. Perbaikan dari aspek lainnya yaitu praktik tata kelola di PT LRTJ yang secara praktik dapat diakui sejajar dengan Perusahaan lainnya di Indonesia. Hal ini tercermin dari penghargaan TOP GRC Award 4 star level, *The High Performing Board of Commissioner on GRC 2023* dan *The Most Committed GRC Leader 2023*.

Selama tahun 2023, beberapa kegiatan GCG Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Penilaian pencapaian GCG yang dilakukan secara *self assessment*.
2. Sosialisasi terhadap pembaharuan Kebijakan Anti Penyuapan, Prosedur Pelaporan Pelanggaran, dan Pedoman Pengelolaan Gratifikasi di lingkungan PT LRT Jakarta.
3. Pelaksanaan rapat Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) sesuai Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Lingkungan PT LRT Jakarta, berdasarkan SK Direksi No. 001/DRU/111/II/2023.
4. Peluncuran (*launching*) *Whistleblowing System* (WBS) LRT Jakarta Integritas pada tanggal 22 Agustus 2023 yang dikelola oleh konsultan independen. Sosialisasi WBS LRT Jakarta Integritas dilakukan kepada seluruh karyawan dan rekanan.
5. Pelaksanaan program komunikasi GRC kepada *stakeholder* Perusahaan melalui *social media* dan majalah internal Perusahaan.
6. Pengimplementasian *E-Procurement* dalam proses pengadaan barang dan jasa.
7. Penerimaan penghargaan TOP GRC Award 4 star level, *The High Performing Board of Commissioner on GRC 2023* dan *The Most Committed GRC Leader 2023* yang diselenggarakan oleh Top Business.
8. Pelaksanaan audit oleh Kementerian Perhubungan dengan hasil Perusahaan memperoleh piagam Sistem

3. Improvement from the aspect of the Board of Directors through the fulfillment of the Company's performance targets, improvement of value-added relationships for the Company and the Company's stakeholders, ensuring fairness in information disclosure to stakeholders, and the implementation of effective internal control.
4. Improvement in the aspect of information disclosure and transparency through providing access for stakeholders to relevant, adequate, and reliable Company information in a timely and periodic manner. In addition, the improvement of the aspect of information disclosure is reflected in the awards obtained by the Company, among others, namely:
 - a. PR Indonesia: *Bronze Winner* - Digital Channel Social Media Sub Category (Instagram) and *Bronze Winner* - PR Program Corporate PR Sub Category (LRTJ Creativity Hub - LRTJ Photography Workshop)
 - b. SPS Award: *Bronze Winner* - Best Social Media in Corporate Sub Category
 - c. Indonesian Public Relations: *Bronze Winner* - Best Government Public Relations Program (Sub-Health), *Bronze Winner* - Best Government Public Relations Agency (BUMD).
5. Improvement from other aspects is the practice of governance at PT LRTJ which can be recognized as practically equal to other companies in Indonesia. This is reflected in the TOP GRC Award 4 star level, The High Performing Board of Commissioners on GRC 2023 and The Most Committed GRC Leader 2023.

During 2023, the Company has conducted the following GCG activities:

1. Assessment of GCG achievement conducted by self-assessment.
2. Socialization of updates to the Anti-Bribery Policy, Whistleblowing Procedures, and Guidelines for Gratification Management within PT LRT Jakarta.
3. Implementation of Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) meetings in accordance with the Anti-Bribery Management System (SMAP) Governance within PT LRT Jakarta, Pursuant to Decree of the Board of Directors No. 001/DRU/111/II/2023.
4. Launching of the Whistleblowing System (WBS) "LRT Jakarta Integritas" on August 22, 2023 managed by an independent consultant. Socialization of the LRT Jakarta Integrity WBS was carried out to all employees and partners.
5. Implementation of GRC communication program to the Company's stakeholders through social media and the Company's internal magazine.
6. Implementation of E-Procurement in the procurement of goods and services.
7. Acceptance of TOP GRC Award 4 star level, The High Performing Board of Commissioner on GRC 2023 and The Most Committed GRC Leader 2023 organized by Top Business.
8. The implementation of audit by the Ministry of Transportation with the result that the Company

Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) dengan kategori "Memuaskan" nilai 93,22%.

9. Pelaksanaan Audit Sistem Manajemen Terintegrasi oleh pihak eksternal. Perusahaan memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dan ISO 45001: 2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
10. *Training* Anti Korupsi dan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan berbasis ISO 37001:2016 untuk Karyawan Perusahaan.
11. *Training* Implementasi Manajemen Risiko dan Kepatuhan di lingkungan Perusahaan.
12. Penandatangan Pakta Integritas untuk seluruh Karyawan dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Perusahaan.
13. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) untuk Direksi dan Komisaris.

ASESMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

LRT Jakarta telah melakukan pengukuran atas penerapan prinsip GCG secara berkala. Hal itu sebagai bentuk upaya Perusahaan dalam meningkatkan penerapan prinsip-prinsip GCG. Adapun tujuan dilaksanannya pengukuran tersebut adalah untuk:

1. Menguji dan menilai penerapan GCG di Perusahaan melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan dengan kondisi nyata yang diterapkan pada Perusahaan, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan GCG.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG Perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dan penerapannya pada Perusahaan.
3. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di Perusahaan sejalan dengan *best practices*.
4. Memantau konsistensi penerapan GCG pada Perusahaan dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG di Perusahaan.

Assessment implementasi Good Corporate Governance di PT LRTJ dilaksanakan dengan menggunakan kriteria berdasarkan standar alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter/Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), bertujuan untuk menilai implementasi Good Corporate Governance pada Perusahaan meliputi enam aspek pokok yaitu:

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
6. Aspek Lain.

obtained the Railway Safety Management System (SMKP) charter with "Satisfactory" category with a score of 93.22%.

9. Implementation of Integrated Management System Audit by external party. The Company obtained ISO 9001:2015 Quality Management System and ISO 45001: 2018 Occupational Health and Safety Management System.
10. Anti-Corruption Training and Implementation of ISO 37001:2016-based Anti-Bribery Management System for the Company's Employees.
11. Training on the Implementation of Risk Management and Compliance within the Company.
12. Signing of Integrity Pact for all Employees and third parties working with the Company.
13. Reporting of State Officials' Assets Report (LHKPN) of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

ASSESSMENT OF CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

LRT Jakarta has conducted assessment on its GCG implementation periodically. This is a form of the Company's efforts to improve the implementation of GCG principles. The objectives of GCG assessment are as follows:

1. To test and evaluate GCG implementation in the Company through elaborating on the conditions of GCG implementation and assessing the actual conditions applied in the Company, by assigning scores/values to the application of GCG and categories of GCG implementation quality.
2. To identify the strengths and weaknesses of the Company's GCG implementation, as well as to propose improvement recommendations to reduce the gap between GCG criteria and its implementation in the Company.
3. To provide recommendations for refining the gaps found in GCG implementation in the Company in line with best practices.
4. To monitor the consistency of GCG implementation in the Company and obtain input for refining and developing GCG policies in the Company.

Assessment of Good Corporate Governance implementation at PT LRTJ is carried out using criteria based on the standard test tool Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No. SK16/S.MBU/2012 concerning Assessment and Evaluation Indicators/Parameters of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG), which aims to assess the implementation of Good Corporate Governance in the Company covering six main aspects, namely:

1. Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance;
2. Shareholders and GMS;
3. Board of Commissioners;
4. Board of Directors;
5. Information Disclosure and Transparency;
6. Other Aspects.

Pencapaian skor assessment GCG PT LRTJ untuk periode tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PT LRTJ's GCG assessment score for the 2023 period is as follows:

Nomor Number	Aspek Aspects	Bobot Indikator Indicator Weight	Pencapaian Indikator Indicator Achievement	
			Skor Score	%
I	KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SECARA BERKELANJUTAN COMMITMENT TO THE SUSTAINABLE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE	7,00	7,00	100%
II	PEMEGANG SAHAM DAN RUPS/PEMILIK MODAL SHAREHOLDERS AND GMS/CAPITAL OWNERS	9,00	8,64	96%
III	DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS	35,00	30,52	87%
IV	DIREKSI BOARD OF DIRECTORS	35,00	33,95	97%
V	PENGUNGKAPAN INFORMASI DAN TRANSPARANSI INFORMATION DISCLOSURE AND TRANSPARENCY	9,00	6,82	76%
VI	ASPEK LAIN LAIN OTHER ASPECTS	5,00	1,00	20%
TOTAL SKOR TOTAL SCORE		100,00	87,93	

Pada tahun buku 2023 total nilai yang diperoleh PT LRTJ adalah sebesar 87,93 dari total nilai maksimal yaitu sebesar 100 sehingga secara *overall* hasil *assessment* implementasi GCG PT LRTJ tahun 2023 mendapatkan Kualitas Penerapan GCG “**Sangat Baik**”

In the 2023 fiscal year, the Company received a total score of 87.93 from the maximum total score of 100. Thus, the overall GCG implementation assessment results of PT LRTJ in 2023 received a GCG Implementation Quality of “**Very Good**”.



Struktur Tata Kelola

GOVERNANCE STRUCTURE

Sejalan dengan Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa Perusahaan memiliki 3 (tiga) Organ Utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Kesemua Organ Utama tersebut wajib untuk saling menghormati tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan. Selanjutnya, Organ Utama tersebut didukung oleh organ-organ Perusahaan lainnya yang disebut Organ Pendukung. Organ Pendukung tersebut dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan organ tertinggi dalam Perusahaan yang berfungsi sebagai wadah para Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

RUPS tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi, tanpa mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Dengan saling menghormati fungsi dan wewenang masing-masing Organ Perusahaan, diharapkan terciptanya kerja sama dan sinergi untuk mendukung pelaksanaan GCG yang berkesinambungan.

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) ("PT Jakpro") dan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo ("PT JIP") merupakan pemegang saham Perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

Ketentuan terkait RUPS

Dalam pelaksanaan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, RUPS memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. RUPS harus diselenggarakan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipersiapkan secara memadai sehingga dapat mengambil keputusan yang sah. Untuk itu, setiap penyelengaraan RUPS harus memperhatikan sebagai berikut:
 - a. Panggilan RUPS harus mencakup informasi yang lengkap dan akurat mengenai mata acara, tanggal, waktu, dan tempat RUPS;

In line with Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT), it is stated that the Company has 3 (three) Main Organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors. All of these Main Organs are required to respect each other's duties, responsibilities, and authorities in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association. Furthermore, the Main Organ is supported by other Company organs called Supporting Organs. The Supporting Organs can be formed by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The General Meeting of Shareholders, hereinafter referred to as the GMS, is the highest organ in the Company which functions as a forum for Shareholders to make important decisions by taking into account the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

The GMS or do not intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, without reducing the authority of the GMS to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and laws and regulations, including replacing or dismissing members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors. By mutually respecting the functions and authorities of each Company Organ, it is hoped that cooperation and synergy will be created to support the implementation of sustainable GCG.

PT Jakarta Propertindo (Perseroda) ("PT Jakpro") and PT Jakarta Infrastruktur Propertindo ("PT JIP") are the Company's shareholders, as stated in the Company's Articles of Association

Provisions related to GMS

In implementing GCG, in accordance with its authority and responsibilities, the GMS pays attention to the following provisions:

1. GMS must be held in accordance with the interests of the Company and consider the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, and be adequately prepared so that they can make valid decisions. For this reason, each GMS must pay attention to the following:
 - a. Summons for the GMS must include complete and accurate information regarding the agenda, date, time and place of the GMS;

- b. Bahan dan/atau informasi mengenai setiap mata acara yang tercantum dalam panggilan RUPS tersedia di kantor Perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS sehingga memungkinkan bagi Pemegang Saham berpartisipasi aktif dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab. Apabila bahan tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka bahan dan/atau informasi tersebut harus disediakan di kantor Perusahaan sebelum RUPS diselenggarakan.
 - c. Penjelasan mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan mata acara RUPS dapat diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.
 - d. Risalah RUPS harus tersedia di kantor Perusahaan dan Perusahaan menyediakan fasilitas agar Pemegang Saham dapat membaca atau memperoleh risalah tersebut.
2. Mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dalam Perusahaan terdiri dari:
- a. RUPST mengenai persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, diselenggarakan setiap tahun paling lambat 6 bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup.
 - b. RUPS Lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar Perusahaan disebut RUPS Luar Biasa (“RUPSLB”), yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.
3. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- a. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (*fit and proper*) bagi Perusahaan. Pemegang Saham atau RUPS melakukan pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang telah berlaku, serta Peraturan DKI Nomor 50 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan DKI No 5 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan.
 - b. Dalam mengambil keputusan menerima atau menolak Laporan Dewan Komisaris dan Direksi, RUPS mempertimbangkan kualitas laporan yang berhubungan dengan GCG.
- b. Materials and/or information regarding each agenda listed in the summons for the GMS are available at the Company's office from the date of the summons for the GMS so that it is possible for Shareholders to actively participate in the GMS and vote responsibly. If the material is not available when the summon for the GMS is made, then the material and/or information must be made available at the Company's office before the GMS is held.
 - c. Explanations regarding other matters related to the agenda of the GMS can be provided before and/or during the GMS.
 - d. The minutes of the GMS must be available at the Company's office and the Company provides facilities so that Shareholders can read or obtain the minutes.
2. Referring to the Company's Articles of Association, the General Meeting of Shareholders (“GMS”) in the Company consists of:
- a. The AGMS regarding the approval of the Annual Report and ratification of the Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners, which is held every year no later than 6 months after the closing of the Company's fiscal year.
 - b. Other GMS, hereinafter referred to as Extraordinary GMS in the Company's Articles of Association (“EGMS”), namely the General Meeting of Shareholders which can be held at any time based on the need for the benefit of the Company.
3. GMS decision-making is carried out fairly and transparently by taking into account the long-term and short-term interests of the Company, in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association, including but not limited to:
- a. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors, who are appointed at the GMS, consist of people who are fit and proper for the Company. Shareholders or GMS appoint and dismiss Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association which are guided by the prevailing Minister of Finance Regulation, as well as DKI Governor Regulation No. 50/2018 concerning Procedures for Appointing and Dismissing Members of the Supervisory Board and Members of the Board of Commissioners of Regional-Owned Enterprises, and DKI Governor Regulation No. 5/2018 concerning Procedures for Appointing and Dismissing Directors of Regional-Owned Enterprises and Joint Venture Companies.
 - b. In making a decision to accept or reject the reports of the Board of Commissioners and Board of Directors, the GMS considers the quality of reports related to GCG.

- c. Dalam menetapkan Auditor Eksternal, RUPS mempertimbangkan alasan pencalonan Auditor Eksternal yang disampaikan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit.
 - d. Keputusan RUPS diambil dengan memperhatikan kepentingan wajar Pemegang Saham yang didasari pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Dalam mengambil keputusan pemberian bonus, tantiem dan dividen, RUPS memperhatikan kondisi kesehatan keuangan Perusahaan.
4. Penyelenggaraan RUPS merupakan tanggung jawab Direksi. Untuk itu, Direksi harus mempersiapkan dan menyelenggarakan RUPS yang mekanisme pelaksanaannya mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan dan *Board Manual*.
5. Dalam hal Direksi berhalangan maka penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh Dewan Komisaris atau Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
6. Tata tertib RUPS akan diatur dan dibacakan pada pelaksanaan RUPST dan dan RUPSLB.
7. Kewenangan RUPS antara lain:
- a. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - c. Memberikan keputusan yang diperlukan untuk menjaga kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan jangka pendek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
 - d. Menyetujui dan mengesahkan atau menolak Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang disusun oleh Direksi setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris.
 - e. Menetapkan besaran honorarium dan fasilitas bagi Dewan Komisaris serta gaji dan fasilitas lain bagi Direksi.
 - f. Menunjuk Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan.
 - g. Menyetujui atau menolak rencana untuk:
 - i) Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pengajuan permohonan agar Perusahaan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perusahaan.
 - ii) Melakukan bangun serah kelola dan kerja sama operasional untuk aset yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh pemegang saham.
 - iii) Mendirikan perusahaan baru dan/atau turut serta dalam usaha perusahaan lainnya baik dalam maupun luar negeri atau meningkatkan penyertaannya pada perusahaan, atau mengalihkan penyertaan di anak-anak Perusahaan.
- c. In appointing the External Auditor, the GMS considers the reasons for the nomination of the External Auditor submitted by the Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee.
 - d. GMS resolutions are taken considering the fair interests of Shareholders based on the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.
 - e. In making decisions on awarding bonuses, tantiem, and dividends, the GMS takes into account the condition of the Company's financial health.
4. The implementation of the GMS is the responsibility of the Board of Directors. For this reason, the Board of Directors must prepare and hold a GMS whose implementation mechanism refers to the Company's Articles of Association and the Board Manual.
5. In the event that the Board of Directors is absent, the GMS will be held by the Board of Commissioners or Shareholders in accordance with the laws and regulations and the Company's Articles of Association.
6. The rules of conduct for the GMS will be regulated and read out at the holding of the AGMS and EGMS;
7. The authority of the GMS includes:
- a. Establish changes to the Company's Articles of Association.
 - b. Appoint and dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
 - c. Make decisions necessary to secure the long-term and short-term business interests of the Company in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association.
- d. Approve or reject the Annual Report and Financial Statements prepared by the Board of Directors after being examined by the Board of Commissioners.
- e. Determine the amount of honorarium and facilities for the Board of Commissioners as well as salaries and other facilities for the Board of Directors.
- f. Appoint a Public Accounting Firm ("KAP") to audit the Company's Annual Financial Statements.
- g. Approve or reject the plan to:
 - i) Conduct merger, consolidation, acquisition, separation, and submission of application for the Company to be declared bankrupt, extension of the Company's establishment period.
 - ii) Build operate transfer and joint operation for assets that exceed the limit which from time to time will be determined by the shareholders.
 - iii) Establish a new company and/or participate in the business of other companies both at home and abroad or increase its participation in the company, or transfer its participation in subsidiaries.

- iv) Meminjam uang atau membuat hutang atau memberikan pinjaman melampaui batas yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh pemegang saham, kecuali pinjaman utang atau piutang yang timbul karena transaksi operasional.
- v) Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain.
- h. Menyetujui aksi korporasi Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- i. Mengambil keputusan melalui proses yang terbuka dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan.
- j. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- 8. Pemegang Saham minoritas memiliki mekanisme untuk menyelenggarakan RUPS minimal mewakili 1/10 (satupersepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
- 9. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain dengan surat kuasa.
- 10. Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangi persetujuan tersebut keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

Persyaratan RUPS

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat Perusahaan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
2. Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
3. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (2), RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS.
4. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.
5. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan, dengan persetujuan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan.

- iv) Borrow money or create debts or provide loans beyond the limits set from time to time by the shareholders, except for debt or receivable loans arising from operational transactions.
- v) Transfer, release rights or make debt collateral which constitutes more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in a fiscal year, either in one transaction or several transactions that stand alone or are related to one another.
- h. Approve the Company's corporate actions in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.
- i. Make decisions through an open and fair and accountable process.
- j. Carry out good corporate governance in accordance with the authority and responsibility.
- 8. Minority Shareholders have a mechanism to hold a GMS at least representing 1/10 (one tenth) or more of the total shares with voting rights, unless the Articles of Association determines a smaller amount.
- 9. Shareholders can be represented by other Shareholders with a power of attorney.
- 10. Shareholders can also make valid decisions without convening a GMS, provided that all Shareholders have been notified in writing and all Shareholders give their approval regarding the proposal submitted in writing and sign the agreement. Decisions taken in this way have the same power as decisions made legally at the GMS.

GMS Requirements

1. The GMS is held at the domicile of the Company or where the Company conducts its main business activities as specified in the articles of association.
2. The location of the GMS as referred to in paragraph (1) must be located in the territory of the Republic of Indonesia.
3. In addition to organizing the GMS as referred to in the provisions of paragraph (2), the GMS can also be held via teleconference media, video conferences or through other electronic media facilities that allow all GMS participants to see and hear each other directly and participate in the GMS.
4. The GMS has powers that are not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners, within the limits specified in the law and/or the articles of association.
5. In the GMS forum, shareholders are entitled to obtain relevant information, with the approval of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, as long as it relates to the agenda of the meeting and does not conflict with the interests of the Company.

6. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari (setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
7. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
8. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
9. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) harus dilakukan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. Rapat kedua diselenggarakan secepatnya 10 (sepuluh) hari dan selambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender terhitung sejak rapat pertama dilangsungkan.
10. RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
11. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak tercapai, Perusahaan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan atas permohonan Perusahaan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
12. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
6. GMS can be held if more than (half) of the total shares with voting rights are present or represented, unless the law and/or articles of association determine a larger quorum.
7. In the event that the quorum referred to in paragraph (6) is not reached, a second GMS summons may be made.
8. In the summons for the second GMS, it must be stated that the first GMS was held and did not reach a quorum.
9. The summons as referred to in paragraph (7) must be made no later than 7 (seven) days before the meeting is held excluding the date of the summons and the date of the meeting. The second meeting is held at the earliest 10 (ten) days and at the latest 21 (twenty one) calendar days after the first meeting was held.
10. The second GMS as referred to in paragraph (9) is valid and has the right to make decisions if in the GMS at least 1/3 (one third) of the total number of shares with voting rights are present or authorized representative, unless the articles of association determine a larger quorum;
11. In the event that the quorum for the second GMS as referred to in paragraph (10) is not reached, the Company may request the head of the district court whose jurisdiction covers the domicile of the Company at the request of the Company to determine a quorum for the third GMS.
12. Summons for the third GMS must state that the second GMS has been held and does not reach a quorum and that the third GMS will be held with a quorum determined by the head of the district court.

Mekanisme Pemanggilan RUPS

1. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.
2. Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.
3. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
4. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.
5. Dalam panggilan RUPS, dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
6. Perusahaan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

GMS Invitation Mechanism

1. The Board of Directors summons the shareholders before holding the GMS.
2. In certain cases, the summons for the GMS as referred to in paragraph (1) can be made by the Board of Commissioners or shareholders based on the stipulation of the head of the district court.
3. The summons for the GMS shall be made no later than 14 (fourteen) days prior to the date the GMS is held, excluding the date of the summons and the date of the GMS.
4. Summons for the GMS are made by registered letter and/or by advertising in newspapers.
5. In the summons for the GMS, the date, time, place, and agenda of the meeting are stated, accompanied by notification that the materials to be discussed at the GMS are available at the Company's office from the date of the summon for the GMS is made until the date the GMS is held.
6. The Company is required to provide free copies of the materials referred to in paragraph (5) to shareholders if request.

7. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (5), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam RUPS

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dimiliki oleh PT LRT Jakarta, bahwa pengambilan keputusan dalam RUPS berbunyi adalah sebagai berikut:

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Risalah RUPS

1. Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Pemegang Saham memiliki hak dan tanggung jawab atas Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pemegang Saham menyadari bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya harus memperhatikan kelangsungan hidup Perusahaan.
2. Perusahaan harus dapat menjamin terpenuhinya hak dan tanggung jawab Pemegang Saham didasari atas keadilan dan kesetaraan (*fairness*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Hak Pemegang Saham

1. Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan.
2. Hak untuk mengalihkan dan memindah tanggalkan kepemilikan saham.
3. Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur.
4. Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam RUPS.
5. Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi.
6. Hak untuk memperoleh pembagian laba (profit) perusahaan.

7. In the event that the summons is not in accordance with the provisions referred to in paragraph (3) and paragraph (4), and the summons is not in accordance with the provisions of paragraph (5), the GMS decision remains valid if all shareholders with voting rights are present or represented at the GMS and the decision was approved unanimously.

Decision Making Mechanism in GMS

Based on the Code of Corporate Governance of PT LRT Jakarta, the decision making at the GMS is as follows:

1. GMS resolutions are taken based on deliberation to reach a consensus.
2. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus as referred to in paragraph (1) is not reached, a decision is valid if it is approved by more than 1/2 (onehalf) of the total votes cast, except the laws and/or article of association determines that a resolution is valid if it is approved by a greater number of affirmative votes.

Minutes of GMS

1. For each GMS, the minutes of the GMS must be made and signed by the head of the meeting and at least 1 (one) shareholder appointed from and by the GMS participants.
2. The signature as referred to in paragraph (1) is not required if the minutes of the GMS are made using a notarial deed.

Rights and Obligations of the Shareholders

Shareholders have rights and responsibilities for the Company in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association with due observance of the following principles:

1. Shareholders realize that in exercising their rights and responsibilities they must pay attention to the sustainability of the Company.
2. The Company must be able to guarantee the fulfillment of the rights and responsibilities of Shareholders based on the principles of fairness and justice, in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association.

Rights of the Shareholders

1. The right to obtain security guarantees for the ownership registration method.
2. The right to assign and transfer share ownership;
3. The right to obtain relevant information about the Company periodically and regularly.
4. The right to participate and vote in the GMS;
5. The right to elect members of the board of commissioners and directors.
6. The right to obtain Company profit sharing.

- Hak untuk memperoleh perlakuan setara (*equal treatment*) bagi para pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama.

Kewajiban Pemegang Saham

- Pemegang Saham wajib memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan keputusan-keputusan yang dibuat dalam RUPS;
- Pemegang Saham memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam proses pengelolaan perusahaan.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2023

Di tahun 2023, para pemegang saham telah mengambil Keputusan Para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebanyak sebanyak 2 (dua) kali yang terdiri dari 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Berikut disampaikan masing-masing RUPS.

- RUPS Tahunan tentang Laporan PT LRT Jakarta Untuk Tahun Buku 2023, yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Mei 2023.

- The right to obtain equal treatment for shareholders who own shares of the same classification.

Obligations of the Shareholders

- Shareholders must comply with the provisions of the Company's Articles of Association and decisions made at the GMS;
- Shareholders have the responsibility to monitor the implementation of the principles of Good Corporate Governance in the process of managing the Company.

Implementation of the 2023 GMS

In 2023, the shareholders have taken the Shareholders' Resolution through the General Meeting of Shareholders (GMS) a total of 1 (one) time, consisting of 2 (two) Annual General Meeting of Shareholders and 1 (one) Extraordinary General Meeting of Shareholders.

The following is description of each GMS.

- Annual GMS on PT LRT Jakarta's 2023 Annual Report, which was held on Wednesday, May 17, 2023.

Hari/Tanggal Day/Date	:	Rabu, 17 Mei 2023 Wednesday, May 17, 2023
Waktu Time	:	Pk. 14.43 s.d 15.20 WIB 14.43 – 15.20 Western Indonesian Time
Tempat Venue	:	Gedung MCC, Depo LRT Jakarta, Jalan Raya Kelapa Nias, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14025 MCC Building, LRT Jakarta Depot, Jalan Raya Kelapa Nias, Pegangsaan Dua Sub-District, Kelapa Gading District, North Jakarta – 14025
Kehadiran Presence	:	100% Pemegang Saham 100% Shareholders
Informasi Ketidak hadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Information on Absence of the Board of Commissioners and Board of Directors at the GMS	:	-

Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2023 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen

Resolutions of the Annual GMS dated May 17, 2023 and the Follow-Up by Management

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat	Meeting Agenda and its resolutions as well as the Follow Up on the Meeting Resolutions
Agenda Mata Acara Rapat ke-1:	Agenda Mata Acara Rapat ke-1:
Meeting Agenda 1: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)	Meeting Agenda 1: Approval of the Company's Annual Report including the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year, as well as the granting of full release and discharge (volledig acquit et decharge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management and supervisory actions of the Company during the 2022 Fiscal Year
Keputusan Mata Acara Rapat ke-1: 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00065/2.0752/AU.1/06/0209-2/1/II/2023, tanggal 28-02-2023 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh tiga) dengan pendapat "laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan di Indonesia. 2. Menyetujui untuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), apabila dikemudian hari ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dan tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian Perseroan dan patut diduga dilakukan karena kesengajaan serta ketidakahlian atas pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Direksi dan Dewan Komisaris dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadi.	Resolution of Meeting Agenda 1: 1. Approved the Company's Annual Report, which includes the Board of Commissioners' Supervisory Report, and ratified the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year (two thousand twenty-two), which have been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono as contained in the Independent Auditor's Report No. 00065/2.0752/AU.1/0209-2/1/II/2023, February 28, 2023 (February twenty-eighth, two thousand twenty-three) with the opinion "the financial statements present fairly, in all material respects, PT LRT Jakarta's financial position as of December 31, 2022, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards". 2. Provide full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions, that have been carried out during the 2022 Fiscal Year (two thousand twenty-two), provided that if, in the future, any unlawful acts or criminal offenses of abuse of office causing loss to the Company are discovered, and are reasonably suspected to have been committed due to intent and negligence in making disproportionate decisions, then the Board of Directors and Board of Commissioners may be held personally accountable.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti	Follow-up on the Resolution: Has been realized and followed-up
Agenda Mata Acara Rapat ke-2: Penetapan penggunaan laba/rugi bersih Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua)	Meeting Agenda 2: Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2022 Fiscal Year
Keputusan Mata Acara Rapat ke-2: Menyetujui penetapan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp8.222.894.971,- (delapan miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh satu Rupiah) sebagaimana perhitungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00065/2.0752/AU.1/06/0209-2/1/II/2023, tanggal 28-02-2023 (dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh tiga). Pemegang Saham menyetujui untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan memutuskan tidak membagikan Dividen.	Resolution of Meeting Agenda 2: Approved the determination of the Company's net profit for the Financial Year 2022 (two thousand twenty two) of IDR8,222,894,971 (eight billion two hundred twenty-two million eight hundred ninety-four thousand nine hundred seventy-one Rupiah) as calculated and audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono as stated in the Independent Auditor's Report No. 00065/2.0752/AU.1/06/0209-2/1/II/2023, dated February 28, 2022 (February twenty-eighth, two thousand twenty-three). The Shareholders approved that for the 2022 Fiscal Year (two thousand twenty-two) the Company has decided not to distribute Dividends.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti	Follow-up on the Resolution: Has been realized and followed-up

Hasil Keputusan RUPS Tahunan tanggal 17 Mei 2023 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen

Resolutions of the Annual GMS dated May 17, 2023 and the Follow-Up by Management

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat	Meeting Agenda and its resolutions as well as the Follow Up on the Meeting Resolutions
Agenda Mata Acara Rapat ke-3: Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).	Meeting Agenda 3: Appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's financial statements for the 2023 Fiscal Year
Keputusan Mata Acara Rapat ke-3: Menyetujui penetapan penunjukan Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan menggunakan Kantor Akuntan Publik yang digunakan oleh pemegang saham mayoritas atau induk perusahaan.	Resolution of Meeting Agenda 3: Approved the appointment of a Public Accounting Firm (KAP) used by the majority shareholder or parent company to audit the Company's financial statements for the 2023 Fiscal Year (two thousand twenty-three).
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti	Follow-up on the Resolution: Has been realized and followed-up
Agenda Mata Acara Rapat ke-4: Penetapan besaran gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris, dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan menetapkan tantiem/insentif kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).	Meeting Agenda 4: Determination of the amount of the Board of Directors' salaries, honorarium for the Board of Commissioners, and other allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2023 Fiscal Year (two thousand twenty-three), and determination of bonuses/work incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2022 Fiscal Year (two thousand twenty-two)
Keputusan Mata Acara Rapat ke-4: Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris, dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2023 dan menetapkan tantiem/insentif kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) setelah berkonsultasi dengan pemegang saham mayoritas.	Resolution of Meeting Agenda 4: Approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of Directors' salaries, honorarium of the Board of Commissioners, and other benefits for Directors and Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2023 and determine tantiem/work incentives for Directors and Board of Commissioners for the Financial Year 2022 (two thousand twenty-two) after consulting with the majority shareholders.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti	Follow-up on the Resolution: Has been realized and followed-up
2. RUPS tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta, yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Mei 2023.	2. GMS on Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta, which was held on Wednesday, May 17, 2023.
Hari/Tanggal Day/Date	Rabu, 17 Mei 2023 Wednesday, May 17, 2023
Waktu Time	Pk. 15.24 s.d 15.35 WIB 15.24 – 15.35 Western Indonesian Time
Tempat Venue	Gedung MCC, Depo LRT Jakarta, Jalan Raya Kelapa Nias, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara – 14025 MCC Building, LRT Jakarta Depot, Jalan Raya Kelapa Nias, Pegangsaan Dua Sub-District, Kelapa Gading District, North Jakarta – 14025
Kehadiran Presence	100% Pemegang Saham 100% Shareholders
Informasi Ketidak hadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Information on Absence of the Board of Commissioners and Board of Directors at the GMS	: -

Hasil Keputusan RUPS tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta tanggal 17 Mei 2023 serta Tindak Lanjut oleh Manajemen

GMS Resolution on Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta dated May 17, 2023 and Follow-up by Management

Mata Acara Rapat dan Keputusannya serta Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Rapat	Meeting Agenda and its resolutions as well as the Follow Up on the Meeting Resolutions
Agenda Mata Acara Rapat ke-1: Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagai berikut:	Meeting Agenda 1: The amendments to the Company's articles of association are as follows: a. Perubahan Pasal 13 ayat 3; b. Perubahan Pasal 14 ayat 2; c. Perubahan Pasal 16 ayat 3; dan d. Perubahan Pasal 19 ayat 1.
Keputusan Mata Acara Rapat ke-1: Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar sebagai berikut:	Resolution of Meeting Agenda 1: Approved the amendments to the Company's articles of association as follows: 1. Approved the amendment to Article 13, paragraph 3, to read as follows: a. Members of the Board of Directors are appointed by the General Meeting of Shareholders (GMS) for a term of 5 (five) years, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time. 2. Approved the amendment to Article 14, paragraph 2, to read as follows: a. The Board of Directors must obtain approval from the GMS for certain actions, which may be delegated to the Board of Commissioners with the following limitations: i) Approval for engaging in build-operate-transfer and build-transfer-operate projects, and joint operation, with an investment value limit of up to 15% (fifteen percent) of the Company's net asset value; ii) Approval for establishing new companies and/or participating in other companies both domestically and abroad or increasing investments in, or divesting from, subsidiaries with a capital contribution limit of up to 15% (fifteen percent) of the Company's net asset value iii) Approval for borrowing money or incurring debts or granting loans, with a borrowing limit of up to 30% (thirty percent) of the Company's net asset value, except for loans or receivables arising from operational transactions. 3. Approved the amendment to Article 16, paragraph 3, to read as follows: a. Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS for a term of 4 (four) years, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time. 4. Approved the amendment to Article 19, paragraph 1, to read as follows: a. The Board of Directors shall submit the Work Plan and Budget signed together with the Board of Commissioners to the GMS for approval.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti	Follow-up on the Resolution: Has been realized and followed-up
Agenda Mata Acara Rapat ke-2: Menyusun kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Agenda Pertama Rapat tersebut diatas	Meeting Agenda 2: Re-arranged all the provisions in the Company's articles of association in relation to the changes as referred to in the Meeting Agenda 1 mentioned above.
Keputusan Mata Acara Rapat ke-2: Menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan ketentuan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud angka 1 keputusan Rapat	Resolution of Meeting Agenda 2: Approved the re-arrangement of all provisions in the Company's articles of association in connection with the changes to the Company's articles of association provisions as referred to in item 1 of the meeting's resolutions.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Sudah terealisasi dan telah ditindaklanjuti.	Follow-up on the Resolution: Has been realized and followed-up

Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS

Shareholders' Resolutions outside the General Meeting of Shareholders

KPPS di Luar RUPS 21 Maret 2023

Shareholders' Resolutions outside the General Meeting of Shareholders March 21, 2023

Hasil Keputusan Resolutions	Sudah/Belum Terlaksana Has Been Realized/Not Yet Realized	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-Up by Management
--------------------------------	---	---

MEMUTUSKAN, untuk mengangkat Tuan AZAS TIGOR NAI NGGOLAN sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham ini ditandatangani tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Tuan HENDRI SAPUTRA;
Direktur : Tuan ADITIA KESUMA NEGARA DALIMUNTHE;
Direktur : Tuan SAHURDI.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama : Tuan IWAN TAKWIN;
Komisaris : Tuan ROMY BARENO;
Komisaris : Tuan AZAS TIGOR NAI NGGOLAN.

DECIDED, to appoint Mr. AZAS TIGOR NAI NGGOLAN as a Commissioner of the Company for a term of 3 (three) years starting from the date this Shareholders' Resolution is signed, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss him at any time according to the provisions in the Company's articles of association. Thus, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company from the date of the Shareholders' Resolution, will be as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director : Mr. HENDRI SAPUTRA;
Director : Mr. ADITIA KESUMA NEGARA DALIMUNTHE;
Director : Mr. SAHURDI.

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner: Mr. IWAN TAKWIN;
Commissioner : Mr. ROMY BARENO;
Commissioner : Mr. AZAS TIGOR NAI NGGOLAN.

v: sudah terlaksana / x: Belum terlaksana
v: has been realized/ x: Not yet realized

Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 01 tahun 2023 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar PT LRT Jakarta
The decision is effective immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 01 of 2023 concerning the Statement of Shareholders' Resolutions Outside of PT LRT Jakarta.

v

KPPS di Luar RUPS 17 Juli 2023

Shareholders' Resolutions outside the General Meeting of Shareholders July 17, 2023

Hasil Keputusan Resolutions	Sudah/Belum Terlaksana Has Been Realized/Not Yet Realized	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-Up by Management
1. MEMUTUSKAN, dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 16 ayat 9 anggaran dasar Perseroan, untuk memberhentikan Tuan ROMY BARENO sebagai Komisaris Perseroan dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak tanggal terakhir Keputusan Para Pemegang Saham ditandatangani dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusi Tuan ROMY BARENO kepada Perseroan. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung -sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham, menjadi sebagai berikut:		
DIREKSI: Direktur Utama : Tuan HENDRI SAPUTRA; Direktur : Tuan ADITIA KESUMA NEGARA DALIMUNTHE; Direktur : Tuan SAHURDI.		
DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : Tuan IWAN TAKWIN; Komisaris : Tuan AZAS TIGOR NAI NGGOLAN		
2. MEMUTUSKAN, untuk menerima, mengesahkan dan meratifikasi segala tindakan pengurusan sesuai dengan anggaran dasar, yang telah dilakukan oleh Tuan ROMY BARENO sejak tanggal 16-04-2021 (enam belas April dua ribu dua puluh satu) hingga tanggal terakhir Keputusan Para Pemegang Saham ditandatangani, oleh karenanya seluruh tindakan dan/ atau kegiatan kepengurusan yang dilakukan oleh yang bersangkutan selama periode tersebut berlaku mengikat Perseroan.	v	Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 06 tahun 2023 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar PT LRT Jakarta The decision is effective immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 06 of 2023 concerning the Statement of Shareholders' Resolutions Outside of PT LRT Jakarta
1. DECIDED, notwithstanding the provisions of Article 16, paragraph 9 of the Company's articles of association, to dismiss Mr. ROMY BARENO from his position as a Commissioner of the Company, effective as of the last date the Shareholders' Resolution is signed, with the highest gratitude and appreciation for Mr. ROMY BARENO's contributions to the Company. Consequently, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company as of the date of the Shareholders' Resolution, is as follows:		
BOARD OF DIRECTORS: President Director : Mr. HENDRI SAPUTRA; Director : Mr. ADITIA KESUMA NEGARA DALIMUNTHE; Director : Mr. SAHURDI.		
BOARD OF COMMISSIONERS: President Commissioner : Mr. IWAN TAKWIN; Commissioner : Mr. AZAS TIGOR NAI NGGOLAN.		
2. DECIDED, to accept, confirm, and ratify all management actions in accordance with the articles of association, that have been carried out by Mr. ROMY BARENO from the date of April 16, 2021 (April sixteenth, two thousand twenty-one) until the last date the Shareholders' Resolution is signed, and therefore all actions and/or management activities carried out by him during this period are legally binding on the Company.		

v: sudah terlaksana / x: Belum terlaksana
v: has been realized/ x: Not yet realized

KPPS di Luar RUPS 5 Oktober 2023
 Shareholders' Resolutions outside the General Meeting of Shareholders October 5, 2023

Hasil Keputusan Resolutions	Sudah/Belum Terlaksana Has Been Realized/Not Yet Realized	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-Up by Management
--------------------------------	---	---

1. MEMUTUSKAN, untuk mengangkat Tuan MOHAMAD PRAMINTOHADI SUKARNO sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal terakhir Keputusan Para Pemegang Saham ini ditandatangani tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama: Tuan HENDRI SAPUTRA;
 Direktur: Tuan ADITIA KESUMA NEGARA DALIMUNTHE;
 Direktur: Tuan SAHURDI.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama: Tuan IWAN TAKWIN;
 Komisaris: Tuan AZAS TIGOR NAI NGGOLAN;
 Komisaris: Tuan MOHAMAD PRAMINTOHADI SUKARNO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-05-1963 (dua puluh satu Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Puri Bintaro PB.10/8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674042105630005, Warga Negara Indonesia

2. MEMUTUSKAN, untuk menerima, mengesahkan dan meratifikasi segala tindakan pengurusan sesuai dengan anggaran dasar yang telah dilakukan oleh Tuan IWAN TAKWIN selaku Komisaris Utama Perseroan dan Tuan SAHURDI selaku Anggota Direksi Perseroan sejak tanggal 07-10-2022 (tujuh Oktober dua ribu dua puluh dua) hingga tanggal terakhir Keputusan Para Pemegang Saham ditandatangani, oleh karenanya seluruh tindakan dan/ atau kegiatan kepengurusan yang dilakukan oleh yang bersangkutan selama periode tersebut berlaku mengikat Perseroan.

1. DECIDED to appoint Mr. MOHAMAD PRAMINTOHADI SUKARNO as a Commissioner of the Company for a term of 4 (four) years effective from the date of the last signing of this Shareholders' Resolution, without prejudice to the General Meeting of Shareholders' right to dismiss him at any time in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association.

Therefore, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, effective from the date of the Shareholders' Resolution, is as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director: Mr. HENDRI SAPUTRA;
 Director: Mr. ADITIA KESUMA NEGARA DALIMUNTHE;
 Director: Mr. SAHURDI.

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner: Mr. IWAN TAKWIN;
 Commissioner: Mr. AZAS TIGOR NAI NGGOLAN;
 Commissioner: Mr. MOHAMAD PRAMINTOHADI SUKARNO, born in Yogyakarta on May 21, 1963, residing in South Tangerang City, Puri Bintaro PB.10/8, RT.002, RW.009, Sawah Baru Sub-District, Ciputat District, holder of Identity Card Number 3674042105630005, Indonesian citizen.

2. DECIDED to accept, approve, and ratify all management actions in accordance with the Articles of Association that have been carried out by Mr. IWAN TAKWIN as the President Commissioner of the Company and Mr. SAHURDI as a Member of the Company's Board of Directors from October 7, 2022, until the last date the Shareholders' Resolution is signed, and therefore all actions and/or management activities carried out by him during this period are legally binding on the Company.

v: sudah terlaksana / x: Belum terlaksana
 v: has been realized/ x: Not yet realized

Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 01 tahun 2023 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT LRT Jakarta

The decision is effective immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 01 of 2023 concerning the Statement of Shareholders' Resolutions Outside the GMS of PT LRT Jakarta

Realisasi Hasil Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Sepanjang tahun 2022, para pemegang saham telah mengambil Keputusan Para Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebanyak 5 (lima) kali yang terdiri dari 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan 4 (empat) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Berikut merupakan informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku 2022 beserta upaya realisasinya:

RUPS Tahunan

RUPS Tahunan 12 Mei 2022

Annual GMS, May 12, 2022

Hasil Keputusan Resolutions	Sudah/Belum Terlaksana Has been implemented/ not yet implemented	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by the Management
<ol style="list-style-type: none"> Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 yang didalamnya termasuk Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor R-049/2/0752/AU.1/06/0209-1/1/II/2022, tanggal 25 Februari 2022 dengan pendapat "laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT LRT Jakarta tanggal 31 Desember 2021 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021. Menyetujui laba bersih Perseroan sebesar Rp3.639.437.892,00 sebagaimana perhitungan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen Nomor R-049/2/0752/AU.1/06/0209-1/1/II/2022, tanggal 25 Februari 2022. Pemegang Saham menyetujui untuk Tahun Buku 2021 Perseroan memutuskan tidak membagikan Dividen. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dengan menggunakan Kantor Akuntan Publik yang digunakan oleh pemegang saham mayoritas atau induk perusahaan. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris, dan tunjangan lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan menetapkan tantiem/insentif kerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021 setelah berkonsultasi dengan pemegang saham mayoritas. 	V	Telah ditindaklanjuti. Hasil Keputusan RUPS Tahunan telah dituangkan dalam Risalah RUPS No. 04 tanggal 12 Mei 2022 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LRT Jakarta

RUPS Tahunan 12 Mei 2022

Annual GMS, May 12, 2022

Hasil Keputusan Resolutions	Sudah/Belum Terlaksana Has been implemented/ not yet implemented	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by the Management
<p>1. To approve and ratify the Company's Annual Report for the Fiscal Year ending December 31, 2021 which includes the Company's Activity Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Company's Financial Statements for the 2021 Fiscal Year, which have been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono as contained in the Independent Auditor's Report Number R-049/2/0752/AU.1/06/0209-1/1/II/2022, dated February 25, 2022 with the opinion "fair in all material respects, PT LRT Jakarta's financial position as of December 31, 2021, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards".</p> <p>2. To grant full release and discharge (volledig acquit et de charge) to all members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions, that have been carried out during the 2021 Fiscal Year, as long as these actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the year 2021.</p> <p>3. To approve the Company's net profit of IDR3,639,437,892,00, as the calculation has been audited by the Public Accounting Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono, as contained in the Independent Auditor's Report Number R-049/2/0752/AU.1/06/0209-1 /I/II/2022, February 25, 2022. Shareholders agreed that for the 2021 Fiscal Year, the Company decided not to distribute dividends.</p> <p>4. To approve the appointment of a Public Accounting Firm (KAP), which will audit the Company's financial statements for the 2022 Fiscal Year by using the Public Accounting Firm used by the majority shareholder or parent company.</p> <p>5. To approve the granting of authority and power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of the Directors' salaries, honorarium for the Board of Commissioners, and other allowances for the Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2022 Fiscal Year, and determine bonuses/work incentives for the Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2021 Fiscal Year after consultation with majority shareholders.</p>	v	Has been followed up. The Annual GMS Resolutions have been stated in the Minutes of GMS No. 04 dated May 12, 2022, concerning Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta.

v: sudah terlaksana / x: Belum terlaksana
 v: has been implemented / x: not yet implemented

RUPS Luar Biasa**Extraordinary GMS****RUPS Luar Biasa 12 Mei 2022**

Extraordinary GMS, May 12, 2022

Hasil Keputusan Resolutions	Sudah/Belum Terlaksana Has been/not yet implemented	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by the Management
<p>1. Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, dengan batasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Persetujuan dalam melakukan bangun serah kelola dan kerja sama operasional, dengan batasan nilai investasi sampai dengan 15% (lima belas persen) dari nilai kekayaan bersih Perseroan; b. Persetujuan pendirian perusahaan baru dan/atau turut serta dalam usaha perusahaan lainnya baik dalam maupun luar negeri atau meningkatkan penyertaannya pada perusahaan, atau mengalihkan penyertaan di anak-anak perusahaan, dengan batasan nilai setoran modal sampai dengan 15% (lima belas persen) dari nilai kekayaan bersih Perseroan; dan c. Persetujuan tindakan meminjam uang atau membuat hutang atau memberikan pinjaman, dengan batasan nilai investasi sampai dengan 30% (tiga puluh persen) dari nilai kekayaan bersih Perseroan, kecuali pinjaman utang atau piutang yang timbul karena transaksi operasional. <p>2. Pendelegasian kewenangan sebagaimana dalam angka 1 di atas berlaku untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh), serta dalam pelaksanaannya memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. To approved the delegation of authority to the Board of Commissioners as stipulated in Article 14 paragraph 2 of the Company's Articles of Association, with the following restrictions:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Approval of build transfer operate and joint operation, with investment value limit up to 15% (fifteen percent) of the Company's net asset value; b. Approval of the establishment of new companies and/or participating in other company businesses, both domestic and foreign, or increasing its participation in companies, or transferring participation in subsidiaries, with a capital deposit value limit of up to 15% (fifteen percent) of the Company's net assets; and c. Approval of actions to borrow money or make debts or provide loans, with a limit of investment value up to 30% (thirty percent) of the Company's net assets, except for debt or receivable loans arising from operational transactions. <p>2. Delegation of authority as referred to in point 1 above shall be valid for the 2022 Fiscal year (two thousand and twenty-two), and in its implementation shall pay attention to the prevailing legislation.</p>	v	<p>Telah ditindaklanjuti. Hasil Keputusan RUPS telah dituangkan dalam Risalah RUPS No. 05 tanggal 12 Mei 2022 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta.</p> <p>Has been followed up. The GMS Resolutions have been stated in the Minutes of GMS No. 05 dated May 12, 2022, concerning Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta.</p>

v: sudah terlaksana / x: Belum terlaksana
v: has been implemented / x: not yet implemented

Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS

Shareholders' Resolutions Outside the GMS

KPPS di Luar RUPS 07 Oktober 2022

Shareholders' Resolutions Outside the GMS, October 7, 2022

Hasil Keputusan Resolutions	Sudah/Belum Terlaksana Has been/not yet implemented	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by the Management
<ol style="list-style-type: none"> 1. MEMUTUSKAN, untuk memberhentikan dengan hormat Tuan ADRIAN RUSMANA dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan, terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham ditandatangani. 2. MEMUTUSKAN, untuk memberhentikan dengan hormat Tuan M. APRINDY dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan karena mengundurkan diri, terhitung sejak penyampaian Surat Pengunduran Diri tanggal 22-07-2022 (dua puluh dua Juli dua ribu dua puluh dua), dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan. 3. MEMUTUSKAN, untuk mengangkat Tuan SAHURDI sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak Keputusan Para Pemegang Saham ditandatangani sampai dengan pengangkatannya sebagai Direktur Perseroan tersebut mendapatkan persetujuan dari Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketetentuan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. 4. MEMUTUSKAN, untuk mengangkat Tuan IWAN TAKWIN sebagai Komisaris Utama Perseroan, terhitung sejak Keputusan Para Pemegang Saham ditandatangani sampai dengan pengangkatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan tersebut mendapatkan persetujuan dari Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketetentuan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. 	v	Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 22 tahun 2022 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar PT LRT Jakarta

Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham, menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

Direktur Utama : Tuan HENDRI SAPUTRA;
 Direktur : Tuan ADITIA KESUMA NEGARA DALIMUNTHE;
 Direktur : Tuan SAHURDI.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama: Tuan IWAN TAKWIN;
 Komisaris : Tuan ROMY BARENO;
 Komisaris : Nyonya TATAK PRAPTI UJIYATI.

KPPS di Luar RUPS 07 Oktober 2022
Shareholders' Resolutions Outside the GMS, October 7, 2022

Hasil Keputusan Resolutions	Sudah/Belum Terlaksana Has been/not yet implemented	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by the Management
<ol style="list-style-type: none"> 1. DECIDED, to honorably dismiss Mr. ADRIAN RUSMANA from his position as Director of the Company, with the highest gratitude and appreciation for his contribution to the Company, as of the date the Shareholders Resolution was signed. 2. DECIDED, to honorably dismiss Mr. M. APRINDY from his position as President Commissioner of the Company due to resignation, as of the submission of the Letter of Resignation dated 07/22/2022 (twenty-second of July two thousand and twenty-two), with the highest appreciation for his contribution to the Company. 3. DECIDED, to appoint Mr. SAHURDI as the Director of the Company, starting from the signing of the Shareholders' Resolution until his appointment as Director of the Company obtains approval from the Governor of the Special Capital Region of Jakarta, in accordance with statutory provisions and the Company's articles of association. 4. DECIDED, to appoint Mr. IWAN TAKWIN as the President Commissioner of the Company, starting from the signing of the Resolution of the Shareholders until his appointment as the President Commissioner of the Company obtains approval from the Governor of the Special Capital Region of Jakarta, in accordance with statutory provisions and the Company's articles of association. 	v	The decision was immediately effective and has been legally institutionalized through Deed No. 22 of 2022 concerning Statement of Shareholders' Resolutions Outside the GMS of PT LRT Jakarta.

Therefore, the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as of the date of the Shareholders' Resolutions is as follows:

DIRECTOR:

President Director: Mr. HENDRI SAPUTRA;
Director : Mr. ADITIA KESUMA NEGARA DALIMUNTHE;
Director : Mr. SAHURDI.

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner: Mr. IWAN TAKWIN;
Commissioner : Mr. ROMY BARENO;
Commissioner : Mrs. TATAK PRAPTI UJIYATI.

v: sudah terlaksana / x: Belum terlaksana
v: has been implemented / x: not yet implemented

KPPS Di Luar RUPS 31 Oktober 2022
 Shareholders' Resolutions Outside the GMS, October 31, 2022

Hasil Keputusan Resolution	Sudah/Belum Terlaksana Has been/not yet implemented	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by the Management
<p>1. MEMUTUSKAN, untuk menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagai berikut: DECIDED, to approve changes to Article 3 of the Company's articles of association regarding the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company as follows:</p> <p>MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PURPOSES AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES</p> <p>Pasal 3 Article 3</p> <p>1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang sebagai berikut: The purposes and objectives of the Company are to engage in business as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa; Land Transportation and Transportation through Pipelines; b. Konstruksi Bangunan Sipil; Civil Building Construction; c. Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan; Repair and Installation of Machinery and Equipment d. Konstruksi Khusus; Special Construction; e. Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan; Warehousing and Transportation Support Activities; f. Telekomunikasi; Telecommunications; g. Real Estat; Real Estate; h. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen; Head Office Activities and Management Consulting; i. Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis; Architectural and Engineering Activities; Technical Analysis and Testing; j. Periklanan dan Penelitian Pasar; Advertising and Market Research; k. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi; Leasing and Leasing Activities without Option Rights; l. Pendidikan; Education; m. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya; dan Wholesale Trade in Land Transportation Equipment (Not Cars, Motorcycles, and the like), Parts and Equipment; and n. Aktivitas Ketenagakerjaan. Employment Activists. <p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: To achieve the aforementioned purposes and objectives, the Company may carry out the following main business activities:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Angkutan Jalan Rel Perkotaan (49441). Urban Rail Road Transportation (49441). Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan berbagai moda angkutan jalan rel perkotaan, seperti trem, monorel, kereta listrik, kereta bawah tanah, kereta layang dan lain-lain. Mencakup juga pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bagian dari sistem trayek perkotaan. Termasuk angkutan rel dengan jurusan kota ke bandara atau kota ke stasiun. This group covers the business of transporting passengers with various modes of urban rail transportation, such as trams, monorails, electric trains, subways, elevated trains and others. It also includes the operation of cable cars, hill trains, gondola, and others, if they are part of the urban route system, Including rail transportation with the direction of the city to the airport or city to the station. 	v	<p>Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 151 tahun 2022 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT LRT Jakarta</p> <p>The decision was immediately effective and has been legally institutionalized through Deed No. 151 of 2022 concerning the Statement of Shareholders' Resolutions Outside the GMS of PT LRT Jakarta.</p>

KPPS Di Luar RUPS 31 Oktober 2022
 Shareholders' Resolutions Outside the GMS, October 31, 2022

Hasil Keputusan Resolution	Sudah/Belum Terlaksana Has been/not yet implemented	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by the Management
b. Angkutan Jalan Rel Untuk Penumpang (49110). Rail Road Transportation for Passengers (49110). Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang antarkota dengan kereta. Termasuk pengoperasian kereta tidur atau kereta makan sebagai operasi yang terpadu dari perusahaan kereta api. Kelompok ini tidak mencakup angkutan kereta untuk penumpang perkotaan (49441). This group covers the business of transporting passengers between cities by train, including the operation of sleeper trains or dining trains as an integrated operation of the railroad company. This group does not include rail transportation for urban passengers (49441).		
c. Konstruksi Jalan Rel (42103). Railroad Construction (42103). Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/ atau pembangunan kembali jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api. This group covers the construction, maintenance, and/or rebuilding of railroads, such as railroad tracks for trains, including the work of installing rails and sleepers and stockpiling gravel (class A aggregate) for the railroad body.		
d. Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi (42205). Telecommunications Civil Building Construction for Transportation Infrastructure (42205). Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/ atau pembangunan kembali bangunan fasilitas telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, bangunan telekomunikasi navigasi udara, bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api, termasuk bangunan menara/tiang/pipa/antena dan bangunan sejenisnya. This group covers the construction, maintenance and/or rebuilding of telecommunications facilities for sea navigation aids, air navigation telecommunications buildings, signaling buildings, and train telecommunications, including towers/ poles/ pipes/ antenna buildings and similar buildings.		
e. Instalasi Telekomunikasi (43212). Telecommunications Installation (43212). Kelompok ini mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi dan Instalasi telekomunikasi di bangunan gedung dan bangunan sipil. This group covers the installation of telecommunications installations in buildings, both in residential and non-residential areas, such as antenna installation. This group also includes the installation, maintenance and repair of telecommunications installations at telephone/telegraph exchanges, microwave radar transmitter stations, small earth stations/ satellite stations and the like, including the installation of transmission and telecommunications networks and telecommunications installations in buildings and civil structures.		
f. Reparasi Lokomotif Dan Gerbong Kereta (33152). Repair of Locomotive and Train Carriage Repair (33152). Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan lokomotif dan gerbong kereta api dan kendaraan jalan rel lainnya (kecuali industri pembangunan kembali dan pengubahan) dalam golongan 302. This group covers the repair and maintenance of locomotives and railroad cars and other railroad vehicles (except industrial rebuilding and conversion) in class 302.		

KPPS Di Luar RUPS 31 Oktober 2022
 Shareholders' Resolutions Outside the GMS, October 31, 2022

Hasil Keputusan Resolution	Sudah/Belum Terlaksana	Tindak Lanjut oleh Manajemen
	Has been/not yet implemented	Follow-up by the Management
g. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum (33121). Machine Repair for General Purposes (33121).		
<p>Kelompok ini mencakup reparasi mesin untuk keperluan umum yang tercakup dalam golongan 281, seperti reparasi dan perawatan mesin kapal laut atau kereta api, pompa dan peralatan yang terkait, peralatan tenaga uap atau zat cair, katup atau klep, roda gigi (<i>persneling</i>) dan peralatan kemudi, tungku pembakar pada proses industri, alat pengangkat dan pemindah, mesin dan peralatan kantor kecuali komputer dan perlengkapannya (<i>cash register</i>, mesin fotokopi, kalkulator, mesin ketik), perkakas tangan yang digerakkan tenaga, peralatan pendingin dan pembersih udara, timbangan, mesin penjual otomatis dan keperluan umum lainnya.</p> <p>This group covers the repair of general purpose machines covered by class 281, such as repair and maintenance of marine or rail engines, pumps and related equipment, steam or liquid powered equipment, valves, gears and steering gear, furnaces in industrial processes, lifting and transferring equipment, machinery and office equipment, except computers and accessories (<i>cash registers</i>, photocopies, calculators, typewriters), power driven hand tools, air conditioning and cleaning equipment, scales, vending machines and other general needs.</p>		
h. Instalasi Listrik (43211). Electrical Installation (43211).		
<p>Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.</p> <p>This group covers the activities of building, installing, maintaining, rebuilding electrical installations in generators, transmissions, substations, power distribution, power supply systems, and electrical installations in buildings, both in residential and non-residential areas, such as installation of low voltage power networks, including the installation and maintenance of electrical installations in civil buildings, such as roads, railroads and airports.</p>		
i. Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api (43215). Railway Signaling and Telecommunications Installation (43215).		
<p>Kelompok ini mencakup pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api.</p> <p>This group covers the installation, maintenance and repair of railway signaling and telecommunication installations.</p>		
j. Aktivitas Stasiun Kereta Api (52212). Railway Station Activities (52212).		
<p>Kelompok ini mencakup kegiatan usaha stasiun kereta api, seperti pelayanan parkir, penjadwalan keberangkatan kereta api dan pelayanan naik turun penumpang.</p> <p>This group covers the business activities of train stations, such as parking services, scheduling of train departures and passenger boarding and alighting services.</p>		
k. Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD) (52292). Rail Freight Expedition Activities and Land Transport Expedition Activities (EMKA & EAD) (52292).		
<p>Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat.</p> <p>This group covers the business of shipping and or packing goods in large volumes, both those transported by rail or land transportation.</p>		

KPPS Di Luar RUPS 31 Oktober 2022
 Shareholders' Resolutions Outside the GMS, October 31, 2022

Hasil Keputusan Resolution	Sudah/Belum Terlaksana Has been/not yet implemented	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by the Management
-------------------------------	--	---

I. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel (61100).

Cable Telecommunication Activities (61100).

Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem, pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

This group covers the activities of operating, maintaining, or providing access to facilities for transmission of voice, data, text, voice and video using telecommunications cable infrastructure, such as operation and maintenance of conversion and transmission facilities to provide point-to-point communications via land lines, microwave or communication of data and satellite channels, system operation, cable distribution (namely for distribution of television data and signals) and telegraph and other non-vocal communication equipment using own facilities. The location of which the transmission facility performs this activity, can be based on a single technology or a combination of various technologies, including the purchase of access and network capacity from owners and operators of networks and providing telecommunication services that use this capacity for businesses and households and provision of internet access through cable infrastructure operators. Network operation activities for fixed telecommunications intended for the implementation of public telecommunications and leased circuits. This includes data communication connection activities whose delivery is carried out in packets, through a central office or through another network, such as the Public Switched Telephone Network (PSTN). This also includes the activities of the provision of territorial networks serving certain mobile subscribers, including radio trucking services and radio calling services for the public.

KPPS Di Luar RUPS 31 Oktober 2022
 Shareholders' Resolutions Outside the GMS, October 31, 2022

Hasil Keputusan Resolution	Sudah/Belum Terlaksana	Tindak Lanjut oleh Manajemen
	Has been/not yet implemented	Follow-up by the Management
m. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (61200). Wireless Telecommunication Activities (61200).		
<p>Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (<i>paging</i>), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi <i>omni-directional</i> melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.</p> <p>This group covers network operation activities that serve mobile telecommunications with cellular technology on the surface of the earth. Its activities include operating, maintaining, or providing access to facilities for transmitting voice, data, text, voice, and video using wireless communication infrastructure and maintenance and operation of paging, just like cellular telecommunications networks and other wireless telecommunications. The transmission facility provides omnidirectional transmission over the airwaves which may be based on a single technology or a combination of technologies. This includes purchasing access and network capacity from network owners and operators, as well as providing wireless network services (except satellite) for business and household activities and providing internet access through wireless network infrastructure operators.</p>		
n. Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (68111). Real Estate Owned or Leased (68111).		
<p>Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun-disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.</p> <p>This group covers the business of buying, selling, renting, and operating real estate both owned and leased, such as apartment buildings, residential buildings and non-residential buildings (such as storage facilities/warehouses, malls, shopping centers and others), as well as the provision of houses and flats, or furnished or unfurnished apartment for permanent use, either monthly or annually, including the activities of selling land, building development for self-operation (for renting spaces in the building), division of real estate into land lots without land development and operation of residential areas for movable houses.</p>		

KPPS Di Luar RUPS 31 Oktober 2022
 Shareholders' Resolutions Outside the GMS, October 31, 2022

Hasil Keputusan Resolution	Sudah/Belum Terlaksana Has been/not yet implemented	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by the Management
o. Aktivitas Konsultansi Transportasi (70202). Transportation Consulting Activities (70202). Kelompok ini mencakup kegiatan konsultansi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk manajemen keamanan pelabuhan. This group covers transportation consultancy activities, including the submission of views, suggestions, preparation of feasibility studies, planning, supervision, management and research in the field of land, sea and air transportation, including port security management.		
p. Jasa Inspeksi Periodik (71203). Periodic Inspection Services (71203). Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini misalnya pemeriksaan peralatan tekan, <i>pre-shipment</i> , proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor termasuk survei tanpa merusak objek (<i>non destructive testing</i>). Tidak termasuk jasa inspeksi bangunan atau gedung (71101). This group covers inspection activities of a product design, products, services and processes. The activities included in this activity include inspection of pressure equipment, pre-shipment, production process, maintenance or care, and periodic inspections regarding the safety of motorized vehicles, including surveys without damaging objects (nondestructive testing). It does not include building or building inspection services (71101).		
q. Periklanan (73100). Advertising (73100). Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pamer, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (<i>aerial advertising</i>), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan pempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (<i>point of sale</i>), iklan surat (<i>directmail</i>), konsultasi pemasaran. This group includes a variety of advertising services (whether on own or outsourced), including advisory services, creative, advertising material production, media planning and purchasing. The activities include the creation and placement of advertisements in newspapers, magazines and tabloids, radio, television, internet and other media; creation and placement of field advertisements, for example bulletin boards, panels, types of posters and pictures, flyers, pamphlets, circulars, brochures and frames, window advertisements, showroom designs, car and bus advertisements and others; depiction media, namely the sale of space and time for various kinds of application advertising media; aerial advertising, distribution or delivery of advertising material or samples; provision of advertising space on notice boards or billboards and others; creation of booths and other structures and displays; and lead marketing campaigns and other advertising services aimed at attracting and retaining customers, such as product promotion, point of sale marketing, direct mail advertising, marketing consulting.		

KPPS Di Luar RUPS 31 Oktober 2022
 Shareholders' Resolutions Outside the GMS, October 31, 2022

Hasil Keputusan Resolution	Sudah/Belum Terlaksana	Tindak Lanjut oleh Manajemen
	Has been/not yet implemented	Follow-up by the Management
r. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Transportasi Darat Bukan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (77311). Leasing and Leasing Activities without Option Rights for Land Transportation Means of Non-Four Wheeled or More Motorized Vehicles (77311). Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (<i>operational leasing</i>) semua jenis alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya, seperti sepeda motor, caravan, camper, <i>railroad vehicle</i> dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha persewaan peti kemas (<i>container</i>). Persewaan alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam subgolongan 4922, 4942 dan 4943. Penyewaan alat transportasi darat kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil, bus, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya masuk dalam 77100. Penyewaan sepeda dicakup dalam 77210. This group includes leasing and leasing activities without option rights (<i>operational leasing</i>) of all types of non-motorized land transportation vehicles with four or more wheels (cars, buses, trucks and the like) without operators, such as motorcycles, caravans, campers, railroad vehicles and its kind. This group also covers the container rental business. Renting of land transportation equipment with the operator is included in subgroups 4922, 4942 and 4943. Renting of land transportation equipment for motorized vehicles with four or more wheels (cars, buses, trucks and the like) without an operator is included in 77100. Renting bicycles is included in 77210.	Has been/not yet implemented	
s. Pendidikan Lainnya Swasta (85499). Other Private Education (85499). Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan lainnya yang diselenggarakan swasta yang belum dicakup dalam kelompok 85491 sampai dengan 85498. Termasuk peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga kependidikan serta jasa kursus untuk meninjau ujian profesional, pengajaran membaca cepat, sekolah terbang, pelatihan penjaga keselamatan, pelatihan bertahan hidup dan pelatihan berbicara di depan umum, agribisnis, animasi dan sinema, <i>anouncer</i> , <i>broadcasting</i> , budidaya jangkrik, cargo, <i>entertainment</i> dan <i>modeling</i> , hukum, hukum bisnis, hukum perpajakan, jurnalistik/reporter, kepelautan, komunikasi, master of ceremony (MC), notaris/notariat, pariwisata dan perhotelan, pelayaran (anak buah kapal), penasihat hukum, penyiar, perikanan, pertanian, peternakan, <i>public relation</i> , <i>public speaking</i> , <i>show biz</i> , <i>tours and travel</i> , transportasi udara dan lain-lain. Termasuk juga dalam Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan di luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta yang ikut menyelenggarakan pendidikan terkait dengan topik keteranaganukliran. This group includes other educational activities held by the private sector that are not yet covered in groups 85491 to 85498. This includes competency development for teachers and education personnel as well as course services for reviewing professional exams, teaching speed reading, flying schools, safety guard training, survival training and public speaking training, agribusiness, animation and cinema, announcer, broadcasting, cricket cultivation, cargo, entertainment and modeling, law, business law, tax law, journalism/reporter, maritime, communication, master of ceremony (MC), notary, tourism and hospitality, shipping (ship crew), legal advisers, broadcasters, fisheries, agriculture, animal husbandry, public relations, public speaking, show biz, tours and travel, air transportation and others. Also included in this group are educational activities outside of school organized by the private sector that participate in organizing education related to nuclear topics.	Has been/not yet implemented	

KPPS Di Luar RUPS 31 Oktober 2022
 Shareholders' Resolutions Outside the GMS, October 31, 2022

Hasil Keputusan Resolution	Sudah/Belum Terlaksana	Tindak Lanjut oleh Manajemen
	Has been/not yet implemented	Follow-up by the Management
t. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209). Other Management Consulting Activities (70209).		
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh <i>agronomist</i> dan <i>agricultural economist</i> pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. This group covers provision of assistance with advice, guidance and business operations and other organizational and management matters, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; marketing objectives and policies; human resource planning, practices and policies; scheduling planning and production control. The provision of these business services may include advisory assistance, guidance and operation of various management functions, consulting on the management of agronomists and agricultural economists in the field of agriculture and the like, design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget monitoring procedures, providing advice and assistance for community business and services in planning, organizing, efficiency and supervision, management information and others, including infrastructure investment study services.		
u. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya (46593). Wholesale of Land Transportation Equipment (Not Cars, Motorcycles, and the like), Spare Parts, and Accessories (46593).		
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya. This group includes wholesale trade of various types of non-motor land transportation equipment, whether motorized or not (excluding cars, motorcycles, etc.), including wholesale trade of various types of spare parts and accessories.		
v. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu (78200). Labor Provision Activities for a Specific Time (78200).		
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan tenaga kerja untuk pemberi kerja pada jangka waktu tertentu dalam rangka penambahan tenaga kerja, di mana penyediaan tenaga kerja adalah pegawai tidak tetap atau sementara yang membantu suatu unit. Kegiatan yang diklasifikasikan di sini tidak menyediakan pengawas langsung untuk pekerja yang ditempatkan pada pemberi kerja. Kegiatannya seperti jasa penyediaan tenaga penjaga stand - pameran. This group covers the activity of supplying manpower to employers for a certain period of time in the context of adding manpower, in which the supply of manpower is temporary employees who help a unit. The activities classified here do not provide direct supervisors for workers assigned to employers. Other activities include the provision of maintenance services for booths - exhibitions.		
w. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (78300). Provision of Human Resources and Human Resource Management Functions (78300).		
Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personel. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyediaan jasa pekerja/buruh. This group covers the activities of providing human resources and human resource management services to employers. This activity is devoted at organizing human resources and personnel management tasks. This activity presents the work history of workers in matters related to wages, taxes and financial issues and other resources including service providers workers/ labourers.		

KPPS Di Luar RUPS 31 Oktober 2022
 Shareholders' Resolutions Outside the GMS, October 31, 2022

Hasil Keputusan Resolution	Sudah/Belum Terlaksana Has been/not yet implemented	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by the Management
2. MEMUTUSKAN, untuk menyetujui menyusun kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Keputusan Para Pemegang Saham di atas. DECIDED, to approve the restructuring of all provisions in the Articles of Association of the Company in connection with the changes referred to in item 1 of the Shareholders' Resolution above.	Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 151 tahun 2022 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT LRT Jakarta The decision was immediately effective and has been legally institutionalized through Deed No. 151 of 2022 concerning the Statement of Shareholders' Resolutions Outside the GMS of PT LRT Jakarta.	Has been/not yet implemented

KPPS di Luar RUPS 14 November 2022
 Shareholders' Resolutions Outside the GMS, November 14, 2022

Hasil Keputusan Resolutions	Sudah/Belum Terlaksana Has been/not yet implemented	Tindak Lanjut oleh Manajemen Follow-up by the Management
MEMUTUSKAN, untuk memberhentikan dengan hormat Nyonya TATAK PRAPTI UJIYATI dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada Perseroan, terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham ditandatangani. Sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal Keputusan Para Pemegang Saham, menjadi sebagai berikut:	Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 219 tahun 2022 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LRT Jakarta The decision was immediately effective has been legally institutionalized through Deed No. 219 of 2022 concerning the Statement of Shareholders' Resolutions Outside the Annual General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta.	Has been/not yet implemented

DIREKSI:

Direktur Utama	: Tuan HENDRI SAPUTRA
Direktur	: Tuan ADITIA KESUMA NEGARA
	DALIMUNTHE;
Direktur	: Tuan SAHURDI.

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama: Tuan IWAN TAKWIN;
Komisaris: Tuan ROMY BARENO.

DECIDED, to honorably dismiss Mrs. TATAK PRAPTI UJIYATI from her position as Commissioner of the Company, with the highest gratitude and appreciation for her contribution to the Company, as of the date the Shareholders' Resolution was signed. Therefore, the composition of the Board of Directors and the Board of

Commissioners of the Company as of the date of the Resolution of the Shareholders, is as follows:

BOARD OF DIRECTORS:

President Director	: Mr. HENDRI SAPUTRA
Director	: Mr. ADITIA KESUMA NEGARA
	DALIMUNTHE;
Director	: Mr. SAHURDI.

v

Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 219 tahun 2022 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LRT Jakarta

The decision was immediately effective has been legally institutionalized through Deed No. 219 of 2022 concerning the Statement of Shareholders' Resolutions Outside the Annual General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta.

BOARD OF COMMISSIONERS:

President Commissioner: Mr. IWAN TAKWIN;
Commissioner : Mr. ROMY BARENO.

v: sudah terlaksana / x: Belum terlaksana
v: has been implemented / x: not yet implemented

Dewan Komisaris

BOARD OF COMMISSIONERS

Sebagaimana tertuang dalam *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris dengan nomor dokumen LRTJ-MKJ-SPR-002 menyatakan bahwa Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dengan tetap menunjang tinggi prinsip-prinsip GCG.

KRITERIA KOMISARIS

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota Komisaris meliputi persyaratan formal, persyaratan material dan persyaratan lain. Persyaratan formal yang bersifat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan material yang merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

PERSYARATAN DEWAN KOMISARIS

1. Persyaratan Formal:
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Warga Negara Indonesia;
 - c. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
 - d. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan atau mendaftar pertama kali;
 - e. Berijazah paling rendah Strata-1 (S -1) atau setingkat;
 - f. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - g. Mengajukan permohonan kepada Gubernur; dan
 - h. Mengikuti Uji Kelayakan dan Kepututan (UKK).
2. Persyaratan Material:
 - a. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang usaha dan/atau bidang lainnya yang terkait dengan Perseroan, yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup dan dokumen pendukung lainnya;
 - b. Memiliki integritas, kejujuran, jiwa kepemimpinan dan kompetensi yang tercermin dari pengalaman selama ini;

As stated in the Board Manual of the Board of Directors and Board of Commissioners with document number LRTJ-MKJ-SPR-002, the Board of Commissioners is an organ of the Company that is responsible for conducting general and/or special supervision in accordance with the Company's Articles of Association and providing advice to the Board of Directors in conducting the Company's management activities.

The Board of Commissioners is appointed and dismissed by the GMS, which has the responsibility and authority to supervise management policies, the course of management in general. Supervision and provision of advice are carried out for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company, while upholding the principles of GCG.

COMMISSIONER CRITERIA

Requirements that must be met by a candidate for Commissioner include formal requirements, material requirements, and other requirements. General formal requirements, in accordance with applicable laws and regulations, and material requirements which are requirements that are tailored to the needs and nature of the Company's business.

BOARD OF COMMISSIONERS REQUIREMENTS

1. Formal Requirements:
 - a. Individuals;
 - b. Indonesian citizen;
 - c. Physically and mentally healthy and free from drugs;
 - d. Minimum age of 40 (forty) years old and a maximum of 60 (sixty) years old when proposed or registered for the first time;
 - e. Have a degree of at least Bachelor's Degree or equivalent;
 - f. Provide sufficient time to carry out their duties;
 - g. Submit an application to the Governor; And
 - h. Take the Fit and Proper Test (UKK).
2. Material Requirements:
 - a. Have sufficient knowledge and expertise in the field of business and/or other fields related to the Company, as evidenced by a curriculum vitae and other supporting documents;
 - b. Have integrity, honesty, leadership spirit and competence which is reflected from experience so far;

- c. Memiliki motivasi serta berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan;
 - d. Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. Memahami manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - f. Cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatannya pernah:
 - i) Menjadi Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Perseroan pailit; dan
 - ii) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
3. Persyaratan Lain:
- a. Bukan pejabat negara yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sedang menjabat sebagai Dewan Komisaris periode ke-2 pada Perseroan;
 - c. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan sebagai Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta apabila diangkat sebagai Dewan Komisaris pada Perseroan;
 - d. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan apabila diangkat sebagai Dewan Komisaris pada Perseroan; atau
 - e. Bakal calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara menyatakan bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Aparatur Sipil Negara.

Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari calon anggota Komisaris.

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu.
2. Anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
3. Masa jabatan berakhir apabila:
 - a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Masa jabatannya berakhir.
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Meninggal dunia.
 - f. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

- c. Have high motivation and dedication to advance and develop the Company;
- d. Understand the implementation of Regional Government;
- e. Understand the management of the Company related to one of the management functions;
- f. Capable of performing legal actions, unless within the last 5 (five) years prior to his appointment, he/she was:
 - i) A member of the Board of Directors, Board of Commissioners/Supervisory Board found guilty of causing a Regional Owned Company and/or Company to go bankrupt; And
 - ii) Convicted of committing a crime that is detrimental to state/regional finances, Regional Owned Enterprises, Companies, and/or related to the financial sector.

3. Other Requirements:

- a. Not a state official who is prohibited by law;
- b. Not currently serving the 2nd term of the Board of Commissioners of the Company;
- c. Willing to resign from the position of Director of Regional Owned Enterprises, State Owned Enterprises, and/or Private Owned Enterprises if appointed as Board of Commissioners of the Company;
- d. Willing to resign from other positions that may cause a conflict of interest if appointed as the Board of Commissioners of the Company; or
- e. Prospective candidates with status as State Civil Apparatus declare that they are willing to follow the applicable laws and regulations regarding State Civil Apparatus.

Other requirements as referred to in letter c above, is evidenced by a sufficiently stamped statement letter from the prospective members of the Board of Commissioners.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. The term of office for members of the Board of Commissioners is 3 (three) years, without reducing the right of the GMS to dismiss members of the Board of Commissioners at any time
2. Members of the Board of Commissioners can be reappointed for 1 (one) term of office.
3. The term of office ends when:
 - a. Losing Indonesian citizenship
 - b. Resigned.
 - c. The term of office ends.
 - d. No longer fulfilling the applicable statutory requirements.
 - e. Died.
 - f. Is dismissed based on the resolution of the GMS.

- g. Diberhentikan sewaktu-waktu, sesuai dengan ketentuan dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 46 PP No. 54 Tahun 2017, Pasal 46 Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2018.

LARANGAN DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perseroan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Komisaris yang ditentukan oleh RUPS.
2. Dewan Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
3. Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
4. Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam hutuf c, dikenai sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Komisaris.
5. Dalam hal sebagaimana dimaksud huruf d, tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Komisaris dinyatakan berakhir.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2023 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangi, terdapat perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan, yakni berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) No. 001/KPS/123/III/2023 tanggal 21 Maret 2023, dan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) No. 001/KPS/123/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023.

Berikut kronologi perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana terlampir berikut ini.

Kronologi Perubahan Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan

Chronology of Changes in the Composition of the Company's Board of Commissioners

Komisaris yang Berhenti Menjabat No Longer Serving the Company as Commissioner	Komisaris yang Baru Menjabat Newly Appointed Commissioner	Keterangan Description
Romy Barenco		Diberhentikan dengan hormat sejak tanggal 17 Juli 2023 Honorable discharged since July 17, 2023
	Azas Tigor Nainggolan	Diangkat menjadi Komisaris Perseroan sejak tanggal 21 Maret 2023 Appointed as Commissioner of the Company since March 21, 2023

- g. Is dismissed at any time, in accordance with the provisions and procedures as stipulated in Article 46 PP of Government Regulation No. 54 of 2017, Article 46 of Regulation of the Governor No. 50 of 2018.

PROHIBITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. The Board of Commissioners is prohibited from engaging in transactions that have a conflict of interest and taking personal advantage from the Company's activities, in addition to the salary and facilities it receives as a member of the Commissioner which is determined by the GMS.
2. The Board of Commissioners is prohibited from holding more than 2 (two) positions as members of the Board of Commissioners.
3. The Board of Commissioners is prohibited from holding multiple positions as:
 - a. Members of the Board of Directors in State Owned Enterprises, and/or Private Owned Enterprises;
 - b. Other officials in accordance with the provisions of the laws and regulations; and/or
 - c. Other officials who may give rise to a conflict of interest.
4. Violation of the provisions referred to in letter c, is subject to administrative sanctions in the form of being dismissed from his position as the Board of Commissioners at any time.
5. In the event that the action referred to in letter d is not carried out by the GMS no later than 20 (twenty) working days after the person concerned is appointed to a new position as a member of the Board of Commissioners, the position concerned as the Board of Commissioners is declared ended.

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Throughout 2023 until this Annual Report was signed, there have been changes in the composition of the Company's Board of Commissioners, namely based on Shareholders' Resolution (KPPS) No. 001/KPS/123/III/2023 dated March 21, 2023, and Shareholders' Resolution (KPPS) No. 001/KPS/123/X/2023 dated October 5, 2023.

The following is the chronology of changes in the composition of the Company's Board of Commissioners as attached below.

Kronologi Perubahan Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Perusahaan
 Chronology of Changes in the Composition of the Company's Board of Commissioners

Komisaris yang Berhenti Menjabat No Longer Serving the Company as Commissioner	Komisaris yang Baru Menjabat Newly Appointed Commissioner	Keterangan Description
	Mohamad Pramintohadi Sukarno	Diangkat menjadi Komisaris Perseroan sejak tanggal 05 Oktober 2023 Appointed as Commissioner of the Company since October 05, 2023

Berikut adalah komposisi Dewan Komisaris PT LRT Jakarta per 31 Desember 2023

The composition of the Board of Commissioners of PT LRT Jakarta as of December 31, 2023, is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Iwan Takwin	Komisaris Utama President Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham No. 103/ UT2000/X/2022/0321 tanggal 7 Oktober 2022. Shareholders' Resolution No. 103/ UT2000/X/2022/0321 dated October 7, 2022.	Pertama First
Azas Tigor Nainggolan	Komisaris Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham No. 001/KPS/123/ III/2023 tanggal 21 Maret 2023 Shareholders' Resolution No. 001/KPS/123/III/2023 dated March 21, 2023.	Pertama First
Mohamad Pramintohadi Sukarno	Komisaris Commissioner	Keputusan Para Pemegang Saham No. 001/ KPS/123/X/2023 tanggal 5 Oktober 2023 Shareholders' Resolution No. 001/KPS/123/X/2023 dated October 5, 2023.	Pertama First

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS

Perusahaan memiliki *Board Manual* sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta mengelola hubungan dengan Direksi. *Board Manual* Dewan Komisaris telah ditandatangi oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 30 Juni 2022. Adapun *Board Manual* Dewan Komisaris mengatur tentang:

1. Persyaratan dan komposisi, keanggotaan dan masa jabatan Dewan komisaris
2. Program Pengenalan dan Penilaian Kapabilitas
3. Susunan, tugas dan wewenang Komisaris
4. Mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris
5. Penilaian Kinerja Dewan komisaris
6. Etika Jabatan Dewan Komisaris
7. Organ pendukung Dewan komisaris

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Tugas dan tanggung jawab hingga wewenang Dewan Komisaris telah tercantum dalam *Board Manual* Dewan Komisaris. Adapun tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS GUIDELINES

The Company has a Board Manual as a guideline for the Board of Commissioners in carrying out their duties, responsibilities, and authorities as well as managing relations with the Board of Directors. The Board of Commissioners' Board Manual was signed by the Board of Commissioners and Board of Directors on June 30, 2022. The Board of Commissioners' Board Manual regulates:

1. Membership requirements and composition, and term of office of the Board of Commissioners
2. Introduction and Capability Assessment Program
3. Composition, duties, and authorities of the Board of Commissioners
4. Decision-making Mechanism of the Board of Commissioners
5. Performance Assessment of the Board of Commissioners
6. Job Ethics of the Board of Commissioners
7. Supporting Organs of the Board of Commissioners

DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The duties, responsibilities, and authorities of the Board of Commissioners have been listed in the Board of Commissioners Manual. The duties and authorities of the Board of Commissioners are:

Tugas Dewan Komisaris

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan dan memberikan persetujuan, nasihat, tanggapan atau pertimbangan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroan, termasuk tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak pada Perseroan secara tepat waktu dan efisien. Persetujuan, nasihat, tanggapan atau pertimbangan yang diberikan Dewan Komisaris berdasarkan pada hasil kajian atau referensi yang diberikan Direksi.
2. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris, yang merupakan bagian dari RKA Perseroan, untuk selanjutnya mendapat pengesahan RUPS.
3. Melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau berdasarkan keputusan RUPS.
4. Bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada RUPS.
5. Memantau efektivitas praktik GCG yang diterapkan oleh Perseroan.
6. Memberikan tanggapan atau pertimbangan serta persetujuan dan menandatangani Rencana Bisnis Perseroan yang dipersiapkan dan disampaikan oleh Direksi.
7. Memberikan tanggapan atau pertimbangan dan menandatangani RKA.
8. Memberikan tanggapan atau pertimbangan bagi RUPS dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
9. Memberikan tanggapan atau pertimbangan atas laporan berkala Direksi serta pada waktu diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
10. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai tanggapan atau pertimbangan mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
11. Melakukan pengawasan dan pemberian nasi hati serta telaah terhadap kebijakan/rancangan sistem pengendalian internal dan pelaksanaannya.
12. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi Perseroan dan pelaksanaannya.
13. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya.
14. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia, khususnya tentang manajemen dan pengembangan karier di Perseroan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di Perseroan dan pelaksanaan kebijakan tersebut.
15. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Duties of the Board of Commissioners

1. Supervise the Company's management policies, and provide approval, advice, feedback, or consideration to the Board of Directors in carrying out the Company's management activities, including regarding important matters regarding changes in the business environment that are expected to impact the Company in a timely and efficient manner. Approval, advice, responses or considerations given by the Board of Commissioners are based on the results of studies or references provided by the Board of Directors.
2. Prepare the annual work plan and budget for the Board of Commissioners, which are part of the Company's Work Plan and Budget, to then obtain approval from the GMS.
3. Carry out the duties, responsibilities, and authorities in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, the applicable laws and regulations, and/or based on the resolution of the GMS.
4. Act in the interests of the Company and be responsible to the GMS.
5. Monitor the effectiveness of GCG practices implemented by the Company.
6. Provide feedback or consideration as well as approval and sign the Company's Business Plan which is prepared and submitted by the Board of Directors.
7. Provide feedback or consideration and sign the RKA.
8. Provide feedback or considerations for the GMS regarding the appointment and dismissal of the Board of Directors.
9. Provide feedback or considerations on the periodic reports of the Board of Directors, and when necessary regarding the development of the Company.
10. Follow the development of the Company's activities, and in the event that the Company shows symptoms of decline, immediately report to the GMS accompanied by comments or considerations regarding corrective steps to be taken.
11. Supervise and provide advice as well as review the internal control system policies/designs and their implementation.
12. Supervise and provide advice on the Company's information technology system policies and their implementation.
13. Supervise and provide advice on risk management policies and their implementation.
14. Supervise and provide advice on Human Resources management policies, particularly regarding management and career development in the Company, promotion systems and procedures, transfers and demotions in the Company and the implementation of these policies.
15. Supervise and provide advice on accounting policies and preparation of financial reports, in accordance with generally accepted Accounting Standards in Indonesia.

16. Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya.
17. Memberikan nasihat tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.
18. Mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.
19. Mengawasi pelaksanaan RKA dan Rencana Bisnis.
20. Mengawasi agar Perseroan dalam mengungkapkan informasi penting kepada Pemegang Saham, serta Instansi Pemerintah terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.
21. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
22. Mengusulkan kepada RUPS, terkait akuntan publik selaku Auditor Eksternal yang akan melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Perseroan.
23. Mengusulkan sistem evaluasi kinerja Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasi yang sesuai bagi anggota Komisaris dan anggota Direksi kepada RUPS. Dalam menjalankan kewajiban ini, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh komite nominasi dan remunerasi.
24. Mengusulkan sistem nominasi dan seleksi bagi calon anggota Komisaris dan anggota Direksi, dan mengajukannya kepada RUPS untuk disahkan. Dalam menjalankan kewajiban ini, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh komite nominasi dan remunerasi.
25. Meminta laporan pertanggungjawaban tugas pengawasan dari Komisaris yang mengundurkan diri sebagai anggota Komisaris, untuk selanjutnya disampaikan kepada RUPS.
26. Memastikan bahwa Auditor Eksternal maupun Auditor Internal dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perseroan dalam rangka melaksanakan tugasnya.
27. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Komisaris sesuai ketentuan perundang-undangan.
28. Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, integritas dan kapabilitas.
29. Menetapkan, mematuhi dan menerapkan ketentuan anti penyuapan di lingkungan Perseroan.
16. Supervise and provide advice on the procurement of goods and services and their implementation.
17. Provide advice on quality and service policies and the implementation of these policies.
18. Supervise and monitor the compliance of the Board of Directors in carrying out applicable laws and regulations and agreements with third parties.
19. Supervise the implementation of Work Plan and Budget and Business Plan.
20. Conduct supervision to ensure the Company discloses important information to Shareholders, as well as related Government Agencies, in accordance with applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.
21. Carry out other supervisory duties determined by the GMS.
22. Propose to the GMS regarding the public accountant as the External Auditor who will conduct an examination of the Company's financial statements.
23. Propose a performance evaluation system for Commissioners and Directors as well as an appropriate remuneration system for members of the Commissioners and members of the Board of Directors to the GMS. In carrying out this obligation, the Board of Commissioners may be assisted by the nomination and remuneration committee.
24. Propose a nomination and selection system for prospective members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, and submit it to the GMS for approval. In carrying out this obligation, the Board of Commissioners may be assisted by the nomination and remuneration committee.
25. Request an accountability report on supervisory duties from a Commissioner who resigns as a member of the Board of Commissioners, to be submitted to the GMS.
26. Ensure that the External Auditor as well as the Internal Auditor and the Audit Committee have access to information about the Company in order to carry out their duties.
27. Maintain the confidentiality of information obtained while serving as a Member of the Board of Commissioners, in accordance with statutory provisions.
28. Comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, fairness, integrity and capability.
29. Establish, comply with, and implement anti-bribery provisions within the Company.

Wewenang Dewan Komisaris

1. Memperoleh akses atas informasi Perseroan secara tepat waktu dan lengkap. Khususnya terhadap seluruh informasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pengawasan dalam angka 3.4.3.di atas.

Authorities of the Board of Commissioners

1. Obtain access to Company information in a timely and complete manner. Especially for all information relating to the duties and responsibilities of supervision in point 3.4.3.above.

2. Menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal yang terkait dengan pengurusan dan perkembangan Perseroan kepada Direksi.
3. Menyetujui atau menolak usulan dari Direksi dengan batasan kewenangan Dewan Komisaris.
4. Meminta secara tertulis kepada Direksi untuk memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Auditor Internal.
5. Membentuk Komite yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
7. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan. Pemberhentian sementara itu diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan dari tindakan tersebut.
8. Setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
9. Kewenangan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, pendelegasian dan/atau keputusan RUPS.

PEMBAGIAN TUGAS ANTAR DEWAN KOMISARIS

Pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris diatur sesuai dengan kebijakan Dewan Komisaris.

PROGRAM PENGENALAN BAGI KOMISARIS BARU

Anggota Dewan Komisaris yang baru wajib diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan oleh Direktur Utama atau Komisaris atau pejabat yang ditunjuk. Hal itu tertuang dalam *Board Manual* Dewan Komisaris PT LRT Jakarta.

2. Inquire and ask for clarification on all matters related to the management and development of the Company to the Directors.
3. Approve or reject proposals from the Board of Directors with the limits of the authority of the Board of Commissioners.
4. Request in writing to the Board of Directors to provide information on the results of the examination or the results of carrying out the duties of the Internal Auditor.
5. Establish a Committee that works collectively and functions to assist the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties.
6. If all members of the Board of Directors are suspended, and the Company does not have a single member of the Board of Directors, the Board of Commissioners is temporarily obliged to manage the Company. In such case the Board of Commissioners has the right to grant temporary power to one or more members of the Board of Commissioners at the expense of the Board of Commissioners.
7. Temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors from their positions if the members of the Board of Directors act contrary to the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations, or neglect their obligations, or there is an urgent reason for the Company. The temporary suspension is notified to the person concerned along with the reasons for the said action.
8. At any time during working hours, the Company's office has the right to enter buildings and courtyards, or other places used or controlled by the Company and has the right to examine all books, letters and other evidence, check and match the condition of cash and other things and has the right to all actions that have been carried out by the Board of Directors.
9. Other authorities stipulated by laws and regulations, the Company's Articles of Association, delegation and/or GMS resolutions.

DISTRIBUTION OF DUTIES BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS

The division of duties for each member of the Board of Commissioners is regulated in accordance with the policies of the Board of Commissioners.

INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

New members of the Board of Commissioners shall be provided with an introduction program to the Company by the President Director or Commissioner or a designated official. This is stated in the Board Manual of the Board of Commissioners of PT LRT Jakarta.

Pengenalan Perusahaan bagi Komisaris baru memiliki tujuan untuk memberikan memaparan ruang lingkup Perusahaan dan informasi penting lainnya untuk menunjang peran anggota baru tersebut. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis, ke fasilitas Perseroan, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan. Program pengenalan ini dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.

Sehubungan dengan adanya perubahan komposisi dan susunan Dewan Komisaris di tahun 2023, Perusahaan mengadakan pengenalan Komisaris Baru dengan rincian waktu pelaksanaan dan agenda sebagai berikut:

No.	Hari/Tanggal Day/Date	Waktu Time	Tempat Location	Agenda
1	Selasa, 28 Maret 2023 Tuesday, March 28, 2023	09.00 – 12.00	Ruang Rapat BoD-C lt.5, Gedung MCC LRT Jakarta BoD-C Meeting Room 5th Floor, MCC LRT Jakarta Building	Pengenalan Komisaris PT LRT Jakarta dan Induction Azas Tigor Nainggolan Introduction of PT LRT Jakarta's Commissioner and Induction of Azas Tigor Nainggolan
2	Rabu, 18 Oktober 2023 Wednesday, October 18, 2023	09.00 – 12.00	Ruang Rapat BoD-C lt.5, Gedung MCC LRT Jakarta BoD-C Meeting Room 5th Floor, MCC LRT Jakarta Building	Pengenalan Komisaris PT LRT Jakarta dan Induction Mohamad Pramintohadi Sukarno Introduction of PT LRT Jakarta's Commissioner and Induction of Mohamad Pramintohadi Sukarno

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Berbagai pelatihan telah dilakukan untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya di dalam bidang pengawasan kepada Perusahaan. Untuk itu, Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam kinerja Dewan Komisaris. Adapun rincian mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi Dewan Komisaris pada tahun 2023 terdapat dalam bab 'Profil Perusahaan' Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS DI TAHUN 2023

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pemberian nasihat, saran, arahan dan persetujuan terkait pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, antara lain:

1. Melakukan rapat gabungan dengan dewan direksi sebanyak 11 kali.
2. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional serta usulan prospek usaha yang disusun oleh Direksi sebagaimana tertuang dalam rencana kerja Perusahaan tahun 2023. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan asumsi-

The Company's Introduction for New Commissioners has the objective of providing an exposure on the scope of the Company and other important information to support the role of the new member. The introduction program can be in the form of presentations, meetings, visits to business units, to the Company's facilities, review of Company documents, Or other programs deemed appropriate. This induction program Is carried out no later than 3 (three) months after the appointment of Members of the Board of Commissioners.

In connection with changes in the composition and structure of the Board of Commissioners in 2023, the Company's organized introduction program of new commissioners with details of the implementation time and agenda as follows:

COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Various trainings have been conducted to support the implementation of the Board of Commissioners' duties and responsibilities in the field of supervision to the Company. Thus, the Board of Commissioners has participated in various competency development programs aimed at increasing effectiveness in the performance of the Board of Commissioners. Details regarding the implementation of the competency development of the Board of Commissioners in 2023 are contained in the 'Company Profile' chapter of this Annual Report.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2023

Throughout 2023, the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities by providing advice, suggestions, directions and approval regarding the management of the Company by the Board of Directors, including:

1. Hold joint meetings with the Board of Directors 11 times.
2. Board of Commissioners supervised the operational activities and proposed business outlook prepared by the Board of Directors as set out in the Company's 2023 work plan. The assessment was conducted by considering future global and national macroeconomic

asumsi makroekonomi global dan nasional pada masa mendatang serta target yang realistik dan sangat mungkin dicapai dengan tetap mempertimbangkan rencana jangka menengah dan panjang Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris juga mendukung komitmen Direksi untuk terus membangun nilai usaha serta proses bisnis yang sehat, akuntabel, dan transformasi usaha yang berkelanjutan.

3. Selama periode tahun 2023, Dewan Komisaris turut serta mengawasi implementasi dan mekanisme Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) melalui *Whistle Blowing System* "LRT Jakarta Integritas", unit Pengendalian Gratifikasi, serta *training* anti korupsi sistem manajemen anti penyuapan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka meningkatkan peran pengawasan Dewan Komisaris terhadap Perusahaan, maka Dewan Komisaris telah membentuk organ pendukung di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit. Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap jalannya perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi dan memberikan nasihat yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Peran dan fungsi Komite Audit ini diharapkan mampu secara optimal mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dengan cara memberikan informasi dan rekomendasi yang profesional dan independen untuk kepentingan Perseroan dan para pemangku kepentingan.

Dalam menjalankan program/rencana kerja, Komite Audit menyusun *Key Performance Indicators* (KPI) yang akan menjadi tolok ukur kinerja Komite Audit dalam tahun anggaran 2023. KPI ini disusun berdasarkan kondisi riil yang diperkirakan akan sanggup dicapai oleh Komite Audit, sebagai berikut:

assumptions as well as realistic and achievable targets while taking into account the Company's medium and long term plans. In addition, the Board of Commissioners also supports the Board of Directors' commitment to continue building business value as well as healthy, accountable business processes and sustainable business transformation.

3. During the 2023 period, the Board of Commissioners participated in overseeing the implementation and mechanism of the anti-bribery management system (SMAP) through the Whistle Blowing System "LRT Jakarta Integritas", the Gratification Control unit, and anti-corruption training on the anti-bribery management system.

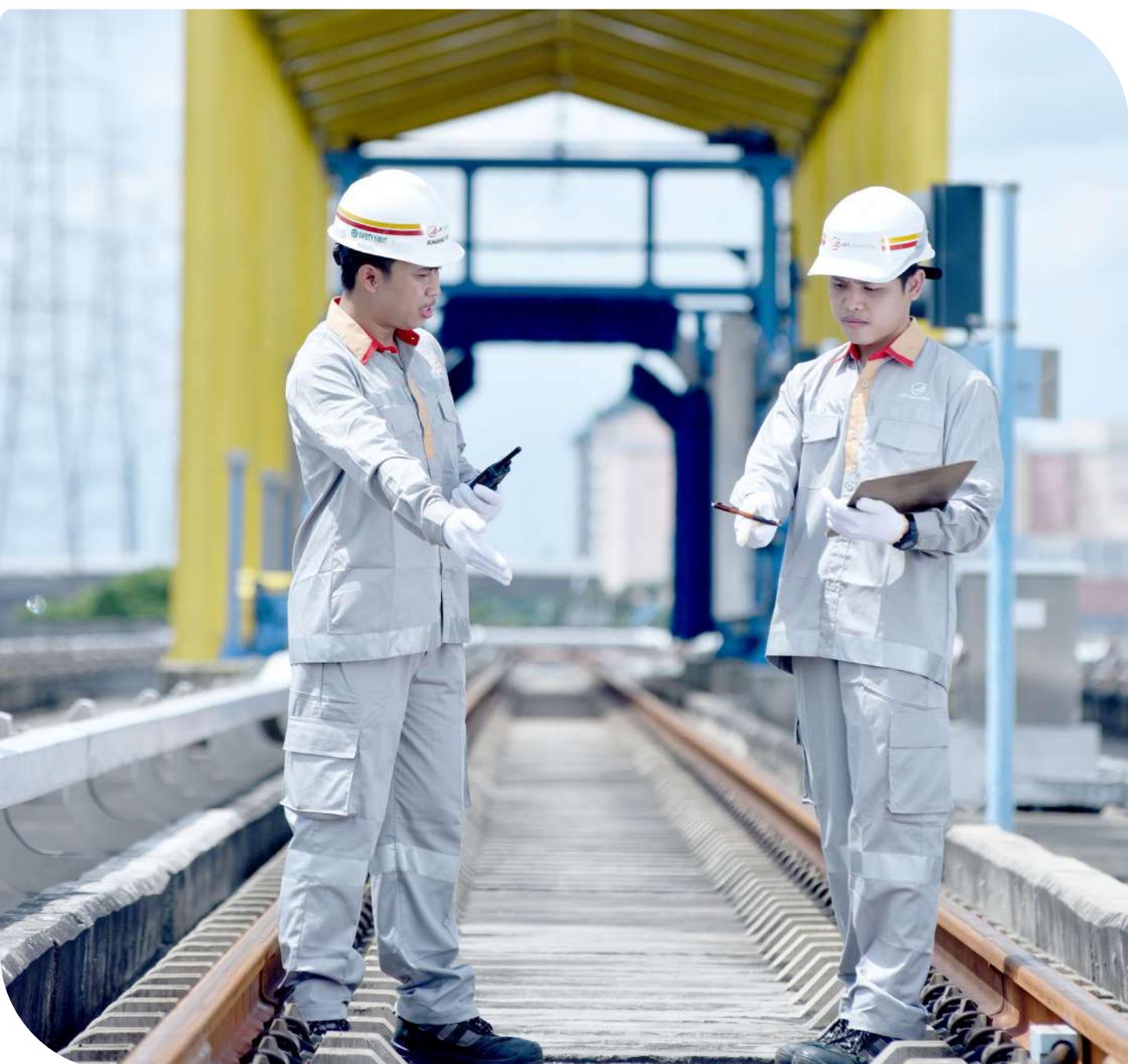
PERFORMANCE ASSESSMENT OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISIONERS

In order to improve the supervisory role of the Board of Commissioners over the Company, the Board of Commissioners has established a supporting organ under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee. The Audit Committee serves as a supporting organ to the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties over the Company's operations conducted by the Board of Directors and providing necessary advice in accordance with the Company's Articles of Association. The role and functions of the Audit Committee are expected to optimally support the implementation of supervisory functions and advisory by providing professional and independent information and recommendations for the benefit of the Company and stakeholders.

In executing its programs/work plans, the Audit Committee develops Key Performance Indicators (KPIs) that will serve as benchmarks for the Audit Committee's performance in the 2023 fiscal year. These KPIs are formulated based on realistic conditions that the Audit Committee is expected to achieve, as follows:

No.	Keterangan Description	KPI	Bobot (%) Weight (%)
1.1 Aspek Sistem Pengendalian Internal Internal Control System Aspect			50
1	Review Penyempurnaan dan Pelaksanaan Review of Completion and Implementation	2 Kali 2 times	15
	Rapat Komite Audit: Audit Committee Meetings:		
2	Jumlah Rapat (Audit Internal/Dewan Komisaris/BOD-BOC) Number of Meetings (Internal Audit/Board of Commissioners/BOD-BOC)	1 Kali/Bulan 1 time/month	10
	Kehadiran dalam Rapat Attendance at Meetings	100%	10
3	Memberi Nasihat/Saran kepada Audit Internal Giving Advice/Suggestions to Internal Audit		
	Jumlah (Minimal) Amount (Min)	2 Kali 2 times	15

No.	Keterangan Description	KPI	Bobot (%) Weight (%)
2.1 Aspek Pelaporan Reporting Aspect			30
1	Menyusun Program Kerja Komite Audit Developing the Audit Committee Work Programme	1 Kali 1 time	10
2	Menyampaikan Pendapat/Saran Kepada Dewan Komisaris Delivering Opinions/Suggestions to Board of Commissioners	1 Kali 1 time	10
3	Menyampaikan Laporan Komite Audit Submitting the Audit Committee Reports	2 Kali 2 times	10
3.1 Aspek Dinamis Dynamic Aspect			20
1	Telaah (<i>Self Assessment</i>) Kinerja Komite Audit Performance Review (<i>Self-Assessment</i>) of the Audit Committee	1 Kali 1 time	10
2	Peran dalam Peningkatan Kinerja: Role in Performance Improvement:		
	GCG	85%	10



DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan, dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Dalam memperoleh efektivitas pengurusan Perseroan, Direksi perlu menyusun, menetapkan dan menerapkan kebijakan yang menjadi tugas Utama dan kewenangan Direksi. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas secara kolegial dan individu untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

KRITERIA DIREKSI

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota Direksi meliputi persyaratan formal, persyaratan material, dan persyaratan lain. Persyaratan formal yang bersifat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan material yang merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perseroan:

1. Persyaratan Formal

Individu yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, yang dapat menjadi anggota Direksi , sebagai berikut:

- a. Orang perseorangan;
- b. Warga Negara Indonesia (WNI);
- c. Sehat secara jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
- d. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diajukan atau mengajukan diri sebagai Direksi;
- e. Berpendidikan minimal Strata Satu (S1) atau setingkat;
- f. Menyampaikan surat permohonan (lamaran) kepada Gubenur; dan
- g. Mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK).

The Board of Directors is a Company Organ that is authorized and fully responsible for managing the Company for the benefit of the Company, in accordance with the goals and objectives of the Company, and represents the Company both inside and outside the court on all matters and events with restrictions as stipulated in the Company's Articles of Association, laws and regulations, and/or GMS resolutions.

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS. In obtaining the effectiveness of the Company's management, the Board of Directors needs to formulate, determine, and implement policies which are the main task and authority of the Board of Directors. The Board of Directors is fully responsible for carrying out tasks collectively and individually for the interests and business of the Company.

DIRECTORS CRITERIA

The requirements that must be met by a candidate for members of the Board of Directors include formal requirements, material requirements, and other requirements. Formal requirements that are general in nature, in accordance with applicable laws and regulations, and material requirements, which are requirements that are tailored to the needs and nature of the Company's business:

1. Formal Requirements

Individuals who can be appointed as members of the Board of Directors are individuals who are capable of carrying out legal actions. Therefore, those who can become members of the Board of Directors are as follows:

- a. Individuals;
- b. Indonesian citizens (WNI);
- c. Physically and mentally healthy and free from drugs;
- d. Minimum age of 35 (thirty five) years old and a maximum of 55 (fifty five) years old, at the time of submission or self-proposed as a member of the Board of Directors;
- e. Minimum education of Bachelor's Degree (S1) or equivalent;
- f. Submit a letter of application (application) to the Governor; And
- g. Take the Fit and Proper Test (UKK).

2. Persyaratan Material

Persyaratan material Direksi, sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang usaha Perseroan;
- b. Memiliki integritas, jiwa kepemimpinan dan kompetensi yang tercermin dari pengalaman selama ini;
- c. Memiliki motivasi serta berdedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan;
- d. Memiliki pengalaman kepemimpinan dalam sebuah unit usaha minimal 5 (lima) tahun di bidang yang sesuai dengan Perseroan.
- e. Cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - i) Menjadi Direksi atau anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perseroan dinyatakan pailit; dan
 - ii) Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara/daerah, Badan Usaha Milik Daerah, perseroan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

3. Persyaratan Lain

Persyaratan lain Direksi, sebagai berikut:

- a. Bukan anggota dan/atau pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;
- b. Bukan pejabat negara yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah;
- d. Tidak sedang menjabat sebagai Direksi selama 2 (dua) periode pada Perseroan;
- e. Bakal calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara menyatakan bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Aparatur Sipil Negara.

MASA JABATAN DIREKSI

Adapun masa jabatan Direksi berdasarkan *Board Manual* adalah:

1. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali;
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
3. Dalam keadaan tertentu, Gubernur dapat mengambil keputusan di luar RUPS untuk mengangkat Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Material Requirements

The material requirements of the Board of Directors are as follows:

- a. Have knowledge and expertise in the Company's business sector;
- b. Have integrity, leadership spirit and competence which is reflected from experience so far;
- c. Have high motivation and dedication to advance and develop the Company;
- d. Have leadership experience in a business unit for a minimum of 5 (five) years in a field that suits the Company.
- e. Capable of performing legal actions, unless within 5 (five) years prior to his appointment, he/she was:
 - i) A member of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners/Supervisory Board who are found guilty of causing a Regional Owned Enterprise and/or company to be declared bankrupt; And
 - ii) Convicted of committing a crime that caused losses to state/regional finances, regionally owned enterprises, companies and/or those related to the financial sector.

3. Other Requirements

Other requirements for the Board of Directors are as follow:

- a. Not a member and/or administrator of a political party and/or a candidate for a member of the legislature and/or a member of the legislature;
- b. Not a state official who is prohibited by law;
- c. Not a candidate for head/deputy regional head and/or head/deputy regional head;
- d. Not currently serving as a Director for 2 (two) periods in the Company;
- e. Prospective candidates with the status of State Civil Apparatus must declare that they are willing to follow the applicable laws and regulations related to State Civil Apparatuses.

TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF DIRECTORS

The term of office of the Board of Directors based on the *Board Manual* is as follows:

1. Members of the Board of Directors are appointed for a certain period of time and can be reappointed;
2. Members of the Board of Directors are appointed by the GMS, for a period of 4 (four) years without reducing the right of the GMS to dismiss them at any time;
3. In certain circumstances, the Governor may make a decision outside the GMS to appoint the Board of Directors in accordance with the provisions of the laws and regulations.

4. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Masa Jabatannya berakhir;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - f. Diberhentikan sewaktu-waktu, yang wajib disertai dengan alasan pemberhentian tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana diatur dalam PP No. 54 Tahun 2017 dan Pergub No.5 Tahun 2018.
5. Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Gubernur dapat mengangkat Direksi sementara sampai diangkatnya pejabat Direksi yang definitif, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan atau Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah. Pengangkatan sementara anggota Direksi paling lama untuk 3 (tiga) bulan.
6. Dalam hal pengangkatan Direktur dan/atau Komisaris anak perusahaan BUMD masih dalam proses persetujuan Gubernur, Direktur dan/atau Komisaris anak perusahaan BUMD diangkat secara definitif oleh RUPS anak perusahaan BUMD, sekurang-kurangnya sampai diterbitkannya persetujuan oleh Gubernur DKI Jakarta.
7. Dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga) puluh hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan
8. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
10. Bagi anggota Direksi yang karena masa jabatannya berakhir, 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, wajib menyusun laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan.Terhadap sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatan, wajib dilaporkan.
11. Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud huruf i di atas, Dewan Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada RUPS, sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir
4. The position of a Member of the Board of Directors ends when:
 - a. The term of office ends;
 - b. Resigned;
 - c. No longer fulfilling statutory requirements;
 - d. Died;
 - e. Dismissed based on the decision of the GMS;
 - f. Dismissed at any time, which must be accompanied by reasons for dismissal, without prejudice to provisions regarding the procedure for dismissal as stipulated in Government Regulation No. 54 of 2017 and Regulation of the Governor No. 5 of 2018.
5. In the event that the position of a member of the Board of Directors ends as referred to in letter d, the Governor may appoint a temporary Board of Directors until a definitive member of the Board of Directors is appointed, unless otherwise stipulated in the Company's Articles of Association or Regional Regulations governing Regionally Owned Enterprises. Temporary appointment of members of the Board of Directors is for a maximum of 3 (three) months.
6. In the event that the appointment of the Director and/or Commissioner of a BUMD subsidiary is still in the process of being approved by the Governor, the Director and/or Commissioner of a BUMD is definitively appointed by the GMS of a BUMD subsidiary, at least until approval is issued by the Governor of DKI Jakarta.
7. With due observance of the Company's Articles of Association, if for any reason the position of one or more or all members of the Board of Directors is vacant, then within 30 (thirty) days after the vacancy occurs, a GMS must be held to fill the vacancy and taking into account the provisions of laws and regulations and Company Articles of Association
8. If for any reason all the positions of members of the Board of Directors are vacant, then for the time being the Company is managed by members of the Board of Commissioners who are appointed by the meeting of the Board of Commissioners.
9. Members of the Board of Directors may be temporarily dismissed by the Board of Commissioners by stating the reasons with written notification to the member of the Board of Directors concerned.
10. For members of the Board of Directors whose term of office ends, 3 (three) months prior to the end of their term of office, they are required to prepare a report on the management of end of term assignments. Regarding the remaining implementation of management duties that have not been reported, no later than 1 (one) month after the end of the term of office, it is mandatory reported.
11. Based on the report on management of the final term of office as referred to in letter i above, the Board of Commissioners is required to submit an assessment and recommendation on the performance of the Board of Directors to the GMS, as a basis for the consideration of the GMS to extend or dismiss members of the Board of Directors. Reports on the management of the final

masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

12. Apabila terjadi perubahan susunan anggota Direksi karena pengangkatan, pergantian dan pemberhentian, maka Perseroan wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Jika pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka dapat berakibat pada penolakan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap setiap permohonan yang dilakukan atau pemberitahuan yang disampaikan dari Perseroan yang belum tercatat dalam daftar perseroan.

KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun 2023 sampai dengan Laporan Tahunan ini ditandatangani, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Direksi Perusahaan. Berikut disampaikan komposisi Direksi PT LRT Jakarta per 31 Desember 2023.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Jabatan Term of Office
Hendri Saputra	Direktur Utama President Director	Akta PKPS No. 1 tanggal 3 Januari 2022 Deed of PKPS No. 1 dated January 3, 2022	Pertama First
Sahurdi	Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Director of Finance and Business Support	Akta PKPS PT LRT Jakarta No. 22 tahun 2022 Deed of PT LRT Jakarta PKPS No. 22 of 2022	Pertama First
Aditia Kesuma Negara	Direktur Operasi dan Pengembangan Director of Operations and Development	Akta PKPS No. 1 tanggal 3 Januari 2022 Deed of PKPS No. 1 dated January 3, 2022	Pertama First

PEDOMAN DIREKSI

Perusahaan memiliki *Board Manual* sebagai pedoman Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya atas pengelolaan Perusahaan. *Board Manual* Direksi telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 30 Juni 2022. Adapun *Board Manual* Direksi mengatur tentang:

1. Kebijakan Umum
2. Persyaratan dan Komposisi, Keanggotaan dan Masa Jabatan Direksi
3. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
4. Susunan, Tugas dan Wewenang Komisaris
5. Hak Direksi
6. Mekanisme Rapat Direksi dan Pengambilan Keputusan
7. Penilaian Kinerja Direksi
8. Etika Jabatan Direksi
9. Fungsi Struktural Direksi

assignments of members of the Board of Directors whose term of office ends is carried out after the results of an audit with a specific purpose or an annual audit from a public accounting firm and submitted to the annual GMS.

12. If there is a change in the composition of the members of the Board of Directors due to appointment, replacement and dismissal, the Company is required to notify the change in members of the Board of Directors to the Minister of Law and Human Rights to be recorded in the register of the Company within a period of no later than 30 (thirty) days from the date of the resolution of the GMS. If the notification has not been made, it may result in the rejection of the Minister of Law and Human Rights of any requests made or notifications submitted from companies that have not been recorded in the list of companies.

COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Throughout 2023 until this Annual Report was signed, there has been no change in the composition of the Company's Board of Directors. The following is the composition of the Board of Directors of PT LRT Jakarta as of December 31, 2023.

BOARD OF DIRECTORS GUIDELINES

The Company has a Board Manual as a guideline for the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities, as well as their authority over the management of the Company. The Board of Directors Manual was signed by the Board of Commissioners and Directors on June 30, 2022. The Board of Directors Manual regulates:

1. Public policy
2. Requirements and Composition, Membership and Term of Office of the Board of Directors
3. Introduction and Capacity Building Program
4. Composition, Duties, and Authorities of the Commissioners
5. Rights of the Board of Directors
6. Meetings and Decision Making Mechanism of the Board of Directors
7. Performance Assessment of the Board of Directors
8. Job Ethics of the Board of Directors
9. Structural Function of the Board of Directors

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

A. Tugas dan wewenang kolegial Direksi, sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi dan strategis Perseroan.
2. Menyusun Rencana Bisnis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai rencana bisnis yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
3. Menyusun RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKA yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.
4. Menjalankan Program Kerja sesuai dengan RKA yang sudah ditetapkan/disahkan dengan tetap mengacu pada Rencana Bisnis.
5. Menetapkan struktur/susunan organisasi Perseroan sesuai kebutuhan, dengan penetapan tugas, kewajiban, tanggung jawab untuk setiap jabatan.
6. Menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam Perseroan.
7. Menetapkan sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan jabatan (struktural) yang diterapkan secara objektif dan transparan.
8. Menetapkan target kinerja berdasarkan RKA dan diturunkan secara berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural) di organisasi.
9. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-unit di bawah Direksi
10. Mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang layak, dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian Perseoran.
11. Menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan Standar Operasional Baku (SOP) untuk proses bisnis inti (*core business*) Perseroan yang ditinjau dan disempurnakan secara berkala.
12. Memberikan respon terhadap usulan peluang bisnis yang berpotensi meningkatkan pendapatan Perseroan, penghematan/efisiensi Perseroan, pendayagunaan aset, dan manfaat lainnya.
13. Merespon isu-isu terkini dari eksternal mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya, secara tepat waktu dan relevan.
14. Menerapkan sistem tentang teknologi informasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
15. Melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan, dengan menetapkan kebijakan, SOP serta Standar Pelayanan Minimum (SPM).

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

A. The collegial duties and authorities of the Board of Directors are as follows:

1. Determine the vision, mission and strategy of the Company.
2. Prepare a Business Plan containing goals and objectives to be achieved within a period of 5 (five) years. The Board of Commissioners reviews and provides opinions regarding the business plan prepared by the Board of Directors prior to co-signing.
3. Prepare Work Plan and Budget, which is an annual elaboration of the Business Plan. The Board of Commissioners reviews and provides opinions regarding the Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors prior to co-signing.
4. Execute the Work Program in accordance with the Work Plan and Budget that has been determined/approved by still referring to the Business Plan.
5. Determine the structure/organizational structure of the Company as needed, with assignments, obligations, and responsibilities for each position.
6. Place employees at all levels of positions according to job specifications and having a succession plan for all positions within the Company.
7. Establish a system/guideline for measuring and evaluating performance for units and positions (structural) that is applied objectively and transparently.
8. Set performance targets based on the Work Plan and Budget and cascade down in stages at the unit, sub-unit and position levels within the organization (structural) in the organization.
9. Perform analysis and evaluation of performance achievements for positions/units under the Board of Directors
10. Develop HR, assess performance and provide appropriate remuneration, and build an HR environment that effectively supports the Company's achievements.
11. Establish operational policies and Standard Operating Standards (SOP) for the Company's core business processes which are regularly reviewed and refined.
12. Respond to proposed business opportunities that have the potential to increase the Company's revenue, the Company's savings/efficiency, asset utilization, and other benefits.
13. Respond to current issues from external regarding changes in the business environment and their problems, in a timely and relevant manner.
14. Implement a system of information technology in accordance with established policies.
15. Implement a product and service quality improvement system, by establishing policies, SOPs, and Minimum Service Standards (SPM).

- 16. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi Perseroan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.
- 17. Menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak Perseroan (*subsidiary governance*) dan/atau Perseroan patungan.
- 18. Menetapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK).
- 19. Menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 20. Menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi mengamankan investasi dan aset Perseroan.
- 21. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal.
- 22. Menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga.
- 23. Menetapkan pelaksanaan hubungan dengan *stakeholders* termasuk menetapkan prosedur tertulis untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan *stakeholders*.
- 24. Melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mendukung keberlanjutan operasi Perseroan.
- 25. Menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya disebabkan benturan kepentingan.
- 26. Membuat dan menyampaikan laporan, yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan. Laporan bulanan dan triwulan terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan tahunan disampaikan kepada RUPS untuk disahkan, informasi dalam laporan tahunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.
- 27. Mengelola Perseroan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham/pemilik modal.
- 28. Memberikan perlakuan yang sama (*fairness*) dalam memberikan informasi kepada Pemegang Saham dan anggota Dewan Komisaris.
- 29. Menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
- 30. Menyediakan akses serta penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS agar dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
- 31. Mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, integritas dan kapabilitas, serta nilai-nilai Perseroan.
- 16. Carry out the procurement of goods and services that are profitable for the Company, both in terms of price and quality of these goods and services.
- 17. Establish regulatory policies for subsidiary companies (*subsidiary governance*) and/or joint venture companies.
- 18. Establish accounting policies and preparation of financial reports in accordance with generally accepted financial accounting standards in Indonesia (SAK).
- 19. Implement risk management in accordance with established policies.
- 20. Establish and implement an internal control system to protect the Company's investments and assets.
- 21. Follow up on the results of examination by the Internal Auditor and External Auditor.
- 22. Establish mechanisms to maintain compliance with laws and regulations, and agreements with third parties, and carry out applicable laws and regulations and agreements with third parties.
- 23. Determine the implementation of relations with stakeholders including establishing written procedures to accommodate and follow up on stakeholder complaints.
- 24. Carry out social responsibility to support the sustainability of the Company's operations.
- 25. Establish policies regarding mechanisms for the Board of Directors and structural officials to prevent personal and other parties from taking advantage due to conflicts of interest.
- 26. Prepare and submit reports, which consist of monthly reports, quarterly reports and annual reports. Monthly and quarterly reports consist of operational activity reports and financial reports submitted to the Board of Commissioners. The annual report is submitted to the GMS for approval, the information in the annual report is in accordance with the applicable laws and regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.
- 27. Manage the Company and be accountable for the implementation of their duties to Shareholders/owners of capital.
- 28. Provide equal treatment (*fairness*) in providing information to Shareholders and members of the Board of Commissioners.
- 29. Organize GMS in accordance with the procedures stipulated in the Company's Articles of Association, and laws and regulations.
- 30. Provide access as well as complete explanation and accurate information regarding the implementation of the GMS so that they can exercise their rights based on the Company's Articles of Association and laws and regulations.
- 31. Comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations, and must implement the principles of transparency, independence, accountability, responsibility, fairness, integrity and capability, as well as the values of the Company.

32. Membuat dan memelihara daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi.
33. Memberikan izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan serta mendapat salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.
34. Menandatangani kontrak manajemen sebagai perjanjian Direksi dengan Pemegang Saham mengenai peran dan tanggung jawabnya.
35. Menandatangani ikatan hukum dengan rekan bisnis.
36. Meminta persetujuan RUPS dalam hal melakukan kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perseroan berupa tanah dan/atau bangunan, dengan skema kerja sama operasi dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
37. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan terbukti lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali apabila anggota Direksi yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
- i) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya.
 - ii) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - iii) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
 - iv) Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut.
38. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dankekayaan Perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
39. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada angka 38 di atas, berlaku juga bagi anggota Direksi yang lalai dan sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun terakhir sebelum Perseroan dinyatakan pailit.
40. Mengatur pendeklegasian wewenang Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang Direktur yang khusus ditunjuk atau memberikan kuasa kepada seorang atau beberapa orang karyawan Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain.
41. Dapat bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS tidak ditetapkan atau menunjuk likuidator dalam pembubarannya Perseroan.
42. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau yang ditetapkan oleh RUPS dan peraturan perundang-undangan.
43. Menunjuk salah seorang anggota Direksi sebagai penanggung jawab implementasi GCG.
32. Create and maintain a register of Shareholders, a Special Register, minutes of GMS and minutes of meetings of the Board of Directors.
33. Give permission to Shareholders to examine the list of Shareholders, Special Register, GMS minutes and annual reports and obtain copies of the GMS minutes and annual reports.
34. Sign a management contract as an agreement between the Board of Directors and Shareholders regarding their roles and responsibilities.
35. Sign a legal bond with a business partner.
36. Request approval from the GMS in terms of carrying out cooperation in the form of utilizing fixed assets owned by the Company in the form of land and/or buildings, with a joint operation scheme and cooperation for a period of more than 10 (ten) years.
37. Each member of the Board of Directors is personally responsible if the person concerned is proven negligent in carrying out his duties for the interests and business of the Company, unless the member of the Board of Directors concerned can prove that:
- i) The loss was not due to his/her fault or negligence.
 - ii) Has conducted management in good faith, and prudence for the benefit, and in accordance with the goals and objectives of the Company.
 - iii) Does not have a conflict of interest, either directly or indirectly, for management actions that result in losses
 - iv) Has taken action to prevent the loss.
38. In the event that bankruptcy occurs due to the fault or negligence of the Board of Directors, and the Company's assets are not sufficient to cover losses due to the bankruptcy, each member of the Board of Directors is jointly and collectively responsible for the said loss.
39. The responsibility referred to in number 38 above also applies to members of the Board of Directors who are negligent and have not served for the last 5 (five) years before the Company was declared bankrupt
40. Regulate the delegation of authority of the Board of Directors to represent the Company in and out of Court, to one or several Directors who are specifically appointed or give power of attorney to one or several employees of the Company, either alone or jointly or to other bodies.
41. Can act as a liquidator if the GMS resolution does not stipulate or appoint a liquidator in the dissolution of the Company.
42. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Company's Articles of Association, or determined by the GMS and laws and regulations.
43. Appoint a member of the Board of Directors as the person in charge of GCG implementation.

44. Menerapkan GCG, *Risk Management* dan *Compliance* terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.
45. Menerapkan pengendalian anti penyuapan sesuai dengan sistem manajemen yang ditetapkan, secara konsisten dan berkelanjutan.
46. Menerapkan pengendalian sistem manajemen lain sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Perseroan.
47. Membahas dan memberikan persetujuan terhadap rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi yang dibahas secara intens dalam Rapat Direksi.

B. Pendeklasian Wewenang Direksi

1. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/ atau Keputusan RUPS. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang mendapat penunjukkan secara tertulis dari Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili Perseroan adalah anggota Direksi yang memiliki wewenang untuk mewakili Perseroan dalam melaksanakan tindakan atau kewenangan tersebut, sesuai dengan pembidangan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam angka 2.4.3. di bawah dan/atau mendapat penunjukkan secara tertulis dari Direktur Utama.
4. Ketentuan angka 3. di atas, berlaku juga untuk anggota Direksi lain, yang karena sebab apapun juga, tidak hadir atau berhalangan, maka anggota Direksi tersebut dapat menunjuk anggota Direksi lainnya untuk mewakili, sebatas kewenangan yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam angka 2.4.3. di bawah.
5. Dalam hal angka 3. di atas, Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, tanpa pemberitahuan dan/ atau informasi paling lama 3 (tiga) hari kerja, karena sebab apapun juga yang dalam pelaksanaannya dinilai dan dapat dibuktikan oleh seluruh anggota Direksi dapat menghambat kinerja Perseroan, maka terhadap hal tersebut, wajib dibahas dalam rapat

44. Implement integrated GCG, Risk Management and Compliance in a consistent and sustainable manner.
45. Implement anti-bribery controls in accordance with the established management system, consistently and continuously.
46. Implement other management system controls according to the needs and interests of the Company.
47. Discuss and give approval for plans for promotion, and transfer of one level of position under the Board of Directors, which are discussed intensely at the Board of Directors Meeting.

B. Delegasi of Authorities of the Board of Directors

1. The Board of Directors has the authority to represent the Company, inside and outside the Court, and perform all actions, both regarding management and regarding ownership, as well as binding the Company with other parties and/or other parties with the Company, with restrictions in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, and/or GMS resolution. The GMS can reduce the limitations on the actions of the Board of Directors that are regulated in the Company's Articles of Association, or determine other restrictions on the Board of Directors other than those regulated in the Company's Articles of Association.
2. The President Director has the right and authority to act for and on behalf of the Board of Directors and represent the Company.
3. In the event that the President Director is absent or unavailable for any reason whatsoever, which does not need to be proven to a third party, then another member of the Board of Directors who has been appointed in writing by the President Director has the right and authority to act on behalf of the Board of Directors and represent the Company. The Board of Directors who has the authority to represent the Company in carrying out these actions or powers, in accordance with the division of duties and authorities as stipulated in number 2.4.3. under and/or obtain a written appointment from the President Director.
4. Provisions in point 3 above also apply to other members of the Board of Directors, who for whatever reason are absent or unable to attend, the said member of the Board of Directors may appoint another member of the Board of Directors to represent, to the extent of his authority, as stipulated in point 2.4. 3. below.
5. In the case of point 3 above, the President Director is absent or unable to attend, without notification and/or information no later than 3 (three) working days, due to any reason, which in its implementation is assessed and can be proven by all members of the Board of Directors may hinder the performance The Company, then regarding this matter, must be

bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris untuk dapat diputuskan, Direktur yang berwenang menjadi pelaksana tugas sementara Direktur Utama.

6. Dalam hal angka 5. di atas, terjadi pada Direktur selain Direktur Utama, maka yang berwenang mewakili Direktur tersebut adalah Direktur Utama.
7. Pendeklegasian angka 3. dan 4. di atas, khusus melalui penunjukan tertulis, harus melalui mekanisme formal sesuai dengan ketentuan surat-menyurat Perseroan.
8. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi juga berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam surat kuasa khusus, kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud seorang atau lebih adalah pihak yang berasal dari internal Perseroan atau eksternal Perseroan, yang memiliki kapasitas dan kapabi litas untuk melakukan perbuatan tertentu dengan syarat yang ditentukan Direksi.
9. Pemberi delegasi tetap bertanggung jawab terhadap hasil akhir, sehingga pemberi delegasi harus memastikan anggota Direksi yang diberikan delegasi merupakan Direksi yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melaksanakan tindakan yang didelegasikan tersebut, serta yang didelegasikan harus dengan itikad baik dan profesional, melakukan sebagian atau seluruh tugas dan kewenangan yang diberikan tersebut. Apabila ternyata/dibuktikan pelaksanaan delegasi dilakukan tidak sesuai ketentuan internal dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima delegasi.
10. Terdapat 2 (dua) bentuk pelaksanaan jabatan, dalam pendeklegasian angka 3) dan 4), yaitu:
 - i) Jabatan Pelaksana Harian (Plh) didelegasikan kepada pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Contoh oleh karena melakukan kunjungan dinas ke daerah atau ke luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, cuti, menunaikan ibadah haji, dirawat karena sakit atau definitif lain yang serupa
 - ii) Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) didelegasikan kepada pejabat yang melaksanakan tugas rutin pejabat definitif yang berhalangan tetap, oleh karena berakhirnya masa jabatan.

Terhadap tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan sebagai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi, maka dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab tersebut dilakukan tanpa pendeklegasian, sebagaimana diatur dalam angka 2.4.3. di bawah.

discussed in a joint meeting between the Board of Directors and the Board of Commissioners, to decide the Director who is authorized to act as executor of the President Director's temporary duties.

6. In the event that point number 5 above occurs to a Director other than the President Director, then the person authorized to represent the Director is the President Director.
7. Delegation of numbers 3 and 4 above, specifically through a written appointment, must go through a formal mechanism in accordance with the provisions of the Company's correspondence.
8. Without reducing the responsibilities of the Board of Directors, the Board of Directors is also entitled to certain actions by appointing one or more proxies, with conditions specified by the Board of Directors in a special power of attorney. The authority given must be carried out in accordance with the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. What is meant by one or more proxies are those coming from the Company's internal or external, who have the capacity and capability to carry out certain actions with conditions determined by the Board of Directors.
9. The principal remains responsible for the final results, so the delegation must ensure that the members of the Board of Directors who are delegated are Directors who have the capacity and capability to carry out the delegated actions, and those who are delegated must be in good faith and professional, carry out some or all of the tasks and the powers conferred. If it is proven that the implementation of the delegation was carried out not in accordance with internal regulations and/or applicable laws and regulations, then it is the full responsibility of the proxy/ies.
10. There are 2 (two) forms of position execution, in the delegation of point numbers 3) and 4), namely:
 - i) The position of Daily Executor (Plh) is delegated to officials who carry out routine tasks from definitive officials who are temporarily absent, for example due to making official visits to regions or abroad, attending education and training/courses, taking leave, performing the pilgrimage, being treated for illness, or other similar definitive
 - ii) The Position of Acting Officer (Plt) is delegated to officials who carry out the routine duties of definitive officials who are permanently absent due to the end of their term of office.

Regarding the duties, authorities and responsibilities that have been determined as the duties, authorities and responsibilities of each member of the Board of Directors, then in carrying out the duties, authorities, and responsibilities it is carried out without delegation, as stipulated in point 2.4.3. below.

11. Pendeklegasian wajib mempertimbangkan benturan kepentingan terhadap dampak transaksi.

Contoh:

Apabila dalam suatu aktivitas/kegiatan/proyek, yang wajib menandatangani persetujuan pembayaran pengeluaran uang adalah Direktur Utama dan Direktur Keuangan, maka pada saat Direktur Utama berhalangan oleh sebab apapun dan memberikan pendeklegasian kepada pejabat sementara. Pejabat sementara sebagai pengganti Direktur Utama, tidak dapat diberikan kepada Direktur Keuangan.

HAK DIREKSI

Direksi memiliki hak-hak atas fungsinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola Perusahaan, sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* PT LRT Jakarta. Adapun hak Direksi di antaranya:

1. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan termasuk memberikan informasi kepada publik.
2. Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta tindakan yang mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan sesuai batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan.
3. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Perseroan.
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para karyawan Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perseroan berdasarkan Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk.
7. Menerima penghasilan (gaji, tunjangan, fasilitas dan/atau tantiem atau insentif pekerjaan) yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
8. Memperoleh hak cuti yang ketentuan lebih lanjut ditetapkan oleh Direksi. Cuti Direktur Utama harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, sedangkan bagi Direksi lainnya harus mendapatkan persetujuan Direktur Utama. Khusus Direksi yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapat izin dari Dewan Komisaris.
9. Memberlakukan kebijakan khusus (*extraordinary*) dalam hal Perseroan berada pada suatu keadaan darurat.
10. Mengundurkan diri dari jabatannya, dengan tetap mengacu pada butir 2.2.3. di atas.
11. Mendapatkan program pengenalan tentang Perseroan, dengan tetap mengacu pada butir 2.3.1. di atas.

11. The delegation shall consider the conflict of interest on the impact of the transaction.

Example:

If in an activity/activities/project, the President Director and the Director of Finance are required to sign the agreement for payment of money, and the President Director is absent for any reason and delegates to a temporary official, it cannot be assigned to the Director of Finance.

RIGHTS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors has rights for its functions in carrying out its duties and responsibilities to manage the Company, as stated in the Board Manual of PT LRT Jakarta. The rights of the Board of Directors include:

1. Represent the Company inside and outside the court, including providing information to the public.
2. Carry out all actions and deeds, both regarding management and ownership, as well as actions that bind the Company to other parties and/or other parties to the Company, in accordance with certain predetermined limits.
3. Establish policies in leading and managing the Company.
4. Regulate the provisions regarding the Company's employment, including the determination of salaries, pensions or old age benefits, and other income for the Company's employees based on the applicable laws and regulations.
5. Appoint and dismiss employees of the Company based on Company Regulations and applicable laws and regulations.
6. Arrange the transfer of powers of the Board of Directors to represent the Company inside and outside the court to a person or several members of the Board of Directors specifically appointed.
7. Receive income (salary, benefits, facilities, and/or bonuses, or work incentives), the amount of which is determined by the GMS, and this authority can be delegated to the Commissioners.
8. Obtain the right to leave of which further provisions are determined by the Board of Directors. The President Director's leave must obtain approval from the Board of Commissioners, while other Directors must obtain the approval of the President Director. Specifically, for Directors who are going to travel overseas, they must obtain permission from the Board of Commissioners.
9. Implement special (*extraordinary*) policies in the event that the Company is in an emergency.
10. Resign from his position, while still referring to point 2.2.3. above.
11. Receive an introduction program about the Company, with reference to point 2.3.1. above.

PEMBIDANGAN DAN URAIAN TUGAS DIREKSI

Perusahaan melakukan pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi agar berjalan secara efektif sesuai bidangnya. Hal itu untuk menjamin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya. Berdasarkan *Board Manual* ruang lingkup dan tanggung jawab masing-masing Direksi adalah sebagai berikut:

DIVISION AND JOB DESCRIPTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company divides the duties and responsibilities of the Board of Directors to run effectively in accordance with their fields. This is to ensure the implementation of duties and responsibilities in accordance with their fields. Based on the Board Manual, the scope and responsibilities of each Director are as follows:

Direktur Utama

President Director

Tujuan jabatan Direktur Utama (*President Director*) adalah:

1. Menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan untuk menjamin keberlangsungan bisnis Perusahaan berdasarkan aturan perundungan yang berlaku serta berdasarkan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
2. Disamping itu, Direktur Utama bertanggung jawab atas organisasi dan tata laksana Direktorat Utama (*Main Directorate*). Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Direktur Utama berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya. Bertugas mengarahkan dan memastikan jalannya Perseroan sesuai visi, misi dan rencana strategis jangka panjang Perseroan serta mematuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Utama memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab
 - a. Menetapkan kebijakan strategis Perseroan yang mencakup seluruh aktivitas Perseroan;
 - b. Koordinasi fungsi-fungsi korporat untuk hal-hal yang terkait dengan penetapan kebijakan dan strategi, pengendalian modal dan alokasi sumber daya serta hubungan pihak luar;
 - c. Penetapan arah, kebijakan, strategi dan rencana strategis serta pengendalian pengelolaan bisnis perkeretaapian *Light Rail Transit* di area DKI Jakarta dan mengarahkan upaya pertumbuhan dengan fokus pada bisnis baru, sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan;
 - d. Perumusan strategi bisnis yang dilakukan bersama dengan pemangku jabatan kunci, penetapan dan pengendalian implementasinya;
 - e. Pengendalian dan koordinasi (secara langsung) penyelenggaraan fungsi seluruh divisi yang berada dibawah Direktorat Utama;
 - f. Memonitor pengelolaan pengembangan citra Perseroan dan komunikasi di dalam dan ke luar Perseroan;
 - g. Memberikan persetujuan rencana audit tahunan;
 - h. Melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kinerja Perseroan.
 - i. Menetapkan budaya Perseroan yang sejalan dengan strategic formulation perusahaan yang berupa visi, misi dan nilai perusahaan;
 - j. Memastikan dijalankannya praktik pengelolaan Perusahaan yang penuh kehati-hatian sesuai ketentuan Tata Kelola Perusahaan (GCG) yang baik untuk menjamin kelangsungan organisasi;
 - k. Memastikan pengelolaan perumusan dan perencanaan program/kebijakan strategis Perusahaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program strategis Perusahaan;
 - l. Menetapkan penerapan Sistem Manajemen K3 dan Keselamatan Perkeretaapian (kebijakan, perencanaan, penyerapan, evaluasi dan program peningkatan keselamatan perkeretaapian) untuk mengurangi potensi risiko dan menghindari bahaya kecelakaan;
 - m. Berkomitmen terhadap penyelenggaraan Sistem Manajemen K3 dan Keselamatan Perkeretaapian;
 - n. Memastikan dan mendukung terselenggaranya Sistem Manajemen K3 dan Keselamatan Perkeretaapian guna tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Wewenang
 - a. Menetapkan kebijakan pengurusan Perseroan.
 - b. Melakukan tindakan untuk dan atas nama Direksi serta Perseroan.
 - c. Melakukan penandatanganan dokumen Perseroan.
 - d. Menetapkan ketentuan pemantauan dan pengendalian kinerja Perseroan.
 - e. Mengatur penyerahan kewenangan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi atau karyawan, untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan.
 - f. Melakukan segala perbuatan dan tindakan lainnya mengenai pengurusan atau pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain, serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Perundang-undangan, dan/atau keputusan RUPS.

Direktur Utama

President Director

The objectives of the position of President Director are as follows:

1. Conduct the Company's management activities, in accordance with the purposes and objectives of the Company, to ensure the continuity of the Company's business based on applicable laws and regulations and based on the principles of Good Corporate Governance.
2. In addition, the President Director is responsible for the organization and management of the Main Directorate in carrying out their duties and responsibilities. The President Director has the authority to determine the Company's management policies within the scope of his duties and responsibilities. The President Director is responsible for directing and ensuring that the Company operates according to the vision, mission, and long-term strategic plans of the Company, and adheres to the principles of Good Corporate Governance.

In carrying out its duties, the President Director has the following responsibilities:

1. Responsibilities

Determine the Company's strategic policies covering all of the Company's activities;

- a. Conduct coordination of corporate functions on matters related to setting policies and strategies, controlling capital, and allocating resources as well as external relations;
- b. Determine the direction, policies, strategies and strategic plans, as well as controlling the management of the Light Rail Transit railroad business in the DKI Jakarta area, and direct growth efforts with a focus on new business, according to the expectations of stakeholders;
- c. Formulate business strategy carried out together with key position holders, determination, and control of its implementation;
- d. Directly control and coordinate the implementation of the functions of all divisions under the Main Directorate;
- e. Monitor the management of the Company's image development and communication within and outside the Company;
- f. Provide approval of the annual audit plan;
- g. Carry out overall supervision of the implementation of the Company's performance.
- h. Establish a corporate culture that is in line with the Company's strategic formulation in the form of vision, mission, and corporate values;
- i. Ensure that the implementation of prudent Company management practices is in accordance with the provisions of Good Corporate Governance (GCG), with the aim to ensure the continuity of the organization;
- j. Ensure that the management of the formulation and planning of the Company's strategic programs/policies, as well as to evaluate and report on the implementation of the Company's strategic programs;
- k. Determine the implementation of the OHS Management System and Railway Safety (policy, planning, absorption, evaluation and program for improving railway safety) to reduce potential risks and avoid accident hazards;
- l. Be committed to the implementation of the OHS Management System and Railway Safety;
- m. Ensure and support the implementation of the OHS Management System and Railway Safety in order to achieve Minimum Service Standards

2. Authorities

- a. Determine the management policy of the Company.
- b. Perform actions for and on behalf of the Board of Directors and the Company.
- c. Sign the Company documents.
- d. Establish provisions for monitoring and controlling the Company's performance.
- e. Regulate the delegation of authority of the Board of Directors to one or several members of the Board of Directors or employees, to make decisions on behalf of the Board of Directors, or represent the Company inside or outside the Court.
- f. Perform all and other actions regarding the management or ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties, and represent the Company inside and outside the Court on all matters and all events, with restrictions as stipulated in the Company's Articles of Association, Laws and Regulations, and/or resolutions of the GMS.

Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis

Director of Finance and Business Support

Tujuan Jabatan Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis adalah:

1. Memastikan rencana strategis bidang keuangan, investasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan pengadaan sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk menyelaraskan antara strategi bisnis Perseroan yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan dengan kegiatan operasional dan anak perusahaan sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan untuk mencapai visi, misi dan rencana strategis Perusahaan.
2. Melakukan pengarahan, pengendalian Perusahaan di bidang pengelolaan keuangan untuk memastikan keberlangsungan Perusahaan dan tercapainya sasaran jangka panjang Perusahaan .

Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab
 - a. Menetapkan kebijakan anggaran, keuangan dan akuntansi Perseroan;
 - b. Perumusan dan perencanaan program/kebijakan strategis atas: pengupayaan sumber pendanaan untuk program rutin; pengendalian risiko, perencanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RKAP dan penyelenggaraan tata laksana perbendaharaan dan administrasi keuangan;
 - c. Mencari sumber dana dari berbagai sumber dana yang dimungkinkan (dana internal, pinjaman, kemitraan, penyertaan modal dan lain-lain) sesuai dengan kebutuhan investasi Perusahaan, melalui pendekatan terhadap sumber dana secara efektif dan efisien;
 - d. Perumusan dan perencanaan program/kebijakan strategis terkait dengan penyusunan laporan keuangan Perusahaan dan pelaporan akuntansi biaya subsidi, non subsidi dan hasil dari kinerja operasi;
 - e. Memastikan skema pendanaan dan ketersediaan alokasi anggaran untuk kejadian tanggap darurat keselamatan, keamanan, dan bencana;
 - f. Mengimplementasikan aspek-aspek *Governance, Risk, and Compliance* dalam pelaksanaan pengelolaan Perseroan;
 - g. Berkoordinasi dengan Direktur Operasi & Pengembangan dalam mendukung pelaksanaan pengembangan bisnis dengan melakukan kajian investasi untuk peluang bisnis dan merumuskan strategi mitigasi risiko investasi;
 - h. Menetapkan kebijakan dan bertanggung jawab dalam sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia, dimulai dari rekrutmen, pengembangan dan penempatan, sistem kompensasi, hubungan industri hingga pemutusan hubungan kerja;
 - i. Merumuskan program internalisasi budaya yang sejalan dengan *strategic formulation* Perseroan.
 - j. Menetapkan standar kompetensi strategis untuk organisasi;
 - k. Menetapkan kebijakan dari sistem pengelolaan tempat kerja serta fasilitas umum perkantoran yang aman dan nyaman;
 - l. Memastikan tersedianya sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mendukung operasional Perusahaan dengan menetapkan dan melaksanakan strategi, rancang bangun (*IT Architecture*), pengembangan serta tata kelola yang sejalan dengan konsep GCG (*Good Corporate Governance*) dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Perseroan;
 - m. Penetapan strategi, kebijakan strategis dan sistem pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
 - n. Menetapkan standar kebijakan pergudangan Perseroan yang efektif dan efisien;
 - o. Menetapkan penerapan Sistem Manajemen K3 dan Keselamatan Perkeretaapian (kebijakan, perencanaan, penyerapan, evaluasi dan program peningkatan keselamatan perkeretaapian) untuk mengurangi potensi risiko dan menghindari bahaya kecelakaan;
 - p. Berkomitmen terhadap penyelenggaraan Sistem Manajemen K3 dan Keselamatan Perkeretaapian;
 - q. Memastikan dan mendukung terselenggaranya Sistem Manajemen K3 dan Keselamatan Perkeretaapian guna tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Wewenang
 - a. Melakukan tindakan pengelolaan portfolio dan investasi keuangan sesuai standar yang berlaku.
 - b. Mengatur ketentuan kebijakan pengelolaan keuangan, manajemen risiko dan melakukan penandatanganan dokumen Perseroan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait strategi pendanaan investasi Perseroan.
 - d. Mengatur ketentuan kebijakan pengelolaan SDM, pengadaan dan teknologi informasi dan melakukan penandatanganan dokumen Perseroan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Melakukan segala perbuatan dan tindakan lainnya mengenai pengurusan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain, serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, perundangundangan dan/atau keputusan RUPS.

Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis

Director of Finance and Business Support

The objectives of the position of Director of Finance and Business Support are as follows:

1. Ensure strategic plans for finance, investment, human resources, information technology, and procurement as part of the Company's commitment to aligning the Company's business strategy contained in the Company's Long Term Plan with operational activities and subsidiaries so as to support the growth and development of the Company to achieve the Company's vision, mission and strategic plans.
2. Provide direction and control of the Company in the field of financial management to ensure the Company's sustainability and achievement of its long-term goals.

In carrying out its duties, the Director of Finance and Business Support has the following responsibilities and authorities:

1. Responsibility
 - a. Determine the Company's budget, finance, and accounting policies;
 - b. Formulation and planning of strategic programs/policies on: seeking sources of funding for routine programs; risk control, planning, evaluating and reporting on the implementation of the Company's Work Plan and Budget, and the administration of treasury and financial administration;
 - c. Seek sources of funds from various possible sources of funds (internal funds, loans, partnerships, equity participation, and others) in accordance with the Company's investment needs, through an effective and efficient approach to sources of funds;
 - d. Formulation and planning of strategic programs/policies related to the preparation of the Company's financial statements, and reporting of subsidized, non-subsidized cost accounting, and the results of operating performance;
 - e. Ensure the funding scheme and availability of budget allocations for safety, security and disaster emergency response events;
 - f. Implement the aspects of Governance, Risk, and Compliance in implementing the management of the Company;
 - g. Coordinate with the Director of Operations & Development in supporting the implementation of business development by conducting investment studies for business opportunities and formulating investment risk mitigation strategies;
 - h. Establish policies and be responsible for the Human Resources management system, starting from recruitment, development and placement, compensation systems, industrial relations, to termination of employment;
 - i. Formulate a cultural internalization program that is in line with the Company's strategic formulation;
 - j. Establish strategic competency standards for the organization;
 - k. Establish policies for safe and comfortable workplace management systems and public office facilities;
 - l. Ensure the availability of an information system that suits the needs of the organization to support the Company's operations by establishing and implementing strategies, designing (IT Architecture), development and governance that are in line with the concept of GCG (Good Corporate Governance) in order to support the achievement of the Company's performance;
 - m. Determine strategies, strategic policies and management systems for the procurement of goods and services;
 - n. Establish effective and efficient Company warehousing policy standards;
 - o. Establish the application of the Railway Safety and Occupational Health and Safety Management System (policy, planning, absorption evaluation and program for improving railway safety) to reduce potential risks and avoid accident hazards;
 - p. Be committed to the implementation of the OHS Management System and Railway Safety;
 - q. Ensure and support the implementation of the OHS Management System and Railway Safety in order to achieve Minimum Service Standards (SPM).
2. Authorities
 - a. Carry out portfolio management actions and financial investments in accordance with applicable standards.
 - b. Regulate the provisions of financial management policies, risk management and carry out the signing of Company documents based on the applicable laws and regulations.
 - c. Provide recommendations to the President Director regarding the Company's investment funding strategy.
 - d. Regulate the provisions of HR management, procurement and information technology policies and carry out signing of Company documents based on applicable laws and regulations.
 - e. Perform all and other actions regarding the management of the Company, bind the Company with other parties, and represent the Company inside and outside the Court regarding all matters and all events, with restrictions as stipulated in the Company's Articles of Association, laws, and/or GMS resolution.

Direktur Operasi dan Pengembangan

Director of Operations and Development

Direktur Operasi dan Pengembangan (*Operation and Development Director*) bertanggung jawab atas organisasi dan tata laksana Direktorat Operasi dan Pengembangan (*Operation and Development Directorate*) termasuk perencanaan program anggaran dan pengelolaan sumber daya manusia di dalamnya. Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Direktur Operasi dan Pengembangan berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Direktur Utama memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab
 - a. Memimpin dan memastikan kegiatan operasi dan perawatan dapat terlaksana sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan dan memenuhi standar yang berlaku.
 - b. Memimpin dan memastikan penyusunan Rencana Bisnis yang sesuai dengan rencana strategis Perseroan.
 - c. Memimpin dan memastikan penyusunan sistem pengendalian pengelolaan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
 - d. Perumusan dan perencanaan program atau kebijakan strategis terkait dengan operasi lalu lintas perjalanan kereta, program kebijakan pengendalian operasi kereta serta kebijakan jaminan mutu perjalanan kereta meliputi penetapan standar mutu, pelaksanaan dan pengawasannya serta evaluasi dan peningkatan mutu berkelanjutan;
 - e. Perumusan dan perencanaan program atau kebijakan strategis terkait dengan pemeliharaan prasarana meliputi jalur kereta, bangunan stasiun, dan fasilitas operasi;
 - f. Perumusan dan perencanaan program atau kebijakan serta evaluasi pemeliharaan sarana meliputi *trainset*, fasilitas Depo dan segala bentuk fasilitas penunjang terkait;
 - g. Perumusan dan perencanaan program atau kebijakan strategis terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis pengembangan dan proses uji sarana dan prasarana, pengelolaan atau pelaksanaan kajian rekayasa teknis pengembangan dan penyusunan desain atau spesifikasi teknis sarana dan prasarana, serta pelaksanaan koordinasi atau kerja sama teknis di bidang yang relevan dengan pihak luar;
 - h. Perumusan dan perencanaan program atau kebijakan strategis atas pengusahaan prasarana dan sarana beserta perencanaan integrasi antar moda;
 - i. Penetapan kebijakan pelaksanaan terkait dengan fungsi operasional dan layanan, prasarana, sarana dan pengembangan bisnis.
 - j. Memastikan pengelolaan kegiatan komersialisasi aset perusahaan maupun Jakpro dan/atau anak usaha Jakpro berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan untuk dapat meningkatkan lalu lintas orang (*crowd*) dan daya tarik masyarakat untuk menggunakan, menyewa dan memanfaatkan aset yang tersedia guna mewujudkan pencapaian target pendapatan Perusahaan;
 - k. Berkoordinasi dengan Direktur Keuangan & Dukungan Bisnis dalam mendukung pelaksanaan pengembangan bisnis dengan melakukan kajian investasi untuk peluang bisnis baru;
 - l. Terciptanya keselamatan, keamanan dan kesehatan lingkungan kerja serta mendukung tercapainya standar keselamatan dan keamanan penumpang;
 - m. Menetapkan penerapan Sistem Manajemen K3 dan Keselamatan Perkeretaapian (kebijakan, perencanaan, penerapan, evaluasi dan program peningkatan keselamatan perkeretaapian) untuk mengurangi potensi risiko dan menghindari bahaya kecelakaan;
 - n. Berkomitmen terhadap penyelenggaraan Sistem Manajemen K3 dan Keselamatan Perkeretaapian;
 - o. Memastikan dan mendukung terselenggaranya Sistem Manajemen K3 dan Keselamatan Perkeretaapian guna tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM).
2. Wewenang
 - a. Melakukan segala perbuatan dan tindakan lainnya mengenai pengurusan atau pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain, serta mewakili Perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS.
 - b. Mengatur ketentuan tentang kebijakan operasional Perusahaan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Melakukan penandatanganan dokumen terkait kegiatan operasional Perusahaan.
 - d. Menetapkan ketentuan pemantauan dan pengendalian kinerja Perusahaan di bidang operasional.
 - e. Mengatur ketentuan kebijakan pengembangan bisnis dan melakukan penandatanganan dokumen Perseroan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait strategi pengembangan bisnis Perseroan.

Direktur Operasi dan Pengembangan

Director of Operations and Development

Director of Operations and Development (Operations and Development Director) is responsible for the organization and management of the Directorate of Operations and Development (Operations and Development Directorate), including in budget program planning and management of human resources. In carrying out its main duties and responsibilities, the Director of Operations and Development is authorized to determine the Company's management policies within the scope of his duties and responsibilities.

In carrying out its main duties and responsibilities, the Director of Operations and Development has the following responsibilities and authorities:

1. Responsibilities
 - a. Lead and ensure that operations and maintenance activities can be carried out in accordance with the established strategy and meet the applicable standards.
 - b. Lead and ensure the preparation of a Business Plan in accordance with the Company's strategic plan.
 - c. Lead and ensure that the preparation of an asset management control system can be implemented in accordance with the needs of the Company.
 - d. Formulation and planning of strategic programs or policies related to train travel traffic operations, train operation control policy programs and quality assurance policies for train travel including the establishment of quality standards, implementation and supervision, as well as evaluation and continuous quality improvement;
 - e. Formulation and planning of strategic programs or policies related to the maintenance of infrastructure including railway lines, station buildings, and operating facilities;
 - f. Formulation and planning of programs or policies as well as evaluating the maintenance of facilities including trainsets, Depot facilities, and all forms of related supporting facilities;
 - g. Formulation and planning of strategic programs or policies related to meeting the technical requirements for the development and testing process of facilities and infrastructure, management or implementation of technical engineering studies for the development and preparation of designs, or technical specifications for facilities and infrastructure, as well as implementation of technical coordination or cooperation in fields relevant to external parties;
 - h. Formulation and planning of strategic programs or policies on the management of infrastructure and facilities, as well as intermodal integration planning;
 - i. Determination of implementation policies related to operational functions and services, infrastructure, facilities and business development.
 - j. Ensure that the management of the commercialization of the Company's and Jakpro's assets, and/or Jakpro's subsidiaries goes according to the set plan in order to increase the traffic of people (crowd) and attract the public to use, rent, and utilize available assets in order to achieve the achievement of the Company's revenue target ;
 - k. Coordinate with the Director of Finance & Business Support in supporting the implementation of business development by conducting investment studies for new business opportunities;
 - l. Create a safety, security, and health work environment and support the achievement of passenger safety and security standards;
 - m. Determine the implementation of the OHS Management System and Railway Safety (policy, planning, implementation, evaluation and improvement program for railway safety) to reduce potential risks and avoid accident hazards;
 - n. Be committed to the implementation of the OHS Management System and Railway Safety;
 - o. Ensure and support the implementation of the OHS Management System and Railway Safety in order to achieve Minimum Service Standards (SPM).
2. Authorities
 - a. Perform all and other actions regarding the management or ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties, and represent the Company inside and outside the Court on all matters and all events, with restrictions as stipulated in the Company's Articles of Association, laws and regulations and/or GMS resolution.
 - b. Set the provisions regarding the Company's operational policies based on the applicable laws and regulations.
 - c. Sign documents related to the Company's operational activities.
 - d. Establish provisions for monitoring and controlling the Company's performance in the operational field.
 - e. Regulate the provisions of business development policies and sign Company documents based on applicable laws and regulations.
 - f. Provide recommendations to the President Director regarding the Company's business development strategy.

ETIKA JABATAN DIREKSI

Direksi harus berpedoman pada standar etika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, berikut pedoman standar etika Direksi:

1. Etika Berkaitan dengan Keteladanan Setiap anggota Direksi harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi standar etika di Perseroan. Salah satu caranya adalah dengan menjadikan diri sendiri sebagai teladan yang baik bagi seluruh karyawan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perseroan dan Pedoman GCG serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan termasuk dalam hal ini seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga.
3. Setiap anggota Direksi dapat mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan informasi yang telah ditetapkan oleh Perseroan. Seluruh anggota Direksi harus selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepada masing-masing anggota Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan Perseroan.
4. Selain gaji atau pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau keputusan RUPS, setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan dari seluruh kegiatan Perseroan secara tidak sah, untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan/atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Selama menjabat, setiap anggota Direksi tidak diperbolehkan untuk:
 - a. Mengambil peluang bisnis yang bukan untuk kepentingan Perseroan, melainkan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok usaha dan/atau pihak lain;
 - b. Menggunakan aset Perseroan, informasi Perseroan atau jabatan selaku anggota Direksi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan Perseroan yang telah ditetapkan;
 - c. Berkompesi dengan Perseroan, yaitu menggunakan pengetahuan/informasi dari dalam (*inside information*) untuk mendapatkan keuntungan bagi kepentingan selain kepentingan Perseroan. Setiap anggota Direksi harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Perseroan.
 - d. Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas untuk setiap tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Direksi menyampaikan dan melampirkan Pakta Integritas yang telah ditandatangani bersamaan dengan surat permohonan persetujuan atas tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

JOB ETHICS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors must be guided by ethical standards in carrying out its duties and responsibilities, following the guidelines for ethical standards of the Board of Directors:

1. Every member of the Board of Directors must encourage ethical behavior and uphold ethical standards in the Company. One way to do this is by setting a good example for all employees of the Company.
2. Each member of the Board of Directors must comply with the prevailing laws and regulations, the Company's Articles of Association and GCG Guidelines as well as the Company's established policies including all agreements and commitments made by the Company with third parties.
3. Each member of the BOD may disclose information in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations and the information policy established by the Company. All members of the BOD must always maintain the confidentiality of information entrusted to each member of the BOD, in accordance with the provisions of laws and regulations and/or the provisions of the Company.
4. In addition to salary or other legal income based on the provisions of laws and regulations and / or GMS decisions, each member of the Board of Directors is prohibited from taking advantage of all Company activities illegally, for personal, family, business group and / or other parties, either directly or indirectly.
5. During their term of office, each member of the Board of Directors is not allowed to:
 - a. Taking business opportunities that are not in the interest of the Company, but for personal, family, business group and/or other parties;
 - b. Using the Company's assets, Company information or position as a member of the Board of Directors for personal interests outside the provisions of laws and regulations and established Company policies;
 - c. Competing with the Company, i.e. using inside knowledge/information to gain advantage for interests other than those of the Company. Each member of the Board of Directors must disclose information in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations and always maintain the confidentiality of information entrusted to him/her in accordance with the provisions of laws and regulations and/or the provisions of the Company.
 - d. The Board of Directors must sign an Integrity Pact for each transactional action that requires the approval of the Board of Commissioners. The Board of Directors shall submit and attach the signed Integrity Pact together with a letter requesting approval for transactional actions that require the approval of the Board of Commissioners.

Terhadap permohonan persetujuan yang diajukan melalui rapat bersama, maka dalam undangan rapat dan/atau pada saat sebelum dimulainya rapat bersama. Sekretaris Perusahaan memberikan Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh Direksi kepada Sekretariat Dewan Komisaris.

6. Setiap anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perseroan. Setiap anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - i) Anggota Direksi lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan yang ditunjuk dalam Rapat Direksi. Dalam rapat tersebut, keputusan diambil oleh Direksi lain yang tidak memiliki benturan kepentingan. Apabila Direksi merasa ragu untuk mengambil keputusan secara independen, maka Direksi dapat meminta tanggapan atau pertimbangan Dewan Komisaris;
 - ii) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - iii) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iv) Dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan tidak ada satupun anggota Dewan Komisaris, maka Perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.
 - c. Direksi dilarang melakukan pertemuan dengan calon rekan bisnis ataupun telah menjadi rekan bisnis termasuk pihak lain dalam rangka aktivitas, kegiatan ataupun proyek tertentu tanpa didampingi oleh personel Perseroan. Apabila pendampingan tersebut tidak dapat dilakukan, maka Direksi wajib menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada seluruh anggota Direksi lainnya. Pertemuan tersebut harus terjadwal di Perseroan.
 - d. Setiap anggota Direksi wajib membuat Daftar Khusus, untuk masing-masing anggota Direksi dan keluarga anggota Direksi.

For approval requests submitted through joint meetings, the Board of Directors shall include the Integrity Pact in the meeting invitation and/or prior to the start of the joint meeting. The Corporate Secretary provides the Integrity Pact that has been signed by the Board of Directors to the Secretariat of the Board of Commissioners.

6. Each member of the BOD is prohibited from taking actions that have a conflict of interest with the Company's activities. Each member of the Board of Directors is not authorized to represent the Company if:
 - a. There is a case before the court between the Company and the member of the Board of Directors concerned or the member of the Board of Directors concerned has a conflict of interest with the Company;
 - b. In the event that there are circumstances as referred to above, those entitled to represent the Company are:
 - i) Other members of the Board of Directors who have no conflict of interest with the Company are appointed in the Board of Directors Meeting. In the meeting, decisions are made by other Directors who have no conflict of interest. If the Board of Directors feels hesitant to make decisions independently, then the Board of Directors can ask for feedback or consideration from the Board of Commissioners;
 - ii) The Board of Commissioners in the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company;
 - iii) Other parties appointed by the GMS in the event that all members of the Board of Directors or Board of Commissioners have an interest in the Company; or
 - iv) In the event that all members of the Board of Directors have a conflict of interest with the Company and none of the members of the Board of Commissioners, the Company shall be represented by other parties appointed by the GMS.
 - c. The Board of Directors is prohibited from conducting meetings with prospective or existing business partners including other parties in the context of certain activities, activities or projects without being accompanied by Company personnel. If such accompaniment cannot be done, then the BOD must convey the results of the meeting to all other members of the BOD. The meeting must be scheduled in the Company.
 - d. Each member of the Board of Directors is obliged to make a Special Register, for each member of the Board of Directors and the family of a member of the Board of Directors.

7. Direksi dilarang memberikan, menawarkan, atau menerima baik secara langsung maupun tidak langsung kepada atau dari pelanggan, pegawai negeri, penyelenggara negara, atau pihak ketiga lainnya untuk mempengaruhi suatu keputusan atau sebagai imbalan atas hal-hal yang telah dilakukan. Direksi wajib mematuhi ketentuan anti penyuapan yang ada di Perseroan, sebagai bagian dari komitmen penerapan NI ISO 37001:2016.
8. Setelah tidak lagi menjabat, setiap anggota Direksi wajib:
 - a. Mengembalikan seluruh dokumentasi dan fasilitas yang berhubungan dengan jabatan yang diemban kepada Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, setelah berakhirnya masa jabatan.
 - b. Menyampaikan atas tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggungjawaban pertanggungjawabannya oleh RUPS.
 - c. Apabila anggota Direksi meninggal dunia selama menjabat, maka ahli waris anggota Direksi tersebut wajib mengembalikan dokumentasi dan fasilitas sesuai dengan huruf a tersebut di atas.

Terhadap penyimpangan etika yang dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi diperlakukan sama dengan penyimpangan terhadap Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

PROGRAM PENGENALAN BAGI DIREKSI BARU

Direksi baru diberikan program pengenalan mengenai Perusahaan, dengan tujuan untuk memberikan pemparpan ruang lingkup Perusahaan dan informasi penting lainnya untuk menunjang peran anggota baru tersebut seperti kewajiban, tugas, tanggung jawab dan hak-hak Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan berdasarkan panduan *code of conduct* PT LRT Jakarta dan Jakpro. Tanggung jawab pengadaan program pengenalan Direksi baru dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke unit bisnis, ke fasilitas Perseroan, pengkajian dokumen Perseroan atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan. Program pengenalan bagi Direksi baru dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Anggota Direksi Baru.

Di tahun 2023, tidak terdapat pergantian keanggotaan Direksi dan pengangkatan Direksi baru. Dengan demikian program pengenalan Perusahaan dilakukan/tidak dilakukan.

7. Directors are prohibited from giving, offering, or accepting directly or indirectly to or from customers, civil servants, state officials, or other third parties to influence a decision or in return for things that have been done. Directors must comply with the anti-bribery provisions in the Company, as part of the commitment to implement NI ISO 37001:2016.
8. Upon leaving office, each member of the Board of Directors shall:
 - a. Return all documentation and facilities related to the position held to the Company no later than 30 (thirty) calendar days, after the end of the term of office.
 - b. Delivering on actions for which the GMS has not accepted accountability.
 - c. If a member of the Board of Directors dies during his/her term of office, the heirs of the member of the Board of Directors must return the documentation and facilities in accordance with letter a above.

Ethical violations committed by each member of the Board of Directors are treated the same as violations of the GCG Guidelines and Code of Conduct.

INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS

New Directors are provided with an introduction program about the Company, with the aim of providing exposure to the scope of the Company and other important information to support the role of the new members such as the obligations, duties, responsibilities and rights of the Directors as well as things that are not allowed based on the code of conduct guidelines of PT LRT Jakarta and Jakpro. The responsibility for procuring the introduction program for new Directors is carried out by the Corporate Secretary. The introduction program can be in the form of presentations, meetings, visits to business units, to the Company's facilities, review of the Company's documents or other programs deemed appropriate to the needs. The introduction program for new Directors shall be conducted no later than 3 (three) months after the appointment of the New Directors.

In 2023, there has been no change in the membership of the Board of Directors and no appointment of new Directors. Therefore, the Company's introduction program is carried out/not carried out.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Direksi telah mengikuti program pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam kinerja Direksi. Adapun rincian mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi Direksi pada tahun 2023 terdapat dalam bab 'Profil Perusahaan' Laporan Tahunan ini.

REALISASI PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Terkait pelaksanaan tugas di tahun 2023, Direksi melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan rapat BoD sebanyak 12 kali sepanjang tahun 2023
2. Menerbitkan 22 Surat Keputusan Direksi
3. Terlaksananya *Groundbreaking* fase 1B Velodrome - Manggarai
4. Mendapatkan Penghargaan "The Best CEO Focus on Human Capital Awards"
5. Mendapatkan Penghargaan "The Most Committed GRC Leader 2023 #4 stars"
6. Mendapatkan Penghargaan "Top Digital Implementation 2023 dan Top Leader on Digital Implementation 2023"
7. Mendapatkan Penghargaan Peringkat Emas Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3)
8. Meluncurkan LRT Jakarta Integritas
9. Melakukan uji coba terbatas Jaklingko Indonesia "Pay as You Go" bersama Kepala Dinas Perhubungan
10. Atribut kinerja di *Learning & Growth* dapat mencapai diatas target yang ditetapkan
11. Atribut kinerja dalam perspektif internal business process dapat terpenuhi sesuai target
12. LRT Jakarta mampu meningkatkan jumlah penumpang (*ridership*) tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sebesar 43% dengan rerata 2.841,25 penumpang per hari.

BOARD OF DIRECTORS COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The Board of Directors has participated in competency development programs aimed at improving effectiveness in the performance of the Board of Directors. Details regarding the implementation of the competency development of the Board of Directors in 2023 are contained in the 'Company Profile' chapter of this Annual Report.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Regarding the implementation of duties in 2023, the Board of Directors carried out the following activities:

1. Conduct BoD meeting activities 12 times throughout 2023
2. Issued 22 Directors' Decrees
3. Implementation of Groundbreaking phase 1B Velodrome - Manggarai
4. Awarded "The Best CEO Focus on Human Capital Awards"
5. Awarded "The Most Committed GRC Leader 2023 #4 stars"
6. Awarded "Top Digital Implementation 2023 and Top Leader on Digital Implementation 2023"
7. Received the Gold Award for Occupational Health and Safety Management System (SMK3)
8. Launched "LRT Jakarta Integritas"
9. Conducted a limited trial of Jaklingko Indonesia "Pay as You Go" with the Head of the Transportation Agency
10. Performance attributes in Learning & Growth was able to achieve above the set target
11. Performance attributes in the internal business process perspective was fulfilled according to the target
12. LRT Jakarta was able to increase ridership in 2023 compared to 2022 by 43% with an average of 2,841.25 passengers per day.

Transparansi Informasi tentang Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Information On the Board of Commissioners and Board Of Directors

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Perusahaan menyadari keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan baik dari latar belakang profesi dan pendidikan sebelumnya, merupakan sesuatu hal yang penting sehingga dapat memberikan pandangan yang luas dalam menyusun langkah-langkah strategis bagi Perusahaan.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan yang dibutuhkan, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Company realizes that the diversity of the composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, both in terms of professional background and previous education, is important so that it can provide a broad view in formulating strategic steps for the Company.

The diversity in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors is done by considering the needs and requirements, as described in the table below.

Nama dan Jabatan Name and Position	Kewarganegaraan Citizenship	Usia Age	Gender	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Dewan Komisaris Board of Commissioners						
Iwan Takwin (Komisaris Utama) President Commissioner	Indonesia	48	Laki-Laki Male	S1 – Sarjana Teknik Bachelor of Engineering	Konstruksi Construction	Teknik Engineering
Azas Tigor Nainggolan (Komisaris) Commissioner	Indonesia	59	Laki-Laki Male	Studi Program Doktor Hukum Universitas Pelita Harapan (2021-Sekarang) Doctor of Law, Pelita Harapan University (2021-Present)	Hukum Law	Hukum Law
Mohamad Pramintohadi Sukarno (Komisaris) Commissioner	Indonesia	60	Laki-Laki Male	S2-Magister Transportasi Institut Teknologi Bandung Master of Transportation, Bandung Institute of Technology	Irjen Kemenhub Inspector General of the Ministry of Transportation	Transportasi Transportation

Nama dan Jabatan Name and Position	Kewarganegaraan Citizenship	Usia Age	Gender	Latar Belakang Pendidikan Educational Background	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
Direksi Board of Directors						
Hendri Saputra (Direktur Utama) President Director	Indonesia	53	Laki-Laki Male	S1 - Sarjana Fisika Bachelor of Physics	Project Management	Fisika Physics
Sahurdi (Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis) Director of Finance and Business Support	Indonesia	51	Laki-Laki Male	S1 – Sarjana Teknik Sipil Bachelor of Civil Engineering	Operations, Business Development	Teknik Sipil Civil Engineering
Aditia Kesuma Negara (Direktur Operasi dan Pengembangan) Director of Operations and Development	Indonesia	38	Laki-laki Male	S3 – Doctorate Degree Program in Economic Business	Operations & Project Management	Teknik Engineering

PENILAIAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagai fungsi pengawasan (*oversight*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan serta Kontrak Manajemen yang telah disepakati atau disetujui pada saat pengangkatannya. Indikator tersebut dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPS dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam skema remunerasi untuk Dewan Komisaris.

Sementara terkait indikator pencapaian kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Kriteria evaluasi kinerja Direksi didasari pada target kinerja dalam Kontrak Manajemen yang disampaikan pada saat pengangkalamnya. Kinerja Direksi dievaluasi setiap tahunnya oleh Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kriteria evaluasi kinerja yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan usulan dari Direksi yang bersangkutan. Evaluasi kinerja tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam skema remunerasi untuk Direksi.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The Performance Achievement Indicator is a method of assessment on the successful implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners as an oversight function in accordance with laws and regulations and the Company's Articles of Association and Management Contracts that have been agreed upon or approved at the time of appointment. These indicators are evaluated by the Shareholders at the GMS and become an integral part of the remuneration scheme for the Board of Commissioners.

While related to performance achievement indicators, it is a method of assessment on the successful implementation of the duties and responsibilities of each Board of Directors, in accordance with laws and/or the Company's Articles of Association. The criteria for evaluating the performance of the Board of Directors are based on the performance targets in the Management Contracts, which are submitted at the time of its adoption. The performance of the Directors is evaluated annually by the Shareholders at the GMS, based on the performance evaluation criteria set by the Board of Commissioners, in accordance with the proposals from the Directors concerned. The performance evaluation is an integral part of the remuneration scheme for the Board of Directors.

Adapun rincian KPI Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Details of KPI for the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

Hasil KPI Dewan Komisaris tahun 2023

2023 KPI Results of the Board of Commissioners

No.	Keterangan Description	KPI KPI	Bobot (%) Weight (%)	Capaian Achievement		% Capaian % Achievement	Nilai Score			
1.1 Aspek Pengawasan & Pengarahan Supervision & Direction Aspect			50							53,8
1.	Review Kinerja Perusahaan The Company's Performance Review	6	Kali Time(s)	10	7	Kali Time(s)	117%	11,7		
2.	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting									
	Jumlah Rapat (Direksi & Komisaris) Number of Meetings (Board of Directors & Board of Commissioners)	12	Kali Time(s)	10	11	Kali Time(s)	92%	9,2		
	Jumlah Rapat (Komisaris & Komite Audit) Number of Meetings (Board of Commissioners & Audit Committee)	6	Kali Time(s)	5	6	Kali Time(s)	100%	5,0		
	Jumlah Rapat (RUPS & RUPS LB) Number of Meetings (GMS & Extraordinary GMS)	1	Kali Time(s)	5	3	Kali Time(s)	120%	6,0		
	Kehadiran dalam Rapat Attendance in Meetings	100	%	10	100	%	100%	10,0		
3	Memberi Nasihat/Saran kepada Direksi Giving Advice/Suggestions to the Board of Directors									
	Jumlah (Minimal) Amount (Minimum)	6	Kali Time(s)	10	24	Kali Time(s)	120%	12,0		
2.1 Aspek Pelaporan Reporting Aspect			30							30,0
1.	Program Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Work Programs	1	Kali Time(s)	10	1	Kali Time(s)	100%	10,0		
2.	Pendapat/Saran Kepada Pemegang Saham/RUPS Opinions/Suggestions to Shareholders/ GMS	1	Kali Time(s)	10	1	Kali Time(s)	100%	10,0		
3.	Laporan tentang Tugas Pengawasan Internal Reports on Internal Supervisory Duties	1	Kali Time(s)	5	1	Kali Time(s)	100%	5,0		
4.	Laporan Evaluasi atas Auditor Eksternal Evaluation Report on External Auditor	1	Kali Time(s)	5	1	Kali Time(s)	100%	5,0		
3.1 Aspek Dinamis Dynamic Aspect			20							20,2
1	Peningkatan Kompetensi (Minimal) Competency Improvement (Minimum)	1	Kali Time(s)	10	1	Kali Time(s)	100%	10,0		
2.	Peran dalam Peningkatan Kinerja Role in Performance Improvement									
	GCG GCG	85	%	10	87	%	102%	10,2		
TOTAL			100							104,1



Hasil KPI Direksi tahun 2023

PERSPEKTIF	BOBOT	SASARAN STRATEGI	KPI	KODE	PENGERTIAN KPI
Financial	22,5%	Meningkatkan Pendapatan	Total Pendapatan Usaha	F1	Pendapatan Subsidi, Farebox dan Non Farebox
		Meingkatkan Profitabilitas Perusahaan	Margin Laba Bersih	F2	Margin Laba Bersih
			Optimalisasi Aset (Return of Asset)	F3	Return On Assets (ROA) (Mengukur Produktifitas Aset Dalam Menghasilkan Laba)
Customer	30,0%	Service Excellence	Kepuasan Pelanggan	C1	Tingkat Kepuasan Pelanggan LRT Jakarta (%)
			Share of Voice (%)	C2	Jumlah Pemberitaan positif dibandingkan seluruh berita terbit terkait pengoperasian LRT Jakarta
		Operation Excellence	Jumlah Penumpang (Ridership)	C3	Total Penumpang Tahunan (Berdasarkan rataan ridership 2.000 penumpang per hari)
Internal Process	25,0%	Efektivitas Bisnis Proses	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum LRT Jakarta Fase 1	C4	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) LRT Jakarta Fase 1
			Support Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B	C5	Support Proyek Pembangunan LRTJ Fase 1B (Sesuai Milestone Pembangunan)
		Efektivitas Bisnis Proses	Sertifikasi dan Surveillance Sistem Manajemen Terintegrasi	I1	Memperoleh Sertifikasi sesuai target Perusahaan dan memenuhi persyaratan untuk mempertahankan perolehan
Learning & Growth	22,5%	Meningkatkan Corporate Branding & Identity	Digitalisasi Proses Bisnis	I2	Banyaknya Aktivitas Proses Digitalisasi yang mendukung bisnis
			Program Peningkatan Brand Awareness	I3	Program/Event yang dilakukan oleh LRT Jakarta sebagai program peningkatan brand awareness & Corporate Identity
		Peningkatan Inovasi untuk Mendukung Kinerja	Terlaksananya Inovasi Baru	I4	Terlaksananya Inovasi Bisnis Baru
Learning & Growth	22,5%	Optimalisasi Kinerja Organisasi	Revenue Per Employee	LG1	Mengukur tingkat produktifitas karyawan dalam perusahaan
		Implementasi GCG	Nilai GCG Perusahaan	LG2	Mengukur Tingkat Penerapan GCG di PT LRT Jakarta
		Risk Awareness	Risk Maturity Level	LG3	Tercapainya Risk Maturity Level tingkat 3,3 (Kategori Repeatable) menggunakan Kategori Level Risk and Insurance Management Society (RIMS), Pengukuran berdasarkan self assessment berbasis ISO 31000:2018

Hasil KPI Direksi tahun 2023

TARGET	BOBOT KPI	YTD Des 2023	CAPAIAN	NILAI KPI	
		REALISASI			
Rp208,4 Miliar	7,5%	Rp271,6 Miliar	120%	9%	
4%	7,5%	5,7%	120%	9%	27,0%
2,5%	7,5%	4,1%	120%	9%	
86%	5,0%	92,5%	108%	5,4%	
80%	5,0%	88,6%	109%	5,5%	
730.000	7,5%	1.037.162	120%	9%	32,4%
99%	7,5%	98,25%	99%	7,4%	
100%	5,0%	100%	100%	5%	
100%	7,5%	100%	100%	7,5%	
100%	5,0%	100%	100%	5%	25,5%
12	5,0%	14	110%	5,5%	
100%	7,%	100%	100%	7,5%	
Rp 0,7 Miliar	7,%	Rp1 Miliar	120%	9,0%	
87	7,%	88	101%	7,6%	24,3%
3,3	7,%	3,4	103%	7,7	
				109,1%	109,1%

KPI Result of the Board of Directors in 2023

Perspective	Weight	Strategy Targets	KPI	Code	KPI Definition
Financial	22,5%	Increase Revenue	Total Operating Income	F1	Subsidized, Farebox and Non Farebox Revenue
		Net Profit Margin	Net Profit Margin	F2	Net Profit Margin
		Asset Optimization (Return of Asset)	Asset Optimization (Return of Asset)	F3	Return On Assets (ROA) (Measures Asset Productivity in Generating Profit)
Customer	30,0%	Service Excellence	Customer Satisfaction	C1	LRT Jakarta Customer Satisfaction Level (%)
		Service Excellence	Share of Voice (%)	C2	Number of positive news reports compared to all published news related to the operation of the Jakarta LRT
		Ridership	Ridership	C3	Total Annual Passengers (Based on average ridership of 2,000 passengers per day)
Internal Process	25,0%	Operation Excellence	Fulfillment of LRT Jakarta Phase 1 Minimum Service Standards	C4	Fulfillment of LRT Jakarta Phase 1 Minimum Service Standards (SPM)
		Business Process Effectiveness	LRT Jakarta Phase 1B Development Project Support	C5	LRTJ Phase 1B Development Project Support (In accordance with Development Milestones)
		Business Process Effectiveness	Certification and Surveillance of Integrated Management System	I1	Obtaining Certification according to the Company's target and meeting the requirements to maintain the acquisition
Learning & Growth	22,5%	Business Process Effectiveness	Business Process Digitalization	I2	Number of Digitization Process Activities that support business
		Enhancing Corporate Branding & Identity	Brand Awareness Improvement Program	I3	Programs/Events carried out by LRT Jakarta as a program to increase brand awareness & Corporate Identity
		Increased Innovation to Support Performance	Implementation of New Innovations	I4	Implementation of New Business
Learning & Growth	22,5%	Optimization of Organizational Performance	Revenue Per Employee	LG1	Innovation Measuring the level of employee productivity in the company
		GCG Implementation	The Company's GCG Score	LG2	Measuring the Level of GCG Implementation in PT LRT Jakarta
		Risk Awareness	Risk Maturity Level	LG3	Achievement of Risk Maturity Level level 3.3 (Repeatable Category) using the Risk and Insurance Management Society (RIMS) Category Level, Measurement based on self-assessment based on ISO 31000: 2018

KPI Result of the Board of Directors in 2023

Target	KPI Weight	YTD Dec 2023 Realization	Achievement	KPI Score	
IDR208.4 billion	7,5%	IDR271.6 billion	120%	9%	
4%	7,5%	5,7%	120%	9%	27,0%
2,5%	7,5%	4,1%	120%	9%	
86%	5,0%	92,5%	108%	5,4%	
80%	5,0%	88,6%	109%	5,5%	
730.000	7,5%	1.037.162	120%	9%	32,4%
99%	7,5%	98,25%	99%	7,4%	
100%	5,0%	100%	100%	5%	
100%	7,5%	100%	100%	7,5%	
100%	5,0%	100%	100%	5%	25,5%
12	5,0%	14	110%	5,5%	
100%	7,7%	100%	100%	7,5%	
IDR0,7 Billion	7,7%	IDR1 billion	120%	9,0%	
87	7,7%	88	101%	7,6%	24,3%
3,3	7,7%	3,4	103%	7,7	
				109,1%	109,1%

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pemberian Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 79 tahun 2019 tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.

STUKTUR REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI No. 79 tahun 2019, komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
<ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium. 2. Tunjangan. 3. Fasilitas. 4. Tantiem/Insentif Kinerja. <p>Pajak atas Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Perseroan. Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium. 2. Allowances. 3. Facility. 4. Tantiem/Performance Incentives. <p>Taxes on Honorarium, Allowances and Facilities for the Board of Commissioners are borne by and become the burden of the Company. Meanwhile, taxes on Tantiem/Performance Incentives for the Board of Commissioners are borne by and become the burden of each member of the Board of Commissioners.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji. 2. Tunjangan. 3. Fasilitas. 4. Tantiem/Insentif Kinerja. <p>Pajak atas Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Perseroan. Sedangkan pajak atas Tantiem/ Insentif Kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salaries. 2. Allowances. 3. Facility. 4. Tantiem/Performance Incentives. <p>Taxes on Salaries, Allowances and Facilities for the Board of Directors are borne by and become the burden of the Company. Meanwhile, taxes on Tantiem/Performance Incentives for the Board of Directors are borne by and become the burden of each member of the Board of Directors.</p>
Direktur Utama President Director	100%
Direksi Lainnya Other Directors	Sebesar 90% dari gaji Direktur Utama 90% of the President Director's salary
Komisaris Utama President Commissioner	Sebesar 45% dari gaji Direktur Utama 45% of the President Director's salary
Komisaris Lainnya Other Commissioners	Sebesar 90% dari Komisaris Utama 90% of the President Commissioner's salary

JUMLAH NOMINAL REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Besaran remunerasi yang diterima Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku 2023 sebagai berikut:

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors refers to the Regulations of the Governor of DKI Jakarta No. 79 of 2019 concerning Guidelines for the Income of Board of Directors, Supervisory Board and Board of Commissioners of Regional Owned Enterprises.

REMUNERATION STRUCTURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Based on the Regulations of the Governor of DKI Jakarta No. 79 of 2019, the income components for the Board of Commissioners and Board of Directors consist of:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors
<ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium. 2. Tunjangan. 3. Fasilitas. 4. Tantiem/Insentif Kinerja. <p>Pajak atas Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Perseroan. Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium. 2. Allowances. 3. Facility. 4. Tantiem/Performance Incentives. <p>Taxes on Honorarium, Allowances and Facilities for the Board of Commissioners are borne by and become the burden of the Company. Meanwhile, taxes on Tantiem/Performance Incentives for the Board of Commissioners are borne by and become the burden of each member of the Board of Commissioners.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji. 2. Tunjangan. 3. Fasilitas. 4. Tantiem/Insentif Kinerja. <p>Pajak atas Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Perseroan. Sedangkan pajak atas Tantiem/ Insentif Kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Salaries. 2. Allowances. 3. Facility. 4. Tantiem/Performance Incentives. <p>Taxes on Salaries, Allowances and Facilities for the Board of Directors are borne by and become the burden of the Company. Meanwhile, taxes on Tantiem/Performance Incentives for the Board of Directors are borne by and become the burden of each member of the Board of Directors.</p>
Direktur Utama President Director	100%
Direksi Lainnya Other Directors	Sebesar 90% dari gaji Direktur Utama 90% of the President Director's salary
Komisaris Utama President Commissioner	Sebesar 45% dari gaji Direktur Utama 45% of the President Director's salary
Komisaris Lainnya Other Commissioners	Sebesar 90% dari Komisaris Utama 90% of the President Commissioner's salary

NOMINAL AMOUNT OF THE REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Information on the nominal amount of remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:

Jabatan Position	Besaran (Rp) Amount (IDR)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Total Remuneration of the Board of Commissioners	2.217.263.178
Jumlah Remunerasi Direksi Total Remuneration of the Board of Directors	7.097.327.959
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Total Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors	9.314.591.137

RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT DEWAN KOMISARIS YANG MENGUNDANG DIREKSI, DAN RAPAT DIREKSI

Rapat Internal Dewan Komisaris

Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris diatur dalam *Board Manual* Dewan Komisaris, yang menjelaskan bahwa rapat Dewan Komisaris dapat diadakan secara berkala, yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan, di mana dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.

Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 1(satu) rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING, BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS JOINT MEETING, AND BOARD OF DIRECTORS MEETING

Board of Commissioners Internal Meeting

The Board of Commissioners Board Manual explains that Board of Commissioners meetings can be held periodically, namely at least once a month, of which the Board of Commissioners may invite the Board of Directors to the meeting. Board of Commissioners Meetings can be held at any time when deemed necessary, by one or more members of the Board of Commissioners, or at the request of 1 (one) shareholder who jointly represents 1/10 (one tenth) of the total shares with valid voting rights.

Throughout 2023, the Board of Commissioners has held 1 (one) internal meetings with the following attendance details:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Iwan Takwin	Komisaris Utama President Commissioner	1	1	100%
Romy Bareno*	Komisaris Commissioner	-	-	-%
Azas Tigor Nainggolan**	Komisaris Commissioner	4	4	100%
Mohamad Pramintohadi Sukarno***	Komisaris Commissioner	4	4	100%

*Sudah tidak lagi menjabat sejak 17 Juli 2023

**Menjabat Sejak 21 Maret 2023

***Menjabat Sejak 5 Oktober 2023

*No longer served since July 17, 2023

**Started serving since March 21, 2023

***Started serving since October 5, 2023

Agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The agenda for discussion for the Board of Commissioners meetings is as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
1	30 Agustus 2023 August 30, 2023	Revu Kinerja LRT Jakarta Juli 2023 Review of LRT Jakarta Performance July 2023	3 orang 3 people
2	15 September 2023 September 15, 2023	Pembahasan mengenai Mekanisme Subsidi Discussion on Subsidy Mechanism	10 orang 10 people
3	02 Oktober 2023 October 2, 2023	Pembahasan Komite Audit Discussion on the Audit Committee	4 orang 4 people
4	21 November 2023 November 21, 2023	Persiapan Rapat BoD - BoC BoD - BoC Meeting Preparation	3 orang 3 people

Rapat Gabungan Antara Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi juga mengadakan rapat gabungan, dengan tujuan menjaga hubungan komunikasi serta pandangan dalam memutuskan keputusan penting terkait dengan kelangsungan usaha Perusahaan. Di tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 11 kali pertemuan, dengan uraian tingkat kehadiran pada tabel berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Iwan Takwin	Komisaris Utama President Commissioner	11	11	100%
Romy Bareno*	Komisaris Commissioner	5	3	60%
Azas Tigor Nainggolan**	Komisaris Commissioner	10	10	100%
Mohamad Pramintohadi Sukarno***	Komisaris Commissioner	3	3	100%
Direksi Board of Directors				
Hendri Saputra	Direktur Utama President Director	11	11	100%
Sahurdi	Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Director of Finance and Business Support	11	10	90,9%
Aditia Kesuma Negara	Direktur Operasi dan Pengembangan Director of Operations and Development	11	11	100%

*Sudah tidak lagi menjabat sejak 17 Juli 2023

**Menjabat Sejak 21 Maret 2023

***Menjabat Sejak 5 Oktober 2023

*No longer served since July 17, 2023

**Started serving since March 21, 2023

***Started serving since October 5, 2023

Agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting

In maintaining communication and perspectives in deciding important decisions related to the continuity of the Company's business, the Board of Commissioners and Directors held joint meetings. Throughout 2023, the Board of Commissioners and the Board of Directors held 11 joint meetings, with a description of the level of attendance in the following table:

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
1	20 Januari 2023 January 20, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Januari Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors for January	5 orang 5 people
2	21 Maret 2023 March 21, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Februari dan Maret Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors for February and March	5 orang 5 people
3	13 April 2023 April 13, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan April Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors for April	6 orang 6 people
4	30 Mei 2023 May 30, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Mei Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors for May	6 orang 6 people
5	23 Juni 2023 June 23, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Juni Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors for June	5 orang 5 people

The agenda for discussion in the Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings is as follows:

No.	Tanggal Date	Agenda	Peserta Participants
6	20 Juli 2023 July 20, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Juli Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors for July	5 orang 5 people
7	30 Agustus 2023 August 30, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Agustus Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors for August	5 orang 5 people
8	26 September 2023 September 26, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan September Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors for September	5 orang 5 people
9	27 Oktober 2023 October 27, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Oktober Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors for October	5 orang 5 people
10	24 November 2023 November 24, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan November Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors for November	6 orang 6 people
11	28 Desember 2023 December 28, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Desember Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors for December	6 orang 6 people

Rapat Direksi

Rapat Direksi merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Direksi di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi. Rapat Direksi wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan atau bila dipandang perlu diselenggarakan.

Pada tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan rapat rutin internal sebanyak 55 kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Hendri Saputra	Direktur Utama President Director	55	55	100%
Sahurdi	Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Director of Finance and Business Support	55	53	96,36%
Aditia Kesuma Negara	Direktur Operasi dan Pengembangan Director of Operations and Development	55	55	100%

Adapun agenda yang menjadi pembahasan dalam pertemuan rapat Direksi adalah sebagai berikut:

Board of Directors Meeting

Board of Directors meeting is a meeting held by the Board of Directors at the place of domicile of the Company, or the place of business of the Company, or in other locations within the territory of the Republic of Indonesia as determined by the Board of Directors. Board of Directors meeting must be held at least once a month or if deemed necessary.

Throughout 2023, the Board of Directors has held 55 regular internal meetings with the following level of attendance:

No.	Tanggal Date	Agenda
1	9 Januari 2023 January 9, 2023	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Januari Sesi 1 Monthly Meeting of the Board of Directors and Heads of Division for January Session 1
2	13 Januari 2023 January 13, 2023	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Januari Sesi 2 Monthly Meeting of the Board of Directors and Heads of Division for January Session 2
3	20 Januari 2023 January 20, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Januari Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting for January
4	2 Februari 2023 February 2, 2023	Finalisasi Program Kerja dan Anggaran PT LRT Jakarta Tahun 2023 Finalization of PT LRT Jakarta's 2023 Work Program and Budget
5	9 Februari 2023 February 9, 2023	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Februari Sesi 1 Monthly Meeting of the Board of Directors and Heads of Division for February Session 1
6	14 Februari 2023 February 14, 2023	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Februari Sesi 2 Monthly Meeting of the Board of Directors and Heads of Division for February Session 2
7	16 Februari 2023 February 16, 2023	Kick Off Meeting Project Analisa Beban Kerja LRT Jakarta Kick Off Meeting of LRT Jakarta's Workload Analysis Project

No.	Tanggal Date	Agenda
8	21 Februari 2023 February 21, 2023	Sosialisasi Manajemen Sistem Kinerja Karyawan 2023 & Mekanisme Penilaian Kinerja 2022 Socialization of 2023 Employee Performance System Management & 2022 Performance Assessment Mechanism
9	10 Maret 2023 March 10, 2023	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Maret Monthly Meeting of the Board of Directors and Heads of Divisions for March
10	21 Maret 2023 March 21, 2023	Rapat gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Februari – Maret Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting for February – March
11	24 Maret 2023 March 24, 2023	Pembahasan KPI Divisi PT LRT Jakarta dengan Direksi Sesi 1 Discussion on Division's KPI of PT LRT Jakarta with the Board of Directors Session 1
12	27 Maret 2023 March 27, 2023	Pembahasan KPI Divisi PT LRT Jakarta dengan Direksi Sesi 2 Discussion on Division's KPI of PT LRT Jakarta with the Board of Directors Session 2
13	6 April 2023 April 6, 2023	<i>Monthly Meeting</i> BOD-GM April Monthly Meeting of BOD-GM for April
14	13 April 2023 April 13, 2023	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan April Monthly Meeting of BOD and Heads of Division for April
15	5 Mei 2023 May 5, 2023	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Mei Monthly Meeting of the Board of Directors and Heads of Division for May
16	9 Mei 2023 May 9, 2023	Kalibrasi Kinerja 2022 Level Kepala Divisi dan Kepala Departemen dengan Direksi 2022 Performance Calibration for Heads of Division level and Heads of Department with the Board of Directors
17	11 Mei 2023 May 11, 2023	Pelaksanaan Pra Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LRT Jakarta Holding of Pre-Annual General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta
18	30 Mei 2023 May 30, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Mei Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting for May
19	5 Juni 2023 June 5, 2023	Pemaparan <i>Result WLA</i> Insan LRT Jakarta Presentation of WLA Results of LRT Jakarta Personnel
20	12 Juni 2023 June 12, 2023	Presentasi Kandidat Beasiswa KORASS tahun 2023 Presentation of KORASS Scholarship Candidates for 2023
21	12 Juni 2023 June 12, 2023	<i>Kick Off meeting</i> penyusunan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) dengan Deloitte Kick Off Meeting for the Preparation of Whistleblowing System (WBS) with Deloitte
22	14 Juni 2023 June 14, 2023	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Juni Sesi 1 Monthly Meeting of the Board of Directors and Heads of Division for June session 1
23	19 Juni 2023 June 19, 2023	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Juni Sesi 2 Monthly Meeting of the Board of Directors and Heads of Division for June session 2
24	23 Juni 2023 June 23, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Juni Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting for June
25	3 Juli 2023 July 3, 2023	Pemaparan Hasil Audit oleh Internal Audit kepada Direksi LRT Jakarta Presentation of Audit Results by Internal Audit to the Board of Directors of LRT Jakarta
26	4 Juli 2023 July 4, 2023	Implementation <i>Checklist WBS</i> oleh Tim Risk Implementation of WBS Checklist by Risk Team
27	10 Juli 2023 July 10, 2023	<i>Update Program HC Development Kepada Direksi</i> HC Development Program Update to the Board of Directors
28	12 Juli 2023 July 12, 2023	<i>Business Review Meeting</i> Semester 1 Business Review Meeting Semester 1
29	20 Juli 2023 July 20, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Juli Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting for July
30	3 Agustus 2023 August 3, 2023	Pemaparan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/CSR (TJSLS) Presentation of Social and Environmental Responsibility (TJSLS)
31	7 Agustus 2023 August 7, 2023	Diskusi Pengembangan SDM dengan Direksi HR Development Discussion with the Board of Directors
32	16 Agustus 2023 August 16, 2023	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Agustus Monthly Meeting of the Board of Directors and Heads of Division for August
33	22 Agustus 2023 August 22, 2023	<i>Launching Whistleblowing System</i> LRT Jakarta Integritas Launching of Whistleblowing System LRT Jakarta Integritas
34	25 Agustus 2023 August 25, 2023	<i>Kick Off Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)</i> Perusahaan Tahun 2024 Kick Off of the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKA)
35	30 Agustus 2023 August 30, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Agustus Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting for August
36	5 September 2023 September 5, 2023	Diskusi Divisi SDM bersama Direksi HR Division Discussion with the Board of Directors

No.	Tanggal Date	Agenda
37	12 September 2023 September 12, 2023	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan September Sesi 1 Monthly Meeting of the Board of Directors and Heads of Division for September Session 1
38	13 September 2023 September 13, 2023	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan September Sesi 2 Monthly Meeting of the Board of Directors and Heads of Division for September Session 2
39	26 September 2023 September 26, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan September Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting for September
40	6 Oktober 2023 October 6, 2023	Rapat Tindak Lanjut Penyusunan RKAP 2024 Follow-up Meeting on the Preparation of the Company's 2024 Work Plan and Budget
41	16 Oktober 2023 October 16, 2023	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Oktober Sesi 1 Monthly Meeting of the Board of Directors and Heads of Division for October Session 1
42	17 Oktober 2023 October 17, 2023	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Oktober Sesi 2 Monthly Meeting of the Board of Directors and Heads of Division for October Session 2
43	27 Oktober 2023 October 27, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Oktober Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting for October
44	10 November 2023 November 10, 2023	<i>Strategic Review Meeting Semester II 2023 dan Pembahasan Program Kerja Tahun 2024 Day 1</i> Strategic Review Meeting Semester II 2023 and Discussion of 2024 Work Program Day 1
45	11 November 2023 November 11, 2023	<i>Strategic Review Meeting Semester II 2023 dan Pembahasan Program Kerja Tahun 2024 Day 2</i> Strategic Review Meeting Semester II 2023 and Discussion of 2024 Work Program Day 2
46	24 November 2023 November 24, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan November Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting for November
47	27 November 2023 November 27, 2023	<i>Focus Group Discussion : Pengukuran Nilai Budaya Perusahaan LRTJ</i> Focus Group Discussion: Measurement of LRTJ Corporate Culture Values
48	28 November 2023 November 28, 2023	Rapat Pembahasan Sosialisasi Matriks Kewenangan Authority Matrix Socialization Discussion Meeting
49	30 November 2023 November 30, 2023	<i>Performance Review Meeting</i>
50	4 Desember 2023 December 4, 2023	Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT LRT Jakarta Pre-Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT LRT Jakarta
51	7 Desember 2023 December 7, 2023	Rapat Pembahasan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> Tahun 2024 Risk Appetite and Risk Tolerance Discussion Meeting for 2024
52	13 Desember 2023 December 13, 2023	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Desember Part 1 Monthly Meeting of the Board of Directors and Heads of Division for December Session 1
53	14 Desember 2023 December 14, 2023	Rapat Bulanan Direksi dan Kepala Divisi Bulan Desember Sesi 2 Monthly Meeting of the Board of Directors and Heads of Division for December Session 2
54	18 Desember 2023 December 18, 2023	Diskusi Hasil Pemetaan Proses Bisnis dan Matriks RACI LRT Jakarta Discussion of Business Process Mapping Results and RACI Matrix of LRT Jakarta
55	28 Desember 2023 December 28, 2023	Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi Bulan Desember Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting for December

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Informasi Pemegang Saham Utama/Pengendali Hingga Nama Pemilik Akhir

PT Jakarta Propertindo (perseroda) ("PT Jakpro") dan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo ("PT JIP") adalah Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan. Kepemilikan saham PT Jakpro atas Perusahaan adalah sebesar 99,55% sementara PT JIP memiliki saham Perusahaan sebesar 0,45%

DISCLOSURE OF AFFILIATION BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJOR AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

Information on Major/Controlling Shareholders Up to the Name of the Ultimate Owner

PT Jakarta Propertindo (perseroda) ("PT Jakpro") and PT Jakarta Infrastruktur Propertindo ("PT JIP") are the Company's Shareholders, as stated in the Company's Articles of Association. PT Jakpro owns 99.55% of the Company's shares while PT JIP owns 0.45% of the Company's shares

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi

Pemegang Saham Utama/Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki Pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak masing-masing.

Berikut disampaikan terkait hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun Pemegang Saham.

Affiliation of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Major/Controlling Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors respect each other in carrying out their respective duties, responsibilities, and authorities, in accordance with laws and regulations and the Articles of Association. The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company have guidelines and rules of procedure that include, among other things, their respective responsibilities, obligations, authorities, and rights.

The following information is provided regarding the affiliation of the Board of Commissioners and the Board of Directors with other members of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as the Shareholders.

	Jabatan Position	Hubungan Keluarga dengan Familial Relationship with			Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with			
		Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	
Dewan Komisaris Board of Commissioners								
Iwan Takwin	Komisaris Utama President Commissioner	x	x	x	x	x	v	
Azas Tigor Nainggolan	Komisaris Commissioner	x	x	x	x	x	x	
Mohamad Pramintohadi Sukarno	Komisaris Commissioner	x	x	x	x	x	x	
Direksi Board of Directors								
Hendri Saputra	Direktur Utama President Director	x	x	x	x	x	x	
Sahurdi	Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Director of Finance and Business Support	x	x	x	x	x	x	
Aditia Kesuma Negara	Direktur Operasi dan Pengembangan Director of Operations and Development	x	x	x	x	x	x	

v = ada | x = tidak ada

v = yes | x = no

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Per 31 Desember 2023, Perseroan tidak melakukan penerbitan saham untuk dimiliki oleh publik, dan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham Perseroan.

DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

As of December 31, 2023, the Company did not issue shares to be owned by the public, and did not have a management share ownership program. Thus, the Board of Commissioners and Directors do not own the Company's shares.

	Kepemilikan Saham Share Ownership	
	PT LRT Jakarta	Perusahaan Lain > 5% In Other Company >5%
Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Iwan Takwin (Komisaris Utama) President Commissioner	x	x
Azas Tigor Nainggolan (Komisaris) Commissioner	x	x
Mohamad Pramintohadi Sukarno (Komisaris) Commissioner	x	x
Direksi Board of Directors		
Hendri Saputra (Direktur Utama) President Director	x	x
Sahurdi (Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis) Director of Finance and Business Support	x	x
Aditia Kesuma Negara (Direktur Operasi dan Pengembangan) Director of Operations and Development	x	x

v = ada | x = tidak ada
v = yes | x = no

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Berikut ini tabel yang menunjukkan hubungan Kepengurusan antar anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan lain dalam periode tahun 2023:

DISCLOSURE OF CONCURRENT POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The following table shows the managerial relationship between members of the Board of Commissioners and Directors in other companies in the 2023 period:

	Kepengurusan pada Perusahaan/Institusi Lain Management in Other Companies/Institutions		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Member of the Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As a Member of the Board of Directors	Jabatan Lainnya Other Position
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Iwan Takwin (Komisaris Utama) President Commissioner	x	v	x
Azas Tigor Nainggolan (Komisaris) Commissioner	x	x	v
Mohamad Pramintohadi Sukarno (Komisaris) Commissioner	x	x	x
Direksi Board of Directors			
Hendri Saputra (Direktur Utama) President Director	x	x	x
Sahurdi (Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis) Director of Finance and Business Support	x	x	x
Aditia Kesuma Negara (Direktur Operasi dan Pengembangan) Director of Operations and Development	x	x	x

v = ada | x = tidak ada
v = Yes | x = No

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Organs of The Board of Commissioners

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal pengawasan, Dewan Komisaris membentuk organ pendukung yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan (undangan sampai dengan dokumentasi) rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
3. Membuat, mengadministrasikan serta mendistribusikan risalah Rapat Dewan Komisaris.
4. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan:
 - a. *Monitoring* tindak lanjut hasil persetujuan, nasihat, tanggapan atau pertimbangan Dewan Komisaris;
 - b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perseroan;
 - c. Dukungan administrasi serta *monitoring* berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengelolaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi; and
 - d. Dukungan administrasi serta *monitoring* berkaitan dengan hal-hal yang harus dilaporkan kepada Pemegang Saham/RUPS.
5. Mempersiapkan bahan/materi, angka 4) huruf b) di atas, antara lain:
 - a. Laporan Bulanan Perseroan;
 - b. Laporan Triwulanan Perseroan;
 - c. Laporan Tahunan Perseroan; and
 - d. Laporan-laporan lain yang diperlukan, termasuk dokumen/laporan dari komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.
6. Mempersiapkan dan mendokumentasi seluruh dokumen dan aktivitas penerapan GCG, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris.

In supporting the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in terms of supervision, the Board of Commissioners forms supporting organs consisting of the Secretary to the Board of Commissioners and the Audit Committee.

SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

Duties and Responsibilities of the Secretary to the Board of Commissioners

1. Carry out secretarial administrative activities within the Board of Commissioners.
2. Organize (invitations to documentation) meetings of the Board of Commissioners and meetings between the Board of Commissioners and Shareholders, as well as Directors and other related parties.
3. Create, administer and distribute the minutes of the Board of Commissioners' Meetings.
4. Provide data/information needed by the Board of Commissioners and committees within the Board of Commissioners relating to:
 - a. Monitoring follow-up results of the approval, advice, responses or considerations of the Board of Commissioners;
 - b. Substances/materials of an administrative nature regarding reports/activities of the Board of Directors in managing the Company;
 - c. Administrative support and monitoring related to matters that must obtain approval or recommendations from the Board of Commissioners, in connection with the Company's management activities carried out by the Board of Directors; and
 - d. Administrative support and monitoring related to matters that must be reported to Shareholders/GMS.
5. Prepare materials for number 4) letter b) above, among others:
 - a. The Company's Monthly Report;
 - b. The Company's Quarterly Report;
 - c. The Company's Annual Report; and
 - d. Other necessary reports, including documents/reports from committees under the Board of Commissioners.
6. Prepare and record all GCG implementation documents and activities, especially those related to the implementation of the Board of Commissioners' supervision.

KOMITE AUDIT

Komite Audit adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

Piagam Komite Audit

Komite Audit Perseroan memiliki Piagam sebagai acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal Perseroan.

Piagam Komite Audit antara lain berisi:

1. Struktur Komite Audit
2. Pembentukan dan pengangkatan anggota Komite Audit
3. Persyaratan dan masa tugas anggota Komite Audit
4. Fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Komite Audit
5. Lingkup pekerjaan
6. Kode etik dan mekanisme rapat

Kriteria Komite Audit dan Masa Jabatan

Persyaratan

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan akuntansi;
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut Badan Usaha Milik Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis operasi Perseroan;
5. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis Perseroan.

Masa Jabatan

1. Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya dalam hal masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
2. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan jangka waktu masa jabatan Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee was formed and is responsible to the Board of Commissioners in assisting the implementation of the duties and functions of the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal system and the effectiveness of the implementation of the duties of external auditors and internal auditors by monitoring and evaluating the planning and implementation of audits as well as monitoring the follow-up of audit results in order to assess the adequacy of internal control including the adequacy of the financial reporting process.

Audit Committee Charter

The Company's Audit Committee has a Charter as a reference and work guideline for the Audit Committee in carrying out its duties and authorities in carrying out compliance obligations with laws and regulations and the Company's internal control.

The Audit Committee Charter includes:

1. Structure of the Audit Committee
2. Formation and appointment of members of the Audit Committee
3. Requirements and term of office of members of the Audit Committee
4. Functions, duties, authorities, and responsibilities of the Audit Committee
5. Scope of work
6. Code of Conduct and meeting mechanism

Criteria and Term of Office of the Audit Committee

Requirements

1. Possesses high integrity, sufficient ability, knowledge and experience in accordance with their educational background, and able to communicate well;
2. At least one member of the Audit Committee must have an educational background and experience in finance and accounting;
3. Have sufficient knowledge to read and understand financial reports;
4. Have sufficient knowledge of laws and regulations, especially those concerning Regional Owned Enterprises, and laws and regulations related to the Company's business operations;
5. One of the members of the Audit Committee must have the ability and understanding of the Company's business scope.

Term of Office

1. The term of office of the Audit Committee member, which is also a member of the Board of Commissioners, automatically terminates when its term of office as a member of the Board of Commissioners ends.
2. The term of office for members of the Audit Committee who are not members of the Board of Commissioners, is in accordance with the term of office of the Board of Commissioners, without prejudice to the right of the Board of Commissioners to terminate at any time.

3. Dalam hal ketua Komite Audit berhenti atau diberhentikan dari posisinya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sudah ditetapkan penggantinya.

Komposisi Komite Audit

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Sarno	Komite Audit Audit Committee	SK Komisaris No. 001/KOM/111/XI/2023 tentang Pembentukan Komite Audit Dewan Komisaris PT LRT Jakarta tanggal 1 November 2023 Decree of the Board of Commissioners No. 001/KOM/111/XI/2023 concerning the Establishment of Audit Committee of the Board of Commissioners of PT LRT Jakarta dated November 1, 2023

Profil Komite Audit



Sarno

Komite Audit
Periode Jabatan: Pertama
Audit Committee
Term of Office: 1st

Profile of Audit Committee

Data Pribadi
Warga Negara Indonesia
Usia 43 Tahun
Kelahiran Blora, 25 Oktober 1980

Domisili
Jakarta, Indonesia

Riwayat Pendidikan

- Master Degree (M.Buss) International University of Japan, 2011
- Master Degree (M.Sc.) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010
- Diploma IV (SST.,Ak.) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta, 2004
- Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta, 2002

Riwayat Pekerjaan

- Senior Policy Analyst, Fiscal Policy Agency, Des 2019 - sekarang
- Head of Subdivision for Export Tax (and Customs Facilities), Fiscal Policy Agency, Agustus 2018 – November 2019
- Head of Subdivision for Excise Tax, Fiscal Policy Agency, 2012 – Agustus 2018
- Auditor, Kantor Pelayanan Utama DJBC Tanjung Priok, 2008 – 2009
- Goods Inspector, Kantor Pelayanan Utama DJBC Tanjung Priok, 2007 – 2008
- Auditor, Regional Office of Customs and Excise, Sumatera Selatan, 2006 – 2007
- Auditor, Head Quarter of Directorate General of Customs and Excise, 2004 – 2006
- Consultant, Ernst and Young, 2004 – 2006

Sertifikasi

- Sertifikat Akuntan (Chartered Accountant/CA) – 2004
- Sertifikat Auditor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan – 2005
- Sertifikat Ketua Auditor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan – 2008
- Seminar Nasional Internal Audit: Trusted Advisor, Navigating the New Frontier, Connecting between Information Technology and Business Strategy – 2023

3. In the event that the chairman of the Audit Committee resigns or is dismissed from his position, no later than 30 (thirty) working days, a replacement will be determined.

Composition of Audit Committee

Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
SK Komisaris No. 001/KOM/111/XI/2023 tentang Pembentukan Komite Audit Dewan Komisaris PT LRT Jakarta tanggal 1 November 2023 Decree of the Board of Commissioners No. 001/KOM/111/XI/2023 concerning the Establishment of Audit Committee of the Board of Commissioners of PT LRT Jakarta dated November 1, 2023

Profile of Audit Committee

Personal Data
Indonesian Citizen
Age 43 years old
Born in Blora, October 25, 1980

Domicile
Jakarta, Indonesia

Educational Background

- Master's Degree (M.Buss) from International University of Japan, 2011
- Master's Degree (M.Sc.) from Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2010
- Diploma IV (SST.,Ak.) from State College of Accountancy Jakarta, 2004
- Diploma III from State College of Accountancy Jakarta, 2002

Work Experience

- Senior Policy Analyst, Fiscal Policy Agency, Dec 2019 – present
- Head of Subdivision for Export Tax (and Customs Facilities), Fiscal Policy Agency, August 2018 – November 2019
- Head of Subdivision for Excise Tax, Fiscal Policy Agency, 2012 – August 2018
- Auditor, Main Service Office of Directorate General of Customs and Excise, Tanjung Priok, 2008 – 2009
- Goods Inspector, Main Service Office of Directorate General of Customs and Excise, Tanjung Priok, 2007 – 2008
- Auditor, Regional Office of Customs and Excise, South Sumatra, 2006 – 2007
- Auditor, Headquarters of the Directorate General of Customs and Excise, 2004 – 2006
- Consultant, Ernst and Young, 2004 – 2006

Certifications

- Chartered Accountant Certificate (CA) – 2004
- Auditor Certificate at the Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance – 2005
- Chief Auditor Certificate at the Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance – 2008
- National Seminar on Internal Audit: Trusted Advisor, Navigating the New Frontier, Connecting between Information Technology and Business Strategy – 2023

Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit Perseroan diwajibkan memenuhi kriteria independensi:

1. Bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
2. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris.
3. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas tugas sebagai anggota Komite Audit.
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

1. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas *system* pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internal.
2. Komite Audit bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
3. Komite Audit menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal.
4. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaannya.
5. Komite Audit memastikan telah terdapat prosedur evaluasi atas segala informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan.
6. Komite Audit melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
7. Komite Audit melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan, antara lain: Laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
8. Komite Audit memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dan Auditor Eksternal atas jasa yang diberikannya.
9. Komite Audit menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan. Dengan tetap mengacu pada sistem pelaporan pelanggaran Perseroan.

Audit Committee Independence

Members of the Company's Audit Committee are required to meet the following independence criteria:

1. Not an employee of a Public Accounting Firm, Legal Consulting Firm, or other party providing audit services, non-audit services, and or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners.
2. Not an individual who has the authority and responsibility to plan, lead or control the Company within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners, except for members of the Audit Committee who come from the Board of Commissioners.
3. Has no business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business, including not receiving compensation from the Company and its subsidiaries other than fees for services received related to duties as a member of the Audit Committee.
4. Has no familial relationship due to marriage and heredity to the second degree, both horizontally and vertically with the Board of Commissioners, Directors, or Major/Controlling Shareholders of the Company.

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

1. The Audit Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of the duties of the External and Internal Auditor.
2. The Audit Committee works collectively and functions to assist the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties.
3. The Audit Committee assesses the implementation of activities and audit results carried out by the Internal Auditors and External Auditors.
4. The Audit Committee provides recommendations regarding the improvement of the internal control system and its implementation.
5. The Audit Committee ensures that there is an evaluation procedure for all information issued by the Company.
6. The Audit Committee identifies matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.
7. The Audit Committee reviews the financial information to be issued by the Company, including: Financial statements, projections and other reports related to the Company's financial information.
8. The Audit Committee provides an independent opinion in the event of a difference of opinion between the Board of Directors and the External Auditor for the services provided.
9. The Audit Committee examines complaints related to the Company's accounting and financial reporting processes, by still referring to the Company's violation reporting system.

10. Komite Audit menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan dalam Perseroan. Dengan tetap mengacu pada bagian benturan kepentingan dalam pedoman ini.
11. Komite Audit memberikan rekomendasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawas Intern kepada Dewan Komisaris.
12. Komite Audit memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan yang disampaikan oleh Direksi (manajemen) kepada Dewan Komisaris.
13. Komite Audit memantau ketataan/kepatuhan terhadap pedoman GCG, termasuk penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016.
14. Komite Audit membantu Dewan Komisaris terhadap kelengkapan dokumen dan aktivitas yang ditetapkan sebagai bagian dari penerapan GCG.
15. Komite Audit melakukan penelaahan atas kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
16. Komite Audit berwenang untuk:
 - a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan, tentang pegawai (karyawan), dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
 - b. Berkomunikasi langsung dengan pegawai (karyawan), termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi pengendalian internal, manajemen risiko, tata kelola perusahaan dan Auditor Eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; dan
 - c. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
17. Ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Audit akan diuraikan lebih rinci dalam Piagam Komite Audit, yang paling sedikit memuat:
 - a. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang;
 - b. Komposisi, struktur dan persyaratan keanggotaan;
 - c. Tata cara dan prosedur kerja;
 - d. Kebijakan penyelenggaraan rapat;
 - e. Sistem pelaporan kegiatan;
 - f. Kode etik;
 - g. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan;
 - h. Masa tugas Komite Audit; dan
 - i. Piagam Komite Audit, ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Ketua Komite Audit.
10. The Audit Committee reviews and provides advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest in the Company. By still referring to the conflict of interest section in this guide.
11. The Audit Committee provides recommendations regarding the appointment and dismissal of the Head of the Internal Audit Unit to the Board of Commissioners.
12. The Audit Committee provides independent professional opinion to the Board of Commissioners on reports submitted by the Board of Directors (management) to the Board of Commissioners.
13. The Audit Committee monitors adherence/compliance with GCG guidelines, including the implementation of the SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System.
14. The Audit Committee assists the Board of Commissioners with the completeness of documents and activities determined as part of the implementation of GCG.
15. The Audit Committee reviews the Company's compliance with laws and regulations related to the Company's activities.
16. The Audit Committee is authorized to:
 - a. Access Company documents, data and information, regarding employees, funds, assets, and Company resources needed;
 - b. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and parties carrying out the functions of internal control, risk management, corporate governance, and the External Auditor regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee; and
 - c. Carry out other authorities granted by the Board of Commissioners.
17. The scope of duties, authorities and responsibilities of the Audit Committee will be described in more detail in the Audit Committee Charter, which at least contains:
 - a. Duties, responsibilities, and authorities;
 - b. Composition, structure and membership requirements;
 - c. Work procedures;
 - d. Meeting holding policy;
 - e. Activity reporting system;
 - f. Code of Ethics;
 - g. Provisions regarding the handling of complaints or reports related to violations concerning financial reporting;
 - h. Term of office of the Audit Committee; and
 - i. Audit Committee Charter, signed by the Board of Commissioners and the Chairman of the Audit Committee.

Tanggung Jawab Komite Audit dalam Pemberian Rekomendasi atas Penunjukan dan Pemberhentian Auditor Eksternal

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, salah satu tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan. Selain itu, Komite Audit juga bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.

Komite Audit, sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik, memegang tanggung jawab yang signifikan dalam memastikan integritas dan transparansi laporan keuangan. Dalam kapasitasnya, komite audit memberikan rekomendasi yang objektif dan independen atas penunjukan serta pemberhentian auditor eksternal, sebuah proses yang krusial untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Ketika induk usaha menunjuk auditor eksternal, Komite Audit harus melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa auditor tersebut memenuhi standar legalitas, kompetensi, dan independensi yang berlaku. Komite Audit bertindak berdasarkan *charter* yang telah ditetapkan, yang mengatur proses seleksi dan penunjukkan auditor eksternal, serta ketentuan yang harus dipatuhi terkait dengan kriteria tersebut.

Selain itu, Komite Audit juga bertanggung jawab untuk menelaah hasil evaluasi kinerja auditor eksternal. Jika terdapat temuan yang menunjukkan adanya konflik kepentingan atau penurunan kualitas audit, Komite Audit harus memberikan rekomendasi pemberhentian dan mengusulkan penunjukan auditor pengganti yang lebih sesuai.

Dengan demikian, Komite Audit memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa auditor eksternal yang ditunjuk oleh induk usaha dapat bekerja dengan efektif, independen, dan sesuai dengan standar etika profesi, demi menjaga integritas informasi keuangan perusahaan.

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Di tahun 2023, Komite Audit telah mengikuti program pengembangan kompetensi, dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Uraian terkait program pengembangan kompetensi Komite Audit disajikan secara lengkap di bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Responsibilities of the Audit Committee in Providing Recommendations for the Appointment and Termination of External Auditors

In accordance with Regulation of Financial Services Authority No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Work Implementation of the Audit Committee, one of the duties and responsibilities of the Audit Committee is to review the financial information that will be issued by the Company to the public and/or authority authorities, including financial reports, projections, and other reports related to the Company's financial information. Additionally, the Audit Committee is also responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an Accountant based on independence, scope of assignment, and fee remuneration.

The Audit Committee, as an integral part of good corporate governance, holds significant responsibility in ensuring the integrity and transparency of financial reporting. In its capacity, the audit committee provides objective and independent recommendations on the appointment and dismissal of external auditors, a crucial process for maintaining stakeholder trust.

When the parent company appoints an external auditor, the Audit Committee must conduct a thorough evaluation to ensure that the auditor meets the applicable standards of legality, competence, and independence. The Audit Committee acts based on a charter that has been established, which regulates the selection process and appointment of external auditors, as well as the provisions that must be complied with regarding these criteria.

Furthermore, the Audit Committee is also responsible for reviewing the results of the external auditor's performance evaluation. If findings indicate a conflict of interest or a decline in audit quality, the Audit Committee must recommend dismissal and propose the appointment of a more suitable replacement auditor.

Thus, the Audit Committee plays a key role in ensuring that the external auditors appointed by the parent company can work effectively, independently, and in accordance with professional ethical standards, to maintain the integrity of the Company's financial information.

Competency Development of Audit Committee

In 2023, the Audit Committee has participated in competency development programs to enhance competencies and expertise in carrying out its duties and responsibilities. Details regarding the Audit Committee's competency development program are presented comprehensively in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Kebijakan Remunerasi Bagi Anggota Komite Audit

LRT Jakarta memiliki kebijakan terkait remunerasi bagi Komite Audit. Persetujuan pemberian remunerasi Komite Audit ditetapkan berdasarkan RKAT tahun 2023.

Remuneration Policy for Members of the Audit Committee

LRT Jakarta has a policy regarding remuneration for the Audit Committee. Approval for granting remuneration for the Audit Committee is determined based on the 2023 RKAT.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Komite Audit melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Komite Audit
2. Memberi nasihat/saran kepada audit internal
3. Menyusun program kerja Komite Audit
4. Menyampaikan pendapat/saran kepada Dewan Komisaris
5. Menyampaikan laporan Komite Audit
6. *Self assessment* kinerja Komite Audit
7. Melakukan peran dalam peningkatan kinerja GCG
8. Melakukan pengawasan terhadap Audit Internal, Manajemen Risiko, Sistem Teknologi Informasi
9. Melakukan review atas RKAT Divisi Internal Audit
10. Mengikuti Seminar Nasional Internal Audit

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang diterapkan Perseroan sebagai berikut:

1. Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan para eksekutif lainnya di dalam Perusahaan;
2. Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan jumlah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
3. Membantu menyusun sistem penggajian, pemberian tunjangan dan fasilitas lainnya di Perusahaan serta memantau pelaksanaannya.

Proses kerja dari fungsi nominasi adalah kandidat potensial selain posisi Direksi dan Komisaris yaitu level Kepala Divisi akan diseleksi oleh Divisi SDM untuk kemudian dilaporkan kepada Direksi dan secara berkala prosesnya akan dilaporkan jajaran direksi kepada Dewan Komisaris. Sedangkan fungsi remunerasi, Divisi SDM akan membuat prosesnya untuk disampaikan kepada Direksi hingga mendapatkan persetujuan, kemudian hasil yang telah disetujui Direksi akan dilaporkan kepada Dewan Komisaris, sehingga seluruh proses yang terjadi di fungsi nominasi dan remunerasi dapat dipantau pelaksanaannya oleh Dewan Komisaris.

Implementation of Duties of the Audit Committee in 2023

Throughout the year 2023, the Audit Committee carried out the following activities:

1. Audit Committee Meetings
2. Providing advice/guidance to internal audit
3. Developing the Audit Committee's work program
4. Providing opinions/recommendations to the Board of Commissioners
5. Presenting Audit Committee report
6. Self-assessment of the Audit Committee's performance
7. Playing a role in improving GCG performance
8. Supervising Internal Audit, Risk Management, Information Technology Systems
9. Reviewing the Internal Audit Division's Annual Audit Plan (RKAT)
10. Participating in National Internal Audit Seminars

Nomination and Remuneration Function

The Nomination and Remuneration functions applied by the Company are as follows:

1. Formulating selection criteria and nomination procedures for members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and other executives within the Company;
2. Developing an assessment system and providing recommendations regarding the required number of members of the Board of Directors and members of the Company's Board of Commissioners;
3. Assisting in the formulation of the Company's salary system, benefits, and other facilities, as well as monitoring their implementation.

The work process of the nomination function is that potential candidates for positions other than the Board of Directors and Commissioners, such as the Head of Division level, will be selected by the HR Division and then reported to the Board of Directors, and periodically the process will be reported by the Board of Directors to the Board of Commissioners. As for the remuneration function, the HR Division will create the process to be presented to the Board of Directors for approval, then the results approved by the Board of Directors will be reported to the Board of Commissioners, so that the entire process occurring in the nomination and remuneration functions can be monitored by the Board of Commissioners.

Organ Pendukung Direksi

Supporting Organs of The Board of Directors

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan, Direksi dibantu oleh beberapa organ pendukung, yaitu Sekretaris Perusahaan, Prasarana, SDM dan GA, Sarana, Akuntansi dan Keuangan, Strategi, Bisnis dan Pengadaan, dan Audit, Risiko dan Keselamatan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Salah satu elemen dalam struktur dan proses Tata Kelola Perusahaan adalah pemastian bahwa penggunaan wewenang dan hubungan dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik untuk kepentingan Perseroan. Untuk mendukung fungsi pembentukan citra positif Perseroan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan, manajemen Perseroan didukung oleh Sekretaris Perusahaan. Selain fungsi tersebut, Sekretaris Perusahaan juga bertugas untuk membantu tugas Direksi, yaitu merumuskan dan menyusun kebijakan dan pedoman, perencanaan, evaluasi, dan melaksanakan aktivitas hubungan eksternal, pemasaran, tanggung jawab sosial, protokoler, legal, administrasi, dan komunikasi internal Perseroan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Sheila Indira Maharshi berdasarkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 004/SDM/106/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap. Berikut disampaikan informasi terkait profil Sekretaris Perusahaan.

In carrying out the duties and responsibilities of managing the Company, the Board of Directors is assisted by several supporting organs, namely the Corporate Secretary, Infrastructure, Human Resources and General Affairs, Facilities, Finance and Accounting, Strategy, Business and Procurement, and Audit, Risk and Safety.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director based on the Company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners.

One of the elements in the structure and process of Corporate Governance is ensuring that the use of authority and relations with stakeholders are running well for the benefit of the Company. To support the function of forming a positive image of the Company through the management of an effective communication program to all stakeholders, the Company's management is supported by the Corporate Secretary. In addition to these functions, the Corporate Secretary is also tasked with assisting the Board of Directors' duties, namely formulating policies and guidelines, planning, evaluating, and carrying out activities of external relations, marketing, social responsibility, protocol, legal, administration, and the Company's internal communications in accordance with the Company's policies, guidelines and plans that have been set.

Profile of the Corporate Secretary

The position of Corporate Secretary is held by Sheila Indira Maharshi, based on the Decree of the Board of Directors No. 004/SDM/106/VII/2022, July 18, 2022 concerning the Appointment of Permanent Employees. The following provides information regarding the profile of the Corporate Secretary.



Sheila Indira Maharshi

Sekretaris Perusahaan
Menjabat sejak 18 Juli 2022
Corporate Secretary
Held office since: July 18, 2022

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 36 tahun per 31 Desember 2023

Domisili

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Pendidikan

Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjajaran, Bandung (2008)

Riwayat Pekerjaan

1. Corporate Communication Head, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2017-2022)
2. Senior Manager Public Relation, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2008-2017)

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Penghubung (*liaison officer*) antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham serta wakil Perseroan dalam berhubungan dengan masyarakat, regulator, investor, lembaga atau asosiasi lain (*stakeholders*) yang berkaitan dengan Perseroan.
2. Penatausahaan (kesekretariatan) dokumen Perseroan, serta membuat, memelihara dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus serta risalah Rapat Direksi maupun RUPS. Dalam hal pembuatan, pemeliharaan dan penyimpanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Perseroan yang berlaku.
3. Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta laporan sewaktu-waktu yang diminta untuk dan atas nama Perseroan, berisi informasi yang akurat dan dapat diandalkan.
4. Menyelenggarakan (undangan sampai dengan dokumentasi) rapat Direksi dan rapat/pertemuan antara Direksi dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris maupun pihak-pihak terkait lainnya.
5. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Direksi yang berkaitan dengan:
 - a. *Monitoring* tindak lanjut hasil keputusan, dan arahan dari Direksi kepada manajemen di bawah Direksi, dan termasuk persetujuan, nasihat, tanggapan atau pertimbangan dari Dewan Komisaris kepada Direksi;
 - b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Divisi/*Special Business Unit* Proyek dalam mengelola unit kerja;

Personal Data

Indonesian Citizen
36 years old, as of December 31, 2023

Domicile

Bekasi, West Java, Indonesia

Educational Background

Bachelor of Communication Science from Padjadjaran University (2008)

Work Experience

1. Corporate Communication Head, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (2017-2022)
2. Senior Manager Public Relation, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2008-2017)

Main Duties and Functions

1. As a liaison officer between the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders, and representatives of the Company in dealing with the public, regulators, investors, other institutions or associations (stakeholders) related to the Company.
2. Administration (secretariat) of the Company's documents, as well as creating, maintaining and storing the Register of Shareholders, the Special Register, and the minutes of the Board of Directors and GMS meetings. In terms of manufacture, maintenance and storage must be in accordance with the applicable provisions of laws and regulations and the Company's internal policies.
3. Prepare monthly, quarterly, and annual reports, as well as occasional reports requested for and on behalf of the Company, containing accurate and reliable information.
4. Organize (invitation to documentation) meetings of the Board of Directors and meetings between the Board of Directors and Shareholders, the Board of Commissioners, and other related parties.
5. Provide data/information required by the Board of Directors relating to:
 - a. Monitoring the follow-up of decisions, and directions from the Board of Directors to management under the Board of Directors, and including approval, advice, responses, or considerations from the Board of Commissioners to the Board of Directors;
 - b. Administrative materials regarding Division/*Special Business Unit*/Project reports/activities in managing work units;

- c. Dukungan administrasi serta *monitoring* berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan dari Direksi;
- d. Dukungan administrasi serta *monitoring* berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan, tanggapan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
- 6. Memberikan pelayanan informasi yang dibutuhkan mengenai data atau dokumen dari Perseroan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam kebijakan informasi Perseroan dan penyampaian laporan-laporan lainnya kepada Pemegang Saham atau kepada *stakeholders* secara tepat waktu, termasuk mengelola penyampaian data, dokumen dan laporan Perseroan secara elektronik sesuai ketentuan Pergub No. 19 Tahun 2018.
- 7. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
- 8. Mengadakan program pengenalan Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya.
- 9. Melakukan pengurusan mengenai permohonan dan/ atau perubahan data Perseroan terkait pengurusan Direksi, antara lain: Pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan legalitas lainnya terkait Perseroan.
- 10. Mengelola penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Unit Kerja dalam rangka sosialisasi, seminar, *focus group discussion*, peresmian, *launching* dan bentuk kegiatan lainnya yang dihadiri oleh *stakeholders* eksternal Perseroan. Pengelolaan penyelenggaraan kegiatan tersebut agar dapat memberikan kontribusi peningkatan citra positif Perseroan.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No. 009/SDM/111/III/2020. Berikut struktur organisasi Sekretaris Perusahaan yang menggambarkan fungsi-fungsi yang berada di dalamnya.

- c. Administrative support and monitoring related to matters that must obtain approval from the Board of Directors;
- d. Administrative support and monitoring related to matters that must obtain approval, response, or recommendations from the Board of Commissioners and/or GMS.
- 6. Provide information services needed regarding data or documents from the Company within the limits specified in the Company's information policy and submit other reports to Shareholders or to stakeholders in a timely manner, including managing the delivery of Company data, documents and reports electronically, in accordance with the provisions of Regulation of the Governor No. 19 of 2018.
- 7. Provide information needed by the Board of Directors and Commissioners periodically and/or at any time when requested.
- 8. Organize a Company introduction program for members of the Board of Directors and Board of Commissioners who were appointed for the first time.
- 9. Manage requests for and/or change Company data related to the management of the Board of Directors, including: Appointment, replacement and dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and other legal matters related to the Company.
- 10. Manage the implementation of Work Unit activities in the context of outreach, seminars, focus group discussions, inauguration, launching and other forms of activities attended by the Company's external stakeholders. Also, manage the implementation of these activities in order to contribute to increasing the positive image of the Company.

Corporate Secretary Organizational Structure

The organizational structure of the Corporate Secretary is determined in accordance with the Decree of the Board of Directors No. 009/SDM/111/III/2020. The following is the organizational structure of the Corporate Secretary which describes the functions within it.



Hingga akhir tahun 2023, jumlah karyawan Sekretaris Perusahaan adalah sebanyak 16 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Jabatan Position	Jumlah Karyawan Number of Employees
Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Head of Corporate Secretary Division	1
Kepala Departemen Hukum Head of Legal Department	1
Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan Head of Corporate Communications Department	1
Kepala Departemen Kesekretariatan dan Administrasi Head of Secretarial and Administration Department	1
Officer Hukum Legal Officer	1
Staf Hukum Legal Staff	2
Supervisor Brand Communication Brand Communication Supervisor	1
Officer Brand Communication Brand Communication Officer	1
Staf Brand Communication Brand Communication Staff	1
Officer Public Relation Public Relation Officer	1
Staf Public Relation Public Relation Staff	1
Staf Kesekretariatan dan Administrasi Secretarial and Administration Staff	2
Sekretaris Direksi Secretary to the Board of Directors	1
Admin Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Administration Staff	1
Jumlah Total	16

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian dalam menjalankan fungsi dan peranannya, di tahun 2023 Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pengembangan kompetensi yang pembahasannya disajikan secara lengkap di bab Profil Perusahaan.

Laporan Kegiatan Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan, di antaranya:

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan hubungan dengan media, seperti pembuatan siaran pers, kunjungan ke Depo dan Stasiun.
2. Menjalankan dan memantau media sosial resmi Perseroan: Instagram, Tiktok, Facebook, X, dan YouTube.
3. Membuat materi dan konten publikasi Perseroan seperti poster digital, video dan foto.
4. Mengoordinasikan pelaksanaan kunjungan para pemangku kepentingan.

As of the end of 2023, the number of employees in the Corporate Secretary amounted to 16 people, with the following details:

Competency Development of Corporate Secretary

To improve competence and expertise in carrying out its functions and roles, in 2023 the Corporate Secretary has participated in a competency development program, which is discussed comprehensively in the Company Profile chapter.

Corporate Secretary Activity Report

During the year 2023, the Company Secretary has carried out various tasks and activities, including:

1. Coordinating media relations activities, such as drafting press releases and visits to Depots and Stations.
2. Managing and monitoring the Company's official social media accounts: Instagram, TikTok, Facebook, X, and YouTube.
3. Creating materials and content for the Company's publications such as digital posters, videos, and photos.
4. Coordinating stakeholder visits.

- 5. Mengoordinasikan pelaksanaan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama serta turunannya pada tahun 2023.
- 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan rapat antara Perseroan dengan pemangku kepentingan pemerintah Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan *townhall* perusahaan maupun kegiatan aktivasi untuk meningkatkan jumlah penumpang.
- 7. Mengoordinasikan penyelenggaraan Pra RUPS, RUPS Tahunan dan RUPS LB 2023.
- 8. Menghadiri rapat Direksi sebanyak 55 kali dan menyusun risalah rapat Direksi.
- 9. Menghadiri rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 11 kali dan mempersiapkan materi rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
- 10. Mengoordinasikan pelaksanaan rapat Direksi baik dengan pihak internal maupun eksternal.
- 11. Mengelola dan menyimpan dokumen Perseroan seperti Keputusan Direksi, *Board Manual*, Surat Edaran, Matriks Kewenangan pada tahun 2023.
- 12. Membuat dan memutakhirkan kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- 13. Melakukan dan menyiapkan pemaparan induksi Komisaris baru.
- 14. Mengoordinasikan pelaporan dan sosialisasi pengisian pelaporan LHKPN.
- 5. Coordinating the signing of MoUs and Cooperation Agreements and their derivatives in 2023.
- 6. Coordinating meetings between the Company and government stakeholders, as well as organizing company town hall events and activation activities to increase passenger numbers.
- 7. Organizing Pre-AGM, Annual AGM, and Extraordinary AGM meetings in 2023.
- 8. Attending Board meetings 55 times and preparing meeting minutes.
- 9. Attending joint meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors 11 times and preparing meeting materials.
- 10. Coordinating Board meetings with both internal and external parties.
- 11. Managing and storing Company documents such as Board Decisions, Board Manuals, Circulars, and Authority Matrices in 2023.
- 12. Creating and updating policies related to Good Corporate Governance.
- 13. Conducting and preparing induction presentations for new Commissioners.
- 14. Coordinating reporting and dissemination of asset disclosure reporting (LHKPN).

AUDIT INTERNAL

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal

Dalam rangka memastikan pengelolaan Perseroan telah dilaksanakan, Divisi Audit Internal bertanggung jawab langsung terhadap Direktur Utama. Kepala Divisi Audit Internal diangkat oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Divisi Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris jika Kepala Divisi Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan piagam audit internal perusahaan dan/atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas dengan mempertimbangkan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Profil Kepala Divisi Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/SDM/106/VII/2023 tanggal 01 Juli 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap PT LRT Jakarta, Perusahaan mengangkat Adityawarman Nugroho sebagai Kepala Divisi Audit Internal. Berikut disampaikan profil Kepala Divisi Audit Internal.

INTERNAL AUDIT

Appointment and Dismissal of the Head of Internal Audit Division

The Head of the Internal Audit Division is appointed by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners. The President Director can dismiss the Head of the Internal Audit Division, after obtaining approval from the Board of Commissioners if the Head of the Internal Audit Division does not meet the requirements as stipulated in the Company's internal audit charter and/or fails, or is incompetent in carrying out his duties, taking into account and fulfilling the requirements set by the Company.

Profile of Head of Internal Audit Division

Pursuant to Decree of the Board of Directors No. 003/SDM/106/VII/2023 dated July 1, 2023, concerning Appointment of Permanent Employees of PT LRT Jakarta, the Company appointed Adityawarman Nugroho as Head of the Internal Audit Division. Profile of the Head of the Internal Audit Division is described as follows.



Adityawarman Nugroho

Kepala Divisi Audit Internal
Menjabat sejak 01 Juli 2023
Head of Internal Audit Division
Held office since July 1, 2023

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 36 tahun per 31 Desember 2023

Domisili

Depok, Jawa Barat, Indonesia

Riwayat Pendidikan

1. Sarjana (S1) Ekonomi, Akuntansi – Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia
2. Magister (S2) Magister Manajemen –Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Riwayat Pekerjaan

1. Kepala Departemen Internal Audit, PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
2. Senior Internal Auditor, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
3. Auditor, PT Bank Tabungan Negara, Tbk

Sertifikasi

1. Certified Forensic Auditor
2. Qualified Internal Auditor
3. Lead Implementer ISO 27001
4. Sertifikasi Manajemen Risiko
5. Risk Management Certification Body

Personal Data

Indonesian Citizen
36 years old, as of December 31, 2023

Domicile

Depok, West Java, Indonesia

Educational Background

1. Bachelor of Economics, Accounting – Sultan Agung Islamic University Semarang, Indonesia
2. Master of Management – Jakarta State University, Indonesia

Work Experience

1. Head of Internal Audit Department, PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
2. Senior Internal Auditor, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
3. Auditor, PT Bank Tabungan Negara, Tbk

Certifications

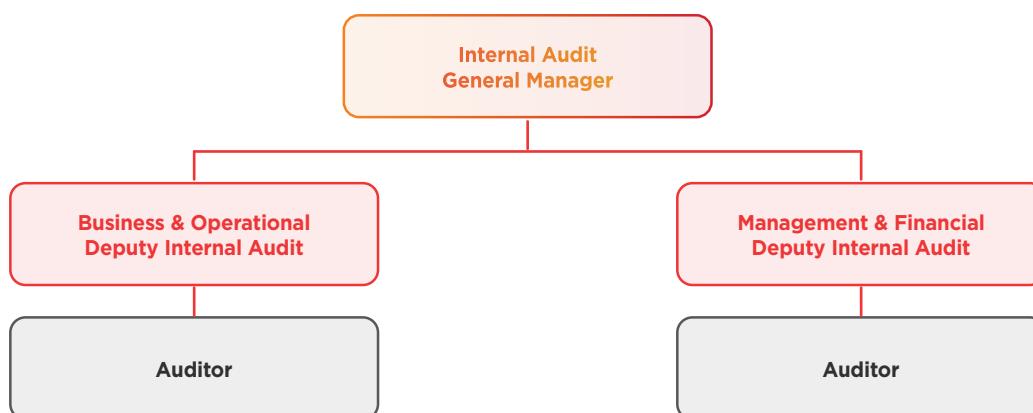
1. Certified Forensic Auditor
2. Qualified Internal Auditor
3. Lead Implementer ISO 27001
4. Sertifikasi Manajemen Risiko
5. Risk Management Certification Body

Struktur Organisasi Audit Internal

Di tahun 2023, struktur organisasi Audit Internal memiliki 4 (empat) orang auditor yang terdiri atas 1 orang Internal Audit General Manager, 1 orang Management & Financial Deputy Internal Audit, 1 orang Business & Operational Deputy Internal Audit, dan 1 orang Auditor sebagaimana terlihat pada bagan berikut:

Internal Audit Organizational Structure

In 2023, the Internal Audit organizational structure has 4 (four) auditors consisting of 1 Internal Audit General Manager, 1 Management & Financial Deputy Internal Audit, 1 Business & Operational Deputy Internal Audit, and 1 Auditor as shown in following chart:



Sertifikasi Profesi Audit Internal

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sertifikasi profesi audit internal menjadi sebuah aspek penting bagi auditor mengenai hal yang berkaitan dengan audit. Pelaksanaan fungsi Audit Internal merujuk pada standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (*The Institute of Internal Auditors*). Perusahaan senantiasa memfasilitasi auditor dalam meningkatkan kemampuan dengan mengikutsertakan pada beragam sertifikasi profesi guna memenuhi standar yang dibutuhkan Perusahaan. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Divisi Audit Internal hingga akhir tahun 2023.

Nama dan Jabatan Name and Position	Level Sertifikasi Certification Level
Adityawarman Nugroho, Internal Audit Division Head	Qualified Internal Auditor Sertifikasi Manajemen Risiko Risk Management Certification
Bambang Arifin, Management & Financial Deputy Internal Audit	Qualified Internal Auditor Tingkat Lanjutan Qualified Internal Auditor Advanced Level
I Dewa Ayu Rai W., Business & Operational Deputy Internal Audit	Qualified Internal Auditor Tingkat Lanjutan Qualified Internal Auditor Advanced Level
Angga Chandra P., Auditor	Qualified Internal Auditor Tingkat Dasar Qualified Internal Auditor Basic Level

Piagam Audit Internal

Sebagai landasan legal formal dan pedoman bagi Audit Internal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seperti yang telah tertuang dalam Piagam Audit Internal dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi. Piagam Audit Internal ini ditandatangani tanggal 25 Juli 2023.

Piagam Audit Internal antara lain berisi:

1. Visi, Misi dan Tujuan Internal Audit
2. Kedudukan dan Ruang Lingkup Internal Audit
3. Kewenangan dan Tanggung Jawab Internal Audit
4. Standard Audit
5. Independensi dan Objektivitas
6. Kebijakan Masa Tunggu
7. Hubungan Kerja Internal Audit
8. Pelaporan
9. Pengembangan Auditor Divisi Internal Audit
10. Program Quality Assurance & Improvement Program

Tanggung Jawab Internal Audit

1. Menyusun, mengevaluasi dan memutakhirkan pedoman audit intern.
2. Menyusun dan menyampaikan anggaran dan rencana kerja audit tahunan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Melaksanakan penugasan berdasarkan rencana kerja Internal Audit, pedoman audit intern yang berkaitan, serta standar kode etik yang berlaku umum.
4. Memberikan saran serta rekomendasi perbaikan atas kondisi, sebab, dan atau akibat yang ditimbulkan dari kelemahan/defisiensi yang ditemukan dalam penugasan.

Internal Audit Professional Certification

In carrying out its duties and responsibilities, professional certification is an important aspect for auditors regarding audit-related matters. The implementation of the Internal Audit function refers to the International Standards for Internal Audit Professional Practice (The Institute of Internal Auditors). The Company always facilitates auditors in improving their abilities by enrolling in various professional certifications to meet the standards required by the Company. The followings are the professional certifications held by employees of the Internal Audit Division until the end of 2023.

Internal Audit Charter

As a formal legal basis and guidelines for Internal Audit in carrying out its duties and authorities, as stated in the Internal Audit Charter, with the approval of the Board of Commissioners and Board of Directors. This Internal Audit Charter was signed on July 25, 2023.

The Internal Audit Charter contains, among others:

1. Vision, Mission, and Objectives of Internal Audit
2. Position and Scope of Internal Audit
3. Authorities and Responsibilities of Internal Audit
4. Audit Standards
5. Independence and Objectivity
6. Waiting Period Policy
7. Working Relationship of Internal Audit
8. Reporting
9. Development of Auditors of Internal Audit Division
10. Quality Assurance & Improvement Program (QAIP)

Responsibilities of Internal Audit

1. Develop, evaluate, and update internal audit guidelines.
2. Prepare and present annual audit budget and work plan to the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee.
3. Execute assignments based on the annual Internal Audit work plan, relevant internal audit guidelines, and generally accepted ethical standards.
4. Provide recommendations for improvement regarding the conditions, causes, and/or consequences resulting from weaknesses/deficiencies identified during assignments.

5. Melaksanakan penugasan audit di luar rencana kerja atas permintaan dari Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Direksi dengan Persetujuan Direktur Utama.
6. Melakukan koordinasi kegiatan dengan audit eksternal, atau fungsi pengawasan lainnya sebagai penyedia *assurance* agar dapat dicapai hasil yang komprehensif dan optimal.
7. Melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan tindak lanjut hasil penugasan audit interal dan hasil audit eksternal maupun penyedia jasa *assurance* lainnya.
8. Memastikan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi auditor internal.
9. Memastikan terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada Divisi Internal Audit dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas audit internal.
5. Conduct audits beyond the work plan upon request from the President Director, Board of Commissioners, and Management with the President Director's approval.
6. Coordinate activities with external auditors or other oversight functions as assurance providers to achieve comprehensive and optimal results.
7. Monitor the implementation progress of follow-up actions resulting from internal audit assignments and external audit findings or other assurance service providers.
8. Ensure continuous competency development for internal auditors.
9. Ensure the transfer of knowledge from external parties to the Internal Audit Division, particularly when external services are used for internal audit activities.

Wewenang Audit Internal

1. Melaksanakan penugasan tanpa campur tangan, paksaan ataupun izin dari manajemen Perusahaan. Proses penugasan dimaksud, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi, pendekatan, dan frekuensi penugasan.
2. Mengakses seluruh informasi, aktivitas, *asset* perusahaan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada catatan karyawan dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Menggunakan tenaga pertambahan dari pihak lain, baik dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan dengan persetujuan Direktur Utama.
4. Melakukan koordinasi dan membangun hubungan sinergitas dan unit/fungsi penyelenggara *assurance* lainnya.
5. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia internal audit secara periodik.
6. Menetapkan pedoman yang merupakan kebijakan dan prosedur standar.
7. Melakukan komunikasi langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
8. Melaporkan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui komite audit tentang hasil audit, termasuk melaporkan upaya yang menghambat akses kepada pencatatan, data/informasi, bukti/dokumen dan/atau kegiatan yang menjadi objek audit ataupun melaporkan adanya penolakan pelaksanaan audit oleh objek audit.

Rapat Audit Internal

Di tahun 2023, Audit Internal telah melaksanakan 28 kali rapat, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Authorities of Internal Audit

1. Execute assignments independently, without interference, coercion, or permission from the Company's management. This process includes determining the scope, methods, techniques, strategies, approaches, and frequency of assignments.
2. Access all information, activities, and company assets, including but not limited to employee records and resources, as well as other relevant matters related to its duties and functions.
3. Utilize assistance from other parties, whether internal or external to the company, with the President Director's approval.
4. Coordinate and build synergistic relationships with other assurance provider units/functions.
5. Develop the knowledge and skills of internal audit human resources periodically.
6. Establish guidelines that represent standard policies and procedures.
7. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee.
8. Report directly to the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee on audit results, including reporting efforts hindering access to records, data/information, evidence/documents, and/or activities subject to audit or reporting refusal to undergo an audit by the audited object.

Internal Audit Meeting

Throughout 2023, Internal Audit has held 28 meetings, with the following attendance levels:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Percentage of Attendance
Adityawarman Nugroho*	General Manager Internal Audit	28	20	71%
Bambang Arifin	Management & Financial Deputy Internal Audit	28	28	100%
I Dewa Ayu Rai W.	Business & Operational Deputy Internal Audit	28	28	100%
Angga Chandra P.	Auditor	28	28	100%

*)General Manager Internal Audit, bergabung pada tanggal 01 Juli 2023.

*)General Manager of Internal Audit joined on July 1, 2023.

Pelaksanaan Tugas Divisi Audit Internal

1. Kegiatan Audit

Sampai dengan akhir Desember 2023, dari target RKAT Tahun 2023 sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan audit, terealisasi 19 (sembilan belas) kegiatan yang terdiri atas:

- 10 (sepuluh) kegiatan audit sesuai target RKAT Tahun 2023
- 7 (tujuh) kegiatan audit atas permintaan Direksi, terdiri atas:
 - 4 (empat) kegiatan *prouity* audit
 - 3 (tiga) kegiatan *assurance* lainnya
- 2 (dua) kegiatan konsultasi

Catatan: terdapat 1 (satu) kegiatan audit yang di *carry over* di tahun 2024.

2. Kegiatan Non-Audit

Sampai dengan akhir Desember 2023, telah dilaksanakan kegiatan non-audit berupa pendampingan auditor eksternal dan kegiatan *monitoring* tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil audit.

Kegiatan pendampingan auditor eksternal dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kegiatan, yaitu:

- Pendampingan audit atas laporan keuangan PT LRT Jakarta tahun buku 2022 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
- Pendampingan atas evaluasi pembangunan infrastruktur kereta tahun 2023 oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
- Pendampingan atas reviu tata kelola PSN LRT Jalur JIS-Kepala Gading dan Velodrome-Manggarai oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
- Pendampingan atas evaluasi penanganan kemacetan di DKI Jakarta oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
- Pendampingan atas pemeriksaan laporan keuangan PT LRT Jakarta tahun buku 2023 oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
- Pendampingan audit atas laporan keuangan PT LRT Jakarta tahun buku 2023 oleh KAP.

Implementation of Duties of the Internal Audit Division

1. Audit Activities

Until the end of December 2023, out of the 2023 RKAT target of 10 (ten) audit activities, 19 (nineteen) activities were realized, comprising:

- 10 (ten) audit activities in line with the 2023 RKAT target
- 7 (seven) audit activities upon the Directorate's request, consisting of:
 - 4 (four) probity audit activities
 - 3 (three) other assurance activities
- 2 (two) consultancy activities

Note: There is 1 (one) audit activity carried over to 2024.

2. Non-Audit Activities

Until the end of December 2023, non-audit activities were conducted, including supporting external auditors and monitoring follow-ups on audit findings and recommendations.

Supporting external auditor activities were conducted in 6 (six) instances, namely:

- Supporting the audit of PT LRT Jakarta's financial statements for the 2022 fiscal year by Public Accounting Firm (PAF).
- Supporting the evaluation of 2023 railway infrastructure development by the Jakarta Regional Representative Office of the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP).
- Supporting the review of governance of PSN LRT JIS-Kepala Gading Line and Velodrome-Manggarai by the Jakarta Regional Representative Office of the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP).
- Supporting the evaluation of traffic congestion handling in Jakarta by the Jakarta Regional Representative Office of the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP).
- Supporting the examination of PT LRT Jakarta's financial statements for the 2023 fiscal year by the Jakarta Provincial Representative Office of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK).
- Supporting the audit of PT LRT Jakarta's financial statements for the 2023 fiscal year by Public Accounting Firm.

Sedangkan kegiatan *monitoring* tindak lanjut hasil audit, dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kegiatan, yaitu *monitoring* tindak lanjut s.d. bulan Juni, September, Oktober, November, dan Desember 2023.

Tindak Lanjut Hasil Audit

Atas laporan hasil audit yang telah diterbitkan, Divisi Internal Audit melakukan monitoring atas tindak lanjut yang dilakukan oleh *auditee*. Berikut tindak lanjut hasil audit tahun 2023 dan rekomendasi audit tahun 2022 yang belum selesai ditindaklanjuti sampai dengan saat ini.

1. Tindak Lanjut atas Hasil Audit Tahun 2023
Kegiatan audit tahun 2023 terdapat 50 (lima puluh) temuan dengan 75 (tujuh puluh lima) rekomendasi. Atas temuan dan rekomendasi yang tersebut, Divisi Internal Audit melakukan monitoring atas tindak lanjut yang dilakukan oleh *auditee*.
2. Temuan dan Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2022 yang Belum Selesai Ditindaklanjuti.
Terdapat temuan dan rekomendasi hasil audit tahun 2022 yang belum selesai ditindaklanjuti, yaitu sebanyak 4 (empat) temuan dengan 7 (tujuh) rekomendasi.

Audit Internal SMT (Sistem Manajemen Terintegrasi)

Audit Internal Sistem Manajemen Terintegrasi PT LRT Jakarta Tahun 2023 diselenggarakan dalam 2 agenda, yaitu Internal Audit SMT sebagai kegiatan Audit Rutin Tahunan yang terdiri dari 7 Sistem Manajemen (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016, SMKP Permenhub 69/2018, SMK3 PP 50/2012, SMP Perpol 7/2019), serta Audit Internal ISO 14001:2015 yang dilakukan dalam rangka persiapan Audit Eksternal Sertifikasi ISO 14001:2015 yang baru dilakukan pertama kali di Tahun 2024.

Hasil Audit Internal SMT menunjukkan terdapat 137 Temuan dari 30 Unit Kerja yang diaudit, di mana di antaranya terdapat 13 Temuan Minor dan 124 Temuan Observasi. Hasil tersebut menunjukkan PT LRT Jakarta telah melaksanakan penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi secara efektif dan banyak peluang *improvement* untuk meningkatkan kinerja penerapan Sistem Manajemen tersebut. Berdasarkan update *monitoring* Temuan per tanggal 28 Maret 2024, terdapat 84 Temuan yang telah selesai ditindaklanjuti, 23 Temuan sedang dalam proses tindak lanjut, dan 30 Temuan dalam status *Open*.

Meanwhile, monitoring activities for follow-ups on audit findings were conducted in 5 (five) instances, namely monitoring follow-ups until June, September, October, November, and December 2023.

Follow-Up on Audit Results

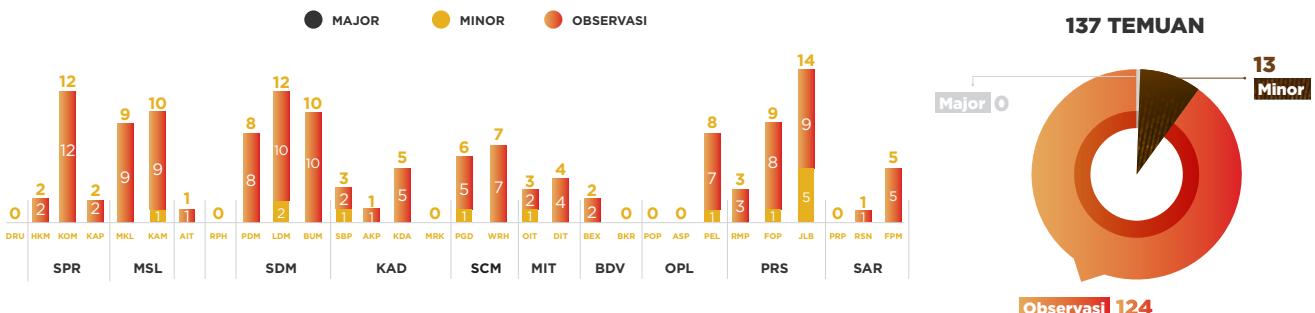
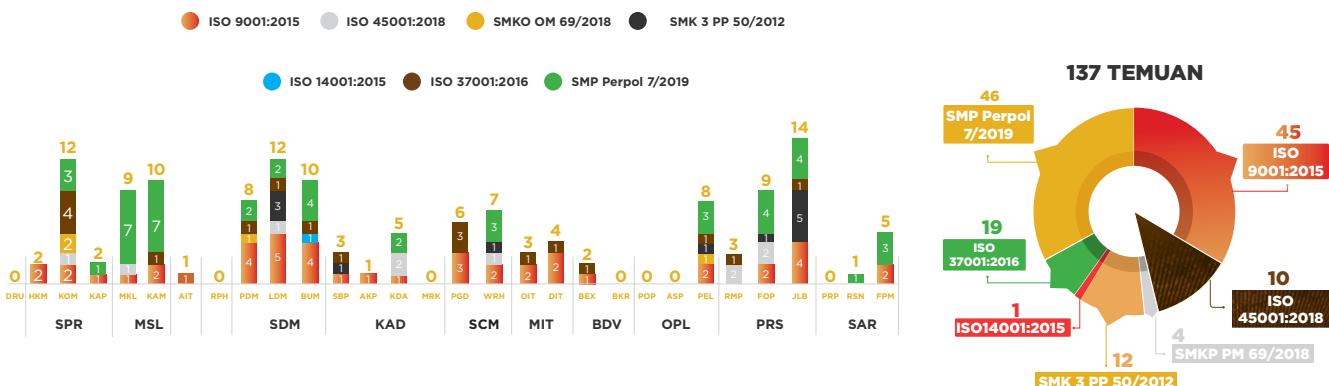
Based on the issued audit reports, the Internal Audit Division monitors the follow-up actions taken by auditees. Below are the follow-up actions on the audit results of 2023 and the unresolved audit findings and recommendations from 2022 to date.

1. Follow-Up on 2023 Audit Results
In the 2023 audit activities, there were 50 (fifty) findings with 75 (seventy-five) recommendations. The Internal Audit Division monitors the follow-up actions taken by auditees on these findings and recommendations.
2. Unresolved Audit Findings and Recommendations from 2022.
There are unresolved findings and recommendations from the 2022 audit, totaling 4 (four) findings with 7 (seven) recommendations.

Internal Audit of SMT (Integrated Management System)

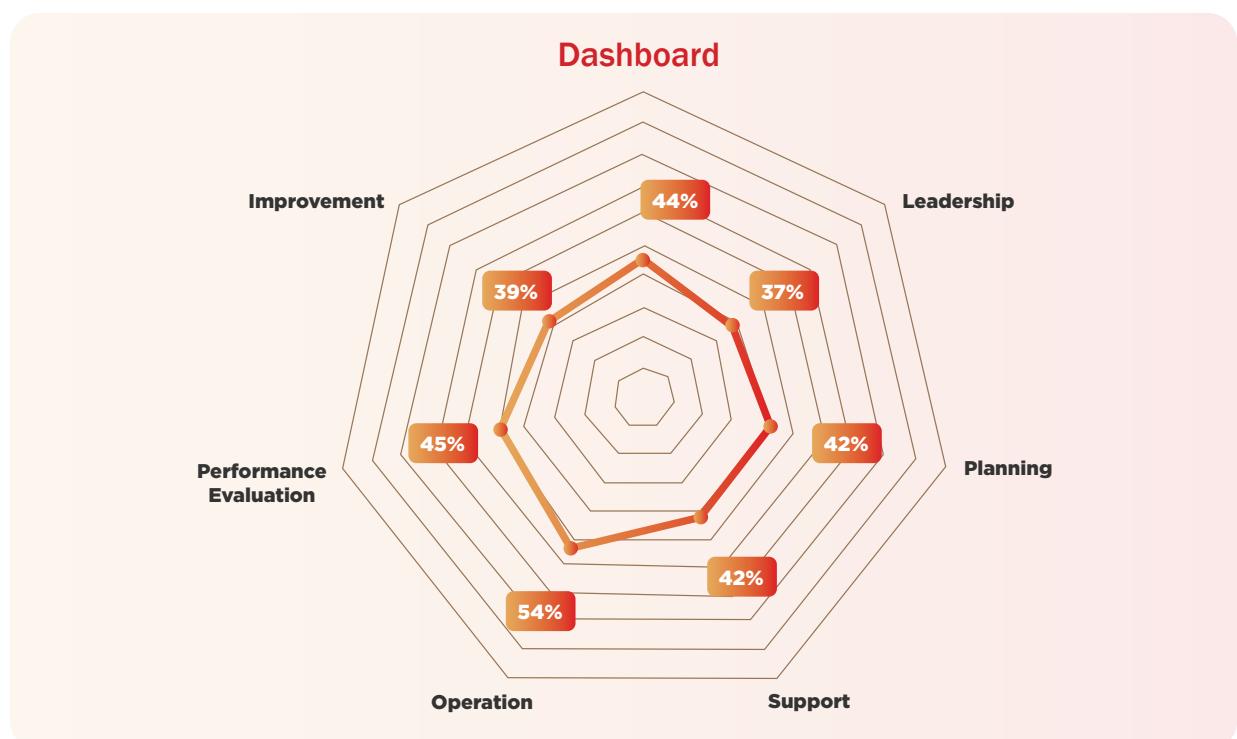
Internal Audit of Integrated Management System (SMT) of PT LRT Jakarta for the year 2023 was organized into two agendas: the Internal Audit of SMT as an Annual Routine Audit activity, which encompasses 7 Management Systems (ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016, SMKP Permenhub 69/2018, SMK3 PP 50/2012, SMP Perpol 7/2019), and the Internal Audit of ISO 14001:2015, conducted in preparation for the first-time External Certification Audit of ISO 14001:2015 scheduled for 2024.

The Internal Audit of SMT results revealed 137 findings from 30 audited work units, including 13 Minor Findings and 124 Observational Findings. These results indicate that PT LRT Jakarta has effectively implemented the Integrated Management System, presenting many opportunities for improvement to enhance the performance of the system's application. Based on the monitoring update of the findings as of March 28, 2024, there are 84 findings that have been resolved, 23 findings are in the process of being addressed, and 30 findings are still open.



Hasil Audit Internal ISO 14001:2015 menunjukkan pemenuhan terhadap Sistem Manajemen Lingkungan sebesar 43%, hal ini dikarenakan terdapat beberapa dokumen yang diwajibkan dalam ISO 14001:2015 masih dalam proses *approval*, sehingga belum dapat ditunjukkan sebagai evidence saat kegiatan Audit. Saat ini, seluruh Temuan Audit Internal ISO 14001:2015 telah selesai ditindaklanjuti sebelum dilaksanakannya Audit Eksternal ISO 14001:2015 pada tanggal 7-8 Maret 2024.

The Internal Audit for ISO 14001:2015 results show a 43% compliance rate with the Environmental Management System. This is because several documents required by ISO 14001:2015 are still in the approval process, thus they could not be presented as evidence during the audit. Currently, all findings from the Internal Audit of ISO 14001:2015 have been addressed prior to the External Audit of ISO 14001:2015 scheduled for March 7-8, 2024.



CHECKLIST SECTION	SECTION SCORE
Context of the Organization	44%
Performance Evaluation	37%
Improvement	42%
Leadership	42%
Planning	54%
Support	46%
Operation	39%

Keterangan:

Metode Audit dilakukan dengan cara interview & Document Review dengan tim QSHE serta Laporan audit menggunakan Gema Check list dengan metoda Kuantitatif dan berdasarkan Klausul ISO 14001:2015.

Notes:

The audit method was conducted through interviews and document reviews with the QSHE team and the audit report utilized the Gema Checklist with a quantitative method and was based on the clauses of ISO 14001:2015.



Auditor Eksternal

External Auditor

Keberadaan auditor eksternal diperlukan oleh LRT Jakarta, Perusahaan menggunakan jasa auditor eksternal yang fungsinya dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang disampaikan kepada Para Pemangku Kepentingan.

Penunjukan auditor eksternal dilakukan oleh RUPS atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan wajib memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERAN DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT DALAM MEKANISME PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Tahapan mekanisme penunjukan Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku di Perseroan.
2. Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali auditor eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja auditor eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan.
3. Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RUPS dan besarnya honorarium/ imbalan jasa yang diusulkan untuk eksternal auditor tersebut.
4. Usulan kepada RUPS tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan Perseroan.
5. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja auditor eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.
6. Untuk proses penunjukan calon auditor eksternal dan atau penunjukan kembali auditor eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.

The presence of external auditor is a necessity for LRT Jakarta. The Company uses the services of an external auditor whose function is carried out by a Public Accounting Firm (KAP) to express an opinion on the fairness, in all material respects, financial position, results of operations, changes in equity and cash flows in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia, which is presented to the Stakeholders.

The appointment of the external auditor is conducted by the General Meeting of Shareholders or based on the recommendation from the Board of Commissioners, and it must adhere to the provisions of the Articles of Association as well as applicable regulations.

ROLE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE AUDIT COMMITTEE IN THE MECHANISM OF APPOINTING PUBLIC ACCOUNTANT

The stages of the mechanism for appointing Public Accountants are as follows:

1. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, initiates the selection process of external Auditor candidates by requesting assistance from the Board of Directors in accordance with the prevailing procurement regulations in the Company.
2. The Board of Commissioners may reappoint the external auditor based on an evaluation of the performance of the external auditor in auditing financial statements.
3. The Board of Commissioners conveys the reasons for the nomination to the General Meeting of Shareholders (RUPS) and the proposed fee/remuneration for the external auditor.
4. The proposal to the GMS can be conveyed through a separate letter that is part of the Board of Commissioners' response letter regarding the Company's annual performance.
5. The Board of Commissioners evaluates the performance of the external auditor through the Audit Committee in accordance with applicable regulations and standards.
6. For the process of appointing external auditor candidates and/or reappointing external auditors carried out by the GMS, the Board of Commissioners merely delegates authority to the GMS to appoint the auditor.

PENUNJUKAN AUDITOR EKSTERNAL

Perseroan menyadari bahwa akuntabilitas informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan audit sangat penting bagi keberlanjutan usaha. Untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan dan operasional Perseroan, LRT Jakarta secara rutin menunjuk pihak eksternal (independen) untuk melakukan audit terkait laporan tersebut. Kantor Akuntan Publik dipilih dan ditetapkan sebagai auditor eksternal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan Perusahaan melalui RUPS Tahunan dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihan dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perseroan. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menunjang sistem pengendalian internal Perseroan dan memperoleh informasi yang memadai sebagai pertimbangan dalam menyusun strategi pengembangan Perseroan ke depan.

Adapun Auditor eksternal Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut.

APPOINTMENT OF EXTERNAL AUDITOR

The Company understands that the accountability of the information generated from the audit is critical to the sustainability of the business. To provide reasonable assurance on the Company's financial and operational reports, LRT Jakarta routinely appoints an external (independent) party to conduct audits related to these reports. The Public Accounting Firm is selected and appointed as the external auditor in charge of examining the Company's financial statements through the Annual GMS by considering the recommendations of the Board of Commissioners and the Audit Committee. The selection process is done through the procurement mechanism of goods and services within the Company. These efforts are made to support the Company's internal control system and obtain adequate information for consideration in formulating the Company's future development strategy.

The external auditors of the Company for the last 5 (five) years up to 2023 are as follows.

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa Service	Jasa Lainnya Other Services	Biaya (Rp) Fee (IDR)
2023	KAP Hertanto, Grace, Karunawan	Sagita Fajarahayu	Audit atas Laporan Keuangan PT LRT Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Audit of the Financial Statements of PT LRT Jakarta for the year ending December 31, 2023	-	Rp109.807.583
2022	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Syamsudin	Audit atas Laporan Keuangan PT LRT Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Audit of the Financial Statements of PT LRT Jakarta for the year ending December 31, 2022	-	Rp124.960.000
2021	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Syamsudin	Audit atas Laporan Keuangan PT LRT Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Audit of the Financial Statements of PT LRT Jakarta for the year ending December 31, 2021	1. Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan tahun 2021. 2. Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap pengendalian internal tahun 2021. 1. Assurance services for the 2021 statutory compliance report. 2. Assurance services on the 2021 compliance with internal control report.	Rp124.960.000

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Accountant	Jasa Service	Jasa Lainnya Other Services	Biaya (Rp) Fee (IDR)
2020	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Suhartono, MPA, Ak., CPA	Audit atas Laporan Keuangan PT LRT Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Audit of the Financial Statements of PT LRT Jakarta for the year ending December 31, 2020	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan tahun 2020. 2. Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap pengendalian internal tahun 2020. 	Rp96.562.400
2019	KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono	Andy Eldes, Ak., CA., CPA	Audit atas Laporan Keuangan PT LRT Jakarta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Audit of the Financial Statements of PT LRT Jakarta for the year ending December 31, 2019	<ul style="list-style-type: none"> 1. Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan tahun 2019. 2. Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap pengendalian internal tahun 2019. 	Rp48.109.041

Sistem pengendalian Internal

Sistem pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan didefinisikan sebagai suatu proses yang integral dan melekat pada tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus oleh manajemen dan seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan operasional, pelaporan dan kepatuhan Perusahaan.

Manual dan kebijakan tentang Sistem Pengendalian Internal diatur dalam Pedoman Sistem Pengendalian Internal No. LRTJ-AIT-002 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal adalah sebagai kerangka organisasi dan prosedur kerja operasional keuangan dan nonkeuangan, yang dapat memberi jaminan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perusahaan mengarah pada tercapainya tujuan Perusahaan secara berdaya guna dan berhasil guna, meliputi:

1. Tujuan Kepatuhan, yaitu menjamin bahwa semua kegiatan usaha Perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, regulator, ketentuan perjanjian pihak ketiga, maupun kebijakan dan prosedur internal yang ditetapkan oleh Perusahaan.
2. Tujuan Informasi, yaitu menyediakan laporan yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tujuan Operasional, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Perusahaan dari risiko kerugian.
4. Tujuan Budaya Risiko, yaitu untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di Perusahaan secara berkesinambungan.

EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Adapun evaluasi atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal telah dilakukan setiap kali Divisi Audit Internal melakukan audit sesuai Program Kerja Audit Tahunan (PKAT). Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada PT LRT Jakarta telah cukup efektif.

The Internal Control System is a process that is integral and attached to actions and activities that are carried out continuously by management and all employees to provide adequate assurance of the achievement of the Company's operational, reporting, and compliance objectives.

Manuals and policies regarding the Internal Control System are regulated in the Guidelines for Internal Control System No. LRTJ-AIT-002 dated October 13, 2020, which was signed by the President Director.

The objectives of the Internal Control System is to serve as an organizational framework and financial and non-financial operational work procedures, which can provide assurance that every implementation of activities within the Company's environment leads to the achievement of the Company's objectives in an efficient and effective manner, including:

1. Compliance objectives, namely, to guarantee that all of the Company's business activities have been carried out in accordance with the applicable laws and regulations, both issued by the government, regulators, provisions of third party agreements, as well as internal policies and procedures established by the Company.
2. Information objective, namely, to provide correct, complete, timely and relevant reports needed in the framework of making appropriate and accountable decisions.
3. Operational objective, namely, to increase effectiveness and efficiency in using assets and other resources, in order to protect the Company from the risk of loss.
4. Risk Culture objective, namely, to identify weaknesses and assess irregularities early and reassess the fairness of existing policies and procedures in the Company on an ongoing basis.

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM

Evaluation of the implementation of the Internal Control System has been carried out every time the Internal Audit Division conducts an audit according to the Annual Audit Work Program (PKAT). Based on the evaluation results, the implementation of the Internal Control System at PT LRT Jakarta has been quite effective.

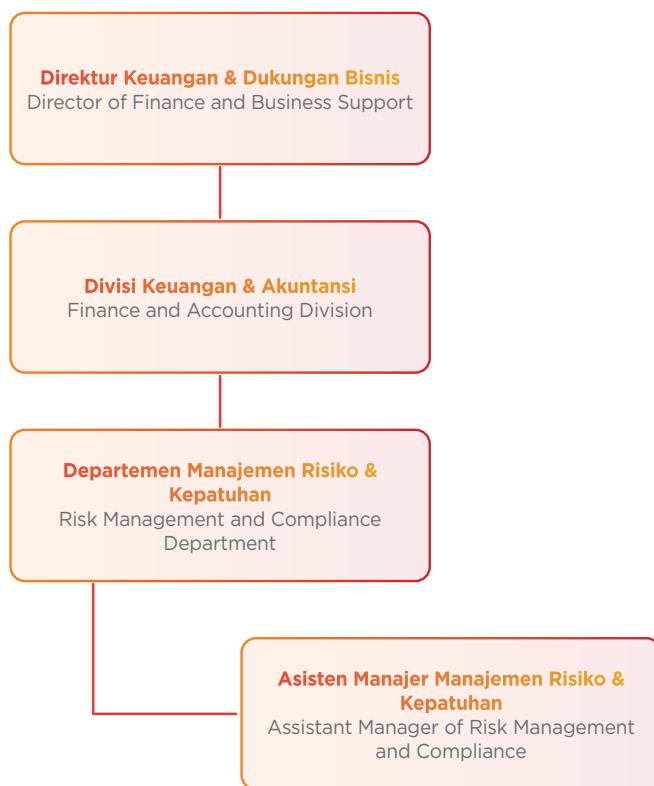
Manajemen risiko

Risk Management

Manajemen Risiko merupakan serangkaian proses sistem pengelolaan risiko dan perlindungan terhadap Perusahaan yang mencakup aset, operasional, keuangan, dan lain sebagainya atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya risiko.

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO

Di tahun 2023, Departemen Manajemen Risiko & Kepatuhan berada di bawah Divisi Keuangan & Akuntansi, Direktorat Keuangan & Dukungan Bisnis, dengan struktur sebagai berikut:



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Departemen Manajemen Risiko & Kepatuhan:

1. Mengimplementasikan praktik pengelolaan perusahaan yang berdasarkan pada GCG atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengelola perusahaan berlandaskan peraturan dan etika yang berlaku;
2. Menetapkan kebijakan, prosedur, instruksi kerja dan formulir atas praktik manajemen risiko;
3. Melakukan asesmen risiko pada tiap-tiap Departemen;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan atas penerapan Manajemen Risiko melalui *risk profile* sesuai *Key Performance Indicator* (KPI).

Risk Management is a series of risk management system processes and protection for the Company which includes assets, operations, finance, and so on for losses due to risks.

RISK MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In 2023, the Risk Management & Compliance Department is under the Finance & Accounting Division, Directorate of Finance & Business Support, with the following structure:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Duties and responsibilities of the Risk Management & Compliance Department:

1. Implement the Company's management practices based on GCG or Good Corporate Governance by managing the Company based on applicable regulations and ethics;
2. Establish policies, procedures, work instructions and forms for risk management practices;
3. Conduct a risk assessment in each Department;
4. Prepare and submit reports on the implementation of Risk Management through a risk profile according to the Key Performance Indicator (KPI).

5. Mengimplementasikan pemenuhan *Compliance Review* atau pengujian kepatuhan atas penerapan kontrol yang berlaku sesuai SOP Kepatuhan Perusahaan;
6. Menciptakan keselamatan, keamanan dan kesehatan lingkungan kerja serta mendukung tercapainya standar keselamatan dan keamanan penumpang.

KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI PROFESI

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi karyawan di Divisi Manajemen Risiko untuk memahami perkembangan mitigasi dan profil risiko, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Adapun sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Divisi Manajemen Risiko hingga akhir tahun 2023.

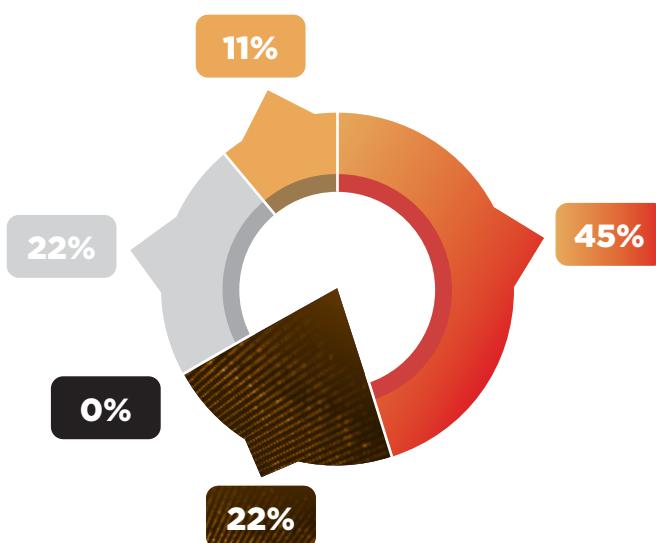
Nama dan Jabatan Name and Position	Level Sertifikasi Certification Level
Tridewi Pujamawaty Kepala Departemen Head of Department	<i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i> <i>Certified Governance Professional (CGP)</i>
Equivalent Armando Asisten Manager Assistant Manager	<i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i>

RISIKO PERUSAHAAN TAHUN 2023 DAN PENGELOLAANNYA

Profil Risiko Berbasis RKAP 2023

Setiap tahun LRTJ melakukan pemetaan risiko berdasarkan tujuan dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) secara *top down*. Berikut ini profil risiko RKAP tahun 2023:

Grafik/Chart 1 :Risk Profile RKAP by Category



● Risiko Finansial ● Risiko Operasional ● Risiko Kepatuhan
● Risiko Reputasi ● Risiko Mitra Eksternal

5. Implement the fulfillment of Compliance Review or compliance testing on the application of applicable controls according to the Company's Compliance SOP;
6. Create a safe, secure and healthy work environment and support the achievement of passenger safety and security standards.

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS AND CERTIFICATIONS

Professional certification is an important aspect for employees in the Risk Management Division to understand developments in risk mitigation and profiles, particularly in relation to regulatory compliance, and industry developments. The followings are the professional certifications held by employees of the Risk Management Division until the end of 2023.

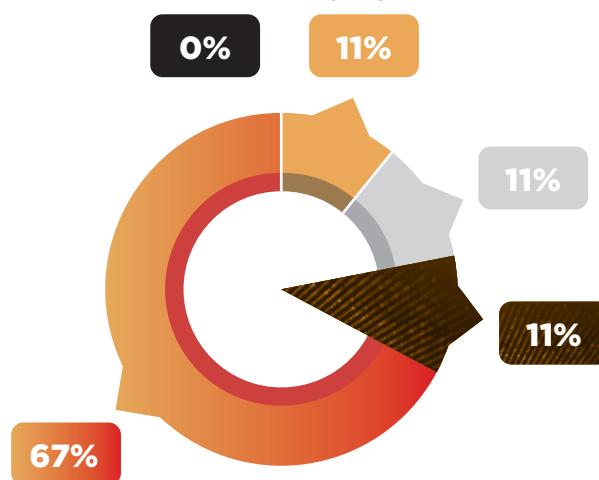
Nama dan Jabatan Name and Position	Level Sertifikasi Certification Level
Tridewi Pujamawaty Kepala Departemen Head of Department	<i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i> <i>Certified Governance Professional (CGP)</i>
Equivalent Armando Asisten Manager Assistant Manager	<i>Qualified Risk Management Professional (QRMP)</i>

THE COMPANY'S RISKS IN 2023 AND THEIR MANAGEMENT

Risk Profile Based on the Company's 2023 Work Plan and Budget

Every year LRTJ conducts risk mapping based on the objectives of the Company's Work Plan and Budget on a top down basis. The following is the risk profile of the Company's 2023 Work Plan and Budget:

Grafik/Chart 2: Risk Profile RKAP by Exposure
Risk Profile by Exposure



● Rendah ● Sedang-Rendah ● Sedang-Tinggi
● Tinggi ● Sangat Tinggi

Profil risiko RKA untuk tahun 2023 terdiri dari 9 risiko yang teridentifikasi untuk 9 tujuan (*objective*) Perusahaan. Risiko Perusahaan masih didominasi risiko pada aspek finansial namun sudah dapat diturunkan hingga eksposur rendah di akhir tahun. Walaupun demikian masih terdapat risiko yang tergolong tinggi yaitu terkait dengan Pendapatan *Non-Farebox*. Secara keseluruhan di akhir tahun risiko-risiko LRTJ masih dalam level toleransi risiko Perusahaan.

Pemetaan risiko juga dilakukan secara *bottom up* yang terdiri dari 161 risiko yang teridentifikasi dari 11 Divisi dan 28 Departemen. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dapat diketahui bahwa risiko LRTJ didominasi pada kategori operasional, finansial serta kepatuhan dan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan mitigasi dengan memperkuat *internal control*, prosedur dan *assurance* untuk memastikan kegiatan risiko-risiko operasional maupun aspek kepatuhan dan hukum masih dalam level toleransi LRTJ. Sedangkan level risiko secara keseluruhan masih didominasi pada level *Low* sehingga dapat dipastikan risiko-risiko di LRTJ masih dalam level toleransi risiko Perusahaan. Namun untuk level *High* perlu segera dilakukan *treatment* agar level risiko bisa diturunkan hingga ke level toleransi yang dapat diterima.

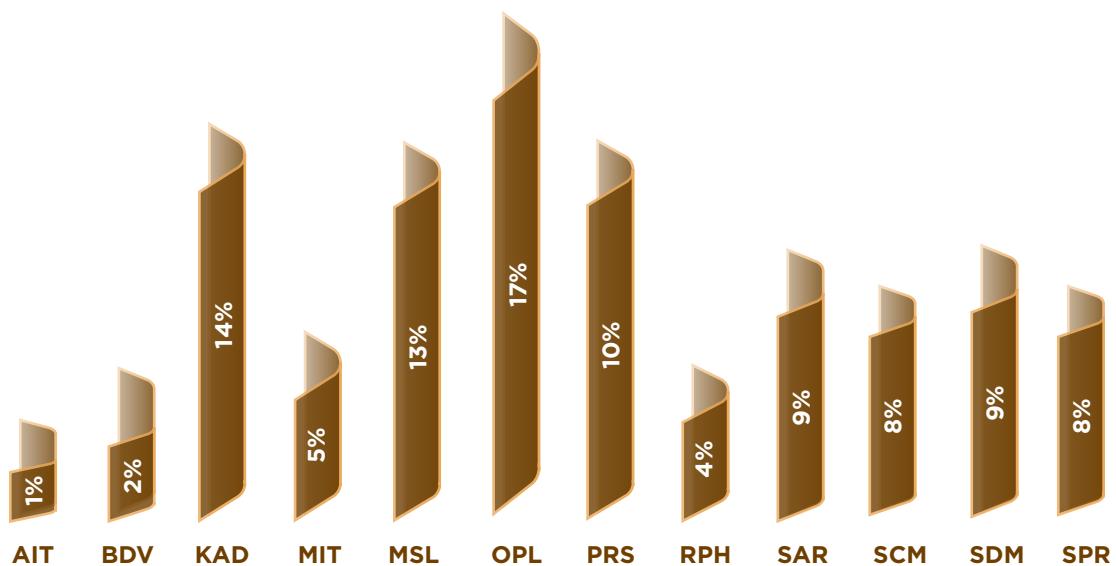
Untuk persebaran risiko yang teridentifikasi masih didominasi pada divisi Operasional dan Pelayanan (OPL). Berikut ini gambaran profil risiko yang diidentifikasi berdasarkan masing-masing divisi.

The risk profile of the 2023 Work Plan and Budget consists of 9 identified risks for 9 objectives of the Company. The Company's risks are still predominantly financial in nature but have been reduced to low exposure by the end of the year. However, there still exists a high-risk element related to Non-Farebox Revenue. Overall, by the end of the year, LRTJ's risks remain within the Company's risk tolerance level.

Risk mapping is also conducted bottom-up, comprising 161 identified risks from 11 Divisions and 28 Departments. Based on this identification, it is evident that LRTJ's risks are dominated by operational, financial, and compliance/legal categories. Therefore, mitigation efforts are needed to strengthen internal controls, procedures, and assurances to ensure that operational risks and compliance/legal aspects remain within LRTJ's tolerance level. While the overall risk level is mostly Low, indicating that LRTJ's risks are within the Company's risk tolerance level, High-level risks require immediate treatment to bring them down to an acceptable tolerance level.

The identified risk distribution is still dominated by the Operational and Service (OPL) division. Below is an overview of the risk profile identified based on each division.

Risk Profile by Division



Proses identifikasi risiko dilakukan pada awal tahun dan dilakukan *monitoring* serta evaluasi di setiap triwulan nya kepada departemen MRK untuk memastikan seluruh risiko yang teridentifikasi masih di bawah level toleransi risiko LRTJ.

The risk identification process is conducted at the beginning of the year, and monitoring and evaluation are carried out quarterly by the Risk Management and Compliance department to ensure that all identified risks remain below LRTJ's risk tolerance level.

Kajian Risiko & Kepatuhan Inisiatif Perusahaan

Dalam upaya mendukung LRTJ mencapai sasaran RKAP dan mengelola ketidakpastian dalam pemenuhan strategi inisiatif Perusahaan di setiap tahunnya, unit manajemen risiko melakukan analisa risiko untuk inisiatif strategis Perusahaan dan proses pengadaan dengan nilai di atas Rp500.000.000. Dasar permintaan Analisa tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain SK Direksi/Kebijakan/Pedoman/SOP/LTA, Matriks kewenangan PT LRT Jakarta, Memo usulan pengadaan dan permintaan review dokumen oleh Direksi.

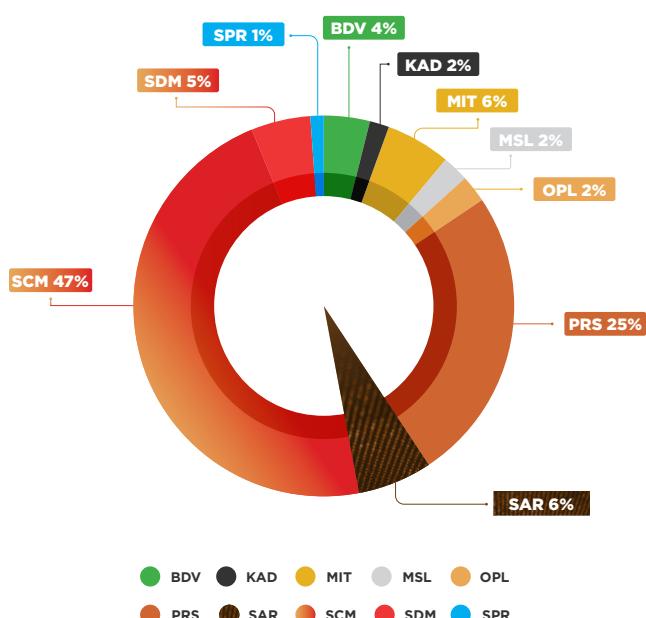
Selama, tahun 2023 LRTJ sudah menerbitkan 179 kajian risiko dan kepatuhan dengan kontribusi permintaan kajian berasal dari Divisi Manajemen Rantai Pasok (SCM) dan Divisi Prasarana (PRS).

Corporate Initiative Risk & Compliance Review

In an effort to support LRTJ in achieving the RKAP targets and managing uncertainty in fulfilling the Company's strategic initiatives every year, the risk management unit conducts risk analysis for the Company's strategic initiatives and procurement processes with a value of over IDR500,000,000. The basis for the request for the analysis is based on the applicable provisions, including Decree of the Board of Directors/Policy/Guidelines/SOP/LTA, PT LRT Jakarta Authority Matrix, Proposal procurement memo and request for document review by the Directors.

In 2023, LRTJ has published 179 risk and compliance reviews with contributions from the Supply Chain Management (SCM) Division and the Infrastructure (PRS) Division.

Grafik Sebaran Kajian Risiko & Kepatuhan Unit
Chart of Unit Risk & Compliance Review Distribution



EVALUASI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO

Pengelolaan risiko dilakukan langsung pada level Departemen, Divisi dan Korporasi untuk risiko-risiko strategis Perusahaan. Dimulai dengan identifikasi risiko, pengukuran, penentuan rencana mitigasi hingga pelaporan pelaksanaan mitigasi disetiap triwulan kepada Departemen Manajemen Risiko & Kepatuhan. Pengelolaan risiko di tahun 2023 dapat dikatakan cukup efektif di mana hampir seluruh risiko yang teridentifikasi masih di bawah level toleransi risiko Perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan asesmen dengan menggunakan framework RIMS (*Risk and Insurance Management Society*), level maturitas penerapan manajemen risiko berada di level 3,3 (dari skala 5). Hal ini menunjukkan implementasi manajemen risiko telah diterapkan secara terstruktur, andal, dan efektif.

EVALUATION ON THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

Risk management is carried out directly at the Department, Division, and Corporate level for the Company's strategic risks. Starting with risk identification, measurement, determination of mitigation plans to reporting on the implementation of mitigation every quarter to the Risk Management & Compliance Department. Risk management in 2023 can be said to be quite effective where all identified risks are still below the Company's risk tolerance level. Furthermore, based on an assessment by an independent consultant, the maturity level of risk management implementation is at level 3,3 (on a scale of 5). This shows that the implementation of risk management has been implemented in a structured, reliable and effective manner.

PERNYATAAN MANAJEMEN ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Manajemen menilai kecukupan sistem manajemen risiko perusahaan sudah berjalan dengan baik dan efektif untuk mendukung perusahaan.

ROADMAP MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan hasil penilaian maturitas Manajemen Risiko yang telah dilakukan, berikut *areas of improvement* yang dapat menjadi perhatian bagi PT LRT Jakarta ke depan:

1. Peningkatan maturitas secara berkesinambungan melalui upaya pelaksanaan yang konsisten dari waktu ke waktu.
2. Merumuskan *roadmap* maturitas Manajemen Risiko. *Roadmap* untuk peningkatan maturitas praktik Manajemen Risiko dapat menggunakan skenario agresif (optimistis) maupun skenario moderat (realistik). Kedua skenario dimaksud memiliki implikasi yang berbeda dalam hal alokasi sumber daya Perusahaan. Rincian skenario *roadmap* untuk meningkatkan maturitas Manajemen Risiko dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

MANAGEMENT STATEMENT ON THE ADEQUACY OF THE COMPANY'S RISK MANAGEMENT SYSTEM

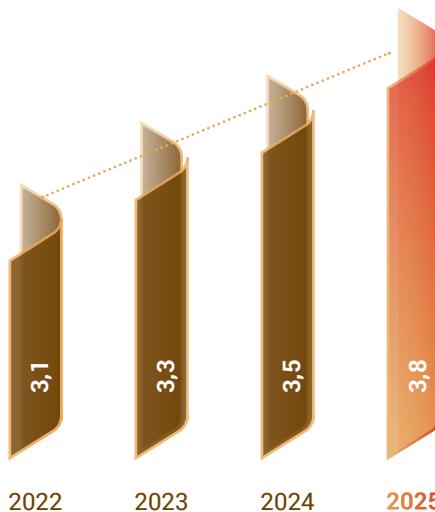
Management assesses the adequacy of the Company's risk management system, which is running well and effective in supporting the Company.

RISK MANAGEMENT ROADMAP

Based on the assessment of Risk Management maturity conducted, the following areas of improvement can be highlighted for PT LRT Jakarta in the future:

1. Continuous improvement in maturity through consistent implementation over time.
2. Formulating a Risk Management maturity roadmap. The roadmap for enhancing Risk Management maturity can utilize both aggressive (optimistic) and moderate (realistic) scenarios. Both scenarios have different implications in terms of resource allocation for the Company. Details of the roadmap scenarios for improving Risk Management maturity can be seen in the table below:

Target Risk management Maturity Road-Map



Atribut Attributes	2022	2023	2024	2025
Adopsi Pendekatan ERM dalam Budaya Perusahaan Adoption of ERM Approach in Corporate Culture	3.2	3.5	3.5	4.0
Pengelolaan Proses ERM ERM Process Management	2.9	3.0	3.5	3.5
Atribut Pengelolaan Selera Risiko Risk Appetite Management Attributes	3.3	3.5	3.5	4.0
Pemahaman Akar Penyebab Root Cause Understanding	3.3	3.5	3.5	4.0
Pengungkapan Risiko Risk Disclosure	3.3	3.5	3.5	4.0
Pengelolaan Kinerja Performance Management	2.9	3.0	3.5	3.5

Atribut Attributes	2022	2023	2024	2025
Resiliensi dan Sustainabilitas Resilience and Sustainability	2.9	3.0	3.5	3.5
<i>Target Maturity Score</i>	3.1	3.3	3.5	3.8

3. Memiliki program kerja dengan tema strategis setiap tahunnya, sehingga di tahun 2025 (2 tahun mendatang) PT LRT Jakarta bisa mencapai skor 3,8.

Tema strategis yang diusulkan Konsultan adalah:

- a. Tahun 2024: Penguatan Implementasi Praktik Manajemen Risiko
- b. Tahun 2025: Integrasi Praktik Manajemen Risiko dalam Kerangka GRC

3. Having an annual work program with strategic themes so that by 2025 (in 2 years), PT LRT Jakarta can achieve a score of 3.8.

The strategic themes proposed by the Consultant are:

- a. Year 2024: Strengthening the Implementation of Risk Management Practices
- b. Year 2025: Integration of Risk Management Practices within the GRC Framework



Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan suatu bentuk kebijakan dan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk membangun lingkungan dan masyarakat yang berkualitas. Terkait pelaksanaan CSR, Perusahaan membaginya ke dalam 7 aspek utama dalam tanggung jawab sosial.

Corporate Social Responsibility (CSR) is a form of policy and activities carried out as an effort to build a quality environment and society. Regarding the implementation of CSR, the Company divides it into 7 main aspects of social responsibility.

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Governance	Komitmen atas Hak Asasi Manusia Commitment to Human Rights	Tanggung Jawab atas Operasi yang Adil Responsibility to Fair Operations	Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan Hidup Social Responsibility towards the Environment	Tanggung Jawab Sosial pada Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja Social Responsibility to Employment, Occupational Health and Safety	Tanggung Jawab atas Produk dan Terhadap Konsumen Responsibility to Products and Consumers	Tanggung Jawab Sosial pada Pengembangan Sosial Kemasyarakatan Social Responsibility in Community Social Development
--	---	--	--	---	--	--

Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perusahaan dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Details regarding the implementation of CSR by the Company can be seen in the Corporate Social Responsibility chapter in this Annual Report.

Perkara Penting

Perkara Penting

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan tidak menghadapi permasalahan hukum baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon, dan/atau termohon yang secara material dapat memengaruhi keberlangsungan kegiatan bisnis Perusahaan.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Per 31 Desember 2023, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

SANKSI ADMINISTRATIF

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif yang dijatuhan kepada Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, maupun anggota Direksi.

Throughout 2023, the Company did not face any legal issues, either as a plaintiff, defendant, applicant, and/or respondent which could materially affect the continuity of the Company's business activities.

IMPORTANT CASES FACED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

As of December 31, 2023, there were no important cases faced by the Board of Commissioners and Directors.

ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Throughout 2023, there were no administrative sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors.

Akses Informasi Dan Data Perusahaan

Access to The Company's Information and Data

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan GCG dalam segala aktivitas Perusahaan melalui transparansi dan pengungkapan informasi kepada seluruh pemangku. Perusahaan menerapkan diversifikasi media penyampaian informasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berbagai media yang dimanfaatkan Perusahaan, antara lain:

1. Laporan Tahunan

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66, Perusahaan mengungkapkan kinerja keuangan maupun nonkeuangan kepada para Pemegang Saham melalui Laporan Tahunan yang tersedia dalam *hardcopy*.

2. Situs Web Perusahaan

Perusahaan memiliki situs Perusahaan, yakni [www.Irtjakarta.co.id](http://Irtjakarta.co.id) yang digunakan untuk memberikan informasi penting bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Perusahaan. Informasi penting yang disediakan antara lain profil perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, bisnis yang dijalankan, GCG, anak-anak Perusahaan, berita dan siaran pers, serta informasi penting bagi masyarakat yang ingin berkariere di Perusahaan.

3. Media Cetak Perusahaan

Perusahaan memiliki media penyampaian informasi berupa media cetak yang meliputi surat kabar nasional, media internal mitra bayar, brosur, dan *leaflet* yang dijadikan sebagai sarana penyampaian informasi. Selain itu, Perusahaan juga kerap mempublikasikan beberapa informasi dan kegiatan penting Perusahaan di beberapa surat kabar nasional.

4. Siaran Pers

Perusahaan senantiasa memuat informasi terkait kegiatan Perusahaan dalam bentuk siaran pers yang disampaikan sebanyak 18 rilis di tahun 2023.

The Company is committed to implementing GCG in all Company activities through transparency and disclosure of information to all stakeholders. The Company implements diversification of information delivery media in accordance with applicable laws and regulations. The various media utilized by the Company include:

1. Annual Report

Based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 66, the Company discloses financial and non-financial performance to Shareholders through an Annual Report which is available in *hardcopy*.

2. Company Website

The Company has a corporate website, namely [www.Irtjakarta.co.id](http://Irtjakarta.co.id), which is used to provide important information for people who want to know more about the Company. Important information provided includes Company profiles, vision and mission, organizational structure, business being carried out, GCG, Company subsidiaries, news and press releases, as well as important information for people who wish to have a career in the Company.

3. Corporate Print Media

The Company has media for conveying information in the form of print media which includes national newspapers, internal media for paying partners, brochures and leaflets which are used as a means of conveying information. In addition, the Company also frequently publishes some important information and activities of the Company in several national newspapers.

4. Press Release

The Company always publishes information related to the Company's activities in the form of 18 press releases delivered in 2023.

Pedoman Perilaku Perusahaan

The Company's Code of Conduct

LRT Jakarta terus berkomitmen menerapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dengan mengimplementasikan Pedoman *Code of Conduct*. Pedoman ini merupakan panduan dalam bertindak dan berperilaku serta untuk memengaruhi, membentuk, mengatur, dan melakukan kesesuaian tingkah laku sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan nilai-nilai dan budaya PT LRT Jakarta. Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* Perusahaan yang telah disahkan pada tanggal 11 September 2023.

The Code of Conduct guidelines are a form of PT LRT Jakarta's commitment to implementing Good Corporate Governance (GCG) practices in a consistent and sustainable manner. This guideline is a guide in acting and behaving, as well as for influencing, shaping, regulating, and conforming behavior, so that a consistent output is achieved that is in accordance with the values and culture of PT LRT Jakarta. The Company's Code of Conduct, which was ratified on September 11, 2023.



POKOK-POKOK KODE ETIK

Code of Conduct Perusahaan berisikan terkait:

1. Pendahuluan
2. Etika Kerja
3. Etika Usaha
4. Penerapan *Code of Conduct*

PEMBERLAKUAN KODE ETIK BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Kode etik Perusahaan sebagaimana diatur dalam *Code of Conduct* berlaku bagi seluruh insan LRT Jakarta. Hal ini ditandai dengan kewajiban bagi seluruh Insan LRT Jakarta untuk menandatangani Pakta Integritas yang merupakan komitmen Insan LRT Jakarta untuk melaksanakan *Code of Conduct* yang diperbarui setiap tahun.

SOSIALISASI DAN PENYEBARLUASAN KODE ETIK

Dalam rangka menegakkan *Code of Conduct* ini maka Perusahaan wajib melakukan sosialisasi. Adapun tujuan dari sosialisasi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan *sense of belonging* terhadap *Code of Conduct* sehingga melahirkan kesadaran dari seluruh Insan LRT J untuk melaksanakan *Code of Conduct* ini;
2. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Insan LRT J mengenai arti penting *Code of Conduct* bagi kelangsungan bisnis Perusahaan;
3. Memberikan kesadaran kepada Insan LRTJ bahwa *Code of Conduct* merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja seluruh Insan LRTJ.

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan melakukan survey terhadap pemahaman GCG serta pedoman perilaku secara menyeluruh, di mana mendapatkan hasil sebesar 84%. Kegiatan ini akan terus dilakukan di setiap tahunnya dan telah menjadi bagian dari program kerja secara berkelanjutan.

SANKSI ATAS PELANGGARAN PEDOMAN PERILAKU PERUSAHAAN

Sebagaimana tertuang pada *Code of Conduct* Perusahaan, dijelaskan bahwa:

1. Setiap Insan LRT J yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan;
2. Sanksi bagi Karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat laporan dari Atasan Langsung Karyawan yang bersangkutan;
3. Dewan Komisaris dan Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan masing-masing;

PRINCIPLES OF THE CODE OF CONDUCT

The Company's Code of Conduct contains the followings:

1. Introduction
2. Work Ethics
3. Business Ethics
4. Implementation of the Code of Conduct

ENFORCEMENT OF THE CODE OF CONDUCT FOR ALL ORGANIZATIONAL LEVELS

The Company's code of ethics, as stipulated in the Code of Conduct applies to all LRT Jakarta personnel. This is marked by the obligation for all Jakarta LRT personnel to sign the Integrity Pact which is the commitment of LRT Jakarta personnel to implement the Code of Conduct which is renewed every year.

SOCIALIZATION AND DISSEMINATION OF THE CODE OF CONDUCT

In order to enforce this Code of Conduct, the Company is obliged to conduct dissemination. The objectives of the dissemination are as follows:

1. Create a sense of belonging to the Code of Conduct, so as to create awareness from all LRTJ personnel to implement this Code of Conduct;
2. Increase the knowledge and insight of LRTJ personnel regarding the importance of the Code of Conduct for the continuity of the Company's business;
3. Provide awareness to LRTJ personnel that the Code of Conduct is an integral part of business practices and performance evaluation of all LRTJ personnel.

In 2023, the Company conducted a survey on the overall understanding of GCG and code of conduct, which received a result of 84%. This activity will continue to be carried out every year and has become part of a work program on an ongoing basis.

SANCTIONS FOR VIOLATING THE COMPANY'S CODE OF CONDUCT

As stated in the Company's Code of Conduct, it is explained that:

1. Every LRTJ employee who is proven to have violated this Code of Conduct will be given sanctions in accordance with the rules and regulations that apply in the Company;
2. Sanctions for employees who commit violations are determined by the Board of Directors after receiving a report from the employee's direct supervisor;
3. The Board of Commissioners and the Board of Directors decide to provide coaching, disciplinary sanctions and/or other actions as well as precautions that must be carried out by the Direct Superiors in their respective environments;

4. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham;
5. Bila Mitra Kerja atau *Stakeholders* lain yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

Pelaksanaan *Code of Conduct* merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh Insan LRTJ. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan maka Insan LRTJ wajib melaporkan pelanggaran tersebut melalui:

1. Sekretaris Perusahaan;
2. Atasan Langsung;
3. Kotak Pengaduan/*Whistle Blowing System*.
4. Pengungkapan harus dilakukan dengan ikhtikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu (*grievance*) ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.

Seluruh karyawan dan pihak eksternal Perusahaan (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) dapat melaporkan pelanggaran *Code of Conduct* yang dilakukan oleh oknum Insan LRTJ dan Perusahaan wajib menindaklanjuti pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak citra Perusahaan yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi dan lain sebagainya.

JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK PERUSAHAAN TAHUN 2023

Sebagai realisasi penegakan Standar Etika Perusahaan, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Kode Etik selama tahun 2023 dan perbandingannya dengan tahun 2022.

Sanksi Sanctions	2023	2022
Tindakan Disiplin Ringan Light Disciplinary Action	4	2
Tindakan Disiplin Sedang Medium Disciplinary Action	2	Nihil None
Tindakan Disiplin Berat Heavy Disciplinary Action	Nihil None	Nihil None
Jumlah Total	6	2

4. Sanctions for the Board of Directors and Board of Commissioners who commit violations are decided by the Shareholders;
5. If the Partners or other Stakeholders commit violations, then the provisions as stated in the contract will be imposed. If it is related to a criminal act, it can be forwarded to the authorities.

VIOLATION REPORTING MECHANISM

Implementation of the Code of Conduct is the commitment and responsibility of all LRTJ personnel. If a violation or deviation occurs, LRTJ personnel must report the violation through:

1. Corporate Secretary;
2. Immediate Supervisor;
3. Complaint Box/*Whistle Blowing System*;
4. Disclosures must be made in good faith and not in the form of a personal complaint against a certain Company policy (*grievance*) or based on bad will/slander.

LRTJ personnel and external parties of the Company (Customers, Business Partners, and Communities) can report violations of the Code of Conduct committed by individual LRTJ personnel, and the Company is required to follow up on reports that have the potential to cause material harm and can damage the Company's image which among others are caused by irregularities, manipulation and so on.

NUMBER OF VIOLATION OF THE COMPANY'S CODE OF CONDUCT IN 2022

As a realization of enforcing the Company's Ethical Standards, the following details the sanctions imposed regarding the enforcement of the Code of Conduct in 2023 and the comparison with 2022.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Anti-Bribery Management System

Ruang lingkup penyusunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan persyaratan standar internasional, yang disadur menjadi Standar Nasional Indonesia (“SNI”) ISO 37001:2016, dengan tetap mengacu pada ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang relevan. Implementasi SMAP yang baik ditandai dengan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dari dewan pengarah, manajemen puncak dan keterlibatan seluruh pekerja, serta memastikan dilakukannya peningkatan berkelanjutan dalam setiap program.

Penerapan SMAP berlaku untuk semua unit kerja perusahaan, wilayah kerja perusahaan, Insan LRTJ yang bekerja di perusahaan, tingkatan organisasi, termasuk mitra bisnis dan individu dari pihak mitra bisnis yang bekerja sama dengan perusahaan dalam rangka mendukung operasi LRTJ.

Tujuan penyusunan penerapan SMAP ini adalah:

1. Menjaga kredibilitas Perusahaan (PT LRT Jakarta) dan meningkatkan kepercayaan publik serta para pemangku kepentingan lainnya kepada perusahaan.
2. Meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan sekaligus meningkatkan nilai perusahaan.
3. Memitigasi Risiko “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi” dengan cara memberikan bukti yang kuat bahwa Perusahaan telah melakukan langkah-langkah pencegahan yang memadai apabila terjadi penyidikan ‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi’ oleh Penegak Hukum (KPK, Kepolisian and Kejaksaan) maupun Pengadilan apabila ada perkara yang telah masuk ke tahap peradilan.
4. Memberi pesan yang kuat baik ke dalam maupun ke luar perusahaan terkait komitmen Perusahaan terhadap anti penyuapan dan anti korupsi.
5. Menjaga keberlangsungan perusahaan dengan cara mencegah terjadinya penyuapan yang berakibat kepada *high-cost economy* sebagai akibat terjadinya biaya-biaya yang tidak wajar.
6. Memberikan dukungan kepada Perusahaan dan Jakpro Group untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance agar korporasi dapat terus berkembang secara berkesinambungan.

Scope of the preparation of the Anti-Bribery Management System (SMAP) is based on international standard requirements, which was adapted into the Indonesian National Standard (“SNI”) ISO 37001:2016, while still referring to the relevant provisions, regulations, and legislation. Good SMAP implementation is characterized by strong commitment and leadership from the steering board, top management, and the involvement of all employees, and ensures continuous improvement in each program.

The application of the SMAP applies to all Company work units, Company work areas, LRTJ personnel working in the Company, organizational levels, including business partners and individuals from business partners who work with the Company in order to support LRTJ operations.

The objectives of preparing the implementation of this SMAP are as follows:

1. Maintaining the credibility of the Company (PT LRT Jakarta) and increasing the trust of the public and other stakeholders in the Company.
2. Increasing shareholder confidence and simultaneously increase corporate value.
3. Mitigating the Risk of “Corporate Criminal Liability” by providing strong evidence that the Company has taken adequate preventive measures in the event of a ‘Corporate Criminal Liability’ investigation by Law Enforcement (KPK, Police and Attorney) or the Court if a case has gone to court.
4. Sending strong messages both inside and outside the Company, regarding the Company’s commitment to anti-bribery and anti-corruption.
5. Maintaining the continuity of the Company by preventing bribery which results in a high-cost economy as a result of unreasonable costs.
6. Providing support to the Company and Jakpro Group to implement Good Corporate Governance so that corporations can continue to develop sustainably.

Selama tahun 2023, PT LRT Jakarta telah melakukan aktivitas dan dokumentasi SMAP sebagai berikut:

1. Meninjau dan Mengkinikan Dokumen SMAP
PT LRT Jakarta telah melakukan pengkinian terhadap Kebijakan, Prosedur, dan Formulir terkait SMAP yang bertujuan agar penerapan SMAP tetap sejalan dengan konteks internal dan eksternal perusahaan serta sebagai bagian dari upaya perbaikan yang berkesinambungan. Adapun dokumen yang dilakukan pengkinian adalah sebagai berikut:
 - a. LRTJ-MKJ-MRK-002 Kebijakan Anti Penyuapan.
 - b. SK Direksi No.001/DRU/111/II/2023 tentang Tata Kelola Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
 - c. SK Direksi No.001/KAD/111/II/2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT LRT Jakarta.
 - d. LRTJ-PR-MRK-003 Prosedur Pelaporan Pelanggaran.
 - e. LRTJ-FR-MRK-009 Formulir Hasil Validasi Pelaporan Pelanggaran.
 - f. LRTJ-FR-MRK-010 Formulir Laporan Hasil investigasi.
2. Pengkinian Komitmen dalam Penerapan SMAP
Setiap insan LRTJ (Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan, dan tenaga alih daya) wajib untuk menandatangani Pakta Integritas. Penandatanganan Pakta Integritas bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan tindakan suap dan korupsi. Selain kepada pihak internal, PT LRT Jakarta juga menegaskan komitmen penerapan SMAP kepada pihak eksternal melalui surat kepada vendor dan mitra bisnis sebagai berikut:
 - a. Surat kepada vendor No.007/DRU/110/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Insan PT LRT Jakarta Terhadap Penerapan SNI ISO 37001:2016 SMAP.
 - b. Surat kepada mitra bisnis No.008/DRU/110/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 perihal Insan PT LRT Jakarta Terhadap Penerapan SNI ISO 37001:2016 SMAP.
3. Penyediaan *Whistleblowing System* (WBS) LRT Jakarta Integritas
Whistleblowing system (WBS) merupakan salah satu saluran pelaporan yang dapat digunakan oleh seluruh insan LRTJ maupun pihak eksternal seperti vendor dan mitra bisnis untuk melaporkan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh insan LRTJ dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya WBS diharapkan PT LRT Jakarta bisa menyuaraskan karyawan dalam mencapai Visi dan Misi Perusahaan, melindungi karyawan dari lingkungan kerja yang tidak sehat, menjaga Perusahaan dalam menjalankan bisnis sesuai dengan koridor yang tepat dan tentunya meningkatkan reputasi Perusahaan sebagai salah satu partner yang dapat dipercaya baik dalam kegiatan usaha maupun pelayanan kepada Masyarakat.

During 2023, PT LRT Jakarta has conducted activities and documentation related to the Anti-Bribery Management System (SMAP) as follows:

1. Reviewing and Updating SMAP Documents
PT LRT Jakarta has reviewed and updated Policies, Procedures, and Forms related to SMAP to ensure that SMAP implementation remains aligned with the company's internal and external contexts and as part of continuous improvement efforts. The documents that have been updated include:
 - a. LRTJ-MKJ-MRK-002 Anti-Bribery Policy.
 - b. Decree of the Board of Directors No.001/DRU/111/II/2023 concerning the Governance of the Anti-Bribery Management System.
 - c. Decree of the Board of Directors No.001/KAD/111/II/2023 concerning the Guidelines for Gratification Control at PT LRT Jakarta.
 - d. LRTJ-PR-MRK-003 Violation Reporting Procedure.
 - e. LRTJ-FR-MRK-009 Violation Reporting Validation Form.
 - f. LRTJ-FR-MRK-010 Investigation Report Form.
2. Updating Commitments in the Implementation of SMAP
Every individual in LRTJ (Directors, Board of Commissioners, Employees, and contract workers) is required to sign an Integrity Pact. Signing the Integrity Pact aims to strengthen collective commitment to prevent and eradicate bribery and corruption actions. In addition to internal parties, PT LRT Jakarta also reaffirms its commitment to SMAP implementation to external parties through letters to vendors and business partners as follows:
 - a. Letter to vendors No.007/DRU/110/V/2023 dated May 8, 2023, regarding LRT Jakarta Personnel Towards the Implementation of SNI ISO 37001:2016 SMAP.
 - b. Letter to business partners No.008/DRU/110/V/2023 dated May 8, 2023, regarding LRT Jakarta Personnel Towards the Implementation of SNI ISO 37001:2016 SMAP.
3. Providing Whistleblowing System (WBS) "LRT Jakarta Integritas"
The Whistleblowing system (WBS) is one of the reporting channels that can be used by all LRTJ personnel and external parties such as vendors and business partners to report violations committed by LRTJ personnel in carrying out their duties. The presence of WBS is expected to align employees in achieving the Company's Vision and Mission, protect employees from unhealthy work environments, ensure that the Company conducts business within appropriate corridors, and ultimately enhance the Company's reputation as a trustworthy partner in both business activities and service to the Community.

PT LRT Jakarta telah melakukan *launching* WBS LRT Jakarta Integritas pada bulan Agustus 2023 yang bekerja sama dengan pihak konsultan independen yaitu PT Deloitte. WBS LRT Jakarta Integritas dapat diakses melalui saluran sebagai berikut:

Telepon	: +62 21 5088 0141
Email	: lrtjakartaintegritas@tipoffs.info
Website	: https://idn.deloitte-halo.com/lrtjakartaintegritas/
SMS	: +62 81 1199 23335
WhatsApp	: +62 81 1199 23335

Sampai dengan bulan Desember 2023 belum terdapat pelaporan pelanggaran yang dilaporkan melalui WBS.

4. Pengendalian Gratifikasi

PT LRT Jakarta telah memiliki Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 001/KAD/111/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 dengan susunan sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab: Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis
- b. Ketua: Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
- c. Anggota:
 - i) Manajer Manajemen Risiko dan Kepatuhan
 - ii) Asisten Manajer Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Sampai dengan bulan Desember 2023, UPG telah menerima 1 (satu) pelaporan gratifikasi.

5. Training Anti Korupsi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Pelatihan SMAP kepada karyawan PT LRT Jakarta bertujuan untuk meningkatkan *awareness* dan memberikan pemahaman mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Pelatihan dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2023. Selain itu, materi terkait SMAP dan Gratifikasi dapat diakses oleh setiap karyawan PT LRT Jakarta melalui *Learning Management System* (LMS).

6. Program Komunikasi

Komunikasi dan publikasi mengenai komitmen serta aktivitas terkait SMAP dilakukan melalui beberapa sarana sebagai berikut:

- a. Website Perusahaan;
- b. GRC Awareness;
- c. Majalah internal “Transporter”;
- d. Banner dan booklet; and
- e. Sosial Media.

7. Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan

PT LRT Jakarta sudah memiliki Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang bertanggung jawab dan berwenang untuk melaksanakan program SMAP. Adapun susunan FKAP adalah sebagai berikut:

PT LRT Jakarta has launched the WBS “LRT Jakarta Integritas” in August 2023, in collaboration with an independent consultant, PT Deloitte. The LRT Jakarta Integrity Whistleblowing System (WBS) can be accessed through the following channels:

Phone	: +62 21 5088 0141
Email	: lrtjakartaintegritas@tipoffs.info
Website	: https://idn.deloitte-halo.com/lrtjakartaintegritas/
SMS	: +62 81 1199 23335
WhatsApp	: +62 81 1199 23335

As of December 2023, there have been no reports of violations submitted through the WBS.

4. Gratification Control

PT LRT Jakarta has established a Gratification Control Unit (UPG) in accordance with Board of Directors Decree No. 001/KAD/111/II/2023 dated February 16, 2023, with the following composition:

- a. Person In Charge: Director of Finance and Business Support
- b. Chair: Head of Finance and Accounting Division
- c. Members:
 - i) Manager of Risk Management and Compliance
 - ii) Assistant Manager of Risk Management and Compliance

As of December 2023, the UPG has received 1 (one) gratification report.

5. Anti-Corruption and Anti-Bribery Management System Training

SMAP training for PT LRT Jakarta employees aims to increase awareness and provide understanding of the Anti-Bribery Management System. Training was conducted on August 8, 2023. Additionally, materials related to SMAP and gratification can be accessed by every PT LRT Jakarta employee through the Learning Management System (LMS).

6. Communication Program

Communication and publication regarding commitments and activities related to SMAP are carried out through various means such as:

- a. Company Website;
- b. GRC Awareness;
- c. Internal magazine “Transporter”;
- d. Banners and booklets; and
- e. Social Media.

7. Anti-Bribery Compliance Function

PT LRT Jakarta has established an Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) responsible for implementing the SMAP program. The composition of FKAP is as follows:

- a. Ketua: Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis (*ex officio*)
- b. Wakil Ketua: Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi (*ex officio*)
- c. Anggota:
 - Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan (*ex officio*)
 - Kepala Divisi Sumber Daya Manusia & Bagian Umum (*ex officio*)
 - Kepala Divisi Audit Internal (*ex officio*)
 - Kepala Divisi Mutu, Keselamatan, Keamanan & Kesehatan Lingkungan (*ex officio*)
 - Manajer Manajemen Risiko & Kepatuhan (*ex officio*)
 - Manajer Komunikasi Perusahaan (*ex officio*)
 - Manajer Hukum (*ex officio*)
 - Manajer Mutu, Keselamatan, Kesehatan, & Lingkungan (*ex officio*)
 - Manajer Pengembangan Sumber Daya Manusia (*ex officio*)
 - Manajer Komunikasi Perusahaan (*ex officio*)
 - Asisten Manajer Manajemen Risiko dan Kepatuhan (*ex officio*)
 - Asisten Manajer Manajemen Mutu dan K3 (*ex officio*)
 - Asisten Manajer Pengembangan Organisasi, Rekrutmen, dan *Talent Management* (*ex officio*)
 - Officer Hukum (*ex officio*)

FKAP telah melaporkan penerapan SMAP kepada Manajemen Puncak.

8. Bribery Risk Assessment

Setiap Departemen wajib melakukan identifikasi risiko penyuapan dan melakukan asesmen terhadap risiko penyuapan. Identifikasi risiko penyuapan dimaksud wajib dituangkan ke dalam formulir *Bribery Risk Assessment* yang kemudian diserahkan kepada Departemen Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara triwulan. Selama tahun 2023 telah teridentifikasi 76 risiko penyuapan.

9. Internal Audit

Sebagai salah satu upaya untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan PT LRT Jakarta melakukan Audit Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT) yang di mana SMAP menjadi salah satu sistem manajemen yang menjadi cakupan audit SMT.

- a. Chair: Director of Finance and Business Support (*ex officio*)
- b. Vice Chair: Head of Finance and Accounting Division (*ex officio*)
- c. Members:
 - Head of Corporate Secretary Division (*ex officio*)
 - Head of Human Resources Division & General Affairs Section (*ex officio*)
 - Head of Internal Audit Division (*ex officio*)
 - Head of Quality, Safety, Security & Environmental Division (*ex officio*)
 - Manager of Risk Management & Compliance (*ex officio*)
 - Corporate Communication Manager (*ex officio*)
 - Legal Manager (*ex officio*)
 - Manager of Quality, Safety, Health, & Environment (*ex officio*)
 - Human Resource Development Manager (*ex officio*)
 - Corporate Communication Manager (*ex officio*)
 - Assistant Manager of Risk Management and Compliance (*ex officio*)
 - Assistant Manager of Quality Management and Occupational Health and Safety (*ex officio*)
 - Assistant Manager of Organization Development, Recruitment, and Talent Management (*ex officio*)
 - Legal Officer (*ex officio*)

FKAP has reported the implementation of SMAP to the Top Management.

8. Bribery Risk Assessment

Every Department is required to identify bribery risks and conduct assessments of bribery risks. The identified bribery risks must be documented in the Bribery Risk Assessment form, which is then submitted to the Risk Management and Compliance Department quarterly. During the year 2023, 76 bribery risks have been identified.

9. Internal Audit

As one of the efforts to continuously evaluate and improve, PT LRT Jakarta conducts an Integrated Management System (IMS) Audit, in which SMAP is one of the management systems covered by the IMS audit.

Kebijakan terkait Pengendalian Gratifikasi

Policies Related to Gratification Control

Perusahaan senantiasa mengedepankan prinsip keadilan dan kejujuran dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu wujud komitmen Perusahaan adalah dengan disahkannya Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT LRT Jakarta sesuai dengan Keputusan Direksi PT LRT Jakarta No. 001/KAD/111/I/2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT LRT Jakarta.

Di dalam pedoman pengendalian gratifikasi tersebut disebutkan bahwa:

1. Setiap karyawan dilarang menerima dan wajib menolak Gratifikasi yang dianggap suap dari pihak mana pun yang diterima secara langsung, yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan tugas dan wewenang di Perusahaan.
2. Pada kondisi tertentu, di mana karyawan tidak dapat menghindar untuk menolak Gratifikasi yang dianggap suap tersebut, maka karyawan wajib melaporkan dan menyerahkan uang/barang/fasilitas dimaksud kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).
3. Setiap karyawan apabila ditawarkan atau diberikan Gratifikasi yang dianggap suap wajib melakukan penolakan dengan cara santun dan memberikan penjelasan secara memadai terhadap kebijakan dan aturan yang ada dalam pedoman ini kepada Mitra Usaha/Pihak Ketiga.
4. Setiap karyawan dilarang memberi Gratifikasi yang dianggap suap baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak manapun, yang bertujuan untuk memengaruhi pihak yang dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal yang berlawanan dengan tugas dan kewenangannya.

Selain itu, di dalam internal Perusahaan juga telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab Person In Charge	Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis Director of Finance and Business Support
Ketua Head	Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi Head of Finance and Accounting Division
Anggota Members	Manajer Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Manager Asisten Manajer Manajemen Risiko dan Kepatuhan Risk Management and Compliance Assistant Manager

The Company always prioritizes the principles of fairness and honesty in conducting its business. One of the manifestations of the Company's commitment is the ratification of the Gratification Control Guidelines within PT LRT Jakarta, in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT LRT Jakarta No. 001/KAD/111/I/2023 dated February 16, 2023, concerning Guidelines for Gratification Control in the Environment of PT LRT Jakarta.

In the guidelines for gratification control it is stated that:

1. Every employee is prohibited from receiving and must refuse Gratification which is considered a bribe received directly from any party, which can affect the independence and objectivity of carrying out duties and authorities in the Company.
2. Under certain conditions, where the employee cannot avoid refusing Gratification which is considered a bribe, the employee is obliged to report and hand over the said money/goods/facilities to the Gratification Control Team.
3. Every employee, if Gratification is offered or given which is considered a bribe, must refuse in a polite manner, and provide an adequate explanation of the policies and rules contained in this guideline to Business Partners/Third Parties.
4. Every employee is prohibited from giving gratuities which are considered bribes either directly or indirectly to any party, which aims to influence the said party to do and/or not do something that is contrary to their duties and authorities.

Apart from that, within the Company a Gratification Control Team has also been formed with the following composition:

Adapun tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi adalah:

1. Menerima pelaporan Gratifikasi dari Direksi atau karyawan;
2. Melakukan Analisa dan pemrosesan atas setiap laporan Gratifikasi yang diterima;
3. Menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas yang dibutuhkan dalam Pengendalian Gratifikasi di Perusahaan, termasuk tempat penyimpanan sementara yang aman dan memadai atas uang/barang/fasilitas Gratifikasi pelapor, sampai adanya tindak lanjut dan rekomendasi dari Direksi;
4. Meneruskan Laporan Gratifikasi dari Karyawan dengan mengisi formulir yang ditetapkan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi, baik secara langsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Direksi atau karyawan;
5. Memberikan laporan Gratifikasi, melakukan koordinasi, dan konsultasi dengan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Keputusan Direksi;
6. Setelah mendapatkan arahan dan persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris, Unit Pengendalian Gratifikasi melanjutkan laporan Gratifikasi kepada Pemegang Saham.

The duties and authorities of the Gratification Control Unit are as follows:

1. Receive gratification reports from the Board of Directors or employees;
2. Analyze and process each received gratification report;
3. Prepare the necessary tools and facilities for gratification control in the Company, including secure and adequate temporary storage facilities for gratification money/goods/facilities from the reporter, until there are follow-up actions and recommendations from the Board of Directors;
4. Forward Gratification Reports from Employees by completing the form specified by the Gratification Control Unit, either directly or no later than 14 (fourteen) working days from the date the gratification is received by the Board of Directors or employees;
5. Provide gratification reports, coordinate, and consult with the Board of Commissioners in implementing the Board of Directors' decisions;
6. After receiving direction and approval from the Board of Directors and the Board of Commissioners, the Gratification Control Unit proceeds with the gratification report to the Shareholders.



Kebijakan Terkait Aktivitas Politik dan Sosial Organisasi

Policies Related to Political Activities and Social Organization

Perusahaan secara tegas, tidak mengizinkan insan LRT Jakarta menggunakan fasilitas atau sumber daya apa pun untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik, sebagaimana yang telah diatur dalam Kode Etik Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan tidak melarang karyawan untuk menentukan aspirasi politiknya tanpa ada paksaan tertentu, selama dilakukan di luar lingkup profesi mereka sebagai karyawan LRT Jakarta.

The Company expressly prohibits LRT Jakarta personnel from using any facilities or resources for political campaign purposes, fundraising for political activities, or for political participation, as stipulated in the Company's Code of Ethics. Therefore, the Company does not prohibit employees from expressing their political aspirations without any coercion, as long as it is done outside the scope of their profession as LRT Jakarta employees.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

State Officials' Assets Report (LHKPN)

Berdasarkan Keputusan Direksi:

- PT Jakarta Propertindo No. 008/UT0000/111/I/2020 mengenai Ketentuan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di PT Jakarta Propertindo dan Anak Usaha
- PT LRT Jakarta No. 001/SPR/111/IV/2020 tentang Ketentuan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di PT LRT Jakarta.

Ditetapkan pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK adalah Dewan Komisaris dan Direksi. Penyampaian LHKPN kepada KPK dilakukan pada saat:

- Pengangkatan pada saat pertama kali menjabat;
- Pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
- Berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
- Setelah diterbitkannya keputusan bagi yang belum pernah menyampaikan LHKPN kepada KPK;
- Secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Penyampaian LHKPN periodik disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Based on the Decree of the Board of Directors:

- PT Jakarta Propertindo No. 008/UT0000/111/I/2020 concerning the Obligation to Submit State Officials' Assets Report (LHKPN) at PT Jakarta Propertindo and its Subsidiaries
- PT LRT Jakarta No. 001/SPR/111/IV/2020 concerning the Provisions on the Obligation to Submit State Officials' Assets Report (LHKPN) at PT LRT Jakarta.

Officials mandated to submit LHKPN to the Corruption Eradication Commission (KPK) are the Board of Commissioners and the Board of Directors. The submission of LHKPN to the KPK is done when:

- Appointment upon first assuming office;
- Reappointment after the end of term or retirement;
- End of term or retirement;
- After the issuance of a decision for those who have not previously submitted LHKPN to the KPK;
- Periodically, every year, for wealth acquired from January 1st to December 31st. Periodic submission of LHKPN must be submitted no later than March 31st of the following year.

Pengadaan barang dan jasa

Procurement of Goods and Services

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan LRT Jakarta mengacu pada SK Direksi No.001/SBU/111/II/2022 merujuk pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perlem LKPP No.12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Pergub DKI Jakarta No.50 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah.

Guidelines for Procurement of Goods and Services in the Jakarta LRT Environment refer to Decree of the Board of Directors No.001/SBU/111/II/2022 which refers to Presidential Regulation No. 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services, Perlem LKPP No.12 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Government Goods/Services Procurement Through Providers, Regulation of the Governor of DKI Jakarta No.50 of 2019 concerning Guidelines for Procurement of Goods/Services for Regional Owned Enterprises.

METODE PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Adapun Metode Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT LRT Jakarta antara lain:

1. Tender Terbuka/Lelang
2. Pemilihan Langsung
3. Pengadaan Langsung
4. Penunjukan Langsung
5. Pembelian Langsung
6. Swakelola



PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES MANAGEMENT METHOD

Methods for procuring goods and services within PT LRT Jakarta include:

1. Open Tender/Auction
2. Direct Selection
3. Direct Procurement
4. Direct Appointment
5. Direct Purchase
6. Self-management

Pelelangan Auction

- Pengadaan B/J > 5M
- Pascakualifikasi dan Prakualifikasi
- Diumpumkan pada website perusahaan
- Procurement of Goods & Service > 5M
- Postqualification and Prequalification
- Announced on the Company website

Penunjukan Langsung Direct Appointment

- Pengadaan B/J dengan keadaan khusus/tertentu yang memenuhi ketentuan-ketentuan
- Procurement of Goods & Service with special/certain circumstances that meet the conditions

Pemilihan Langsung Direct Selection

- Pengadaan B/J < 5M
- Mengundang Min. 3 Vendor Rekanan yang sudah terverifikasi di List Vendor
- Procurement of Goods & Service < 5M
- Invite Min. 3 Vendor Partners that have been verified on the Vendor List

Pembelian Langsung Direct Purchase

- Pengadaan B/J < 50jt on Spot (Toko Retail, Department Store)
- Procurement of Goods & Service < 50 million on Spot (Retail Stores, Department Stores)

Pengadaan Langsung Direct Procurement

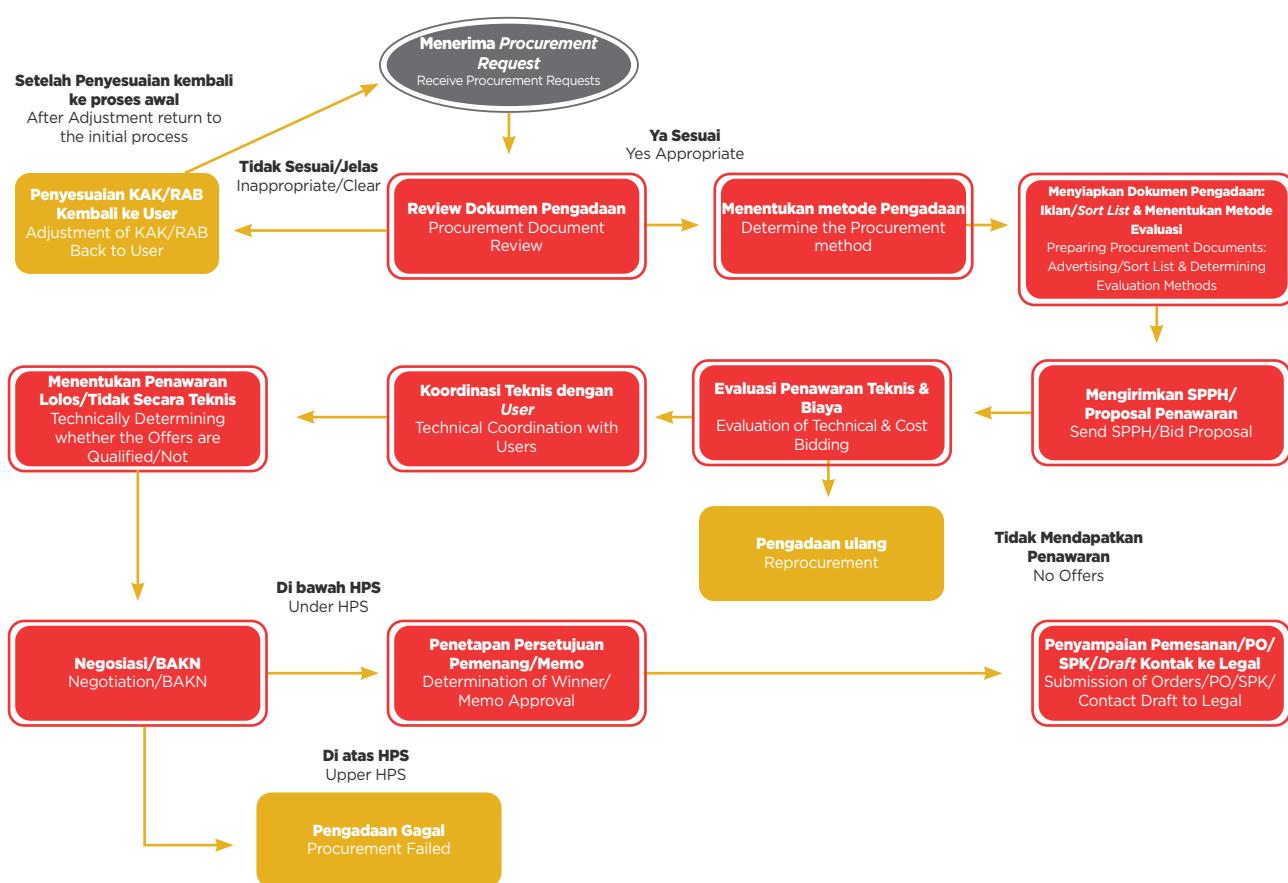
- Pengadaan B/J < 200JT
- Mengundang Min. 2 Vendor Rekanan yang sudah terverifikasi di List Vendor
- Procurement of Goods & Service < 200 million
- Invite Min. 2 Vendors, partners who have been verified on the Vendor List

Swakelola Self Manage

- Pengadaan B/J yang dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan penyedia.
- Procurement of Goods & Service carried out independently without involving a provider.

ALUR PROSES PENGADAAN

FLOW OF PROCUREMENT PROCESS



KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Sepanjang tahun 2023, jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang telah diselesaikan untuk memenuhi kebutuhan operasi Perusahaan, baik melalui metode pengadaan langsung, pemilihan langsung, pelelangan, dan penunjukan langsung akan diuraikan dalam tabel berikut ini:

PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES ACTIVITIES

In 2023, the number of goods and services procurement packages that have been completed to meet the needs of the Company's operations, either through direct procurement, direct selection, auction, and direct appointment methods is described in the following table:

No.	Metode Pengadaan Procurement Method	Jumlah Amount
1	Pengadaan Langsung Direct Procurement	134
2	Pemilihan Langsung/Tender Sederhana Direct Selection/Simple Tender	103
3	Pelelangan/Tender/Seleksi Auction/Tender/Selection	7
4	Penunjukan Langsung Direct Appointment	80
5	Pembelian Langsung Direct Purchase	0
6	Penugasan Assignment	0
7	Proses Pengulangan Pengadaan/Repeat Order Repeat Order Procurement Process.	30
8	Hold/Batal	14

Adapun untuk nilai pengadaan telah dikalkulasikan oleh unit terkait berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

As for the procurement value, it has been calculated by the related unit based on accountable data as follows:

No.	Metode Pengadaan Procurement Method	Nilai Anggaran/HPS (dalam Rupiah Penuh) Budget value/HPS (in Full Rupiah)	Nilai Kontrak (dalam Rupiah Penuh) Contract Value (in Full Rupiah)
1	Pelelangan Auction	Rp43.451.913.797	Rp39.262.105.486
2	Pemilihan Langsung Direct Selection	Rp88.165.847.300	Rp77.901.284.649
3	Pengadaan Langsung Direct Procurement	Rp16.845.586.099	Rp14.639.132.923
4	Penunjukan Langsung Direct Appointment	Rp40.167.700.543	Rp31.132.289.206
5	Repeat Order	Rp13.422.113.754	Rp11.706.152.952
6	Perpanjangan /Addendum Addendum	Rp10.987.205.720	Rp10.734.129.175
Jumlah Total		Rp213.040.367.213	Rp185.375.094.391



Sistem Pelaporan Pelanggaran

Violation Reporting System

LRT Jakarta memiliki mekanisme pelaporan pelanggaran yang merupakan bentuk upaya Perusahaan dalam menciptakan suasana kerja yang bersih dan bertanggung jawab. Perusahaan memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang merupakan bentuk upaya Perusahaan dalam menciptakan suasana kerja yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan adanya WBS diharapkan PT LRT Jakarta bisa menyelaraskan karyawan dalam mencapai Visi dan Misi Perusahaan, melindungi karyawan dari lingkungan kerja yang tidak sehat, menjaga Perusahaan dalam menjalankan bisnis sesuai dengan koridor yang tepat dan tentunya meningkatkan reputasi Perusahaan sebagai salah satu partner yang dapat dipercaya baik dalam kegiatan usaha maupun pelayanan kepada Masyarakat.

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

Salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan *good corporate governance* adalah melalui mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dengan tujuan:

1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi;
2. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya;
3. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal;
4. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini;
5. Meningkatkan reputasi perusahaan.

Efektivitas sistem terlihat dari jumlah kecurangan yang berhasil dideteksi dan juga waktu penindakannya yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan cara lainnya. Selain itu, pimpinan organisasi memiliki kesempatan untuk mengatasi permasalahan secara internal dahulu, sebelum permasalahan tersebut merebak ke ruang publik yang dapat memengaruhi reputasi organisasi.

LRT Jakarta has a violation reporting mechanism which is a Company effort to create a clean and responsible work environment. The Company has a violation reporting system (whistleblowing system) which is a Company effort to create a clean and responsible work environment. With the WBS in place, it is hoped that PT LRT Jakarta can align employees to achieve the Company's Vision and Mission, protect employees from unhealthy work environments, ensure that the Company conducts business in the right manner, and certainly enhance the Company's reputation as a trusted partner in both business activities and service to the community.

VIOLATION REPORTING MECHANISM

One of the most effective ways to prevent and combat practices contrary to good corporate governance is through a violation reporting mechanism (whistleblowing system) with the following objectives:

1. Creating a conducive environment and encouraging reporting on matters that may cause financial or non-financial losses, including those that may damage the organization's reputation.
2. Facilitating management to effectively handle violation reports while protecting the confidentiality of the reporter's identity and ensuring that information is kept in a special archive with guaranteed security.
3. Establishing policies and infrastructure to protect reporters from retaliation by internal and external parties.
4. Reducing losses caused by violations through early detection.
5. Enhancing the Company's reputation.

The effectiveness of the system is evident from the number of frauds detected and the relatively shorter response time compared to other methods. Additionally, organizational leaders could address issues internally before they become public knowledge, which could affect the organization's reputation.

1. Yang termasuk dalam aktivitas pelanggaran antara lain adalah:
 - a. Melanggar peraturan perundang-undangan;
 - b. Melanggar pedoman etika perusahaan;
 - c. Melanggar prinsip akuntansi yang berlaku umum;
 - d. Melanggar kebijakan dan prosedur operasional Perusahaan, ataupun kebijakan prosedur, dan peraturan lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan;
 - e. Melakukan tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non-finansial;
 - f. Melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan kerja.
 2. Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral, atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).
 3. Pada dasarnya, pelapor pelanggaran (*whistleblower*) adalah karyawan dari organisasi itu sendiri (pihak internal), meskipun tidak tertutup kemungkinan adanya pelapor yang berasal dari pihak eksternal (pelanggan, pemasok, masyarakat). Pelapor memberikan bukti, informasi, atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan agar dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.
 4. Sistem Pelaporan Pelanggaran yang baik memberikan fasilitas dan perlindungan (*whistleblower protection*) sebagai berikut:
 - a. Fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, *email*) yang independen, bebas dan rahasia;
 - b. Perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor. Walaupun diperbolehkan, penyampaian pelaporan secara anonim, yaitu tanpa identitas, tidak direkomendasikan. Pelaporan secara anonim menyulitkan dilakukannya komunikasi untuk tindak lanjut atas pelaporan;
 - c. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor;
 - d. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan, bagaimana, serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.
1. Activities considered violations include:
 - a. Violating laws and regulations;
 - b. Violating the Company's ethical guidelines;
 - c. Violating generally accepted accounting principles;
 - d. Violating the Company's policies, operational procedures, and other regulations deemed necessary by the company;
 - e. Engaging in other fraudulent actions that may cause financial or non-financial losses.
 - f. Engaging in actions that endanger workplace safety
 2. Reporting violations (*whistleblowing*) involve disclosing violations or unlawful, unethical, or immoral acts that may harm the organization or stakeholders, made by employees or organizational leaders to the organization's leadership or other institutions capable of taking action on the violation. This disclosure is generally done confidentially.
 3. Essentially, whistleblowers are employees of the organization itself (internal parties), although it's possible for reports to come from external parties (customers, suppliers, the public). Reporters provide clear evidence, information, or indications of the reported violation for investigation or follow-up.
 4. A good Reporting Violations System provides facilities and protections (*whistleblower protection*) as follows:
 - a. Independent, free, and confidential reporting channels (telephone, mail, email).
 - b. Protection of the reporter's identity. This protection is provided when the reporter provides identifying information. Although allowed, anonymous reporting, without identification, is not recommended as it hinders communication for follow-up on reports.
 - c. Protection against retaliation from the accused or the organization. Protection from pressure, delayed promotions, dismissals, lawsuits, loss of property, to physical harm. This protection extends not only to the reporter but can also include the reporter's family members.
 - d. Information on the follow-up process, including when, how, and to which institution the follow-up is submitted. This information is provided confidentially to fully identified reporters.

Berdasarkan prosedur pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) Perusahaan menerima pelaporan pelanggaran baik dari internal Perusahaan maupun eksternal Perusahaan.

PT LRT Jakarta, di tahun 2023 telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran WBS LRT Jakarta Integritas yang pengelolaannya bekerja sama dengan pihak konsultan independen. WBS LRT Jakarta Integritas dapat diakses melalui saluran sebagai berikut:

Telepon	: +62 21 5088 0141
Email	: Irtjakartaintegritas@tipoffs.info
Website	: https://idn.deloitte-halo.com/Irtjakartaintegritas/
SMS	: +62 81 1199 23335
WhatsApp	: +62 81 1199 23335

Setiap pelaporan pelanggaran yang diterima oleh Perusahaan akan dilakukan validasi terlebih dahulu oleh Komite WBS Perusahaan untuk kemudian disampaikan kepada Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris untuk menentukan pelaksanaan penanganan pelaporan ke tahap investigasi. Tim investigasi independen akan dibentuk oleh Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris untuk selanjutnya melakukan proses investigasi dan melaporkan hasil investigasi kepada Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris. Rekomendasi penyelesaian pelanggaran dan sanksi akan merujuk kepada kebijakan dan ketentuan Peraturan Perusahaan.

SOSIALISASI SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Sosialisasi sistem Whistleblowing dilakukan melalui intranet milik Perusahaan kepada seluruh Karyawan Perusahaan, mitra bisnis, vendor, dan *stakeholder* terkait. Media yang digunakan antara lain pertemuan melalui tatap muka atau *online*, *booklet*, *standing banner*, *E-Magazine* dan media sosial Perusahaan. Sistem *Whistleblowing* LRT Jakarta Integritas juga dapat langsung diakses melalui website resmi Perusahaan untuk mempermudah akses bagi pihak eksternal untuk melakukan pelaporan.

SANKSI BAGI PELANGGAR

Sanksi yang diberikan kepada Pelanggar diberikan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan Peraturan Perusahaan.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Perusahaan memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan pelapor atas pelaporan pelanggaran yang diadukan yaitu menjamin kerahasiaan identitas Pelapor dan memberikan perlindungan kepada Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun, selama dan sepanjang Pelapor dapat menjaga kerahasiaan kasus yang dilaporkan. Khusus Pelapor yang merupakan pihak internal (karyawan Perusahaan) yang memberikan identitasnya, Perusahaan memberikan perlindungan dari hal-hal sebagai berikut :

Based on the violation reporting procedure, the Company accepts reports of violations from both internal and external parties.

In 2023, PT LRT Jakarta implemented the WBS “LRT Jakarta Integritas” reporting violation system, managed in collaboration with an independent consultant. The WBS LRT Jakarta Integrity can be accessed through the following channels:

Telephone	: +62 21 5088 0141
Email	: Irtjakartaintegritas@tipoffs.info
Website	: https://idn.deloitte-halo.com/Irtjakartaintegritas/
SMS	: +62 81 1199 23335
WhatsApp	: +62 81 1199 23335

Every violation report received by the Company undergoes validation by the Company's WBS Committee before being forwarded to the CEO and/or Board of Commissioners for determining the handling of the report, which may proceed to the investigation stage. An independent investigation team will be formed by the CEO and/or Board of Commissioners to conduct the investigation and report the findings to them. Recommendations for resolving the violation and sanctions will be based on Company policies and regulations.

SOCIALIZATION OF THE REPORTING VIOLATIONS SYSTEM

The whistleblowing system was socialized through the Company's intranet to all Company employees, business partners, vendors, and related stakeholders. Media used include face-to-face or online meetings, booklets, standing banners, e-magazines, and the Company's social media. The Whistleblowing System “LRT Jakarta Integritas” can also be directly accessed through the Company's official website to facilitate external parties in reporting.

SANCTIONS FOR VIOLATORS

Sanctions for violators are given in accordance with the Company's policies and regulations.

PROTECTION FOR REPORTERS

The Company provides protection and ensures the confidentiality of reporters regarding reported violations, guaranteeing the confidentiality of the reporter's identity, and protecting the reporter from any form of threat, intimidation, or unpleasant actions from any party, as long as the reporter can maintain the confidentiality of the reported case. Specifically for internal reporters (Company employees) who provide their identity, the Company provides protection from actions such as:

1. Pemecatan yang tidak sesuai ketentuan dan diskriminatif;
2. Penurunan jabatan;
3. Catatan yang merugikan pribadi Pelapor;
4. Perbuatan diskriminasi dalam pengembangan karir di Perusahaan.

JUMLAH PENGADUAN TAHUN 2023 DAN TINDAK LANJUTNYA

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat pelaporan pelanggaran yang diduga terjadi di lingkungan Perusahaan.

1. Dismissal that is not in accordance with regulations and is discriminatory;
2. Demotion;
3. Negative records on the reporter's personal profile;
4. Discriminatory actions regarding career development within the Company.

NUMBER OF REPORTS IN 2023 AND THEIR FOLLOW-UPS

Throughout 2023, there were no reports of violations suspected to have occurred within the Company.

Jumlah Laporan Number of Reports	Laporan (Closed) Report (Closed)	Laporan (Open) Report (Open)	Tindak Lanjut Follow-Up
-	-	-	-

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

LRT Jakarta senantiasa berkomitmen untuk memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Adapun kontribusi pajak dari Perusahaan di tahun 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut.

FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS

The Company is always committed to fulfilling all tax obligations. The tax contributions from the Company in 2023 and 2022 are as follows.

Jenis Pajak Type of Tax	Uraian Description		Tahun Pajak Tax Year
	2023	2022	
PPh 4 ayat 2 Income Tax 4 paragraph 2	406.368.858	271.846.527	
PPh 21 Income Tax 21	8.877.066.488	4.799.549.164	
PPh 22 Income Tax 22	404.224.375	269.416.000	
PPh 23 Income Tax 23	1.005.680.404	753.484.976	
Jumlah Total	10.693.340.125		6.094.296.667

Transparansi Praktik *Bad Governance*

Transparency of Bad Governance Practices

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERUSAHAAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Per 31 Desember 2023, Perusahaan tidak menerima pelaporan atas aktivitas Perusahaan yang mencemari lingkungan, baik di sekitar kantor pusat maupun di sekitar lingkungan Perusahaan.

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Seluruh penyajian informasi dalam Laporan Tahunan ini, khususnya terkait kinerja keuangan dan hal-hal lainnya, mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah di audit oleh KAP Hertanto, Grace, Karunawan. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

KASUS TERKAIT BURUH DAN KARYAWAN

Hingga akhir tahun 2023, tidak terdapat kasus antara Perusahaan dengan buruh dan/atau karyawan yang bersifat material sehingga berdampak terhadap kelangsungan usaha Perusahaan.

KESESUAIAN BUKU LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN TAHUNAN DI WEBSITE PERUSAHAAN

Perusahaan telah menyampaikan Laporan Tahunan digital kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, serta telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan dan sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan.

REPORT ON THE COMPANY'S ACTIVITIES THAT POLLUTE THE ENVIRONMENT

As of December 31, 2023, the Company did not receive reports on Company activities that pollute the environment, both around the head office and around the Company's environment.

DISCREPANCIES IN THE PRESENTATION OF ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS WITH APPLICABLE REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK)

All information presented in this Annual Report, particularly regarding financial performance and other matters, refers to the Financial Statements for the years ended December 31, 2023 and December 31, 2023 which have been audited by KAP Public Accounting Firm Hertanto, Grace, Karunawan. Presentation and disclosure of the Company's consolidated financial statements prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

CASES RELATED TO WORKERS AND EMPLOYEES

Throughout 2023, there were no material cases between the Company and workers and/or employees that would have an impact on the continuity of the Company's business.

CONFORMITY OF THE ANNUAL REPORT BOOK AND ANNUAL REPORT ON THE COMPANY'S WEBSITE

The Company's digital Annual Report, whether submitted to shareholders, stakeholders, or uploaded to the Company's official website, is in accordance with the Annual Report book printed and published by the Company.





Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Corporate Social and Environment Responsibility



LRT Jakarta terus berkomitmen memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah operasionalnya sebagai bagian dari pemangku kepentingan Perusahaan.

LRT Jakarta remains committed to providing benefits to the community and the environment around its operational areas as part of the Company's stakeholders.





TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE

Dalam menjalankan usahanya, pelaku bisnis tidak hanya fokus dalam memperoleh keuntungan, melainkan mereka diminta untuk memberikan kontribusi secara positif terhadap lingkungan sosialnya dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Konsep Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainability Development* yang berkembang dari keinginan banyak pihak tentang keseimbangan antara *people, profit, dan planet*, memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan kegiatan usaha dengan tetap bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya.

Regulator telah mendorong upaya harmonisasi ini melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), yang wajibkan entitas usaha untuk memiliki kebijakan dan program terkait komitmennya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan. Tata kelola organisasi (*organizational governance*) merupakan faktor yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial atas dampak keputusan dan tindakan sebuah organisasi serta mengintegrasikan tanggung jawab sosial di seluruh kegiatan operasionalnya. Ke depan, tata kelola organisasi juga turut mencerminkan strategi-strategi, target dan komitmen penerapan tanggung jawab sosial, termasuk komitmen dan akuntabilitas pimpinan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian atas keberlanjutan usaha dan lingkungan sosialnya.

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN PENERAPAN PROGRAM TJSL PERUSAHAAN

TJSL merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan operasional yang dijalankan. Sehingga Perusahaan terus berkomitmen dalam mewujudkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan direalisasikan melalui perilaku etis dan transparan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan harapan pemangku kepentingan serta senantiasa sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan meyakini, perusahaan yang baik bukan hanya yang berhasil mencapai target *profit* yang ditetapkan, melainkan yang juga mampu berkontribusi positif terhadap perkembangan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, Perusahaan menjadikan TJSL sebagai bagian tidak terpisahkan dari kegiatan operasional untuk mendukung keberlanjutan usaha.

In conducting their business, business actors do not only focus on making profits, but also being asked to contribute positively to their social environment in creating sustainable development. The concept of Sustainable Development, which developed from the desire of many parties regarding a balance between people, profit and planet, gave rise to a new awareness of the importance of performing business activities while remaining responsible for the social environment.

Regulators have encouraged this harmonization effort through Social and Environmental Responsibility (TJSL), which requires business entities to have policies and programs related to their commitment to build sustainable relationships with stakeholders. Organizational governance is a factor required in implementing social responsibility for the impact of decisions and actions of an organization, as well as integrating social responsibility in all of its operational activities. Going forward, organizational governance also reflects the strategies, targets, and commitment to implementing social responsibility, including leadership commitment and accountability, so that it influences the achievement of business sustainability and social environment in the future.

COMMITMENT AND POLICY FOR IMPLEMENTING THE COMPANY'S CSR

CSR activities are an integral part of the operational activities being conducted. Hence, the Company continues to be committed in realizing its responsibility to society and the environment is realized through ethical and transparent behavior that is oriented towards sustainable development and community welfare, while taking into account the expectations of stakeholders, and always being in line with the prevailing laws and regulations.

The Company believes, a good company should not only successful in achieving the set profit targets, but also is able to make a positive contribution to the development of the community's standard of living. Thus, the Company makes CSR as an integral part of operational activities to support business sustainability.

UJI TUNTAS/DUE DILIGENCE KEGIATAN PERUSAHAAN DAN DAMPAK SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN

Adapun aktivitas TJSL diarahkan secara berkesinambungan untuk mendorong kemandirian dengan menitikberatkan pada program pembangunan sosial, Ekonomi dan Lingkungan (*Triple Bottom Line*) dengan upaya pencapaian *profit, people, dan planet*, di antaranya adalah:

1. *Profit*, tingkat laba rugi perusahaan;
2. *People*, masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang terdampak atas pelaksanaan kegiatan perusahaan;
3. *Planet*, tingkat tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan.

LRT Jakarta merasa pentingnya keselarasan antara pencapaian tujuan dan tanggung jawab terhadap lingkungan wilayah kerja beroperasi. LRT Jakarta menyusun kegiatan TJSL yang terintegrasi dan sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Uji tuntas dilakukan dalam rangkaian kegiatan perusahaan dan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan, baik dampak positif maupun negatif. Selain itu, proses uji tuntas juga melibatkan semua sektor yang saling terkait dan membentuk rantai bisnis proses. Poin dari uji tuntas yang dilakukan di antaranya menitikberatkan pada tingkat manfaat dan keberlanjutan program terhadap dampak yang terjadi dan prioritas wilayah operasi yang terdampak.

ISU-ISU PENTING SOSIAL, EKONOMI DAN LINGKUNGAN TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERUSAHAAN

Dalam rangka menyelaraskan kinerja usahanya, LRT Jakarta terus berkomitmen memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar wilayah operasionalnya sebagai bagian dari pemangku kepentingan Perusahaan. Perusahaan berupaya untuk memberikan manfaat yang dapat dirasakan dari aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Adapun klasifikasi pemangku kepentingan dan pengaruh/dampak yang dirasakan dari kegiatan Perusahaan yang dijalankan adalah sebagai berikut:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Definisi Definition	Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan Impact of Company Activities
Pemegang Saham/Investor Shareholders/Investors	PT Jakarta Propertindo	Kinerja keuangan Perusahaan akan berdampak terhadap besarnya setoran dividen yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang saham. The Company's financial performance will impact the amount of dividend payments submitted to the DKI Jakarta Provincial Government as a shareholder.
Manajemen/Karyawan Management/Employee	Seluruh pekerja yang bekerja di Perusahaan All of the Company's employee	Kesinambungan Perusahaan berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang. The Company's sustainability affects the welfare of employees in the long term.

DUE DILIGENCE OF THE COMPANY'S ACTIVITIES AND ITS SOCIAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL IMPACTS

CSR activities are directed on an ongoing basis to encourage independence by focusing on social, economic and environmental development programs (*Triple Bottom Line*) with efforts to achieve profit, people and planet:

1. Profit, the Company's profit and loss rate;
2. People, the community as stakeholders who are affected by the implementation of Company activities;
3. Planet, the level of corporate responsibility for the environment.

LRT Jakarta perceives the importance of harmony between achieving goals and responsibility for the environment in which the work operates. LRT Jakarta organizes CSR activities that are integrated and in accordance with the Company's business strategy. Due diligence is conducted in a series of the Company's activities and social, economic and environmental impacts, both positive and negative. In addition, the due diligence process involves all sectors that are interrelated and establish a business process chain. The due diligence which is conducted includes focusing on the level of benefits and sustainability of the program against the impacts that occur and the priorities of the affected operational areas.

IMPORTANT SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL ISSUES RELATED TO THE IMPACT OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

In order to harmonize its business performance, LRT Jakarta committed to continuously aligning business performance that can provide benefits to the community and the environment around the LRT Jakarta operational area as part of the Company's stakeholders. The Company seeks to provide benefits that can be felt in terms of social, economic and environmental aspects. The classification of stakeholders and the perceived influence/impact of the Company's activities can be seen as follows:

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Definisi Definition	Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan Impact of Company Activities
Regulator/Pemerintah Regulators/Government	Pemprov DKI Kementerian Perhubungan DKI Jakarta Provincial Government Ministry of Transportation	Kinerja keuangan perusahaan akan berdampak terhadap besarnya setoran pajak yang diserahkan kepada Pemerintah sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk modal pembangunan. The Company's financial performance will impact the amount of tax payments submitted to the Government as state revenue used for development capital.
Masyarakat The Community	Masyarakat umum baik yang menggunakan produk-produk Perusahaan maupun tidak The public, whether they use the Company's products or not	Kegiatan bisnis Perusahaan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat baik melalui produk dan layanan maupun atas keberadaan Perusahaan yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. The Company's business activities have an impact on improving the quality of life of the community both through products and services as well as the presence of the Company which can have a positive impact on the economy of the surrounding community.
Konsumen/Pelanggan Consumer/Customer	Para klien baik domestik maupun asing The clients, both domestic and foreign	Kualitas produk dan layanan yang diberikan kepada Konsumen akan berpengaruh terhadap loyalitas mereka dalam menggunakan produk dan layanan tersebut. The quality of products and services provided to consumers will affect their loyalty in using these products and services.
Rekanan Partners	Kontrak dan Perjanjian Kerja Sama, Proses Operasional Contracts and Cooperation Agreements, Operational Processes	Proses pengadaan yang adil dan transparan; Proses evaluasi yang objektif; Hubungan yang harmonis. Fair and transparent procurement process; Objective evaluation process; Harmonious relationship.
Media Massa Mass Media	Media yang menyiarakan informasi tentang perusahaan baik media cetak, media elektronik maupun media sosial, dan media <i>online</i> These are the media that disseminates information about the Company, including print media, electronic and social media, and online media	Kegiatan Perusahaan yang disampaikan oleh media massa, akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan produk-produk Perusahaan. The Company's activities conveyed by the mass media will affect the level of public knowledge and understanding of the Company's products.

STRUKTUR ORGANISASI TJSL

Secara internal Perusahaan, pengelola dan penanggung jawab kegiatan TJSL berada di Divisi Sekretaris Perusahaan dengan dikoordinir oleh Departemen Komunikasi Perusahaan.

CSR ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Internally, Corporate Secretary Division is the manager and person in charge of CSR activities within the Company with the coordination of the Corporate Communications Department.



TARGET DAN RENCANA PROGRAM KERJA TJS^L DI TAHUN 2023

Target TJS^L pada tahun 2023 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan memperkuat penghijauan lingkungan. Dengan menggabungkan upaya dalam kedua bidang ini, Perusahaan berupaya menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi seluruh lapisan Masyarakat DKI Jakarta. Ada pun beberapa aktivitas yang digunakan untuk mewujudkan target tersebut :

1. Kampanye Kesadaran: Perusahaan Mengadakan kampanye internal dan eksternal untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan. Ini bisa melibatkan seminar, workshop, atau kegiatan sosial. Beberapa kegiatan yang dilakukan :
 - a. Komitmen Bersama Penyediaan Fasilitas Pemenuhan Ruang Peningkatan Kapasitas Kelompok Rentan Bersama BPBUMD DKI Jakarta dan Jakpro Group. LRT Jakarta, bersama dengan Jakpro Group, menggelar acara penandatanganan komitmen. Tujuan utama dari komitmen ini adalah untuk memfasilitasi ruang bagi kelompok rentan dalam masyarakat. Berbagai langkah akan diambil untuk memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Kegiatan ini melibatkan : PT LRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Jakarta Oses Energi dan PT Pulo Mas Jaya. Kegiatan ini bertujuan melalui peningkatan fasilitas yang disediakan, diharapkan kelompok rentan dapat mengembangkan potensi dan kapasitas mereka serta dengan memberikan ruang dan dukungan, perusahaan berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Semua pihak berharap bahwa komitmen ini akan membawa dampak positif bagi kelompok rentan serta dengan kerja sama dan sinergi, kita dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan berdaya guna.
 - b. LRT Jakarta melaksanakan kampanye melalui media sosial untuk beberapa peristiwa penting, termasuk *Earth Hour*, *World Ozone Day*, Hari Tongkat Putih Internasional, Hari Anti Kekerasan Perempuan dan Anak, serta Hari Disabilitas Internasional. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan, hak-hak individu, dan inklusi. Melalui platform media sosial, LRT Jakarta mengajak warga Jakarta untuk berpartisipasi, berbagi informasi, dan berkomitmen dalam memperjuangkan perubahan positif bagi lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan.
2. Penanaman Pohon: Perusahaan menginisiasi program penanaman pohon di area sekitar kantor atau bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menghijaukan lingkungan.

CSR WORK PROGRAM TARGETS AND PLANS IN 2023

The Company's TJS^L target for 2023 is to improve social welfare and strengthen environmental greening efforts. By combining efforts in both areas, the Company strives to create a better and more sustainable environment for all layers of people living in DKI. Some of the activities used to achieve this target are:

1. Awareness Campaign: The Company conducts internal and external campaigns to raise awareness about environmental issues. This can involve seminars, workshops, or social activities. Several activities conducted by the Company:
 - a. Joint Commitment to Providing Capacity Improvement Facilities for Vulnerable Groups with BPBUMD DKI Jakarta and Jakpro Group. LRT Jakarta, together with Jakpro Group, held a commitment signing event. The main objective of this commitment is to facilitate space for vulnerable groups in society. Various steps will be taken to provide support to those in need. This activity involves PT LRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Jakarta Oses Energi, and PT Pulo Mas Jaya. Through improving the facilities provided, it is hoped that vulnerable groups can develop their potential and capacity. By providing space and support, the Company contributes to environmental sustainability and social welfare. All parties hope that this commitment will have a positive impact on vulnerable groups and that through cooperation and synergy, an inclusive and useful environment can be created.
 - b. LRT Jakarta conducts campaigns through social media for significant events, including Earth Hour, World Ozone Day, International White Cane Safety Day, International Day for the Elimination of Violence against Women and Children, and International Day of Persons with Disabilities. The campaign aims to raise awareness about environmental issues, individual rights, and inclusion. Through social media platforms, LRT Jakarta invites Jakarta residents to participate, share information, and commit to positive changes for the environment and society as a whole.
2. Tree Planting: The Company initiates tree planting programs in the office area or collaborates with local communities to green the environment.

- a. Gerakan menanam pohon bersama tanggal 29 November 2023 sebagai langkah untuk mengatasi perubahan iklim, pemanasan global, serta polusi udara. Kegiatan ini diselenggarakan bersama Direksi Jakpro Group dan Direksi LRT Jakarta sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Tujuan Gerakan Menanam Pohon Bersama:
- i) Mengurangi Dampak Perubahan Iklim: Pohon-pohon yang ditanam akan menyerap karbon dioksida dari udara, membantu mengurangi efek rumah kaca, dan memperkuat ketahanan lingkungan.
 - ii) Menghadapi Pemanasan Global: Pohon-pohon adalah penyejuk alami. Dengan menanam lebih banyak pohon, kita dapat menciptakan mikro-lingkungan yang lebih sejuk dan nyaman.
 - iii) Melawan Polusi Udara: Daun pohon berperan sebagai filter alami yang menangkap partikel debu dan polutan dari udara. Dengan menanam lebih banyak pohon, kita berkontribusi pada kualitas udara yang lebih baik.

Pohon-pohon ini diharapkan akan tumbuh menjadi hutan kecil yang memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Mereka akan menjadi tempat berteduh bagi burung-burung, tempat bermain bagi anak-anak, dan penyejuk bagi kota yang semakin padat .



- a. One of the initiatives is a joint tree planting movement on November 29, 2023, to address climate change, global warming, and air pollution. The activity was organized with the Board of Directors of Jakpro Group and LRT Jakarta as a commitment of the Company to manage resources sustainably. The objectives of the Joint Tree Planting Movement are as follows:
- i) Reducing the Impact of Climate Change: The trees planted will absorb carbon dioxide from the air, helping to reduce greenhouse gas emissions and strengthen environmental resilience.
- ii) Addressing Global Warming: Trees act as natural coolers. By planting more trees, we can create a cooler and more comfortable micro-environment.
- iii) Combating Air Pollution: Tree leaves serve as natural filters that trap dust particles and pollutants from the air. By planting more trees, we contribute to better air quality.

These trees are expected to grow into a small forest that benefits all living beings. They will provide shelter for birds, playgrounds for children, and cooling for the increasingly dense city.



3. LRT Jakarta aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosial sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dalam upaya untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, LRT Jakarta secara konsisten mengadakan program-program yang melibatkan partisipasi warga Jakarta. Program tersebut antara lain : pemberian paket sembako kepada anak yatim dan dhu'a/fa, bantuan renovasi masjid, pembagian daging qurban, serta bantuan terhadap korban bencana. Selain program yang diinisiasi oleh internal, Perusahaan juga kerap berkolaborasi dengan instansi terkait Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup) untuk menjalankan berbagai kegiatan sosial seperti : program mudik gratis Angkutan lebaran dan uji emisi kendaraan.

3. LRT Jakarta actively conducts various social activities as part of its Social and Environmental Responsibility (CSR). In efforts to contribute to sustainable development and community welfare, LRT Jakarta consistently organizes programs involving the participation of Jakarta residents. These programs include providing food packages for orphans and the less fortunate, mosque renovation assistance, distribution of sacrificial meat, and aid for disaster victims. In addition to internally initiated programs, the Company often collaborates with relevant agencies of the DKI Jakarta Provincial Government (Transportation Agency and Environmental Agency) to carry out various social activities such as free transportation programs during Eid al-Fitr and vehicle emission testing.

PEMBIAYAAN DAN ANGGARAN PROGRAM TJS'L PERUSAHAAN

THE COMPANY'S TJS'L PROGRAM FINANCING AND BUDGETING

No	Aspek Aspects	2023 (Rp) (IDR)
1	Sosial Social	358.334.850
2	Ekonomi Economy	-
3	Lingkungan Environment	27.756.500
Jumlah Total		386.091.350



Tanggung Jawab Sosial Terkait Operasi Yang Adil

Social Responsibility Related to Fair Operations

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perusahaan berkomitmen untuk terus menerapkan praktik-praktik operasi yang adil sebagai sikap profesional guna menjalankan kegiatan usahanya dalam menghasilkan produk dan jasa, serta menjunjung tinggi integritas dalam melaksanakan bisnis. Selain itu, perusahaan memiliki kesadaran untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, menghargai hak cipta dan sadar untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, Perusahaan berupaya menerapkan praktik operasi yang adil sesuai dengan landasan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal, serta berbagai standar baku yang berlaku baik nasional maupun internasional.

Selain itu, Perusahaan juga mengembangkan berbagai kebijakan dalam mendukung berbagai aspek sebagaimana tertuang dalam peraturan perusahaan, *code of conduct*, maupun dokumen-dokumen lainnya. Untuk itu, Perusahaan membangun *whistleblowing systems* untuk memudahkan pengaduan bila terjadi pelanggaran. Kebijakan dan pedoman tersebut khususnya ditujukan untuk pencegahan benturan kepentingan dan pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat dan adil. Perusahaan menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menerapkan kegiatan operasional dengan memperhatikan hak para pemangku kepentingan sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan mewujudkan keseimbangan atas kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* seperti yang telah disampaikan dalam keseluruhan bagian Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam laporan tahunan ini akan memperkuat aspek fundamental Perusahaan yang akan berimbas pada nilai positif bagi keberlanjutan Perusahaan. Wujud kegiatan operasional yang adil yaitu praktik bebas dari korupsi dan suap, netralitas dalam isu-isu politik, menghormati kekayaan intelektual, berkompetisi dengan adil serta patuh pada hukum dan regulasi yang berlaku.

COMMITMENT AND POLICY

The Company is committed to continue implementing fair operating practices as a professional attitude to carry out its business activities in producing products and services, and upholding integrity in conducting business. Furthermore, the Company has an awareness of creating a fair business competition climate, respecting copyrights, and being aware of complying with applicable laws and regulations. Hence, the Company strives to implement fair operating practices. The foundation of this practice is the prevailing laws and regulations, internal policies, as well as various standards that are applied both nationally and internationally.

In addition, the Company has developed various policies that support various aspects as stated in Company regulations, code of conduct, and other documents. Thus, the Company has built a whistleblowing system to facilitate complaints in the event of a violation. These policies and guidelines are specifically aimed at preventing conflicts of interest and implementing sound and fair business activities. The Company guarantees that every interested party obtains fair treatment in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. The Company implements operational activities by considering the rights of stakeholders so as to create harmonious relationships and create a balance for the interests of all stakeholders.

In the meantime, the implementation of Good Corporate Governance principles, as stated in all sections of Good Corporate Governance in this annual report, will strengthen the fundamental aspects of the Company which will impact on positive values for the sustainability of the Company. The manifestations of fair operating activities are practices free from corruption and bribery, neutrality in political issues, respecting intellectual property, competing fairly, and complying with applicable laws and regulations.

LINGKUP PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Perusahaan senantiasa melakukan pemetaan terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan atas isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkaitan dengan prinsip operasi yang adil. Perusahaan meyakini pelaksanaan program TJSR terkait operasi yang adil ini sangat bergantung kepada tingkah laku dan tindakan yang dilakukan oleh seluruh karyawan LRT Jakarta. Perusahaan juga telah mengatur segala sikap dan perilaku yang dilakukan oleh seluruh pegawai tanpa terkecuali, di mana hal tersebut tercantum pada sebuah kebijakan kode etik Perusahaan sebagai salah satu cara LRTJ untuk meminimalisir terjadinya praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip operasi yang adil.

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP DAMPAK TANGGUNG JAWAB ATAS OPERASI YANG ADIL

Operasi yang adil terutama menekankan pada pentingnya pengelolaan Perusahaan yang transparan, wajar, dan setara. Pemenuhan aspek operasi yang adil melibatkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, meliputi:

1. Pemegang saham dan kepentingannya terhadap pengelolaan Perusahaan yang transparan dan akuntabel;
2. Karyawan yang berkepentingan terhadap Prosedur Tetap yang wajar, adil, dan dengan mekanisme kerja yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mitra kerja dan pemasok yang memiliki kepentingan terhadap proses kemitraan yang bersandar pada transparansi dan keadilan;
4. Konsumen dan pengguna akhir dengan kepentingan atas kualitas produk yang dapat dipertanggungjawabkan, serta terbukanya jalur keluhan;
5. Regulator yang memiliki kepentingan atas industri yang stabil

PERENCANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ASPEK OPERASI YANG ADIL

Dalam perencanaan tahunannya, Perusahaan senantiasa menargetkan serta menjamin terlaksananya semua kebijakan praktik operasi yang adil. Sasaran dan target serta rencana penerapan tanggung jawab atas operasi yang adil ditekankan pada penerapan Tata Kelola Perusahaan yang bersandar pada 2 (dua) tujuan utama, yaitu pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta pelibatan pemangku kepentingan untuk dapat tumbuh bersama. Selain itu, Perusahaan juga berupaya untuk terus meningkatkan penerapan GCG pada ke dua aspek tersebut, dengan harapan mampu menciptakan operasi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

SCOPE OF FORMULATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATIONS

The Company consistently conducts mapping of the possible impacts of social, economic, and environmental issues related to the principle of fair operations. The Company believes that the implementation of the TJSR program related to fair operations is highly dependent on the behavior and actions taken by all employees of LRT Jakarta. The Company has regulated all attitudes and behaviors performed by all employees without exception, in which this is stated in a policy of the Company's code of conduct as one of LRTJ's ways to minimize the occurrence of practices that are contrary to fair operating principles.

STAKEHOLDERS AND SCOPE OF IMPACT OF SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO FAIR OPERATIONS

Fair operations especially emphasize the importance of transparent, fair, and equal management of the Company. Fulfillment of fair operations aspects involves the interests of various stakeholders, including:

1. Shareholders and their interests in transparent and accountable management of the Company;
2. Employees who have an interest in Standard Procedures that are reasonable, fair, and with an accountable work mechanism;
3. Partners and suppliers who have an interest in the partnership process that relies on transparency and fairness;
4. Consumers and end users with an interest in product quality that can be accounted for, as well as an open complaint line;
5. Regulators who have an interest in a stable industry

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PLANNING FOR FAIR OPERATIONS ASPECT

In its annual planning, the Company always aims to ensure the implementation of all fair operating practice policies. The goals and targets as well as the plan for implementing responsibility for fair operations are emphasized on the implementation of Corporate Governance which relies on 2 (two) main objectives, namely compliance with applicable laws and regulations, as well as involving stakeholders to grow together. In addition, The Company also strives to continuously improve GCG implementation in these two aspects, with the hope of being able to create fair and accountable operations.

PENERAPAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA ASPEK OPERASI YANG ADIL

Tata Kelola Organisasi yang dimiliki Perusahaan telah menyesuaikan dengan iklim dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengawasan dan pengelolaan Perusahaan dijalankan dengan kelengkapan organ pendukung yang dapat memberikan kinerja yang optimal. Selain itu, Perusahaan juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan strategis bagi kinerja keberlanjutan Perusahaan. Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kode Etik, hingga prosedur dan kebijakan Perusahaan lainnya disusun untuk menciptakan operasi yang adil dalam praktik operasi dan bisnis LRT Jakarta. Perusahaan berharap, penerapan GCG yang dilakukan akan terus memperkuat kinerja LRT Jakarta dan melindungi seluruh insan Perusahaan dari kemungkinan praktik pengelolaan bisnis yang tidak sehat.

Perusahaan menjamin perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, segenap insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah. Segenap insan Perusahaan dan keluarganya juga dilarang menerima gratifikasi dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dari mitra usaha dan pihak lainnya yang akan mempengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan tugasnya di Perusahaan.

PROSEDUR DAN MECHANISME PENANGANAN KONFLIK TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Perusahaan membuka sarana penyampaian saran dan pendapat atau pengaduan yang disajikan secara terbuka bagi para pemangku kepentingan. Hal itu untuk menjamin terlaksananya kebijakan dengan baik dan meminimalisasi konflik yang terjadi terkait kegiatan operasi yang adil. Adapun setiap keluhan maupun pengaduan yang diterima, akan ditindaklanjuti secara independen dan rahasia oleh fungsi-fungsi terkait. Selain itu, identitas pelapor juga dijamin kerahasiaannya, sehingga mekanisme ini aman bagi para pelapor. Pelaporan yang masuk akan ditelusuri fakta material yang terjadi. Apabila terdapat pelanggaran, maka Perusahaan akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES ON FAIR OPERATION ASPECTS

The Company's Organizational Governance has adapted to the climate and the applicable rules and regulations. The duties and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors in supervising and managing the Company are conducted with its supporting organs to provide optimal performance. Furthermore, the Company also holds a General Meeting of Shareholders (GMS) as a forum for shareholders to make strategic decisions for the Company's sustainability performance. The Articles of Association, Guidelines for Good Corporate Governance, Code of Conduct, and other Company procedures and policies are structured to create fair operations in LRT Jakarta operational and business practices. The Company hopes that the implementation of GCG will continue to strengthen the performance of the LRT Jakarta and protect all Company personnel from possible unhealthy business management practices.

The Company guarantees fair and equal treatment in fulfilling the rights of stakeholders based on prevailing laws and regulations. Additionally, with referring to laws and regulations, all the Company's personnel are prohibited from taking actions that have a conflict of interest, and taking personal advantage, either directly or indirectly from the Company's decision-making and activities other than valid income. All the Company's personnel and their families are also prohibited from receiving gratuities in any form, either directly or indirectly, from business partners and other parties that will affect the independence and objectivity of carrying out their duties at the Company.

PROCEDURES AND MECHANISMS FOR HANDLING CONFLICTS RELATED TO FAIR OPERATIONS

The Company provides a means of submitting suggestions and opinions or complaints that are presented openly to stakeholders. This is to ensure the implementation of policies properly and minimize conflicts that occur related to fair operations. As for any complaints or grievances received, they will be followed up independently and confidentially by the relevant functions. The identity of the whistleblower is guaranteed confidentiality, making this mechanism safe for the reporter. Incoming reports will be traced to the material facts that occurred. If there is a violation, the Company will impose sanctions according to the level of the violation committed.

PENCAPAIAN DAN PENGHARGAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT OPERASI YANG ADIL

Perusahaan berkomitmen dalam menerapkan tanggung jawab sosial terkait praktik operasi yang adil sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para *stakeholders*. Di tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki kasus indikasi korupsi dan suap yang dihadapi oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun karyawan Perusahaan. Segenap insan Perusahaan juga tercatat tidak berpartisipasi aktif, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada partai politik. Hal ini dipengaruhi oleh penerapan *Code of Conduct* dan prinsip-prinsip GCG yang telah diterapkan dengan baik, serta partisipasi pemangku kepentingan yang turut mendukung penerapan program tanggung jawab sosial terhadap operasi yang adil.

Selain itu, atas pelaksanaan bisnis Perusahaan yang terarah dan bertujuan luhur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Perusahaan juga memberikan dampak positif atas operasi yang telah dilakukan dalam bentuk nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan. Bentuk penghargaan yang diberikan Perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, dibuktikan dengan ketiaatan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban terhadap negara berupa pajak dari nilai ekonomi yang dihasilkan. Perusahaan juga mendistribusikannya langsung kepada lingkungan dan masyarakat dalam bentuk kegiatan dan bantuan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar khususnya di sekitar proyek operasi Perusahaan, yang diberikan secara adil dan sesuai kebutuhan.

ACHIEVEMENTS AND AWARDS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES RELATED TO FAIR OPERATIONS

The Company is committed to implementing social responsibility related to fair operating practices to increase the trust of its stakeholders. In 2023, the Company was not involved in any cases of indications of corruption and bribery faced by members of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as Company employees. All the Company's personnel were also recorded as not actively participating, either directly or indirectly, in political parties. This has led to the proper implementation of the Code of Conduct and GCG principles, as well as the participation of stakeholders supporting the implementation of social responsibility programs related to fair operations.

Furthermore, for the implementation of the Company's business which is directed and has a noble aim to improve the welfare of the community, the Company also has a positive impact on the operations which is conducted in the form of economic value generated and distributed. The form of appreciation given by the Company to stakeholders is evidenced by the Company's obedience in fulfilling obligations to the state in the form of taxes from the economic value generated. The Company also distributes it directly to the environment and the community in the form of activities and assistance to the community and the surrounding environment, especially around the Company's operational projects, which are given fairly and as required.

Dukungan Kegiatan Ramadhan Yayasan El-Fawaz
El-Fawaz Foundation Ramadhan Activity Support



Tanggung Jawab Sosial Terkait Hak Asasi manusia

Social Responsibility Related to Human Rights

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perusahaan senantiasa menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berkarya dan bekerja. Perusahaan berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi segala ketentuan hukum serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan HAM. Perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu hal penting yang terus dijunjung tinggi dan telah menjadi tanggung jawab Perusahaan dalam setiap kegiatan yang dilakukan baik kegiatan usahanya maupun hubungan dengan karyawannya. Dengan demikian, penegakan HAM menjadi komitmen penting bagi Perusahaan, hal itu dilakukan untuk mencegah tindakan diskriminasi, kebebasan berserikat, pengaturan waktu kerja, izin karena kondisi darurat, dan kesempatan untuk menjalankan ibadah. Selain itu, Perusahaan juga telah memiliki fasilitas ruang laktasi, dan sarana penanganan keluh kesah pegawai.

LINGKUP PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL TERKAIT HAM

Internal Perusahaan telah menitikberatkan pada tanggung jawab sosial terkait HAM dan aspek ketenagakerjaan, yakni dengan menjaga hubungan industrial para karyawannya agar senantiasa mendapatkan keadilan dan jaminan kesehatan. Sedangkan, ruang lingkup HAM di dalam Perusahaan, karyawan akan mendapatkan jaminan perlakuan dengan tidak adanya tindakan diskriminasi, pengakuan dan jaminan bagi karyawan, hak pemberian waktu kerja, cuti tahunan, izin istirahat jika melahirkan/keguguran atau sakit karena haid, izin menjalankan ibadah maupun izin meninggalkan pekerjaan.

ISU DAN RISIKO TERKAIT HAM YANG RELEVAN DENGAN PERUSAHAAN

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, isu HAM menitikberatkan pada 2 (dua) elemen penting, yakni terkait etika bisnis dan etika kerja di lingkup LRT Jakarta. Perusahaan menyadari bahwa dalam pelaksanaan operasionalnya juga banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Beberapa isu HAM yang relevan dengan Perusahaan antara lain pembebasan lahan, kebisingan dan gangguan saat pelaksanaan proyek pembangunan. Selain itu, juga terdapat isu-isu HAM yang relevan dan berkaitan langsung dengan Perusahaan adalah pada bidang ketenagakerjaan.

COMMITMENT AND POLICY

The Company always upholds Human Rights (HAM) in various aspects of life, including in production and work. The Company is committed to respecting, protecting, and fulfilling all legal provisions and principles related to human rights. Protection of human rights is one of the important things that continues to be upheld and has become the Company's responsibility in every activity carried out both in its business activities and relationships with its employees. Hence, upholding human rights is an important commitment for LRT, which is formulated in the prevention of acts of discrimination, freedom of association, regulation of working hours, emergency conditions permit, and opportunities to practice worship. In addition, the Company also provides lactation room facilities and facilities for handling employee complaints.

SCOPE OF FORMULATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO HUMAN RIGHTS

Internally, the Company has focused on social responsibility related to human rights and labor aspects, by maintaining industrial relations with its employees to provide fairness and health insurance. Meanwhile, within the scope of human rights in the Company, employees will receive assurance of treatment without discrimination, recognition and guarantees for employees, rights regarding working hours, annual leave, permission for maternity/miscarriage leave or sick leave due to menstruation, permission for religious practices, and permission to leave work.

RELEVANT HUMAN RIGHTS-RELATED ISSUES AND RISKS TO THE COMPANY

As a company engaged in the transportation sector, human rights issues focus on 2 (two) important elements, namely business ethics and work ethics within the scope of the LRT Jakarta. The Company realizes that in carrying out its operations, it also has a lot of direct contact with the community. Several human rights issues that are relevant to the Company include land acquisition, as well as noise and disturbances during the implementation of development projects. Apart from that, there are also human rights issues that are relevant and directly related to the Company, namely in the field of employment.

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP DAMPAK TANGGUNG JAWAB SOSIAL HAK ASASI MANUSIA

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar bagi setiap individu sehingga seluruh pemangku kepentingan terdefinisikan dalam lingkup ini. Secara spesifik, Perusahaan menekankan TJSL di bidang HAM kepada karyawan, pemasok, distributor, konsumen dan pengguna akhir, serta masyarakat di sekitar lokasi usaha atau proyek, sebagai pemangku kepentingan yang memiliki dampak langsung terkait pemenuhan HAM dari kegiatan operasi dan bisnis yang dilakukan LRT Jakarta.

PROSEDUR DAN MEKANISME PENANGANAN KONFLIK TERKAIT HAK ASASI MANUSIA

Perusahaan menjamin kebijakan yang diterapkan dapat terlaksana dengan baik dan meminimalisir konflik yang terjadi terkait HAM. Dengan demikian, Perusahaan mempersilahkan kepada para pemangku kepentingan untuk menyampaikan aduan permasalahan terkait HAM. Setiap keluhan maupun pengaduan yang sampai akan ditindaklanjuti sesuai hukum dan peraturan yang berlaku secara umum, maupun prosedur dan peraturan yang berlaku di lingkup Perusahaan.

PENCAPAIAN DAN PENGHARGAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG HAK ASASI MANUSIA

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan belum mendapatkan penghargaan terkait tanggung jawab sosial di bidang hak asasi manusia. Meski demikian, di tahun 2023 Perusahaan tidak mendapati adanya pengaduan terkait pelanggaran hak asasi manusia, seperti pengaduan tindakan diskriminasi, insiden pelanggaran HAM, pengaduan terkait kebebasan berserikat di lingkungan Perusahaan, serta insiden kerja paksa yang dialami karyawan.

Perusahaan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu manajemen dan kualitas karyawan sehingga seluruh pihak dapat bekerja secara efisien dan efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh Insan Perusahaan. Inisiatif tanggung jawab sosial bidang hak asasi manusia juga ditunjukkan oleh karyawan berupa peningkatan loyalitas, produktivitas dan efektivitas karyawan dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan dalam membentuk citra positif Perusahaan untuk kesejahteraan bersama. Perusahaan juga menghormati hak-hak konsumen dan lingkungan masyarakat, serta membuka layanan konsumen dan masyarakat, dengan sigap menindaklanjuti setiap keluhan konsumen atau masyarakat tanpa melakukan diskriminasi terhadap konsumen dan masyarakat.

STAKEHOLDERS AND SCOPE OF IMPACT OF SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO HUMAN RIGHTS

Human rights are fundamental rights for every individual. So, all stakeholders are included in this scope. Specifically, LRT Jakarta emphasizes TJSL in the field of human rights to employees, suppliers, distributors, consumers and end users, as well as communities around business or project locations, as stakeholders who have a direct impact on the fulfillment of human rights from operations and business activities carried out by LRT Jakarta.

PROCEDURES AND MECHANISMS FOR HANDLING CONFLICTS RELATED TO HUMAN RIGHTS

The Company ensures that the policies implemented can be implemented properly and minimizes human rights-related conflicts that may occur. Therefore, the Company invites stakeholders to submit complaints related to human rights. Every complaint or grievance that is received will be followed up in accordance with laws and regulations that apply in general, as well as procedures and regulations that apply within the scope of the Company.

ACHIEVEMENTS AND AWARDS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES RELATED TO HUMAN RIGHTS

Throughout 2023, the Company has yet to receive an award related to social responsibility in the field of human rights. However, in 2023 the Company did not find any complaints related to violations of human rights, such as complaints of acts of discrimination, incidents of human rights violations, complaints regarding freedom of association within the Company, as well as incidents of forced labor experienced by employees.

The Company is also committed to continuously improving the quality of management and employee quality, so that all parties can work efficiently and effectively, and provide benefits to all Company personnel. Social responsibility initiatives in the field of human rights were also shown by employees in the form of increasing employee loyalty, productivity, and effectiveness, to improve the Company's performance in establishing a positive image of the Company for common prosperity. The Company also respects the rights of consumers and the community environment, as well as opens consumer and community services to respect consumer rights and the community's environment. The Company rapidly follows up any consumer or public complaints without discriminating against consumers and the public.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

CORPORATE RESPONSIBILITY GOVERNANCE IN THE ENVIRONMENTAL SECTOR

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

LRT Jakarta menyadari lingkungan hidup merupakan salah satu indikator penting atas pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang terus digencarkan oleh Perusahaan. Dengan demikian, perusahaan terus berupaya memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional. Selain itu, Perusahaan juga berupaya untuk menjaga pencemaran lingkungan dan melestarikan lingkungan dalam setiap kegiatan operasional.

Perusahaan senantiasa mengevaluasi kebijakan terkait pelestarian lingkungan yang dimiliki oleh Perusahaan melalui identifikasi, kontrol, dan menghindari atau meminimalisir penggunaan bahan atau alat-alat yang dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan dalam seluruh kegiatan operasional Perusahaan, serta memperbarui dan meningkatkan sistem manajemen lingkungan yang diterapkan oleh Perusahaan untuk meningkatkan nilai sekaligus menjadi bukti nyata Perusahaan dalam mendukung dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

DAMPAK DAN RISIKO LINGKUNGAN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN BESERTA PENGELOLAANNYA

Perusahaan berkomitmen mewujudkan lingkungan yang baik terhadap pengelolaan lingkungan sebagai upaya Perusahaan dalam rangka melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan semua aspek yang timbul dalam proses usaha. Sehingga perusahaan dapat meminimalisir dampak negatif apabila terjadi terhadap karyawan dan lingkungan sekitar.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN

Dalam kegiatan bisnisnya, Perusahaan terus berupaya memperhatikan aspek lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

COMMITMENT AND POLICY

LRT Jakarta realizes that the environment is an important indicator of the implementation of sustainable development which the Company continues to intensify. Thus, the Company strives to consider the environmental balance by prioritizing the principle of prudence in carrying out business and operational activities. In addition, the Company also strives to prevent environmental pollution and preserve the environment in every operational activity.

The Company continuously evaluates its environmental conservation policy through identification, control, and avoiding or minimizing the use of materials or tools that can generate a negative impact on the environment in all of the Company's operational activities, as well as updating and improving the environmental management system that is implemented to increase the value which is owned, as well as being a real evidence of LRT Jakarta's commitment to supporting and realizing sustainable development.

ENVIRONMENTAL IMPACTS AND RISKS RELATED TO THE COMPANY'S BUSINESS ACTIVITIES AND THEIR MANAGEMENT

The Company is committed to managing the environment well. Management of the environment, in this case, is all the efforts made by the Company in performing the planning, implementation, and supervision of all aspects that arise in the Company's business processes to minimize the negative impacts that may arise on employees and the surrounding environment.

PROGRAMS AND ACTIVITIES RELATED TO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TOWARDS THE ENVIRONMENT

In its business activities, the Company always strives to pay attention to environmental aspects through various activities as follows:

Pelestarian Lingkungan Hayati

Untuk menjaga ekosistem alam, mendukung ketersediaannya sarana kebersihan, dan memberdayakan kebiasaan menanam pohon untuk keberlangsungan penghijauan, Perusahaan melakukan kegiatan penanaman pohon dan penyediaan peralatan angkut sampah yang dilaksanakan di setiap area operasi Perusahaan. Guna membentuk lingkungan hidup yang harmonis antara kegiatan operasional dan kebutuhan akan lingkungan alam, Perusahaan menata taman sekitaran kantor operasional. Selain digunakan untuk menciptakan suasana yang asri, taman ini dapat berfungsi sebagai area resapan air, sekaligus untuk menjaga kualitas udara agar dapat selalu terjaga dalam kondisi baik.

Komitmen Perusahaan terkait pelestarian lingkungan diimplementasikan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penghijauan

Perusahaan melakukan penghijauan di area internal (Kantor dan Kawasan Depo) dengan melakukan penanaman tumbuhan ruwilia, vidilia, pucuk merah, sablo merah, patah Tulung, srigading, anjuang, pandan Bali, ubi singapur, ketapang mini, mega mendung, bakung, soka, kamboja dan bintaro dengan total tanaman lebih kurang sebanyak 35.000 tanaman.

2. Pengelolaan RKL/RPL

Dalam rangka menjaga dan memelihara kualitas lingkungan operasional dan perawatan LRT Jakarta, Perusahaan telah melaksanakan program Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) pada jalan tol beroperasi sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

3. Pengelolaan Limbah

Pengolahan limbah diatur melalui Surat Tugas Pelaksana Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3 dari Kegiatan Operasional LRT Jakarta Nomor 015/UT0000/118/X/2019 bahwa pengelolaan limbah meliputi limbah domestik dan limbah B3. Pengelolaan Limbah Domestik; berasal dalam lokasi Depo LRT Pegangsaan Dua (mulai dari Gedung MCC, kantor JakPro, kantin, kantor kontraktor dan timbunan sampah lainnya di dalam gedung) dan seluruh stasiun yang beroperasi diserahkan Pengelolaannya kepada PT. LRT Jakarta. Pengelolaan Limbah B3; berasal dari hasil kegiatan operasional baik di Stasiun maupun di lingkungan Depo LRT Jakarta yang selanjutnya dikelola oleh vendor yang memiliki lembar kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

4. Efisiensi dan Konservasi Air

Kegiatan operasional dan perawatan LRT Jakarta tidak terlepas dari penggunaan air sebagai kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan air tersebut, diperoleh dari PDAM. Intensitas penggunaan air baik untuk keperluan domestik maupun operasional perawatan di perusahaan haruslah dilakukan dengan efektif dan efisien. Jika

Conservation of the Living Environment

To maintain natural ecosystems, support the availability of cleaning facilities, and empower the habit of planting trees for sustainable reforestation, the Company carries out tree planting activities and provides waste transportation equipment which is carried out in each of the Company's operating areas. In order to create a harmonious living environment between operational activities and the need for the natural environment, the Company creates gardens around the operational offices. Besides being used to create a beautiful atmosphere, this park can function as a water containment area, as well as to maintain air quality so that it can always be maintained in good condition.

The Company's commitment to environmental preservation is implemented through the following activities:

1. Greening Activity

The Company carries out greening activity in the internal area (office and Depot area) by planting ruwilia, vidilia, red shoots, red sablo, broken Tulung, srigading, anjuang, Balinese pandan, singapur yam, mini ketapang, megamendung, daffodils, soka, cambodia and bintaro, with total of approximately 35,000 plants.

2. Management of RKL/RPL

In order to maintain and preserve the quality of the operational environment and maintenance of the LRT Jakarta, the Company has implemented an Environmental Monitoring Plan (RPL) and Environmental Management Plan (RKL) program in the toll road operation, in accordance with Decree of the Minister of Environment No. 45 of 2005 concerning Guidelines for Compiling Reports on the Implementation of Environmental Monitoring Plans (RPL) and Environmental Management Plans (RKL), as well as Government Regulation No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits.

3. Waste Management

Waste Management is regulated through the Letter of Assignment for Implementing Domestic Waste and Hazardous and Toxic Waste (B3) Management from LRT Jakarta Operational Activities No. 015/UT0000/118/X/2019, which states that waste management includes domestic waste and B3 waste. Domestic Waste Management; originates from the location of the Pegangsaan Dua LRT Depot (starting from the MCC Building, JakPro office, canteen, contractor offices and other waste generated in the building), and all operating stations are handed over to PT. LRT Jakarta. Hazardous waste management originates from the results of operational activities both at the station and within the Jakarta LRT Depot, are then managed by vendors who have cooperation sheets in accordance with laws and regulations.

4. Water Efficiency and Conservation

The operational and maintenance activities of the LRT Jakarta are inseparable from the use of water as a necessity. Fulfillment of the Company water needs is obtained from PDAM. The intensity of water usage for both domestic needs and maintenance operations at the Company must be carried out effectively and efficiently.

tidak, akan menimbulkan kesulitan dalam menangani air limbah yang berakibat pada menurunnya kualitas dan kuantitas air bersih. Dengan adanya isu lingkungan tersebut, perusahaan melakukan pengelolaan air yang baik dengan membuat program efisiensi air.

5. Upaya Mitigasi Emisi Karbon

Upaya mitigasi emisi karbon dilakukan dengan penghematan energi listrik. Perusahaan berupaya menerapkan budaya hemat energi dengan memasang himbauan hemat listrik dan penggunaan lampu hemat energi di setiap ruangan kantor.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan lingkungan, Perusahaan memiliki program-program pengelolaan lingkungan seperti:

- a. Penanaman pohon di lingkungan Depo.
- b. Penyediaan tempat sampah yang dibedakan yang organik dan non organik.
- c. Melakukan pengukuran dan pemantauan lingkungan melalui RKL dan RPL.

6. Pengelolaan Limbah

Perusahaan memiliki kebijakan dalam proses dan prosedur pengolahan limbah yang ramah lingkungan, baik limbah padat maupun cair. Kegiatan pengelolaan limbah padat mencakup pemilihan dan pengelolaan limbah biasa dengan bahan berbahaya dan beracun (B3), serta pengelolaan tempat pembuangan sampah sementara.

a. Pengelolaan Limbah Padat

Limbah Domestik dikelola oleh Dinas Lingkungan setempat dengan dokumen pengangkutan dan pembayaran retribusi daerah secara resmi dibayarkan dikelola oleh Perusahaan. Untuk limbah domestik non LB3 yang masih dapat digunakan seperti hasil pekerjaan bubut yang masih bernilai ekonomis dikelola oleh vendor yang memiliki Izin Usaha/ Izin Lingkungan untuk pengelolaan limbah domestik ekonomis tersebut.

b. Pengelolaan Limbah B3

Limbah B3 (minyak pelumas, gemuk bekas, cairan accu/ asam sulfat, solar kadaluarsa, oli bekas, tiner bekas, bahan pembersih dan solvent, bahan penghilang cat dan vernis) hasil kegiatan operasional LRT Jakarta dikelola (pengangkutan, penyimpanan, pemanfaatan, pengolahan sampai kepada penimbunan) oleh vendor yang memiliki MoU kerja sama dengan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

c. Pengelolaan Limbah Cair

Limbah Cair hasil kegiatan operasional LRT Jakarta berasal dari toilet, kloset dan bak cuci piring serta kegiatan pencucian kereta. Penanganan limbah cair tersebut dilakukan oleh pengelola gedung dan fasilitas Sarana Prasarana LRT Jakarta

If not, it will cause difficulties in handling wastewater which results in a decrease in the quality and quantity of clean water. Given these environmental issues, the Company is implementing good water management by establishing a water efficiency program.

5. Carbon Emission Mitigation Efforts

The effort to mitigate carbon emissions is carried out by saving electricity. The Company seeks to implement an energy-saving culture by installing electricity-saving appeals and using energy-saving lamps in every office room.

In order to optimize the implementation of environmental management programs and activities, the Company has environmental management programs such as:

- a. Planting trees in the area surrounding of the Depot.
- b. Provision of separate waste bins that are organic and non-organic.
- c. Conduct environmental measurement and monitoring through RKL and RPL.

6. Waste Management

The Company has a policy on processes and procedures for treating environmentally friendly waste, for both solid and liquid waste. Solid waste management activities include the selection and management of ordinary waste with hazardous and toxic materials (B3), as well as the management of temporary landfills.

a. Solid Waste Management

Domestic Waste is managed by the local Environmental Service with documents for transportation and payment of regional retribution officially paid managed by the Company. For non-hazardous and toxic domestic waste that can still be used, such as the results of lathe, which still have economic value, it is managed by vendors who have a Business Permit/Environmental Permit for the management of this economical domestic waste.

b. Hazardous and Toxic Waste Management

Hazardous and toxic waste (such as lubricating oil, used grease, accu liquid/sulfuric acid, expired diesel fuel, used oil, used thinner, cleaning agents and solvents, paint remover and varnish) resulting from LRT Jakarta operations are managed (in terms of transportation, storage, utilization, processing and hoarding process) by vendors who have a cooperation MoU with the Company in accordance with statutory provisions.

c. Liquid Waste Management

Liquid waste resulting from the operational activities of the LRT Jakarta comes from toilets and sinks, as well as from train washing activities. The handling of the liquid waste is carried out by the building management and facilities of the LRT Jakarta Infrastructure

7. Program Green Office

Program TJSL di bidang lingkungan hidup dilaksanakan melalui Program *Green Office*, yaitu dengan menerapkan berbagai penghematan, antara lain dengan melakukan berbagai program dan kebijakan terkait kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Perusahaan melakukan kegiatan operasional dengan memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, seperti penghematan penggunaan energi listrik, air, kertas, dan hal-hal lain terkait dengan sumber daya alam. Program tersebut terbukti dapat memberikan manfaat nyata seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi, dan juga peningkatan citra Perusahaan.

8. Pengelolaan penggunaan Material dan Energi

Salah satu komitmen menjaga lingkungan hidup diwujudkan Perusahaan melalui kebijakan penggunaan energi yang efektif dan efisien. Selain berimbang pada penggunaan energi yang tepat guna, kebijakan ini terbukti dapat mengurangi beban biaya operasional Perusahaan. Material dan energi yang kerap digunakan dalam operasional Perusahaan adalah air, kertas maupun bentuk alat tulis kantor (ATK) lainnya, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM).

Perusahaan memiliki kebijakan terkait penggunaan material dan energi pada kegiatan operasional agar digunakan secara efisien serta berorientasi pada meminimalisir dampak lingkungan. Perusahaan berkomitmen melaksanakan efisiensi terkait material dan energi yang digunakan dalam operasional Perusahaan melalui penerapan sejumlah program. Perusahaan mengimbau agar seluruh insan Perusahaan menggunakan kertas kembali pada sisi yang kosong, dan menggunakan air bersih secukupnya, serta mematikan semua listrik apabila tidak digunakan atau selesai bekerja, juga menggunakan BBM sesuai dengan kebutuhan.

Penghematan penggunaan kertas terus diupayakan oleh Perusahaan, yaitu melalui dukungan Teknologi Informasi. Untuk volume penggunaan material kertas dalam kegiatan operasional dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Perbandingan Konsumsi Kertas Tahun 2022-2023
Comparison of Paper Consumption in 2022-2023

Uraian Description	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease (%)
Volume (Rim)	308	348	-11,49%
Nilai (Rp) Value (in IDR)	14.712.500	13.777.311	6,78%

Keberadaan air bersih yang terus menurun setiap tahunnya membuat Perusahaan berupaya untuk menjaga persediaan air bersih. Untuk menjaga persediaan air bersih dalam kegiatan operasional sehari-hari, Perusahaan melakukan sosialisasi penghematan

7. Green Office Program

CSR program in the environmental field is conducted through the Green Office Program, namely by implementing various efficiency efforts, including implementing various programs and policies related to concern for environmental sustainability. The Company carries out operational activities by paying attention to the wise use of natural resources, such as reducing the use of electricity, water, paper, and other matters related to natural resources. The program is proven to provide tangible benefits such as reduced operational costs, increased efficiency, and enhanced the Company's image.

8. Management of Material and Energy Use

One of the commitments to protect the environment is realized by the Company through an effective and efficient energy use policy. Apart from having an impact on the proper use of energy, this policy is proven to be able to reduce the burden on the Company's operational costs. Materials and energy that are often used in the Company's operations are water, paper and other forms of office stationery (ATK), electricity, and fuel oil (BBM).

The Company has policies related to the use of materials and energy in operational activities so that they are used efficiently and oriented towards minimizing environmental impacts. The Company is committed to implementing efficiencies related to materials and energy used in the Company's operations through the implementation of several programs. The Company urges all Company personnel to re-use paper, and consume enough clean water, and turn off all electricity when they are not in use, or after work. The Company also encourage the use of fuel based on necessity.

The Company continues to make efforts to make efficient on paper use, namely through the support of Information Technology. The volume of paper material used in operational activities in the last 2 (two) years is as follows:

The availability of clean water, which continues to decrease every year makes the Company strive to maintain clean water supply. To maintain a supply of clean water in its daily operations, the Company disseminates the efficiency efforts regarding the use of

terhadap penggunaan sumber daya air di lingkungan kantor serta melakukan pengecekan secara rutin terhadap instalasi air sehingga dengan cepat diketahui dan dilakukan perbaikan apabila ada kebocoran.

Selain itu, Perusahaan juga mendorong optimalisasi dan efisiensi penggunaan listrik dalam seluruh kegiatan operasional. Perusahaan menggunakan listrik yang dibeli dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebagai sumber energi untuk kegiatan operasional kantor, dengan menggunakan pendekatan perhitungan jumlah konsumsi energi listrik dengan cara mengkonversi total biaya penggunaan listrik dari PLN menjadi rata-rata jumlah kilo watt jam (kWh) penggunaan.

water resources within the office and conducts routine checks on water installations so that they are quickly identified and repaired if there is a leak.

In addition, the Company also encourages the optimization and efficiency of electricity use in all operational activities. The Company uses electricity purchased from PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) or PLN as an energy source for office operations. The Company uses an approach to calculating the amount of electricity consumption by converting the total cost of using electricity from PLN to an average number of kilo watt hours (kWh) usage.

Perbandingan Penggunaan Listrik Tahun 2022-2023

Comparison of Electricity Use in 2022-2023

Uraian Descriprion	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease (%)
Penggunaan (kWh) Usage (in kWh)	9.770.954	9.231.350	5,84%
Nilai (Rp) Value (in IDR)	17.242.903.839	17.240.546.632	0,01%

Perusahaan mempertimbangkan kelayakan terkait kebijakan penggunaan BBM di seluruh kendaraan operasional sesuai dengan ketentuan lulus uji emisi. Adapun upaya efisiensi penggunaan BBM dapat dilihat sebagai berikut:

The Company considers the eligibility of all operational vehicles in accordance with the provisions of passing the emission test. Efforts to create fuel efficiency can be seen as follows:

Perbandingan Konsumsi BBM Tahun 2022-2023

Comparison of Fuel Consumption for 2022-2023

Uraian Descriprion	2023	2022	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease (%)
Volume (Liter) Volume (in Litre)	1.935	2.271	-14,79%
Nilai (Rp) Value (in IDR)	19.133.873,7	25.061.917,15	-23,65%

9. Pertimbangan Aspek Lingkungan terkait Kerja Sama dengan Mitra Kerja Pemasok/Vendor/Supplier
Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan terus melakukan kerja sama dengan sejumlah mitra, seperti pemasok, vendor, ataupun *supplier*. Selain itu, Perusahaan selalu mempertimbangkan kualitas material yang akan dipakai oleh mitra kerja dan menganalisa setiap material yang akan digunakan untuk meminimalisir dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan.

9. Consideration of Environmental Aspects related to Cooperation with Supplier/Vendor/Partners
In implementing the entire process of business activities, the Company cooperates with a number of partners, such as suppliers, vendors, or partners. In the entire process of cooperation, the Company always considers the quality of the materials that will be used by partners and analyzes each material that will be used to minimize the impact that may be generated on the environment.

DAMPAK KUANTITATIF KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN HIDUP

Perusahaan memastikan seluruh kegiatan operasional dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan. Hal itu terwujud dalam komitmen Perusahaan dalam melakukan efisiensi penggunaan kertas, listrik, air, dan BBM. Selain dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan, kebijakan tersebut juga memberikan dampak terhadap efisiensi biaya operasional Perusahaan.

PELAKSANAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Sebagai bentuk kontribusi Perusahaan dalam memberikan manfaat yang lebih luas bagi peningkatan kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Perusahaan melaksanakan inisiatif program tanggung jawab sosial terkait lingkungan hidup. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, selain kegiatan rutin, Perusahaan juga menekankan program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pengelolaan dan kegiatan pelestarian lingkungan hidup yang merupakan pelaksanaan Inisiatif kegiatan Perusahaan terkait lingkungan hidup yang dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat.

MEKANISME DAN INFORMASI TENTANG PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

Perusahaan membuka kesempatan kepada semua pihak untuk melakukan pengaduan terkait pelanggaran pencemaran lingkungan dari kegiatan operasi yang dilakukan Perusahaan. Saluran pengaduan tersebut dilayangkan melalui telepon, surat, email, atau situs web resmi Perusahaan. Sepanjang tahun 2023, Perusahaan tidak mendapati adanya pengaduan terkait masalah lingkungan yang berdampak cukup signifikan dan berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Perusahaan.

BIAYA IMPLEMENTASI INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA ASPEK LINGKUNGAN HIDUP

Per 31 Desember 2023, Perusahaan telah merealisasikan total biaya dalam menjalankan komitmen perusahaan terkait pelestarian lingkungan hidup sebesar Rp27.756.500.

QUANTITATIVE IMPACT OF ENVIRONMENTAL SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES

The Company ensures that all operational activities can have a positive impact on the environment. It is manifested in the commitment of the LRT Jakarta to use paper, electricity, water and fuel efficiently. Besides being able to have a positive impact on the environment, this policy also has an impact on the efficiency of the Company's operational costs.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES RELATED TO THE ENVIRONMENT

As a form of the Company's contribution in providing wider benefits for the improvement of environmental quality in a sustainable manner. The Company implements social responsibility program initiatives related to the environment. As previously described, in addition to routine activities, the Company also emphasizes corporate social responsibility programs on environmental management and preservation activities which are the implementation of the Company's environmental-related initiatives that can have a positive impact on the environment and society.

MECHANISM AND INFORMATION ON ENVIRONMENTAL COMPLAINTS

The Company opens opportunities for all parties to make complaints regarding violations of environmental pollution from the operations conducted by the Company. The complaint can be channeled via telephone, letter, e-mail, or the Company's official website. Throughout 2023, the Company did not find any complaints related to environmental issues which had a significant impact and affected the continuity of the Company's business.

IMPLEMENTATION COSTS FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES ON ENVIRONMENTAL ASPECT

As of December 31, 2023, the Company has realized a total cost of IDR27,756,500 in carrying out the Company's commitments regarding environmental preservation.

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECT

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Hubungan antara Perusahaan dengan seluruh karyawan merupakan kunci dalam menunjang pencapaian berbagai target Perusahaan. Implementasi kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan terkait praktik ketenagakerjaan adalah tanggung jawab Perusahaan terhadap karyawan sebagai pemangku kepentingan internal. Implementasi ini meliputi praktik terbaik atas pengelolaan ketenagakerjaan, keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi, serta persamaan hak dan kesempatan kerja.

Perusahaan menerapkan berbagai kebijakan untuk memastikan praktik ketenagakerjaan, yaitu dengan melakukan berbagai pemenuhan atas hak karyawan, melakukan pengembangan talenta, mengupayakan remunerasi yang kompetitif, memberikan apresiasi serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Salah satu kebijakan yang dilaksanakan Perusahaan dalam kaitan dengan tanggung jawab sosial terhadap K3 adalah Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT LRT Jakarta dengan Pegawai. Selain praktik ketenagakerjaan, Perusahaan juga mengupayakan praktik mitigasi keselamatan dan kesehatan kerja terbaik untuk para karyawan. Komitmen ini meliputi mitigasi maupun minimalisasi atas risiko kecelakaan, penyakit ataupun absensi kerja yang dapat terjadi pada karyawan. Perusahaan juga menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari budaya kerja yang diharapkan mampu menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif bagi seluruh insan Perusahaan.

LINGKUP DAN PERUMUSAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pencapaian kinerja yang didapatkan oleh Perusahaan tidak terlepas dari produktivitas dan loyalitas karyawan. Untuk itu, Perusahaan bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan kerja (K3) para pegawainya dengan menyediakan peralatan serta lingkungan kerja yang aman dan sehat. Lingkup kegiatan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja terdiri dari program ketenagakerjaan yang meliputi kesetaraan gender, kesempatan kerja yang sama, kesetaraan

COMMITMENT AND POLICY

The relationship between the Company and all employees is key to supporting the achievement of various Company targets. Implementation of corporate social responsibility policies related to employment practices is the responsibility of the Company towards employees as internal stakeholders. This implementation includes best practices on labor management, balance between work and personal life, as well as equal rights and employment opportunities.

The Company implements various policies to ensure labor practices, namely by conducting various fulfillments of employee rights, developing talents, seeking competitive remuneration, giving appreciation, and creating a conducive work environment. One of the policies implemented by the Company in relation to social responsibility towards K3 (OHS) is Law No. 13 of 2003 concerning Employment and Collective Labor Agreements (CLA) between PT LRT Jakarta and Employees. In addition to employment practices, the Company also strives for the best occupational safety and health mitigation practices for employees. This commitment includes mitigating and minimizing the risk of accidents, illness or work absences that can occur to employees. The Company also implements occupational safety and health standards as part of the work culture which is expected to create conducive working conditions for all Company personnel.

SCOPE AND FORMULATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECT

The performance achievement obtained by the Company is inseparable from employee productivity and loyalty. Thus, the Company is fully responsible for the welfare, occupational health and safety (OHS) of its employees by providing equipment and a safe and healthy work environment. The scope of social responsibility activities related to employment, occupational health and safety consists of employment programs which include gender equality, equal employment opportunities, equality in

dalam program pengembangan kompetensi, pemenuhan hak kesejahteraan karyawan, remunerasi, pembentukan lingkungan kerja yang kondusif, rekrutmen dan turnover karyawan, apresiasi terhadap karyawan, kebebasan berserikat, perjanjian kerja bersama, dan program pensiun.

Adapun program pengelolaan K3 yang diterapkan oleh Perusahaan meliputi program sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, memperkuat sarana keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi dan pelatihan K3, program jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja bagi karyawan. Perusahaan juga telah mengatur pengelolaan aspek keselamatan dan kesehatan kerja para pegawai dalam beberapa kebijakan dengan mengacu pada kebijakan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap K3 meliputi pelaksanaan program mitigasi risiko K3, penyediaan sarana dan prasarana K3 yang sesuai dengan standar, peningkatan pengetahuan, kemampuan dan kesadaran karyawan melalui sosialisasi maupun pelatihan, evaluasi kepatuhan regulasi terkait K3, pengendalian operasional K3 di lingkungan kerja, dan pelaksanaan rutin simulasi tanggap darurat berdasarkan risiko area kerja.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja yang Sama, serta Pemberian Izin Cuti

Perusahaan senantiasa memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam hal kesempatan bekerja tanpa memandang perbedaan agama, etnis, ras, status sosial, warna kulit, gender, ataupun kondisi fisik lainnya. Demikian juga dalam sistem rekrutmen, Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada siapapun untuk dapat diterima menjadi karyawan Perusahaan, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, maupun gender.

Kesetaraan gender dan kesempatan kerja yang sama, juga berlaku dalam program pengembangan karier, di mana sistem pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berlaku di internal Perusahaan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan.

Selain itu, Perusahaan juga memberikan izin cuti bagi karyawan perempuan yang sedang hamil dan akan melahirkan. Sementara untuk karyawan laki-laki yang istrinya tengah melahirkan, mendapatkan izin tidak bekerja selama 2 (dua) hari tanpa dipotong cuti tahunan.

2. Persamaan Hak dalam Pengembangan Kompetensi dan Karier

Perusahaan senantiasa menyelenggarakan beberapa program pengembangan kompetensi bagi karyawan secara berkala setiap tahunnya untuk menunjang kegiatan usaha Perusahaan. Di samping itu, Perusahaan

competency development programs, fulfillment of employee welfare rights, remuneration, establishment of a conducive work environment, employee recruitment and turnover, appreciation for employees, freedom of association, collective labor agreement, and pension plans.

The OHS management program implemented by the Company includes an occupational health and safety certification program for employees, strengthening occupational health and safety facilities, OHS dissemination and training, work accident security programs, as well as health insurance and work accident insurance for employees. The Company has also regulated the management of the occupational health and safety aspects of its employees in several policies with reference to the prevailing policies and laws and regulations. Corporate social responsibility for OHS includes implementing OHS risk mitigation programs, providing OHS facilities and infrastructure in accordance with standards, increasing employee knowledge, skills and awareness through outreach and training, evaluating compliance with regulations related to OHS, controlling OHS operations in the work environment, and implementing emergency response simulation routine based on work area risks.

PROGRAMS AND ACTIVITIES CONDUCTED RELATED TO CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECT

1. Gender Equality and Equal Employment Opportunities, as well as the Granting of Leave Permits

The Company always provides equal rights and opportunities in terms of employment opportunities regardless of differences in religion, ethnicity, race, social status, skin color, gender, or other physical conditions. Likewise in the recruitment system, the Company provides equal opportunity to anyone to be accepted as an employee of the Company, regardless of differences in ethnicity, religion, race or gender.

Gender equality and equal employment opportunities also apply to career development programs, in which the Company's internal Human Resources (HR) development system provides equal opportunities for every employee to be promoted to a higher position in accordance with applicable regulations within the Company.

In addition, the Company also provides leave permits for female employees who are pregnant and about to give birth. Meanwhile, for male employees whose wives are giving birth, they get leave permission for 2 (two) days without deducting their annual leave.

2. Equal Rights in Competency and Career Development

The Company regularly organizes several competency development programs for employees annually to support the Company's business activities. In addition, the Company also ensures that every employee has

juga menjamin bahwa setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti setiap program pendidikan dan pelatihan yang dibuka sesuai dengan kebutuhan dan rencana pengembangan organisasi.

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan menginvestasikan pengembangan kompetensi karyawan sebesar Rp5.486.790.970 Pengembangan kompetensi yang dilakukan Perusahaan ini disesuaikan dengan kebutuhan, yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap kinerja Perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan tanggung jawab terhadap para pemegang saham dalam rangka memperkuat keberlanjutan usaha Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga memberikan hak yang sama bagi semua pegawai dalam hal pengembangan karier baik promosi, maupun rotasi. Program ini dilakukan untuk membentuk para pemimpin masa depan Perusahaan. Program ini dikembangkan untuk menempatkan karyawan pada beberapa level tertentu yang disesuaikan dengan kompetensi dan *skill* yang dimiliki sehingga proses regenerasi karyawan dari level terendah pada organisasi Perusahaan dapat berjalan dengan baik.

3. Pemenuhan Hak Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan Insan Perusahaan juga tidak luput dari perhatian. Standar gaji telah ditetapkan sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berlaku, termasuk pemberian tunjangan kepada karyawan. Kesejahteraan seluruh karyawan senantiasa menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh Perusahaan, agar selalu terjalin sinergi antar karyawan dengan Perusahaan demi terciptanya produktivitas kerja dan kinerja yang optimal. Untuk itu, Perusahaan terus berkomitmen dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan guna meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas karyawan terhadap Perusahaan. Hal ini mendorong Perusahaan untuk senantiasa memberikan kompensasi yang layak dan adil sebagai imbal jasa terhadap hasil kinerja karyawan.

4. Tingkat Turnover Karyawan

Rasio turnover karyawan digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas dan loyalitas SDM yang dimiliki oleh Perusahaan. Tingkat turnover karyawan juga menjadi refleksi atas budaya dan sistem kerja Perusahaan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Per 31 Desember 2023, jumlah karyawan yang keluar dari Perusahaan tercatat sebanyak 10 (sepuluh) orang, menurun (secara *voluntarily resigned*) dibandingkan tahun 2022 dengan jumlah 21 (dua puluh satu) orang. Sementara, jumlah keseluruhan rekrutmen di sepanjang tahun 2023 adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang.

Penyebab Turnover Karyawan
Causes of Employee Turnover

Penyebab Causes		
	2023	2022
Pensiun Alami Retirement	1	0
Pensiun Dini Early Retirement	0	0

equal opportunities to participate in any education and training programs held according to the needs and plans for organizational development.

As of the end of 2023, the Company has invested IDR5,486,790,970 in employee competency development. The competency development program carried out by the Company is adjusted to the needs, which are expected to have a positive impact on the Company's performance as a form of responsibility for implementing responsibilities towards shareholders in order to strengthen the Company's business sustainability. In addition, the Company also provides equal rights for all employees in terms of career development, whether it is promotion and rotation. This program is conducted to create the future leaders of the Company. This program was developed to place employees at certain levels according to their competencies and skills so that the employee regeneration process occurs from even the lowest level in the Company's organization.

3. Fulfillment of Employee Welfare Rights

The welfare of the Company's Personnel also does not go unnoticed. Salary standards have been set in accordance with the applicable District/City Minimum Wage, including the provision of benefits to employees. The welfare of all employees is always of great concern to the Company. Hence, a synergy between employees and the Company is always maintained to create optimal work productivity and performance. Therefore, the Company continues to be committed to improving employee welfare to increase employee performance, motivation, and loyalty. This encourages the Company to always provide proper and fair compensation as a reward for employee performance results.

4. Employee Turnover Rate

A turnover ratio is used to measure the level of productivity and loyalty of the Company's human resources. The employee turnover rate is also a reflection of the Company's culture and work system, which can be an indicator of the Company's success in creating a conducive work environment.

As of December 31, 2023, the number of employees who left the Company amounted to 10 people, a decrease (voluntarily resigned) compared to 2022 with 21 people. Meanwhile, the total number of recruitments throughout 2023 amounted to 24 people, an increase compared to the previous year of 29 people.

Penyebab Causes	Penyebab Turnover Karyawan Causes of Employee Turnover	
	2023	2022
Meninggal Death	0	0
Mengundurkan Diri Resignation	8	17
Diberhentikan karena Melakukan Pelanggaran Laid-off due to Violation	1	4
Total Karyawan yang Keluar Total Number of Employees Leaving the Company	10	21
Total Karyawan Akhir Tahun Total Number of Employees at the End of the Year	274	262
Persentase Turnover Turnover Percentage	2,9%	6,5%

5. Penilaian Kinerja Karyawan

Evaluasi atas kinerja karyawan dilakukan rutin setiap tahun, yaitu penilaian kinerja tengah tahun dan penilaian kinerja akhir tahun. Proses penilaian dilakukan dengan membandingkan kinerja karyawan terhadap target (*goal*) yang telah ditetapkan di awal tahun, sesuai dengan indikator kinerja yang terkait. Proses ini dilakukan dengan objektif, melibatkan proses evaluasi 360 derajat dari atasan, rekan kerja, dan juga bawahan.

6. Hubungan Industrial

Perusahaan berkomitmen untuk mendukung hubungan industrial antara karyawan dan Perusahaan melalui kebebasan karyawan untuk berserikat. Hubungan industrial karyawan dan Perusahaan telah memenuhi standar dan perundangan-undangan yang berlaku dengan tetap memaksimalkan peran karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan Perusahaan.

Manajemen Perusahaan juga secara aktif melakukan komunikasi dalam rangka menyampaikan informasi-informasi terkini sesuai dengan azas keterbukaan informasi kepada Serikat Pekerja secara berkala. Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan harmonis antara Manajemen dengan karyawan dapat terus terjaga dengan baik.

7. Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan

Sebagai entitas usaha yang berkomitmen dalam kepatuhan atas norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja serta peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan sangat mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan kerja. Untuk itu, Perusahaan telah menyediakan peralatan keselamatan kerja di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau di lingkungan kerja serta prosedur keamanan yang baku. Selain itu, Perusahaan juga telah menerapkan dan memenuhi kaidah *Health & Safety Environment* (HSE) serta K3 sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

5. Employee Performance Assessment

Assessment of employee performance is carried out routinely every year, namely the mid-year performance assessment and the year-end performance assessment. The assessment process is carried out by comparing employee performance against targets (goals) that have been set at the beginning of the year, according to related performance indicators. This process is carried out objectively, involving a 360-degree evaluation process from superiors, colleagues, and subordinates.

6. Industrial Relationships

The Company is committed to supporting industrial relationships between employees and the Company through employees' freedom of association. Industrial relations between employees and the Company have complied with prevailing standards and laws while still maximizing the role of employees as one of the Company's stakeholders.

The Company's management also actively communicates to convey the latest information, in accordance with the principle of information disclosure, to the Labor Union on a regular basis. Through this activity it is hoped that the harmonious relationship between Management and employees can be maintained properly.

7. Management of Employees' Occupational Health and Safety

As a business entity that is committed to complying with occupational health and safety norms as well as applicable laws and regulations in Indonesia, the Company places high priority on safety, occupational health, and work environment aspects. For this reason, the Company has provided work safety equipment in locations that are easy to reach in the work environment as well as standard security procedures. In addition, the Company has also implemented and complied with the rules of Health & Safety Environment (HSE) and OHS in accordance with applicable rules and regulations.

8. Pengungkapan Tingkat Angka Kecelakaan Kerja

Perusahaan terus berupaya untuk menerapkan aspek K3 di setiap kegiatan operasionalnya secara optimal untuk mencegah atau meminimalisir kecelakaan kerja fatal. Adapun tingkat kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dialami oleh karyawan dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Jenis dan Jumlah Kecelakaan Kerja

Type and Number of Work Accidents

Jenis Kecelakaan Kerja Type of Work Accidents	Angka Kecelakaan Kerja Number of Work Accidents		Kenaikan Increase(%)
	2023 (orang) (people)	2022 (orang) (people)	
Meninggal Dunia Death	0	0	0%
Cedera Berat Severe Injury	0	0	0%
Cedera Sedang Mild Injury	0	1	0%
Cedera Ringan Minor Injury	5	1	400%
Jumlah Total	5	2	150%

9. Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Karyawan

Perusahaan telah menyiapkan fasilitas berupa jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja bagi karyawan. Kedua fasilitas jaminan bagi karyawan tersebut diberikan dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan karyawan dalam bekerja, sehingga para karyawan tetap fokus dan tidak khawatir dalam melakukan kegiatannya untuk memberikan kinerja terbaik bagi Perusahaan.

Adapun kebijakan yang dimiliki Perusahaan adalah menekankan pentingnya aspek kesehatan para karyawan. Guna memenuhi Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2013 yang telah diubah melalui Perpres No. 111 Tahun 2013, Perusahaan telah mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Selain itu, Perusahaan juga mengikutsertakan pegawai dan keluarga inti dari pegawai ke dalam program asuransi kesehatan rawat inap dan fasilitas penggantian biaya rawat jalan.

DAMPAK KUANTITATIF ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Dampak kuantitatif atas pelaksanaan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan, keselamatan dan Kesehatan kerja tercermin dari tingkat suasana yang kondusif di lingkungan Perusahaan, di mana sepanjang tahun 2023, tidak terdapat permasalahan yang melibatkan karyawan dengan Perusahaan, baik di kantor pusat maupun di

8. Disclosure of Work Accident Rate

The Company strives to optimally implement OHS aspects in each of its operational activities to prevent or minimize fatal work accidents. The level of work-related accidents and diseases experienced by employees in the last 2 (two) years can be seen as follows:

9. Health Insurance and Work Accident Insurance for Employees

The Company has prepared facilities in the form of health insurance and work accident insurance for employees. The two insurance facilities for employees are provided to maintain the safety and comfort of employees at work, so that employees remain focused and not worried about performing their activities to provide the best performance for the Company.

It is the Company's policy to emphasize the importance of the health aspects of employees. In order to comply with Law No. 24 of 2011 concerning BPJS and Presidential Regulation (Perpres) No. 12 of 2013, which has been amended through Presidential Decree No. 111 of 2013, the Company has enrolled all employees in the BPJS Ketenagakerjaan (Social Security) and BPJS Kesehatan (Health Insurance) programs. In addition, the Company also includes employees and their nuclear families in the inpatient health insurance program and outpatient reimbursement facilities.

QUANTITATIVE IMPACT ON THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECT

The quantitative impact of the implementation of social responsibility activities related to employment, occupational health and safety can be seen from the conducive atmosphere in the Company's environment, in which until the end of 2023, there have been no issues involving employees with the Company, both at the head

area operasional Perusahaan yang bersifat material dan berpengaruh terhadap kinerja operasional maupun kinerja keuangan Perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan tanggung jawab sosial terkait ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan Perusahaan terhadap seluruh karyawan yang terlibat dalam kegiatan usaha Perusahaan telah berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

MEKANISME PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

LRT Jakarta terus berupaya mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan terhadap kenyamanan, keselamatan, kesehatan, ketertiban, keamanan, kualitas lingkungan dan produktivitas kerja akibat aktivitas kerja dari penggunaan alat, mesin, dan bahan berbahaya dalam lingkungan kerja. Penyelesaian pengaduan masalah ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan dalam rangka menjamin hak-hak para karyawan. Perusahaan menyediakan sarana bagi pegawai untuk menyampaikan pengaduan, keluh kesah, saran, maupun rekomendasi sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

SERTIFIKASI DAN PENGHARGAAN INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA ASPEK KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Penghargaan di Bidang K3 Tahun 2023

Awards Related to OHS Aspect in 2023

Tanggal Date	Nama Penghargaan Name of Award	Institusi yang Memberikan Awarding Institution
-	-	-

office and in the Company's operational areas. In addition, they have no impact on the operational performance and financial performance of the Company. This proves that the social responsibility activities related to employment, occupational health and safety conducted by the Company for all employees involved in the Company's business activities have been going well and in accordance with applicable regulations.

MECHANISM FOR COMPLAINTS ON EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

LRT Jakarta strives to prevent undesirable events from happening to comfort, safety, health, order, security, environmental quality, and work productivity due to work activities from the use of tools, machines and hazardous materials in the work environment. The resolution of complaints about employment, occupational health and safety issues for employees is one of the Company's responsibilities to guarantee the rights of employees. The Company provides facilities for employees to submit complaints, suggestions, and recommendations as stipulated in the Collective Labor Agreement (PKB).

CERTIFICATION AND AWARDS FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECT

Sertifikasi Bidang K3 yang Masih Berlaku di Tahun 2023

Valid OHS Certifications in 2023

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Date of Certification Issuance	Skema Sertifikasi Scheme of Certificate	Jenis Sertifikat Type of Certificate	Nomor Sertifikat Certificate No.	Dikeluarkan Oleh Issued By	Masa Berlaku Hingga Validity Period
27 Maret 2020 March 27, 2020	SNI ISO 9001:2015 Quality Management Systems-Requirement	Sertifikasi Pertama First Certification	QSC 01722	Sucofindo International Certification Services	26 Maret 2023 March 26, 2023

Sertifikasi Bidang K3 yang Masih Berlaku di Tahun 2023

Valid OHS Certifications in 2023

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Date of Certification Issuance	Skema Sertifikasi Scheme of Certificate	Jenis Sertifikat Type of Certificate	Nomor Sertifikat Certificate No.	Dikeluarkan Oleh Issued By	Masa Berlaku Hingga Validity Period
01 September 2021 September 1, 2021	Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018 Railway Safety Management System (RSMS) Based on the Regulation of Minister of Transportation No. 69 of 2018	Sertifikasi Pertama First Certification	01/BA.SMKP/K5.2/IX/DJKA/2021	Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Directorate General of Railways, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia	31 Agustus 2023 August 31, 2023
13 April 2022 April 13, 2022	Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) Based on Government Regulation No. 50 of 2012	Sertifikasi Pertama First Certification	REG.SMK3.2022.MAL.SK-886	Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia	12 Mei 2025 May 12, 2025
13 April 2022 April 13, 2022	SNI ISO 9001:2015 Quality Management Systems-Requirement	Sertifikasi Ulang Re-Certification	QSC 01722	Sucofindo International Certification Services	26 Maret 2026 March 26, 2026
13 April 2022 April 13, 2022	SNI ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System - Requirements with guidance for use	Sertifikasi Pertama First Certification	OHS 00235	Sucofindo International Certification Services	26 Maret 2026 March 26, 2026
13 Mei 2022 May 13, 2022	Integrated Management System <ul style="list-style-type: none"> SNI ISO 9001:2015 Quality Management Systems-Requirement SNI ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System - Requirements with guidance for use 	Sertifikasi Pertama First Certification	IMS 00230	Sucofindo International Certification Services	26 Maret 2026 March 26, 2026
22 Desember 2023 December 22, 2023	Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian (SMKP) Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2018 Railway Safety Management System (RSMS) Based on the Regulation of Minister of Transportation No. 69 of 2018	Sertifikasi Ulang Re-Certification	KA.008-1-1-K5-DJKA-2024	Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Directorate General of Railways, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia	21 Desember 2025 December 21, 2025

BIAYA IMPLEMENTASI INISIATIF TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PADA ASPEK KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah merealisasikan biaya dalam menjalankan komitmennya terkait K3 dan Ketenagakerjaan sebesar Rp1.095.620.442 di luar biaya Kesehatan.

IMPLEMENTATION COSTS FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES RELATED TO EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ASPECT

Throughout 2023, the Company has realized costs in the amount of IDR1,095,620,442 excluding Health costs, in carrying out its commitments related to OHS and Employment.



TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PRODUK DAN KONSUMEN/PELANGGAN

SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE RELATED TO PRODUCT AND CONSUMER/CUSTOMER ASPECT

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perusahaan terus berkomitmen memberikan layanan terbaik dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan maupun konsumen yang diwujudkan melalui sikap dan respon yang profesional dari seluruh Insan Perusahaan dalam melayani pelanggan. Perusahaan juga menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada setiap konsumen dilakukan secara sigap, responsif, dan terpercaya, sejalan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam rangka meningkatkan kepuasan konsumen atas seluruh layanan yang diberikan, Perusahaan senantiasa memperkuat hubungan baik dan saling menguntungkan dengan mitra kerja, baik pemasok, vendor, maupun *supplier* guna mempermudah kegiatan Perusahaan dalam menghadirkan produk dan layanan yang bermutu.

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023

Perusahaan telah menyusun target dan rencana kegiatan sebagai bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap konsumen atau pelanggan yaitu dengan menyediakan layanan informasi pada konsumen atau pelanggan mengenai Perusahaan, pusat pelayanan konsumen atau pelanggan, serta program peningkatan layanan. Perusahaan juga senantiasa merencanakan berbagai program untuk meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan, dengan target yang hendak dicapai antara lain tidak adanya keluhan dari konsumen atau pelanggan terhadap produk dan layanan yang diberikan Perusahaan.

COMMITMENT AND POLICY

The Company continues to be committed to providing the best and most useful service for all stakeholders and consumers, which is manifested through a professional attitude and response from all Company personnel in serving customers. The Company also guarantees that the quality of service provided to each consumer is swift, responsive, and reliable, and in line with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

In order to improve customer satisfaction for all services provided, the Company always strengthens good and mutually beneficial relationships with business partners, such as providers, vendors and suppliers in order to facilitate the Company's activities in presenting quality products and services.

2023 TARGETS AND ACTIVITY PLANS

The Company has developed targets and activity plans as a form of the Company's responsibility to consumers or customers, namely by providing information services to consumers or customers about the Company, consumer or customer service centers, and service improvement programs. The Company also always plans various programs to increase consumer or customer satisfaction, with targets to be achieved, including the absence of complaints from consumers or customers regarding the products and services provided by the Company.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN

1. Kesehatan dan Keselamatan Konsumen atau Pelanggan Perusahaan berkomitmen melaksanakan proses produksi dan jasa sesuai dengan standar operasional dengan menjadikan aspek Kesehatan dan keselamatan konsumen atau pelanggan sebagai prioritas utama. Untuk itu, Perusahaan senantiasa meningkatkan kualitas produk dan jasa dengan menerapkan Sistem Manajemen Mutu. Produk yang dihasilkan Perusahaan bukan merupakan produksi untuk keperluan konsumsi ataupun produk yang dapat membahayakan penggunanya.
2. Kejelasan Informasi Produk dan Promosi Perusahaan menyediakan informasi material yang diperlukan tentang LRT secara transparan dan terbuka, akurat dan tepat waktu, sebagai dasar pengambilan keputusan bagi konsumen untuk menggunakan produk atau jasa Perusahaan. Kegiatan komunikasi kejelasan informasi produk ini juga menjadi salah satu upaya untuk melindungi hak konsumen atau pelanggan untuk memperoleh informasi yang akurat, jelas, dan dapat dipercaya. Perusahaan menyadari, komunikasi yang berjalan secara efektif dan selaras dengan layanan yang sesuai dengan harapan konsumen atau pelanggan, dapat menciptakan loyalitas dan hubungan bisnis jangka panjang. Perusahaan menyediakan berbagai sarana komunikasi yang memadai, agar kualitas produk dan layanan yang dimiliki Perusahaan senantiasa dapat memenuhi harapan konsumen atau pelanggan salah satunya melalui website Perusahaan.
3. Survei Kepuasan Konsumen atau Pelanggan Sampai saat ini, Perusahaan telah mendapat banyak kepercayaan dari konsumen. Hal tersebut seiring dengan pandangan Perusahaan terhadap pentingnya kepuasan konsumen sebagai salah satu tolok ukur penilaian paling efektif dari keseluruhan aspek kualitas produk yang dimiliki. Untuk memetakan kelebihan-kelebihan produk dan posisinya di tengah-tengah konsumen, Perusahaan melakukan survei kepuasan pelanggan yang meliputi penilaian terhadap produk dan layanan yang dimiliki Perusahaan.

PROGRAMS AND ACTIVITIES CONDUCTED

1. Health and Safety of Consumers or Customers The Company is committed to carrying out production and service processes in accordance with operational standards by making the health and safety aspects of consumers or customers as a top priority. For this reason, the Company continuously improves the quality of its products and services by implementing a Quality Management System. Products produced by the Company are not production for consumption purposes or products that can harm the users.
2. Clarity of Product Information and Promotions The Company provides necessary material information about LRT in a transparent and open, accurate and timely manner, as a basis for consumer decision making to use the Company's products or services. This product's information clarity communication activity is also one of the efforts to protect the rights of consumers or customers to obtain accurate, clear, and reliable information. The Company realizes that communication which runs effectively and in harmony with services that meet consumer or customer expectations can create loyalty and long-term business relationships. The Company provides a variety of adequate means of communication, so that the quality of the products and services owned by the Company can always meet the expectations of consumers or customers, one of which is through the Company's website.
3. Consumer or Customer Satisfaction Survey To provide consumers or customers with a sense of security and trust, the Company always complements its products and services with complete information provision facilities, procedures, complaint processes, and complaint facilities through ways that are easily accessible to customers and potential customers, such as website, call center, and social media.
3. Consumer or Customer Satisfaction Survey Until the present time, the Company has won a lot of trust from consumers. This is in line with the Company's view of the importance of customer satisfaction as one of the most effective benchmarks for assessing all aspects of product quality. To map the product's advantages and its position among consumers, the Company conducts a customer satisfaction survey which includes an assessment of the Company's products and services.

Adapun hasil survei kepuasan pelanggan dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

The results of customer satisfaction surveys in the last 2 (two) years are as follows:

2022 Customer Satisfaction Survey

90%	89,8%	92,2%	95%
Triwulan 1 - 2022 Q1 - 2022	Triwulan 2 - 2022 Q2 - 2022	Triwulan 3 - 2022 Q3 - 2022	Triwulan 4 - 2022 Q4 - 2022
<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan periode Maret 2022. 2. Jumlah data sebesar 117 responden. 3. Pengumpulan data secara <i>online</i> dan wawancara di stasiun. 4. Metode pengukuran dengan skala Likert (1-10). <ul style="list-style-type: none"> 1. Implementation period of March 2022. 2. The amount of data is from 117 respondents. 3. Online data collection and station interviews. 4. Measurement method with a Likert scale (1-10). 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan periode Mei-Juni 2022. 2. Jumlah data sebesar 217 responden. 3. Pengumpulan data secara <i>online</i> dan wawancara di stasiun. 4. Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5). <ul style="list-style-type: none"> 1. Implementation period of May-June 2022. 2. The amount of data is from 217 respondents. 3. Online data collection and station interviews. 4. Measurement method with a Likert scale (1-5). 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan periode Agustus - September 2022. 2. Jumlah data sebesar 114 responden. 3. Pengumpulan data secara <i>online</i> dan wawancara di stasiun. 4. Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5). <ul style="list-style-type: none"> 1. Implementation period of August - September 2022. 2. The amount of data is from 114 respondents. 3. Online data collection and station interviews. 4. Measurement method with a Likert scale (1-5). 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan periode November-Desember 2022. 2. Jumlah data sebesar 114 responden. 3. Pengumpulan data secara <i>online</i> dan wawancara di stasiun. 4. Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5). <ul style="list-style-type: none"> 1. Implementation period of November - December 2022. 2. The amount of data is from 114 respondents. 3. Online data collection and station interviews. 4. Measurement method with a Likert scale (1-5).

2023 Customer Satisfaction Survey

90,2%	92,4%	94,2%	93,2%
Triwulan 1 - 2023 Q1 - 2023	Triwulan 2 - 2023 Q2 - 2023	Triwulan 3 - 2023 Q3 - 2023	Triwulan 4 - 2023 Q4 - 2023
<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pada Februari-Maret 2023 dengan 116 responden. • Pengumpulan data : <i>online</i> dan wawancara di stasiun • Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5) • Implementation in February-March 2023 with 116 respondents. • Data collection: online and interviews at stations. • Measurement method using Likert scale (1-5). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pada Mei 2023 dengan 123 responden. • Pengumpulan data : <i>online</i> dan wawancara di stasiun • Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5) • Implementation in May 2023 with 123 respondents. • Data collection: online and interviews at stations. • Measurement method using Likert scale (1-5). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pada Agustus 2023 dengan 186 responden • Pengumpulan data : <i>online</i> dan wawancara di stasiun • Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5) • Implementation in August 2023 with 186 respondents. • Data collection: online and interviews at stations. • Measurement method using Likert scale (1-5). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan pada Desember 2023 dengan 111 responden. • Pengumpulan data : <i>online</i> dan wawancara di stasiun • Metode pengukuran dengan skala Likert (1-5) • Implementation in December 2023 with 111 respondents. • Data collection: online and interviews at stations. • Measurement method using Likert scale (1-5).

4. Pengelolaan Hubungan dengan Mitra Kerja, Distributor/Pemasok/Supplier/Vendor

Mitra Kerja adalah pihak yang telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerja sama dengan LRT Jakarta untuk kegiatan pengembangan usaha setelah melalui proses evaluasi kelayakan. Atas dasar itu, Perusahaan senantiasa melakukan pengembangan usaha, dengan melibatkan mitra kerja di berbagai bidang pengembangan usaha. Dalam menjalankan kegiatan pengembangan usaha, pemilihan mitra kerja yang akan bekerja sama dengan LRT Jakarta tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* dan ketentuan internal yang berlaku. Calon mitra kerja yang dapat ditetapkan menjadi mitra kerja adalah calon mitra kerja yang telah mengikuti prosedur dan aturan serta evaluasi yang berlaku dan memberikan keuntungan atau manfaat bagi Perusahaan.

4. Relationship Management with Work Partners, Distributors/Suppliers/Vendors

Work Partners are parties that have agreed and signed a cooperation agreement with LRT Jakarta for business development activities after going through a feasibility evaluation process. On that basis, the Company continues to develop its business by involving partners in various fields of business development. In carrying out business development activities, the selection of partners who will work with the Jakarta LRT must certainly be conducted in accordance with the principles of *Good Corporate Governance* and applicable internal regulations. Prospective work partners who can be appointed as work partners are prospective work partners who have followed the applicable procedures and rules as well as evaluations and provide benefits to the Company.

LAYANAN KELUHAN DAN PENGADUAN BAGI KONSUMEN ATAU PELANGGAN

Dalam rangka melayani keluhan dan pengaduan bagi konsumen atau pelanggan, Perusahaan menyediakan layanan untuk menyampaikan keluhan, saran, maupun apresiasinya melalui *Care Center Layanan Sahabat LRTJ (CARLA)* yang beroperasi dari Senin-Minggu (diluar hari libur nasional) mulai pukul 08.00-17.00 WIB. Layanan ini dapat diakses melalui website www.lrtjakarta.co.id, email, media sosial yang dimiliki LRT Jakarta atau dengan menghubungi nomor *hotline* (021) 50899909.

Sementara bagi konsumen atau pelanggan yang menyampaikan keluhannya pada hari libur nasional, dapat disampaikan melalui email, media sosial, dan *website* resmi LRT Jakarta. Setiap pengaduan yang disampaikan pelanggan dan masyarakat selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Perusahaan dalam rangka memberikan layanan yang optimal kepada konsumen.

Di sepanjang tahun 2023, total rekapitulasi data masuk melalui contact center LRT Jakarta berjumlah 20.594 pesan, dengan rincian sebagai berikut:

Kanal Channel	Jumlah Total
Call	1.630 panggilan / calls
E-mail	2.062 pesan / messages
LiveChat	3.720 pesan / messages
Facebook	143 pesan / messages
Twitter	494 pesan / messages
Instagram	12.545 pesan / messages
Total Data Masuk Total Incoming Data	20.594 pesan / messages

Data masuk di sepanjang tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 312%, jika dibandingkan pesan yang masuk di tahun 2022, semua pesan yang masuk tersebut telah direspon oleh tim terkait dan telah ditindak lanjuti.

Sementara bagi konsumen atau pelanggan yang menyampaikan keluhannya pada hari libur nasional, dapat disampaikan melalui email, media sosial, dan *website* resmi LRT Jakarta. Setiap pengaduan yang disampaikan pelanggan dan masyarakat selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Perusahaan dalam rangka memberikan layanan yang optimal kepada konsumen.

COMPLAINTS SERVICES FOR CONSUMERS OR CUSTOMERS

In order to address complaints and grievances from consumers or customers, the Company provides a complaint service for consumers to submit complaints, suggestions, or appreciation through the Sahabat LRTJ Service Care Center (CARLA), which operates from Monday to Sunday (excluding national holidays) from 08.00-17.00 WIB. This service can be accessed through the website <http://www.lrtjakarta.co.id>, email, social media owned by LRT Jakarta, or by calling the hotline number (021) 50899909.

Meanwhile, for consumers or customers who wish to convey their complaints on national holidays, they can do so through email, social media, and LRT Jakarta's official website. Every complaint received from customers and the public will be followed up by the Company in order to provide optimal service to consumers.

Throughout the year 2023, the total recapitulation of data received through the LRT Jakarta contact center amounted to 20,594 messages, with the following details:

Incoming data throughout the year 2023 experienced a 312% increase compared to the messages received in 2022. All incoming messages have been responded to by the relevant team and followed up on.

Meanwhile, consumers or customers who submit their complaints on national holidays can do that via email, social media, and the official website of the LRT Jakarta. Every complaint submitted by customers and the public will then be followed up by the Company in order to provide optimal service to consumers.

DAMPAK KUANTITATIF ATAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Hingga akhir tahun 2023, tidak terdapat keluhan konsumen yang bersifat material dan berpengaruh terhadap kinerja operasional maupun keuangan Perusahaan. LRT Jakarta senantiasa berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan layanan terhadap konsumen yang diwujudkan melalui berbagai program, produk dan layanan yang optimal.

PENGHARGAAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PRODUK DAN KONSUMEN/PELANGGAN

Penghargaan di Bidang Produk dan Konsumen Tahun 2023 Awards Related to Product and Consumer Aspect in 2023

Tanggal Date	Nama Penghargaan Name of Award	Institusi yang Memberikan Awarding Institution
04 Agustus 2023 August 4, 2023	Penghargaan Masinis dan Pramudi Teladan Jabodetabek 2023 Exemplary Train Drivers and Conductors Award Jabodetabek 2023	Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Transportation Management Agency of Jabodetabek, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia
26 September 2023 September 26, 2023	<i>The Best Customer Experience - Platinum Winner</i>	Indonesia Contact Center Association (ICCA)

QUANTITATIVE IMPACT ON PROGRAMS AND ACTIVITIES

Until the end of 2023, there were no consumer complaints that were material in nature and had an impact on the Company's operational and financial performance. LRT Jakarta is always committed to continuing to improve service to consumers which is realized through optimal programs, products and services.

AWARDS AND CERTIFICATIONS FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO PRODUCTS AND CONSUMERS/CUSTOMERS

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPEK PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

SOCIAL RESPONSIBILITY GOVERNANCE RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT ASPECT

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

Perusahaan terus berkomitmen melaksanakan program pengembangan sosial dan kemasyarakatan atau *Community Involvement & Development* (CID), agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Komitmen kuat ini untuk memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan bertujuan agar seluruh kegiatan bisnis yang dilakukan LRTJ dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat. Melalui program TJSL di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan, Perusahaan berharap dapat memberikan manfaat, baik secara ekonomi dan sosial sejalan dengan upaya dalam mewujudkan kinerja usaha yang berkesinambungan. Bagi Perusahaan, kelangsungan dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan tidak hanya didasarkan pada kekuatan finansial saja namun harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan sekitar di mana Perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, Perusahaan merancang dan merealisasikan program pengembangan masyarakat dengan melibatkan masyarakat sekitar, sebagai bentuk partisipasinya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan skala global, yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs).

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023

Program tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan ditetapkan berdasarkan pelaksanaan *social mapping* sehingga sasaran dan kegiatan yang dilakukan tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap tahunnya, Perusahaan melalui Divisi Sekretariat Perusahaan, berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) sebagai bentuk kepedulian Perusahaan dalam memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan. Rencana program tanggung jawab sosial Perusahaan menjadi program kerja tahunan terkait TJSL yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, serta lingkungan sosial, dalam bentuk bantuan sarana ibadah, bantuan bencana alam, bantuan pendidikan, serta bantuan sosial dan kesehatan.

COMMITMENT AND POLICY

The Company is committed to implementing social and community development programs or Community Involvement & Development (CID), in order to provide benefits to the community in a sustainable manner. This strong commitment to provide benefits to stakeholders aims to ensure that all business activities carried out by LRTJ can add value to the community. Through the TJSL program in the field of social and community development, the Company hopes to provide both economic and social benefits, which is in line with efforts to achieve sustainable business performance. For the Company, sustainability and sustainable business growth are not only based on financial strength but must also pay attention to the social and environmental dimensions in which the Company operates. Therefore, the Company creates and realizes community development programs by involving local communities, as a form of participation in supporting the achievement of global sustainable development goals, namely the Sustainable Development Goals (SDGs).

2023 TARGETS AND ACTIVITY PLANS

The Company's social responsibility program for social and community development is determined based on the implementation of social mapping so that the goals and activities carried out are appropriate and in accordance with the needs of the community. Every year, the Company, through the Corporate Secretariat Division, is committed to carrying out social and environmental responsibility (CSR) activities as a form of the Company's concern in empowering the community in a sustainable manner. The plan for the Company's social responsibility program is to become an annual work program related to TJSL which covers the fields of education, health, and the social environment, in the form of assistance for places of worship, natural disaster assistance, educational assistance, and social and health assistance.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKUKAN TERKAIT TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Hingga akhir tahun 2023, Perusahaan telah menjalankan sejumlah kegiatan TJSL di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:

1. LRT Jakarta ikut serta berpartisipasi pada program kegiatan pengadaan dan pemberian paket sembako kepada para Anak Yatim dan Duafa dengan memberikan donasi berupa uang sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 8-9 April 2023.
2. LRT Jakarta mengeluarkan dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam rangka mengisi dan mensyiaran Bulan Suci Ramadhan tahun 2023 bersama Yayasan El-Fawaz Generasi Rabbani, dengan rangkaian acara Tarhib Ramadhan, Program Pembagian Sembako, serta BukBer dan Berkhidmad Bingkisan Idul Fitri.
3. LRT Jakarta kembali melakukan qurban pada Hari Raya Idul adha yang bertepatan pada tanggal 29 Juli 2023/10 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Adapun lokasi penyaluran hewan qurban diantaranya:
 - a. Masjid Al-Amanah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kecamatan Kelapa Gading;
 - c. Karang Taruna Jakarta Utara;
 - d. Andyka Community Center;
 - e. Masjid Raudhatul Jannah LRT Jakarta 1 (satu) ekor;
 - f. Forum Komunitas Anak Betawi.
4. LRT Jakarta memberikan dukungan sponsorship pada pembangunan masjid Raudhatul Jannah yang berlokasi di area PT LRT Jakarta. Adapun anggaran yang berikan sebesar Rp26.735.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
5. LRT Jakarta telah memberikan bantuan kepada para korban terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada 4 Maret 2023.
6. LRT Jakarta memberikan dukungan pada pembangunan Masjid Nurus Shomad yang berlokasi di Kel. Kosambi Kec. Cengkareng Jakarta Barat.
7. LRT Jakarta ikut berpartisipasi dan berkontribusi dengan memberikan dukungan pada kegiatan Penanaman 1000 Pohon di Jakarta International Stadium, berupa 10 pohon berdiameter 15-20 cm dan tinggi 3-4 meter berjenis Tebabuya pada 31 Agustus 2023.
8. LRT Jakarta berpartisipasi dalam Gerakan Menanam Pohon bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 November 2023.
9. LRT Jakarta ikut serta berpartisipasi pada Kegiatan Komunitas "Golf Bersama BIMO" dengan memberikan dukungan sponsorship yang dilaksanakan oleh komunitas aulin.comm, pada Sabtu, 11 Maret 2023 di Gunung Geulis kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

PROGRAMS AND ACTIVITIES CONDUCTED RELATED TO SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Until the end of 2023, the Company has carried out several CSR activities related to social and community development, including:

1. LRT Jakarta participated in the procurement and provision of food packages to Orphans and Duafa by making a donation in the form of money in the amount of IDR25,000,000 (twenty-five million rupiah) on April 8-9, 2023.
2. LRT Jakarta issued funds in the amount of IDR10,000,000.00 (ten million rupiah), to participate and celebrate the Holy Month of Ramadan in 2023 with El-Fawaz Generasi Rabbani Foundation, with a series of Tarhib Ramadhan events, the Basic Food Distribution Program, and BukBer and Berkhidmad Eid Gifts.
3. LRT Jakarta once again performed qurban on Eid al-Adha on July 29, 2023/10 Dhulhijjah 1443 Hijriah. The distribution locations of qurban animals include:
 - a. Al-Amanah Mosque of DKI Jakarta Provincial Transportation Agency;
 - b. Kelapa Gading Sub-district;
 - c. Youth Organization of North Jakarta;
 - d. Andyka Community Center;
 - e. Raudhatul Jannah Mosque LRT Jakarta 1 (one);
 - f. Communication Forum for Betawi People (FORKABI).
4. LRT Jakarta provided support in the form of sponsorship for the construction of the Raudhatul Jannah mosque located in PT LRT Jakarta area. The budget provided amounted to IDR26,735,000 (twenty-six million seven hundred thirty five thousand rupiah).
5. LRT Jakarta helped victims affected by the Pertamina Plumpang Depot fire on March 4, 2023.
6. LRT Jakarta provided support for the construction of Nurus Shomad Mosque located in Kosambi Sub-district, Cengkareng, West Jakarta.
7. LRT Jakarta participated and contributed by providing support for the 1000 Tree Planting activity at Jakarta International Stadium, in the form of 10 trees with a diameter of 15-20 cm and a height of 3-4 meters of Tebabuya type on August 31, 2023.
8. LRT Jakarta participated in the Tree Planting Movement with President Joko Widodo (Jokowi) on November 29, 2023.
9. LRT Jakarta participated in the "Golf with BIMO" Community Activity by providing sponsorship support carried out by the aulin.comm community, on Saturday, March 11, 2023 at Gunung Geulis, Sukaraja sub-district, Bogor Regency, West Java.

10. LRT Jakarta berpartisipasi pada kegiatan Reuni Akbar 2023 yang dilaksanakan oleh Keluarga Alumni Teknik Sipil Gadjah Mada (KATSAGAMA) dengan memberikan dukungan partisipasi dalam bentuk *sponsorship* pada Kamis - Jumat, 18 -19 Februari 2023.
11. LRT Jakarta berpartisipasi pada kegiatan festival tahun 2023 dengan tema “Keragaman adalah Kekuatan, persatuan adalah Kejayaan”. Sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat khususnya di bidang olahraga dan seni dan mendukung terlahirnya bakat-bakat olahraga dan seni sejak usia dini pada Sabtu dan Minggu, 05-19 Maret 2023, di Gelanggang Remaja Jakarta Utara.
12. LRT Jakarta memberikan *sponsorship* kepada Asosiasi Time Rally Indonesia (ATRI) dalam kegiatan Ramadhan *On The Road* 2023 yang dilaksanakan pada Minggu, 2 April 2023.
13. LRT Jakarta memberikan dukungan *sponsorship* dan partisipasi pada kegiatan *employee gathering* dengan tema “Menumpuk Kebiasaan Baik dan Menurunkan Kebiasaan Buruk” yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan diikuti oleh 2.500 pegawai.
14. LRT Jakarta memberikan bantuan berupa 1 (satu) unit bus untuk mendukung Kegiatan Mudik dan Balik Gratis Angkutan Lebaran Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan estimasi biaya sejumlah Rp17.546.700,00 (tujuh belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
15. LRT Jakarta memberikan dukungan pada kegiatan Milad Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) ke-22 yang mana mampu meningkatkan *Engagement* serta *Demand* positif yang berasal dari masyarakat untuk PT LRT Jakarta pada suatu organisasi masyarakat atau komunitas pada Minggu, 7 Mei 2023.
16. LRT Jakarta berpartisipasi pada kegiatan 11th Civil In Action “Wujudkan Bangsa Perkasa, Indonesia Tangguh Bencana” yang dilaksanakan oleh organisasi Keluarga Besar Mahasiswa Teknik Sipil Dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dengan memberikan dukungan partisipasi dalam bentuk *sponsorship* dengan anggaran sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Februari - Juli 2023.
17. LRT Jakarta berpartisipasi pada kegiatan Uji Emisi Akbar yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan memberikan dukungan partisipasi dalam bentuk *sponsorship*, pada Senin, 5 Juni 2023.
18. LRT Jakarta berpartisipasi pada kegiatan Lebaran Betawi dengan tema acara “Nyok Kite Lestarikan Budaya Betawi yang makin dicinte” yang dilaksanakan oleh masyarakat Betawi yang di representasikan oleh Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi) yang di dukung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan memberikan dukungan partisipasi dalam bentuk *sponsorship*, dilaksanakan pada Jumat-Sabtu, 19 - 20 Mei 2023.
10. LRT Jakarta participated in 2023 Grand Reunion organized by Keluarga Alumni Teknik Sipil Gadjah Mada (KATSAGAMA) by providing participation support in the form of sponsorship on Thursday - Friday, February 18 -19, 2023.
11. Jakarta LRT participated in the 2023 festival activities with the theme “Diversity is Strength, Unity is Glory”. To accommodate the aspirations of the community, especially in the field of sports and arts and support the birth of sports and arts talents from an early age on Saturday and Sunday, March 5-19, 2023, at the North Jakarta Youth Center.
12. LRT Jakarta provided sponsorship to the Time Rally Indonesia Association (ATRI) in the 2023 Ramadhan on the Road activity held on Sunday, April 2, 2023.
13. LRT Jakarta provided sponsorship support and participation in employee gathering activities with the theme “Accumulating Good Habits and Eliminating Bad Habits”, which was conducted by the DKI Jakarta Provincial Transportation Agency with 2,500 employees participating.
14. LRT Jakarta provided assistance in the form of 1 unit of bus to support Free Transportation for Mudik (Homecoming) and Balik (Return) Activities in celebrating 2023 Lebaran, which carried out by the DKI Jakarta Provincial Transportation Agency with an estimated cost of IDR17,546,700.00 (seventeen million five hundred forty-six thousand seven hundred rupiah).
15. LRT Jakarta provided support for the 22nd Communication Forum for Betawi People (FORKABI) Milad activity, which was able to increase Engagement and positive Demand from the community for PT LRT Jakarta in a community organization or community on Sunday, May 7, 2023.
16. LRT Jakarta participated in the 11th Civil In Action activity “Realizing a Mighty Nation, Disaster Resilient Indonesia”, which was carried out by the Civil and Environmental Engineering Student Family organization, Faculty of Engineering, Gadjah Mada University by providing participation support in the form of sponsorship with a budget of IDR10,000,000.00 (ten million rupiah) in February - July 2023.
17. LRT Jakarta participated in the Grand Emission Test activity carried out by the DKI Jakarta Provincial Environment Agency by providing participation support in the form of sponsorship, on Monday, June 5, 2023.
18. LRT Jakarta participated in the Betawi Lebaran activity with the theme “Nyok Kite Lestarikan Budaya Betawi yang makin dicinte”, which was carried out by the Betawi community represented by the Betawi Community Deliberation Body (Bamus Betawi) supported by the DKI Jakarta Provincial government by providing sponsorship, held on Friday-Saturday, May 19-20, 2023.

19. LRT Jakarta berpartisipasi pada kegiatan *Knowledge Sharing* dan Harmonisasi Teknis Listrik Mekanik & Peralatan Bandara International Soekarno - Hatta oleh PT Angkasa Pura II dengan memberikan dukungan partisipasi dalam bentuk *sponsorship*, pada Selasa, 13 Juni 2023.
20. LRT Jakarta memberikan dukungan dan partisipasi pada kegiatan Jalan Sehat Menyambut Hari Kemerdekaan RI-78. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada Minggu, 13 Agustus 2023 yang dilaksanakan di Halaman kantor Kecamatan Mampang.
21. LRT Jakarta berpartisipasi dengan memberikan dukungan pada kegiatan charity golf tournament 2023, Minggu, 28 Agustus 2023.

DAMPAK KUANTITATIF ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Kegiatan TJSL yang dilakukan oleh Perusahaan telah memberikan manfaat terhadap pembangunan berkelanjutan khususnya terkait dengan pengentasan kemiskinan, melalui program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas Pendidikan masyarakat. Perusahaan juga secara tidak langsung telah ikut serta dalam membangun ekonomi kerakyatan dan membantu program Pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia yang juga sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

SALURAN PENGADUAN PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Perusahaan berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan sosial dan kemasyarakatan, untuk itu, Perusahaan menyediakan sarana saluran pengaduan bagi masyarakat, apabila terdapat kendala atau keluhan dalam kegiatan kemasyarakatan, yang dapat disampaikan langsung ke Perusahaan atau melalui kontak layanan yang tertera di website Perusahaan.

BIAYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah merealisasikan biaya program tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan sebesar Rp386.091.350.

19. LRT Jakarta participated in the Knowledge Sharing and Technical Harmonization of Soekarno-Hatta International Airport Mechanical Electricity & Equipment by PT Angkasa Pura II by providing participation support in the form of sponsorship, on Tuesday, June 13, 2023.
20. LRT Jakarta provided support and participated in the Healthy Walk to Welcome the 78th Anniversary of Indonesian Independence Day. The activity was held on Sunday, August 13, 2023, at the Mampang District office yard.
21. LRT Jakarta participated by providing support for the charity golf tournament 2023, Sunday, August 28, 2023.

QUANTITATIVE IMPACT ON THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

CSR activities carried out by the Company have provided benefits for sustainable development, especially related to poverty alleviation through community empowerment programs and improving the quality of community education. The Company has also indirectly participated in building a people's economy and assisting the Government's program to reduce poverty in Indonesia which is also in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

COMPLAINT CHANNEL FOR THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

The Company is committed to continuing to conduct social and community development programs, and for this reason, the Company provides a complaint channel for the community. If there are problems or complaints in community activities, they can be submitted directly to the Company or through the service contact listed on the Company's website.

COSTS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY RELATED TO SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT

Throughout 2023, the Company has realized the social responsibility program costs amounted to IDR386,091,350 in the field of social and community development.





Laporan Keuangan

Financial Report

08





1·2

Boulevard Utara, Pulomas,
Velodrome





PT LRT JAKARTA

**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

***FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
DIRECTOR'S STATEMENT**

**TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
REGARDING TO THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023**

PT LRT JAKARTA

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

We undersigned below:

1. Nama	Hendri Saputra	Name
Alamat Kantor	Jl. Raya Kelapa Nias RT000/RW025 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. 14250	Office Address
Alamat Domisili	Kota Wisata San Fransisco RT001/RW031 Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Bogor	Domicile Address
Nomor Telepon	082111570358	Phone Number
Jabatan	Direktur Utama/President Director	Position
2. Nama	Sahurdi	Name
Alamat Kantor	Jl. Raya Kelapa Nias RT000/RW025 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara. 14250	Office Address
Alamat Domisili	Mutiara Sentul RT004/RW010 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Bogor, Jawa Barat	Domicile Address
Nomor Telepon	08128076691	Phone Number
Jabatan	Direktur Keuangan dan Dukungan Bisnis/ <i>Director of Finance and Business Support</i>	Position

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT LRT Jakarta;
2. Laporan Keuangan PT LRT Jakarta telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;;
 - b. Laporan Keuangan PT LRT Jakarta tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the financial statement of PT LRT Jakarta;*
2. *The financial statements of PT LRT Jakarta have been prepared and presented in conformity with Indonesian Financial Accounting Standard;*
 - a. *All information in the Company financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;*
 - b. *The Company financial statements do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact; and;*

3. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan..

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

3. We are responsible for the Company's internal control system.

This statements letter is made truthfully.

Jakarta, 27 Juni 2024/ June 27, 2024

Atas nama dan mewakili Direksi/ For and on behalf on the board of Director



Hendri Saputra Sahurdi
Direktur Utama/ President Director Direktur/Director



**PT LRT JAKARTA
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT LRT JAKARTA
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023
AND FOR THE YEAR
ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

**Halaman/
Page**

Daftar Isi

Table of Content

Surat Pernyataan Direksi

Directors' Statement

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023**

**Financial Statements
For The Year Ended
December 31, 2023**

Laporan Posisi Keuangan	1 - 2	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	3	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	5	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	6 - 63	<i>Notes to the Financial Statements</i>

No : 00198/2.1000/AU.1/05/0136-1/1/VII/2024

**Laporan Auditor Independen/
Independent Auditors' Report****Kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi****PT LRT Jakarta****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT LRT Jakarta ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan" pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**To The Shareholders, Boards of Commissioners
and Directors****PT LRT Jakarta****Opinion**

We have audited the financial statements of PT LRT Jakarta (the "Company"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as of December 31, 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements" paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Palma Tower, 18th Floor Lot F&G

Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang, Jakarta Selatan 12310
Phone : +6221-75930431, 75930432, 75930433 Fax : +6221-75930434
Email : info@hgkfirm.com Web : www.hgkfirm.com www.TIAGnet.com
NIUKAP : KEP-929/KM.1/2014 - S-30/MK.1/2015



No: 00198/2.1000/AU.1/05/0136-1/1/VI/2024

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 28 Februari 2023.

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. 00184/2.1000/AU.1/05/0136-1/1/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 dengan opini wajar tanpa modifikasi atas laporan keuangan PT LRT Jakarta tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Selanjutnya, PT LRT Jakarta telah menerbitkan Kembali laporan keuangannya untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan sebagaimana diungkapkan dalam catatan 33 atas laporan keuangan. Oleh karena itu, kami memberikan Laporan Auditor Independen ini atas laporan keuangan yang telah diterbitkan Kembali.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistenan material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Other Matter

The financial statements of the Company as at December 31, 2022 and for the year then ended were audited by another independent auditor who expressed an unmodified opinion on those financial statements on February 28, 2023.

Prior to this report, we had published Independent Auditor's Report No. 00184/2.1000/AU.1/05/0136-1/1/VI/2024 dated 19 June 2024 with a qualified opinion without modification on the financial statements of PT LRT Jakarta dated 31 December 2023 and for the year ended on that date. Furthermore, PT LRT Jakarta has re-issued its financial reports to adjust the presentation and disclosure as disclosed in note 33 to the financial statements. Therefore, we provide this Independent Auditor's Report on the reissued financial statements.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above, when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

No : 00198/2.1000/AU.1/05/0136-1/1/VII/2024

Informasi Lain (Lanjutan)

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistik selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Other Information (Continued)

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

No : 00198/2.1000/AU.1/05/0136-1/1/VII/2024

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntasi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

No : 00198/2.1000/AU.1/05/0136-1/1/VII/2024

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga: (Lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha
- Mengevaluasi penyajian, struktur dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (Continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (Continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

No : 00198/2.1000/AU.1/05/0136-1/1/VII/2024

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

HERTANTO, GRACE, KARUNAWAN



Drs. Hertanto., M.S.Ak.,CPA.,CPMA.,CA.

Izin Akuntan Publik No. AP.0136/ Public Accountant License No. AP.0136

27 Juni 2024/ June 27, 2024

PT LRT JAKARTA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2023
(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3e, 3f, 5	120.641.665.365	114.030.489.408	<i>Cash and Cash Equivalents</i>
Investasi Jangka Pendek *)	12	43.699.794.842	15.000.000.000	<i>Short-term Investment *)</i>
Piutang Usaha - Bersih	3e, 3g, 6			<i>Trade Receivable - Net</i>
Pihak Berelasi	3d	2.617.964.953	2.528.613.103	<i>Related Parties</i>
Pihak Ketiga		2.852.065.100	897.894.855	<i>Third Parties</i>
Persediaan	3l, 11	12.946.218.960	--	<i>Inventory</i>
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	3i, 7	2.473.679.351	1.680.210.678	<i>Accrued Revenue</i>
Pajak Dibayar Dimuka	3p, 8a	120.966.635	758.993.967	<i>Prepaid Taxes</i>
Biaya Dibayar Dimuka	3j, 9	3.122.035.680	2.466.150.082	<i>Prepaid Expenses</i>
Uang Muka	3k, 10	816.508.511	822.953.530	<i>Advance</i>
Jumlah Aset Lancar		189.290.899.397	138.185.305.623	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON CURRENT ASSETS
Aset Tetap - Bersih	3m, 13	180.554.354.151	187.619.512.920	<i>Fixed Assets - Nett</i>
Aset Pajak Tangguhan	3p, 8d	8.811.083.964	10.663.264.884	<i>Deffered Tax Assets</i>
Aset Tak Berwujud	3n, 14	2.815.747.970	2.851.866.032	<i>Intangible Assets</i>
Aset Lain-lain		16.606.372	33.225.607	<i>Others Asset</i>
Jumlah Aset Tidak Lancar		192.197.792.457	201.167.869.443	Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		381.488.691.854	339.353.175.066	TOTAL ASSETS

*) Lihat Catatan 32

*) See notes 32

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY	
LIABILITAS			LIABILITIES	
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES	
Utang Usaha	3e, 3o, 15		Trade Payables	
Pihak Berelasi	3d	11.089.608.167	Related Parties	
Pihak Ketiga		35.692.162.441	Third Parties	
Utang Pajak	3p, 8b	2.443.277.936	Tax Payable	
Beban Akrual	3k, 16	7.639.438.934	Accrued Expenses	
Pendapatan Diterima Dimuka	3k, 17	2.992.679.506	Unearned Revenues	
Jaminan dan			Guarantees And	
Uang Muka Lainnya	3k, 18	355.047.818	Other Advances	
Utang Retensi	3k, 19	116.397.499	Retention Payables	
Utang Lain-lain - Pihak Ketiga	3e, 3d, 3o	--	Other Payables- Third Parties	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		60.328.612.301	37.841.185.377	Total Current Liability
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON CURRENT LIABILITIES	
Liabilitas			Post-employment	
Imbalan Pasca Kerja	3q, 20	5.865.367.835	Benefit Liabilities	
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		5.865.367.835	Total Non Current Liabilities	TOTAL LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS				
EKUITAS			EQUITY	
Modal Saham,			Share Capital	
Nilai nominal Rp100.000 per saham			Nominal value of Rp100,000	
Modal dasar 6.000.000 saham.			per share. Authorized capital	
Modal ditempatkan dan disetor			6,000,000 shares. issued and	
3.338.934 saham	21	333.893.400.000	paid-up capital 3,338,934	
Penghasilan Komprehensif Lain:			Other Comprehensive Income	
Pengukuran Kembali Liabilitas			Remeasurements of	
Imbalan Kerja Jangka Panjang*)	3q, 20	(2.782.984.892)	Long-Term Employee	
Saldo Rugi		(15.815.703.390)	Benefits Liabilities*)	
Jumlah Ekuitas		315.294.711.718	Loss Accumulated	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS			TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	
		381.488.691.854	339.353.175.066	

*) Lihat Catatan 32

*) See notes 32

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT LRT JAKARTA
 LAPORAN LABA RUGI
 DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2023

(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
 STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
 AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 FOR THE YEAR THEN ENDED
 DECEMBER 31, 2023

(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
PENDAPATAN	3r, 22	271.606.454.045	214.704.813.046	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	3r, 23	(170.163.884.005)	(143.921.284.817)	COST OF REVENUE
LABA BRUTO		101.442.570.040	70.783.528.229	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Beban Penjualan	3r, 24	(536.300.537)	(91.599.041)	Selling Expenses
Beban Umum dan Administrasi	3r, 25	(85.492.101.782)	(62.451.178.319)	General And Administrative Expenses
Jumlah Beban Usaha		(86.028.402.319)	(62.542.777.360)	Total Operating Expenses
LABA USAHA		15.414.167.721	8.240.750.869	OPERATING PROFIT
PENDAPATAN / (BEBAN)				OTHER INCOME / (EXPENSES)
LAIN-LAIN				
Pendapatan Keuangan - Bersih	3r, 26a	2.828.557.983	1.909.257.874	Financial Income - Net
Pendapatan Lain-lain - Bersih	3r, 26b	1.407.726.729	837.804.240	Other Income - Net
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		4.236.284.712	2.747.062.114	Total Other Income
LABA SEBELUM				PROFIT BEFORE
PAJAK PENGHASILAN		19.650.452.433	10.987.812.983	INCOME TAX
MANFAAT/ (BEBAN) PAJAK				TAX BENEFIT/ (EXPENSES)
Beban Pajak Tangguhan	3p, 8c	(2.336.591.181)	(2.764.918.012)	Deffered Tax Expense
Jumlah Beban Pajak		(2.336.591.181)	(2.764.918.012)	Total Tax Expense
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		17.313.861.252	8.222.894.971	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pengukuran Kembali Atas				Remeasurements of Defined
Kewajiban Imbalan Pasti	3q, 20	(2.201.864.827)	365.673.366	Benefit Obligation
Dampak Pajak	3p, 8d	484.410.262	(80.448.141)	Income Tax Effect
Jumlah Laba/ (Rugi) Komprehensif Lain		(1.717.454.565)	285.225.225	Total Other Comprehensive Income/ (Loss)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		15.596.406.687	8.508.120.196	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THEYEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

PT LRT JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023
 (Jumlah disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2023
 (Amount expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Paid of Capital Stock	Income	Retained Earnings	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid of Capital	Penghasilan Komprehensif Lainnya/ Other Comprehensive Income
					Saldo Rugi/ Loss	
Saldo per 1 Januari 2022			333.893.400.000	291.190.184.835		Balance as of January 1, 2022
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Laba Tahun Berjalan	3q, 20	--	285.225.225 8.222.894.971	285.225.225 8.222.894.971	(1.065.530.327)	Remeasurements of Long-Term Employee Benefits Liabilities Profit for The Year
Saldo per 31 Desember 2022			333.893.400.000	299.698.305.031	(34.195.094.969)	December 31, 2022
Dampak Reklasifikasi Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang *	--	--	(1.065.530.327)	1.065.530.327	--	Impact of Reclassification Remeasurements of Long-Term Employee Benefits Liabilities *)
Saldo per 1 Januari 2023			333.893.400.000	(1.065.530.327)	(33.129.564.642)	299.698.305.031
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Laba Tahun Berjalan	3q, 20	--	(1.717.454.565) --	17.313.861.252	(1.717.454.565) --	Remeasurements of Long-Term Employee Benefits Liabilities Profit for The Year
Saldo per 31 Desember 2023			333.893.400.000	(2.782.984.892)	(15.815.703.390)	315.294.711.718
Balance as of December 31, 2023						

*) Lihat Catatan 32

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement taken as a whole

*) See notes 32

PT LRT JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023

(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

PT LRT JAKARTA
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR THEN ENDED
DECEMBER 31, 2023

(Expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31, 2023	31 Desember / December 31, 2022	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan Kas Dari Pelanggan	22	269.965.768.868	228.539.615.789	<i>Cash Receipt from Customers</i>
Pembayaran Kas untuk Beban Usaha dan Operasional	23, 24	(138.947.585.836)	(124.986.819.519)	<i>Cash Payments for Operating and Operating Expenses</i>
Pembayaran Kas kepada Pengurus dan Karyawan	23, 24, 25	(92.998.879.111)	(57.477.735.716)	<i>Cash Payments to Managers and Employees</i>
Penerimaan Bunga Deposito dan Jasa Giro	26	<u>3.514.072.695</u>	<u>2.303.621.768</u>	<i>Interest Receipt and Current Account Service</i>
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi		<u>41.533.376.617</u>	<u>48.378.682.322</u>	<i>Net Cash Flows Used In Operating Activities</i>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				Cash Flows from Investing Activities
Penempatan Deposito	5, 12	(43.699.794.842)	(15.000.000.000)	<i>Placement Deposits</i>
Penerimaan Deposito	5, 12	15.000.000.000	--	<i>Time deposit withdrawal</i>
Perolehan Aset Tak Berwujud	14	(1.047.898.420)	(2.321.835.205)	<i>Acquisition of Intangible Asset</i>
Perolehan Aset Tetap	13	(5.174.507.398)	(4.141.291.191)	<i>Acquisition of Fixed Asset</i>
Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		<u>(34.922.200.660)</u>	<u>(21.463.126.396)</u>	<i>Net Cash Used in Investing Activities</i>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		--	--	Cash Flows from Financing Activities
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas		<u>6.611.175.957</u>	<u>26.915.555.926</u>	<i>Increase (Decrease) of Cash & Cash Equivalent</i>
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun		<u>114.030.489.408</u>	<u>87.114.933.482</u>	<i>Cash & Cash Equivalent at the Beginning of the Current Year</i>
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun		<u>120.641.665.365</u>	<u>114.030.489.408</u>	<i>Cash & Cash Equivalent at the End of the Current Year</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of this financial statements

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT LRT Jakarta ("Perusahaan") didirikan di Jakarta dengan nama PT LRT Jakarta sesuai dengan Akta No. 10 tanggal 16 April 2018 tentang pendirian PT LRT Jakarta, dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Pendirian Perusahaan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 17 April 2018 dengan surat keputusan No. AHU-0020380.AH.01.01. Tahun 2018.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan akta notaris Wiwik Condro, S.H. No.75 tanggal 26 Oktober 2020 mengenai perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0408252 tanggal 17 November 2020.

b. Kegiatan Usaha Pokok Perusahaan

Sesuai anggaran dasarnya, Perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melanjutkan usaha dibidang:

- 1) Konstruksi bangunan sipil
- 2) Konstruksi khusus
- 3) Angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa
- 4) Aktivitas arsitektur dan keinsinyuran; analisis dan uji teknis
- 5) Pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan
- 6) Telekomunikasi
- 7) Real estat
- 8) Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen
- 9) Periklanan dan penelitian pasar
- 10) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi
- 11) Pendidikan

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2019. Perusahaan berkedudukan di Jakarta Utara. Entitas induk Perusahaan adalah PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

1. GENERAL

a. Establishment of the Company

PT LRT Jakarta ("the Company") was established in Jakarta under the name of PT LRT Jakarta in accordance with Notarial deed No. 10 dated April 16, 2018 about establishment of PT LRT Jakarta from Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. Establishment of the Company has been approved by the Minister of Justice of the Republic Indonesia dated April 17, 2018 in its Decision Letter No. AHU-0020380.AH.01.01. Tahun 2018.

The Articles of Association have been amended several times, most recently by a deed of Notary Wiwik Condro, S.H. 75 dated 26 October, 2020 regarding changes to the increase in issued/paid-up capital. The amendment has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0408252 dated November 17, 2020.

b. The Company's Business Activities

Based on article, The Company was established with with aim and objectives to operate business activities in fields:

- 1) Civil building construction
- 2) Special construction
- 3) Land transportation and transportation through pipelines
- 4) Architectural and engineering activities; technical analysis and test
- 5) Warehousing and transportation support activities
- 6) Telecommunications
- 7) Real estate
- 8) Head office activities and management consulting
- 9) Advertising and market research
- 10) Leasing and leasing activities without option rights
- 11) Educations

The Company started its commercial activities in 2019. The Company domiciled in North Jakarta. The parent company is PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

1. UMUM (LANJUTAN)

c. Dewan Komisaris dan Direksi (Lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT LRT Jakarta sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT LRT Jakarta No. 01 tanggal 3 November 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	2023	2022	Board of Commissioners
Komisaris Utama	Iwan Takwin	Iwan Takwin	: President Commissioner
Komisaris	Azas Tigor Nainggolan	Romy Bareno	: Commissioner
Komisaris	M. Pramintohadi Sukarno	--	: Commissioner
Dewan Direksi			Directors
Direktur Utama	Hendri Saputra	Hendri Saputra	: President Commissioner
Direktur	Sahurdi	Sahurdi	: Commissioner
Direktur	Aditia Kesuma Negara Dalimunte	Aditia Kesuma Negara Dalimunte	: Commissioner

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 274 dan 262 karyawan (tidak diaudit).

The composition of Board of Commissioners and Directors PT LRT Jakarta based on Deed of Statement of Shareholders Resolutions Outside the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB) PT LRT Jakarta No. 01 November 3, 203 are as follows:

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. PSAK 1 (amandemen) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Perusahaan telah menerapkan amandemen PSAK 1 untuk pertama kalinya pada tahun berjalan. Amandemen ini mengubah persyaratan PSAK 1 terkait pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut menggantikan seluruh istilah 'kebijakan akuntansi signifikan' dengan 'informasi kebijakan akuntansi material'. Informasi kebijakan akuntansi bersifat material jika, ketika dipertimbangkan bersama dengan informasi lain yang termasuk dalam laporan keuangan suatu entitas, informasi tersebut secara wajar diharapkan dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum berdasarkan laporan keuangan tersebut.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENT OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("SFAS") AND INTERPRETATION OF PSAK ("ISAK")

a. SFAS 1 (amendment) Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies

The company has adopted the amendments to SFAS 1 for the first time in the current year. The amendments change the requirements in SFAS 1 with regard to disclosure of accounting policies. The amendments replace all instances of the term 'significant accounting policies' with 'material accounting policy information'. Accounting policy information is material if, when considered together with other information included in an entity's financial statements, it can reasonably be expected to influence decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (LANJUTAN)
- a. PSAK 1 (amandemen) Penyajian Laporan Keuangan: Pengungkapan Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)
- Paragraf pendukung dalam PSAK 1 juga diubah untuk memperjelas bahwa informasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi, peristiwa atau kondisi lain adalah tidak material, tidak perlu diungkapkan. Informasi kebijakan akuntansi mungkin material karena sifat transaksi terkait, peristiwa atau kondisi lain, meskipun jumlahnya tidak material. Namun, tidak semua informasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi material, peristiwa atau kondisi lain bersifat material.
- b. PSAK 25 (amendemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan: Definisi Estimasi Akuntansi
- Perusahaan telah menerapkan amandemen PSAK 25 untuk pertama kalinya pada tahun berjalan. Amandemen tersebut menggantikan definisi perubahan estimasi akuntansi dengan definisi estimasi akuntansi.
- Berdasarkan definisi baru, estimasi akuntansi adalah "jumlah moneter dalam laporan keuangan yang bergantung pada ketidakpastian pengukuran". Definisi perubahan estimasi akuntansi telah dihapus.
- c. PSAK 16 (amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan
- Perusahaan telah menerapkan amandemen PSAK 16 untuk pertama kalinya pada tahun berjalan. Amandemen tersebut melarang pengurangan terhadap biaya perolehan suatu aset tetap untuk setiap hasil penjualan barang yang diproduksi sebelum aset tersebut tersedia untuk digunakan, yaitu hasil saat membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar aset tersebut mampu beroperasi sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen. Oleh karena itu, perusahaan mengakui hasil penjualan dan biaya-biaya terkait dalam laba rugi. perusahaan mengukur biaya perolehan barang-barang tersebut sesuai dengan PSAK 14 Persediaan.
2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENT OF FINANSIAL ACCOUNTING STANDARDS ("SFAS") AND INTERPRETATION OF PSAK ("ISAK") (CONTINUED)
- a. SFAS 1 (amendment) Presentation of Financial Statements: Disclosure of Accounting Policies
- The supporting paragraphs in SFAS 1 are also amended to clarify that accounting policy information that relates to transactions, other events or conditions that is immaterial, need not to be disclosed. Accounting policy information may be material because of the nature of the related transactions, other events or conditions, even if the amounts are immaterial. However, not all accounting policy information relating to material transactions, other events or conditions is itself material.
- b. SFAS 25 (amendment) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors: Definition of Accounting Estimates
- The company has adopted the amendments to SFAS 25 for the first time in the current year. The amendments replace the definition of a change in accounting estimates with a definition of accounting estimates.
- c. SFAS 16 (amendment) Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use
- The company has adopted the amendments to SFAS 16 for the first time in the current year. The amendments prohibit deducting from the cost of an item of property, plant and equipment any proceeds from selling items produced before that asset is available for use, i.e. proceeds while bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Consequently, the company recognises such sales proceeds and related costs in profit or loss. the company measures the cost of those items in accordance with SFAS 14 Inventories.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (LANJUTAN) 2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENT OF FINANSIAL ACCOUNTING STANDARDS ("SFAS") AND INTERPRETATIOIN OF PSAK ("ISAK") (CONTINUED)

c. PSAK 16 (amendemen) Aset Tetap: Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan (Lanjutan)

Jika tidak disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian mengungkapkan jumlah penjualan dan biaya yang tercatat dalam laporan laba rugi yang berkaitan dengan item yang diproduksi yang bukan merupakan output dari aktivitas normal entitas, dan pada item mana jumlah tersebut disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain .

c. SFAS 16 (amendment) Property, Plant and Equipment: Proceeds before Intended Use (Continued)

The amendments also clarify the meaning of 'testing whether an asset is functioning properly'. SFAS 16 specifies this as assessing whether the technical and physical performance of the asset is such that it is capable of being used in the production or supply of goods or services, for rental to others, or for administrative purposes.

d. PSAK 46 (amendemen) Pajak Penghasilan: Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal.

Perusahaan telah menerapkan amandemen PSAK 46 untuk pertama kalinya pada tahun berjalan. Amandemen ini memperkenalkan pengecualian lebih lanjut dari pengecualian pengakuan awal. Berdasarkan amandemen tersebut, entitas tidak menerapkan pengecualian pengakuan awal untuk transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan dikenai pajak yang setara. Tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku, perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan dikenai pajak yang setara mungkin timbul pada pengakuan awal aset dan liabilitas dalam suatu transaksi yang bukan merupakan kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak.

Setelah amandemen PSAK 46, entitas diharuskan mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait, dengan pengakuan aset pajak tangguhan tunduk pada kriteria terpulihkan dalam PSAK 46.

d. SFAS 46 (amendment) Income Taxes: Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from a Single Transaction

The company has adopted the amendments to SFAS 46 for the first time in the current year. The amendments introduce a further exception from the initial recognition exemption. Under the amendments, an entity does not apply the initial recognition exemption for transactions that give rise to equal taxable and deductible temporary differences. Depending on the applicable tax law, equal taxable and deductible temporary differences may arise on initial recognition of an asset and liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting profit nor taxable profit.

Following the amendments to SFAS 46, an entity is required to recognise the related deferred tax asset and liability, with the recognition of any deferred tax asset being subject to the recoverability criteria in SFAS 46.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (LANJUTAN) 2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENT OF FINANSIAL ACCOUNTING STANDARDS ("SFAS") AND INTERPRETATIOIN OF PSAK ("ISAK") (CONTINUED)

e. Standar dan Amendemen/Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar, interpretasi dan amandemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi perusahaan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024:

- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- PSAK 73 (amendemen) Sewa: Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-balik
- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- PSAK 2 (amandemen) Laporan arus kas dan PSAK 60 (amandemen) Instrumen Keuangan : Pengungkapan : Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025:

- PSAK 74 Kontrak Asuransi
- PSAK 74 (amendemen) Kontrak Asuransi: Penerapan awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif
- PSAK 10 (amandemen) Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing : Kekurangan Ketertukaran

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

e. Standard and Amendments/ Improvements to Standards Issued not yet Adopted

At the date of authorization of these financial statements, the following standard, interpretation and amendments to SFAS relevant to the company were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after January 1, 2024:

- SFAS 1 (amendment) Presentation of financial statements: Classification of Liabilities as Current or Non-current
- SFAS 73 (amendment) Leases: Lease Liability in a Sale and Leaseback
- SFAS 1 (amendment) Presentation of financial statements: Non-current Liabilities with Covenants
- SFAS 2 (amendment) Statement of cash flows and SFAS 60 (amendment) Financial Instruments : Disclosures : Supplier Finance Arrangements

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025:

- SFAS 74 Insurance Contracts
- SFAS 74 (amendment) Insurance Contracts: Initial application of PSAK 74 and PSAK 71 - Comparative Information
- PSAK 10 (amendment) The effects of changes in foreign exchange rates: Lack of Exchangeability

As of the issuance date of the financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI).

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

c. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Perusahaan. Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dikonversi ke dalam Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2023 dan 2022.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which contain in Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS"), Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Institute of Indonesian Chartered Accountants (DSAK-IAI)

b. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The financial statements are prepared and presented based on the going concern assumption and on the accrual basis, except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows is presented using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of these financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Company.

c. Transactions and Balances in Foreign Currency

The financial statements are presented in Rupiah which is the functional and recording currency of the Company. Transactions in foreign currencies are recorded in Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies were converted into Rupiah at the Bank Indonesia middle rate on December 31, 2023 and 2022.

Mata Uang	Kurs		Currency
	2023	2022	
1 EUR	17.140	16.731	1 EUR

Keuntungan/kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat sebagai laba atau rugi pada tahun berjalan.

Gains/losses arising from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recorded as profit or loss in the current year.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(LANJUTAN)**

d. Transaksi dengan Pihak-pihak berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau Perusahaan yang terkait dengan Perusahaan, jika:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor.
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor;
 - iii. Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (seperti entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas).
 - ii Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (entitas asosiasi atau entitas bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya),
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama
 - iv. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

**3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(CONTINUED)**

d. Transactions with Related Parties

Related parties are Persons or Companies related to the Company, if:

1. *The person or immediate family member has a relationship with the reporting entity if the person:*
 - i. *Having joint control or control over the reporting entity;*
 - ii. *Has significant influence over the reporting entity;*
 - iii. *Key management personnel of the reporting entity or entity of the reporting entity.*
2. *An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:*
 - i. *The reporting entity and entity are members of the same business Company (such as the parent entity, subsidiary, and subsequent subsidiaries with respect to the entity).*
 - ii. *An entity is an associate or joint venture of another entity (associate entity or a joint entity which is a member of a business Company in which the other entity is its members),*
 - iii. *Both entities are joint ventures of the same*
 - iv. *An entity is a joint venture of a third entity and*
 - v. *The entity is a work reward for employee benefits from an entity reporter or entity associated with the reporting entity. If the reporting entity is an entity organizing the program, the sponsoring entity also relates to the reporting entity.*
 - vi. *Entities controlled or jointly controlled by persons identified in number (i).*
 - vii. *The person identified in number (1) (i) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity (or entity of the entity).*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL 3. **SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

d. Transaksi dengan Pihak-pihak berelasi (Lanjutan)

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut: (Lanjutan)
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan atau Pemerintah Daerah yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

e. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Perusahaan telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72.

d. *Transactions with Related Parties (Continued)*

2. An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following: (Continued)

viii. The entity, or a member of a Company to which it is a part, provides key management personnel service to the reporting entry or to the parent of the reporting entity.

Government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or influenced by the government. Government refers to government, government agencies and similar bodies both locally, nationally, and internationally.

Entities related to the Government can be entities that are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance or Local Governments which are shareholders of the entity, or entities controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs as the shareholder's proxy.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes.

e. *Financial Instrument*

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Company has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under SFAS 72.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL 3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (LANJUTAN) (CONTINUED)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran Awal (Lanjutan)

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (NWPKL), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Perusahaan untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

1. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
2. Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
3. Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
4. Nilai wajar melalui laba rugi (NWLR).

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

1. Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi (Instrumen Utang)

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

e. Financial Instrument (Continued)

Financial Assets (Continued)

Initial Recognition and Measurement (Continued)

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income (FVOCI), it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Company business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

1. Financial assets at amortized cost (debt instruments),
2. Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),
3. Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and
4. Fair value through profit or loss (FVTPL).

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

1. Financial Assets at Amortized Cost (Debt Instruments)

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (LANJUTAN)	3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)	e. <i>Financial Instrument (Continued)</i>
Aset Keuangan (Lanjutan)	<i>Financial Assets (Continued)</i>
<u>Pengakuan dan Pengukuran Awal (Lanjutan)</u>	<u><i>Initial Recognition and Measurement (Continued)</i></u>
Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori: (Lanjutan)	For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories: (Continued)
1. Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi (Instrumen Utang) (Lanjutan)	1. <i>Financial Assets at Amortized Cost (Debt Instruments) (Continued)</i>
Aset keuangan Perusahaan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk piutang usaha, piutang subsidi, piutang sewa, piutang lain-lain, pendapatan yang harus diterima, uang jaminan dan dana yang dibatasi penggunaannya.	<i>The Company financial assets at amortized cost includes account receivables, subsidy receivables, lease receivables, other receivables, accrued revenues, guarantee deposits and restricted funds.</i>
2. Aset Keuangan Pada NWPKL (Instrumen Utang)	2. <i>Financial Assets at FVOCI (Debt Instruments)</i>
Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.	<i>For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in the statement of profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.</i>
3. Aset Keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan	3. <i>Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and</i>
Pada pengakuan awal, Perusahaan dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang takterbantalkan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.	<i>Upon initial recognition, the Company can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 50 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.</i>

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL	3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)
e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)	e. Financial Instrument (Continued)
Aset Keuangan (Lanjutan)	Financial Assets (Continued)
Pengakuan dan Pengukuran Awal (Lanjutan)	Initial Recognition and Measurement (Continued)
Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori: (Lanjutan)	For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories: (Continued)
3. Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan (Lanjutan)	3. Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and (Continued)
Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.	Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in the profit or loss when the right of payment has been established.
Perusahaan memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.	The Company elected to classify irrevocably its non-listed equity investments under this category.
4. Aset Keuangan pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (NWLR)	4. Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)
Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.	Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.
Deratif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Deratif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.	A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL 3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan Perusahaan) ketika:

1. Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir, atau
2. Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Perusahaan telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Perusahaan telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan 'pass-through', Perusahaan mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Perusahaan masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Perusahaan tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Perusahaan tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Perusahaan.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Perusahaan untuk membayar kembali.

e. Financial Instrument (Continued)

Financial Assets (Continued)

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a Company of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Company's statement of financial position) when:

1. The rights to receive cash flows from the asset have expired, or
2. The Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Company has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Company continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Company also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Company has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Company could be required to repay.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL 3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (LANJUTAN) (CONTINUED)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya amortisasi, nilai wajar melalui laba rugi (NWLR) atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan dikelompokkan sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Perusahaan menetapkan liabilitas keuangan mencakup utang usaha, utang lain-lain, utang kontraktor, beban akrual, utang bank, utang retensi, liabilitas sewa dan uang jaminan pelanggan yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pengakuan Selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

e. *Financial Instrument (Continued)*

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at amortized cost, fair value through profit or loss (FVTPL) or through comprehensive income (FVOCI).

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Company designates its financial liabilities include accounts payable, other payable, contractors payable, accrued expenses, bank loan, retention payable, lease liabilities and Customer's security deposit which are classified as financial liabilities at amortized cost. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

Subsequent Measurement

After initial recognition, interest - bearing financial liabilities at amortized cost are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Gains or losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or canceled or expires.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL 3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (LANJUTAN) (CONTINUED)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Penghentian Pengakuan (Lanjutan)

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilainya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau harga yang diminta pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (arm's length market transactions), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lainnya.

e. *Financial Instrument (Continued)*

Financial Liabilities (Continued)

Derecognition (Continued)

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Fair Value of Financial Instrument

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market bid or ask prices at the close of business at the end of the reporting period. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques.

Such techniques may include using recent arm's length market transaction, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL 3. **SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)**

f. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Piutang Usaha

Piutang usaha dicatat dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai. Perusahaan menetapkan penyisihan penurunan nilai berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang masing-masing pelanggan pada akhir tahun berdasarkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan".

h. Piutang Lain-lain

Piutang lain-lain adalah hak tagih terhadap pihak lain atas kas, jasa dari kegiatan diluar kegiatan utama Perusahaan. Misalnya piutang pegawai.

i. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan Pendapatan Tagihan yang timbul dari penjualan yang telah diakui dan pembayarannya akan diterima yang tagihan invocenya belum diterbitkan dicatat ke dalam akun pendapatan yang masih harus diterima.

j. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang akan dialokasikan selama masa manfaat atas masing-masing biaya tersebut. Biaya dibayar dimuka berfungsi antara lain untuk membiayai operasional tidak lebih dari satu tahun setelah tanggal laporan posisi keuangan Perusahaan. Biaya dibayar dimuka diakui pada saat pengeluaran uang dilakukan tetapi barang/jasa manfaat belum diterima. Biaya dibayar dimuka berkurang pada saat barang/jasa/manfaat diterima atau habis masanya.

f. Cash and Cash Equivalent

For the purpose of presentation of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash on hand, in banks and all investments which mature within three months or less from the date of acquisition and which are not pledged and unrestricted.

g. Trade Receivables

Trade receivables are recorded net of an allowance for impairment. The Company provide allowance for impairment based on the review of the status of the individual receivable accounts at the end of the year based on SFAS 71 "Financial Instrument".

h. Other Receivable

Other receivables are receivables from other parties for cash, services from activities outside the main activities of the Company. For example, employee receivables.

i. Accrued Revenues

Accrued revenue is Revenue Receivables arising from sales that have been recognized and payments to be received whose invoices have not been issued are recorded in the accrued income account.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses represent costs that will be allocated over the useful life of each of these costs. Prepaid expense function, among others, to finance operations no later than one year after the date of the Company's statement of financial position. Prepaid expenses are recognized when the money is disbursed but goods/services/benefits have not been received. Prepaid expenses are reduced when the goods/services/benefits are received or expire.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL 3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (LANJUTAN)

k. Uang Muka

Uang muka adalah uang yang telah dibayarkan namun belum diakui sebagai beban atau belum dibebankan dikarenakan belum lengkap secara dokumentasi atau belum dipertanggungjawabkan oleh user. Uang muka dilakukan dalam kegiatan yang bersifat swakelola yang pencairan dananya dilakukan melalui metode SPU. Selain itu kas kecil yang telah dibelanjakan namun belum dipertanggungjawabkan oleh pemegang kas kecil dicatat sebagai uang muka.

I. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Persediaan bahan baku dan bahan pembantu dihitung dengan menggunakan metode rata-rata, dan persediaan barang jadi dihitung dengan menggunakan metode rata-rata produksi. Biaya perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja serta alokasi biaya pabrikasi yang dapat diatribusi secara langsung baik yang bersifat tetap maupun variabel. Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya penjualan.

Perusahaan menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

m. Aset Tetap

Perusahaan menggunakan metode biaya untuk pengukuran aset tetapnya. Aset tetap, setelah pengakuan awal, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Perusahaan menghitung aset tetap menggunakan metode garis lurus. Taksiran masa manfaat ekonomis untuk masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	Tahun/ Year	Asset Type
Sarana Perkeretaapian	4-30	Railway Facilities
Prasarana Perkeretaapian	4-8	Railway Infrastructures
Reovasi Gedung	8	Renovation of Office Buildings
Inventaris Kantor	4-10	Office Equipments

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (CONTINUED)

k. Advances

Advances are money that has been paid but has not been recognized as an expense or has not been charged due to incomplete documentation or not yet accounted for by the user. Advances are carried out in self managed activities where the disbursement of funds is carried out through the SPU method. In addition, petty cash that has been spent but has not been accounted for by petty cash holders is recorded as an advances.

I. Inventory

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Inventories of raw materials and auxiliaries are calculated using the average method, and finished goods inventory is calculated using the average production method. The cost of the finished goods and the goods in the process consists of the cost of raw materials, labor and the allocation of manufacturing costs that can be directly attributed either fixed or variable. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated cost of completion and the cost of the sale.

The Company provides allowance for net realizable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.

m. Fixed Assets

The Company uses the cost method for measuring its fixed assets. Fixed assets, after initial recognition, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Depreciation of property, plant and equipment is computed using the straight-line method for building and double declining balances for non-building. The estimated useful lives of the individual property and equipment are as follows:

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL 3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (LANJUTAN) (CONTINUED)

m. Aset Tetap (Lanjutan)

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, terjadi sehubungan dengan penyelesaian aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian.

Biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Suatu aset tetap dihentikan pengakuan pada saat dilepaskan atau saat tidak terdapat manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan konsolidasian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuan.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, masa manfaat, dan metode penyusutan atas aset tetap ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

n. Aset Takberwujud

Aset takberwujud merupakan biaya atas perolehan piranti lunak komputer yang tidak terintegrasi dengan piranti keras dikapitalisasi berdasarkan biaya terjadinya untuk mendapatkan dan menyiapkan piranti lunak sampai siap digunakan. diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama masa manfaatnya, yaitu empat tahun.

m. Fixed Assets (Continued)

Self-constructed fixed assets are presented as part of fixed assets as "Construction in Progress" and are stated at cost. All costs, including borrowing costs, incurred in connection with the completion of the asset are capitalized as part of the cost of fixed assets in progress.

The cost of fixed assets in progress does not include any internal profits, abnormal amounts of wasted costs incurred in the use of raw materials, labor or other resources.

The accumulated acquisition cost will be transferred to the appropriate item of fixed assets when the asset is completed or ready for use and is depreciated since operating.

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

The residual values, useful lives, and methods of depreciation of fixed assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

n. Intangible Assets

Intangible asset is the costs associated with the acquisition of computer software which is not integrated with related hardware are capitalised based on costs incurred to acquire and prepare the software until ready to use. These costs are amortised using the straight-line method over their estimated useful lives, which is four years.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(LANJUTAN)**

n. Aset Takberwujud (Lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya.

o. Utang Usaha dan Utang Lain-lain

Utang usaha adalah liabilitas yang timbul karena pengadaan kebutuhan barang dan/atau jasa untuk pelaksanaan aktivitas operasi Perusahaan. Utang usaha meliputi utang kepada pihak ketiga (vendor) untuk pengadaan barang dan/atau jasa.

Nilai utang usaha yang dimaksud terdiri dari jumlah pokok utang dan bunga (jika ada), dan tidak ada diskonto/premium dan biaya transaksi atas utang usaha tersebut.

Sehingga secara umum, jumlah tercatat utang usaha sama dengan jumlah terutang dan tidak ada amortisasi diskon/premium dan biaya transaksi.

Utang usaha dikelompokan menjadi dua bagian:

- Utang usaha kepada pihak berelasi merupakan pinjaman yang diberikan oleh pemegang saham di luar setoran modal atau pembelian barang atau jasa maupun pinjaman yang diperoleh dari perusahaan afiliasi.
- Utang usaha kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang timbul dalam rangka kegiatan normal operasi Perusahaan. Utang ini dicatat jika hak kepemilikan barang sudah berpindah kepada perusahaan. Dilihat dari jumlahnya, yang dicatat adalah sebesar jumlah yang akan dibayar yaitu harga faktur.

**3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(CONTINUED)**

n. Intangible Assets (Continued)

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the profit or loss when the asset is derecognized.

o. Account Payables and Other Payable

Account payables are liabilities arising from the procurement of goods and/or services for the implementation of the Company's operating activities. Account payables include debts to third parties (vendors) for the procurement of goods and/or services.

The value of account payables in question consists of the principal amount owed and interest (if any), and there is no discount/premium and transaction costs for these account payables.

So in general, the carrying amount of trade payables is the same as the amount payable and there is no amortization of discounts/premiums and transaction costs.

Accounts payable are Companied into two parts:

- *Accounts payable to related parties is a loan provided by the shareholders excluding the capital contribution or the purchase of goods or services as well as loans obtained from affiliated companies.*
- *Accounts payable to third parties is an obligation that arises in the course of the normal operations of the Company. This payable is recorded when the ownership rights to the goods have been transferred to the Company. Judging from the amount, what is recorded is the amount to be paid, namely the invoice price.*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(LANJUTAN)

p. Perpajakan

• Pajak Penghasilan Final

Beban pajak final diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak. Bila penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final, perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset dan liabilitas tangguhan.

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan.

• Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui ke penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada akhir periode pelaporan.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(CONTINUED)

p. Taxes

• Final Income Tax

The final tax expense is recognized proportionately with the amount of revenue recognized under the accounting in the current year. The difference between the final income tax that been paid and the amount charged to the profit and loss and other comprehensive income statement is recognized as prepaid tax or tax debt. Where income has been subject to final income tax, the difference between the carrying value of assets and liabilities on their tax bases is not recognized as deferred assets and liabilities.

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognize losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

• Current Income Tax

The income tax expense consists of current and deferred taxes. Taxes are recognized in the statements of profit and loss and other comprehensive income, unless the taxes relate to transactions or events recognized to other comprehensive income or directly to equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity.

Current income tax expense is calculated using the tax rates applicable at the end of the reporting period.

The amount of unpaid current tax for the current and prior periods is recognized as a liability. If the amount of tax paid for the current and prior periods exceeds the amount of tax payable for those periods, the excess is recognized as an asset. The current tax liability (asset) for the current and prior periods is measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, calculated using tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the end of the period reporting.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(LANJUTAN)

p. Perpajakan (Lanjutan)

• Pajak Kini (Lanjutan)

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai asset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

• Pajak Tangguhan

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

1. Pengakuan awal goodwill; atau
2. Pengakuan awal aset atau liabilitas dan transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah liabilitasnya.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(CONTINUED)

p. Taxes (Continued)

• Current Income Tax (Continued)

The benefit relating to a tax loss that can be carried forward to recover current tax of a previous period is recognized as an asset. Deferred tax assets are recognized for the carry-forward of unused tax losses and unused tax credits to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

• Deffered Tax

A deferred tax liability is recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

1. *The initial recognition of goodwill; or*
2. *The initial recognition of an asset or liability in transaction which is not a business combination and at the time of the transaction, affect neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).*

A deferred tax asset is recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to be applied to the period when the asset is recovered or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(LANJUTAN)

p. Perpajakan (Lanjutan)

• Pajak Tangguhan (Lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Perusahaan mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalkan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Perusahaan melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

1. Perusahaan memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
2. Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. Entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulikkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Perusahaan melakukan saling hapus atas pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Perusahaan:

1. Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
2. Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(CONTINUED)

p. Taxes (Continued)

• Deffered Tax (Continued)

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of the reporting period. The Company reduces the carrying amount of deferred tax assets if it is probable that sufficient taxable profit will no longer be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. Any such deduction is reversed on the deferred tax assets until it is probable that the available taxable profit will be sufficient.

The Company offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if:

1. The company has a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities; and
2. Deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income tax imposed by the same taxation authority on:
 - i. The same taxable entity; or
 - ii. A different taxable entity that intends to recover current tax assets and liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of the deferred tax assets or liabilities are expected to be settled or recovered.

The Company offsets current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Company:

1. Has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and
2. Intends to settle on a net basis or realize the asset and settle the liability simultaneously:

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(LANJUTAN)

p. Perpajakan (Lanjutan)

• Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

1. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
2. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(CONTINUED)

p. Taxes (Continued)

• Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

1. *When the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
2. *When receivables and payables are stated with the amount of VAT included.*

The net amount of VAT recoverable from, or payable to, the taxation authorities is included as part of receivables or payables in the statement of financial position.

q. Imbalan Kerja

(i) Imbalan Kerja

Pada bulan April 2022, DSAK IAI (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK 24: Imbalan Kerja yang diadopsi dari IAS 19 Employee Benefits. Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam IFRS Interpretation Committee (IFRIC) Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19). Perusahaan telah menerapkan materi penjelasan tersebut dan dengan demikian merubah kebijakan akuntansi menyangkut atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari yang kebijakan yang diterapkan sebelumnya pada laporan keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

q. Employee Benefits

(i) Employee Benefits

In April 2022, DSAK IAI (Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board) issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK 24: Employee Benefits which was adopted from IAS 19 Employee Benefits. The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the Labor Law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS Interpretation Committee (IFRIC) Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service (IAS 19). The Company has adopted the said explanatory material and accordingly changed its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service previously applied in the financial statements of the Company as of December 31, 2022 and for the year then ended.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(LANJUTAN)

q. Imbalan Kerja (Lanjutan)

(i) Imbalan Kerja (Lanjutan)

Perusahaan mempunyai program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat.

Perusahaan juga mencatat penyisihan manfaat tambahan selain program dana pensiun tersebut di atas untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Undang-undang No. 11/2020 (Undang-undang Cipta Kerja). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode Projected Unit Credit.

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, efek dari plafon aset, tidak termasuk jumlah yang termasuk dalam bunga bersih atas liabilitas manfaat pasti bersih dan pengembalian aset program (tidak termasuk jumlah yang termasuk dalam bunga bersih atas liabilitas imbalan pasti bersih) segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

1. Ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
2. Ketika Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Perusahaan mengakui perubahan berikut pada liabilitas obligasi neto pada akun Beban Pokok Penjualan dan Beban Umum dan Administrasi pada laba rugi:

1. Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (curtailment) tidak rutin, dan
2. Beban atau penghasilan bunga neto.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(CONTINUED)

q. Employee Benefits (Continued)

(i) Employee Benefits (Continued)

The Company have defined contribution retirement plans covering all their qualified permanent employees.

The Company also provides additional provisions on top of the benefits provided under the above mentioned defined contribution pension programs in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Law No. 11/2020 (the "Job Creation Law"). The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, the effect of the asset ceiling, excluding the amounts included in the net interest on the net defined benefit liability and the return on plan assets (excluding the amounts, included in net interest on the net defined benefit liability) are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

1. *The date of the plan amendment or curtailment, and*
2. *The date the Company recognizes related restructuring costs.*

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The Company recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Revenues" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the profit or loss:

1. *Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains or losses on curtailments and non-routine settlements, and*
2. *Net interest expense or income.*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(LANJUTAN)

q. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif

Pesangon

Perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal diantara:

1. Ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
2. Ketika Perusahaan mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Perusahaan mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

r. Pengakuan pendapatan dan beban

Perusahaan melakukan penerapan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(CONTINUED)

q. Employee Benefits (Continued)

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits consist of wages, salaries, bonus and incentive.

Termination Benefits

The Company recognizes a liability and expenses for termination benefits at the earlier of the following dates

1. The date of the plan amendment or curtailment, and
2. The date the Company recognizes related restructuring costs.

The Company measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

r. Recognizing revenue and expenses

The company implements PSAK 72 which requires revenue recognition to fulfill the 5 steps of analysis as follows:

1. Identify contracts with customers.
2. Identification of performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to deliver goods or services to deliver goods or services that have different characteristics to customers.
3. Transaction pricing. The transaction price is the amount of consideration that an entity is entitled to receive as compensation for delivering the promised goods or services to customers. If the fee promised to the customer is reduced by the estimated amount of service performance guarantee to be paid during the contract period.
4. Allocation of the transaction price to each performance obligation using the basis of the relative stand-alone selling prices of each different good or service promised in the contract.
5. Recognition of revenue when the performance obligation has been fulfilled by delivering the promised goods or services to the customer (when the customer has control over the goods or services).

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(LANJUTAN)

r. Pengakuan pendapatan dan beban (Lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi:

1. Pada suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
2. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Kriteria pengakuan tertentu berikut harus dipenuhi sebelum pengakuan pendapatan diakui:

1. Pendapatan tiket diakui pada saat jasa angkutan telah selesai diberikan.
2. Pendapatan Non-tiket yang diterima dimuka disajikan sebagai "Pendapatan diterima di muka". Pendapatan Non-tiket diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa kontrak ditambah dengan bagi hasil, apabila ada.
- 3 Subsidi sarana dan prasarana diakui sebagai pendapatan berdasarkan berita acara verifikasi bulanan yang disepakati bersama antara Perusahaan dan Pemerintah, dimana disepakati jumlah subsidi yang akan dibayarkan oleh Pemerintah dan telah diakui sebagai kewajiban oleh Pemerintah. Nilai subsidi yang diakui oleh Pemerintah pada akhir tahun adalah sesuai dengan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pendapatan Subsidi diakui sesuai dengan realisasi pada kontrak subsidi dalam periode berjalan pada tahun bersangkutan. Atas uang muka subsidi dicatat sebagai utang uang muka/pendapatan ditangguhkan dan dilakukan perhitungan dikemudian sebagai pengurang pembayaran atas subsidi setelah verifikasi data. Atas beban dan biaya yang berkaitan dengan pendapatan subsidi disajikan kedalam beban pokok pendapatan subsidi.

Beban diakui pada saat terjadinya, kecuali biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan konstruksi proyek LRT Jakarta dikapitalisasi pada aset dalam penyelesaian.

3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(CONTINUED)

r. Recognizing revenue and expenses (Continued)

A performance obligation may be satisfied:

1. At a point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
2. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

The following specific recognition criteria must be met before revenue recognition will be recognized:

1. At a point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
2. Non-Farebox revenues received in advance are presented as "Unearned Revenues". Non-farebox revenue are recognized as revenue on straight-line basis over the contract period plus revenue and/or profit sharing, if any.
- 3 Facilities and infrastructure subsidy is recognized as revenue based on a monthly verification report in which the amount of subsidy to be paid by the Government is agreed and recognized as an obligation by the Government. The final subsidy amount recognized by the Government at the end of the year is based on audit result of AuditBoard of Republic of Indonesia.

Subsidy Income is recognized in accordance with the realization in the subsidy contract in the current period of the year. The down payment for subsidies is recorded as advance payment/deferred income and is calculated later as a deduction for subsidies after data verification. The expenses and expenses related to subsidized income are presented in the cost of subsidized income.

Expenses are recognized when incurred, except for the costs incurred in connection with the construction of Jakarta LRT's project which are capitalized as construction in progress.

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(LANJUTAN)**

s. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

t. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (probable) arus masuk manfaat ekonomi.

4. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

a. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan yang diakui dalam laporan keuangan.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi ditetapkan PSAK 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

**3. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
(CONTINUED)**

s. Provision

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

t. Contingencies

Unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

4. ACCOUNTING, ESTIMATION JUDGEMENT, AND ASSUMPTION

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about such assumptions and estimates may result in material adjustments to the carrying amount of assets and liabilities in the subsequent reporting period.

a. Consideration

The following considerations are made by management in the context of implementing the company's accounting policies that have the most significant influence recognized in the financial statements.

Classification of Assets and Liabilities

The Company determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities taking into account when the defined definition of SFAS 71 is met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in the Company's accounting policies.

4. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 4. ACCOUNTING, ESTIMATION JUDGEMENT, AND (LANJUTAN) ASSUMPTION (CONTINUED)

a. Pertimbangan (Lanjutan)

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang di lingkungan ekonomi primer tempat entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional adalah Rupiah.

a. Consideration (Continued)

Functional Currency Determination

The Company's functional currency is the currency in the primary economic environment in which it operates. The currency is the currency that affects the income and expenses of the services rendered. Based on the Company's management's assessment, the functional currency is Rupiah.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode/tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasa atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

b. Estimates and Assumptions

The principal assumptions of the future and other principal sources of estimation of other uncertainties at the reporting date which have significant risks for material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities for subsequent periods / years are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on the parameters available at the time the financial statements are prepared. Assumptions and situations regarding future developments may change as a result of a change of pace or situation beyond the control of the Company. The changes are reflected in the related assumptions as they occur.

Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian atas Piutang Usaha

Perusahaan menetapkan penyisihan penurunan nilai piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari ECL. Matriks provisi digunakan untuk menghitung ECL untuk piutang usaha dan lain-lain. Tarif penyisihan didasarkan pada hari tunggakan untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Allowance for Expected Credit Losses of Accounts Receivables

The Company estimates impairment allowance for accounts receivables using simplified approach of ECL. A provision matrix is used to determine ECL for accounts receivables, where the allowance rates are based on days past due for Companyings of various customer segments that have similar loss patterns.

Matriks penyisihan awalnya didasarkan pada riwayat tingkat kerugian pelanggan. Perusahaan akan melakukan penyesuaian pengalaman kerugian historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi yang terkait erat dengan riwayat tingkat kerugian diperkirakan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar pada sektor-sektor pelanggan beroperasi, riwayat tingkat kerugian disesuaikan.

The provision matrix is initially based on the customers historical observed loss rates. The Company will adjust the historical observed loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions closely related to the historical observed loss are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the sectors where customers are operating, the historical losses are adjusted accordingly.

4. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI 4. ACCOUNTING, ESTIMATION JUDGEMENT, AND (LANJUTAN) ASSUMPTION (CONTINUED)

b. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian atas Piatang Usaha (Lanjutan)

Pada setiap tanggal pelaporan, riwayat tingkat gagal bayar yang diamati diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

Evaluasi atas korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan ECL, adalah estensi signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Kerugian kredit historis Perusahaan dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili tingkat gagal bayar pelanggan aktual di masa depan.

Penentuan Nilai Wajar dari Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model arus kas terdiskonto.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Perusahaan mengestimasi masa manfaat dari aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar.

Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perusahaan terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan diatas.

b. Estimates and Assumptions (Continued)

Allowance for Expected Credit Losses of Accounts Receivables (Continued)

At every reporting date, the historical observed loss rates are updated and changes in the forward looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed loss rates, forecast economic conditions and ECLs, is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Company's historical observed loss rate and forecast of economic conditions may not be representative of customer's actual default in the future.

Determination of Fair Values of Financial Assets and Financial Liabilities

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position cannot be derived from active markets, their fair values are determined using valuation techniques including the discounted cash flow model.

The judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair values of financial instruments.

Estimating Useful Lives of Fixed Assets

The Company estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behavior.

The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Company assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

4. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

b. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap (Lanjutan)

Jumlah dan waktu dari beban yang dicatat untuk setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Pengurangan dalam estimasi masa manfaat dari aset tetap Perusahaan akan meningkatkan beban operasi dan menurunkan aset tidak lancar yang dicatat.

Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 50 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya.

Estimasi atas Suku Bunga Pinjaman Inkremental ("SBPI") dari Suatu Sewa

Perusahaan tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Perusahaan menggunakan SBPI untuk mengukur liabilitas sewa. SBPI adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Perusahaan untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama.

Dengan demikian, SBPI mencerminkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh Perusahaan, yang perlu diestimasi ketika tidak ada tingkat bunga yang dapat langsung diamati (seperti untuk entitas dalam Perusahaan yang tidak melakukan transaksi pembiayaan) atau ketika tingkat bunga perlu disesuaikan untuk mencerminkan persyaratan dan kondisi sewa.

Perusahaan menetapkan estimasi SBPI menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk membuat estimasi spesifik untuk entitas tertentu jika diperlukan.

Penurunan Nilai Aset Non - Keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi setiap tahun pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, estimasi jumlah yang dapat dipulihkan akan dilakukan dan kerugian penurunan nilai akan diakui sejauh jumlah tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah yang dapat diperoleh kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai wajar yang lebih tinggi dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

4. ACCOUNTING, ESTIMATION JUDGEMENT, AND ASSUMPTION (CONTINUED)

b. *Estimates and Assumptions (Continued)*

Estimating Useful Lives of Fixed Assets (Continued)

The amounts and timing of recorded expenses for any year will be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of the Company's fixed assets will increase the recorded operating expenses and decrease non-current assets.

The management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 4 to 50 years, which are common life expectancies applied in the industry where the Company conducts its business.

Estimating the Incremental Borrowing Rate ("IBR") of a Lease

The Company cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its IBR to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Company would have to pay to borrow over a similar term.

The IBR therefore reflects interest the Company would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available (such as for entities within the Company that do not enter into financing transactions) or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease.

The Company estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates as necessary.

Impairment of Non - Financial Assets

In accordance with the Company accounting policy, each asset or cash-generating unit is evaluated every reporting year to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of recoverable amount is performed and an impairment loss recognized to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash-generating company of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

4. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

b. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Non - Keuangan (Lanjutan)

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang ekspektasi operasi dan volume pendapatan, harga tiket, biaya operasi, serta belanja modal di masa depan.

Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah aset yang dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa atau semua aset mungkin akan mengalami penurunan nilai atau biaya penurunan nilai dikurangi dengan dampak yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

4. ACCOUNTING, ESTIMATION JUDGEMENT, AND ASSUMPTION (CONTINUED)

b. Estimates and Assumptions (Continued)

Impairment of Non - Financial Assets (Continued)

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected operations and revenue volumes, ticket prices, operating costs, and future capital expenditure.

These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence, there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired or the impairment charge reduced with the impact recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Realisasi dari Pajak Tangguhan

Perusahaan melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai sebesar kemungkinan aset tersebut tidak dapat direalisasikan, dimana penghasilan kena pajak yang tersedia memungkinkan untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Perusahaan atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan permanen yang dapat dikurangkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya.

Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana juga dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Tetapi tidak terdapat kepastian bahwa Perusahaan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

Estimasi Beban Imbalan Kerja Karyawan

Imbalan karyawan ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Penilaian aktuaris termasuk membuat variasi asumsi yang terdiri dari, antara lain, tingkat diskonto, tingkat pengembalian dana pensiun yang diharapkan, tingkat kenaikan kompensasi dan tingkat kematian.

Realization of Deferred Tax Assets

The Company reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. The Company assessment on the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences is based on the level and timing of forecasted taxable income of the subsequent reporting period.

This forecast is based on the Company past results and future expectations on revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Company will generate sufficient taxable income to allow all or part of deferred tax assets to be utilized.

Estimation of Employee Benefits

Employee benefits are determined using the Projected Unit Credit method. Actuarial valuation includes making various assumptions which consist of, among others, discount rates, expected rates of return on plan assets, rates of compensation increases and mortality rates.

4. ESTIMASI, ASUMSI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

b. Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

Estimasi Beban Imbalan Kerja Karyawan (Lanjutan)

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan oleh Perusahaan langsung diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan atas asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material atas estimasi liabilitas imbalan karyawan dan beban imbalan karyawan neto.

Perusahaan percaya bahwa asumsi mereka adalah memadai dan tepat, perbedaan signifikan dalam pengalaman aktual Perusahaan atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat mempengaruhi secara material beban dan kewajiban pensiun dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Semua asumsi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan.

4. ACCOUNTING, ESTIMATION JUDGEMENT, AND ASSUMPTION (CONTINUED)

b. Estimates and Assumptions (Continued)

Estimation of Employee Benefits (Continued)

Actual results that differ from the assumptions set forth by the Company are recognized immediately in profit or loss as incurred. While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions used can materially affect the estimated liability for employee benefits and employee benefits expense.

While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company actual experience or significant changes in its assumptions may materially affect the costs and obligations of pension and other long-term employee benefits. All assumptions are reviewed at each reporting date.

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2023	2022	
Akun ini terdiri dari:			<i>This account consists of:</i>
Kas			Cash
Kas Operasional	133.000.000	8.000.000	<i>Cash Operational</i>
Kas <i>Ticket</i>			<i>Cash Ticket</i>
<i>Vending Machine</i>	27.210.000	--	<i>Vending Machine</i>
<i>Kas Passenger</i>			<i>Cash Passenger</i>
<i>Service Machine</i>	24.822.200	11.382.200	<i>Service Machine</i>
Sub Jumlah	185.032.200	19.382.200	Sub Total
Bank			Bank
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.832.831.879	15.056.033.585	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15.158.741.640	270.215.849	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Central Asia (Persero) Tbk	206.293.690	168.585.245	<i>PT Bank Central Asia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	40.108.297	467.248.399	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta	39.895.675.424	23.049.024.130	<i>PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta</i>
Sub Jumlah	69.133.650.930	39.011.107.208	Sub Total

PT LRT JAKARTA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 31 DESEMBER 2023

(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) (Amount expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

PT LRT JAKARTA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEAR THEN ENDED
 DECEMBER 31, 2023

5. KAS DAN SETARA KAS (LANJUTAN)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (CONTINUED)

	2023	2022	
Deposito Berjangka			Time Deposite
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	45.000.000.000	45.000.000.000	PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	6.322.982.235	--	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank DKI Syariah	--	30.000.000.000	PT Bank DKI Syariah
Sub Jumlah	51.322.982.235	75.000.000.000	Sub Total
Jumlah Kas dan Setara Kas	120.641.665.365	114.030.489.408	Total Cash And Eqivalents

	2023	2022	
Jangka Waktu Nisbah	1 Bulan / Month 63,9% - 68,89%	1 Bulan / Month 52-67%	Term of Time Sharing
Jumlah Kas dan Setara Kas	120.641.665.365	114.030.489.408	

Tidak ada kas setara kas yang dibatasi penggunaannya.

Saldo pada PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta merupakan dana operasional PT LRT Jakarta hasil pendapatan subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (Dishub).

There is no restricted cash and cash equivalents.

The balance at PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta is operational funds for PT LRT Jakarta resulting from subsidy income from the DKI Jakarta Provincial Government through the DKI Jakarta Provincial Transportation Service (Dishub).

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE RECEIVABLES

	2023	2022	
Akun ini terdiri dari:			
Pihak Berelasi			This account consists of: Related Parties
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	2.184.274.072	2.522.422.222	PT Jakarta Infrastruktur Propertindo
PT Jakarta Konsultindo	427.500.000	--	PT Jakarta Konsultindo
PT Jakarta Propertindo	6.190.881	6.190.881	PT Jakarta Propertindo
Sub Jumlah Pihak Berelasi	2.617.964.953	2.528.613.103	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Len Rekaprima Semesta	871.124.382	--	PT Len Rekaprima Semesta
PT Fintek Karya Nusantara	705.206.423	832.500.000	PT Fintek Karya Nusantara
PT Fatlanay Mulia Jaya	691.777.086	--	PT Fatlanay Mulia Jaya
Piutang Pihak Ketiga Dibawah 500 Juta Rupiah	670.525.109	65.394.855	Third Party Receivables Under 500 Million Rupiah
Sub Jumlah Pihak Ketiga	2.938.633.000	897.894.855	Total Third Parties
Dikurangi:			Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(86.567.900)	--	Allowance for Impairment Losses on Receivable
Sub Jumlah Pihak Ketiga - Bersih	2.852.065.100	897.894.855	Sub Total
Jumlah	5.470.030.053	3.426.507.958	Third Parties - Net
			Total

6. PIUTANG USAHA (LANJUTAN)

Piutang Usaha berdasarkan (hari)
 adalah sebagai berikut:

	2023	2022	Trade receivables by age (days) as follow:
Belum Jatuh Tempo	--	--	Not Over Due
Jatuh Tempo:			Over Due:
1 - 90 hari	2.228.446.576	905.914.855	1 - 90 days
90 -180 hari	--	--	90 - 180 days
> 180 hari	3.328.151.377	2.530.593.103	> 180 days
Sub Jumlah	5.556.597.953	3.436.507.958	Sub Total
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(86.567.900)	--	Allowance for Impairment Losses on Receivable
Jumlah	5.470.030.053	3.436.507.958	Total
Mutasi Cadangan Kerugian Piutang			Movement of Allowance for Losses on Receivables
	2023	2022	
Saldo Awal	--	--	Beginning Balance
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	(86.567.900)	--	Allowance For Impairment Losses on Receivable
Tahun Berjalan	--	--	For The Current Year
Pemulihan Cadangan Kerugian Piutang	--	--	Recovery of Allowance For Trade Receivable
Tahun Berjalan	--	--	For The Current Year
Penghapusan Piutang	--	--	Write-off Receivables
Jumlah	(86.567.900)	--	Total

Piutang usaha kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) merupakan piutang subsidi, piutang kepada PT Jakarta Infrastruktur Propertindo atas jasa advertising dan piutang kepada PT Jakarta Konsultindo atas jasa pengurusan study AMDAL dan ANDALALIN Flyover Rorotan.

7. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Akun ini terdiri dari:
 PT Angkasa Pura II
 Bunga Deposito

**Jumlah Pendapatan
Yang Masih Harus Diterima**

	2023	2022	This account consists of: PT Angkasa Pura II Deposit Interest
	1.992.496.101	1.156.318.725	
	481.183.250	523.891.953	
Jumlah Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	2.473.679.351	1.680.210.678	Total Accrued Revenues

8. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

Akun ini terdiri dari:

Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) - Masukan
Jumlah

	2023	2022	This account consists of: Value Added Tax - In Total
	120.966.635	758.993.967	
Jumlah	120.966.635	758.993.967	

PT LRT JAKARTA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 31 DESEMBER 2023

(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) (Amount expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

PT LRT JAKARTA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEAR THEN ENDED
 DECEMBER 31, 2023

8. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

8. TAXATION (CONTINUED)

b. Utang Pajak

	2023	2022	
Akun ini terdiri dari:			<i>This account consists of:</i>
Pajak Penghasilan:			<i>Income Tax:</i>
Pasal 21	1.687.581.623	951.039.892	Article 21
Pasal 23	417.061.580	395.385.062	Article 23
Pasal 4 ayat 2	338.634.733	76.199.092	Article 4 (2)
Jumlah	2.443.277.936	1.422.624.046	Total

c. Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

	2023	2022	
Laba			<i>Profit</i>
Sebelum Pajak	19.650.452.433	10.987.812.983	<i>Before Income Tax</i>
Koreksi fiskal:			<i>Correction Fiskal:</i>
Koreksi Positif:			Positive Correction:
Beban Imbalan			<i>Post - employment</i>
Pasca Kerja	1.849.818.351	2.778.663.667	<i>Benefit Expenses</i>
Beban Yang			<i>Non - Deductible Expenses</i>
Tidak Dapat Dikurangkan	5.254.654.099	3.026.612.238	<i>Bonus and Production Services Expenses</i>
Beban Tantiem			<i>Bad Debt Expenses</i>
dan Jasa Produksi	4.325.871.189	--	<i>Total</i>
Beban Penyisihan Piutang	86.567.900	--	
Jumlah	11.516.911.539	5.805.275.905	
Koreksi Negatif			<i>Negative Correction:</i>
Penyusutan			<i>Depreciation</i>
Aset Tetap	(2.871.687.765)	(2.871.687.765)	<i>of Fixed Assets</i>
Penghasilan Final	(2.294.036.978)	(289.464.885)	<i>Final Taxable</i>
Bunga Deposito	(3.259.861.608)	(1.902.390.068)	<i>Interest Deposit</i>
Pembayaran			<i>Post - employment</i>
Imbalan Pasca kerja	(735.614.483)	--	<i>Benefit Payments</i>
Jumlah	(9.161.200.834)	(5.063.542.718)	<i>Total</i>
Jumlah Koreksi Fiskal	2.355.710.705	741.733.187	Total Fiscal Correction
Laba Sebelum Kompensasi Rugi Fiskal	22.006.163.138	11.729.546.170	<i>Income Before Tax Loss Compensation</i>
Kompensasi Rugi Fiskal Penghasilan Kena Pajak			<i>Compensation for Fiscal Losses in Taxable Income:</i>
2018	--	(13.929.376.512)	2018
2019	(58.362.698.381)	(58.362.698.381)	2019
2020	--	3.920.370.723	2020
2021	--	3.764.466.669	2021
2022	5.485.007.050	--	2022
Jumlah	(52.877.691.331)	(64.607.237.501)	Total
Akumulai Rugi Fiskal	(30.871.528.193)	(52.877.691.331)	<i>Accumulated Prior Year Fiscal Loss</i>

PT LRT JAKARTA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 31 DESEMBER 2023

(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) (Amount expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

PT LRT JAKARTA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEAR THEN ENDED
 DECEMBER 31, 2023

8. PERPAJAKAN (LANJUTAN)

8. TAXATION (CONTINUED)

d. Pajak Tangguhan

d. Deffered Tax

	2023			
	Dikreditkan (Dibebankan) Ke Laporan Laba Rugi/ Credited (Charged) to Statement of Profit or Loss	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain / Credited (Charged) to Other Comprehensive Income		31 Desember 2023/ December 31, 2023
Penyusutan Aset Tetap Tetap	(1.368.837.834)	737.066.526	--	(631.771.308)
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	399.010.625	406.960.037	484.410.262	1.290.380.924
Rugi Fiskal	11.633.092.093	(4.841.355.890)	--	6.791.736.203
Tantiem dan Jaspro	--	1.341.693.208	--	1.341.693.208
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai				
Piutang	--	19.044.938	--	19.044.938
Jumlah	10.663.264.884	(2.336.591.181)	484.410.262	8.811.083.964
				Total
	2022			
	Dikreditkan (Dibebankan) Ke Laporan Laba Rugi Komprehensif / Credited (Charged) to Statement of Comprehensive Income	Dikreditkan (Dibebankan) ke Penghasilan Komprehensif Lain / Credited (Charged) to Other Comprehensive Income		31 Desember 2022/ December 31, 2022
Penyusutan Aset Liabilitas	(737.066.526)	(631.771.308)	--	(1.368.837.834)
Imbalan Pasca Kerja	32.105.313	447.353.453	(80.448.141)	399.010.625
Rugi Fiskal	14.213.592.250	(2.580.500.157)	--	11.633.092.093
Jumlah	13.508.631.037	(2.764.918.012)	(80.448.141)	10.663.264.884
				Total

9. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

9. PREPAID EXPENSES

	2023	2022	
Akun ini terdiri dari:			
Asuransi Karyawan	1.207.935.561	1.865.687.582	
Lainnya	1.914.100.119	600.462.500	
Jumlah	3.122.035.680	2.466.150.082	
Biaya Dibayar Dimuka			Total
			Prepaid Expenses

This account consists of:
 Employee's Insurance
 Others

PT LRT JAKARTA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 31 DESEMBER 2023

(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) (Amount expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

PT LRT JAKARTA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEAR THEN ENDED
 DECEMBER 31, 2023

10. UANG MUKA

	2023	2022
Akun ini terdiri dari:		
Surat Permohonan		
Uang Muka (SPU)	547.748.199	565.333.400
Lainnya	268.760.312	257.620.130
Jumlah Uang Muka	816.508.511	822.953.530

Nilai uang muka kerja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp816.528.714 yang diantaranya merupakan transaksi:

- SPU untuk mendanai kegiatan dimana pelaksanaannya bersifat swakelola yang dilakukan secara langsung oleh user atau dengan melibatkan penyelenggara pihak ketiga.
- Realisasi kas kecil belum dipertanggungjawabkan dan belum dilakukan top up.

10. ADVANCES

	2023	2022	This account consists of:
Akun ini terdiri dari:			<i>Advance Request Letter (SPU)</i>
Surat Permohonan			<i>Others</i>
Jumlah Uang Muka	816.508.511	822.953.530	Total Advances

The value of work advances as of December 31, 2023 amounted to Rp816,528,714 which included the following transactions:

- *SPU to fund activities where the implementation is self-managed which is carried out directly by the user or by involving a third party organizer.*
- *Use of petty cash that has not been accounted for and has not been top up.*

11. PERSEDIAAN

	2023	2022
Akun ini terdiri dari:		
Persediaan Suku Cadang Prasarana	10.312.796.286	--
Persediaan Suku Cadang Sarana	2.633.422.674	--
Jumlah	12.946.218.960	--

Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang dapat mengindikasikan penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2023, sehingga tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan pada tanggal tersebut.

11. INVENTORIES

	2023	2022	This account consists of:
Akun ini terdiri dari:			<i>Inventory of Infrastructure Spareparts</i>
Persediaan Suku Cadang Prasarana	10.312.796.286	--	<i>Inventory of Facilities Spareparts</i>
Jumlah	12.946.218.960	--	Total

Based on the Company's management's review, there are no events or changes in circumstances which indicate that there is impairment in value of the inventories as of December 31, 2023, thus, no allowance for impairment in value of inventories is provided.

12. INVESTASI JANGKA PENDEK	
Akun ini terdiri dari:	
Letter of Credit	
Euro	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.606.372
Sub Jumlah	16.606.372

12. SHORT - TERM INVESTMENT

	2023	2022	This account consists of:
Akun ini terdiri dari:			<i>Letter of Credit</i>
Euro			<i>Euro</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	16.606.372	33.225.607	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
Sub Jumlah	16.606.372	33.225.607	Sub Total

PT LRT JAKARTA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 31 DESEMBER 2023

(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) (Amount expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

PT LRT JAKARTA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEAR THEN ENDED
 DECEMBER 31, 2023

12. INVESTASI JANGKA PENDEK (LANJUTAN)

12. SHORT - TERM INVESTMENT (CONTINUED)

	2023	2022	
Deposito Berjangka			Time Deposits
Rupiah			Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia	43.699.794.842	--	PT Bank Rakyat Indonesia
PT Bank DKI Syariah	--	15.000.000.000	PT Bank DKI Syariah
Sub Jumlah	43.699.794.842	15.000.000.000	Sub Total
Jumlah	43.716.401.214	15.033.225.607	Total
	2023	2022	
Jangka Waktu	6 bulan/ month	6 bulan/ month	Term of time
Nisbah	5,75%	67,89%	Sharing
Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.606.372 merupakan kas yang dibatasi penggunaannya atas rekening letter of credit untuk alat pembayaran transaksi impor.			Other Assets as of December 31, 2023 amounting to IDR 16,606,372 is cash whose use is restricted from a letter of credit account as a means of payment for import transactions.

13. ASET TETAP

13. FIXED ASSETS

	2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Harga Perolehan						Acquisition Cost
Sarana						Railway
Perkeretaapian	185.303.583.614	14.897.032	--	(47.520.000)	185.270.960.646	Facilities
Prasarana						Railway
Perkeretaapian	8.342.594.367	--	--	(162.982.120)	8.179.612.247	Infrastructure
Renovasi						Building
Gedung	12.324.750.879	1.483.087.975	--	--	13.807.838.854	Renovation
Inventaris						Office
Kantor	11.138.798.668	236.117.313	--	--	11.374.915.981	Equipment
Sub Jumlah	217.109.727.528	1.734.102.320	--	(210.502.120)	218.633.327.728	Sub Total
Aset Dalam Penyelesaian						Asset Under Construction
	--	3.440.405.078	--	--	3.440.405.078	
Sub Jumlah	--	3.440.405.078	--	--	3.440.405.078	Sub Total
Jumlah	217.109.727.528	5.174.507.398	--	(210.502.120)	222.073.732.806	Total

13. ASET TETAP (LANJUTAN)

13. FIXED ASSETS (CONTINUED)

2023						<i>Acumulated Depreciation</i>
	<i>Saldo Awal/ Beginning Balance</i>	<i>Penambahan/ Additions</i>	<i>Pengurangan/ Disposals</i>	<i>Reklasifikasi/ Reclassification</i>	<i>Saldo Akhir/ Ending Balance</i>	
Akumulasi Penyusutan						
Sarana						<i>Railway</i>
Perkeretaapian	14.323.100.935	6.677.486.397	--	(43.560.000)	20.957.027.332	Facilities
Prasarana						Railway
Perkeretaapian	3.717.953.657	1.827.193.761	--	(144.678.806)	5.400.468.612	Infrastructure
Renovasi						Building
Gedung	3.907.581.398	1.549.097.525	--	--	5.456.678.923	Renovation
Inventaris						Office
Kantor	7.541.578.618	2.163.625.170	--	--	9.705.203.788	Equipment
Jumlah	29.490.214.608	12.217.402.853	--	(188.238.806)	41.519.378.655	Total
Nilai Buku	187.619.512.920				180.554.354.151	Book Value
2022						
	<i>Saldo Awal/ Beginning Balance</i>	<i>Penambahan/ Additions</i>	<i>Pengurangan/ Disposals</i>	<i>Reklasifikasi/ Reclassification</i>	<i>Saldo Akhir/ Ending Balance</i>	
Harga Perolehan						<i>Acquisition Cost</i>
Sarana						<i>Railway</i>
Perkeretaapian	185.020.540.000	283.043.614	--	--	185.303.583.614	Facilities
Prasarana						Railway
Perkeretaapian	8.342.594.367	--	--	--	8.342.594.367	Infrastructure
Renovasi						Building
Gedung	11.391.403.773	3.858.247.577	--	(2.924.900.471)	12.324.750.879	Renovation
Inventaris						Office
Kantor	9.752.798.668	1.386.000.000	--	--	11.138.798.668	Equipment
Jumlah	214.507.336.808	5.527.291.191	--	(2.924.900.471)	217.109.727.528	Total
Akumulasi Penyusutan						<i>Accumulated Depreciation</i>
Sarana						<i>Railway</i>
Perkeretaapian	7.718.333.700	6.604.767.235	--	--	14.323.100.935	Facilities
Prasarana						Railway
Perkeretaapian	1.889.309.895	1.828.643.762	--	--	3.717.953.657	Infrastructure
Renovasi						Building
Gedung	2.483.655.926	1.423.925.472	--	--	3.907.581.398	Renovation
Inventaris						Office
Kantor	5.075.486.784	2.466.091.834	--	--	7.541.578.618	Equipment
Sub Jumlah	17.166.786.305	12.323.428.303	--	--	29.490.214.608	Sub Total
Penurunan Nilai						<i>Impairment Building</i>
Renovasi						<i>Renovation</i>
Gedung	2.924.900.471	--	--	(2.924.900.471)	--	
Sub Jumlah	2.924.900.471	--	--	(2.924.900.471)	--	Sub Total
Jumlah	20.091.686.776	12.323.428.303	--	(2.924.900.471)	29.490.214.608	Total
Nilai Buku	194.415.650.032				187.619.512.920	Book Value

PT LRT JAKARTA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 31 DESEMBER 2023

(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) (Amount expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

PT LRT JAKARTA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEAR THEN ENDED
 DECEMBER 31, 2023

13. ASET TETAP (LANJUTAN)

13. FIXED ASSETS (CONTINUED)

	2023	2022	
Alokasi beban penyusutan sebagai berikut:			Depreciation allocation as follows:
Beban Pokok Pendapatan	8.316.441.354	8.433.410.997	Cost of Revenues
Beban Administrasi Umum	3.712.722.693	3.890.017.306	Administrative Expenses
Jumlah	12.029.164.047	12.323.428.303	Total

Total nilai aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp180.576.617.464, dengan nilai aset terbesar adalah sarana LRV yang diperoleh di November 2020 sebagai modal disetor (inbreng) sebesar Rp183.893.400.000.

The total value of fixed assets as of December 31, 2023 was Rp180.576.617.464, with the largest asset value being the LRV facility obtained in November 2020 as paid-in capital (inbreng) of Rp183.893.400.000.

14. ASET TAKBERWUJUD

14. INTANGIBLE ASSETS

	2023			
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga Perolehan				Acquisition Cost
Sistem dan Aplikasi	4.469.234.605	1.047.898.420	--	System and Application
Sub Jumlah	4.469.234.605	1.047.898.420	--	Sub Total
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Sistem dan Aplikasi	1.617.368.573	1.084.016.482	--	System and Application
Sub Jumlah	1.617.368.573	1.084.016.482	--	Sub Total
Nilai Buku	2.851.866.032			Book Value
	2022			
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance
Harga Perolehan				Acquisition Cost
Sistem dan Aplikasi	2.147.399.400	2.321.835.205	--	System and Application
Sub Jumlah	2.147.399.400	2.321.835.205	--	Sub Total
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Sistem dan Aplikasi	1.080.518.723	536.849.850	--	System and Application
Sub Jumlah	1.080.518.723	536.849.850	--	Sub Total
Nilai Buku	1.066.880.677			Book Value

PT LRT JAKARTA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 31 DESEMBER 2023

(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) (Amount expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

PT LRT JAKARTA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEAR THEN ENDED
 DECEMBER 31, 2023

14. ASET TAKBERWUJUD (LANJUTAN)

	2023	2022	<i>Depreciation allocation as follows:</i>
Alokasi beban penyusutan sebagai berikut:			<i>General and Administrative Expenses Total</i>
Beban Administrasi Umum	1.084.016.482	536.849.850	
Jumlah	1.084.016.482	536.849.850	

Aset tidak berwujud merupakan perolehan atas implementasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP), Aplikasi LRT Jakarta pada IOS dan Android, dan Intranet LRT Jakarta.

Intangible assets are acquisitions from the implementation of the Enterprise Resource Planning (ERP) system, the Jakarta LRT Application on IOS and Android, and the Jakarta LRT Intranet.

15. UTANG USAHA

	2023	2022	<i>This account consists of:</i>
Akun ini terdiri dari:			
Pihak Berelasi			<i>Related Parties</i>
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	11.089.608.167	2.217.932.979	<i>PT Jakarta Propertindo (Perseroda)</i>
Sub Jumlah Pihak Berelasi	11.089.608.167	2.217.932.979	<i>Sub Total Related Party</i>

	2023	2022	<i>Third Parties</i>
Pihak Ketiga			
Rotem SRS Co., LTD	4.388.848.000	--	<i>Rotem SRS Co., LTD</i>
PT Samjin Indonesia ENC	2.952.825.838	--	<i>PT Samjin Indonesia ENC</i>
PT Persada Konstruksi	1.964.968.411	1.382.004.250	<i>PT Persada Konstruksi</i>
PT Hutama Panca Perkasa	1.363.638.640	--	<i>PT Hutama Panca Perkasa</i>
PT Gisos Pratama Perkasa	1.308.606.243	--	<i>PT Gisos Pratama Perkasa</i>
PT Kalyana Insan Anugrah	1.231.603.217	--	<i>PT Kalyana Insan Anugrah</i>
PT Duta Listrik Graha Prima	1.077.432.300	--	<i>PT Duta Listrik Graha Prima</i>
PT Inka Multi Solusi Trading	1.067.620.200	--	<i>PT Inka Multi Solusi Trading</i>
PT Simoco Indonesia	1.064.482.000	--	<i>PT Simoco Indonesia</i>
PT Citas Otis Elevator	1.048.323.920	--	<i>PT Citas Otis Elevator</i>
PT Prima Maju Mapan	941.237.421	--	<i>PT Prima Maju Mapan</i>
Cakra Satya Internusa	792.338.519	--	<i>Cakra Satya Internusa</i>
PT Panglima Siaga Bangsa	726.505.819	--	<i>PT Panglima Siaga Bangsa</i>
PT Berkat Sumber Rezeki	695.687.200	--	<i>PT Berkat Sumber Rezeki</i>
PT Dananjaya Sejuk Sejahtera	649.974.279	--	<i>PT Dananjaya Sejuk Sejahtera</i>
PT ISS Indonesia	609.891.496	--	<i>PT ISS Indonesia</i>
PT Mitra Integrasi Informatika	522.734.618	--	<i>PT Mitra Integrasi Informatika</i>
PT Len Rekaprima Semesta	501.080.611	1.895.875.024	<i>PT Len Rekaprima Semesta</i>
Hyundai Rotem Company	--	2.794.274.798	<i>Hyundai Rotem Company</i>
Neo Transco.,LTD	--	2.135.333.291	<i>Neo Transco.,LTD</i>
PT Kubik Kreasi Sisilain	--	1.275.373.870	<i>PT Kubik Kreasi Sisilain</i>
PT Kreatif Dinamika Integrasi	--	1.180.470.000	<i>PT Kreatif Dinamika Integrasi</i>
PT Dana Purna Investama	--	902.929.563	<i>PT Dana Purna Investama</i>
PT Panglima Siaga Bangsa	--	681.312.122	<i>PT Panglima Siaga Bangsa</i>
PT Personel Alih Daya	--	643.917.368	<i>PT Personel Alih Daya</i>
PT Tangguh Duta Merlin	--	601.106.706	<i>PT Tangguh Duta Merlin</i>
PT Italian Infodinamika	--	597.451.209	<i>PT Italian Infodinamika</i>
PT Cendana Teknika Utama	--	518.840.000	<i>PT Cendana Teknika Utama</i>
PT Golden Solution Indonesia	--	501.472.004	<i>PT Golden Solution Indonesia</i>
Sub Jumlah Pihak Ketiga	22.907.798.732	15.110.360.205	<i>Sub Total Third Parties</i>

PT LRT JAKARTA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 31 DESEMBER 2023
 (Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) (Amount expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

PT LRT JAKARTA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEAR THEN ENDED
 DECEMBER 31, 2023

15. UTANG USAHA (LANJUTAN)

15. TRADE PAYABLES (CONTINUED)

	2023	2022	
Pihak Ketiga (Lanjutan)			Third Parties (Continued)
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp500 juta rupiah)	12.784.363.709	8.183.122.923	Other (each below to Rp500 Million)
Sub Jumlah Pihak Ketiga	35.692.162.441	23.293.483.128	Sub Total Third Parties

16. BEBAN AKRUAL

16. ACCRUED EXPENSES

	2023	2022	
Akun ini terdiri dari:			<i>This account consists of:</i>
Tantiem dan Jasa Produksi			Bonuses and Service Production
Beban Pegawai	2.976.335.438	2.507.098.766	Employee expenses
Beban Sarana	1.446.166.946	2.249.432.850	Rolling-stock expenses
Beban Prasarana	1.216.697.735	1.638.373.753	Infrastructure expenses
Beban Non Farebox	459.405.372	--	Non Farebox Expense
Sub Jumlah	6.098.605.491	6.394.905.369	Sub Total
Beban Non Farebox	710.071.632	--	Non Farebox Expense
Beban Umum	827.146.623	2.288.626.681	General Expenses
Lainnya	3.615.188	22.971.834	Others
Sub Jumlah	1.540.833.443	2.311.598.515	Sub Total
Jumlah	7.639.438.934	8.706.503.884	Total

17. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

17. UNEARNED REVENUE

	2023	2022	
Akun ini terdiri dari:			<i>This account consists of:</i>
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Fatlanay Mulia Jaya	1.600.000.000	--	PT Fatlanay Mulia Jaya
PT EPID	622.729.536	--	PT EPID
Menara AssetCo	550.000.000	400.000.000	Menara AssetCo
PT Solusi	101.967.552	--	PT Solusi
Kuliner Indonesia	--	250.000.000	Kuliner Indonesia
Waskita - Nindya	--	52.500.000	Waskita - Nindya
- LRS KSO	117.982.418	43.750.000	- LRS KSO
Link Aja	--	--	Link Aja
PT Indosat Tbk	--	--	PT Indosat Tbk
Lainnya	--	--	Others
Jumlah	2.992.679.506	746.250.000	Total

Pendapatan diterima dimuka merupakan penerimaan yang diterima dari pihak penyewa sehubungan dengan penyewaan aset yang nantinya akan diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak.

Unearned revenue represents receipts received from the lessee in connection with the rental of assets which will later be amortized over the term of the contract.

PT LRT JAKARTA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
31 DESEMBER 2023

(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) (Amount expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

PT LRT JAKARTA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR THEN ENDED
DECEMBER 31, 2023

18. JAMINAN DAN UANG MUKA LAINNYA

	2023	2022
Akun ini terdiri dari:		
Security Deposit	355.047.818	1.318.603.833
Jumlah	355.047.818	1.318.603.833

Jaminan dan uang muka lainnya adalah security deposit terkait sewa area di PT LRT Jakarta. Saldo jaminan dan uang muka lainnya merupakan pihak ketiga.

18. GUARANTEES AND OTHER ADVANCES

<i>This account consist of:</i>	<i>Security Deposit</i>
	<i>Total</i>

Guarantees and other advances are security deposits related to the rental of the area at PT LRT Jakarta. Guarantees balances and other advances are third parties.

19. UTANG RETENSI

	2023	2022
Akun ini terdiri dari:		
Utang Retensi	116.397.499	28.228.600
Jumlah	116.397.499	28.228.600

Utang retensi merupakan utang kepada kontraktor atas pekerjaan penyediaan akses tangga BOH, perangkat akses lift, perangkat jaringan gedung MCC, penambahan renovasi gedung, penyediaan dan pemasangan UPS, dan penyediaan dan instalasi gate AFC. Saldo utang retensi merupakan pihak ketiga.

19. RETENTION PAYABLES

<i>This account consist of:</i>	<i>Retention</i>
	<i>Total</i>

Retention payables represent payables to contractors for the work of providing access to BOH stairs, lift access equipment, MCC building network equipment, additional building renovations, supply and installation of UPS, and supply and installation of AFC gates. Retention payables are third parties.

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan mengestimasi jumlah imbalan pasca kerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Perhitungan imbalan pasca kerja dilakukan oleh perusahaan konsultan aktuaria KKA Azwir Arifin & Rekan dengan nomor laporan aktuaria 000000/LAA-AAR/II/2024, laporan aktuaria diselasaikan pada 07 Februari 2024. Berikut adalah asumsi signifikan yang digunakan:

20. POST - EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

The company estimates the amount of post-employment benefits in accordance with the labor law. The calculation of post-employment benefits is carried out by actuarial consulting firm KKA Azwir Arifin & Rekan with actuarial report number 000000/LAA-AAR/II/2024, actuarial report completed at February 07, 2024. The following are the significant assumptions used:

	2023	2022	
Jumlah Pegawai	250	238	<i>Number of employees</i>
Usia Pensiun	56	56	<i>Retirement age</i>
Tingkat Kenaikan Gaji	8,00%	8,00%	<i>Salary increase rate</i>
Tingkat Bunga Diskonto	Multirate	7,33%	<i>Discount interest rate</i>
Tabel Mortalita	TMI IV - 2019	TMI IV - 2019	<i>Mortality table</i>

Rekonsiliasi nilai liabilitas imbalan kerja pada posisi 31 Desember 2023 dan 2022 di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

2023

	2023	2022	
Nilai Kini Kewajiban	9.902.376.898	6.407.269.980	<i>Present Value of Obligation</i>
Imbalan Pasti			<i>Fair Value</i>
Nilai Wajar	(4.037.009.063)	(4.593.585.322)	<i>of Plan Assets</i>
Aset Program			
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	5.865.367.835	1.813.684.658	<i>Post - Employment Benefit Liabilities</i>

2022

	2022	
Nilai Kini Kewajiban	9.902.376.898	<i>Present Value of Obligation</i>
Imbalan Pasti		<i>Fair Value</i>
Nilai Wajar	(4.037.009.063)	<i>of Plan Assets</i>
Aset Program		
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	5.865.367.835	<i>Post - Employment Benefit Liabilities</i>

Reconciliation of the value of work imbalance liabilities as of December 31, 2023 and 2022 in the financial position is as follows:

PT LRT JAKARTA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 31 DESEMBER 2023
 (Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) (Amount expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

PT LRT JAKARTA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEAR THEN ENDED
 DECEMBER 31, 2023

20 LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (LANJUTAN)

**20 POST - EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES
 (CONTINUED)**

	2023	2022	
Biaya			
Jasa Kini	2.418.960.005	736.980.036	Current Service Expenses
Bunga Neto	132.943.086	1.072.221	Nett Interest (Gain) / Loss
(Keuntungan) / Kerugian			
Aktuaria	--	823.955.945	
Kewajiban Kini Peserta Mutasi	<u>33.529.743</u>	<u>--</u>	
Beban			
Imbalan Pasca Kerja	<u>2.585.432.834</u>	<u>1.562.008.202</u>	Actuarial - Assets Post - Employee Benefits Expenses

Mutasi nilai wajar aset program selama tahun berjalan sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan assets of the year is as follows:

	2023	2022	
Saldo Awal	4.593.585.322	--	Beginning balance
Penyesuaian			Beginning Adjustment
Saldo Awal	--	4.920.506.778	Balance Adjustment
Penghasilan Bunga	336.709.804	360.889.517	Interest Income
Pengukuran Kembali - Imbal			Remeasurement -
Hasil atas Aset Program	(893.286.063)	(823.955.945)	Return on Plan Assets
Iuran Perusahaan	--	136.144.972	The Company Contribution
Imbalan Yang Dibayar	--	--	Benefits Paid
Jumlah	<u>4.037.009.063</u>	<u>4.593.585.322</u>	Total

21. MODAL SAHAM

Berdasarkan akta notaris Wiwik Condro, S.H No. 75 tanggal 26 Oktober 2020, mengenai susunan pemegang saham per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

21. SHARE CAPITAL

Based on notarial deed No. 41 of Wiwik Condro, S.H dated October 26, 2020 , composition of shareholders as of 31 December 2023 and 2022 is as follows:

Pemegang Saham / Shareholders	Jumlah Saham / Number of shares	Presentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah Nominal (Rp) / Amount
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	3.323.934	99,55%	332.393.400.000
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	<u>15.000</u>	<u>0,45%</u>	<u>1.500.000.000</u>
Jumlah / Total	<u>3.338.934</u>	<u>100%</u>	<u>333.893.400.000</u>

22. PENDAPATAN

22. REVENUE

	2023	2022	
Akun ini terdiri dari:			<i>This account consist of:</i>
Berasal dari subsidi:			Sources from subsidies:
Sarana	136.155.828.746	110.097.445.842	Facilities
Prasarana	122.219.629.509	96.447.051.915	Infrastructure
Sub Jumlah	258.375.458.255	206.544.497.757	Sub Total
Non Subsidi:			Non Subsidies:
Farebox			Farebox
Tiket	4.872.248.450	3.462.909.084	Ticket
Non - Farebox			Non - Farebox
Jasa Teknis	5.884.424.060	2.677.156.193	Technical Services
Sewa	2.410.500.663	1.969.991.003	Lease
Pendidikan dan Pelatihan	61.005.540	--	Education and Training
Periklanan	2.817.077	9.009.009	Advertising
Operasi	--	41.250.000	Operation
dan Perawatan	--	--	and Maintenance
Sub Jumlah	13.230.995.790	8.160.315.289	Sub Total
Jumlah	271.606.454.045	214.704.813.046	Total

Pendapatan Subsidi

Subsidi sarana merupakan alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyelenggaraan sarana perkeretaapian dalam rangka kewajiban pelayanan publik agar tarif terjangkau oleh pelanggan.

Subsidi prasarana merupakan alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membayar biaya operasional dan perawatan prasarana perkeretaapian serta biaya modal fasilitas operasi.

Pendapatan subsidi merupakan pendapatan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Badan Usaha Milik Daerah. PT LRT Jakarta merupakan anak Perusahaan dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 154 tahun 2017 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo dalam Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Ringan/Light Rail Transit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pergub Penugasan").

Subsidies Income

Rolling Stock subsidies are the DKI Jakarta Provincial Government's budget allocation for the operation of railway facilities in the context of public service obligations so that fares are affordable for customers.

Infrastructure subsidies are the DKI Jakarta Provincial Government's budget allocation to pay for operational and maintenance costs for railway infrastructure as well as capital costs for operating facilities.

Subsidy revenue is income from the DKI Jakarta Provincial Government to Regional Owned Enterprises. PT LRT Jakarta is a subsidiary of PT Jakarta Propertindo (Perseroda) which is a Regional Owned Enterprise (BUMD) assigned by the DKI Jakarta Provincial Government based on Governor Regulation Number 154 of 2017 concerning Assignments to PT Jakarta Propertindo in the Implementation of Light Rail Infrastructure and Facilities /Light Rail Transit as amended by DKI Jakarta Governor Regulation Number 25 of 2020 (hereinafter referred to as "Assignment Gubernatorial Regulation").

22. PENDAPATAN (LANJUTAN)

Pendapatan Subsidi

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara PT Jakarta Propertindo (Perseroda) dengan PT LRT Jakarta tentang Kerjasama Pengoperasian dan Perawatan Sarana dan Prasarana Kereta Api Ringan Koridor I Fase I Velodrome – Kelapa Gading No.009/UT2000/107/IX/2019 dan No.001/DRU/107/IX/2019, tanggal 20 September 2019 sebagai operator LRT Jakarta dengan ruang lingkup (a) pengoperasian, (b) perawatan dan (c) pengusahaan. Dalam menjalankan operasional LRT Jakarta, Jakpro mendapatkan dukungan subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2022 tentang Subsidi Layanan Angkutan Umum Transjakarta, Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pergub Subsidi").

Berdasarkan peraturan di atas, Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Nomor.107/UT0000/IV/2023/0017 dan 003/DRU/107/IV/2023 tanggal 14 April 2023 tentang Pemberian Subsidi untuk Pengoperasian dan Perawatan Sarana dan Prasarana Lintas Raya Terpadu Tahun Anggaran 2023.

Besaran pagu pemberian subsidi prasarana dan sarana Tahun 2023 senilai Rp350.000.000.000 dan akan dibayarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) untuk kemudian dibayarkan kepada PT LRT Jakarta dalam beberapa tahapan pembayaran, yaitu:

- a. Pencairan uang muka sebesar Rp50.000.000.000 dari total nilai perjanjian senilai Rp70.000.000.000 yang dibayarkan dalam jangka waktu 14 hari kalender setelah diterimanya surat permohonan pencairan uang muka dan dokumen administrasi dinyatakan lengkap oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda).
- b. Pencairan subsidi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dilakukan selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan pencairan subsidi dan dokumen dinyatakan lengkap oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

Perusahaan telah menandatangani addendum perjanjian dengan Pemprov DKI Jakarta No.5458/PH.10.00 tanggal 30 November 2023 tentang Pemberian Subsidi Lintas Raya Terpadu yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan Penyesuaian terhadap Perjanjian sebagai berikut:

- a. Realokasi Biaya Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana
- b. Penyesuaian Target Pengguna Jasa
- c. Penyesuaian Tarif Penyelenggara (Tarif Keekonomian)

22. REVENUE (CONTINUED)

Subsidies Income

Based on the Cooperation Agreement between PT Jakarta Propertindo (Perseroda) and PT LRT Jakarta concerning Cooperation in the Operation and Maintenance of Light Railway Facilities and Infrastructure Corridor I Phase I Velodrome – Kelapa Gading No.009/UT2000/107/IX/2019 and No.001/DRU /107/IX/2019, dated 20 September 2019 as Jakarta LRT operator with the scope of (a) operation, (b) maintenance and (c) business. In carrying out Jakarta LRT operations, Jakpro receives subsidy support from the DKI Jakarta Provincial Government through the Transportation Service in accordance with Governor Regulation Number 46 of 2022 concerning Subsidy for Transjakarta Public Transport Services, Integrated Highways and Integrated Highways (hereinafter referred to as "Subsidized Gubernatorial Regulation").

Based on the above regulations, the Company has signed an agreement with PT Jakarta Propertindo (Perseroda) Number. 107/UT0000/IV/2023/0017 and 003/DRU/107/IV/2023 dated 14 April 2023 concerning Providing Subsidies for the Operation and Maintenance of Facilities and Integrated Highway Infrastructure for Fiscal Year 2023.

The ceiling amount for subsidies for infrastructure and facilities in 2023 is Rp350.000.000.000 and will be paid by the DKI Jakarta Provincial Government to PT Jakarta Propertindo (Perseroda) to then be paid to PT LRT Jakarta in several stages of payment, namely:

- a. Disbursement of the down payment amounting to Rp50.000.000.000 from the total agreement value of Rp70.000.000.000 which was paid within 14 calendar days after receipt of the request letter for disbursement of the down payment and the administrative documents were declared complete by PT Jakarta Propertindo (Perseroda).*
- b. Disbursement of subsidies for the period 1 January to 31 December 2023 will be carried out no later than 14 calendar days from the date of receipt of the request for subsidy disbursement and the documents are declared complete by PT Jakarta Propertindo (Perseroda).*

The company has signed an addendum to the agreement with the DKI Jakarta Provincial Government No.5458/PH.10.00 dated 30 November 2023 concerning the Provision of Integrated Highway Subsidies Sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2023, with adjustments to the Agreement as follows:

- a. Reallocation of Costs for Providing Infrastructure and Facilities*
- b. Adjustment of Service User Targets*
- c. Organizer Tariff Adjustment (Economic Tariff)*

22. PENDAPATAN (LANJUTAN)

Pendapatan Subsidi (Lanjutan)

Perusahaan telah menandatangani addendum perjanjian dengan Pemprov DKI Jakarta No.5458/PH.10.00 tanggal 30 November 2023 tentang Pemberian Subsidi Lintas Raya Terpadu yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan Penyesuaian terhadap Perjanjian sebagai berikut: (Lanjutan)

- d. Penyesuaian Nilai Kebutuhan Subsidi Prasarana dan Sarana
- e. Pembayaran Utang Subsidi Tahun 2022

Pada tahun 2023, Perusahaan telah menerima pencairan subsidi atas uang muka subsidi, subsidi bulan Januari – November 2023, 90% subsidi bulan Desember 2023 sebesar Rp267.691.686.916 setelah dikurangi denda atas ketidaktercapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM), ketidaktercapaian pengguna jasa, kecelakaan dan aduan Masyarakat.

Pada bulan Januari tahun 2024, Perusahaan dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) telah menandatangani Berita Acara Verifikasi Selsih Kurang/Lebih Subsidi Prasarana dan Sarana LRT Jakarta Tahun 2023. Dimana dalam berita acara tersebut tercantum nilai subsidi PT LRT Jakarta sebesar Rp258.375.458.255. Sepanjang 2023 Perusahaan menerima subsidi sebesar Rp267.691.686.916, sehingga Perusahaan mencatatkan utang atas kelebihan penerimaan subsidi sebesar Rp9.316.228.661. Perusahaan juga masih mempunyai utang kelebihan subsidi 2022 sebesar Rp1.773.736.876 sehingga total kelebihan subsidi 2022 dan 2023 menjadi sebesar Rp11.089.608.166 yang dicatat sebagai utang pihak berelasi kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

Pendapatan Tiket

Pendapatan tiket merupakan pendapatan dari hasil penjualan tiket sesuai tarif angkutan penumpang yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian Mass Rapid Transit dan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit ("Peraturan Gubernur No. 34") yang telah diubah Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.46 Tahun 2022 tentang Subsidi Layanan Angkutan Umum Transjakarta, Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu. Berdasarkan Peraturan Gubernur No.46 tersebut, tarif angkutan perkeretaapian LRT Koridor Pegangsaan Dua sampai dengan Velodrome adalah sebesar Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Pendapatan Non - Farebox

Pendapatan Non - Farebox merupakan pendapatan dari jasa teknis, sewa menyewa, jasa pelatihan, dan periklanan.

22. REVENUE (CONTINUED)

Subsidies Income (Continued)

The company has signed an addendum to the agreement with the DKI Jakarta Provincial Government No.5458/PH.10.00 dated 30 November 2023 concerning the Provision of Integrated Highway Subsidies Sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2023, with adjustments to the Agreement as follows: (Continued)

- d. Adjustment of the Value of Infrastructure and Facilities Subsidy Requirements
- e. Subsidized Debt Payments in 2022

In 2023, the Company has received disbursement of subsidies for subsidy advances, subsidies for January – November 2023, 90% of subsidies for December 2023 amounting to Rp267.691.686.916 after deducting fines for non-achievement of Minimum Service Standards (SPM), non-attainment of service users, accidents and public complaint.

In January 2024, the Company and PT Jakarta Propertindo (Perseroda) signed the Minutes of Verification of the Difference in Less/Over Subsidy for Jakarta LRT Infrastructure and Facilities in 2023. Where in the minutes the PT LRT Jakarta subsidy value was stated at Rp258.375.458.255. Throughout 2023, the Company received subsidies amounting to Rp267.691.686.916, so the Company recorded a debt for excess subsidy receipts amounting to Rp9.316.228.661. The company also still has an excess subsidy debt for 2022 amounting to Rp1.773.736.876 so that the total excess subsidy for 2022 and 2023 is Rp11.089.608.166 which is recorded as a related party debt to PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

Farebox Income

Farebox revenue is income from ticket sales in accordance with passenger transportation rates stipulated in the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Province Regulation No. 34 of 2019 concerning Mass Rapid Transit and Light Rail Transit Railway Transportation Tariffs ("Governor Regulation No. 34") which has been amended by the Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Province No. 46 of 2022 concerning Subsidies for Transjakarta Public Transport Services, Integrated Highways and Integrated Highways. Based on Governor Regulation No. 46, the transportation fare for the Pegangsaan Dua Corridor LRT train to the Velodrome is Rp5.000 (Five Thousand Rupiah).

Non - Farebox Income

Non - farebox is income from technical services, Lease, training services, and advertising.

PT LRT JAKARTA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 31 DESEMBER 2023

(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) (Amount expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

PT LRT JAKARTA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEAR THEN ENDED
 DECEMBER 31, 2023

23. BEBAN POKOK PENDAPATAN

23. COST OF REVENUES

	2023	2022	
Akun ini terdiri dari:			<i>This account consist of:</i>
Beban Sarana Perkertaapian			Cost of Rolling Stock
Beban Operasi Sarana			<i>Operating Expenses</i>
Perkeretaapian	50.380.171.010	45.558.531.470	<i> of Rolling Stock</i>
Beban Overhead			Overhead Expenses
Sarana	23.806.826.094	23.666.906.129	<i> of Rolling Stock</i>
Beban Perawatan Sarana			Maintenance Expenses
Perkeretaapian	17.585.432.172	2.870.859.833	<i> of Rolling Stock</i>
Beban Penyusutan			Depreciation Expenses
Sarana Perkeretaapian	6.633.926.397	6.604.767.235	<i> of Rolling Stock</i>
Sub Jumlah	98.406.355.673	78.701.064.667	Sub Total
Beban Prasarana			Cost of Infrastructure
Dan Fasilitas Operasi			<i>Maintenance Expenses</i>
Beban Perawatan			<i> of Infrastructure</i>
Prasarana	43.734.296.332	44.280.519.417	<i> Overhead Expenses</i>
Beban Overhead Prasarana			<i> of Infrastructure</i>
Dan Fasilitas Operasi	18.295.893.851	14.561.285.034	<i> Depreciation Expenses</i>
Beban Penyusutan Aset Fasilitas			<i> of Operating Facility</i>
Operasi Perkeretaapian	1.302.117.615	1.366.258.088	<i> Depreciation Expenses</i>
Beban Penyusutan Aset			<i> of Infrastructure</i>
Prasarana	380.397.340	462.385.674	<i> Licensing Expenses</i>
Beban Perizinan	15.096.000	186.638.278	
Sub Jumlah	63.727.801.138	60.857.086.491	Sub Jumlah
Beban Pokok Non-Farebox			Non-Farebox Expenses
Beban Operasi dan Perawatan			<i>O&M Expenses</i>
Sarana APMS	3.745.538.040	1.011.051.517	<i>of Rolling Stock - APMS</i>
Beban Pegawai Non			<i>Employee's Non-Farebox</i>
Farebox	3.292.241.469	2.209.276.074	<i> Expenses</i>
Beban Perawatan Optimalisasi			<i> Maintenance Expenses</i>
Aset Properti	774.159.097	583.334.407	<i> of Property Assets</i>
Beban Umum Non			<i> General Non-Farebox</i>
Farebox	217.788.588	130.074.545	<i> Expenses</i>
Beban Operasi dan Perawatan			<i> O&M Expenses</i>
Prasaranan APMS	--	11.763.070	<i> of Infrastructure - APMS</i>
Beban Administrasi			<i> General and Administrative</i>
dan Umum APMS	--	417.634.046	<i> Expenses - APMS</i>
Sub Jumlah	8.029.727.194	4.363.133.659	Sub Total
Jumlah	170.163.884.005	143.921.284.817	Total

24. BEBAN PENJUALAN

24. SALES EXPENSES

	2023	2022	
Akun ini terdiri dari:			<i>This Account Consist of:</i>
Beban Promosi	410.210.537	28.329.041	<i>Promotional Expenses</i>
Beban Media (Iklan)	126.090.000	63.270.000	<i>Media Expenses (Advertising)</i>
Jumlah	536.300.537	91.599.041	Total

PT LRT JAKARTA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
 31 DESEMBER 2023

(Jumlah disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain) (Amount expressed in full amount of Rupiah, unless otherwise stated)

PT LRT JAKARTA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEAR THEN ENDED
 DECEMBER 31, 2023

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

25. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES

	2023	2022	
Akun ini terdiri dari:			<i>This Account Consist of:</i>
Beban Pegawai	49.949.544.197	33.370.189.203	<i>Employee Expenses</i>
Beban Umum	27.977.983.005	20.984.820.889	<i>General Expenses</i>
Beban Penyusutan	4.796.739.175	4.426.867.156	<i>Depreciation Expenses</i>
Beban			<i>Professional Service Expenses</i>
Jasa Profesional	2.767.835.405	3.669.301.071	
Jumlah	85.492.101.782	62.451.178.319	Total

26. PENDAPATAN / (BEBAN) LAINNYA - BERSIH

26. OTHER INCOME / (EXPENSE) - NET

	2023	2022	
Akun ini terdiri dari :			<i>This Account Consist of:</i>
a. Pendapatan/ (Beban) Keuangan			a. Other Financial Income/ (Expense)
Pendapatan			<i>Deposit</i>
Bunga Deposito	3.259.861.608	1.902.390.068	<i>Interest Income</i>
Pendapatan Jasa Giro	254.211.087	401.231.700	<i>Service Income</i>
Beban Pajak Atas Bunga	(667.183.088)	(352.287.880)	<i>Tax from interest</i>
Biaya Administrasi Bank	(18.331.624)	(42.076.014)	<i>Bank Administration</i>
Jumlah			Total Other Financial Income
Pendapatan Keuangan	2.828.557.983	1.909.257.874	
b. Pendapatan/ (Beban) Lain-lain			b. Other Income/ (Expenses)
Pajak:			<i>Tax:</i>
Final	(310.153.484)	(58.125.020)	<i>Final</i>
Non Final	(32.790.398)	(70.266.039)	<i>Non Final</i>
Cadangan Kerugian			
Piutang Usaha	(86.567.900)	--	<i>Bad Debt Expenses</i>
Pendapatan Lainnya	3.310.479.548	7.365.744.367	<i>Others Income</i>
Beban Lainnya	(1.473.241.037)	(6.399.549.068)	<i>Others Expense</i>
Jumlah Pendapatan Lain-lain	1.407.726.729	837.804.240	Total Other Income

27. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

27. TRANSACTION WITH RELATED PARTIES

a. Sifat hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

a. Nature of relationship and transaction with related parties as follow:

No	Pihak berelasi/ Related parties	Sifat hubungan perusahaan/ Nature of company relations	Sifat transaksi/ Nature of transaction
1	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	Entitas induk/ Parent Pemegang saham/ Shareholders	Piutang usaha, utang Account receivables,
2	PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	Pemegang saham/ Shareholders	Piutang usaha/ Account receivables

27. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BEREELASI (LANJUTAN)

b. Saldo dan Transaksi Pihak Berelasi

b. Transactions Balance And Related Parties

Aset/ Assets			Presentase Terhadap Jumlah Aset/ Percentage of Total Assets	
	2023	2022	2023	2022
Piutang Usaha/ Account Receivables				
PT Jakarta Infrastruktur Propertindo	2.184.274.072	2.522.422.222	0,57%	0,74%
PT Jakarta Konsultindo	427.500.000	--	0,11%	0,00%
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	6.190.881	6.190.881	0,00%	0,00%
Jumlah/ Total	2.617.964.953	2.528.613.103	0,69%	0,75%
Presentase Terhadap Jumlah Aset/ Percentage of Total Assets				
Liabilitas/Liabilities			Presentase Terhadap Jumlah Aset/ Percentage of Total Assets	
	2023	2022	2023	2022
Utang Usaha/ Account Payables				
PT Jakarta Propertindo (Perseroda)	11.089.608.167	2.217.932.979	16,75%	5,59%
Jumlah/ Total	11.089.608.167	2.217.932.979	16,75%	5,59%

28. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND ENGAGEMENTS

a. PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

Pada tanggal 14 April 2023, Perusahaan dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Perihal Pemberian Subsidi untuk Pengoperasian dan Perawatan Sarana dan Prasarana Lintas Raya Terpadu Periode 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023.

Jangka waktu pemberian subsidi berlaku dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pada akhir tahun berjalan, selisih kekurangan atau kelebihan pencairan Subsidi Sarana dan Subsidi Prasarana berdasarkan hasil perhitungan kembali maupun akibat adanya penundaan pencairan Subsidi Sarana dan Subsidi Prasarana pada tahun berjalan akan diperhitungkan di tahun berikutnya dengan ketentuan yang berlaku dan telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.

a. PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

On April 14, 2023, the Company and PT Jakarta Propertindo (Perseroda) signed a Cooperation Agreement Regarding the Provision of Subsidies for the Operation and Maintenance of Integrated Crossroad Facilities and Infrastructure for the Period 1 January 2023 - 31 December 2023.

The period for granting subsidies is from January 1, 2023 to December 31, 2023.

At the end of the current year, the difference in the shortage or excess of the disbursement of the Facilities Subsidy and Infrastructure Subsidy based on the results of the recalculation as well as the delay in the disbursement of the Facilities Subsidy and Infrastructure Subsidy in the current year will be calculated in the following year with the applicable provisions and has been agreed in the Cooperation Agreement.

28. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (LANJUTAN)

a. PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Lanjutan)

Hak dan kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian tersebut antara lain:

- i. Perusahaan berhak untuk:
 - a) Menerima pencairan subsidi sarana dan subsidi prasarana sebagaimana ketentuan perjanjian ini; dan
 - b) Menerima salinan Berita Acara Pencapaian SPM dan salinan Berita Acara Verifikasi Subsidi dari PT Jakarta Propertindo apabila telah menerimanya dari Dinas Perhubungan.
- ii. Perusahaan berkewajiban untuk:
 - a) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Subsidi kepada PT Jakarta Propertindo; dan
 - b) Menyampaikan dokumen administrasi untuk keperluan pencairan subsidi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu terhadap pasal 18 bahwa Pertanggungjawaban Badan Usaha Penyelenggara Lintas Raya Terpadu secara formal dan material atas penggunaan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian yang diterima dan target kinerjanya sebagai obyek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

b. PT Fintek Karya Nusantara

Pada tanggal 23 Juli 2020, Perusahaan dan PT Fintek Karya Nusantara Perjanjian Kerja Sama menandatangani Perihal Penggunaan Layanan Aplikasi LinkAja pada Gate *Electronic Ticketing* LRT Jakarta. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara pengoperasian Aplikasi Layanan QR Code LinkAja atau sampai dengan tahun 2023. Sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama, PT Fintek Karya Nusantara sepakat untuk membayar *joining fee* kepada Perusahaan dengan nilai sebagai berikut:

- i. Tahun ke 1 (Satu)
Sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) belum termasuk pajak. Pembayaran dilakukan setelah tanggal Perjanjian ini, jangka waktu pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perusahaan mengajukan tagihan.

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND ENGAGEMENTS (CONTINUED)

**a. PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Lanjutan)
(Continued)**

The rights and obligations of the Company based on the Agreement include:

- i. *The company has the right to:*
 - a) *Receive the disbursement of facilities subsidies and infrastructure subsidies as stipulated in this agreement; and*
 - b) *Receive a copy of the Minutes of Achievement of SPM and a copy of the Minutes of Subsidy Verification from PT Jakarta Propertindo if they have received them from the Department of Transportation.*
- ii. *The company is obliged to:*
 - a) *Submit Subsidy Implementation Report to PT Jakarta Propertindo; and*
 - b) *Submit administrative documents for subsidy disbursement purposes.*

Based on the Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta No. 107 of 2019 concerning Integrated Highway and Integrated Highway Subsidies to article 18 that the responsibility Organizing of the Integrated Highway Business Entity is formally and materially for the use of Railway Infrastructure Subsidies and Railway Facilities Subsidies received and their performance targets as objects of examination by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia.

b. PT Fintek Karya Nusantara

On July 23, 2020, the Company and PT Fintek Karya Nusantara signed a Cooperation Agreement Regarding the Use of the LinkAja Application Service at the Jakarta LRT Electronic Ticketing Gate. The term of this Agreement is valid for 3 (three) years from the date of signing the minutes of operation of the LinkAja QR Code Service Application or until 2023. In connection with the Cooperation Agreement, PT Fintek Karya Nusantara agreed to pay a joining fee to the Company with the following value:

- i. *1 (one) year
Rp500,000,000 (five hundred million Rupiah) excluding tax. Payment is made after the date of this Agreement, the payment period is no later than 1 (one) month after the Company submits the invoice.*

28. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (LANJUTAN)

b. PT Fintek Karya Nusantara (Lanjutan)

ii. Tahun ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga)

Sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) belum termasuk pajak. Pembayaran dilakukan setiap tahunnya setelah bulan Agustus, jangka waktu pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perusahaan mengajukan tagihan.

Nilai *joining fee* akan berubah jika ada mekanisme payment QR Code pada gate electronic ticketing Perusahaan dari pihak ketiga yang menggunakan Perangkat lain, maka nilai yang akan dibayarkan di tahun ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) akan dikurangi 30% (tiga puluh persen) dari nilai *joining fee* yang dibayarkan pihak ketiga tersebut untuk menggunakan Perangkat di 26 (dua puluh enam) gate .

Apabila jumlah Perangkat pada gate yang digunakan oleh pihak ketiga kurang dari 26 (dua puluh enam), maka pengurang atas *joining fee* akan dihitung secara proporsional.

b. PT Indosat Tbk (Indosat)

Pada tanggal 10 September 2020, Perusahaan dan Indosat menandatangani Perjanjian Kerja Sama Perhal Sewa Menyewa Untuk Penempatan Antenna Microcell. Jangka waktu Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023.

Penempatan antenna microcell berlokasi di 3 Stasiun LRTJ, yaitu di Stasiun Pulomas, Stasiun Boulevard Utara, dan Stasiun Boulevard Selatan. Dengan rincian harga sewa yang telah disepakati adalah sebagai berikut:

- i. Stasiun Pulomas (JL. Kayu Putih Raya, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur). Sebesar Rp42.000.000 (empat puluh dua juta Rupiah) per tahun atau sebesar Rp126.000.000 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) selama 3 (tiga) tahun belum termasuk PPN, dengan area sewa seluas +/- 2 m² (dua meter persegi).
- ii. Stasiun Boulevard Utara (JL. Boulevard Raya, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara). Sebesar Rp42.000.000 (empat puluh dua juta Rupiah) per tahun atau sebesar Rp126.000.000 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) selama 3 (tiga) tahun belum termasuk PPN, dengan area sewa seluas +/- 2 m² (dua meter persegi).

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND ENGAGEMENTS (CONTINUED)

b. PT Fintek Karya Nusantara (Continued)

ii. 2 (two) and 3 (third) year

Rp1,500,000,000 one billion five hundred million Rupiah) excluding tax. Payment is made annually after August, the payment period is no later than 1 (one) month after the Company submits the invoice.

The value of the joining fee will change if there is a QR Code payment mechanism at the company's electronic ticketing gate from a third party using another device, then the value to be paid in the 2nd (two) and 3rd (third) year will be reduced by 30% (thirty percent) of the value of the joining fee paid by the third party to use the device at 26 (twenty six) gate.

If the number of Devices at the gate used by a third party is less than 26 (twenty six), then the deduction from the joining fee will be calculated proportionally.

b. PT Indosat Tbk (Indosat)

On September 10, 2020, the Company and Indosat signed a Cooperation Agreement Regarding Lease for Microcell Antenna Placement. The term of this agreement is valid for 3 (three) years from June 1, 2020 until May 31, 2023

Microcell antenna placements are located at 3 LRTJ stations, namely Pulomas Station, North Boulevard Station, and South Boulevard Station. The details of the agreed rental rates are as follows:

- i. Pulomas Station (JL Kayu Putih Raya, Kayu Putih, Pulo Gadung, East Jakarta). Rp42,000,000 (forty two million Rupiah) per year or Rp126,000,000 (one hundred twenty six million Rupiah) for 3 (three) years excluding VAT, with a rental area of +/- 2 m (two square meters).
- ii. North Boulevard Station (JL. Boulevard Raya, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, North Jakarta) Rp42,000,000 (forty two million Rupiah) per year or Rp 126,000,000 (one hundred twenty six million Rupiah) for (three) years excluding VAT, with a rental area of +/- 2 m (two square meters).

28. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (LANJUTAN)

b. PT Indosat Tbk (Indosat) (Lanjutan)

Penempatan antena microcell berlokasi di 3 Stasiun LRTJ, yaitu di Stasiun Pulomas, Stasiun Boulevard Utara, dan Stasiun Boulevard Selatan. Dengan rincian harga sewa yang telah disepakati adalah sebagai berikut: (Lanjutan)

iii. Stasiun Boulevard Selatan (JL. Boulevard Raya, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara). Sebesar Rp42.000.000 (empat puluh dua juta Rupiah) per tahun atau sebesar Rp126.000.000 (seratus dua puluh enam juta Rupiah) selama 3 (tiga) tahun belum termasuk PPN, dengan area sewa seluas +/- 2 m² (dua meter persegi).

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama, pembayaran akan dibayar dimuka sebesar tagihan untuk 3 (tiga) tahun sekaligus setelah tanggal Perjanjian ini, jangka waktu pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perusahaan mengajukan tagihan. Selain itu PT Indosat wajib menyerahkan uang jaminan sebesar Rp42.000.000 (empat puluh dua juta Rupiah).

28. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND ENGAGEMENTS (CONTINUED)

b. PT Indosat Tbk (Indosat) (Continued)

Microcell antenna placements are located at 3 LRTJ stations, namely Pulomas Station, North Boulevard Station, and South Boulevard Station. The details of the agreed rental rates are as follows: (Continued)

iii. South Boulevard Station (JL. Boulevard Raya, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, North Jakarta)

Rp42,000,000 (forty two million Rupiah) per year or Rp 126,000,000 (one hundred twenty six million Rupiah) for (three) years excluding VAT, with a rental area of +/- 2 m (two square meters).

Based on the Cooperation Agreement, payment will be paid in advance of the invoice for 3 (three) years at a time after the date of this Agreement, the payment period is no later than 1 (one) month after the Company submits the invoice. In addition, PT Indosat is required to submit a security deposit of Rp42,000,000 (forty two million Rupiah)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko mata uang, dan risiko suku bunga. Perusahaan mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- i. Risiko kredit merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Perusahaan.
- ii. Risiko likuiditas merupakan risiko atas ketidakmampuan Perusahaan membayar liabilitasnya pada saat jatuh tempo. Saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo.
- iii. Risiko mata uang merupakan risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing.
- iv. Risiko suku bunga terdiri dari risiko suku bunga atas nilai wajar, yaitu risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar, dan risiko suku bunga atas arus kas, yaitu risiko arus kas di masa datang akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

a. Financial Risk Management Factors and Policy

In conducting operating, investing and financing activities, the Company faces financial risks such as credit risk, liquidity risk, currency risk, and interest rate risk. The Company defines these risks as follows:

- i. Credit risk represents risk due to the possibility that a customer will not repay all or a portion of a receivable or will not repay in a timely manner and therefore will cause a loss to the Company.
- ii. Liquidity risk represents risk of the Company's inability to repay all their liabilities at maturity date. At present the Company does expect to pay all liabilities at their contractual maturity.
- iii. Foreign currency risk represents fluctuation of financial instrument caused by changes of foreign currency exchange.
- iv. Interest rate risk consists of fair value interest rate risk, which is the risk of fluctuation of financial instrument caused by changes in market interest rate, and cash flow interest rate risk, which is the risk that the future cash flow of a financial instruments will fluctuate due to changes in market interest rate.

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)

a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- i. Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksi dengan menyediakan cadangan mata uang yang cukup.
- ii. Memaksimalkan penggunaan lindung nilai alamiah yang menguntungkan sebanyak mungkin off-setting alami antara pendapatan dan biaya dan hutang piutang dalam mata uang yang sama; dan
- iii. Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

Risiko Kredit

Perusahaan mengelola risiko kredit terkait dengan simpanan dana di bank dan penempatan deposito berjangka dengan hanya menggunakan bank-bank yang memiliki reputasi dan predikat yang baik untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank.

Terkait dengan kredit yang diberikan kepada pelanggan, Perusahaan mengendalikan eksposur risiko kredit dengan menetapkan kebijakan atas persetujuan atau penolakan kontrak kredit baru. Kepatuhan atas kebijakan tersebut dipantau oleh Direksi. Sebagai bagian dari proses dalam persetujuan atau penolakan tersebut, reputasi dan jejak rekam pelanggan menjadi bahan pertimbangan. Saat ini, tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan.

Aset	2023
Kas pada Bank	120.641.665.365
Piutang Usaha	5.470.030.053
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	2.473.679.351
Biaya Dibayar Dimuka	3.122.035.680
Uang Muka	816.508.511
Jumlah	132.523.918.960

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

a. Financial Risk Management Factors and Policy (Continued)

In order to effectively manage those risks, the Board of Director of the Company has approved some strategies for the management of financial risks, which are in line with corporate objectives. These guidelines set up objectives and action to be taken in order to manage the financial risks that the Company faces.

The major guidelines of this policy are as follows:

- i. Minimize effect of changes in foreign exchange and market risk for all kind of transactions by providing adequate foreign currencies reserve;*
- ii. Maximize the use of "natural hedge" favouring as much as possible the natural off-setting of revenue and costs and payables receivables denominated in the same currency; and*
- iii. All financial risk management activities carried out on a prudent, consistent basis, and following the best market practices.*

Credit Risk

The Company manage credit risk exposed from its deposits in banks and time deposits by using banks with good reputation and ratings to mitigate financial loss through potential failure of the banks.

In respect of credit exposures given to customer, the Company controls its exposure to credit risk by setting its policy in approval or rejection of new credit contract. Compliance to the policy is monitored by the Board of Director. As part of the process in approval or rejection, the customer reputation and track record is taking into consideration. There are no significant concentrations of credit risk.

At the reporting date, the Company's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the statements of financial position.

2023	2022	Assets
120.641.665.365	114.030.489.408	Cash in Bank
5.470.030.053	3.426.507.958	Trade Receivables
2.473.679.351	1.680.210.678	Accrued Revenue
3.122.035.680	2.466.150.082	Prepayments
816.508.511	822.953.530	Advances
132.523.918.960	122.426.311.656	Total

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)

a. Faktor dan Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

Risiko Likuiditas

Pada saat ini Perusahaan berharap dapat membayar semua liabilitas pada saat jatuh tempo. Perusahaan melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat atas arus kas masuk dan kas keluar untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek yang jatuh tempo diperoleh dari pelunasan piutang dari pelanggan yang memiliki jangka waktu kredit 1 bulan.

Risiko Suku Bunga

Perusahaan terekspos risiko tingkat bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan sehubungan dengan utang bank yang dimiliki. Perusahaan memiliki pinjaman yang bersifat jangka panjang kepada bank yang memiliki suku bunga mengambang sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar keuangan. Untuk meminimalkan risiko ini, Perusahaan mengadakan perjanjian dengan pihak bank agar dapat membayar bunga dengan tingkat bunga tetap untuk mengantisipasi apabila terdapat perubahan tingkat bunga pasar yang signifikan.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat pertukaran tingkat bunga pinjaman. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba sebelum beban pajak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

Dampak Terhadap Laba Sebelum Beban Pajak :	2023
Kenaikan dalam Satuan Poin (+50)	34.275.736
Penurunan dalam Satuan Poin (-50)	-

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Eksposur risiko nilai tukar mata uang asing Perusahaan timbul terutama dari volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing lainnya. Perusahaan terekspos pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama karena transaksi yang didenominasi dalam mata uang USD.

Kebijakan Perusahaan adalah melakukan penyeimbangan saldo kas setara kas terhadap liabilitas keuangan dalam mata uang asing, sehingga tidak terjadi risiko nilai tukar mata uang asing.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

a. Financial Risk Management Factors and Policy (Continued)

Liquidity Risk

At the moment the Company expects to pay all liabilities at maturity. The Company conducts a rigorous evaluation and supervision of cash inflows and cash outflows to ensure the availability of funds to meet the maturing liabilities payment requirement. In general, funding requirements for short-term maturity liabilities are obtained from the settlement of receivables from customers who have a credit term of 1 month.

Interest Rate Risk

The Company is exposed to interest rate risk, especially concerning financial liabilities in relation to bank loan held. The Company has a long-term loan to a bank with a floating interest rate in line with the relevant interest rate changes in the financial market. To minimize this risk, the Company entered into an agreement with the bank in order to be able to pay interest at a fixed interest rate in anticipation of significant market interest rate changes.

The following table shows the sensitivity of the possibility of changes in the rate of exchange on the interest rate on the loan. Assuming other variables are constant, profit before tax expense is affected by floating interest rates as follows:

Impact on Profit Before Tax Expenses:	2022
Increase in Unit Poin (+50)	19.718.195
Decrease in Unit Poin (-50)	19.718.195

Foreign Exchange Risk

The foreign exchange risk exposure of the Company mainly arise from the volatility in Rupiah against the other the foreign currency. The company exposed by the effect of fluctuations of the foreign exchange especially because the transactions that dominated on USD.

The Company's policy is to balance the cash and cash equivalents against financial liabilities denominated in foreign currencies, so that there is no risk of foreign exchange rates.

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)

b. Manajemen Permodalan

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Kebijakan Perusahaan adalah untuk mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (CONTINUED)

b. Capital Management

The main objective of the Company's capital management is to ensure the maintenance of a healthy capital ratio to support the business and maximize returns for shareholders.

The company manages the capital structure and makes adjustments, based on changes in economic conditions. To maintain and adjust the capital structure, the Company can issue new shares or seek funding through loans. The Company's policy is to maintain a sound capital structure to secure access to funding at a reasonable cost.

30. KEBERLANGSUNGAN USAHA

Dalam Penyusunan laporan keuangan, Manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha. Manajemen tidak memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasinya.

30. GOING CONCERN

In preparing the financial statements, Management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, and to use the basis of business continuity accounting. Management has no intention to liquidate the Company or stop its operations.

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Perjanjian Subsidi dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

Pada tanggal 6 Mei 2024, Perusahaan dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Perihal Pemberian Subsidi untuk Pengoperasian dan Perawatan Sarana dan Prasarana Lintas Raya Terpadu Periode 1 Januari 2024 - 31 Desember 2024.

Jangka waktu pemberian subsidi berlaku dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pada akhir tahun berjalan, selisih kekurangan atau kelebihan pencairan Subsidi Sarana dan Subsidi Prasarana berdasarkan hasil perhitungan kembali maupun akibat adanya penundaan pencairan Subsidi Sarana dan Subsidi Prasarana pada tahun berjalan akan diperhitungkan di tahun berikutnya dengan ketentuan yang berlaku dan telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.

31. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

a. Subsidi Agreement with PT Jakarta Propertindo (Perseroda)

On May 6, 2024, the Company and PT Jakarta Propertindo (Perseroda) signed a Cooperation Agreement Regarding the Provision of Subsidies for the Operation and Maintenance of Integrated Crossroad Facilities and Infrastructure for the Period 1 January 2024 - 31 December 2024

The period for granting subsidies is from January 1, 2024 to December 31, 2024.

At the end of the current year, the difference in the shortage or excess of the disbursement of the Facilities Subsidy and Infrastructure Subsidy based on the results of the recalculation as well as the delay in the disbursement of the Facilities Subsidy and Infrastructure Subsidy in the current year will be calculated in the following year with the applicable provisions and has been agreed in the Cooperation Agreement.

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (LANJUTAN) 31. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD (CONTINUED)

a. Perjanjian Subsidi dengan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Lanjutan)

Hak dan kewajiban Perusahaan berdasarkan Perjanjian tersebut antara lain:

i. Perusahaan berhak untuk:

- a) Menerima pencairan subsidi sarana dan subsidi prasarana sebagaimana ketentuan perjanjian ini; dan
- b) Menerima salinan Berita Acara Pencapaian SPM dan salinan Berita Acara Verifikasi Subsidi dari PT Jakarta Propertindo apabila telah menerimanya dari Dinas Perhubungan.

ii. Perusahaan berkewajiban untuk:

- a) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Subsidi kepada PT Jakarta Propertindo; dan
- b) Menyampaikan dokumen administrasi untuk keperluan pencairan subsidi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu terhadap pasal 18 bahwa Pertanggungjawaban Badan Usaha Penyelenggara Lintas Raya Terpadu secara formal dan material atas penggunaan Subsidi Prasarana Perkeretaapian dan Subsidi Sarana Perkeretaapian yang diterima dan target kinerjanya sebagai obyek pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

a. Subsidi Agreement with PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Continued)

The rights and obligations of the Company based on the Agreement include:

i. The company has the right to:

- a) Receive the disbursement of facilities subsidies and infrastructure subsidies as stipulated in this agreement; and*
- b) Receive a copy of the Minutes of Achievement of SPM and a copy of the Minutes of Subsidy Verification from PT Jakarta Propertindo if they have received them from the Department of Transportation.*

ii. The Company is obliged to:

- a) Submit Subsidy Implementation Report to PT Jakarta Propertindo; and*
- b) Submit administrative documents for subsidy disbursement purposes.*

Based on the Regulation of the Governor of the Special Capital Region of Jakarta No. 107 of 2019 concerning Integrated Highway and Integrated Highway Subsidies to article 18 that the responsibility Organizing of the Integrated Highway Business Entity is formally and materially for the use of Railway Infrastructure Subsidies and Railway Facilities Subsidies received and their performance targets as objects of examination by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia.

32. REKLASIFIKASI

a. Terdapat reklasifikasi pada aset tahun 2022:

32. RECLASSIFICATION

a. There is a reclassification to asset in 2022:

2022			
	Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification
Aset Lancar			
Deposito	15.000.000.000	(15.000.000.000)	--
Investasi Jangka Pendek	--	15.000.000.000	15.000.000.000
Jumlah	15.000.000.000	--	15.000.000.000
			Total

Current Assets
 Time Deposit
 Short-term
 Investment

32. REKLASIFIKASI (LANJUTAN)

b. Terdapat reklasifikasi pada ekuitas tahun 2022:

	2022			<i>Equity Loss Accumulated Short-term Remeasurements of Long-Term Employee Benefits Liabilities</i>
	<i>Sebelum Reklasifikasi/ Before Reclassification</i>	<i>Reklasifikasi/ Reclassification</i>	<i>Setelah Reklasifikasi/ After Reclassification</i>	
Ekuitas				
Saldo	(34.195.094.969)	1.065.530.327	(33.129.564.642)	
Rugi				
Pengukuran				
Kembali				
Liabilitas				
Imbalan				
Kerja Jangka Panjang	--	(1.065.530.327)	(1.065.530.327)	
Jumlah	(34.195.094.969)	--	(34.195.094.969)	Total

33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Penerbitan kembali laporan keuangan tanggal 19 Juni 2024.

Sebelumnya perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan 31 Desember 2023 pada tanggal 19 Juni 2024, dan memutuskan untuk menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut pada 27 Juni 2024 dengan perubahan dan tambahan pengungkapan atas catatan laporan keuangan sebagai berikut:

32. RECLASSIFICATION (CONTINUED)

b. *There is a reclassification to equity in 2022:*

33. REISSUE OF FINANCIAL REPORTS

Reissuance of financial reports on June 19, 2024.

Previously, the company published its financial report for December 31, 2023 on June 19, 2024, and decided to reissue the financial report on June 27, 2024 with changes and additional disclosures to the financial report notes as follows:

	<i>Sebelum Penerbitan Kembali/ Before Reissue</i>	<i>Penyesuaian/ Adjustment</i>	<i>Setelah Penerbitan Kembali/ After Reissue</i>	<i>Statement of Cash Flows</i>
	<i>Cash Flows From Operating Activities</i>	<i>Cash Payments for Operating and Operating Expenses</i>	<i>Cash Payments to Manager and Employees</i>	
Laporan Arus Kas				
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
Pembayaran Kas untuk Beban Usaha dan Operasional	(340.155.846.177)	(201.208.260.342)	(138.947.585.836)	<i>Cash Payments for Operating and Operating Expenses</i>
Pembayaran Kas kepada Pengurus dan Karyawan	92.998.879.111	185.997.758.222	(92.998.879.111)	<i>Cash Payments to Manager and Employees</i>
Penerimaan Deposito	15.000.000.000	(15.000.000.000)	--	<i>Time deposit withdrawal</i>

**33. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 33. REISSUE OF FINANCIAL REPORTS (CONTINUED)
 (LANJUTAN)**

Sebelumnya perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan 31 Desember 2023 pada tanggal 19 Juni 2024, dan memutuskan untuk menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut pada 27 Juni 2024 dengan perubahan dan tambahan pengungkapan atas catatan laporan keuangan sebagai berikut: (Lanjutan)

Previously, the company published its financial report for December 31, 2023 on June 19, 2024, and decided to reissue the financial report on June 27, 2024 with changes and additional disclosures to the financial report notes as follows: (Continued)

	Sebelum Penerbitan Kembali/ Before Reissue	Penyesuaian/ Adjustment	Setelah Penerbitan Kembali/ After Reissue	Cash Flows From Operating Investing Placement Deposito Time deposit withdrawal Acquisition of Fixed Aset
Arus Kas dari Aktivitas Investasi				
Penempatan Deposito	(28.699.794.842)	(15.000.000.000)	(43.699.794.842)	Deposito
Penerimaan Deposito	-	15.000.000.000	15.000.000.000	Time deposit withdrawal
Perolehan Aset Tetap	(4.964.005.278)	(210.502.120)	(5.174.507.398)	Acquisition of Fixed Aset

**34. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN 34. MANAGEMENT RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL
 KEUANGAN**

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 27 Juni 2024.

The management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the financial statements which were authorized for issuance on June 27, 2024.



Drive Collaboration & Strengthening the Foundation for the Future



PT LRT Jakarta

GEDUNG MCC - DEPO LRT JAKARTA
Jl. Raya Kelapa Nias, RW025,
Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 14250
Tel. +6221 8061 7490

